



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 351 -

- i. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Belanja Lainnya
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp12.441.749.435 dan Rp0. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan koreksi atas utang pada Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar minus Rp2.174.168.000 merupakan koreksi pencatatan utang terhadap tagihan biaya Ongkos Angkut Beras Tahun Anggaran 2012 sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015, sesuai rekomendasi BPK atas Nota Kesepakatan Final Nomor: NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019.
 - 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar minus Rp10.267.581.435 merupakan koreksi pencatatan utang atas tagihan pembayaran PD Irian Bhakti yang mendahului kontrak Tahun 2017 setelah mendapat reuiu dari BPKP senilai Rp10.267.581.435.
- j. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp2.426.198.123.797 dan Rp680.779.393.840. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya merupakan mutasi Ekuitas Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

UBL	31 Desember 2018 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>
1) Otorita Asahan	(5.723.385.343)	(295.805.669)
2) Yayasan TMII	838.358.276	1.999.190.591
3) Yayasan Gedung Veteran	(1.209.977.642)	(2.476.808.735)
4) Baznas	(36.779.821.723)	46.468.140.771
5) Badan Wakaf Indonesia	(10.671.526)	(99.923.519)
6) BP Dana Abadi Umat	(3.327.847.280.828)	333.529.292.730
7) SKK Migas	353.220.510.951	(19.893.300.598)
8) OJK	1.292.651.713.003	321.548.608.269
9) Badan Pengelola Keuangan Haji	4.151.058.678.629	-
Jumlah	2.426.198.123.797	680.779.393.840

- k. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (TK)
Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp14.971.171.246.998 dan minus Rp9.143.224.596.255. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK sebesar Rp14.971.171.661.388 dikurangi penyesuaian saldo ekuitas awal LKBUN Tahun 2018 sebesar Rp414.390, yang merupakan eliminasi LK BUN Tahun 2017 *Audited* atas transaksi utang dan beban bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan pada BA 999.99 Transaksi Khusus Panas Bumi. Koreksi Lainnya pada BUN Pengelolaan TK dijelaskan sebagai berikut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 352 -

UAPBUN TK	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	(760.210.994.707)	(34.175.033.855)
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	10.512.511.652.063	(8.761.423.371.207)
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	5.218.871.004.032	(347.626.191.192)
4) Penyesuaian	-	-
Jumlah	14.971.171.661.388	(9.143.224.596.254)*

**selisih Rp1 karena pembulatan*

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar minus Rp1.121.136.417.497 dan minus Rp1.005.041.960.222. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN pada TA 2018 berasal dari penyesuaian Saldo Awal Ekuitas LKBUN Tahun 2018 dan penyesuaian mutasi Dana Cadangan Penjaminan yang sudah disajikan pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

3. Penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya Konsolidasi LKPP pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar sebesar minus Rp10.313.926.922.260 dan minus Rp11.709.716.328.641. Rincian penyesuaian Koreksi Lainnya pada Konsolidasi LKPP TA 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai	Keterangan
Mutasi Kas Lainnya di KL dari Hibah pada BUN	4.107.605.394.583	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas dan Bank BLU pada LKBUN	(14.026.122.161.970)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP KL	(74.322.109.329)	Eliminasi karena pencatatan ganda
Mutasi Kas BP LKBUN	74.322.109.329	Pencatatan mutasi Kas BP KL pada BUN
Investasi ekuitas bersih PTNBH pada BUN 999 03	(380.490.944.611)	Eliminasi karena masih tercatat sebagai BMN di Kemristek Dikti
Reklasifikasi antara Pengesahan Hibah langsung dengan akun koreksi lainnya	(14.919.210.262)	Reklasifikasi akun
Jumlah	(10.313.926.922.260)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar
Entitas Rp513,17
miliar*

Transaksi Antar Entitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp513.172.752.484 dan Rp184.315.553.360. Transaksi Antar Entitas TA 2018 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 <i>(Audited)</i>	31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>
Ditagihkan Ke Entitas Lain	9.024.058.360.711.860	7.667.629.414.023.180
Diterima Dari Entitas Lain	(9.053.140.743.836.210)	(7.689.683.255.327.710)
Pengesahan Hibah Langsung	27.997.866.283.268	19.920.061.337.943
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(2.192.390.439.978)	(325.761.880.913)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	3.246.918.430.584	-
Setoran Surplus BLU	-	2.496.676.098.011
Transfer Keluar	(297.074.388.438.771)	(204.411.874.523.524)
Transfer Masuk	297.617.550.041.741	204.559.055.826.370
Jumlah*	513.172.752.494	184.315.553.357

**selisih TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp10 dan Rp 3 karena pembulatan*

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan. Atas pembentukan dana tersebut, BUN mencatat akun DKEL, sedangkan Kementerian Pertahanan mengakui aset berupa Dana lainnya. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* juga dicatat pada BUN. Pada konsolidasi LKPP, Dana lainnya yang dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dieliminasi dengan akun DDEL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain. Sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung dan pengembalian Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp9.024.058.360.711.860, DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210, pengesahan hibah langsung sebesar Rp27.997.866.283.268, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar Rp2.192.390.439.978, dan Pengesahan Hibah Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp3.246.918.430.584.

Nilai DDEL sebesar minus Rp9.053.140.743.836.210 sudah termasuk jurnal penyesuaian eliminasi Dana lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.404.845.903.013. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar minus Rp29.988.850.484 sudah dapat dijelaskan seluruhnya.

Rincian penyebab saldo Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan DDEL antara catatan KL dengan SiAP (UAPBUN AP)	(2.285.186.350)	132.492.464
b) Mutasi Akun Transitoris (815 dan 825)	(27.582.431.851)	77.540.752.671
c) Perbedaan pencatatan belanja antara catatan KL dengan SiAP	222	(294)
d) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(121.233.000)	(40.564.410.058)
e) Transaksi antar Entitas lainnya	495	25.415.727
Jumlah	(29.988.850.484)	37.134.250.510

Penjelasan atas saldo Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp29.988.850.484 di antaranya sebagai berikut.

- a) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar minus Rp2.285.186.350. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara pencatatan DDEL sebagai kontra akun pendapatan yang dilaporkan pada KL dan BA BUN lebih besar dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL).
- b) Perbedaan *posting rule* atas pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP antara SiAP dengan SAI. Pengeluaran dan penerimaan transitio UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Perbedaan *posting rule* ini menyebabkan saldo transaksi antar entitas sebesar minus Rp27.582.431.851.
- c) Perbedaan pencatatan belanja pada K/L dengan SiAP sebesar Rp222.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

- d) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dengan Pengesahan HL di K/L sebesar minus Rp121.233.000. Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Hibah Langsung TAYL dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL yang terbentuk dari pendapatan hibah langsung pada BA 999.02.
- e) Transaksi antar entitas lain-lain karena pembulatan adalah sebesar Rp495.
2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar minus Rp297.074.388.438.771 dan Transfer Masuk sebesar Rp297.617.550.041.741. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp543.161.602.970. Selisih Transfer masuk antara lain disebabkan adanya jurnal *take out* revaluasi atas penilaian kembali BMN baik tahun 2017 maupun tahun 2018 pada satker konsolidasi KL, pencatatan aset TK dari BUN yang secara sistem belum bisa dicatat pada menu Transfer Masuk karena tidak ada ADK sehingga dicatat pada menu saldo awal, transfer keluar Aset Tetap Renovasi dimana pada satker penerima secara aplikasi SIMAK BMN tercatat sebagai aset definitif, dan transfer keluar Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah dimana pada satker penerima secara aplikasi tercatat sebagai aset tetap. Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BUN sebagai berikut.

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
KL	(255.921.624.935.324)	297.420.632.160.350	41.499.007.225.026
BA BUN	(41.152.763.503.447)	196.917.881.391	(40.955.845.622.056)
Penyesuaian	-	-	-
Total LKPP	(297.074.388.438.771)	297.617.550.041.741	543.161.602.970

Rincian Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BA BUN terdapat pada Lampiran 30.

G.5. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.679.256.307.076. Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas merupakan reklasifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Sesuai dengan kebijakan penyusunan LKPP, pada tahun 2018 reklasifikasi kewajiban ke Ekuitas disajikan di pos Koreksi lainnya.

G.6. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Penurunan Ekuitas pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp132.975.432.283.199 dan Rp26.148.095.077.709. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

*Reklasifikasi
Kewajiban Ke
Ekuitas Rp0*

*Penurunan Ekuitas
Rp132,97 triliun*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

G.7. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp1.407,80 triliun

Ekuitas Akhir pada TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp1.407.808.224.645.741 dan Rp1.540.783.656.928.940. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dikurangi penurunan Ekuitas sebesar Rp132.975.432.283.199.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara	95
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	96
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	96
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	97
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	98
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	98
Catatan	B.2.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	99
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	100
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	101
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	102
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	103
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	103
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	107
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	107
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	109
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	109
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	110
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	112
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	112
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	113
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	114
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	114
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	115
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	115
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	115
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	116
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	116
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	116
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	117
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	117
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	118
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	118
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	118
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran	119
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	119
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri	120
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL	120
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	120
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	121
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	122
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	123
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	123
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	124



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 358 -

Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	124
Catatan	B.2.4.1.9	Pembiayaan Lain-Lain	125
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	125
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	125
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Tunai	125
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	126
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	126
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	126
Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	127
Catatan	B.3	CATATAN PENTING LAINNYA	128

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	134
Catatan	C.2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	134
Catatan	C.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	135
Catatan	C.4	Penyesuaian Pembukuan	135
Catatan	C.5	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)	136
Catatan	C.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	141

NERACA

Catatan	D.2.1	ASET	143
Catatan	D.2.1.1	Aset Lancar	143
Catatan	D.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	143
Catatan	D.2.1.1.1.1	Rekening Kas BUN di BI	143
Catatan	D.2.1.1.1.2	Rekening Pemerintah Lainnya	143
Catatan	D.2.1.1.1.3	Rekening Kas di KPPN	144
Catatan	D.2.1.1.1.4	Kas Dalam Transito	144
Catatan	D.2.1.1.1.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	145
Catatan	D.2.1.1.1.6	Kas di Bendahara Penerimaan	145
Catatan	D.2.1.1.1.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	145
Catatan	D.2.1.1.1.8	Kas Pada BLU	147
Catatan	D.2.1.1.2	Uang Muka dari Rekening BUN	148
Catatan	D.2.1.1.3	Investasi Jangka Pendek	148
Catatan	D.2.1.1.4	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	148
Catatan	D.2.1.1.5	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	149
Catatan	D.2.1.1.6	Piutang	149
Catatan	D.2.1.1.6.1	Piutang Perpajakan	149
Catatan	D.2.1.1.6.2	Piutang Bukan Pajak	152
Catatan	D.2.1.1.6.3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	161
Catatan	D.2.1.1.6.4	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	161
Catatan	D.2.1.1.6.5	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	161
Catatan	D.2.1.1.6.6	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	161
Catatan	D.2.1.1.6.7	Piutang dari Kegiatan BLU	162
Catatan	D.2.1.1.6.8	Piutang PFK	163
Catatan	D.2.1.1.6.9	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	163
Catatan	D.2.1.1.6.10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	163
Catatan	D.2.1.1.7	Persediaan	165
Catatan	D.2.1.2	Investasi Jangka Panjang	166



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 359 -

Catatan	D.2.1.2.1	Investasi Non Permanen	166
Catatan	D.2.1.2.1.1	Dana Bergulir	166
Catatan	D.2.1.2.1.2	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	168
Catatan	D.2.1.2.1.3	Investasi Non Permanen Lainnya	168
Catatan	D.2.1.2.1.4	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	169
Catatan	D.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	169
Catatan	D.2.1.2.2.1	Investasi Permanen PMN	169
Catatan	D.2.1.2.2.2	Investasi Permanen BLU	171
Catatan	D.2.1.2.2.3	Investasi Permanen Lainnya	171
Catatan	D.2.1.3	Aset Tetap	173
Catatan	D.2.1.3.1	Aset Tetap Tanah	173
Catatan	D.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	174
Catatan	D.2.1.3.3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	174
Catatan	D.2.1.3.4	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174
Catatan	D.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	174
Catatan	D.2.1.3.6	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	175
Catatan	D.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	175
Catatan	D.2.1.4	Piutang Jangka Panjang	175
Catatan	D.2.1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	176
Catatan	D.2.1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	176
Catatan	D.2.1.4.3	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	176
Catatan	D.2.1.4.4	Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	176
Catatan	D.2.1.4.5	Piutang Jangka Panjang Lainnya	176
Catatan	D.2.1.4.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	178
Catatan	D.2.1.5	Aset Lainnya	179
Catatan	D.2.1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	179
Catatan	D.2.1.5.2	Aset Tidak Berwujud	181
Catatan	D.2.1.5.3	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	182
Catatan	D.2.1.5.4	Dana Penjaminan	186
Catatan	D.2.1.5.5	Dana Kelolaan BLU	187
Catatan	D.2.1.5.6	Aset Lain-lain	189
Catatan	D.2.1.5.7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	200
Catatan	D.2.1.5.8	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	203
Catatan	D.2.1.5.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	204
Catatan	D.2.2	KEWAJIBAN	205
Catatan	D.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	205
Catatan	D.2.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	205
Catatan	D.2.2.1.2	Utang Kepada Pihak Ketiga	206
Catatan	D.2.2.1.3	Utang Biaya Pinjaman	215
Catatan	D.2.2.1.4	Utang Subsidi	215
Catatan	D.2.2.1.5	Utang Transfer	218
Catatan	D.2.2.1.6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	219
Catatan	D.2.2.1.7	Utang SBN Jangka Pendek	219
Catatan	D.2.2.1.8	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	220
Catatan	D.2.2.1.9	Pendapatan Diterima di Muka	220
Catatan	D.2.2.1.10	Pendapatan yang Ditangguhkan	221
Catatan	D.2.2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	221
Catatan	D.2.2.2	Utang Jangka Panjang	222
Catatan	D.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	222



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 360 -

Catatan	D.2.2.2.1.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	222
Catatan	D.2.2.2.1.2	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	222
Catatan	D.2.2.2.1.3	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditanggguhkan	222
Catatan	D.2.2.2.1.4	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	223
Catatan	D.2.2.2.1.5	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	224
Catatan	D.2.2.2.1.6	Utang Jangka Panjang Subsidi	226
Catatan	D.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	228
Catatan	D.2.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	228
Catatan	D.2.2.2.2.2	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	229
Catatan	D.2.3	EKUITAS	232
Catatan	D.3	CATATAN PENTING LAINNYA	233

LAPORAN OPERASIONAL

Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	281
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	282
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	282
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pajak Penghasilan	283
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	284
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	284
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pendapatan Cukai	285
Catatan	E.2.1.1.1.5	Pajak Lainnya	285
Catatan	E.2.1.1.1.6	Bea Masuk	286
Catatan	E.2.1.1.1.7	Bea Keluar	286
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pajak Lain-lain	286
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	287
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	287
Catatan	E.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	288
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	289
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	291
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	292
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	292
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	294
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	294
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	295
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	296
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	296
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	297
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	298
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	299
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	300
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	301
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	302
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	306
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	307
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	308
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	309
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	309
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	309



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 361 -

Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	310
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	311
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	311
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	311
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	311
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	311
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	312
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	313
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	314
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	314

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	315
Catatan	F.1.2	Kenaikan Penurunan Kas	315
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	317
Catatan	F.2.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	319
Catatan	F.2.1.1	Arus Kas Masuk	319
Catatan	F.2.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	319
Catatan	F.2.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	320
Catatan	F.2.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	320
Catatan	F.2.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	321
Catatan	F.2.1.1.1.4	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	321
Catatan	F.2.1.1.1.5	Pendapatan Cukai	321
Catatan	F.2.1.1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	321
Catatan	F.2.1.1.1.7	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	322
Catatan	F.2.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	322
Catatan	F.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	323
Catatan	F.2.1.1.2.2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	323
Catatan	F.2.1.1.2.3	Pendapatan PNBP Lainnya	323
Catatan	F.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	324
Catatan	F.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	324
Catatan	F.2.1.2	Arus Kas Keluar	325
Catatan	F.2.1.2.1	Belanja Pegawai	325
Catatan	F.2.1.2.2	Belanja Barang	326
Catatan	F.2.1.2.3	Belanja Pembayaran Bunga Utang	326
Catatan	F.2.1.2.4	Belanja Subsidi	327
Catatan	F.2.1.2.5	Belanja Hibah	328
Catatan	F.2.1.2.6	Bantuan Sosial	328
Catatan	F.2.1.2.7	Belanja Lain-Lain	328
Catatan	F.2.1.2.8	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	329
Catatan	F.2.1.2.9	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	329
Catatan	F.2.1.2.10	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	330
Catatan	F.2.1.2.11	Dana Alokasi Umum	330
Catatan	F.2.1.2.12	Transfer Dana Alokasi Khusus	330
Catatan	F.2.1.2.13	Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	330
Catatan	F.2.1.2.14	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	331



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

Catatan	F.2.1.2.15	Dana Desa	331
Catatan	F.2.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	294
Catatan	F.2.2.1	Arus Kas Masuk	331
Catatan	F.2.2.1.1	Pengelolaan dan Penjualan BMN	332
Catatan	F.2.2.1.2	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	332
Catatan	F.2.2.1.3	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	332
Catatan	F.2.2.1.4	Penerimaan Investasi Pemerintah	332
Catatan	F.2.2.2	Arus Kas Keluar	333
Catatan	F.2.2.2.1	Belanja Modal	333
Catatan	F.2.2.2.2	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	333
Catatan	F.2.2.2.3	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	333
Catatan	F.2.2.2.4	Penyertaan Modal Negara	333
Catatan	F.2.2.2.5	Pengeluaran Investasi Pemerintah	334
Catatan	F.2.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	334
Catatan	F.2.3.1	Arus Kas Masuk	334
Catatan	F.2.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	334
Catatan	F.2.3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	336
Catatan	F.2.3.1.3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	336
Catatan	F.2.3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	336
Catatan	F.2.3.2	Arus Kas Keluar	337
Catatan	F.2.3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	337
Catatan	F.2.3.2.2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	337
Catatan	F.2.3.2.3	Pengembalian Pinjaman	337
Catatan	F.2.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	337
Catatan	F.2.4.1	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	338
Catatan	F.2.4.2	Transito (Neto)	339
Catatan	F.2.4.3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	340
Catatan	F.2.4.4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	341
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Catatan	G.1	Ekuitas Awal	342
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	342
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	342
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	342
Catatan	G.3.2	Penggunaan SAL	342
Catatan	G.3.3	Penyesuaian SiLPA	342
Catatan	G.3.4	Koreksi Nilai Persediaan	343
Catatan	G.3.5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	343
Catatan	G.3.6	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	343
Catatan	G.3.7	Revaluasi Aset BUMN	347
Catatan	G.3.8	Koreksi Lain-lain	347
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	353
Catatan	G.5	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	355
Catatan	G.6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	355
Catatan	G.7	Ekuitas Akhir	356



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 364 -

DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	<i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	:	<i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN	:	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	<i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	:	<i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	<i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	<i>Japanese Yen</i>
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	<i>Non-Performing Loan</i>
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	<i>Project Based Sukuk</i>
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	<i>Past Service Liability</i>
PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	<i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	<i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	:	<i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 368 -

DAFTAR ISI

1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2018	370
2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2018	392
3	Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2018	419
4	Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>Multi Years Contract</i>) Per 31 Desember 2018.....	499
5	Saldo Kas Di Rekening KPPN Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	501
6	Kas Pada K/L dan BUN Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	509
7	Belanja Dibayar Di Muka, Uang Muka Belanja dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	514
8	Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak Per 31 Desember 2018	520
9	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	527
10	Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi Per 31 Desember 2018.....	534
11	Rincian Aset Kredit Eks BPPN dan Eks PT PPA Per 31 Desember 2018	537
12	Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	549
13	Persediaan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	552
14	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (BUMN) Tahun 2018.....	556
15	Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan Tahun 2018	567
16	Laporan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Keuangan Internasional Per 31 Desember 2018	570
17	Ikhtisar Laporan Keuangan Non BUMN (Minoritas) Tahun 2018.....	572
18	Laporan Penghasilan Komprehensif LPS Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	577
19	Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	579
20	TP/TGR Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	606



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 369 -

DAFTAR ISI

21	Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	612
22	Rincian Aset Eks BPPN Per 31 Desember 2018	618
23	Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2018	638
24	Daftar BMN Eks BMN <i>Idle</i> yang Diserahkan Kepada Pengguna Barang atau Pemda Tahun 2018	645
25	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	649
26	Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan Per 31 Desember 2018	656
27	Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Per 31 Desember 2018	664
28	Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan Per 31 Desember 2018	674
29	Laporan Penilaian Kembali BMN untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018	677
30	Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per 31 Desember 2018	699
31	Laporan Pertanggungjawaban SBN Tahun 2018	702



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

**LRA PENDAPATAN
PEMERINTAH PUSAT
TA 2018**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
4	PENDAPATAN NEGARA	1.894.720.327.977.000	1.943.674.876.878.800	102,58%	1.666.375.912.658.080	277.298.964.220.711	16,64%
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030	93,86%	1.343.529.843.798.510	175.259.933.352.520	13,04%
411	PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI	1.579.395.493.162.000	1.472.907.964.370.350	93,26%	1.304.316.269.228.040	168.591.695.142.313	12,93%
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	855.133.462.162.000	749.977.029.683.808	87,70%	646.793.472.957.381	103.183.556.726.427	15,95%
41111	Pendapatan PPh Migas	38.134.050.000.000	64.699.145.451.922	169,66%	50.315.750.744.783	14.383.394.707.139	28,59%
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	15.402.410.000.000	26.549.508.906.106	172,37%	16.599.430.743.163	9.950.078.162.943	59,94%
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	22.731.640.000.000	38.115.852.120.909	167,68%	33.711.719.453.816	4.404.132.667.093	13,06%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	33.784.424.907	-	4.600.547.804	29.183.877.103	634,36%
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	816.999.412.162.000	675.165.778.735.455	82,64%	587.543.573.276.305	87.622.205.459.150	14,81%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	164.932.930.000.000	134.914.657.190.069	81,80%	117.764.553.589.746	17.150.103.590.323	14,56%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	12.281.980.257.000	18.008.015.831.134	146,62%	16.172.671.971.729	1.835.343.859.405	11,35%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	58.323.576.427.000	54.723.505.867.454	93,83%	43.156.722.093.470	11.566.783.773.984	26,80%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	40.392.710.597.000	39.739.217.510.968	98,38%	34.005.879.655.650	5.733.337.855.318	16,86%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22.209.410.000.000	9.406.726.317.202	42,35%	7.806.580.852.307	1.600.145.464.895	20,50%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	269.356.583.712.000	252.131.439.879.614	93,61%	206.550.829.248.758	45.580.610.630.856	22,07%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	61.181.086.370.000	50.638.032.804.063	82,77%	43.691.062.125.980	6.946.970.678.083	15,90%
411128	Pendapatan PPh Final	173.363.863.788.000	115.462.258.335.252	66,60%	106.310.936.330.643	9.151.322.004.609	8,61%
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	14.957.271.011.000	141.924.999.699	0,95%	12.084.337.398.022	-11.942.412.398.323	-98,83%
41113	Pendapatan PPh Fiskal	0	349.905.982	-	349.728.807	177.175	0,05%
411131	Pendapatan PPh Fiskal	0	349.905.982	-	349.728.807	177.175	0,05%
41114	Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	0	10.111.755.590.449	-	8.933.799.207.486	1.177.956.382.963	13,19%
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	12.987.522	-	132.161.316	-119.173.794	-90,17%
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	0	167.200	-	219.978	-52.778	-23,99%
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	0	-2.462.000	-	0	-2.462.000	-
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	0	503.900.818	-	614.833.045	-110.932.227	-18,04%
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	0	1.892.891.197.764	-	1.702.566.568.147	190.324.639.617	11,18%
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	0	8.218.348.183.000	-	7.230.485.435.000	987.862.748.000	13,86%
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	1.616.145	-	0	1.616.145	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	541.801.130.000.000	537.267.909.259.264	99,16%	480.724.607.483.756	56.543.301.775.508	11,76%
41121	Pendapatan PPN	524.843.980.000.000	520.390.211.070.339	99,15%	463.528.437.616.523	56.861.773.453.816	12,27%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	361.296.910.000.000	333.921.320.457.564	92,42%	314.342.826.531.220	19.578.483.926.344	6,23%
411212	Pendapatan PPN Impor	163.395.980.000.000	186.400.182.247.898	114,08%	149.034.796.849.454	37.365.385.398.444	25,07%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	151.090.000.000.000	68.708.364.877	45,48%	150.814.235.849	-82.105.870.972	-54,44%
41122	Pendapatan PPnBM	16.957.150.000.000	16.877.698.188.925	99,53%	17.196.169.867.233	-318.471.678.308	-1,85%
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.212.000.000.000	12.794.658.786.886	104,77%	13.292.538.563.625	-497.879.776.739	-3,75%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	4.700.100.000.000	4.108.005.284.889	87,40%	3.796.354.314.090	311.850.970.799	8,21%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	45.050.000.000	-24.965.882.850	-55,42%	107.276.989.518	-132.242.872.368	-123,27%
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.369.101.000.000	19.444.913.884.758	111,95%	16.770.346.937.156	2.674.566.947.602	15,95%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.369.101.000.000	19.444.913.884.758	111,95%	16.770.346.937.156	2.674.566.947.602	15,95%
411311	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	396.446.920	-	0	396.446.920	-
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.615.454.905.000	2.188.577.469.904	135,48%	2.175.377.454.058	13.200.015.846	0,61%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	335.880.731.000	756.237.733.965	225,15%	595.957.370.926	160.280.363.039	26,89%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.917.414.364.000	1.718.416.162.627	89,62%	1.480.177.403.749	238.238.758.878	16,10%
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	13.500.351.000.000	14.381.978.062.129	106,53%	12.230.011.698.753	2.151.966.363.376	17,60%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	313.275.381.204	-	253.462.867.931	59.812.513.273	23,60%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	86.032.628.009	-	35.360.141.739	50.672.486.270	143,30%
4114	Pendapatan BPHTB	0	32.748.454	-	1.216.911.547	-1.184.163.093	-97,31%
41141	Pendapatan BPHTB	0	32.748.454	-	1.216.911.547	-1.184.163.093	-97,31%
411411	Pendapatan BPHTB	0	32.748.454	-	1.216.911.547	-1.184.163.093	-97,31%
4115	Pendapatan Cukai	155.400.000.000.000	159.588.552.586.225	102,70%	153.288.149.392.121	6.300.403.194.104	4,11%
41151	Pendapatan Cukai	155.400.000.000.000	159.588.552.586.225	102,70%	153.288.149.392.121	6.300.403.194.104	4,11%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	148.230.000.000.000	152.941.410.762.377	103,18%	147.719.216.343.096	5.222.194.419.281	3,54%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	170.000.000.000	139.235.597.580	81,90%	147.122.735.280	-7.887.137.700	-5,36%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.500.000.000.000	6.418.775.169.760	98,75%	5.567.468.557.500	851.306.612.260	15,29%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	76.696.556.557	-	-158.239.602.120	234.938.158.677	-
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	500.000.000.000	12.434.499.951	2,49%	12.581.358.365	-148.858.414	-1,17%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 373 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	9.691.800.000.000	6.629.526.207.843	68,40%	6.738.475.546.078	-108.949.338.235	-1,62%
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	9.691.800.000.000	6.139.864.878.421	63,35%	6.098.195.197.160	41.669.479.261	0,68%
411611	Pendapatan Bea Meterai	0	1.470.393.848.442	-	1.367.164.381.348	103.229.467.094	7,55%
411612	Pendapatan dan Penjualan Benda Meterai	9.691.800.000.000	3.985.445.194.453	41,12%	3.715.003.305.722	270.441.888.731	7,28%
411613	Pendapatan PPh Batubara	0	656.409.788.263	-	982.575.599.538	-326.165.811.275	-33,19%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	27.615.845.263	-	33.451.910.552	-5.836.065.289	-17,45%
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	0	489.861.531.422	-	640.280.348.918	-150.618.817.496	-23,52%
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	-14.087.087.862	-	406.970.758.069	-421.057.845.931	-103,46%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	499.442.551.458	-	232.614.159.194	266.828.392.264	114,71%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM	0	1.166.073.449	-	493.203.415	672.870.034	136,43%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTL	0	3.139.994.377	-	202.228.240	2.937.766.137	1452,70%
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	38.700.000.000.000	45.881.812.780.678	118,56%	39.213.574.570.471	6.668.238.210.207	17,00%
4121	Pendapatan Bea Masuk	35.700.000.000.000	39.116.746.986.751	109,57%	35.066.181.439.852	4.050.565.546.899	11,55%
41211	Pendapatan Bea Masuk	35.700.000.000.000	38.689.558.007.910	108,37%	34.821.385.171.852	3.868.172.836.058	11,11%
412111	Pendapatan Bea Masuk	35.700.000.000.000	37.407.985.838.439	104,78%	33.495.272.858.547	3.912.712.979.892	11,68%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	0	743.750	-	0	743.750	-
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	274.134.580.810	-	582.649.947.955	-308.515.367.145	-52,95%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	625.126.712.146	-	457.334.656.735	167.792.055.411	36,69%
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	0	19.682.000	-	0	19.682.000	-
412116	Pendapatan BM-DTP	0	370.614.635.480	-	280.946.213.728	89.668.421.752	31,92%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	0	11.675.815.285	-	5.181.494.887	6.494.320.398	125,34%
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan	0	427.188.978.841	-	244.796.268.000	182.392.710.841	74,51%
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	247.390.857.841	-	182.509.916.000	64.880.941.841	35,55%
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan	0	44.227.000	-	2.105.000	42.122.000	2001,05%
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	179.753.894.000	-	62.284.247.000	117.469.647.000	188,60%
4122	Pendapatan Bea Keluar	3.000.000.000.000	6.765.065.793.927	225,50%	4.147.393.130.619	2.617.672.663.308	63,12%
41221	Pendapatan Bea Keluar	3.000.000.000.000	6.765.065.793.927	225,50%	4.147.393.130.619	2.617.672.663.308	63,12%
412211	Pendapatan Bea Keluar	3.000.000.000.000	6.763.961.349.944	225,47%	4.137.811.636.557	2.626.149.713.387	63,47%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	0	1.079.891.983	-	9.287.233.578	-8.207.341.595	-88,37%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	24.552.000	-	294.260.484	-269.708.484	-91,66%
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275.427.969.415.000	409.320.239.488.446	148,61%	311.216.253.857.085	98.103.985.631.361	31,52%
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	103.674.868.751.000	180.592.649.823.641	174,19%	111.132.042.413.912	69.460.607.409.729	62,50%
4211	PENDAPATAN MINYAK BUMI	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%	58.203.042.976.236	43.283.652.339.664	74,37%
42111	Pendapatan Minyak Bumi	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%	58.203.042.976.236	43.283.652.339.664	74,37%
421111	Pendapatan Minyak Bumi	59.582.710.000.000	101.486.695.315.900	170,33%	58.203.042.976.236	43.283.652.339.664	74,37%
4212	PENDAPATAN GAS BUMI	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%	23.639.900.993.613	17.662.650.785.846	74,72%
42121	Pendapatan Gas Bumi	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%	23.639.900.993.613	17.662.650.785.846	74,72%
421211	Pendapatan Gas Bumi	20.766.330.000.000	41.302.551.779.459	198,89%	23.639.900.993.613	17.662.650.785.846	74,72%
4213	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	17.858.522.076.000	30.313.666.621.680	169,74%	23.763.165.037.383	6.550.501.584.297	27,57%
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	769.823.433.000	545.625.001.566	70,88%	515.832.971.394	29.792.030.172	5,78%
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi	393.795.083.000	103.356.976.462	26,25%	515.832.971.394	-412.475.894.832	-79,98%
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	376.028.350.000	442.247.155.183	117,61%	0	442.247.155.183	-
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat	0	20.869.921	-	0	20.869.921	-
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	17.088.698.643.000	29.768.041.620.114	174,20%	23.247.332.065.989	6.520.709.554.125	28,05%
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	13.765.769.080.000	21.854.960.527.170	158,76%	23.247.332.065.989	-1.392.371.538.819	-5,99%
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	1.453.562.299.000	2.474.665.328.788	170,25%	0	2.474.665.328.788	-
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	1.038.932.533.000	3.014.269.148.774	290,13%	0	3.014.269.148.774	-
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	36.651.347.000	89.309.735.873	243,67%	0	89.309.735.873	-
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	470.575.384.000	1.431.581.482.578	304,22%	0	1.431.581.482.578	-
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	305.520.000.000	687.472.008.752	225,02%	0	687.472.008.752	-
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	17.688.000.000	215.783.388.179	1219,94%	0	215.783.388.179	-
4214	PENDAPATAN KEHUTANAN	4.166.711.459.000	4.760.407.698.602	114,25%	4.101.918.540.911	658.489.157.691	16,05%
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.858.699.022.000	1.982.019.914.364	106,63%	1.728.935.988.957	253.083.925.407	14,64%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.858.699.022.000	1.982.019.914.364	106,63%	1.728.935.988.957	253.083.925.407	14,64%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	921.026.787.000	1.141.414.248.868	123,93%	918.354.417.067	223.059.831.801	24,29%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	921.026.787.000	1.141.414.248.868	123,93%	918.354.417.067	223.059.831.801	24,29%
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPHH)	205.912.809.000	101.732.195.506	49,41%	40.477.518.350	61.254.677.156	151,33%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 375 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)	205.912.809.000	101.732.195.506	49,41%	40.477.518.350	61.254.677.156	151,33%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.181.072.841.000	1.535.241.339.864	129,99%	1.414.055.724.537	121.185.615.327	8,57%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.181.072.841.000	1.535.241.339.864	129,99%	1.413.168.383.981	122.072.955.883	8,64%
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				808.534.746	-808.534.746	-100,00%
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih				78.805.810	-78.805.810	-100,00%
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan				94.892.000	-94.892.000	-100,00%
421451	Pendapatan dan Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan				94.892.000	-94.892.000	-100,00%
4215	PENDAPATAN PERIKANAN	600.000.810.000	448.751.885.603	74,79%	491.033.529.369	-42.281.643.766	-8,61%
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	23.125.810.000	6.274.976.907	27,13%	491.033.529.369	-484.758.552.462	-98,72%
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	22.902.110.000	6.023.274.817	26,30%	491.033.529.369	-485.010.254.552	-98,77%
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	223.700.000	251.702.090	112,52%	0	251.702.090	
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	576.875.000.000	442.476.908.696	76,70%	0	442.476.908.696	
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	576.875.000.000	442.476.908.696	76,70%	0	442.476.908.696	
4216	PENDAPATAN PANAS BUMI	700.594.406.000	2.280.576.522.397	325,52%	932.981.336.400	1.347.595.185.997	144,44%
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	681.365.153.000	2.252.646.884.360	330,61%	909.162.988.429	1.343.483.895.931	147,77%
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	681.365.153.000	2.252.646.884.360	330,61%	909.162.988.429	1.343.483.895.931	147,77%
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	18.350.429.000	26.437.236.602	144,07%	22.320.119.055	4.117.117.547	18,45%
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	17.309.514.000	25.409.429.618	146,79%	22.320.119.055	3.089.310.563	13,84%
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	1.040.915.000	1.027.806.984	98,74%	0	1.027.806.984	
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	878.824.000	1.492.401.435	169,82%	1.498.228.916	-5.827.481	-0,39%
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	878.824.000	1.492.401.435	169,82%	1.498.228.916	-5.827.481	-0,39%
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)	44.895.387.920.000	45.060.521.375.969	100,82%	43.904.217.111.673	1.156.304.264.296	2,63%
4221	PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN	44.895.387.920.000	45.060.521.375.969	100,82%	43.904.217.111.673	1.156.304.264.296	2,63%
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	43.788.577.920.000	44.602.870.375.969	101,88%	43.904.217.111.673	698.653.264.296	1,59%
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	13.923.320.000.000	16.267.751.186.649	116,84%	12.460.928.189.608	3.806.822.997.041	30,55%
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	29.865.257.920.000	28.335.119.189.320	94,88%	31.443.288.922.065	-3.108.169.732.745	-9,89%
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	906.810.000.000	457.651.000.000	50,47%	0	457.651.000.000	
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	906.810.000.000	457.651.000.000	50,47%	0	457.651.000.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	43.304.597.653.000	55.093.058.250.618	127,22%	47.345.432.555.948	7.747.625.694.670	16,36%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	41.255.596.544.000	48.813.837.134.982	118,32%	44.250.619.466.173	4.563.217.668.809	10,31%
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	25.241.568.040.000	28.739.609.164.736	113,86%	25.499.135.736.497	3.240.473.428.239	12,71%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	13.216.007.167.000	13.468.152.546.364	101,91%	12.514.890.768.413	953.261.777.951	7,62%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	8.666.436.803.000	11.053.330.293.568	127,54%	9.342.558.845.242	1.710.771.448.326	18,31%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	290.997.229.000	440.382.485.600	151,34%	374.488.613.094	65.893.872.506	17,60%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	237.343.000	70.022.700	29,50%	997.359.907	-927.337.207	-92,98%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	253.621.368.000	301.504.866.353	118,88%	205.551.198.212	95.953.668.141	46,68%
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.329.409.056.000	2.569.200.853.792	110,29%	2.469.169.897.608	100.030.956.184	4,05%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	39.860.340.000	256.894.230	0,64%	521.558.428	-284.664.188	-50,74%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	444.998.734.000	13.961.044.004	3,14%	578.022.735	13.383.021.269	2315,31%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	892.750.158.125	-	590.379.472.858	302.370.685.267	51,22%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.946.622.051.000	1.507.220.557.604	77,43%	1.173.415.343.107	333.805.214.497	28,45%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorta	1.522.343.342.000	1.257.203.387.695	82,58%	976.117.914.519	281.085.473.176	28,80%
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	0	464.463.334	-	870.631.200	-406.167.866	-46,65%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	424.278.709.000	249.552.706.575	58,82%	196.426.797.388	53.125.909.187	27,05%
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	13.712.304.703.000	17.622.794.124.394	128,52%	17.327.970.928.406	294.823.195.988	1,70%
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	3.789.323.000	4.331.943.877	114,32%	7.192.215.956	-2.860.272.079	-39,77%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	325.117.690.000	463.567.036.550	142,58%	454.883.174.310	8.683.862.240	1,91%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syanah	38.647.690.000	23.025.867.119	59,58%	26.685.223.399	-3.659.356.280	-13,71%
424136	Pendapatan Investasi	30.000.000.000	867.305.481.511	2891,02%	754.207.224.761	113.098.256.750	15,00%
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	11.507.000.000.000	14.413.921.271.119	125,26%	14.277.243.703.515	136.677.567.604	0,96%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.807.750.000.000	1.850.642.524.218	102,37%	1.807.759.386.465	42.883.137.753	2,37%
42414	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	355.101.750.000	944.213.288.248	265,90%	250.097.458.163	694.115.830.085	277,54%
424141	Pendapatan dan pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	355.101.750.000	944.213.288.248	265,90%	250.097.458.163	694.115.830.085	277,54%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	11.488.695.000	90.948.165.044	791,63%	174.211.852.608	-83.263.687.564	-47,79%
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang	9.309.000.000	50.461.073.849	542,07%	150.380.967.979	-99.919.894.130	-66,44%
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1.966.000.000	2.269.722.309	115,45%	508.500.000	1.761.222.309	346,36%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
424212	Pendapatan Hibah Tenkat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	1.050.000.000	12.213.064.521	1163,15%	10.803.345.551	1.409.718.970	13,05%
424213	Pendapatan Hibah Tenkat Dalam Negeri-Pemda - Uang	6.293.000.000	28.728.335.036	456,51%	137.175.876.053	-108.447.541.017	-79,06%
424215	Pendapatan Hibah Tenkat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	5.445.026.983	-	0	5.445.026.983	-
424216	Pendapatan Hibah Tenkat Luar Negeri-Negara - Uang	0	1.804.925.000	-	1.893.246.375	-88.321.375	-4,67%
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang	2.179.695.000	40.487.091.195	1857,47%	23.830.884.629	16.656.206.566	69,89%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1.939.695.000	31.198.150.000	1608,40%	23.029.134.629	8.169.015.371	35,47%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	240.000.000	9.277.265.695	3865,53%	801.750.000	8.475.515.695	1057,13%
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang	0	11.675.500	-	0	11.675.500	-
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	545.882.124.000	1.556.582.772.589	285,15%	578.904.594.476	977.678.178.113	168,88%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	545.882.124.000	1.556.582.772.589	285,15%	578.904.594.476	977.678.178.113	168,88%
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	24.970.290.000	69.088.747.701	276,68%	63.202.955.819	5.885.791.882	9,31%
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	414.603.018.000	1.302.943.551.461	314,26%	441.892.939.535	861.050.611.926	194,86%
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	106.308.816.000	184.550.473.427	173,60%	73.808.699.122	110.741.774.305	150,04%
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	235.873.713.666	-	0	235.873.713.666	-
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	0	235.873.713.666	-	0	235.873.713.666	-
424421	Pendapatan dan Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	191.521.434.832	-	0	191.521.434.832	-
424422	Pendapatan dan Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	44.352.278.834	-	0	44.352.278.834	-
4249	Pendapatan BLU Lainnya	1.491.630.290.000	4.395.816.464.337	294,70%	2.341.696.642.691	2.054.119.821.646	87,72%
42491	Pendapatan BLU Lainnya	1.491.630.290.000	4.182.323.918.597	280,39%	2.333.457.970.246	1.848.865.948.351	79,23%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.491.630.290.000	4.024.154.940.912	269,78%	2.311.074.174.733	1.713.080.766.179	74,12%
424913	Komis, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	0	543.344.744	-	143.730.000	399.614.744	278,03%
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU	0	2.844.811.716	-	0	2.844.811.716	-
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26.951.018.124	-	531.751.312	26.419.266.812	4968,35%
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	768.647.952	-	145.263.871	623.384.081	429,14%
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	0	176.411.569	-	0	176.411.569	-
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	126.884.743.580	-	21.563.050.330	105.321.693.250	488,44%
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	0	212.846.139.940	-	8.233.372.445	204.612.767.495	2485,16%
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	4.349.166.626	-	370.024.000	3.979.142.626	1075,37%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 378 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	18.550.007.884	-	838.244.772	17.711.763.112	2112,96%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	0	170.834.730.030	-	6.789.074.673	164.045.655.357	2416,32%
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	9.240.417.760	-	187.076.000	9.053.341.760	4839,39%
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	4.130.945.157	-	48.653.000	4.082.292.157	8390,63%
424929	Pendapatan BLU Lainnya dan Sewa Lainnya	0	5.740.872.483	-	300.000	5.740.572.483	1913524,16%
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	0	846.406.800	-	5.300.000	641.105.800	12096,34%
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	0	535.368.000	-	0	535.368.000	-
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	0	111.037.800	-	5.300.000	105.737.800	1995,05%
425	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	83.753.115.091.000	128.574.010.038.218	153,52%	108.834.561.775.552	19.739.448.262.566	18,14%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	23.313.211.604.000	47.238.075.748.023	202,62%	26.847.745.503.721	20.390.330.244.302	75,95%
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	15.000.615.504.000	22.768.752.720.908	151,79%	17.395.210.236.393	5.373.542.484.515	30,89%
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	14.236.751.637.000	19.313.686.076.030	135,66%	16.856.247.876.611	2.457.438.199.419	14,58%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	53.075.390.000	65.938.056.673	124,23%	81.739.559.943	-15.801.503.270	-19,33%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	18.826.000	1.385.489.934	7359,45%	1.635.891.000	-250.401.066	-15,31%
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	702.967.810.000	3.355.203.918.148	477,29%	404.568.064.997	2.950.635.853.151	729,33%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	7.801.841.000	32.539.180.123	417,07%	51.018.843.842	-18.479.663.719	-36,22%
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	169.586.181.000	250.827.244.737	147,91%	196.631.066.809	54.196.177.928	27,56%
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	131.773.000	22.124.812.449	16790,10%	1.011.857.500	21.112.954.949	2086,55%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	8.183.457.000	76.098.520.939	929,81%	22.369.347.651	53.729.173.288	240,19%
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	7.824.348.000	17.542.553.524	224,20%	17.481.104.672	61.448.852	0,35%
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	0	135.365.000	-	114.500	135.250.500	118122,71%
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	0	7.130.000	-	0	7.130.000	-
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	153.446.603.000	134.918.862.825	87,93%	155.768.642.486	-20.849.779.661	-13,39%
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	941.185.091.000	1.575.471.215.636	167,39%	503.190.153.764	1.072.281.061.872	213,10%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	291.910.659.000	1.521.589.996.942	521,26%	423.279.205.010	1.098.320.791.932	259,48%
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.760.618.000	8.952.903.922	508,51%	14.357.024.388	-5.404.120.466	-37,64%
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Ingasi dan Jaringan	75.000.000	768.092.244	1024,12%	2.365.920.600	-1.587.828.356	-87,54%
425134	Pendapatan dan KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18.022.487.087	-	7.949.500.447	10.072.986.640	126,71%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 379 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0	98.280.000	-	1.000	98.279.000	9827900,00%
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	360.047.373	-	0	360.047.373	
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	0	2.125.500	-	0	2.125.500	
425139	Pendapatan dan Pemanfaatan BMN Lainnya	647.438.814.000	25.667.282.568	3,96%	55.238.502.319	-29.571.219.751	-53,53%
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	90.000.000	573.611.868.078	637346,52%	615.775.120.447	-42.163.252.369	-6,85%
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	0	497.482.084.878	-	401.644.630.034	95.837.454.844	23,86%
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	0	26.515.283.300	-	586.695.000	25.928.588.300	4419,43%
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	0	1.643.589.980	-	2.282.433.000	-638.843.020	-27,99%
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	0	787.691.588	-	1.121.249.463	-333.557.875	-29,75%
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	0	40.696.464.000	-	2.857.517.700	37.838.946.300	1324,19%
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	90.000.000	6.486.754.332	7207,50%	207.282.595.250	-200.795.840.918	-96,87%
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	70.687.234.000	62.256.481.499	88,07%	0	62.256.481.499	
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	70.687.234.000	62.256.481.499	88,07%	0	62.256.481.499	
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	6.181.047.594.000	20.655.579.279.504	334,18%	6.979.420.198.806	13.676.159.080.698	195,95%
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMD)	6.113.980.000.000	7.499.912.603.765	122,67%	6.239.688.148.016	1.260.224.455.749	20,20%
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	67.067.594.000	13.155.666.675.739	19615,53%	739.732.050.790	12.415.934.624.949	1678,44%
42517	Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	950.000.000.000	1.351.576.937.661	142,27%	1.157.518.727.502	194.058.210.159	16,77%
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	678.242.124.000	1.072.659.813.466	158,15%	862.796.192.354	209.863.621.112	24,32%
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	271.757.876.000	278.602.555.395	102,52%	294.722.535.148	-16.118.979.753	-5,47%
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	314.568.800	-	0	314.568.800	
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM	14.658.093.518.000	17.768.155.575.932	121,22%	17.128.594.138.373	639.561.437.559	3,73%
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	3.258.557.809.000	3.508.128.893.239	107,68%	1.891.930.718.910	1.616.197.974.329	85,43%
425211	Pendapatan Paspor	1.000.154.900.000	1.097.623.900.000	109,75%	1.887.808.918.910	-790.185.018.910	-41,86%
425212	Pendapatan Visa	127.930.084.000	222.629.046.105	174,02%	0	222.629.046.105	
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	708.412.250.000	521.131.100.000	73,56%	0	521.131.100.000	
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	90.145.850.000	284.913.445.000	318,08%	0	284.913.445.000	
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	497.388.650.000	740.179.950.000	148,81%	0	740.179.950.000	
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	193.531.550.000	116.545.148.967	60,22%	0	116.545.148.967	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 380 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	179.340.525.000	26.693.152.424	14,88%	0	26.693.152.424	
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	461.654.000.000	498.294.215.005	107,94%	0	498.294.215.005	
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	118.735.738	-	4.121.800.000	-4.003.064.262	-97,12%
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	489.608.655.000	801.858.988.566	163,78%	743.766.318.732	58.092.668.834	7,81%
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	150.917.830.000	346.182.363.003	229,38%	452.259.609.518	-106.077.246.515	-23,45%
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	229.524.800.000	122.731.687.406	53,47%	0	122.731.687.406	
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	109.166.025.000	161.102.991.326	147,58%	127.200.619.861	33.802.371.485	26,65%
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	0	59.464.713.186	-	61.336.779.510	-1.872.066.324	-3,05%
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	0	22.740.691.177	-	102.969.309.843	-80.228.618.666	-77,92%
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	0	89.636.542.468	-	0	89.636.542.468	
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	175.815.402.000	710.472.768.619	404,10%	829.074.665.967	-118.601.897.348	-14,31%
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	517.217.000	332.375.000	64,26%	362.775.000	-30.400.000	-8,38%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.601.179.000	949.964.500	59,33%	1.084.950.882	-134.986.382	-12,44%
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	22.435.284.000	28.345.178.960	126,34%	25.854.627.187	2.490.551.773	9,63%
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	0	7.021.831.765	-	4.501.256.489	2.520.575.276	56,00%
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	0	669.443.546	-	566.487.997	102.955.549	18,17%
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	44.000.000.000	91.838.022.563	208,72%	146.789.516.068	-54.961.493.505	-37,44%
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	63.000.000.000	458.458.080.139	727,71%	0	458.458.080.139	
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	22.000.000.000	89.431.576.201	406,51%	561.353.321.860	-471.921.745.659	-84,07%
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22.261.722.000	33.426.295.945	150,15%	88.551.730.484	-55.125.434.539	-62,25%
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	313.944.983.000	1.253.573.712.907	399,30%	458.346.658.250	795.227.054.657	173,50%
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	51.000.000.000	362.565.020.463	710,91%	94.500.382.533	268.064.637.930	283,67%
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.100.000.000	247.731.735.938	22521,07%	1.723.459.987	246.008.275.951	14274,09%
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	92.018.983.000	372.324.301.672	404,62%	249.676.794.437	122.647.507.235	49,12%
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	1.100.000.000	46.350.707.965	4213,70%	42.973.726.893	3.376.981.072	7,86%
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	99.000.000.000	14.644.901.085	14,79%	47.324.463.717	-32.679.562.632	-69,05%
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	62.000.000.000	83.048.203.124	133,95%	0	83.048.203.124	
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	7.000.000.000	706.300.000	10,09%	0	706.300.000	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 381 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	66.000.000	75.988.842.399	115134,61%	22.147.830.683	53.841.011.716	243,10%
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	660.000.000	50.213.700.261	7608,14%	0	50.213.700.261	
42525	Pendapatan Perizinan	926.451.475.000	1.566.453.310.352	169,08%	2.603.827.263.108	-1.037.373.952.756	-39,84%
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	850.000.000.000	1.423.430.821.900	167,46%	2.576.964.484.894	-1.153.533.682.994	-44,76%
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	12.147.900.000	17.046.100.000	140,32%	0	17.046.100.000	
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	10.545.000.000	44.497.990.000	421,98%	0	44.497.990.000	
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	24.081.000.000	45.459.250.000	188,78%	0	45.459.250.000	
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.351.555.000	4.055.863.250	93,20%	26.862.778.214	-22.806.914.964	-84,90%
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	25.326.020.000	31.963.285.202	126,21%	0	31.963.285.202	
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.627.060.815.000	8.491.555.385.000	98,43%	9.080.142.986.000	-588.587.601.000	-6,48%
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	864.739.765.000	625.080.330.000	72,29%	660.298.000.000	-35.217.670.000	-5,33%
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	508.363.625.000	604.351.415.000	118,88%	572.269.710.000	32.081.705.000	5,61%
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	2.847.500.000.000	2.403.053.325.000	84,39%	3.502.910.836.000	-1.099.857.511.000	-31,40%
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	75.238.775.000	282.528.300.000	375,51%	80.598.700.000	201.929.600.000	250,54%
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	2.276.250.000.000	2.485.384.975.000	109,19%	2.317.695.905.000	167.689.070.000	7,24%
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.357.532.700.000	1.344.034.000.000	99,01%	1.211.267.435.000	132.766.565.000	10,96%
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	33.068.450.000	29.147.850.000	88,14%	29.639.150.000	-491.300.000	-1,66%
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	151.387.500.000	170.302.050.000	112,49%	172.810.750.000	-2.508.700.000	-1,45%
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	512.980.000.000	547.673.140.000	106,76%	532.652.500.000	15.020.640.000	2,82%
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	415.857.701.000	876.003.488.818	210,65%	1.521.505.527.406	-645.502.038.588	-42,43%
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.000.000.000	907.700.000	11,35%	0	907.700.000	
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	8.000.000.000	909.300.000	11,37%	0	909.300.000	
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	3.698.200.000	299.610.715.000	8101,53%	3.324.000.000	296.286.715.000	8913,56%
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	267.973.080.000	202.890.885.000	75,71%	264.844.460.000	-61.953.575.000	-23,39%
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	20.377.555.000	28.707.426.410	140,88%	23.558.130.001	5.149.296.409	21,86%
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital	99.308.866.000	334.724.562.408	337,05%	169.933.842.529	164.790.719.879	96,97%
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	8.500.000.000	8.252.900.000	97,09%	1.059.845.094.876	-1.051.592.194.876	-99,22%
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	450.796.678.000	560.109.228.431	124,25%	0	560.109.228.431	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 382 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425281	Pendapatan Akreditasi	15.743.600.000	19.279.600.000	122,46%	0	19.279.600.000	
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.558.956.000	928.417.100	59,55%		928.417.100	
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	89.280.910.000	87.180.831.927	97,65%	0	87.180.831.927	
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	13.978.405.000	27.305.089.529	195,34%	0	27.305.089.529	
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	33.868.261.000	42.226.504.374	124,68%	0	42.226.504.374	
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	3.852.810.000	7.629.518.962	198,02%	0	7.629.518.962	
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	131.565.604.000	101.480.009.436	77,13%	0	101.480.009.436	
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	74.240.000.000	198.000.292.900	266,70%	0	198.000.292.900	
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	86.708.132.000	76.078.964.203	87,74%	0	76.078.964.203	
4253	PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN	6.513.181.334.000	7.421.052.335.146	113,94%	6.807.179.045.090	613.873.290.056	9,02%
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan	3.205.433.661.000	3.849.996.353.287	120,11%	3.692.049.439.026	157.946.914.261	4,29%
425311	Pendapatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	135.690.120.000	150.987.861.839	111,27%	124.536.710.562	26.451.151.277	21,24%
425312	Pendapatan dan BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	2.244.990.960.000	2.801.330.955.443	124,78%	3.556.989.653.464	-755.658.698.021	-21,24%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	628.010.791.000	574.772.060.540	91,52%	0	574.772.060.540	
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	33.090.880.000	48.359.610.383	146,14%	0	48.359.610.383	
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	140.330.485.000	235.939.212.082	168,13%	0	235.939.212.082	
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	23.320.425.000	38.606.653.000	165,55%	10.523.075.000	28.083.578.000	266,88%
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	84.830.000.000	179.606.380.001	211,73%	0	179.606.380.001	
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	84.830.000.000	179.606.380.001	211,73%	0	179.606.380.001	
42533	Pendapatan Jasa Karantina	176.144.838.000	344.312.823.136	195,47%	0	344.312.823.136	
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	139.581.088.000	267.493.327.963	191,64%	0	267.493.327.963	
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	36.563.750.000	76.819.495.173	210,10%	0	76.819.495.173	
42534	Pendapatan Jasa Agraria	2.307.119.235.000	2.177.144.211.554	94,37%	2.318.870.035.242	-141.725.823.688	-6,11%
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	2.266.455.513.000	2.177.144.211.554	96,06%	2.318.870.035.242	-141.725.823.688	-6,11%
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora	40.663.722.000	0	0,00%	0	0	
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan	739.653.600.000	869.992.567.168	117,62%	796.259.570.822	73.732.996.346	9,26%
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	739.653.600.000	869.992.567.168	117,62%	796.259.570.822	73.732.996.346	9,26%
4254	PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI	4.737.423.665.000	4.763.894.209.734	100,56%	4.603.461.244.398	160.432.965.336	3,49%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 383 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
42541	Pendapatan Pendidikan	4.165.311.302.000	4.091.137.740.960	98,22%	4.484.816.582.419	-393.678.841.459	-8,78%
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	79.763.648.000	78.033.811.448	97,83%	134.834.378.923	-56.800.567.475	-42,13%
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	3.829.107.988.000	3.799.330.389.906	99,22%	3.956.797.554.032	-157.467.164.126	-3,98%
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	529.000.000	25.946.183.264	4904,76%	0	25.946.183.264	
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	255.910.666.000	187.827.356.342	73,40%	393.184.649.464	-205.357.293.122	-52,23%
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	311.891.818.000	283.378.471.210	90,86%	0	283.378.471.210	
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	301.962.925.000	255.235.125.257	84,53%	0	255.235.125.257	
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	9.928.893.000	28.143.345.953	283,45%	0	28.143.345.953	
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	254.431.618.000	383.125.471.424	150,58%	102.755.561.086	280.369.910.338	272,85%
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	36.808.232.000	73.168.285.301	198,78%	0	73.168.285.301	
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	72.527.365.000	107.261.809.466	147,89%	102.755.561.086	4.506.248.380	4,39%
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	102.875.550.000	111.620.131.097	108,50%	0	111.620.131.097	
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	32.448.156.000	20.518.625.945	63,24%	0	20.518.625.945	
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	7.514.190.000	26.153.313.294	348,05%	0	26.153.313.294	
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	801.000.000	5.524.461.080	689,70%	0	5.524.461.080	
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	1.457.125.000	38.878.845.241	2668,19%	0	38.878.845.241	
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	5.788.927.000	6.252.526.140	108,01%	15.889.100.893	-9.636.574.753	-60,65%
425451	Pendapatan Museum	3.543.230.000	3.348.070.000	94,49%	15.889.100.893	-12.541.030.893	-78,93%
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	2.245.697.000	2.904.456.140	129,33%	0	2.904.456.140	
4255	PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.375.046.414.000	23.950.487.055.396	107,04%	17.639.681.081.421	6.310.805.973.975	35,78%
42551	Pendapatan Jasa Transportasi	6.753.243.224.000	6.319.589.621.391	93,58%	0	6.319.589.621.391	
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	460.324.500.000	938.634.625.000	203,91%	0	938.634.625.000	
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.236.552.350.000	902.206.837.845	72,96%	0	902.206.837.845	
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.540.603.841.000	2.234.327.178.826	87,94%	0	2.234.327.178.826	
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	650.391.073.000	548.045.578.845	84,28%	0	548.045.578.845	
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	283.760.793.000	238.311.705.954	83,98%	0	238.311.705.954	
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	297.633.128.000	340.384.958.211	114,36%	0	340.384.958.211	
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	636.280.395.000	521.181.218.991	81,91%	0	521.181.218.991	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 384 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425518	Pendapatan dan Konsesi Bidang Transportasi	547.969.695.000	508.428.602.995	92,78%	0	508.428.602.995	
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	99.727.449.000	88.068.914.724	88,31%	0	88.068.914.724	
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	15.591.419.395.000	17.446.455.866.510	111,90%	17.578.783.121.175	-132.327.254.665	-0,75%
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	14.628.136.271.000	16.364.753.538.293	111,87%	16.560.272.878.360	-195.519.340.067	-1,16%
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	931.763.622.000	1.027.001.367.847	110,22%	1.018.510.242.815	8.491.125.032	0,83%
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	29.245.502.000	47.799.896.741	163,44%	0	47.799.896.741	
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	174.000.000	825.002.500	474,14%	0	825.002.500	
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	0	1.886.706.490	-	0	1.886.706.490	
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	0	976.814.639	-	0	976.814.639	
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	2.100.000.000	3.212.540.000	152,98%	0	3.212.540.000	
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	30.383.795.000	184.441.567.495	607,04%	60.897.960.246	123.543.607.249	202,87%
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	30.325.345.000	24.921.968.222	82,18%	53.714.415.124	-28.792.446.902	-53,60%
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI	58.450.000	28.672.000	49,05%	7.183.545.122	-7.154.873.122	-99,60%
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	112.877.812.351	-	0	112.877.812.351	
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	0	46.613.114.922	-	0	46.613.114.922	
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA	198.638.113.000	910.056.355.732	458,15%	6.853.858.987.581	-5.943.802.831.848	-86,72%
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.364.437.000	204.088.090.073	195,55%	158.901.986.453	45.186.103.620	28,44%
425611	Pendapatan Wisata Alam	93.857.111.000	167.966.219.615	178,96%	158.189.355.087	8.776.864.528	6,18%
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.491.776.000	21.094.153.074	201,05%	0	21.094.153.074	
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	15.550.000	15.027.717.384	96641,27%	712.631.366	14.315.086.018	2008,76%
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	18.011.993.000	21.799.455.591	121,03%	4.173.205.256.034	-4.151.405.800.443	-99,48%
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Penkakan	15.218.393.000	21.791.630.591	143,19%	4.173.205.256.034	-4.151.413.625.443	-99,48%
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	2.793.600.000	7.825.000	0,28%	0	7.825.000	
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	76.261.683.000	684.168.810.068	897,13%	2.521.751.745.094	-1.837.582.935.026	-72,87%
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemenuksaan	6.879.375.000	5.663.582.398	82,33%	676.511.073.121	-670.847.490.723	-99,16%
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	46.054.003.000	407.131.262.221	884,03%	1.729.039.879.031	-1.321.908.616.810	-76,45%
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol	0	110.076.543.484	-	116.200.792.942	-6.124.249.458	5,27%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	23.328.305.000	161.297.421.965	691,42%	0	161.297.421.965	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 385 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	7.496.693.718.000	11.153.269.856.791	148,78%	13.503.079.012.415	-2.349.809.155.624	-17,40%
42571	Pendapatan Bunga	935.591.500.000	1.656.180.667.138	177,02%	1.535.360.256.560	120.820.410.578	7,87%
425713	Pendapatan Bunga dan Putang dan Pembenan Pinjaman	935.591.500.000	1.309.111.487.158	139,82%	1.117.768.921.744	191.342.565.414	17,12%
425714	Pendapatan Bunga dan Pemberian Kredit Pemerintah	0	60.552.451.830	-	118.014.288.401	-57.461.836.571	-48,69%
425717	Pendapatan Bunga dan Rekening Pembangunan Hutan	0	286.216.349.005	-	299.075.698.586	-12.859.349.581	-4,30%
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	0	300.379.145	-	501.347.829	-200.968.684	-40,09%
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption	0	0	-	6.497.500.000	-6.497.500.000	-100,00%
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	0	0	-	6.497.500.000	-6.497.500.000	-100,00%
42573	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara	2.110.041.860.000	2.282.759.533.200	108,19%	6.110.092.446.400	-3.827.332.913.200	-62,64%
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.110.041.860.000	1.141.132.650.700	54,08%	4.092.987.718.300	-2.951.855.067.600	-72,12%
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	0	1.141.626.882.500	-	2.017.104.728.100	-875.477.845.600	-43,40%
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	84.864.361.000	94.901.097.815	111,83%	69.108.954.346	25.792.143.469	37,32%
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	84.864.361.000	94.497.933.237	111,35%	69.108.954.346	25.389.978.891	36,74%
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN	0	139.460.000	-	0	139.460.000	-
425743	Pendapatan Kupon SBN	0	259.840.000	-	0	259.840.000	-
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu	0	3.864.578	-	0	3.864.578	-
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	110.001.126.000	242.930.299.187	220,84%	23.239.529.318	219.690.769.869	945,33%
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	110.000.000.000	242.713.600.134	220,65%	23.214.731.478	219.498.868.656	945,52%
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	1.126.000	207.685.127	18444,51%	24.797.840	182.987.287	737,51%
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	0	9.013.926	-	0	9.013.926	-
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	281.732.329.000	287.720.782.980	102,13%	264.409.379.457	23.311.403.523	8,82%
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	891.308	-	72.441.207	-71.549.899	-98,77%
425762	Pendapatan Jasa Bank dan Pemberian Pinjaman	0	160.641.039	-	6.473.966.920	-6.313.325.881	-97,52%
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	0	74.556.330.261	-	47.502.727.325	27.053.602.936	56,95%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	281.732.329.000	207.822.645.528	73,77%	208.907.991.702	-1.085.346.174	-0,52%
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	5.180.274.844	-	1.452.252.303	3.728.022.541	256,71%
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	3.430.000.000.000	6.054.091.902.483	176,50%	5.041.464.684.573	1.012.627.217.910	20,09%
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	60.000.000.000	256.947.451.726	428,25%	148.697.096.222	108.250.355.504	72,80%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 386 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425773	Pendapatan dan Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	210.000.000.000	332.449.155.560	158,31%	285.028.502.724	47.420.652.836	16,64%
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	3.160.000.000.000	5.464.695.295.197	172,93%	4.607.739.085.627	856.956.209.570	18,60%
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	380.522.231.000	481.447.093.712	126,52%	412.785.656.940	68.661.436.772	16,63%
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	982.732.000	2.371.011.392	241,27%	2.522.550.922	-151.539.530	-6,01%
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	308.030.455.675	-	238.448.003.875	89.582.451.800	28,18%
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	68.037.631.165	-	50.712.440.833	17.325.190.332	34,16%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	16.559.499.000	91.608.841.688	553,21%	101.978.082.340	-10.369.240.652	-10,17%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	362.980.000.000	11.399.153.792	3,14%	19.124.578.970	-7.725.425.178	-40,40%
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	163.940.311.000	53.238.480.276	32,47%	40.120.604.821	13.117.875.455	32,70%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	163.851.121.000	16.918.424.771	10,33%	25.421.722.548	-8.503.297.777	-33,45%
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	89.190.000	3.827.704.570	4281,63%	14.698.882.273	-10.871.177.703	-73,96%
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	32.492.350.935	-	0	32.492.350.935	-
4258	PENDAPATAN DENDA	16.346.711.000	611.724.687.653	3742,19%	737.267.906.420	-125.543.218.767	-17,03%
42581	Pendapatan Denda I	16.201.711.000	540.373.238.968	3335,29%	565.766.276.076	-25.393.037.108	-4,49%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.681.511.000	508.183.330.466	8944,51%	447.318.998.095	60.864.332.371	13,61%
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	10.000.000.000	25.421.045.096	254,21%	112.024.980.817	-86.603.935.721	-77,31%
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	519.200.000	216.600.000	41,72%	0	216.600.000	-
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	0	96.762	-	11.737.858	-11.841.096	-99,18%
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	1.000.000	8.592.034	859,20%	9.019.805	-427.771	-4,74%
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penemuan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	0	347.459.213	-	1.821.234.053	1.473.774.840	80,92%
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	0	6.196.115.397	-	4.580.305.448	1.615.809.949	35,28%
42582	Pendapatan Denda II	145.000.000	65.693.449.290	45305,83%	169.770.738.744	-104.077.289.454	-61,30%
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	0	5.278.945.347	-	21.354.797	5.257.590.550	24820,19%
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	0	1.607.497.444	-	4.031.337.358	-2.423.839.914	-60,12%
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	145.000.000	180.092.454	124,20%	483.288.294	-303.195.840	-62,74%
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	0	929.616.900	-	0	929.616.900	-
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	57.697.297.145	-	165.234.758.295	-107.537.461.150	-85,08%
42583	Pendapatan Denda III	0	5.657.999.395	-	1.730.891.600	3.927.107.795	226,88%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 387 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	5.657.999.395	-	1.730.891.600	3.927.107.795	226,88%
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	4.444.480.014.000	14.757.294.213.811	332,04%	14.713.694.856.133	43.599.357.678	0,30%
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	4.434.967.331.000	6.467.615.893.218	145,83%	12.363.242.225.359	-5.895.626.332.141	-47,69%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	20.526.285.000	185.172.872.106	902,13%	457.149.799.641	-271.976.927.535	-59,49%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.745.580.000	1.101.775.087.107	40129,05%	843.192.718.010	258.582.369.097	30,67%
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.230.000.000	1.434.357.954.147	44407,37%	1.003.033.506.472	431.324.447.675	43,00%
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	1.631.000	-1.631.000	-100,00%
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.174.920.308.894	-	258.983.070.509	1.915.937.238.385	739,79%
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	0	34.731.049.514	-	28.819.974.494	5.911.075.020	20,51%
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.265.881.745.564	-	302.316.583.514	963.565.162.050	318,73%
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15.464.387.256	-	5.464.727.290	9.999.659.966	182,89%
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	4.408.465.466.000	255.312.488.630	5,79%	9.464.280.214.429	-9.208.967.725.799	-97,30%
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	0	261.161.535.102	-	221.236.016.033	39.925.519.069	18,05%
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	0	261.161.535.102	-	221.236.016.033	39.925.519.069	18,05%
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	0	33.306.961.074	-	14.368.455.221	18.938.505.853	131,81%
425931	Pendapatan Setoran dan Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	29.301.333.275	-	12.094.364.721	17.206.968.554	142,27%
425932	Pendapatan Setoran dan Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	0	3.914.284.983	-	1.405.586.100	2.508.698.883	178,48%
425933	Pendapatan Setoran dan Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	0	1.314.216	-	858.304.400	-856.990.184	-99,85%
425934	Pendapatan Setoran dan Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	0	90.028.600	-	10.200.000	79.828.600	782,63%
42598	Pendapatan Lain-Lain I	0	7.704.637.733.401	-	0	7.704.637.733.401	-
425982	Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun	0	7.704.637.733.401	-	0	7.704.637.733.401	-
42599	Pendapatan Lain-Lain II	9.512.683.000	290.572.091.016	3054,58%	2.114.848.159.520	-1.824.276.068.504	-86,26%
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia	0	0	-	1.700.103.052.202	-1.700.103.052.202	-100,00%
422212	Pendapatan dari Surplus Otentitas Jasa Keuangan	0	55.663.300.189	-	0	55.663.300.189	-
425991	Penerimaan Kembali Persekiti/Uang Muka Gaji	3.942.387.000	6.179.868.939	156,75%	16.823.574.332	-10.643.705.393	-63,27%
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	0	0	-	98.074.018	-98.074.018	-100,00%
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi	0	277.788	-	0	277.788	-
425995	Pendapatan Penyeteroran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	5.412.836	-	1.277.285.335	-1.271.872.499	-99,58%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 388 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	ANGGARAN	TA 2018	% Realisasi	TA 2017	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
425997	Pendapatan dan Hibah yang Belum Disahkan	0	160.324.477	-	86.711.899	73.612.578	84,89%
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	0	22.851.019.981	-	222.345.903.094	-199.494.883.113	-89,72%
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	5.570.296.000	205.711.886.806	3693,02%	174.113.558.640	31.598.328.166	18,15%
43	PENDAPATAN HIBAH	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1300,47%	11.629.815.002.490	3.935.045.236.830	33,84%
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320	1300,47%	11.629.815.002.490	3.935.045.236.830	33,84%
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	0	13.178.185.591.822	-	7.410.435.627.384	5.767.749.964.438	77,83%
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	0	13.178.185.591.822	-	7.410.435.627.384	5.767.749.964.438	77,83%
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan	0	9.076.264.000	-	228.975.340.000	-219.899.076.000	-96,04%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha	0	339.156.572.926	-	137.817.215.944	201.339.356.982	146,09%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah	0	12.814.628.074.896	-	7.043.656.235.321	5.770.971.839.575	81,93%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya	0	15.324.680.000	-	-13.163.881	15.337.843.881	-
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.196.865.400.000	2.386.674.647.498	199,41%	4.219.379.375.106	-1.832.704.727.608	-43,44%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	1.196.865.400.000	418.374.595.589	34,96%	530.076.024.609	-111.701.429.020	-21,07%
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	1.196.865.400.000	202.952.271.644	16,96%	234.472.316.950	-31.520.045.306	13,44%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral	0	215.422.323.945	-	295.603.707.659	-80.181.383.714	-27,12%
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	0	1.968.300.051.909	-	3.689.303.350.497	-1.721.003.298.588	-46,65%
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral	0	1.527.744.362.454	-	2.994.461.088.630	-1.466.716.726.176	-48,88%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral	0	347.385.546.650	-	652.784.794.782	-305.399.248.132	-46,78%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya	0	93.170.142.805	-	42.057.467.085	51.112.675.720	121,53%
Grand Total		1.894.720.327.977.000	1.943.674.876.878.800	102,58%	1.666.375.912.658.080	277.298.964.220.711	16,64%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 389 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.B

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

No (1)	Nama BUMN (2)	Jumlah (3)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.472.280.892.834
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.572.714.448.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.859.459.907.905
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	363.295.937.910
Perbankan		16.267.751.186.649
1	PT Pertamina (Persero)	8.569.790.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	8.651.640.277.399
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	308.715.000.000
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	768.850.000.000
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	436.503.715.078
6	PT Jasa Raharja (Persero)	1.269.902.963.670
7	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	410.940.896.980
8	PT Pegadaian (Persero)	1.005.367.000.000
9	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	308.035.889.138
10	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	653.968.051.800
11	Perum Jaminan Kredit Indonesia	80.184.500.000
12	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	171.821.761.507
13	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	441.147.067.551
14	PT Angkasa Pura II (Persero)	301.947.000.000
15	PT Angkasa Pura I (Persero)	283.716.000.000
16	PT Biofarma (Persero)	236.410.000.000
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	241.086.272.753
18	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	156.491.377.209
19	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	522.923.131.688
20	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	27.704.250.000
21	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	148.222.628.708
22	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	1.031.387.739
23	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	88.300.000.000
24	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	52.572.750.063
25	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	29.824.758.920
26	Perum Jasa Tirta II	17.455.197.202
27	PT Hutama Karya (Persero)	214.207.547.813
28	Perum Jasa Tirta I	12.333.045.000
29	PT Sucofindo (Persero)	26.949.137.622
30	PT Brantas Abipraya (Persero)	27.015.066.292
31	PT Surveyor Indonesia (Persero)	11.163.696.741
32	PT Dahana (Persero)	8.815.000.000
33	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	6.319.177.264



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 390 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.B

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
34	PT Perikanan Nusantara	723.042.778
35	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	7.067.022.678
36	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	4.954.745.552
37	PT Kawasan Industri Makassar	1.020.465.340
38	Perum Perhutani	81.189.600.000
39	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	8.973.967.036
40	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	20.000.000.000
41	Perum Damri	357.000.000
42	PT Pos Indonesia (Persero)	18.102.960.000
43	PT TWC Borobudur	13.929.212.000
44	Perum Peruri	121.177.000.000
45	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	8.779.645.000
46	PT Nindya Karya	175.000.000
47	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	116.939.940
48	PT LEN Industri (Persero)	1.850.000.000
49	PT Pindad (Persero)	6.400.000.000
50	PT Virama Karya (Persero)	2.926.971.174
51	PT Bina Karya	1.172.872.603
52	PT Indra Karya (Persero)	431.201.140
53	PT Sarinah (Persero)	558.000.000
54	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.265.392.101
55	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	15.089.791.336
56	PT Garam (Persero)	66.453.339.566
57	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	1.946.721.639
58	PT Perum Perikanan Indonesia	394.245.000
59	PT Yodya Karya (Persero)	2.622.861.792
60	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	54.010.679.700
61	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1.919.750.000.000
62	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	7.926.703.560
Non Perbankan		27.863.719.928.072
No	Nama Non BUMN (Minoritas)	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	12.884.249.518
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	24.447.061.524
3	PT Socfin Indonesia	57.269.043.900
4	PT Indosat	56.693.625.000
5	PT Perkebunan Nusantara X	287.270.722
6	PT Perkebunan Nusantara VI	693.890.240



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 391 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 1.B

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(3)
7	PT Perkebunan Nusantara IV	38.133.318.928
8	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.593
9	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2
10	PT Timah (Persero) Tbk	23
Non Perbankan		190.408.461.450
Pembayaran Piutang		
No	BUMN	Jumlah
1	PT Perkebunan Nusantara II	1.200.000.000
2	PT Inhutani I	900.000.000
3	PT Inhutani V	300.000.000
4	PT Balai Pustaka	35.000.000
5	PT Bina Karya	70.000.000
6	PT TWC Borobudur	175.217.658
7	PT ASDP Indonesia Ferry	2.707.981.893
Jumlah Pembayaran Piutang		5.388.199.551
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		
1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PT. Bank Ekspor Indonesia)	275.602.600.247
2	PT Sarana Multi Infrastruktur	271.000.000.000
3	PT Sarana Multigriya Finansial	85.500.000.000
4	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	101.151.000.000
Jumlah Pembayaran Dividen BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		733.253.600.247
JUMLAH TOTAL		45.060.521.375.969



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 392 -

**LRA BELANJA
PEMERINTAH PUSAT
TA 2018**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 393 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	952.803.014.000	1.040.191.480.000	919.832.189.679	20.827.891.351	899.004.298.328	141.187.181.672
01	SEKRETARIAT JENDERAL	157.180.219.000	161.321.772.000	153.801.036.758	124.743.603	153.676.293.155	7.645.478.845
02	MAJELIS	795.622.795.000	878.869.708.000	766.031.152.921	20.703.147.748	745.328.005.173	133.541.702.827
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.728.286.667.000	5.728.286.667.000	4.698.135.255.704	94.462.735.224	4.603.672.520.480	1.124.614.146.520
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.700.427.543.000	1.700.427.543.000	1.091.888.983.985	3.669.218.794	1.088.219.765.191	612.207.777.809
02	DEWAN	4.027.859.124.000	4.027.859.124.000	3.606.246.271.719	90.793.516.430	3.515.452.755.289	512.406.368.711
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.840.531.119.000	3.627.420.844.000	3.569.636.665.275	26.039.896.262	3.543.596.769.013	83.824.074.987
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.840.531.119.000	3.627.420.844.000	3.569.636.665.275	26.039.896.262	3.543.596.769.013	83.824.074.987
005	MAHKAMAH AGUNG	8.262.100.000.000	8.478.226.882.000	8.427.964.001.230	4.545.286.604	8.423.418.714.626	54.808.167.374
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7.716.684.359.000	7.891.296.405.000	7.862.896.213.931	2.739.946.658	7.860.156.267.273	31.140.137.727
02	KEPANITERAAN	157.270.100.000	168.615.995.000	168.470.696.977	9.276.303	168.461.420.674	154.574.326
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	152.581.761.000	152.581.761.000	141.982.086.630	308.405.991	141.673.680.639	10.908.080.361
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	71.643.906.000	71.950.031.000	70.537.734.694	228.494.499	70.309.240.195	1.640.790.805
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA	23.708.288.000	23.708.288.000	22.620.228.951	19.336.142	22.600.892.809	1.107.395.191
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	107.622.532.000	136.129.486.000	127.559.429.676	1.222.581.899	126.336.847.777	9.792.638.223
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	32.589.054.000	33.944.916.000	33.897.610.371	17.245.112	33.880.365.259	64.550.741
006	KEJAKSAAN RI	6.386.605.675.000	6.727.265.343.000	6.124.467.686.057	5.679.099.673	6.118.788.586.384	608.476.756.616
01	KEJAKSAAN RI	6.386.605.675.000	6.727.265.343.000	6.124.467.686.057	5.679.099.673	6.118.788.586.384	608.476.756.616
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.923.622.827.000	2.490.743.350.000	2.332.079.208.240	1.747.931.247	2.330.331.276.993	160.412.073.007
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.101.322.827.000	1.361.182.590.000	1.237.027.201.038	301.887.917	1.236.725.313.121	124.457.276.879
03	SEKRETARIAT KEPRESIDENAN	369.800.000.000	511.445.398.000	504.007.605.264	376.473.889	503.631.131.375	7.814.266.625
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	131.800.000.000	229.371.904.000	213.537.943.071	109591487	213.428.351.584	15.943.552.416
05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	35.000.000.000	32.005.000.000	31.762.758.319	279.553.559	31.483.204.760	521.795.240
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	41.000.000.000	122.250.133.000	119.214.938.343	0	119.214.938.343	3.035.194.657
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	40.000.000.000	38.978.810.000	38.391.576.738	353686	38.391.223.052	587.586.948
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	80.000.000.000	81.411.655.000	81.139.328.229	446.447.049	80.692.881.180	718.773.820



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 394 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
10	KANTOR STAF PRESIDEN	124.700.000.000	114.097.860.000	106.997.857.238	233.623.660	106.764.233.578	7.333.626.422
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.116.344.184.000	3.251.205.592.000	3.086.791.637.550	11.516.663.919	3.075.274.973.631	175.930.618.369
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.006.476.081.000	974.949.875.000	938.629.491.978	3.143.127.500	935.486.364.478	39.463.510.522
02	INSPEKTORAT JENDERAL	74.293.717.000	76.400.370.000	67.246.270.582	1.661.032.271	65.585.238.311	10.815.131.689
03	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	131.333.816.000	242.024.698.000	239.707.394.320	120.172.668	239.587.221.652	2.437.476.348
04	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	156.878.262.000	160.005.670.000	150.690.709.625	578.614.152	150.112.095.473	9.893.574.527
05	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	219.687.596.000	226.793.289.000	207.314.506.172	1.363.752.041	205.950.754.131	20.842.534.869
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	184.442.601.000	210.679.253.000	196.489.916.493	1.310.848.470	195.179.068.023	15.500.184.977
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	110.220.201.000	114.590.931.000	105.163.914.525	923.863.640	104.240.050.885	10.350.880.115
08	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	884.783.485.000	884.783.485.000	853.399.190.704	1.200.644.209	852.198.546.495	32.584.938.505
09	DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH	74.633.284.000	74.633.284.000	70.925.621.785	213.088.563	70.712.533.222	3.920.750.778
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48.283.120.000	51.876.461.000	49.026.725.017	189.987.062	48.836.737.955	3.039.723.045
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	225.312.021.000	234.468.276.000	208.197.896.349	811.533.343	207.386.363.006	27.081.912.994
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.250.769.089.000	7.845.758.894.000	7.548.789.081.431	5.020.805.509	7.543.768.275.922	301.990.618.078
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.123.195.060.000	6.513.126.087.000	6.231.751.787.517	3.052.013.005	6.228.699.774.512	284.426.312.488
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	69.186.051.000	76.657.482.000	75.388.539.340	168.409.149	75.220.130.191	1.437.351.809
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	46.020.058.000	52.673.535.000	52.456.792.613	54.356.438	52.402.436.175	271.098.825
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	59.098.302.000	59.830.021.000	59.532.863.603	114.446.545	59.418.417.058	411.603.942
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	618.471.405.000	787.806.556.000	784.795.237.971	54.582.666	784.740.655.305	3.065.900.695
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	93.881.322.000	104.481.322.000	99.800.196.160	103.046.077	99.697.150.083	4.784.171.917
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	40.681.495.000	43.232.550.000	42.065.615.982	123.479.842	41.942.136.140	1.290.413.860
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	137.701.366.000	136.701.366.000	132.902.628.600	1.246.747.062	131.655.881.538	5.045.484.462
09	INSPEKTORAT JENDERAL	31.399.139.000	33.109.334.000	32.479.726.421	60.854.157	32.418.872.264	690.461.736
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	31.134.891.000	38.140.641.000	37.615.693.224	42.870.568	37.572.822.656	567.818.344
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	107.682.385.062.000	113.153.865.671.000	108.230.116.806.677	1.549.689.563.132	106.680.427.243.545	6.473.438.427.455
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	26.142.506.902.000	22.227.150.211.000	16.613.309.649.935	39.615.795.886	16.573.693.854.049	5.653.456.356.951



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 395 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
21	MARKAS BESAR TNI	7.532.830.911.000	8.304.019.023.000	8.303.250.630.024	6.461.651.352	8.296.788.978.672	7.230.044.328
22	MARKAS BESAR TNI AD	45.310.497.196.000	50.679.082.575.000	50.402.748.339.499	255.729.053.621	50.147.019.285.878	532.063.289.122
23	MARKAS BESAR TNI AL	16.103.833.758.000	17.959.873.042.000	17.840.003.201.544	12.012.006.334	17.827.991.195.210	131.881.846.790
24	MARKAS BESAR TNI AU	12.592.716.295.000	13.983.740.820.000	15.070.804.985.675	1.235.871.055.939	13.834.933.929.736	148.806.890.264
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.591.410.243.000	13.101.216.922.000	12.670.792.949.598	29.103.446.071	12.641.689.503.527	459.527.418.473
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.761.179.680.000	3.978.065.288.000	3.895.323.531.272	2.049.882.222	3.893.273.649.050	84.791.638.950
02	INSPEKTORAT JENDERAL	32.223.447.000	32.866.907.000	32.168.332.421	336.376.680	31.831.955.741	1.034.951.259
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	680.307.515.000	683.271.257.000	566.014.356.540	13.982.034.891	552.032.321.649	131.238.935.351
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	4.263.913.635.000	5.195.564.329.000	5.135.325.664.212	1.898.231.048	5.133.427.433.164	62.136.895.836
06	DITJEN IMIGRASI	2.257.320.972.000	2.366.728.137.000	2.248.333.072.928	7.959.190.988	2.240.373.881.940	126.354.255.060
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	193.723.991.000	261.845.006.000	236.207.817.432	1.138.867.912	235.068.949.520	26.776.056.480
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41.419.507.000	43.501.071.000	41.323.888.026	60.610.357	41.263.277.669	2.237.793.331
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	34.283.683.000	37.663.698.000	36.460.026.071	79.540.500	36.380.485.571	1.283.212.429
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	108.570.670.000	108.570.670.000	103.162.178.092	114.943.862	103.047.234.230	5.523.435.770
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	29.900.158.000	29.900.158.000	29.354.349.151	37.695.442	29.316.653.709	583.504.291
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK	188.566.985.000	363.240.401.000	347.119.733.453	1.446.072.169	345.673.661.284	17.566.739.716
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	45.682.169.483.000	46.987.862.720.000	39.925.775.243.195	25.307.154.530	39.900.468.088.665	7.087.394.631.335
01	SEKRETARIAT JENDERAL	19.887.754.241.000	20.763.842.227.000	19.668.089.116.567	15.427.627.377	19.652.661.489.190	1.111.180.737.810
02	INSPEKTORAT JENDERAL	118.341.754.000	118.341.754.000	104.830.414.891	203.373.887	104.627.040.804	13.714.713.196
03	DITJEN ANGGARAN	154.537.430.000	154.537.430.000	133.798.783.475	468.985.372	133.329.798.103	21.207.631.897
04	DITJEN PAJAK	7.441.352.425.000	7.441.587.985.000	6.736.325.524.250	1.955.835.893	6.734.369.688.357	707.218.296.643
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	3.393.722.235.000	3.754.677.608.000	3.499.909.067.756	1.792.311.065	3.498.116.756.691	256.560.851.309
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	144.022.253.000	145.975.618.000	126.667.252.936	768.941.903	125.898.311.033	20.077.306.967
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	119.511.382.000	119.511.382.000	111.641.135.992	76.103.621	111.565.032.371	7.946.349.629
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	12.660.896.220.000	12.682.854.534.000	7.984.612.172.616	256.867.996	7.984.355.304.620	4.698.499.229.380
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	872.909.999.000	872.909.999.000	744.841.856.341	1.769.903.039	743.071.953.302	129.838.045.698



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 396 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	731.706.890.000	774.327.499.000	685.875.790.252	2.557.579.561	683.318.210.691	91.009.288.309
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	157.414.654.000	159.296.684.000	129.184.128.319	29.624.816	129.154.503.503	30.142.180.497
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	23.820.762.303.000	24.038.510.833.000	21.926.170.250.684	89.567.412.990	21.836.602.837.694	2.201.907.995.306
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.492.092.430.000	1.730.087.799.000	1.664.825.022.530	7.694.961.098	1.657.130.061.432	72.957.737.568
02	INSPEKTORAT JENDERAL	97.134.000.000	97.134.000.000	92.247.744.073	375.341.496	91.872.402.577	5.261.597.423
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	6.486.964.351.000	6.675.409.495.000	6.168.356.984.721	67.832.674.926	6.100.524.309.795	574.885.185.205
04	DITJEN HORTIKULTURA	1.355.960.980.000	1.242.629.794.000	1.126.405.896.209	309.442.239	1.126.096.453.970	116.533.340.030
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.631.801.109.000	1.636.354.054.000	1.415.645.206.640	562.118.501	1.415.083.088.139	221.270.965.861
06	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.087.023.491.000	2.028.956.742.000	1.853.987.720.287	4.527.598.811	1.849.460.121.476	179.496.620.524
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	6.030.828.749.000	5.834.734.749.000	5.122.013.869.600	2.624.771.431	5.119.389.098.169	715.345.650.831
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	2.084.560.880.000	2.092.710.111.000	1.886.936.693.932	2.535.320.933	1.884.401.372.999	208.308.738.001
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDA PERTANIAN	1.253.599.323.000	1.264.588.172.000	1.177.201.395.207	1.541.674.879	1.175.659.720.328	88.928.451.672
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	527.612.000.000	600.286.783.000	587.591.785.845	1.315.194.014	586.276.591.831	14.010.191.169
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	773.184.990.000	835.619.134.000	830.957.931.640	248.314.662	830.709.616.978	4.909.517.022
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.827.854.207.000	2.847.922.836.000	2.629.621.597.547	1.511.494.653	2.628.110.102.894	219.812.733.106
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.078.722.835.000	1.139.651.155.000	1.087.911.681.440	677.234.155	1.087.234.447.285	52.416.707.715
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	124.964.753.000	121.536.458.000	101.837.823.850	44.360.940	101.793.462.910	19.742.995.090
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	126.141.000.000	124.334.748.000	107.854.803.005	90.827.741	107.763.975.264	16.570.772.736
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	124.904.050.000	120.493.000.000	98.893.368.957	14.349.796	98.879.019.161	21.613.980.839
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	369.897.840.000	369.897.840.000	353.760.336.800	91.914.104	353.668.422.696	16.229.417.304
06	INSPEKTORAT JENDERAL	43.616.390.000	43.616.390.000	42.001.083.414	67.911.178	41.933.172.236	1.683.217.764
07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	709.671.398.000	734.114.223.000	688.421.116.793	288.690.841	688.132.425.952	45.981.797.048
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	195.297.671.000	140.456.953.000	101.162.549.560	220.035.937	100.942.513.623	39.514.439.377
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	54.638.270.000	53.822.069.000	47.778.833.728	16.169.961	47.762.663.767	6.059.405.233
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.497.099.834.000	6.571.484.341.000	5.920.499.789.115	9.652.547.491	5.910.847.241.624	660.637.099.376
01	SEKRETARIAT JENDERAL	351.974.082.000	360.723.780.000	341.316.639.725	1.555.427.245	339.761.212.480	20.962.567.520



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 397 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
02	INSPEKTORAT JENDERAL	80.431.910.000	80.431.910.000	71.996.468.174	49.892.846	71.946.575.328	8.485.334.672
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	1.729.967.194.000	1.736.467.194.000	1.572.195.099.550	17.556.705	1.572.177.542.845	164.289.651.155
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	141.273.370.000	141.273.370.000	129.612.445.066	264.530.966	129.347.914.100	11.925.455.900
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	364.571.634.000	364.522.073.000	328.615.320.099	654.776.642	327.960.543.457	36.561.529.543
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	57.116.345.000	57.116.345.000	53.034.444.722	32.478.868	53.001.965.854	4.114.379.146
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA	566.950.824.000	597.170.889.000	522.661.972.264	1.581.360.016	521.080.612.248	76.090.276.752
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	439.422.918.000	468.387.223.000	401.866.027.840	200.687.953	401.665.339.887	66.721.883.113
13	BADAN GEOLOGI	859.817.575.000	859.817.575.000	768.439.812.540	1.750.130.681	766.689.681.859	93.127.893.141
14	BPH MIGAS	183.355.740.000	183.355.740.000	168.665.119.443	2.815.068.306	165.850.051.137	17.505.688.863
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.722.218.242.000	1.722.218.242.000	1.562.096.439.692	730.637.263	1.561.365.802.429	160.852.439.571
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	48.203.109.426.000	53.421.412.068.000	45.089.338.310.698	13.596.955.940	45.075.741.354.758	8.345.670.713.242
01	SEKRETARIAT JENDERAL	580.135.964.000	580.135.964.000	528.615.964.573	237.739.480	528.378.225.093	51.757.738.907
02	INSPEKTORAT JENDERAL	106.110.822.000	106.110.822.000	102.739.362.790	407	102.739.362.383	3.371.459.617
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	4.582.007.686.000	4.955.730.267.000	4.480.981.331.387	1.117.314.816	4.479.864.016.571	475.866.250.429
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	11.600.486.955.000	14.417.626.963.000	11.502.150.936.122	5.776.995.262	11.496.373.940.860	2.921.253.022.140
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	9.162.040.051.000	9.177.698.362.000	8.237.595.029.586	5.069.425.334	8.232.525.604.252	945.172.757.748
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	17.296.256.780.000	19.188.457.243.000	15.950.142.348.702	697.117.619	15.949.445.231.083	3.239.012.011.917
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	143.830.906.000	143.830.906.000	131.373.759.530	114.733.692	131.259.025.838	12.571.880.162
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	4.527.496.007.000	4.647.077.286.000	3.958.170.428.242	579.972.879	3.957.590.455.363	689.486.830.637
13	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	204.744.255.000	204.744.255.000	197.569.149.766	3.656.451	197.565.493.315	7.178.761.685
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	40.092.000.000.000	40.493.436.672.000	39.628.185.099.082	195.749.468.186	39.432.435.630.896	1.061.001.041.104
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.768.057.003.000	1.768.495.003.000	1.736.837.028.239	7.704.697.678	1.729.132.330.561	39.362.672.439
02	INSPEKTORAT JENDERAL	192.188.790.000	192.188.790.000	180.649.160.890	8.757.084.465	171.892.076.425	20.296.713.575
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	22.574.237.959.000	22.574.306.076.000	22.240.967.895.310	67.545.999.572	22.173.421.895.738	400.884.180.262
05	DITJEN PAUD-DIKMAS	1.805.463.073.000	2.204.186.491.000	2.116.994.193.921	24.202.081.067	2.092.792.112.854	111.394.378.146
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.154.945.174.000	1.154.945.174.000	1.057.329.653.368	27.731.018.238	1.029.598.635.130	125.346.538.870



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 398 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	396.946.190.000	396.946.190.000	373.105.704.928	2.656.071.806	370.449.633.122	26.496.556.878
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.829.626.560.000	1.831.833.697.000	1.668.966.494.584	8.952.783.832	1.660.013.710.752	171.819.986.248
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.370.535.251.000	10.370.535.251.000	10.253.334.967.842	48.199.731.528	10.205.135.236.314	165.400.014.686
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	59.097.729.214.000	61.864.479.406.000	57.594.527.906.764	245.870.500.087	57.348.657.406.677	4.515.821.999.323
01	SEKRETARIAT JENDERAL	28.165.890.422.000	28.138.096.577.000	27.445.707.938.175	10.095.804.545	27.435.612.133.630	702.484.443.370
02	INSPEKTORAT JENDERAL	119.983.200.000	119.983.200.000	115.696.760.216	2.101.782.611	113.594.977.605	6.388.222.395
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.102.710.381.000	2.114.745.619.000	1.960.859.328.489	6.721.212.981	1.954.138.115.508	160.607.503.492
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	15.388.088.064.000	17.204.700.290.000	15.596.718.755.945	164.103.073.176	15.432.615.682.769	1.772.084.607.231
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	2.723.525.128.000	3.378.571.989.000	3.088.234.861.280	15.755.754.831	3.072.479.106.449	306.092.882.551
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	4.939.179.936.000	5.086.359.848.000	4.194.184.011.909	7.036.646.326	4.187.147.365.583	899.212.482.417
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	909.016.668.000	930.898.816.000	839.842.706.389	11.354.457.680	828.488.248.709	102.410.567.291
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	4.749.335.415.000	4.891.123.067.000	4.353.283.544.361	28.701.767.937	4.324.581.776.424	566.541.290.576
025	KEMENTERIAN AGAMA	62.154.741.091.000	63.848.099.224.000	59.448.952.829.457	67.953.619.190	59.380.999.210.267	4.467.100.013.733
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.220.689.530.000	2.239.867.534.000	2.154.683.181.878	3.600.817.612	2.151.082.364.266	88.785.169.734
02	INSPEKTORAT JENDERAL	153.471.473.000	153.786.179.000	153.699.842.978	646.873.660	153.052.969.318	733.209.682
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5.130.689.599.000	5.184.871.735.000	5.095.007.842.489	6.589.634.834	5.088.418.207.655	96.453.527.345
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	49.089.647.287.000	50.506.369.452.000	46.844.330.704.564	31.811.682.229	46.812.519.022.335	3.693.850.429.665
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.895.576.212.000	1.896.007.498.000	1.647.217.497.257	5.069.803.705	1.642.147.693.552	253.859.804.448
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	911.534.193.000	924.066.292.000	853.683.410.687	3.046.214.568	850.637.196.119	73.429.095.881
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	767.569.592.000	773.353.877.000	702.167.366.704	2.662.740.055	699.504.626.649	73.849.250.351
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	280.422.135.000	280.722.135.000	255.906.254.486	756.725.581	255.149.528.905	25.572.606.095
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	1.085.824.226.000	1.212.308.943.000	1.120.812.837.290	7.552.370.198	1.113.260.467.092	99.048.475.908
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	600.793.776.000	600.793.776.000	557.810.928.865	5.423.205.930	552.387.722.935	48.406.053.065
	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	18.523.068.000	75.951.803.000	63.632.962.259	793.550.818	62.839.411.441	13.112.391.559
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.991.179.304.000	3.994.939.982.000	3.763.306.403.752	8.887.760.911	3.754.418.642.841	240.521.339.159
01	SEKRETARIAT JENDERAL	402.575.082.000	402.575.082.000	367.678.612.919	586.986.959	367.091.625.960	35.483.456.040



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 399 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
02	INSPEKTORAT JENDERAL	60.000.000.000	60.000.000.000	57.703.193.930	363.047.287	57.340.146.643	2.659.853.357
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN TENAGA KERJA	766.681.820.000	766.681.820.000	742.765.840.403	3.316.067.820	739.449.772.583	27.232.047.417
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	184.947.680.000	184.947.680.000	178.774.721.128	1.650.093.026	177.124.628.102	7.823.051.898
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	269.899.804.000	270.620.944.000	257.221.578.944	176.024.543	257.045.554.401	13.575.389.599
11	BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	84.478.298.000	84.478.298.000	81.103.745.047	70.327.402	81.033.417.645	3.444.880.355
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	2.222.596.620.000	2.225.636.158.000	2.078.058.711.381	2.725.213.874	2.075.333.497.507	150.302.660.493
027	KEMENTERIAN SOSIAL	41.295.742.086.000	43.393.136.929.000	41.812.673.205.280	578.530.334.236	41.234.142.871.044	2.158.994.057.956
01	SEKRETARIAT JENDERAL	332.315.654.000	338.089.886.000	328.157.427.301	1.150.979.246	327.006.448.055	11.083.437.945
02	INSPEKTORAT JENDERAL	44.088.417.000	45.999.752.000	44.765.759.155	194.918.421	44.570.840.734	1.428.911.266
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	433.823.251.000	498.505.882.000	483.754.840.015	2.954.151.792	480.800.688.223	17.705.193.777
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1.006.519.857.000	1.025.616.559.000	1.000.638.593.455	8.165.459.237	992.473.134.218	33.143.424.782
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.671.377.420.000	19.668.377.420.000	19.601.013.911.053	48.839.629.896	19.552.174.281.157	116.203.138.843
06	DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN	21.455.112.967.000	21.455.112.967.000	19.999.845.572.910	516.125.955.638	19.483.719.617.272	1.971.393.349.728
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	352.504.520.000	361.434.463.000	354.497.101.391	1.099.240.006	353.397.861.385	8.036.601.615
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	8.025.646.692.000	8.060.961.667.000	7.209.022.019.518	28.087.294.062	7.180.934.725.456	880.026.941.544
01	SEKRETARIAT JENDERAL	603.956.342.000	603.956.342.000	565.103.171.752	1.323.607.748	563.779.564.004	40.176.777.996
02	INSPEKTORAT JENDERAL	66.990.220.000	64.970.525.000	63.914.077.587	639.152.605	63.274.924.982	1.695.600.018
03	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	407.691.364.000	407.691.364.000	396.351.984.476	580.910.190	395.771.074.286	11.920.289.714
04	DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	1.082.474.152.000	1.084.817.437.000	1.035.772.813.261	476.651.104	1.035.296.162.157	49.521.274.843
05	DITJEN KONSERVASI SDA DAN	2.033.159.356.000	2.042.022.621.000	1.949.616.446.166	1.733.059.854	1.947.883.386.312	94.139.234.688
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	1.133.562.466.000	1.100.434.984.000	596.826.976.582	12.675.886.099	584.151.090.483	516.283.893.517
07	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	284.837.618.000	305.445.430.000	300.298.984.649	407.406.757	299.891.577.892	5.553.852.108
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	325.914.960.000	315.433.088.000	308.543.336.145	163.870.707	308.379.465.438	7.053.622.562
09	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMARITIMAN	416.014.975.000	410.420.946.000	375.405.091.036	1.970.815.781	373.434.275.255	36.986.670.745



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 400 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN	372.606.381.000	372.606.381.000	359.143.077.864	1.749.403.148	357.393.674.716	15.212.706.284
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	320.439.911.000	336.780.485.000	328.945.875.137	981.923.543	327.963.951.594	8.816.533.406
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN	278.630.287.000	288.649.982.000	280.703.161.944	315.131.328	280.388.030.616	8.261.951.384
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN	729.369.846.000	727.732.082.000	648.397.022.919	5.069.475.198	643.327.547.721	84.404.534.279
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.287.582.609.000	7.632.526.314.000	6.105.253.866.171	7.883.011.874	6.097.370.854.297	1.535.155.459.703
01	SEKRETARIAT JENDERAL	423.513.361.000	476.784.747.000	416.335.642.729	1.315.503.505	415.020.139.224	61.764.607.776
02	INSPEKTORAT JENDERAL	73.117.458.000	79.016.175.000	77.475.885.703	27.446.605	77.448.439.098	1.567.735.902
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.264.959.688.000	1.279.761.056.000	828.358.250.135	622.365.609	827.735.884.526	452.025.171.474
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	944.857.746.000	969.593.786.000	692.900.840.662	895.487.170	692.005.353.492	277.588.432.508
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN &	813.454.764.000	813.199.676.000	642.987.200.841	818.135.692	642.169.065.149	171.030.610.851
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	785.003.713.000	789.399.807.000	670.199.361.947	1.063.245.690	669.136.116.257	120.263.690.743
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	666.921.318.000	679.122.286.000	429.856.693.160	454.450.037	429.402.243.123	249.720.042.877
12	BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.785.978.817.000	1.966.080.364.000	1.805.320.726.110	2.390.353.582	1.802.930.372.528	163.149.991.472
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL	529.775.744.000	579.568.417.000	541.819.264.884	296.023.984	541.523.240.900	38.045.176.100
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	107.386.317.301.000	115.482.201.310.000	102.576.081.476.774	92.433.024.495	102.483.648.452.279	12.998.552.857.721
01	SEKRETARIAT JENDERAL	600.000.003.000	600.000.003.000	557.090.208.865	828.105.416	556.262.103.449	43.737.899.551
02	INSPEKTORAT JENDERAL	104.974.960.000	104.974.960.000	95.039.545.658	1.151.807.793	93.887.737.865	11.087.222.135
04	DITJEN BINA MARGA	41.673.066.930.000	46.351.969.681.000	40.577.821.877.838	12.776.212.873	40.565.045.664.965	5.786.924.016.035
05	DITJEN CIPTA KARYA	16.109.202.581.000	18.634.190.049.000	17.189.191.579.236	15.667.223.951	17.173.524.355.285	1.460.665.693.715
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	37.309.551.551.000	37.825.259.130.000	32.798.190.041.595	53.954.930.576	32.744.235.111.019	5.081.024.018.981
07	DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN	9.633.756.042.000	9.989.756.042.000	9.502.039.901.578	3.667.234.833	9.498.372.666.745	491.383.375.255
08	DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	261.638.463.000	254.238.463.000	239.356.156.362	320.261.948	239.035.894.414	15.202.568.586
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	611.986.939.000	614.509.139.000	565.040.510.967	1.059.834.108	563.980.676.859	50.528.462.141
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	338.716.396.000	338.716.396.000	335.520.708.440	1.092.134.521	334.428.573.919	4.287.822.081
14	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	248.359.063.000	273.523.074.000	253.691.315.916	1.028.413.666	252.662.902.250	20.860.171.750
15	BADAN PENGEMBANGAN SDM	495.064.373.000	495.064.373.000	463.099.630.319	886.864.810	462.212.765.509	32.851.607.491



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 401 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	283.651.000.000	289.230.376.000	231.821.130.429	143.549.101	231.677.581.328	57.552.794.672
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	283.651.000.000	289.230.376.000	231.821.130.429	143.549.101	231.677.581.328	57.552.794.672
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.427.810.000	453.525.156.000	439.290.655.699	381.610.026	438.909.045.673	14.616.110.327
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	414.427.810.000	453.525.156.000	439.290.655.699	381.610.026	438.909.045.673	14.616.110.327
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	382.103.310.000	382.103.310.000	269.130.210.078	102.034.034	269.028.176.044	113.075.133.956
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	382.103.310.000	382.103.310.000	269.130.210.078	102.034.034	269.028.176.044	113.075.133.956
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	3.733.408.080.000	3.737.618.611.000	3.536.459.181.397	3.485.941.313	3.532.973.240.084	204.645.370.916
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	3.733.408.080.000	3.737.618.611.000	3.536.459.181.397	3.485.941.313	3.532.973.240.084	204.645.370.916
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	247.041.755.000	247.041.755.000	227.626.605.854	178.248.817	227.448.357.037	19.593.397.963
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	247.041.755.000	247.041.755.000	227.626.605.854	178.248.817	227.448.357.037	19.593.397.963
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	41.284.024.119.000	47.325.863.849.000	43.434.297.250.286	196.309.034.386	43.237.988.215.900	4.087.875.633.100
01	SEKRETARIAT JENDERAL	29.825.289.642.000	33.854.058.563.000	30.909.197.168.391	153.095.061.478	30.756.102.106.913	3.097.956.456.087
02	INSPEKTORAT JENDERAL	54.833.402.000	54.833.402.000	51.833.774.961	26.180.357	51.807.594.604	3.025.807.396
03	DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI	1.152.501.579.000	1.176.651.416.000	1.031.809.774.945	4.701.705.850	1.027.108.069.095	149.543.346.905
04	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	6.344.705.887.000	8.242.915.477.000	7.760.663.443.789	23.931.856.034	7.736.731.587.755	506.183.889.245
05	DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI	1.759.261.009.000	1.845.485.105.000	1.578.726.883.186	7.008.620.995	1.571.718.262.191	273.766.842.809
06	DITJEN RISET DAN PENGEMBANGAN	1.848.367.500.000	1.852.854.786.000	1.814.314.550.272	5.147.172.479	1.809.167.377.793	43.687.408.207
07	DITJEN PENGUASAAN INOVASI	299.065.100.000	299.065.100.000	287.751.654.742	2.398.437.193	285.353.217.549	13.711.882.451
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	944.538.384.000	944.538.384.000	858.662.646.931	168.697.991	858.493.948.940	86.044.435.060
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	944.538.384.000	944.538.384.000	858.662.646.931	168.697.991	858.493.948.940	86.044.435.060
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	553.849.035.000	556.170.204.000	520.068.068.348	3.185.518.107	516.882.550.241	39.287.653.759



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 402 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	553.849.035.000	556.170.204.000	520.068.068.348	3.185.518.107	516.882.550.241	39.287.653.759
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	357.366.400.000	357.366.400.000	310.788.654.382	6.825.961.862	303.962.692.520	53.403.707.480
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	357.366.400.000	357.366.400.000	310.788.654.382	6.825.961.862	303.962.692.520	53.403.707.480
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.646.215.000.000	5.682.698.210.000	5.629.110.278.111	535.998.998	5.628.574.279.113	54.123.930.887
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	5.646.215.000.000	5.682.698.210.000	5.629.110.278.111	535.998.998	5.628.574.279.113	54.123.930.887
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	969.255.000.000	969.255.000.000	945.295.710.890	2.898.515.474	942.397.195.416	26.857.804.584
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	969.255.000.000	969.255.000.000	945.295.710.890	2.898.515.474	942.397.195.416	26.857.804.584
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	42.390.000.000	44.629.547.000	40.679.644.586	12.800.000	40.666.844.586	3.962.702.414
01	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL	42.390.000.000	44.629.547.000	40.679.644.586	12.800.000	40.666.844.586	3.962.702.414
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.760.239.963.000	4.777.877.035.000	4.361.146.801.380	6.264.963.894	4.354.881.837.486	422.995.197.514
01	BADAN PUSAT STATISTIK	4.760.239.963.000	4.777.877.035.000	4.361.146.801.380	6.264.963.894	4.354.881.837.486	422.995.197.514
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.994.104.303.000	3.099.723.901.000	2.525.827.844.636	4.499.778.646	2.521.328.065.990	578.395.835.010
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.994.104.303.000	3.099.723.901.000	2.525.827.844.636	4.499.778.646	2.521.328.065.990	578.395.835.010
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	9.065.881.486.000	9.218.317.478.000	7.901.768.207.907	15.235.144.567	7.886.533.063.340	1.331.784.414.660
01	SEKRETARIAT JENDERAL	8.264.324.436.000	8.414.953.927.000	7.207.759.047.511	10.708.195.160	7.197.050.852.351	1.217.903.074.649
02	INSPEKTORAT JENDERAL	13.314.061.000	13.314.061.000	12.883.669.112	328.209.611	12.555.459.501	758.601.499
03	DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	220.906.151.000	220.906.151.000	203.979.065.715	285.641.120	203.693.424.595	17.212.726.405
04	DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN	309.874.469.000	311.680.970.000	240.504.179.684	1.255.933.378	239.248.246.306	72.432.723.694
05	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN	32.278.360.000	32.278.360.000	23.266.122.468	543.075.232	22.723.047.236	9.555.312.764
06	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA	21.149.080.000	21.149.080.000	20.502.371.903	92.834.232	20.409.537.671	739.542.329
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH	13.169.583.000	13.169.583.000	12.295.489.775	81.640.930	12.213.848.845	955.734.155
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGGUNAAN TANAH	177.447.968.000	177.447.968.000	167.803.175.353	1.923.236.082	165.879.939.271	11.568.028.729
09	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA	13.417.378.000	13.417.378.000	12.775.086.386	16.378.822	12.758.707.564	658.670.436
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	584.933.638.000	584.933.638.000	550.689.387.683	127.249.541	550.562.138.142	34.371.499.858



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 403 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	584.933.638.000	584.933.638.000	550.689.387.683	127.249.541	550.562.138.142	34.371.499.858
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.922.660.273.000	5.164.066.055.000	4.904.604.477.051	8.181.466.040	4.896.423.011.011	267.643.043.989
01	SEKRETARIAT JENDERAL	264.760.364.000	272.451.139.000	266.897.770.974	212.075.344	266.685.695.630	5.765.443.370
02	INSPEKTORAT JENDERAL	22.605.960.000	21.605.960.000	20.792.374.859	84.452.962	20.707.921.897	898.038.103
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	855.320.081.000	850.520.081.000	815.596.753.696	1.097.213.289	814.499.540.407	36.020.540.593
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	144.971.236.000	143.971.236.000	138.719.563.909	111.269.492	138.608.294.417	5.362.941.583
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	3.219.800.394.000	3.219.800.394.000	3.027.631.186.097	5.882.697.218	3.021.748.488.879	198.051.905.121
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	220.358.878.000	223.414.117.000	213.370.001.791	661.528.209	212.708.473.582	10.705.643.418
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	194.843.360.000	432.303.128.000	421.596.825.725	132.229.526	421.464.596.199	10.838.531.801
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	95.031.469.792.000	100.611.422.605.000	98.497.727.761.517	373.722.285.194	98.124.005.476.323	2.487.417.128.677
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	95.031.469.792.000	100.611.422.605.000	98.497.727.761.517	373.722.285.194	98.124.005.476.323	2.487.417.128.677
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.173.728.393.000	2.174.979.482.000	1.925.222.862.600	9.961.163.251	1.915.261.699.349	259.717.782.651
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.173.728.393.000	2.174.979.482.000	1.925.222.862.600	9.961.163.251	1.915.261.699.349	259.717.782.651
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	277.698.000.000	288.239.118.000	285.507.748.580	600.821.229	284.906.927.351	3.332.190.649
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	277.698.000.000	288.239.118.000	285.507.748.580	600.821.229	284.906.927.351	3.332.190.649
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	548.229.840.000	548.229.840.000	481.267.825.257	581.200.398	480.686.624.859	67.543.215.141
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	548.229.840.000	548.229.840.000	481.267.825.257	581.200.398	480.686.624.859	67.543.215.141
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.732.033.274.000	1.822.956.981.000	1.695.120.784.730	7.421.045.007	1.687.699.739.723	135.257.241.277
01	PELAKSANA HARIAN BNN	1.732.033.274.000	1.822.956.981.000	1.695.120.784.730	7.421.045.007	1.687.699.739.723	135.257.241.277
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	5.145.253.061.000	5.888.602.212.000	5.480.756.370.561	20.080.012.123	5.460.676.358.438	427.925.853.562
02	INSPEKTORAT JENDERAL KDPDTT	57.060.378.000	63.294.966.000	59.287.452.744	385.301.020	58.902.151.724	4.392.814.276
03	DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.822.670.394.000	3.469.077.267.000	3.204.380.935.104	16.641.485.865	3.187.739.449.239	281.337.817.761
04	DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	332.081.502.000	332.581.502.000	324.581.764.921	7.182.541	324.574.582.380	8.006.919.620
05	DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU	262.792.792.000	262.792.792.000	249.456.802.298	231.874.385	249.224.927.913	13.567.864.087
06	DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	320.060.761.000	320.060.761.000	300.218.911.113	442.293.837	299.776.617.276	20.284.143.724
07	DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN	391.254.350.000	391.254.350.000	372.717.195.410	113.419.689	372.603.775.721	18.650.574.279



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 404 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
08	DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	400.000.000.000	400.000.000.000	367.335.904.928	1.276.118.662	366.059.786.266	33.940.213.734
09	BALITBANG DIKLAT SERTA INFO	280.557.341.000	305.861.891.000	286.261.665.405	343.403.831	285.918.261.574	19.943.629.426
10	SETJEN KEMENDES PDT DAN TRANSMIGRASI	278.775.543.000	343.678.683.000	316.515.738.638	638.932.293	315.876.806.345	27.801.878.655
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.544.784.337.000	5.574.162.165.000	4.316.272.614.677	17.540.687.499	4.298.731.927.178	1.275.430.237.822
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.544.784.337.000	5.574.162.165.000	4.316.272.614.677	17.540.687.499	4.298.731.927.178	1.275.430.237.822
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	86.682.000.000	97.945.574.000	85.370.688.528	814.175.484	84.556.513.044	13.389.060.956
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	86.682.000.000	97.945.574.000	85.370.688.528	814.175.484	84.556.513.044	13.389.060.956
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.702.912.962.000	1.809.763.372.000	1.737.614.377.840	5.414.085.567	1.732.200.292.273	77.563.079.727
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.702.912.962.000	1.809.763.372.000	1.737.614.377.840	5.414.085.567	1.732.200.292.273	77.563.079.727
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.508.650.264.000	24.420.025.341.000	20.870.681.914.609	7.173.092.559	20.863.508.822.050	3.556.516.518.950
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.508.650.264.000	24.420.025.341.000	20.870.681.914.609	7.173.092.559	20.863.508.822.050	3.556.516.518.950
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	321.149.542.000	360.652.908.000	347.497.483.207	823.895.700	346.673.587.507	13.979.320.493
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	321.149.542.000	360.652.908.000	347.497.483.207	823.895.700	346.673.587.507	13.979.320.493
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131.004.000.000	143.869.148.000	138.184.611.547	295.954.979	137.888.656.568	5.980.491.432
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	131.004.000.000	143.869.148.000	138.184.611.547	295.954.979	137.888.656.568	5.980.491.432
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.416.726.219.000	1.387.313.742.000	1.321.858.447.614	2.133.768.506	1.319.724.679.108	67.589.062.892
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.416.726.219.000	1.387.313.742.000	1.321.858.447.614	2.133.768.506	1.319.724.679.108	67.589.062.892
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	898.552.331.000	899.463.709.000	819.035.218.263	610.108.785	818.425.109.478	81.038.599.522
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	898.552.331.000	899.463.709.000	819.035.218.263	610.108.785	818.425.109.478	81.038.599.522
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.189.258.353.000	1.269.989.695.000	1.185.841.899.987	1.252.696.333	1.184.589.203.654	85.400.491.346
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.189.258.353.000	1.269.989.695.000	1.185.841.899.987	1.252.696.333	1.184.589.203.654	85.400.491.346
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	827.075.267.000	852.637.368.000	805.545.005.671	424.550.051	805.120.455.620	47.516.912.380
01	L A P A N	827.075.267.000	852.637.368.000	805.545.005.671	424.550.051	805.120.455.620	47.516.912.380
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	790.877.075.000	796.117.205.000	701.550.122.662	5.068.068.263	696.482.054.399	99.635.150.601
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	790.877.075.000	796.117.205.000	701.550.122.662	5.068.068.263	696.482.054.399	99.635.150.601
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	182.465.697.000	183.641.416.000	177.987.242.239	126.427.159	177.860.815.080	5.780.600.920



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 405 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	182.465.697.000	183.641.416.000	177.987.242.239	126.427.159	177.860.815.080	5.780.600.920
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	177.868.325.000	177.868.325.000	167.511.272.515	1.390.385.188	166.120.887.327	11.747.437.673
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	177.868.325.000	177.868.325.000	167.511.272.515	1.390.385.188	166.120.887.327	11.747.437.673
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	291.891.512.000	333.486.408.000	321.005.310.663	181.914.865	320.823.395.798	12.663.012.202
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	291.891.512.000	333.486.408.000	321.005.310.663	181.914.865	320.823.395.798	12.663.012.202
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	195.514.015.000	195.514.015.000	190.711.584.773	853.883.752	189.857.701.021	5.656.313.979
01	ARSIP NASIONAL	195.514.015.000	195.514.015.000	190.711.584.773	853.883.752	189.857.701.021	5.656.313.979
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	654.926.411.000	1.073.369.802.000	979.109.694.360	1.821.965.081	977.287.729.279	96.082.072.721
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	654.926.411.000	1.073.369.802.000	979.109.694.360	1.821.965.081	977.287.729.279	96.082.072.721
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.451.983.609.000	1.608.453.127.000	1.557.552.570.481	1.891.576.299	1.555.660.994.182	52.792.132.818
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.451.983.609.000	1.608.453.127.000	1.557.552.570.481	1.891.576.299	1.555.660.994.182	52.792.132.818
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.534.508.009.000	4.209.118.299.000	3.707.309.987.567	5.480.724.296	3.701.829.263.271	507.289.035.729
01	SEKRETARIAT JENDERAL	720.530.123.000	728.169.077.000	673.414.380.351	810.875.559	672.803.504.792	55.565.572.208
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.982.444.315.000	2.633.509.949.000	2.248.027.681.364	2.314.110.497	2.245.713.570.867	387.796.378.133
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	150.000.000.000	155.071.952.000	143.401.208.668	390.481.576	143.010.727.092	12.061.224.908
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	148.887.001.000	148.887.001.000	134.075.343.999	528.970.752	133.546.373.247	15.340.627.753
05	INSPEKTORAT JENDERAL	44.500.000.000	44.500.000.000	42.411.000.199	137.768.042	42.273.232.157	2.226.767.843
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	155.463.929.000	153.463.929.000	134.465.419.564	31.335.320	134.434.084.244	19.029.844.756
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	70.426.317.000	70.426.317.000	61.602.478.255	334.069.197	61.268.409.058	9.157.907.942
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	37.256.324.000	36.456.324.000	35.755.656.344	28.885.696	35.726.770.648	729.553.352
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	225.000.000.000	238.633.750.000	234.156.818.823	904.227.657	233.252.591.166	5.381.158.834
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.037.540.061.000	9.434.847.434.000	8.780.146.426.268	81.360.031.747	8.698.786.394.521	736.061.039.479
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.037.540.061.000	9.434.847.434.000	8.780.146.426.268	81.360.031.747	8.698.786.394.521	736.061.039.479
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	790.170.548.000	854.230.815.000	815.517.828.298	2.348.286.272	813.169.542.026	41.061.272.974
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	790.170.548.000	854.230.815.000	815.517.828.298	2.348.286.272	813.169.542.026	41.061.272.974
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.082.392.940.000	1.082.392.940.000	1.044.129.083.918	15.382.109.501	1.028.746.974.417	53.645.965.583



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 406 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	230.297.694.000	230.297.694.000	208.378.443.320	460.470.701	207.917.972.619	22.379.721.381
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	852.095.246.000	852.095.246.000	835.750.640.598	14.921.638.800	820.829.001.798	31.266.244.202
100	KOMISI YUDISIAL RI	114.860.602.000	122.421.071.000	121.656.698.841	45.314.455	121.611.384.386	809.686.614
01	KOMISI YUDISIAL RI	114.860.602.000	122.421.071.000	121.656.698.841	45.314.455	121.611.384.386	809.686.614
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	749.380.299.000	7.192.186.163.000	7.113.492.996.337	8.782.882.614	7.104.710.113.723	87.476.049.277
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	749.380.299.000	7.192.186.163.000	7.113.492.996.337	8.782.882.614	7.104.710.113.723	87.476.049.277
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	396.160.715.000	396.160.715.000	373.809.752.897	971.113.608	372.838.639.289	23.322.075.711
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	396.160.715.000	396.160.715.000	373.809.752.897	971.113.608	372.838.639.289	23.322.075.711
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	224.809.272.000	224.809.272.000	208.544.893.194	3.709.997.577	204.834.895.617	19.974.376.383
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	224.809.272.000	224.809.272.000	208.544.893.194	3.709.997.577	204.834.895.617	19.974.376.383
107	BADAN SAR NASIONAL	2.235.099.560.000	2.235.099.560.000	2.182.072.292.448	554.670.639	2.181.517.621.809	53.581.938.191
01	BADAN SAR NASIONAL	2.235.099.560.000	2.235.099.560.000	2.182.072.292.448	554.670.639	2.181.517.621.809	53.581.938.191
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134.795.052.000	134.795.052.000	129.420.999.925	917.313.339	128.503.686.586	6.291.365.414
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	134.795.052.000	134.795.052.000	129.420.999.925	917.313.339	128.503.686.586	6.291.365.414
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	242.479.384.000	242.479.384.000	227.100.041.047	23.669.000	227.076.372.047	15.403.011.953
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	242.479.384.000	242.479.384.000	227.100.041.047	23.669.000	227.076.372.047	15.403.011.953
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	148.125.006.000	151.839.556.000	149.081.347.788	1.493.039.087	147.588.308.701	4.251.247.299
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	148.125.006.000	151.839.556.000	149.081.347.788	1.493.039.087	147.588.308.701	4.251.247.299
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	203.542.280.000	203.542.280.000	175.192.633.979	900.427.802	174.292.206.177	29.250.073.823
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	203.542.280.000	203.542.280.000	175.192.633.979	900.427.802	174.292.206.177	29.250.073.823
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2.046.159.533.000	2.046.159.533.000	1.368.887.676.077	-	1.368.887.676.077	677.271.856.923
01	BPKPB BATAM	2.046.159.533.000	2.046.159.533.000	1.368.887.676.077	-	1.368.887.676.077	677.271.856.923
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	505.586.324.000	543.733.483.000	538.263.765.143	1.862.709.257	536.401.055.886	7.332.427.114
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	505.586.324.000	543.733.483.000	538.263.765.143	1.862.709.257	536.401.055.886	7.332.427.114
114	SEKRETARIAT KABINET	230.475.029.000	353.401.987.000	299.257.700.308	1.456.315.174	297.801.385.134	55.600.601.866



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 407 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	APBN	DIPA	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) DIPA
01	SEKRETARIAT KABINET	230.475.029.000	353.401.987.000	299.257.700.308	1.456.315.174	297.801.385.134	55.600.601.866
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	5.568.195.464.000	9.677.351.776.000	7.759.947.900.291	11.064.341.200	7.748.883.559.091	1.928.468.216.909
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	5.568.195.464.000	9.677.351.776.000	7.759.947.900.291	11.064.341.200	7.748.883.559.091	1.928.468.216.909
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	958.068.760.000	1.039.091.672.000	981.814.649.376	512.776.759	981.301.872.617	57.789.799.383
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	958.068.760.000	1.039.091.672.000	981.814.649.376	512.776.759	981.301.872.617	57.789.799.383
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	838.896.336.000	959.367.584.000	905.705.614.304	297.222.395	905.408.391.909	53.959.192.091
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	838.896.336.000	959.367.584.000	905.705.614.304	297.222.395	905.408.391.909	53.959.192.091
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	224.864.020.000	224.864.020.000	152.957.668.389	23.375.000	152.934.293.389	71.929.726.611
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	224.864.020.000	224.864.020.000	152.957.668.389	23.375.000	152.934.293.389	71.929.726.611
119	BADAN KEAMANAN LAUT	558.997.000.000	558.997.000.000	542.879.018.283	193.697.750	542.685.320.533	16.311.679.467
01	BADAN KEAMANAN LAUT	558.997.000.000	558.997.000.000	542.879.018.283	193.697.750	542.685.320.533	16.311.679.467
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	300.306.844.000	300.306.844.000	278.233.537.674	4.356.452.259	273.877.085.415	26.429.758.585
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	300.306.844.000	300.306.844.000	278.233.537.674	4.356.452.259	273.877.085.415	26.429.758.585
121	BADAN EKONOMI KREATIF	746.158.140.000	746.158.140.000	662.082.772.527	5.959.145.628	656.123.626.899	90.034.513.101
01	SEKRETARIAT BADAN EKONOMI KREATIF	746.158.140.000	746.158.140.000	662.082.772.527	5.959.145.628	656.123.626.899	90.034.513.101
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	607.059.203.577.000	623.808.784.256.000	608.763.240.084.018		608.763.240.084.018	15.045.544.171.982
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	238.607.121.370.000	264.850.500.000.000	257.952.028.141.279		257.952.028.141.279	6.898.471.858.721
02	PENGELOLA HIBAH	1.460.845.703.000	1.988.620.314.000	1.520.560.988.285		1.520.560.988.285	468.059.325.715
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	156.228.125.107.000	223.590.040.996.000	216.883.304.115.301		216.883.304.115.301	6.706.736.880.699
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	100.422.042.713.000	15.472.570.425.000	15.075.455.517.087		15.075.455.517.087	397.114.907.913
99	TRANSAKSI KHUSUS	110.341.068.684.000	117.907.052.521.000	117.331.891.322.066		117.331.891.322.066	575.161.198.934
XXX XX						(222) (222)	
	JUMLAH	1.454.494.390.020.000	1.547.176.957.250.000	1.459.294.959.016.680	3.970.079.789.065	1.455.324.879.227.620	91.852.078.022.383



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 408 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	86.170.975.942	778.454.510.584	34.378.811.802						899.004.298.328
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.016.368.546.497	3.409.935.811.365	177.368.162.618						4.603.672.520.480
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.935.394.391.927	1.471.421.078.750	136.781.298.336						3.543.596.769.013
005	MAHKAMAH AGUNG	6.494.938.953.632	1.350.195.992.537	578.283.768.457						8.423.418.714.626
006	KEJAKSAAN RI	3.214.731.010.681	1.535.817.457.629	1.368.240.118.074						6.118.788.586.384
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	463.202.827.345	1.614.243.792.772	252.884.656.876						2.330.331.276.993
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	747.258.581.185	2.180.307.294.836	147.709.097.610						3.075.274.973.631
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.373.674.823.399	3.191.882.183.199	978.211.269.324						7.543.768.275.922
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	45.402.355.204.242	42.136.175.243.332	19.141.896.795.971						106.680.427.243.545
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI									
		6.306.574.297.290	4.489.360.521.766	1.845.754.684.471						12.641.689.503.527
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	20.361.276.169.489	17.744.369.417.285	1.794.822.501.911						39.900.468.088.665
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.430.897.301.335	18.536.529.810.452	869.175.725.907						21.836.602.837.694
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	683.586.736.719	1.498.565.789.721	445.957.576.454						2.628.110.102.894
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
		885.922.266.994	3.719.806.773.617	1.305.118.201.013						5.910.847.241.624
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.535.208.820.295	14.458.084.323.975	27.082.448.210.488						45.075.741.354.758
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.345.622.015.736	20.020.060.946.049	1.015.169.213.941				10.051.583.455.170		39.432.435.630.896
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.016.492.763.916	23.989.406.062.646	2.850.715.434.115				25.492.043.146.000		57.348.657.406.677
025	KEMENTERIAN AGAMA	35.772.161.121.423	18.041.375.535.542	4.050.707.389.362				1.516.755.163.940		59.380.989.210.267
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	402.989.197.496	2.585.580.220.182	765.849.225.163						3.754.418.642.841
027	KEMENTERIAN SOSIAL	471.787.790.216	3.472.332.616.879	134.171.280.952				37.155.851.182.997		41.234.142.871.044
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.917.981.838.419	4.589.002.842.831	673.950.044.206						7.180.934.725.456
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.842.935.277.585	3.477.393.598.803	777.041.977.909						6.097.370.854.297
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	2.631.721.467.832	29.618.990.691.437	70.232.936.293.010						102.483.648.452.279



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 409 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	57.070.605.464	168.783.435.937	5.823.539.927						231.677.581.328
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	90.734.621.345	339.235.959.903	8.938.464.425						438.909.045.673
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PMK	54.982.570.007	209.598.759.707	4.446.846.330						269.028.176.044
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	261.305.732.625	2.836.476.913.348	435.190.594.111						3.532.973.240.084
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	48.701.098.828	125.054.565.466	53.692.692.743						227.448.357.037
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	13.280.875.215.715	20.135.797.396.410	6.120.933.623.976				3.700.381.979.799		43.237.988.215.900
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	102.839.304.644	679.107.896.509	76.546.747.787						858.493.948.940
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39.627.029.366	474.959.429.117	2.296.091.758						516.882.550.241
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	71.852.712.173	209.700.342.475	22.409.637.872						303.962.692.520
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	277.795.577.797	2.220.809.029.416	3.129.969.671.900						5.628.574.279.113
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	120.526.940.891	272.968.696.120	548.901.558.405						942.397.195.416
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	20.697.566.925	19.969.277.661							40.666.844.586
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.995.459.018.043	2.009.571.195.781	349.851.623.662						4.354.881.837.486
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	155.691.045.921	2.306.280.180.629	59.356.839.440						2.521.328.065.990
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.042.764.441.246	5.199.330.912.447	644.437.709.647						7.886.533.063.340
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	84.674.548.185	335.312.296.970	130.575.292.987						550.562.138.142
059	KEMENTERIAN KOMINFO	400.706.908.212	4.265.388.630.083	230.327.472.716						4.896.423.011.011
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	46.682.847.953.298	23.501.312.948.373	27.959.844.574.652						98.124.005.476.323



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 410 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	475.778.964.428	948.943.275.024	490.539.459.897						1.915.261.699.349
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	73.231.063.843	112.992.029.422	98.683.834.086						284.906.927.351
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	124.417.949.241	336.423.267.240	19.845.408.378						480.686.624.859
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	476.917.743.154	846.839.556.022	363.942.440.547						1.687.699.739.723
067	KEMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	214.433.233.366	4.972.694.878.931	273.548.246.141						5.460.676.358.438
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.094.883.187.414	2.112.777.623.516	91.071.116.248						4.298.731.927.178
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	28.014.240.738	55.085.536.118	1.456.736.188						84.556.513.044
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	525.403.077.382	677.493.384.294	529.303.830.597						1.732.200.292.273
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.216.398.024.288	19.164.482.104.500	482.628.693.262						20.863.508.822.050
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	54.993.364.719	259.362.392.383	32.317.830.405						346.673.587.507
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	69.628.280.061	54.644.073.748	13.616.302.759						137.888.656.568
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	565.048.392.044	397.698.885.343	356.977.401.721						1.319.724.679.108
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	355.040.869.883	212.129.033.912	251.255.205.683						818.425.109.478
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	433.364.546.467	458.606.070.691	292.618.586.496						1.184.589.203.654
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	148.180.497.320	196.066.274.249	460.873.684.051						805.120.455.620
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	75.374.738.737	193.304.567.250	427.802.748.412						696.482.054.399
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	44.452.555.128	82.234.465.575	51.173.794.377						177.860.815.080
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	55.696.579.799	94.970.158.662	15.454.148.866						166.120.887.327
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	143.220.123.815	158.026.429.851	19.576.842.132						320.823.395.798
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	84.018.523.695	83.934.300.921	21.904.876.405						189.857.701.021
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	329.074.850.118	556.843.766.590	91.369.112.571						977.287.729.279



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 411 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	951.831.224.384	516.715.633.145	87.114.136.653						1.555.660.994.182
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	460.861.789.263	3.137.150.750.100	103.816.723.908						3.701.829.263.271
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	87.726.417.414	8.448.512.695.106	162.547.282.001						8.698.786.394.521
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	490.672.001.007	245.226.446.228	77.271.094.791						813.169.542.026
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	312.527.851.130	704.386.974.978	11.832.148.309						1.028.746.974.417
100	KOMISI YUDISIAL RI	33.621.815.707	85.284.151.512	2.705.417.167						121.611.384.386
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	54.597.022.631	610.918.724.851	37.396.374.634				6.401.797.991.607		7.104.710.113.723
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	109.433.463.778	246.607.285.192	16.797.890.319						372.838.639.289
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	30.227.197.503	153.087.574.146	21.520.123.968						204.834.895.617
107	BADAN SAR NASIONAL	347.514.628.106	732.925.771.550	1.101.077.222.153						2.181.517.621.809
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	33.293.682.974	89.765.326.011	5.444.677.601						128.503.686.586
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	10.209.471.000	36.235.102.811	180.631.798.236						227.076.372.047
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	59.982.337.390	84.234.512.644	3.371.458.667						147.588.308.701
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	24.043.127.236	144.097.507.091	6.151.571.850						174.292.206.177
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM		929.162.671.613	439.725.004.464						1.368.887.676.077
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	22.882.584.473	424.376.325.378	89.142.146.035						536.401.055.886
114	SEKRETARIAT KABINET	179.679.363.692	113.211.835.738	4.910.185.704						297.801.385.134
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	72.208.953.199	7.477.667.982.023	199.006.623.869						7.748.883.559.091



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 412 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.B

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018 (Audited)**

(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Belanja Lain-lain 58	Total Belanja
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	577.433.477.279	287.004.579.118	116.863.816.220						981.301.872.617
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	309.492.066.577	464.242.653.477	131.673.671.855						905.408.391.909
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		39.447.350.289	113.486.943.100						152.934.293.389
119	BADAN KEAMANAN LAUT	44.718.264.750	138.747.622.217	359.219.433.566						542.685.320.533
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	34.838.040.911	222.251.602.285	16.787.442.219						273.877.085.415
121	BADAN EKONOMI KREATIF	19.634.556.304	626.449.877.142	10.039.193.453						656.123.626.899
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	115.927.310.196.440	316.191.097.283		257.952.028.141.279	216.883.304.115.301	1.520.560.988.285		16.163.845.545.430	608.763.240.084.018
	PERBEDAAN PENCATATAN ANTARA BUN DAN SAI									
	JUMLAH	346.890.715.609.048,00	347.468.404.508.711,00	184.127.607.400.272,00	257.952.028.141.279,00	216.883.304.115.301,00	1.520.560.988.285,00	84.318.412.919.513,00	16.163.845.545.430,00	1.455.324.879.227.840,00
	Persentase Per Jenis Belanja	23,84%	23,88%	12,65%	17,72%	14,90%	0,10%	5,79%	1,11%	100,00%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 413 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No	LK PLN	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jenis Belanja Pada Tahun 2018 (Rp/jah)				Rencana (Rp/jah)				Kewajiban	Kewajiban/Kelebihan sebagaiExecuting Agency	Pemerikss (BPK/BPKP/NAP)		
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban					
1	LK PLN 1	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (Phase II)	World Bank (IBRD)	WISMP II	IBRD 0027 ID	10837161	06 October 2011	06 October 2011	31 Juli 2018	IDR	65 952 480 000	54 508 181 818	9 550 804 426		9 550 804 426								PUPR	BPK dan BPKP	
2	LK PLN 2	Second Additional Financing For The Water Supply And Sanitation For Low-income Communities / Community Based Water Supply Project	Bank Dunia (World Bank)	PAMSIMAS III	IBRD LOAN No 8578 ID	1NPS3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2020	IDR	26 778 000 000	6 248 000 000	8 962 144 753		8 962 144 753								Ditjen Cipta Karya (KemenPUPR)	BPKP	
3	LK PLN 3	Asean Development Bank Ordinary Fund	ADB	Flood Management In Selected River Basins (FMSRB)	3440 INO	IRUK7NCA	02 November 2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108 700 000	8 268 288 905	15 155 070 803		15 155 070 803					243 648 805			Ditjen SDA, KemenPUPR	BPK	
4	LK PLN 4	Asean Development Bank Ordinary Fund	ADB	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program	3528 INO dan 8327 INO (AIF)	1883YQPA dan 1100K81A	31 Juli 2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	600 000 000		17 425 523 167		17 425 523 167								Ditjen SDA, KemenPUPR	BPK	
5	LK PLN 5	Construction of Kanan Multipurpose Dam Project	Korea	Construction of Kanan Multipurpose Dam Project	INA 19	21854001	22 Desember 2012	14 Februari 2012	14 Februari 2019	USD	100 000 000	36 750 870	159 201 503 218		159 201 503 218					159 201 503 218			Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
6	LK PLN 6	Emission Reduction in Cities Solid Waste Management	KfW Jerman	Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management	BMZ 201066471	21867101	02 Mei 2013	02 Mei 2013	06 Juni 2018	EUR	75 000 000	2 937 770	121 180 147 115		121 180 147 115								Ditjen Cipta Karya	BPKP	
7	LK PLN 7	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	Deutsche Bank Spanyol	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	LA 21 06 2016	12PKKNIA	21 Juni 2016	02 Agustus 2016	31 Agustus 2018	EUR	6 978 738	2 010 753	56 874 821 486		56 874 821 486						56 874 821 486		Ditjen Cipta Karya	BPKP	
8	LK PLN 8	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	ICO Spanyol	Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief (SSWTP-ER)	ONI-00805-023 T	16NMNYFA	21 Juni 2016	02 Agustus 2016	31 Agustus 2018	EUR	6 978 738		45 344 434 060		45 344 434 060						45 344 434 060		Ditjen Cipta Karya	BPKP	
9	LK PLN 9	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	Hongaria	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Area	HS00216000	15PR17RA	20 Mei 2016	01 Agustus 2016	03 Agustus 2020	USD	36 443 330	10 175 513	228 838 526 883		228 838 526 883								Ditjen Cipta Karya	BPKP	
10	LK PLN 10	Toll Road Development of Solo-Kertosono (Saradan - Kertosono Section) Phase I	China	Toll Road Development of Solo Kertosono (Saradan - Kertosono Section) Phase I	PRC No (2015) 38 TOTAL 382	1M2JG1EA	29 Desember 2015	30 September 2016	30 September 2021	USD	198 772 235	59 484 384	1 277 232 416 424		1 277 232 416 424							1 277 232 416 424		Ditjen Bina Marga	BPKP
11	LK PLN 11	Toll Road Development of Balikpapan Samarinda	China	Toll Road Development of Balikpapan Samarinda	PRC No (2015) 42 TOTAL 385	1VMMBHYA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	53 405 756	6 989 786	170 327 485 551		170 327 485 551							170 327 485 551		Ditjen Bina Marga	BPKP
12	LK PLN 12	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan Sumedang Phase II	China	Toll Road Development of Cileunyi-Dawuan Sumedang Phase II	PRC No (2016) 01 TOTAL 389	1RVNVDTA	13 Juni 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	219 398 580	37 332 912	884 521 696 280		884 521 696 280							884 521 696 280		Ditjen Bina Marga	BPKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 414 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No	LK/PLN	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jumlah Belanja Pada Tahun 2018 (Rp/pech)				Neraca (Rp/pech)				Kewajiban/Umbara sebagai Escrowed Agency	Pemeriksa (DPK/BPKP/KAP)		
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban				
13	LK/PLN 13	Toll Road Development of Manado-Bitung	China	Toll Road Development of Manado-Bitung	PBC No (2016) 07 TOTAL 395	1UG6AGFA	13 Jun 2016	30 September 2016	30 September 2021	USD	78 099 983	12 000 500	552 071 906 582			552 071 906 582						Ditjen Bina Marga	BPKP	
14	LK/PLN 14	Toll Road Development of Medan - Kualanamu Project	China	Toll Road Development of Medan - Kualanamu Project	PBC No (2012) 44 TOTAL 232	21663301	12 November 2012	11 Maret 2013	11 Maret 2018	USD	122 428 814	85 058 710	368 392 154 284			368 392 154 284						Ditjen Bina Marga	BPKP	
15	LK/PLN 15	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	IP-551	21618401	31/03/2009	28 Juli 2009	28 Desember 2018	JPY	7 480 000 000	5 944 901 403	59 730 101 262			59 730 101 262						Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
16	LK/PLN 16	Countermeasure for Sediment in Wonorejo Multipurpose Dam Reservoir (I)	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonorejo Multipurpose Dam Reservoir (I)	IP 552	21617101	31 Maret 2009	28/07/2009	28/07/2018	JPY	8 080 000 000	5 287 388 327	16 460 370 121			16 460 370 121						Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
17	LK/PLN 17	Upper Citarum Basin Flood Management Sector Loan	JICA	Upper Citarum Basin Flood Management Sector Loan	IP 558	21668901	28/03/2013	25 Juli 2013	25 Juli 2020	JPY	3 311 000 000	782 523 087	34 178 834 597			34 178 834 597						Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
18	LK/PLN 18	Urgent Disaster Reduction Project for Mt.Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	JICA	Urgent Disaster Reduction Project for Mt.Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	IP 566	21682601	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	5 111 000 000	3 545 288 185	58 285 043 476			58 285 043 476						Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
19	LK/PLN 19	Countermeasure for Sediment in Wonorejo Multipurpose Dam Reservoir (II)	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonorejo Multipurpose Dam Reservoir (II)	IP 557	21684001	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	4 854 000 000	556 143 418	88,315 131 871		7 669 904 250	81 645 227 621		7 669 904 250	81 645 227 621				Ditjen Sumber Daya Air	BPKP
20	LK/PLN 20	Rehling Irrigation Modernization Project (RIMP)	JICA	Rehling Irrigation Modernization Project (RIMP)	IP 573	1HJMS8A	30/03/2017	27 Juli 2017	27 Juli 2026	JPY	48 237 000 000											Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
21	LK/PLN 21	Komereng Irrigation Project Stage III	JICA	Komereng Irrigation Project Stage III	IP-574	1SVVA82A	30/03/2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	15 886 000 000											Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
22	LK/PLN 22	Bali Beach Conservation Project II Komponen Ditjen SDA	JICA	Bali Beach Conservation Project II Komponen Ditjen SDA	IP-575	17HCS2YA	30/03/2017	27 Juli 2017	27 Juli 2025	JPY	8 855 000 000											Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
23	LK/PLN 23	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II)	JICA	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE II)	IP 584	216881901	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2018	JPY	10 029 000 000	9 554 358 849										Ditjen Cipta Karya	BPKP	
24	LK/PLN 24	Metropolitan Sanitation Management Investment Program Engineering Service for Sewerage System Development in DKI Jakarta	JICA	Metropolitan Sanitation Management Investment Program Engineering Service for Sewerage System Development in DKI Jakarta	IP 585	21683301	24/02/2014	23 Juni 2014	23 Juni 2021	JPY	1,968 000 000	147 853 878	54 811,395 418			54 811 395 418						Ditjen Cipta Karya	BPKP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 415 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No	LK/PLN	PILN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jenis Belanja Pada Tahun 2018 (Rp/juta)				Rencana (Rp/juta)				Kementerian/Lembaga selaku Eselon/Instansi Agency	Pemerintah (BPK/BNP/KAP)		
													Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban				
25	LK/PLN 25	Patihan Port Development Project (I)	JICA	Patihan Port Development Project (I)	IP 577	1AVH2LAA	15/11/2017	13 Maret 2018	13 Maret 2028	JPY	11 535 000 000	147 365 517 243			147 365 517 243						Ditjen Bina Marga	BPKP		
26	LK/PLN 26	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	3455-IND	1FINDHGA	28/11/2016	21 Desember 2016	30 Juni 2020	USD	148 200 000	1 031 941	30 821 829 528	14 531 889 486	16 380 140 042						16 380 140 042		Sekretariat Jenderal	BPK
27	LK/PLN 27	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	ADB	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	3440-IND	1RUX78CA	02/11/2016	09 Desember 2016	30 Juni 2023	USD	108 700 000	2 000 000	89 331 208 000	162 836 100	89 188 271 900						89 188 271 900		Ditjen Sumber Daya Air	BPK
28	LK/PLN 28	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	IFAD	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	2000001445	1116F8FA	13 Februari 2017	13 Februari 2017	30 September 2023	EUR	93 150 000											Ditjen Sumber Daya Air	BPKP	
29	LK/PLN 29	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	ADB OCR	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	3520-IND	1283Y0PA	31/07/2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	500 000 000		88 551 329 480	17 835 483 373	50 715 840 107		248 415 445				50 715 840 107		Ditjen Sumber Daya Air	BPK
30	LK/PLN 30	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	ADB AIF	Integrated Participatory Development and management of Irrigation Project (IPDMIP)	8327-IND (AIF)	110DKS1A	31/07/2017	08 September 2017	30 Juni 2023	USD	100 000 000		13 967 728 431	3 898 311 213	10 068 418 218		46 953 575				10 068 418 218		Ditjen Sumber Daya Air	BPK
31	LK/PLN 31	Regional Road Development (RRDP)	ADB	Regional Road Development (RRDP)	2817-IND	10846401	07 Mei 2018	05 Agustus 2012	30/11/2018	USD	180 000 000	131 988 879	385 140 103 365	10 759 289 193	354 380 804 172						354 380 804 172		Ditjen Bina Marga	BPK
32	LK/PLN 32	Regional Road Development (RRDP)	IDB	Regional Road Development (RRDP)	IND 161	10848801	17/04/2012	28 April 2013	10 Juni 2019	USD	65 000 000	23 852 315	154 347 186 228		154 347 186 228						154 347 186 228		Ditjen Bina Marga	BPKP
33	LK/PLN 33	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	2854-IND	10811901	21/01/2010	22 November 2010	31 Desember 2020	USD	35 000 000	22 084 024										Ditjen Cipta Karya	BPK	
34	LK/PLN 34	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) Ordinary Operations	ADB OCR	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) Ordinary Operations	3123-IND	10883301	13/05/2014	09 Juli 2014	31 Desember 2020	USD	80 000 000	1 648 282	15 437 864 905		15 437 864 905						15 437 864 905		Ditjen Cipta Karya	BPK
35	LK/PLN 35	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) AIF	ADB AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) AIF	8280-IND (AIF)	10884001	13/05/2015	09 Juli 2014	31 Desember 2020	USD	40 000 000											Ditjen Cipta Karya	BPK	
36	LK/PLN 36	Nasional Slum Upgrading Project (Service Jara)	IDB	Nasional Slum Upgrading Project (Service Jara)	IND 174	1VFXS7JA	19/05/2016	18 September 2016	04 Mei 2021	USD	8 000 000	2 000 000	9 828 555 605		9 828 555 605							Ditjen Cipta Karya	BPKP	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 416 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No	PLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jenis Belanja Pada Tahun 2018 (Rp/tdr)				Rencana (Rp/tdr)				Kontribusi/Umpan balikExecuting Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	
												Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lala	Kewajiban			
37	LK PLN 37	National Slum Upgrading Project (Isthana financing)	National Slum Upgrading Project (Isthana financing)	IND 175	1ENTRFA	18/05/2017	18 September 2016	09 Mei 2021	USD 311.760.000	71.911.000	874.672.705.842		874.672.705.842								Ditjen Cipta Karya	BPKP
38	LK PLN 38	National Slum Upgrading Project (ISFD Loan)	National Slum Upgrading Project (ISFD Loan)	IND 176	1INT81PXA	19/05/2018	18 September 2016	22 November 2021	USD 10.000.000	689.552											Ditjen Cipta Karya	BPKP
39	LK PLN 39	Community Based Sanitation Program (SANMAS PROJECT)	Community Based Sanitation Program (SANMAS PROJECT)	IND 167	10880201	19/02/2014	12 Jun 2015	12 Jun 2020	USD 100.000.000	38.337.813	179.138.390.249		179.138.390.249			3.740.055.885					Ditjen Cipta Karya	BPKP
40	LK PLN 40	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	31224ND	10882601	23/04/2014	17 Jul 2014	31 Desember 2019	USD 74.400.000	56.225.088	203.882.090.188		140.728.467.858				63.253.822.330				Ditjen Cipta Karya	BPK
41	LK PLN 41	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Jawa)	Construction Development of Trans South South Java Road Project (Jawa)	IDN 1012	1SMHNPXA	16/05/2017	07 November 2017	14 Agustus 2022	USD 15.000.000												Ditjen Bina Marga	BPKP
42	LK PLN 42	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP II)	Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP II)	80274D	10837101	08 Oktober 2011	04 November 2011	31 Mei 2018	USD 150.000.000	108.745.178	54.750.481.308		23.000.588.540		31.749.921.768		37.207.580		234.258.875	31.515.861.883	Ditjen Sumber Daya Air	BPK
43	LK PLN 43	Jakarta urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	Jakarta urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	81214D	10845701	17 Februari 2012	08 Agustus 2012	28 Februari 2019	USD 139.640.000	87.021.321	105.380.778.288		484.502.800		104.806.276.488		69.542.800		104.806.276.488		Ditjen Sumber Daya Air	BPK
44	LK PLN 44	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	87114D	1227L6XA	09 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Jun 2023	USD 125.000.000	3.926.747	85.778.222.274		47.161.925.645		38.617.296.828		56.512.800		31.836.063.547	8.781.233.082	Ditjen Sumber Daya Air	BPK
45	LK PLN 45	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)	LN000010 14DN	1XH37LXA	08 Mei 2017	04 Agustus 2017	30 Jun 2023	USD 125.000.000	3.926.747	85.755.483.981		47.138.187.382		38.617.296.828		56.512.800		31.836.063.547	8.781.233.082	Ditjen Sumber Daya Air	BPKP
46	LK PLN 46	Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)	Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP)	80434D	10842801	14 Desember 2011	13 Maret 2012	28 Februari 2021	USD 250.000.000	156.080.189	526.281.255.242		745.841.818		525.535.413.323				525.535.413.323		Ditjen Bina Marga	BPK
47	LK PLN 47	Fourth National Program for Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM)	Fourth National Program for Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM)	82134D	10861801	28 Desember 2012	01 Maret 2013	31 Desember 2018	USD 288.000.000	257.788.428	173.972.548.000		173.972.548.000								Ditjen Cipta Karya	BPK
48	LK PLN 48	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	82584D	10865701	11 Juni 2013	02 Agustus 2013	30 November 2018	USD 59.900.000	87.800.000	263.169.488.790		263.169.488.790								Ditjen Cipta Karya	BPK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 417 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No	LK/PLN	PHU	PENERBI PINJAMAN	PROYEK	Loan ID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan Amount	Disbursement s.d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jumlah Belanja Pada Tahun 2018 (Rupiah)			Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selakuExecuting Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)					
													Belanja Pagawani	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lam			Kewajiban				
49	LK/PLN 49	Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Base Water Supply Project (PAMSIMAS III)	World Bank	Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Base Water Supply Project (PAMSIMAS III)	85784D	1NPA3NNA	30 Juni 2016	22 Agustus 2016	31 Desember 2020	USD	300 000 000	74 250 000	911 009 288 532								Ditjen Cipta Karya	BPK				
50	LK/PLN 50	National Slum Upgrading Program (NSUP)	World Bank	National Slum Upgrading Program (NSUP)	86364D	1BK8ECNA	22 Agustus 2016	11 Oktober 2016	31 Maret 2022	USD	216 500 000	20 200 000	392 235 447 886								Ditjen Cipta Karya	BPK				
51	LK/PLN 51	National Slum Upgrading Program (NSUP)	ADB	National Slum Upgrading Program (NSUP)	1N000404ND	1P1D00DAA	01 September 2016	31 Oktober 2016	31 Maret 2022	USD	216 500 000	20 200 000	437 951 602 405			2 662 268 000					Ditjen Cipta Karya	BPKP				
52	LK/PLN 52	National Affordable Housing Program	World Bank	National Affordable Housing Program	87174D	1HG72SWA	30 November 2017	24 Januari 2018	31 Maret 2021	USD	450 000 000		586 710 455 120								Ditjen Pembiayaan Perumahan	BPK				
53	LK/PLN 53	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	World Bank	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	88914D	1NF3PM6A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250 000 000										Ditjen Sumber Daya Air	BPK				
54	LK/PLN 54	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	ADB	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	0080A	1HS4NF8A	11 Juli 2018	23 Agustus 2018	30 Juni 2024	USD	250 000 000										Ditjen Sumber Daya Air	BPKP				
55	LK/PLN 55	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	World Bank	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	88724D	1CPUK3GA	02 Agustus 2018	08 Agustus 2018	31 Desember 2022	USD	100 000 000										Ditjen Cipta Karya	BPK				
56	LK/PLN 56	Advance Agreement for Preparation of Proposed Tourism Development Cooperation / Integrated Master Plan for Priority Tourism Destination Preparation Advance	World Bank	Advance Agreement for Preparation of Proposed Tourism Development Cooperation / Integrated Master Plan for Priority Tourism Destination Preparation Advance	F4820	1NM8QKDA	21 November 2017	21 November 2017	30 November 2018	USD	4 000 000		4 711 277 500								BPIW	BPK				
57	LK/PLN 57	Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas/Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	World Bank	Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas/Indonesia Tourism Development Project (ITDP)	88614D	1M1JWRAA	24 Oktober 2018	28 November 2018	31 Desember 2023	USD	300 000 000										BPIW	BPK				
58	LK/PLN 58	Padang Bypass Capacity Expansion Project	Korea	Padang Bypass Capacity Expansion Project	1NA 17	21643301	03 Januari 2011	14 April 2011	14/08/2017	USD	58 000 000	44 530 515	2 086 075 454								Ditjen Bina Marga	BPKP				
59	LK/PLN 59	Pinjaman Luar Negeri	IBRD	The Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project)	IBRD Loan 8887-ID	18U19N3A	26 Oktober 2018	15 November 2018	31 Oktober 2023	USD	200 000 000										Ditjen Jenderal Infrastruktur Kelangkaan	BPKP				
60	LK/PLN 60	State Accountability Revitalization (SAR)	ADB	State Accountability Revitalization (SAR)	28274ND	1G8595D1	26 November 2012	18 Februari 2013	31 Maret 2019	USD	57 750 000	806 831 550 789	120 580 035 075			62 698 448 175					57 890 595 800	58 841 081 500			BPKP	BPK
61	LK/PLN 61	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	World Bank	Coral Reef Rehabilitation and Management Program: Coral Triangle Initiative (COREMAP CTI)	82364D	10881801	17 Maret 2014	05 Juni 2014	31 Juni 2019	USD	47 380 000,00	15 800 000,00	22 200 000,00			48.357.688.193,00					2 810 080 551,00	32 800 422 875,00			1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014-2017) 2. Lembaga Ilmu	BPK RI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 418 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 2.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI
PER 31 DESEMBER 2018

No	PHLN	PEMBERI PINJAMAN	PROYEK	Loan/GrantID	No Register	Date sign	Date effective	Closing date	Loan/Grant Amount	Disbursement s d 2017	Disbursement Tahun 2018	Jenis Belanja Pada Tahun 20XX (Rupiah)				Neraca (Rupiah)				Kementerian/Lembaga selaku Executing Agency	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)
												Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lain	Kewajiban		
1	LK HLN 1	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)	IFAD	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)	71697101				SGD	675 000	2 983 919 382		2 983 919 382							BKP (Kementerian Pertanian)	
2	LK HLN 2	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	Australia	Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	66387	74936401	26 Desember 2012	28 Februari 2014	31 Desember 2021	AUD	38 000 000									Ditjen Bina Marga	BPKP
3	LK HLN 3	Preparation of Proposed Tourism Development Operation/Integrated Masterplan (IMP) for Priority Tourism Destination	World Bank	Preparation of Proposed Tourism Development Operation/Integrated Masterplan (IMP) for Priority Tourism Destination	TF-A4649	2XNH4UXA	21 November 2017	21 November 2017	30 April 2019	USD	2 100 000	7 867 080 613	7 867 080 613							BPIW	BPK
4	LK HLN 4	Sanitation Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIG)	Australia	Sanitation Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation (SAIG)	66387	73736401	26 April 2012	01 Juli 2012	30 Juni 2020	AUD	40 000 000	2 730 600								Ditjen Cipta Karya	BPKP
5	LK HLN 5	Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase II	Australia	Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase II	62031	72599501	26 April 2012	01 Juli 2012	30 Juni 2020	AUD	93 845 646	73 342 346								Ditjen Cipta Karya	BPKP
6	LK HLN 6	TA for Emission Reduction in Cities Solid Waste Management Programme	KW Jerman	TA for Emission Reduction in Cities Solid Waste Management Programme	202080796	73657101	02 Mei 2013	02 Mei 2013	31 Desember 2020	EUR	7 600 000			9 124 373 324						Ditjen Cipta Karya	BPKP
7	LK HLN 7	Feasibility Study for the Project Emission Reduction in Cities Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia	KW Jerman	Feasibility Study for the Project Emission Reduction in Cities Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia	FA07112016	ZH1GMLIA	07 November 2016	07 November 2016	30/06/2019	EUR	2 550 000			15 210 896 806						Ditjen Cipta Karya	BPKP
8	LK HLN 8	Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung	KW Jerman	Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung	FA07112016	2VPZG07A	07 November 2016	07 November 2016	28/02/2019	EUR	750 000			1 868 736 375						Ditjen Cipta Karya	BPKP
9	LK HLN 9	The Palembang City Sewerage Project	Australia	The Palembang City Sewerage Project	73826	2K6Q8TSA	11 September 2017	12 September 2017	31/08/2022	AUD	45 000 000									Ditjen Cipta Karya	BPKP
10	LK HLN 10	Replication and Mainstreaming of REKOMPAK/CSRRP	World Bank	Replication and Mainstreaming of REKOMPAK/CSRRP	TF 0A2519	23AEKS4A	20 Mei 2016	20 Mei 2016	31/03/2019	USD	1 619 522		7 758 707 602							Ditjen Cipta Karya	BPK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 419 -

LAPORAN REALISASI TKDD TA 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 420 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.A

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH	Total Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	619.337.189.038	483.588.805.058	17.678.274.500	1.120.582.248.596	14.728.915.636.000	5.553.347.971.407	12.890.263.889.805	34.293.109.545.608
2	Provinsi Sumatera Utara	1.547.139.987.073	282.354.513.400	19.965.326.000	1.849.459.826.473	24.095.779.124.000	3.944.917.898.029	40.214.435.890.987	40.214.435.890.987
3	Provinsi Sumatera Barat	388.484.446.202	54.408.987.428	13.184.125.000	456.077.558.630	13.525.163.475.000	4.963.027.046.732	1.182.822.631.951	20.126.890.712.313
4	Provinsi Riau	3.801.621.548.183	4.316.191.573.098	-	8.117.813.121.258	8.417.436.573.000	3.990.725.716.990	1.414.544.431.890	21.940.519.843.139
5	Provinsi Kepulauan Riau	495.882.018.888	1.437.770.319.791	-	5.567.378.500	1.939.219.717.279	4.283.238.970.000	1.487.380.658.749	7.890.201.694.028
6	Provinsi Jambi	719.088.085.783	1.170.089.900.395	-	6.918.952.000	1.896.084.918.178	7.969.270.503.000	2.776.264.332.708	13.891.547.917.610
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.108.132.851.305	4.703.784.114.966	-	5.781.980.250	7.815.698.946.521	12.331.394.490.000	6.082.880.715.312	28.919.581.172.831
8	Provinsi Bangka Belitung	211.142.980.337	579.307.886.240	-	790.450.678.577	4.263.148.484.000	1.400.639.224.867	304.957.427.435	6.758.195.782.909
9	Provinsi Bengkulu	184.527.312.588	131.600.040.373	-	208.127.352.841	6.421.416.839.000	1.988.548.737.223	977.827.322.866	9.683.920.057.030
10	Provinsi Lampung	429.801.936.209	327.690.646.032	12.014.171.500	789.506.755.741	12.891.526.399.000	6.004.998.454.005	2.351.313.494.117	22.017.346.102.863
11	Provinsi DKI Jakarta	15.026.197.580.222	183.375.491.488	-	15.209.573.081.710	-	2.845.603.981.214	-	17.855.177.072.924
12	Provinsi Jawa Barat	3.931.726.545.349	1.318.924.073.088	336.567.841.000	5.587.219.359.437	34.413.898.308.000	19.883.952.304.082	5.351.306.165.482	65.036.376.136.981
13	Provinsi Banten	1.688.926.950.939	22.488.861.504	-	1.891.425.812.443	8.262.705.287.000	4.437.816.408.870	1.077.838.619.416	15.468.686.105.629
14	Provinsi Jawa Tengah	1.887.570.702.322	79.416.234.359	876.828.097.000	2.423.915.033.881	37.142.002.322.000	17.983.070.951.096	7.521.069.742.397	64.180.058.049.174
15	Provinsi DI Yogyakarta	243.537.781.714	3.729.954.583	16.343.513.000	283.611.249.277	5.595.700.705.000	2.290.588.087.558	1.591.269.133.000	8.741.178.174.836
16	Provinsi Jawa Timur	2.764.610.508.122	6.071.877.201.120	1.512.086.546.000	10.348.584.255.242	39.914.884.856.000	16.282.047.759.159	7.283.419.018.104	75.828.735.866.505
17	Provinsi Kalimantan Barat	541.873.951.835	201.887.073.161	3.702.583.500	747.463.618.496	11.820.595.796.000	4.874.748.024.083	1.818.545.564.108	19.261.353.062.667
18	Provinsi Kalimantan Tengah	585.887.174.418	1.277.282.180.650	4.870.659.250	1.668.040.014.318	10.166.848.080.000	3.288.065.901.154	1.404.136.245.555	16.726.888.241.027
19	Provinsi Kalimantan Selatan	859.772.148.531	3.805.222.953.734	-	4.464.895.102.865	7.970.842.063.000	3.224.639.170.496	1.629.857.335.500	17.290.433.671.261
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.309.485.003.084	10.214.888.460.239	-	12.524.371.453.303	5.134.617.596.000	2.715.756.477.639	849.007.847.943	21.223.763.374.885
21	Provinsi Kalimantan Utara	358.393.428.393	793.952.569.655	-	1.152.345.998.048	3.709.831.308.000	1.003.716.181.589	457.051.884.000	6.322.745.181.637
22	Provinsi Sulawesi Utara	302.837.502.428	223.523.070.985	-	526.160.573.413	8.518.499.008.000	3.358.322.380.587	1.358.496.475.000	13.781.478.437.000
23	Provinsi Gorontalo	77.252.238.633	8.612.045.583	-	85.864.284.216	4.025.329.702.000	1.574.706.607.805	680.884.810.400	6.376.885.404.421
24	Provinsi Sulawesi Tengah	260.918.877.092	647.019.841.205	6.896.545.750	914.835.264.047	9.540.123.610.000	3.596.298.664.919	1.500.871.188.512	15.552.129.727.478
25	Provinsi Sulawesi Selatan	616.431.237.099	236.559.474.030	16.853.828.000	869.844.539.129	18.369.987.919.000	8.917.485.770.474	2.433.473.582.018	30.590.775.790.621
26	Provinsi Sulawesi Barat	81.828.679.843	6.917.771.867	-	88.746.451.510	4.224.888.264.000	1.585.806.097.335	682.378.270.000	6.561.819.091.845
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	210.971.586.898	377.188.350.965	-	588.169.937.863	9.821.734.403.000	3.880.199.084.929	1.603.163.678.782	15.893.267.102.584
28	Provinsi Bali	485.988.086.592	6.311.111.319	11.717.881.250	504.017.959.181	7.092.130.533.000	2.555.972.558.804	975.706.388.800	11.127.827.437.765
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	269.395.545.793	555.531.853.382	249.100.895.995	1.074.028.095.170	8.584.172.174.000	4.232.152.727.841	1.285.056.400.721	15.156.012.406.732
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	241.598.838.446	25.059.154.647	6.006.756.750	272.654.749.843	13.482.237.846.000	5.924.189.687.782	2.582.421.858.753	22.271.514.142.378
31	Provinsi Maluku	172.552.989.004	89.210.870.486	-	241.763.859.490	7.958.890.251.000	2.982.700.813.952	1.059.440.492.076	12.252.595.396.518
32	Provinsi Maluku Utara	138.427.574.901	350.167.709.990	-	488.595.284.891	6.358.388.224.000	2.258.940.266.892	920.822.171.757	10.024.723.947.540
33	Provinsi Papua	923.888.130.711	3.213.493.719.388	-	4.137.381.850.099	6.039.528.587.239	12.381.087.726.544	15.029.724.814.882	45.009.724.814.882
34	Provinsi Papua Barat	672.186.848.678	1.907.432.818.195	-	2.579.599.485.173	8.024.771.700.000	2.087.115.228.881	5.395.587.975.800	18.087.074.369.954
35	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	353.976.565.607	-	353.976.565.607
	JUMLAH	45.695.178.904.793	45.086.658.324.382	2.922.191.165.245	93.704.038.394.420	401.488.579.648.000	173.448.578.218.684	88.148.741.785.275	757.782.938.057.379

Catatan: Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatas adalah Total dari Realisasi Pemerintah Provinsi ditambah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 421 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	153.815.821.172	92.067.929.935	61.747.891.237	153.815.821.172
2	Kab. Aceh Barat	13.877.807.354	6.231.612.022	7.646.195.332	13.877.807.354
3	Kab. Aceh Besar	13.593.001.718	7.296.924.785	6.296.076.933	13.593.001.718
4	Kab. Aceh Selatan	11.261.304.493	5.526.019.491	5.735.285.002	11.261.304.493
5	Kab. Aceh Singkil	13.482.013.051	3.449.085.994	10.032.927.057	13.482.013.051
6	Kab. Aceh Tengah	10.418.230.537	4.892.068.171	5.526.162.366	10.418.230.537
7	Kab. Aceh Tenggara	8.606.740.512	3.413.979.928	5.192.760.584	8.606.740.512
8	Kab. Aceh Timur	32.007.950.528	4.425.049.234	27.582.901.294	32.007.950.528
9	Kab. Aceh Utara	96.473.023.759	6.314.624.969	90.158.398.790	96.473.023.759
10	Kab. Bireuen	13.614.101.639	6.126.591.284	7.487.510.355	13.614.101.639
11	Kab. Pidie	11.616.418.206	6.181.466.302	5.434.951.904	11.616.418.206
12	Kab. Simeulue	8.347.313.987	2.910.126.303	5.437.187.684	8.347.313.987
13	Kota Banda Aceh	36.334.696.132	31.809.628.597	4.525.067.535	36.334.696.132
14	Kota Sabang	7.817.975.001	3.158.153.828	4.659.821.173	7.817.975.001
15	Kota Langsa	13.858.904.834	8.348.990.969	5.509.913.865	13.858.904.834
16	Kota Lhokseumawe	28.928.488.941	9.657.080.161	19.271.408.780	28.928.488.941
17	Kab. Nagan Raya	14.401.570.751	4.552.767.753	9.848.802.998	14.401.570.751
18	Kab. Aceh Jaya	9.141.099.442	2.823.292.191	6.317.807.251	9.141.099.442
19	Kab. Pidie Jaya	7.693.302.498	2.968.980.952	4.724.321.546	7.693.302.498
20	Kab. Aceh Barat Daya	8.681.343.321	3.226.056.870	5.455.286.651	8.681.343.321
21	Kab. Gayo Lues	8.338.551.222	2.620.637.168	5.717.914.054	8.338.551.222
22	Kab. Aceh Tamang	79.776.702.346	5.647.812.600	74.128.889.746	79.776.702.346
23	Kab. Bener Merah	8.272.979.491	3.423.597.614	4.849.381.877	8.272.979.491
24	Kota Subulussalam	8.977.828.103	3.194.213.085	5.783.615.018	8.977.828.103
25	Provinsi Sumatera Utara	449.086.001.729	329.303.454.923	119.782.546.806	449.086.001.729
26	Kab. Asahan	61.767.184.941	14.024.918.816	47.742.266.125	61.767.184.941
27	Kab. Dairi	12.496.303.541	6.179.749.521	6.316.554.020	12.496.303.541
28	Kab. Deli Serdang	62.265.354.132	30.374.319.761	31.891.034.371	62.265.354.132
29	Kab. Karo	13.658.236.123	7.884.318.634	5.773.917.489	13.658.236.123
30	Kab. Labuhan Batu	45.414.292.241	13.711.357.105	31.702.935.136	45.414.292.241
31	Kab. Langkat	143.898.133.603	12.008.910.872	131.889.222.731	143.898.133.603
32	Kab. Mandailing Natal	24.374.119.932	8.404.345.723	15.969.774.209	24.374.119.932
33	Kab. Nias	9.029.889.003	4.840.816.988	4.189.072.035	9.029.889.003
34	Kab. Simalungun	48.449.791.190	11.973.004.890	36.476.786.300	48.449.791.190
35	Kab. Tapanuli Selatan	39.962.868.961	10.257.468.815	29.705.400.146	39.962.868.961
36	Kab. Tapanuli Tengah	14.533.718.353	6.146.833.705	8.386.884.588	14.533.718.353
37	Kab. Tapanuli Utara	31.466.317.865	8.341.927.203	23.124.390.662	31.466.317.865
38	Kab. Toba Samosir	14.534.229.244	9.449.218.057	5.085.011.187	14.534.229.244
39	Kota Binjai	16.231.271.134	8.907.286.509	7.323.984.625	16.231.271.134
40	Kota Medan	212.631.219.115	202.854.855.415	9.776.363.700	212.631.219.115
41	Kota Pematang Siantar	19.423.364.321	15.154.796.327	4.268.567.994	19.423.364.321
42	Kota Sibolga	12.455.401.558	8.049.175.011	4.406.226.547	12.455.401.558
43	Kota Tanjung Balai	11.352.617.318	6.906.275.631	4.446.341.687	11.352.617.318
44	Kab. Batu Bara	27.100.703.654	13.868.532.408	13.232.171.246	27.100.703.654
45	Kab. Labuhan Batu Utara	35.147.628.245	6.762.537.826	28.385.090.419	35.147.628.245
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	57.043.301.599	8.546.909.307	48.496.392.292	57.043.301.599
47	Kab. Padang Lawas Utara	21.006.522.429	6.010.163.476	14.996.358.953	21.006.522.429
48	Kab. Padang Lawas	22.631.226.502	6.392.147.529	16.239.078.973	22.631.226.502
49	Kab. Nias Utara	9.602.903.718	5.132.040.749	4.470.862.969	9.602.903.718
50	Kab. Nias Barat	9.105.043.509	4.943.710.381	4.161.333.128	9.105.043.509
51	Kota Tebing Tinggi	12.670.403.267	8.326.433.390	4.343.969.877	12.670.403.267
52	Kota Padang Sidempuan	14.242.055.101	9.180.418.828	5.061.636.273	14.242.055.101
53	Kab. Pakpak Bharat	10.318.081.406	5.121.762.363	5.196.319.043	10.318.081.406
54	Kab. Nias Selatan	11.581.508.325	5.408.323.540	6.173.184.785	11.581.508.325
55	Kab. Humbang Hasundutan	11.538.878.604	5.614.773.043	5.924.105.561	11.538.878.604
56	Kab. Serdang Bedagai	39.989.314.861	10.380.391.296	29.608.923.565	39.989.314.861
57	Kab. Samosir	10.653.795.549	5.366.605.005	5.287.190.544	10.653.795.549
58	Kota Gunungsitoli	11.478.306.000	7.430.854.221	4.047.451.779	11.478.306.000
59	Provinsi Sumatera Barat	112.139.095.402	93.181.301.499	18.957.793.903	112.139.095.402
60	Kab. Lima Puluh Kota	10.223.879.620	4.321.613.516	5.902.266.104	10.223.879.620
61	Kab. Agam	14.000.068.393	5.945.564.866	8.054.503.527	14.000.068.393
62	Kab. Kepulauan Mentawai	10.870.117.367	3.110.647.034	7.759.470.333	10.870.117.367
63	Kab. Padang Panjang	8.812.618.584	3.854.186.306	4.958.432.278	8.812.618.584
64	Kab. Pasaman	9.241.287.041	4.080.471.132	5.160.815.909	9.241.287.041



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 422 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
65	Kab. Pesisir Selatan	15.452.877.217	4.248.095.779	11.204.781.438	15.452.877.217
66	Kab. Sijunjung	10.218.731.808	4.006.855.239	6.211.876.569	10.218.731.808
67	Kab. Solok	10.218.439.468	4.751.125.462	5.467.314.006	10.218.439.468
68	Kab. Tanah Datar	9.815.933.386	5.035.171.673	4.780.761.713	9.815.933.386
69	Kota Bukit Tinggi	10.905.190.472	7.012.627.657	3.892.562.815	10.905.190.472
70	Kota Padang Panjang	7.682.058.808	3.565.099.458	4.116.959.350	7.682.058.808
71	Kota Padang	62.854.411.577	55.294.125.648	7.560.285.929	62.854.411.577
72	Kota Payakumbuh	9.968.959.414	5.978.566.418	3.990.392.996	9.968.959.414
73	Kota Sawahlunto	8.632.934.607	4.024.417.109	4.608.517.498	8.632.934.607
74	Kota Solok	9.719.458.572	5.544.767.371	4.174.691.201	9.719.458.572
75	Kota Panaman	9.901.058.761	5.409.271.378	4.491.787.383	9.901.058.761
76	Kab. Pasaman Barat	24.031.899.148	4.928.421.448	19.103.477.700	24.031.899.148
77	Kab. Dharmasraya	17.420.678.094	5.082.367.216	12.338.310.878	17.420.678.094
78	Kab. Solok Selatan	16.374.748.463	4.313.594.029	12.061.154.434	16.374.748.463
79	Provinsi Riau	856.660.641.569	209.908.107.164	646.752.534.405	856.660.641.569
80	Kab. Bengkalis	1.436.254.223.765	46.121.906.260	1.390.132.317.505	1.436.254.223.765
81	Kab. Indragiri Hilir	51.845.980.126	15.290.789.044	36.555.191.082	51.845.980.126
82	Kab. Indragiri Hulu	86.882.825.819	13.667.867.680	73.214.958.139	86.882.825.819
83	Kab. Kampar	222.848.856.511	15.498.333.512	207.350.522.999	222.848.856.511
84	Kab. Kuantan Singingi	34.567.430.336	12.387.939.857	22.179.490.479	34.567.430.336
85	Kab. Pelalawan	130.445.877.647	24.882.865.459	105.563.012.188	130.445.877.647
86	Kab. Rokan Hilir	237.776.893.564	14.338.970.354	223.437.923.210	237.776.893.564
87	Kab. Rokan Hulu	67.647.644.590	13.927.483.484	53.720.161.106	67.647.644.590
88	Kab. Siak	451.431.044.871	26.779.202.874	424.651.841.997	451.431.044.871
89	Kota Dumai	58.145.053.156	32.588.849.375	25.556.203.781	58.145.053.156
90	Kota Pekanbaru	109.210.648.782	92.404.623.962	16.806.024.820	109.210.648.782
91	Kab. Kepulauan Meranti	57.904.427.427	11.174.920.469	46.729.506.958	57.904.427.427
92	Provinsi Kepulauan Riau	155.976.997.739	122.662.996.761	33.314.000.978	155.976.997.739
93	Kab. Bintan	23.918.046.951	14.325.557.566	9.592.489.385	23.918.046.951
94	Kab. Natuna	74.842.416.265	10.350.482.078	64.491.934.187	74.842.416.265
95	Kab. Karimun	42.148.249.401	18.821.889.659	23.326.359.742	42.148.249.401
96	Kota Batam	104.694.249.054	94.694.584.954	9.999.664.100	104.694.249.054
97	Kab. Kepulauan Anambas	50.508.491.223	16.251.232.983	34.257.258.240	50.508.491.223
98	Kota Tanjung Pinang	26.220.652.195	19.676.025.994	6.544.626.201	26.220.652.195
99	Kab. Lingga	17.572.916.160	9.874.721.908	7.698.194.252	17.572.916.160
100	Provinsi Jambi	168.557.795.503	60.586.732.418	107.971.063.085	168.557.795.503
101	Kab. Batangan	80.430.599.417	4.816.067.139	75.614.532.278	80.430.599.417
102	Kab. Bungo	23.135.813.832	7.904.421.675	15.231.392.157	23.135.813.832
103	Kab. Kenri	9.238.623.294	2.959.250.528	6.279.372.766	9.238.623.294
104	Kab. Merangin	16.483.944.721	5.716.835.765	10.767.108.956	16.483.944.721
105	Kab. Muaro Jambi	83.483.597.769	6.023.834.302	77.459.763.467	83.483.597.769
106	Kab. Sarolangun	49.402.602.195	4.414.462.615	44.988.139.580	49.402.602.195
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	105.796.317.817	6.922.401.941	98.873.915.876	105.796.317.817
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	63.308.094.672	6.262.837.471	57.045.257.201	63.308.094.672
109	Kab. Tebo	37.921.345.610	4.730.559.914	33.190.785.696	37.921.345.610
110	Kota Jambi	71.532.045.324	35.461.693.153	36.070.352.171	71.532.045.324
111	Kota Sungai Penuh	9.777.285.629	5.667.734.124	4.109.551.505	9.777.285.629
112	Provinsi Sumatera Selatan	705.105.611.881	199.501.946.552	505.603.665.329	705.105.611.881
113	Kab. Lahat	92.448.266.434	11.374.802.121	81.073.464.313	92.448.266.434
114	Kab. Musi Banyuasin	629.683.242.091	19.491.479.808	610.191.762.283	629.683.242.091
115	Kab. Musi Rawas	177.684.232.848	7.549.299.614	170.134.933.234	177.684.232.848
116	Kab. Musi Rawas Utara	32.706.142.410	6.822.692.448	25.883.449.962	32.706.142.410
117	Kab. Muara Enim	470.035.153.625	35.931.347.151	434.103.806.474	470.035.153.625
118	Kab. Ogan Komering Ilir	52.254.143.385	11.862.868.642	40.391.274.743	52.254.143.385
119	Kab. Ogan Komering Ulu	77.757.601.756	9.938.271.045	67.819.330.711	77.757.601.756
120	Kota Palembang	122.318.774.030	115.113.319.389	7.205.454.641	122.318.774.030
121	Kota Pagar Alam	12.295.658.249	6.559.596.960	5.736.061.289	12.295.658.249
122	Kota Lubuk Linggau	15.518.389.184	10.448.759.180	5.069.630.004	15.518.389.184
123	Kota Prabumulih	100.947.039.667	15.551.941.863	85.395.097.804	100.947.039.667
124	Kab. Empat Lawang	13.297.451.290	6.525.907.154	6.771.544.136	13.297.451.290
125	Kab. Banyuasin	71.489.631.880	11.615.371.022	59.874.260.858	71.489.631.880
126	Kab. Ogan Ilir	67.693.628.871	7.778.793.171	59.914.835.700	67.693.628.871
127	Kab. OKU Timur	16.790.165.153	7.608.702.443	9.181.462.710	16.790.165.153
128	Kab. OKU Selatan	14.540.706.101	6.640.542.418	7.900.163.683	14.540.706.101



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 423 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	433.567.012.450	8.439.225.402	425.127.787.048	433.567.012.450
130	Provinsi Bangka Belitung	53.519.592.074	33.660.997.191	19.858.594.883	53.519.592.074
131	Kab. Bangka	25.264.920.209	7.864.302.068	17.600.618.141	25.264.920.209
132	Kab. Belitung	24.496.592.350	5.945.338.558	18.551.255.792	24.496.592.350
133	Kota Pangkal Pinang	22.358.726.468	16.436.929.917	5.921.796.551	22.358.726.468
134	Kab. Bangka Selatan	17.217.671.853	3.802.822.795	13.414.849.058	17.217.671.853
135	Kab. Bangka Tengah	18.586.505.648	5.528.040.674	13.058.464.974	18.586.505.648
136	Kab. Bangka Barat	28.941.619.932	6.750.275.086	22.191.344.846	28.941.619.932
137	Kab. Belitung Timur	20.757.361.803	4.363.788.688	16.393.573.115	20.757.361.803
138	Provinsi Bengkulu	40.963.179.706	29.108.229.171	11.854.950.535	40.963.179.706
139	Kab. Bengkulu Selatan	7.512.322.919	2.758.105.417	4.754.217.502	7.512.322.919
140	Kab. Bengkulu Utara	23.959.869.175	3.988.032.921	19.971.836.254	23.959.869.175
141	Kab. Rejang Lebong	9.127.305.162	4.101.795.803	5.025.509.359	9.127.305.162
142	Kota Bengkulu	21.928.043.675	17.197.110.583	4.730.933.092	21.928.043.675
143	Kab. Kaur	7.757.649.884	2.053.653.213	5.703.996.671	7.757.649.884
144	Kab. Seluma	9.438.784.632	2.458.951.098	6.979.833.534	9.438.784.632
145	Kab. Mukomuko	15.287.862.063	3.150.064.130	12.137.797.933	15.287.862.063
146	Kab. Lebong	9.194.706.183	2.448.451.188	6.746.254.995	9.194.706.183
147	Kab. Bengkulu Tengah	11.725.621.151	2.844.450.137	8.881.171.014	11.725.621.151
148	Kab. Kepahiang	7.631.968.018	2.661.729.266	4.970.238.752	7.631.968.018
149	Provinsi Lampung	122.496.301.793	92.534.598.872	29.961.702.921	122.496.301.793
150	Kab. Lampung Barat	9.552.225.881	4.620.998.472	4.931.227.389	9.552.225.881
151	Kab. Lampung Selatan	26.368.741.577	10.333.453.031	16.035.288.546	26.368.741.577
152	Kab. Lampung Tengah	37.875.008.130	13.028.387.133	24.846.620.997	37.875.008.130
153	Kab. Lampung Utara	16.829.252.921	7.229.907.911	9.599.345.010	16.829.252.921
154	Kab. Lampung Timur	24.368.533.379	7.335.441.257	17.033.092.122	24.368.533.379
155	Kab. Tanggamus	30.166.651.408	7.066.539.862	23.100.111.546	30.166.651.408
156	Kab. Tulang Bawang	20.675.231.142	6.813.076.265	13.862.154.877	20.675.231.142
157	Kab. Way Kanan	16.221.717.943	5.043.744.561	11.177.973.382	16.221.717.943
158	Kab. Pesawaran	12.127.938.063	4.919.075.070	7.208.862.993	12.127.938.063
159	Kab. Pesisir Barat	9.043.182.462	3.788.419.397	5.254.763.065	9.043.182.462
160	Kab. Pringsewu	9.953.425.654	5.323.666.651	4.629.759.003	9.953.425.654
161	Kab. Mesuji	16.787.209.613	4.144.901.949	12.642.307.664	16.787.209.613
162	Kab. Tulang Bawang Barat	11.609.606.793	4.234.833.341	7.374.773.452	11.609.606.793
163	Kota Bandar Lampung	52.082.460.745	46.079.120.795	6.003.339.950	52.082.460.745
164	Kota Metro	13.644.448.725	8.840.332.614	4.804.116.111	13.644.448.725
165	Provinsi DKI Jakarta	15.026.197.590.222	14.961.540.040.248	64.667.549.974	15.026.197.590.222
166	Provinsi Jawa Barat	1.390.469.986.853	1.252.723.209.767	137.746.777.086	1.390.469.986.853
167	Kab. Bandung	144.933.549.485	57.691.068.608	87.242.480.877	144.933.549.485
168	Kab. Bekasi	381.014.848.306	332.249.305.206	48.765.543.101	381.014.848.306
169	Kab. Bogor	182.236.486.914	124.400.369.811	57.836.117.103	182.236.486.914
170	Kab. Ciamis	35.895.351.200	27.523.639.903	8.371.711.297	35.895.351.200
171	Kab. Cianjur	50.671.681.980	34.168.076.195	16.503.605.785	50.671.681.980
172	Kab. Cirebon	58.225.698.832	40.287.956.659	17.937.742.173	58.225.698.832
173	Kab. Garut	81.986.650.287	31.394.183.279	50.592.467.008	81.986.650.287
174	Kab. Indramayu	150.821.818.345	47.630.214.784	103.191.603.561	150.821.818.345
175	Kab. Karawang	210.865.030.191	171.864.790.541	39.000.239.650	210.865.030.191
176	Kab. Kuningan	35.175.286.150	27.392.091.034	7.783.195.116	35.175.286.150
177	Kab. Majalengka	45.531.009.015	28.264.192.778	17.266.816.237	45.531.009.015
178	Kab. Pangandaran	30.529.916.504	23.694.305.550	6.835.610.954	30.529.916.504
179	Kab. Purwakarta	73.146.049.017	64.198.134.407	8.947.914.610	73.146.049.017
180	Kab. Subang	98.049.171.694	38.976.551.757	59.072.619.937	98.049.171.694
181	Kab. Sukabumi	82.692.108.437	38.400.257.000	44.291.851.437	82.692.108.437
182	Kab. Sumedang	40.559.138.415	33.079.589.155	7.479.549.260	40.559.138.415
183	Kab. Tasikmalaya	38.041.432.781	26.863.906.366	11.177.526.395	38.041.432.781
184	Kab. Bandung Barat	52.430.756.272	42.021.256.792	10.409.499.480	52.430.756.272
185	Kota Bandung	294.579.081.924	286.152.830.910	8.426.251.014	294.579.081.924
186	Kota Bekasi	119.526.364.254	110.205.147.359	9.321.216.895	119.526.364.254
187	Kota Bogor	66.718.674.350	61.059.017.264	5.659.657.086	66.718.674.350
188	Kota Cirebon	44.701.110.749	39.003.662.840	5.697.447.909	44.701.110.749
189	Kota Depok	78.494.670.284	71.286.982.409	7.207.687.875	78.494.670.284
190	Kota Sukabumi	34.178.252.108	29.886.975.738	4.291.276.370	34.178.252.108
191	Kota Cimahi	39.647.090.718	34.977.821.288	4.669.269.430	39.647.090.718
192	Kota Tasikmalaya	37.974.632.883	32.860.209.168	5.114.423.715	37.974.632.883



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 424 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
193	Kota Banjar	32.630.697.421	23.985.228.308	8.645.469.113	32.630.697.421
194	Provinsi Banten	647.226.228.299	637.477.681.805	9.748.546.494	647.226.228.299
195	Kab. Lebak	62.448.874.317	47.063.817.083	15.385.057.234	62.448.874.317
196	Kab. Pandeglang	57.338.339.557	47.853.084.603	9.485.254.954	57.338.339.557
197	Kab. Serang	78.571.340.558	69.822.884.398	8.748.456.160	78.571.340.558
198	Kab. Tangerang	199.354.194.945	189.945.462.749	9.408.732.196	199.354.194.945
199	Kota Cilegon	118.352.788.466	113.763.776.026	4.589.012.440	118.352.788.466
200	Kota Tangerang	260.382.410.953	253.202.330.769	7.180.080.184	260.382.410.953
201	Kota Serang	70.738.966.362	65.928.166.793	4.810.799.569	70.738.966.362
202	Kota Tangerang Selatan	174.513.807.482	168.637.000.285	5.876.807.197	174.513.807.482
203	Provinsi Jawa Tengah	555.693.157.918	493.828.217.226	61.864.940.692	555.693.157.918
204	Kab. Banjarnegara	22.256.029.329	11.562.284.510	10.693.744.819	22.256.029.329
205	Kab. Banyumas	35.407.240.494	24.289.774.439	11.117.466.055	35.407.240.494
206	Kab. Batang	28.478.078.368	17.457.137.879	11.020.940.489	28.478.078.368
207	Kab. Blora	86.617.980.036	14.861.009.228	71.756.970.808	86.617.980.036
208	Kab. Boyolali	23.855.761.561	16.574.543.292	7.281.218.269	23.855.761.561
209	Kab. Brebes	24.589.836.258	11.916.619.119	12.673.217.139	24.589.836.258
210	Kab. Cilacap	60.421.115.064	43.459.864.411	16.961.250.653	60.421.115.064
211	Kab. Demak	21.641.358.012	13.379.869.728	8.261.488.286	21.641.358.012
212	Kab. Grobogan	29.550.114.637	12.228.662.443	17.321.452.194	29.550.114.637
213	Kab. Jepara	32.112.528.419	21.501.083.059	10.611.445.360	32.112.528.419
214	Kab. Karanganyar	23.260.774.389	15.877.252.406	7.383.521.983	23.260.774.389
215	Kab. Kebumen	20.803.060.743	12.761.712.456	8.041.348.287	20.803.060.743
216	Kab. Kendal	27.929.803.964	14.806.913.674	13.122.890.290	27.929.803.964
217	Kab. Klaten	24.846.841.755	18.343.705.774	6.503.135.981	24.846.841.755
218	Kab. Kudus	86.425.599.596	79.367.847.963	7.057.751.633	86.425.599.596
219	Kab. Magelang	19.795.869.884	13.219.712.908	6.576.156.976	19.795.869.884
220	Kab. Pati	25.409.066.041	15.186.649.134	10.222.416.907	25.409.066.041
221	Kab. Pekalongan	18.774.993.989	9.754.318.143	9.020.675.846	18.774.993.989
222	Kab. Pemalang	21.400.365.523	11.131.345.121	10.269.020.402	21.400.365.523
223	Kab. Purbalingga	17.522.139.880	11.451.968.096	6.070.171.784	17.522.139.880
224	Kab. Purworejo	17.301.712.596	11.032.409.163	6.269.303.433	17.301.712.596
225	Kab. Rembang	20.192.268.635	11.494.263.196	8.698.005.439	20.192.268.635
226	Kab. Semarang	30.211.932.991	20.924.393.605	9.287.539.386	30.211.932.991
227	Kab. Sragen	19.056.875.440	12.412.641.206	6.644.234.234	19.056.875.440
228	Kab. Sukoharjo	25.167.028.223	19.436.676.033	5.730.352.190	25.167.028.223
229	Kab. Tegal	21.232.470.187	12.320.425.594	8.912.044.593	21.232.470.187
230	Kab. Temanggung	17.951.069.172	11.313.312.921	6.637.756.251	17.951.069.172
231	Kab. Wonogiri	19.299.570.422	12.017.301.471	7.282.268.951	19.299.570.422
232	Kab. Wonosobo	20.295.505.728	10.174.539.495	10.120.966.233	20.295.505.728
233	Kota Magelang	17.018.271.075	12.863.814.220	4.154.456.855	17.018.271.075
234	Kota Pekalongan	18.389.981.062	13.489.977.254	4.900.003.808	18.389.981.062
235	Kota Salatiga	17.102.363.894	12.838.870.149	4.263.493.745	17.102.363.894
236	Kota Semarang	159.709.311.870	151.461.246.819	8.248.065.051	159.709.311.870
237	Kota Surakarta	39.592.216.688	34.936.525.972	4.655.690.716	39.592.216.688
238	Kota Tegal	18.258.408.479	14.150.154.417	4.108.254.062	18.258.408.479
239	Provinsi DI Yogyakarta	88.194.755.176	85.634.891.641	2.559.863.535	88.194.755.176
240	Kab. Bantul	24.848.763.991	19.175.250.119	5.673.513.872	24.848.763.991
241	Kab. Gunung Kidul	20.375.691.123	14.769.665.011	5.606.026.112	20.375.691.123
242	Kab. Kulon Progo	17.790.198.027	13.067.561.640	4.722.636.387	17.790.198.027
243	Kab. Sleman	47.600.928.548	41.564.539.542	6.036.389.006	47.600.928.548
244	Kota Yogyakarta	44.727.444.849	40.350.210.890	4.377.233.959	44.727.444.849
245	Provinsi Jawa Timur	932.783.028.517	810.811.243.915	121.971.784.602	932.783.028.517
246	Kab. Bangkalan	27.765.125.049	14.253.403.245	13.511.721.804	27.765.125.049
247	Kab. Banyuwangi	46.077.600.987	25.669.048.786	20.408.552.201	46.077.600.987
248	Kab. Blitar	24.042.193.334	15.407.792.369	8.634.400.965	24.042.193.334
249	Kab. Bojonegoro	216.818.133.601	20.582.163.156	196.235.970.445	216.818.133.601
250	Kab. Bondowoso	23.062.310.577	13.217.714.021	9.844.596.556	23.062.310.577
251	Kab. Gresik	104.081.963.966	73.860.274.089	30.221.689.877	104.081.963.966
252	Kab. Jember	48.127.727.032	28.310.645.277	19.817.081.755	48.127.727.032
253	Kab. Jombang	27.419.123.153	18.241.723.052	9.177.400.101	27.419.123.153
254	Kab. Kediri	34.512.204.971	18.646.180.722	15.866.024.249	34.512.204.971
255	Kab. Lamongan	29.420.364.959	16.792.939.980	12.627.424.979	29.420.364.959
256	Kab. Lumajang	25.579.762.430	15.162.868.815	10.416.893.615	25.579.762.430



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 425 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
257	Kab. Madiun	22.456.675.810	13.419.309.829	9.037.365.981	22.456.675.810
258	Kab. Magetan	19.936.443.725	14.237.500.214	5.698.943.511	19.936.443.725
259	Kab. Malang	53.533.384.247	33.453.177.727	20.080.206.520	53.533.384.247
260	Kab. Mojokerto	34.072.285.924	23.802.479.253	10.269.806.671	34.072.285.924
261	Kab. Nganjuk	25.123.313.495	15.157.766.893	9.965.546.602	25.123.313.495
262	Kab. Ngawi	24.842.486.121	14.070.478.439	10.772.007.682	24.842.486.121
263	Kab. Pacitan	18.084.182.730	12.577.226.044	5.506.956.686	18.084.182.730
264	Kab. Pamekasan	23.083.303.943	15.546.393.646	7.536.910.297	23.083.303.943
265	Kab. Pasuruan	50.360.760.004	39.578.939.075	10.781.820.929	50.360.760.004
266	Kab. Ponorogo	24.770.535.001	15.375.311.959	9.395.223.042	24.770.535.001
267	Kab. Probolinggo	27.219.327.257	18.332.163.372	8.887.163.885	27.219.327.257
268	Kab. Sampang	21.914.175.973	12.857.241.122	9.056.934.851	21.914.175.973
269	Kab. Sidoarjo	102.471.641.335	84.400.204.070	18.071.437.265	102.471.641.335
270	Kab. Situbondo	23.099.526.076	13.875.330.084	9.224.195.992	23.099.526.076
271	Kab. Sumenep	35.275.942.812	14.256.799.021	21.019.143.791	35.275.942.812
272	Kab. Trenggalek	21.172.033.419	13.167.270.808	8.004.762.611	21.172.033.419
273	Kab. Tuban	62.383.736.994	22.714.936.535	39.668.800.459	62.383.736.994
274	Kab. Tulungagung	25.986.820.686	17.491.038.652	8.495.782.034	25.986.820.686
275	Kota Blitar	19.629.923.801	15.634.320.193	3.995.603.608	19.629.923.801
276	Kota Kedin	36.840.130.893	32.621.266.300	4.218.864.593	36.840.130.893
277	Kota Madiun	25.390.798.853	21.341.314.333	4.049.484.520	25.390.798.853
278	Kota Malang	59.220.052.598	53.911.092.464	5.308.960.134	59.220.052.598
279	Kota Mojokerto	18.931.773.681	14.793.425.139	4.138.348.542	18.931.773.681
280	Kota Pasuruan	20.615.996.480	16.339.727.225	4.276.269.255	20.615.996.480
281	Kota Probolinggo	22.780.341.763	15.952.928.852	6.827.412.911	22.780.341.763
282	Kota Surabaya	389.788.594.246	380.109.394.123	9.679.200.123	389.788.594.246
283	Kota Batu	15.936.781.679	11.055.077.190	4.881.704.489	15.936.781.679
284	Provinsi Kalimantan Barat	146.425.501.580	95.619.467.366	50.806.034.214	146.425.501.580
285	Kab. Bengkayang	14.570.464.890	5.103.354.101	9.467.110.779	14.570.464.890
286	Kab. Landak	23.310.540.776	5.586.564.551	17.723.976.225	23.310.540.776
287	Kab. Kapuas Hulu	26.176.062.371	6.822.981.153	19.353.081.218	26.176.062.371
288	Kab. Ketapang	75.032.860.428	13.587.256.602	61.445.603.846	75.032.860.428
289	Kab. Mempawah	12.531.717.365	6.339.472.070	6.192.245.295	12.531.717.365
290	Kab. Sambas	29.203.256.518	7.445.507.767	21.757.748.751	29.203.256.518
291	Kab. Sanggau	37.578.479.204	8.742.080.494	28.836.398.710	37.578.479.204
292	Kab. Sintang	33.991.902.668	8.288.445.563	25.703.457.105	33.991.902.668
293	Kota Pontianak	49.328.591.474	43.818.998.394	5.509.593.080	49.328.591.474
294	Kota Singkawang	13.002.346.987	8.445.849.120	4.556.497.867	13.002.346.987
295	Kab. Kayong Utara	13.277.814.635	4.329.037.818	8.948.776.817	13.277.814.635
296	Kab. Kubu Raya	29.901.570.464	13.934.720.489	15.966.849.975	29.901.570.464
297	Kab. Sekadau	17.637.699.617	5.692.213.935	11.945.485.682	17.637.699.617
298	Kab. Melawi	19.905.142.868	5.292.719.012	14.612.423.856	19.905.142.868
299	Provinsi Kalimantan Tengah	140.130.497.862	64.043.901.226	76.086.596.636	140.130.497.862
300	Kab. Banto Selatan	16.888.941.807	4.468.201.132	12.420.740.675	16.888.941.807
301	Kab. Banto Utara	41.626.690.732	6.164.891.139	35.461.799.593	41.626.690.732
302	Kab. Kapuas	35.904.511.636	5.433.302.780	30.471.208.856	35.904.511.636
303	Kab. Kotawaringin Barat	57.565.969.093	13.378.340.744	44.187.628.349	57.565.969.093
304	Kab. Kotawaringin Timur	76.380.357.846	14.693.808.796	61.686.549.050	76.380.357.846
305	Kota Palangkaraya	21.895.091.517	16.741.455.680	5.153.635.837	21.895.091.517
306	Kab. Banto Timur	22.214.782.098	8.183.829.344	14.030.952.754	22.214.782.098
307	Kab. Murung Raya	27.995.341.812	5.095.000.370	22.900.341.442	27.995.341.812
308	Kab. Pulang Pisau	13.641.888.709	4.016.040.879	9.625.847.730	13.641.888.709
309	Kab. Gunung Mas	21.522.201.950	3.684.117.890	17.838.084.060	21.522.201.950
310	Kab. Lamandau	17.433.697.693	3.289.124.824	14.144.572.869	17.433.697.693
311	Kab. Sukamara	12.426.450.426	3.080.979.459	9.345.470.967	12.426.450.426
312	Kab. Katungan	51.107.874.841	3.981.406.220	47.126.468.621	51.107.874.841
313	Kab. Seruyan	29.152.876.396	4.131.916.291	25.020.960.105	29.152.876.396
314	Provinsi Kalimantan Selatan	169.920.751.085	102.452.732.631	67.468.018.454	169.920.751.085
315	Kab. Banjar	28.519.954.396	10.861.987.325	17.657.967.071	28.519.954.396
316	Kab. Banto Kuala	17.310.473.638	6.075.704.457	11.234.769.181	17.310.473.638
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	32.955.082.272	5.907.346.416	27.047.735.856	32.955.082.272
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	12.121.683.857	6.649.252.384	5.472.431.473	12.121.683.857
319	Kab. Hulu Sungai Utara	12.049.768.283	5.810.887.390	6.238.880.893	12.049.768.283
320	Kab. Kotabaru	49.189.299.562	13.013.615.181	36.175.684.381	49.189.299.562



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 426 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
321	Kab. Tabalong	77.183.883.874	13.242.178.828	63.941.705.046	77.183.883.874
322	Kab. Tanah Laut	45.696.273.093	9.417.503.353	36.278.769.740	45.696.273.093
323	Kab. Tapin	51.312.428.427	7.002.486.198	44.309.942.229	51.312.428.427
324	Kota Banjarbaru	20.151.911.952	15.087.972.063	5.063.939.889	20.151.911.952
325	Kota Banjarmasin	42.418.194.520	37.241.765.568	5.176.428.952	42.418.194.520
326	Kab. Balangan	27.858.480.903	9.829.095.299	18.029.385.604	27.858.480.903
327	Kab. Tanah Bumbu	73.083.962.669	13.562.563.028	59.521.399.641	73.083.962.669
328	Provinsi Kalimantan Timur	599.348.148.844	303.513.805.813	295.834.243.031	599.348.148.844
329	Kab. Berau	86.907.777.801	35.363.184.546	51.544.593.255	86.907.777.801
330	Kab. Kutai Kartanegara	859.880.761.437	53.395.522.659	806.485.238.778	859.880.761.437
331	Kab. Kutai Barat	68.730.739.648	25.385.997.562	43.344.742.086	68.730.739.648
332	Kab. Kutai Timur	210.988.623.151	53.699.528.328	157.289.094.823	210.988.623.151
333	Kab. Mahakam Ulu	28.042.001.829	16.241.867.710	11.800.134.119	28.042.001.829
334	Kab. Pasir	77.700.447.420	26.758.502.683	50.941.944.737	77.700.447.420
335	Kota Balikpapan	123.953.578.235	115.198.045.567	8.755.532.668	123.953.578.235
336	Kota Bontang	88.073.151.363	54.778.648.063	33.294.503.300	88.073.151.363
337	Kota Samarinda	93.507.456.251	56.577.179.805	36.930.276.446	93.507.456.251
338	Kab. Penajam Paser Utara	72.352.317.085	17.872.381.795	54.479.935.290	72.352.317.085
339	Provinsi Kalimantan Utara	77.752.121.867	20.345.068.115	57.407.053.752	77.752.121.867
340	Kab. Bulungan	71.609.084.744	7.442.486.345	64.166.598.399	71.609.084.744
341	Kab. Malinau	29.574.493.073	4.482.424.835	25.092.068.238	29.574.493.073
342	Kab. Nunukan	55.951.008.328	4.499.283.813	51.451.724.515	55.951.008.328
343	Kab. Tana Tidung	18.452.250.509	3.135.394.266	15.316.856.243	18.452.250.509
344	Kota Tarakan	105.054.469.872	10.958.012.913	94.096.456.959	105.054.469.872
345	Provinsi Sulawesi Utara	78.154.251.915	62.474.345.501	15.679.906.414	78.154.251.915
346	Kab. Bolaang Mongondow	9.215.546.535	2.764.422.483	6.451.124.052	9.215.546.535
347	Kab. Minahasa	19.216.098.573	5.760.412.254	13.455.686.319	19.216.098.573
348	Kab. Sangihe	8.549.383.578	4.233.299.243	4.316.084.335	8.549.383.578
349	Kota Bitung	31.964.373.954	7.252.964.129	24.711.409.825	31.964.373.954
350	Kota Manado	40.240.148.585	35.438.340.683	4.801.807.902	40.240.148.585
351	Kab. Kepulauan Talaud	7.779.479.132	2.846.214.781	4.933.264.351	7.779.479.132
352	Kab. Minahasa Selatan	9.024.979.611	3.979.816.850	5.045.162.761	9.024.979.611
353	Kab. Minahasa Tenggara	7.875.667.635	3.064.679.739	4.810.987.896	7.875.667.635
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	7.244.554.111	2.819.966.553	4.424.587.558	7.244.554.111
355	Kota Kotamubagu	9.637.785.220	5.276.478.828	4.361.306.392	9.637.785.220
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7.772.079.294	2.761.825.047	5.010.254.247	7.772.079.294
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	8.612.051.575	2.582.101.085	6.029.950.490	8.612.051.575
358	Kota Tomohon	13.415.852.461	4.256.659.777	9.159.192.684	13.415.852.461
359	Kab. Minahasa Utara	36.338.294.535	8.173.564.816	28.164.729.719	36.338.294.535
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	7.596.955.714	2.609.113.777	4.987.841.937	7.596.955.714
361	Provinsi Gorontalo	19.881.801.282	16.565.376.939	3.316.424.343	19.881.801.282
362	Kab. Boalemo	7.820.521.943	2.310.919.042	5.509.602.901	7.820.521.943
363	Kab. Gorontalo	9.607.643.593	4.393.153.968	5.214.489.635	9.607.643.593
364	Kota Gorontalo	14.235.584.241	10.183.003.648	4.052.580.593	14.235.584.241
365	Kab. Pohuwato	9.212.021.992	2.733.417.599	6.478.604.393	9.212.021.992
366	Kab. Gorontalo Utara	8.425.940.560	2.263.001.806	6.162.938.754	8.425.940.560
367	Kab. Bone Bolango	8.068.725.022	2.964.569.355	5.104.155.667	8.068.725.022
368	Provinsi Sulawesi Tengah	63.317.044.581	39.331.701.128	23.985.343.453	63.317.044.581
369	Kab. Banggai	68.849.491.022	9.294.902.186	59.554.588.836	68.849.491.022
370	Kab. Banggai Laut	6.598.532.102	2.022.162.083	4.576.370.019	6.598.532.102
371	Kab. Banggai Kepulauan	7.222.509.411	2.043.098.177	5.179.411.234	7.222.509.411
372	Kab. Buol	10.594.395.481	2.623.806.697	7.970.588.784	10.594.395.481
373	Kab. Toli-Toli	9.170.365.383	3.689.447.676	5.480.917.707	9.170.365.383
374	Kab. Donggala	10.056.794.863	2.786.035.546	7.270.759.317	10.056.794.863
375	Kab. Morowali	14.480.398.836	5.436.891.944	9.043.506.892	14.480.398.836
376	Kab. Morowali Utara	13.194.529.331	3.117.586.590	10.076.942.741	13.194.529.331
377	Kab. Poso	10.943.702.899	3.747.688.362	7.196.014.537	10.943.702.899
378	Kota Palu	20.980.564.177	16.310.852.169	4.669.712.008	20.980.564.177
379	Kab. Parigi Moutong	9.627.739.448	3.093.503.424	6.534.236.024	9.627.739.448
380	Kab. Sigi	7.677.742.059	2.459.253.059	5.218.488.000	7.677.742.059
381	Kab. Tojo Una-Una	8.205.067.499	2.392.523.779	5.812.543.720	8.205.067.499
382	Provinsi Sulawesi Selatan	189.182.309.749	164.256.930.524	24.925.379.225	189.182.309.749
383	Kab. Bantaeng	9.969.283.777	4.917.363.564	5.051.920.213	9.969.283.777
384	Kab. Barru	9.907.534.977	4.944.224.669	4.963.310.308	9.907.534.977



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 427 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
385	Kab. Bone	17.583.162.612	7.898.863.978	9.684.298.634	17.583.162.612
386	Kab. Bulukumba	13.338.072.172	6.620.372.379	6.717.699.793	13.338.072.172
387	Kab. Enrekang	10.596.582.860	4.797.141.197	5.799.441.663	10.596.582.860
388	Kab. Gowa	14.012.264.933	7.392.386.905	6.619.878.028	14.012.264.933
389	Kab. Jeneponto	12.050.670.579	6.468.018.227	5.582.652.352	12.050.670.579
390	Kab. Luwu	10.367.184.717	5.026.045.514	5.341.139.203	10.367.184.717
391	Kab. Luwu Utara	11.397.337.140	4.667.854.814	6.729.482.326	11.397.337.140
392	Kab. Maros	20.964.916.412	10.501.259.675	10.463.656.737	20.964.916.412
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	20.095.060.874	8.888.541.821	11.206.519.053	20.095.060.874
394	Kab. Pinrang	11.112.968.665	5.719.456.000	5.393.512.665	11.112.968.665
395	Kab. Selayar	9.700.430.982	4.293.893.974	5.406.537.008	9.700.430.982
396	Kab. Sidenreng Rappang	12.214.654.305	6.312.330.094	5.902.324.211	12.214.654.305
397	Kab. Sinjai	10.075.095.567	5.129.022.592	4.946.072.975	10.075.095.567
398	Kab. Soppeng	9.953.630.514	4.861.524.198	5.092.106.316	9.953.630.514
399	Kab. Takalar	12.780.545.377	5.257.823.027	7.522.722.350	12.780.545.377
400	Kab. Tana Toraja	9.274.052.897	4.498.638.859	4.775.414.038	9.274.052.897
401	Kab. Wajo	29.088.604.838	6.404.235.737	22.684.369.101	29.088.604.838
402	Kota Pare-pare	12.767.283.620	8.344.195.582	4.423.088.038	12.767.283.620
403	Kab. Toraja Utara	9.373.697.742	4.699.113.863	4.674.583.879	9.373.697.742
404	Kota Makassar	102.913.565.625	95.758.546.448	7.155.019.177	102.913.565.625
405	Kota Palopo	10.960.605.312	6.614.862.665	4.345.742.647	10.960.605.312
406	Kab. Luwu Timur	36.751.720.853	16.482.454.687	20.269.266.166	36.751.720.853
407	Provinsi Sulawesi Barat	18.378.410.941	12.063.902.838	6.314.508.103	18.378.410.941
408	Kab. Majene	8.121.890.371	2.591.927.083	5.529.963.288	8.121.890.371
409	Kab. Mamuju	13.811.229.239	5.779.149.348	8.032.079.891	13.811.229.239
410	Kab. Mamuju Tengah	8.755.090.846	1.525.164.403	7.229.926.443	8.755.090.846
411	Kab. Polewali Mandar	9.647.557.695	3.947.184.231	5.700.373.464	9.647.557.695
412	Kab. Mamasa	7.484.852.802	1.982.559.287	5.502.293.515	7.484.852.802
413	Kab. Pasangkayu	15.629.647.749	2.269.869.904	13.359.777.845	15.629.647.749
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	49.254.878.141	36.682.537.718	12.572.340.423	49.254.878.141
415	Kab. Buton	6.669.604.008	1.782.860.202	4.886.743.806	6.669.604.008
416	Kab. Konawe	9.256.950.538	2.823.529.284	6.433.421.254	9.256.950.538
417	Kab. Konawe Kepulauan	5.720.604.948	1.265.084.418	4.455.520.530	5.720.604.948
418	Kab. Kolaka	20.854.226.184	8.093.544.379	12.760.681.805	20.854.226.184
419	Kab. Kolaka Timur	6.375.565.791	1.435.065.352	4.940.500.439	6.375.565.791
420	Kab. Muna	7.434.870.033	2.761.705.763	4.673.164.270	7.434.870.033
421	Kota Kendari	21.785.883.530	17.039.821.333	4.746.062.197	21.785.883.530
422	Kota Bau-bau	9.275.651.305	4.410.186.551	4.865.464.754	9.275.651.305
423	Kab. Konawe Selatan	14.007.061.852	2.409.992.872	11.597.068.980	14.007.061.852
424	Kab. Bombana	7.936.349.837	2.140.120.059	5.796.229.778	7.936.349.837
425	Kab. Konawe Utara	10.751.026.816	1.358.888.626	9.392.138.190	10.751.026.816
426	Kab. Buton Utara	6.167.712.455	1.421.730.074	4.745.982.381	6.167.712.455
427	Kab. Wakatobi	6.928.158.661	1.902.618.566	5.025.540.095	6.928.158.661
428	Kab. Kolaka Utara	9.218.322.474	1.810.560.024	7.407.762.450	9.218.322.474
429	Kab. Muna Barat	5.754.556.339	1.440.637.182	4.313.919.157	5.754.556.339
430	Kab. Buton Tengah	6.802.212.175	1.649.494.180	5.152.717.995	6.802.212.175
431	Kab. Buton Selatan	6.777.951.811	1.569.077.319	5.208.874.492	6.777.951.811
432	Provinsi Bali	179.005.916.512	175.334.969.151	3.670.947.361	179.005.916.512
433	Kab. Badung	79.158.567.575	74.638.402.976	4.520.164.599	79.158.567.575
434	Kab. Bangli	16.440.861.953	11.963.683.399	4.477.178.554	16.440.861.953
435	Kab. Buleleng	24.498.664.444	18.862.277.756	5.636.386.688	24.498.664.444
436	Kab. Gianyar	25.216.664.438	20.619.900.920	4.596.763.518	25.216.664.438
437	Kab. Jembrana	17.945.002.056	12.827.358.561	5.117.643.495	17.945.002.056
438	Kab. Karangasem	19.658.751.772	14.688.068.265	4.970.683.507	19.658.751.772
439	Kab. Klungkung	17.256.463.918	13.035.049.899	4.221.414.019	17.256.463.918
440	Kab. Tabanan	21.959.807.412	17.065.204.637	4.894.602.775	21.959.807.412
441	Kota Denpasar	84.848.266.512	79.302.507.312	5.545.759.200	84.848.266.512
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	72.229.982.291	56.098.053.461	16.131.928.830	72.229.982.291
443	Kab. Bima	9.339.650.070	3.240.507.620	6.099.142.450	9.339.650.070
444	Kab. Dompu	9.797.480.045	4.564.561.065	5.232.918.980	9.797.480.045
445	Kab. Lombok Barat	12.451.322.502	6.042.936.800	6.408.385.702	12.451.322.502
446	Kab. Lombok Tengah	17.317.950.171	9.892.092.103	7.425.858.068	17.317.950.171
447	Kab. Lombok Timur	18.436.096.681	10.538.632.341	7.897.464.340	18.436.096.681
448	Kab. Sumbawa	20.500.851.596	6.945.798.988	13.555.052.608	20.500.851.596



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 428 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
449	Kota Mataram	28.078.881.733	22.622.691.439	5.456.190.294	28.078.881.733
450	Kab. Lombok Utara	9.540.227.689	4.469.357.580	5.070.870.109	9.540.227.689
451	Kota Bima	12.114.935.072	7.500.219.519	4.614.715.553	12.114.935.072
452	Kab. Sumbawa Barat	59.588.167.943	12.933.373.912	46.654.794.031	59.588.167.943
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	59.067.321.926	50.120.668.894	8.946.653.032	59.067.321.926
454	Kab. Alor	7.609.272.632	2.526.316.360	5.082.956.272	7.609.272.632
455	Kab. Belu	7.674.247.432	3.369.160.224	4.305.087.208	7.674.247.432
456	Kab. Ende	8.980.002.657	4.050.818.840	4.929.183.817	8.980.002.657
457	Kab. Flores Timur	8.280.628.007	3.019.570.858	5.261.057.349	8.280.628.007
458	Kab. Kupang	8.011.432.328	2.508.579.508	5.502.852.820	8.011.432.328
459	Kab. Lembata	6.778.993.131	2.113.884.614	4.665.108.517	6.778.993.131
460	Kab. Malaka	6.115.560.508	1.770.526.689	4.345.033.819	6.115.560.508
461	Kab. Manggarai	8.056.284.586	3.221.788.459	4.834.496.127	8.056.284.586
462	Kab. Ngada	6.884.324.547	2.369.690.402	4.514.634.145	6.884.324.547
463	Kab. Sikka	9.462.746.943	4.384.697.062	5.078.049.881	9.462.746.943
464	Kab. Sumba Barat	6.719.298.148	2.329.164.644	4.390.133.504	6.719.298.148
465	Kab. Sumba Timur	10.236.552.411	4.024.463.531	6.212.088.880	10.236.552.411
466	Kab. Timor Tengah Selatan	8.660.586.109	3.003.318.752	5.657.267.357	8.660.586.109
467	Kab. Timor Tengah Utara	7.519.333.764	2.417.283.957	5.102.049.807	7.519.333.764
468	Kota Kupang	25.320.729.080	20.843.514.203	4.477.214.877	25.320.729.080
469	Kab. Rote Ndao	6.673.049.901	1.798.849.039	4.874.400.862	6.673.049.901
470	Kab. Nagekeo	6.445.799.997	1.778.425.835	4.667.374.162	6.445.799.997
471	Kab. Sumba Tengah	6.028.027.185	1.400.225.479	4.627.801.706	6.028.027.185
472	Kab. Sumba Barat Daya	7.042.855.700	2.060.633.140	4.982.222.560	7.042.855.700
473	Kab. Manggarai Timur	6.796.429.035	2.001.150.188	4.795.278.847	6.796.429.035
474	Kab. Sabu Raijua	5.478.375.038	1.434.896.376	4.043.478.662	5.478.375.038
475	Kab. Manggarai Barat	7.756.987.381	2.754.245.383	5.002.741.998	7.756.987.381
476	Provinsi Maluku	40.626.368.858	26.219.086.051	14.407.282.807	40.626.368.858
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	9.525.590.878	3.160.818.885	6.364.771.993	9.525.590.878
478	Kab. Maluku Tengah	15.030.193.843	3.056.738.691	11.973.455.152	15.030.193.843
479	Kab. Maluku Tenggara	8.183.926.639	2.684.360.459	5.499.566.180	8.183.926.639
480	Kab. Pulau Buru	8.680.022.232	2.103.822.966	6.576.399.266	8.680.022.232
481	Kota Ambon	23.349.590.150	17.817.995.919	5.531.594.231	23.349.590.150
482	Kab. Seram Bagian Barat	8.195.252.573	1.901.827.596	6.293.424.977	8.195.252.573
483	Kab. Seram Bagian Timur	28.574.945.008	2.163.889.436	26.411.055.572	28.574.945.008
484	Kab. Maluku Barat Daya	7.616.199.264	1.654.956.769	5.961.242.495	7.616.199.264
485	Kab. Buru Selatan	7.186.648.390	1.311.483.004	5.875.165.386	7.186.648.390
486	Kab. Kepulauan Aru	9.539.943.688	2.053.711.082	7.486.232.606	9.539.943.688
487	Kota Tual	6.044.287.481	1.419.224.267	4.625.063.214	6.044.287.481
488	Provinsi Maluku Utara	33.402.200.226	25.266.451.087	8.135.749.139	33.402.200.226
489	Kab. Halmahera Tengah	9.206.084.182	1.911.036.992	7.295.047.190	9.206.084.182
490	Kab. Halmahera Barat	8.031.660.380	1.964.155.218	6.067.505.162	8.031.660.380
491	Kota Ternate	16.884.154.782	11.056.856.685	5.827.498.097	16.884.154.782
492	Kab. Halmahera Timur	8.801.845.097	1.956.091.582	6.845.753.515	8.801.845.097
493	Kota Tidore Kepulauan	8.845.603.352	3.503.626.950	5.341.976.402	8.845.603.352
494	Kab. Kepulauan Sula	8.859.144.651	1.902.579.752	6.956.564.899	8.859.144.651
495	Kab. Pulau Morotai	7.184.075.017	1.899.769.505	5.284.305.512	7.184.075.017
496	Kab. Pulau Taliabu	7.274.170.735	1.505.796.117	5.768.374.618	7.274.170.735
497	Kab. Halmahera Selatan	11.397.194.081	2.539.275.813	8.857.918.268	11.397.194.081
498	Kab. Halmahera Utara	18.541.442.398	9.660.888.015	8.880.754.383	18.541.442.398
499	Provinsi Papua	253.674.351.616	176.216.319.179	77.458.032.437	253.674.351.616
500	Kab. Yalimo	7.543.949.828	2.930.302.683	4.613.647.145	7.543.949.828
501	Kab. Lanny Jaya	8.039.740.733	3.006.096.688	5.033.644.045	8.039.740.733
502	Kab. Biak Numfor	11.431.063.484	6.184.646.419	5.246.417.065	11.431.063.484
503	Kab. Jayapura	15.289.567.256	5.688.145.254	9.581.422.002	15.289.567.256
504	Kab. Jayawijaya	12.163.748.190	6.177.388.847	5.986.359.343	12.163.748.190
505	Kab. Merauke	36.988.971.766	9.902.117.573	27.086.854.193	36.988.971.766
506	Kab. Mimika	304.025.685.168	131.073.600.669	172.952.084.499	304.025.685.168
507	Kab. Nabire	13.036.621.406	4.893.346.176	8.143.275.230	13.036.621.406
508	Kab. Paniai	10.174.374.948	3.958.247.979	6.216.126.969	10.174.374.948
509	Kab. Puncak Jaya	9.760.840.294	3.610.568.899	6.150.271.395	9.760.840.294
510	Kab. Kepulauan Yapen	11.251.664.334	4.077.913.934	7.173.750.400	11.251.664.334
511	Kota Jayapura	32.843.963.442	28.226.857.382	4.617.106.060	32.843.963.442
512	Kab. Sarmi	15.122.362.786	3.402.863.378	11.719.499.408	15.122.362.786



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 429 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
513	Kab. Keerom	13.815.202.332	3.543.662.757	10.271.539.575	13.815.202.332
514	Kab. Yahukimo	11.338.488.081	3.240.627.353	8.097.860.728	11.338.488.081
515	Kab. Pegunungan Bintang	11.392.195.135	3.323.900.751	8.068.294.384	11.392.195.135
516	Kab. Tolikara	9.762.873.503	3.100.916.374	6.661.957.129	9.762.873.503
517	Kab. Boven Digoel	15.960.761.992	3.443.633.660	12.517.128.332	15.960.761.992
518	Kab. Mappi	12.412.804.939	3.358.794.803	9.054.010.136	12.412.804.939
519	Kab. Asmat	12.226.695.419	3.443.448.553	8.783.246.866	12.226.695.419
520	Kab. Waropen	16.435.846.994	3.066.849.784	13.368.997.210	16.435.846.994
521	Kab. Mamberamo Raya	15.165.176.227	2.966.349.854	12.198.826.373	15.165.176.227
522	Kab. Mamberamo Tengah	7.497.548.750	2.995.056.964	4.502.491.786	7.497.548.750
523	Kab. Nduga	8.304.805.488	3.038.242.260	5.266.563.228	8.304.805.488
524	Kab. Dogiyai	8.865.165.457	3.185.780.084	5.679.385.373	8.865.165.457
525	Kab. Intan Jaya	12.691.983.068	5.047.208.000	7.644.775.068	12.691.983.068
526	Kab. Puncak	9.965.820.791	3.444.756.626	6.521.064.165	9.965.820.791
527	Kab. Deiyai	8.395.486.290	3.139.618.595	5.255.867.695	8.395.486.290
528	Kab. Supiori	8.330.370.994	3.113.715.839	5.216.655.155	8.330.370.994
529	Provinsi Papua Barat	140.766.513.456	33.253.228.608	107.513.284.848	140.766.513.456
530	Kab. Sorong	154.914.034.506	3.970.076.442	150.943.958.064	154.914.034.506
531	Kab. Manokwan	20.153.143.793	7.410.337.774	12.742.806.019	20.153.143.793
532	Kab. Manokwan Selatan	8.998.457.718	1.400.845.817	7.597.611.901	8.998.457.718
533	Kab. Fak Fak	12.564.317.006	1.711.979.844	10.852.337.162	12.564.317.006
534	Kota Sorong	18.407.664.644	11.433.695.006	6.973.969.638	18.407.664.644
535	Kab. Pegunungan Arfak	19.061.964.489	1.421.395.867	17.640.568.622	19.061.964.489
536	Kab. Sorong Selatan	12.707.952.679	1.972.208.221	10.735.744.458	12.707.952.679
537	Kab. Raja Ampat	14.092.467.236	1.736.630.099	12.355.837.137	14.092.467.236
538	Kab. Teluk Bintuni	230.303.035.891	12.995.727.707	217.307.308.184	230.303.035.891
539	Kab. Teluk Wondama	10.861.352.054	1.562.512.194	9.298.839.860	10.861.352.054
540	Kab. Tambrauw	9.117.164.799	1.585.183.820	7.531.980.979	9.117.164.799
541	Kab. Maybrat	8.735.079.126	1.311.186.088	7.423.893.038	8.735.079.126
542	Kab. Karmana	11.483.499.581	1.517.022.190	9.966.477.391	11.483.499.581
	JUMLAH	45.695.178.904.793	29.991.687.612.756	15.703.491.292.037	45.695.178.904.793



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 430 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	332.884.297.055	187.455.671.783	137.727.508.321	7.050.605.724	96.922.756	276.815.139	.	332.607.523.723
2	Kab. Aceh Barat	15.994.469.124	993.328.460	1.267.108.105	13.009.625.682	8.811.215	14.361.071	701.234.591	15.994.469.124
3	Kab. Aceh Besar	3.773.053.009	993.328.460	1.267.108.105	634.836.571	134.811.374	41.733.908	701.234.591	3.773.053.009
4	Kab. Aceh Selatan	3.985.874.697	993.328.460	1.267.108.105	997.140.703	8.811.215	5.495.400	701.234.591	3.973.118.474
5	Kab. Aceh Singkil	3.707.139.516	993.328.460	1.267.108.105	707.405.106	8.811.215	3.000.300	701.234.591	3.680.887.777
6	Kab. Aceh Tengah	4.236.453.222	993.328.460	1.267.108.105	1.155.502.985	8.811.215	110.467.866	701.234.591	4.236.453.222
7	Kab. Aceh Tenggara	3.553.182.577	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.145.003	701.234.591	3.553.182.577
8	Kab. Aceh Timur	16.834.342.379	2.332.193.836	13.175.909.950	568.555.203	8.811.215	4.384.500	701.234.591	16.791.089.295
9	Kab. Aceh Utara	40.800.022.990	19.512.607.749	19.992.979.042	568.555.203	8.811.215	2.815.200	701.234.591	40.787.003.000
10	Kab. Bireuen	3.553.164.026	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.708.200	701.234.591	3.540.745.774
11	Kab. Pidie	3.954.250.228	993.328.460	1.267.108.105	969.578.191	8.811.215	1.946.100	701.234.591	3.942.006.662
12	Kab. Simeulue	3.557.704.024	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.104.812	701.234.591	3.553.142.386
13	Kota Banda Aceh	3.553.164.026	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.708.200	701.234.591	3.540.745.774
14	Kota Sabang	3.612.215.687	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	67.844.325	14.145.003	701.234.591	3.612.215.687
15	Kota Langsa	3.555.439.393	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	1.745.700	701.234.591	3.540.783.274
16	Kota Lhokseumawe	3.553.182.577	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.145.003	701.234.591	3.553.182.577
17	Kab. Nagan Raya	5.221.122.057	993.328.460	1.267.108.105	2.231.445.600	8.811.215	4.918.500	701.234.591	5.206.846.471
18	Kab. Aceh Jaya	3.561.406.003	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	3.777.600	701.234.591	3.542.815.174
19	Kab. Pidie Jaya	3.553.182.577	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	14.145.003	701.234.591	3.553.182.577
20	Kab. Aceh Barat Daya	3.606.978.894	993.328.460	1.267.108.105	621.750.867	8.811.215	1.708.200	701.234.591	3.593.941.438
21	Kab. Gayo Lues	4.222.104.153	993.328.460	1.267.108.105	1.219.654.252	8.811.215	31.967.530	701.234.591	4.222.104.153
22	Kab. Aceh Tamiang	5.700.645.142	3.121.311.848	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	2.552.400	701.234.591	5.669.573.362
23	Kab. Bener Meriah	3.613.162.723	993.328.460	1.267.108.105	568.555.203	8.811.215	6.441.000	701.234.591	3.545.478.574



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 431 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Kota Subulussalam	3.567.679.226	993.328.460	1.267.108.105	583.070.403	8.811.215	1.708.200	701.234.591	3.555.260.974
25	Provinsi Sumatera Utara	58.317.018.988	468.091.031	628.611.060	45.381.648.376	278.839.285	11.559.829.236	.	58.317.018.988
26	Kab. Asahan	3.694.034.648	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	77.829.300	701.234.591	3.586.343.037
27	Kab. Dairi	4.492.552.537	29.255.886	39.287.950	3.357.557.518	17.427.394	85.546.500	701.234.591	4.230.309.839
28	Kab. Deli Serdang	3.787.195.865	30.520.180	130.093.553	2.721.307.916	17.427.394	186.612.231	701.234.591	3.787.195.865
29	Kab. Karo	3.862.867.703	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	354.353.966	701.234.591	3.862.867.703
30	Kab. LabuhanBatu	3.842.285.299	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	155.658.300	701.234.591	3.664.172.037
31	Kab. Langkat	5.359.175.531	560.352.621	1.166.416.517	2.721.307.916	17.427.394	192.436.492	701.234.591	5.359.175.531
32	Kab. Mandailing Natal	7.793.573.016	29.255.886	39.287.950	5.326.367.381	557.678.241	993.277.200	701.234.591	7.647.101.249
33	Kab. Nias	3.694.034.648	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	77.829.300	701.234.591	3.586.343.037
34	Kab. Simalungun	3.740.686.437	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	232.172.700	701.234.591	3.740.686.437
35	Kab. Tapanuli Selatan	92.592.324.179	29.255.886	39.287.950	91.619.373.933	17.427.394	98.408.400	701.234.591	92.504.988.154
36	Kab. Tapanuli Tengah	4.452.818.522	29.255.886	39.287.950	3.352.235.420	17.427.394	249.263.615	701.234.591	4.388.704.856
37	Kab. Tapanuli Utara	5.736.802.204	29.255.886	39.287.950	4.553.707.028	17.427.394	395.889.355	701.234.591	5.736.802.204
38	Kab. Toba Samosir	4.122.186.942	29.255.886	39.287.950	2.914.118.017	17.427.394	420.863.104	701.234.591	4.122.186.942
39	Kota Binjai	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
40	Kota Medan	3.804.802.631	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	296.288.894	701.234.591	3.804.802.631
41	Kota Pematang Siantar	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
42	Kota Sibolga	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
43	Kota Tanjung Balai	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
44	Kab. Batu Bara	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
45	Kab. LabuhanBatu Utara	5.836.325.040	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	2.261.294.720	701.234.591	5.769.808.457
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	4.049.372.937	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	540.859.200	701.234.591	4.049.372.937



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 432 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kab. Padang Lawas Utara	3.869.320.613	29.255.886	39.287.950	2.746.346.916	17.427.394	289.710.397	701.234.591	3.823.263.134
48	Kab. Padang Lawas	4.321.042.897	403.821.346	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	437.963.700	701.234.591	4.321.042.897
49	Kab. Nias Utara	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
50	Kab. Nias Barat	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
51	Kota Tebing Tinggi	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
52	Kota Padang Sidempuan	4.082.749.967	29.255.886	39.287.950	3.109.177.918	17.427.394	186.366.228	701.234.591	4.082.749.967
53	Kab. Pakpak Bharat	4.792.838.427	29.255.886	39.287.950	2.744.870.616	17.427.394	81.945.000	701.234.591	3.614.021.437
54	Kab. Nias Selatan	4.056.813.739	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	509.990.400	701.234.591	4.018.504.137
55	Kab. Humbang Hasundutan	4.126.329.650	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	191.014.500	701.234.591	3.899.528.237
56	Kab. Serdang Bedagai	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
57	Kab. Sumsel	3.948.237.089	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	180.210.300	701.234.591	3.688.724.037
58	Kota Gunungsitoh	3.694.879.965	29.255.886	39.287.950	2.721.307.916	17.427.394	186.366.228	701.234.591	3.694.879.965
59	Provinsi Sumatera Barat	15.535.825.002	-	-	4.932.058.001	370.295.881	10.233.471.120	-	15.535.825.002
60	Kab. LimaPuluh Kota	1.608.745.501	-	-	673.218.423	41.144.132	160.993.906	701.234.591	1.576.591.052
61	Kab. Agam	1.465.917.325	-	-	531.522.453	41.144.132	75.024.300	701.234.591	1.348.925.476
62	Kab. Kepulauan Mentawai	4.483.658.883	-	-	522.184.453	41.144.132	1.027.003.200	701.234.591	2.291.566.376
63	Kab. Padang Pariaman	1.455.781.978	-	-	522.184.453	41.144.132	191.218.802	701.234.591	1.455.781.978
64	Kab. Pasaman	1.700.641.251	-	-	765.217.456	41.144.132	193.045.072	701.234.591	1.700.641.251
65	Kab. Pesisir Selatan	1.615.084.425	-	-	676.737.519	41.144.132	87.062.100	701.234.591	1.506.178.342
66	Kab. Sijunjung	1.999.724.007	-	-	911.323.413	41.144.132	346.021.871	701.234.591	1.999.724.007
67	Kab. Solok	1.804.158.708	-	-	631.308.384	266.710.603	79.037.100	701.234.591	1.678.290.678
68	Kab. Tanah Datar	1.456.188.422	-	-	522.184.453	41.144.132	160.666.351	701.234.591	1.425.229.527
69	Kota Bukit Tinggi	1.457.702.965	-	-	522.184.453	41.144.132	193.139.789	701.234.591	1.457.702.965



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 433 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Kota Padang Panjang	1.455.781.978	-	-	522.184.453	41.144.132	191.218.802	701.234.591	1.455.781.978
71	Kota Padang	1.456.536.096	-	-	523.733.812	41.144.132	180.275.330	701.234.591	1.446.387.865
72	Kota Payakumbuh	1.455.784.321	-	-	522.184.453	41.144.132	191.221.145	701.234.591	1.455.784.321
73	Kota Sawahlunto	9.958.106.870	-	-	9.020.525.672	41.144.132	187.354.464	701.234.591	9.950.258.859
74	Kota Solok	1.455.782.349	-	-	522.184.453	41.144.132	191.219.173	701.234.591	1.455.782.349
75	Kota Pariaman	1.460.532.178	-	-	522.184.453	41.144.132	195.969.002	701.234.591	1.460.532.178
76	Kab. Pasaman Barat	1.472.366.800	-	-	531.038.753	41.144.132	198.949.324	701.234.591	1.472.366.800
77	Kab. Dharmasraya	1.729.956.123	-	-	783.747.868	41.144.132	203.829.532	701.234.591	1.729.956.123
78	Kab. Solok Selatan	2.053.193.676	-	-	645.179.847	515.024.963	144.240.900	701.234.591	2.005.680.301
79	Provinsi Riau	864.950.038.139	812.548.162.439	18.834.225.216	10.707.972.698	-	22.859.677.786	-	864.950.038.139
80	Kab. Bengkalis	818.101.260.166	803.642.583.241	3.424.404.683	1.813.824.579	-	8.519.213.072	701.234.591	818.101.260.166
81	Kab. Indragiri Hilir	172.302.436.388	147.736.029.758	3.424.404.683	16.115.091.069	-	4.325.676.287	701.234.591	172.302.436.388
82	Kab. Indragiri Hulu	161.991.433.553	150.156.572.586	3.424.404.683	3.432.735.276	-	4.276.486.417	701.234.591	161.991.433.553
83	Kab. Kampar	373.824.111.279	354.235.398.537	11.823.470.939	1.886.581.922	-	5.177.425.290	701.234.591	373.824.111.279
84	Kab. Kuantan Singingi	161.799.587.168	147.736.029.758	3.424.404.683	5.888.557.665	-	4.049.360.471	701.234.591	161.799.587.168
85	Kab. Pelalawan	199.938.435.166	151.780.236.083	27.973.644.349	1.856.160.579	-	17.627.159.564	701.234.591	199.938.435.166
86	Kab. Rokan Hilir	500.945.219.255	490.916.075.821	3.424.404.683	1.813.824.579	-	4.089.679.581	701.234.591	500.945.219.255
87	Kab. Rokan Hulu	163.065.226.019	153.632.318.328	3.424.404.683	1.887.234.980	-	3.420.033.437	701.234.591	163.065.226.019
88	Kab. Siak	422.274.864.980	404.079.024.956	5.891.277.700	1.813.824.579	-	9.789.503.154	701.234.591	422.274.864.980
89	Kota Dumai	158.526.075.439	147.736.029.758	3.424.404.683	1.813.824.579	-	4.850.581.828	701.234.591	158.526.075.439
90	Kota Pekanbaru	156.957.018.140	147.736.029.758	3.424.404.683	1.813.824.579	-	3.281.524.529	701.234.591	156.957.018.140
91	Kab. Kepulauan Meranti	161.515.867.404	150.806.322.429	3.822.422.058	2.523.519.921	-	3.662.368.405	701.234.591	161.515.867.404
92	Provinsi Kepulauan Riau	379.767.968.007	61.990.229.751	303.275.953.954	14.024.521.534	-	477.262.768	-	379.767.968.007



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 434 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Kab. Bintan	116.209.673.565	20.460.816.243	90.641.521.814	4.381.735.449	-	12.264.900	701.234.591	116.197.572.997
94	Kab. Natuna	269.750.039.838	83.036.516.945	182.141.705.310	3.846.943.233	-	12.264.900	701.234.591	269.738.664.979
95	Kab. Karimun	125.750.464.141	20.460.816.243	90.641.521.828	13.835.593.758	-	42.384.600	701.234.591	125.681.551.020
96	Kota Batam	115.675.640.431	20.460.816.243	90.641.521.828	3.846.943.233	-	12.264.900	701.234.591	115.662.780.795
97	Kab. Kepulauan Anambas	198.662.699.221	54.152.301.439	139.910.851.661	3.846.943.233	-	44.956.485	701.234.591	198.656.287.409
98	Kota Tanjung Pinang	115.715.443.087	20.460.816.243	90.641.521.828	3.887.967.776	-	19.642.913	701.234.591	115.711.183.351
99	Kab. Lingga	116.354.311.233	20.460.816.243	90.641.521.828	4.507.267.971	-	43.470.600	701.234.591	116.354.311.233
100	Provinsi Jambi	236.361.941.734	62.493.692.403	131.859.314.422	31.032.154.664	-	10.976.780.245	-	236.361.941.734
101	Kab. Batanghari	59.590.797.381	13.337.142.039	26.371.862.693	15.741.480.275	-	3.439.077.783	701.234.591	59.590.797.381
102	Kab. Bungo	65.223.864.037	12.498.738.580	26.371.862.693	24.577.937.529	-	1.074.090.644	701.234.591	65.223.864.037
103	Kab. Kerinci	46.492.397.004	12.498.738.580	26.371.862.693	5.853.117.773	-	1.067.443.367	701.234.591	46.492.397.004
104	Kab. Merangin	47.046.611.642	12.498.738.580	26.371.862.693	6.286.346.890	-	1.188.428.888	701.234.591	47.046.611.642
105	Kab. Muaro Jambi	50.207.893.469	14.017.886.179	26.449.728.850	7.697.344.480	-	413.249.100	701.234.591	49.279.443.200
106	Kab. Sarolangun	75.252.666.201	13.313.321.228	26.384.951.342	30.708.192.432	-	463.393.200	701.234.591	71.571.092.793
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	340.962.107.966	102.366.369.145	225.081.108.750	7.089.581.233	-	5.723.814.247	701.234.591	340.962.107.966
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	104.794.606.439	31.103.229.405	64.918.428.530	5.853.117.773	-	2.218.596.140	701.234.591	104.794.606.439
109	Kab. Tebo	55.431.716.603	13.230.203.874	26.371.862.693	10.065.694.683	-	5.062.720.762	701.234.591	55.431.716.603
110	Kota Jambi	46.849.999.483	12.856.341.059	26.371.862.693	5.853.117.773	-	1.067.443.367	701.234.591	46.849.999.483
111	Kota Sungai Penuh	46.495.322.113	12.498.738.580	26.371.862.693	5.853.117.773	-	1.070.368.476	701.234.591	46.495.322.113
112	Provinsi Sumatera Selatan	936.907.319.894	95.875.954.953	542.294.890.067	290.587.611.086	159.007.277	7.989.856.511	-	936.907.319.894
113	Kab. Lahat	367.592.492.523	13.278.629.818	93.414.795.773	259.034.722.247	83.877.958	926.158.558	701.234.591	367.439.418.945
114	Kab. Musi Banyuasin	1.140.595.500.033	146.921.908.705	913.752.047.568	75.318.985.023	19.875.565	3.881.448.581	701.234.591	1.140.595.500.033
115	Kab. Musi Rawas	238.857.767.080	30.470.952.368	162.354.426.992	43.975.296.950	19.875.565	1.335.980.614	701.234.591	238.857.767.080



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 435 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Kab Musi Rawas Utara	131.380.124.327	11.984.494.572	67.786.861.498	49.964.785.816	19.875.565	920.848.564	701.234.591	131.378.100.606
117	Kab. Muara Enim	425.449.223.197	18.413.015.321	108.501.891.548	296.054.797.174	212.369.592	1.565.914.971	701.234.591	425.449.223.197
118	Kab. Ogan Komering Ilir	127.823.654.693	11.984.494.572	67.786.861.498	36.639.619.075	19.875.565	10.691.569.392	701.234.591	127.823.654.693
119	Kab. Ogan Komering Ulu	133.919.630.138	20.550.902.270	72.979.885.443	38.704.081.963	19.875.565	474.505.500	701.234.591	133.430.485.332
120	Kota Palembang	116.882.059.110	11.984.494.572	67.786.861.498	35.463.075.175	19.875.565	926.517.709	701.234.591	116.882.059.110
121	Kota Pagar Alam	118.479.980.899	11.984.494.572	67.786.861.498	35.463.075.175	59.048.370	2.265.033.666	701.234.591	118.259.747.872
122	Kota Lubuk Linggau	116.882.059.110	11.984.494.572	67.786.861.498	35.463.075.175	19.875.565	926.517.709	701.234.591	116.882.059.110
123	Kota Prabumulih	123.031.546.418	14.315.806.473	71.129.753.726	35.938.358.354	19.875.565	926.517.709	701.234.591	123.031.546.418
124	Kab. Empat Lawang	119.047.627.328	11.984.494.572	67.786.861.498	37.628.643.393	19.875.565	926.517.709	701.234.591	119.047.627.328
125	Kab. Banyuasin	125.040.668.207	15.221.406.293	67.786.861.498	40.319.892.291	19.875.565	991.397.969	701.234.591	125.040.668.207
126	Kab. Ogan Ilir	118.848.156.043	13.701.602.180	67.780.625.220	35.718.300.778	19.875.565	926.517.709	701.234.591	118.848.156.043
127	Kab. OKU Timur	118.170.553.502	11.984.494.572	67.786.861.498	36.750.508.036	19.875.565	927.579.240	701.234.591	118.170.553.502
128	Kab. OKU Selatan	117.789.853.759	11.984.494.572	67.786.861.498	36.323.553.994	23.948.624	969.760.480	701.234.591	117.789.853.759
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	127.952.017.193	18.791.870.615	69.184.383.391	38.329.825.728	19.875.565	923.183.947	701.234.591	127.950.373.837
130	Provinsi Bangka Belitung	162.566.556.351	5.663.154.403	-	155.723.973.336	-	649.159.790	-	162.036.287.529
131	Kab. Bangka	86.760.314.596	1.616.479.128	-	84.384.902.916	-	10.012.800	701.234.591	86.712.629.435
132	Kab. Belitung	47.757.442.292	1.616.479.128	-	45.389.852.863	-	35.034.300	701.234.591	47.742.600.882
133	Kota Pangkal Pinang	42.367.869.981	1.616.479.128	-	40.004.781.686	-	45.374.576	701.234.591	42.367.869.981
134	Kab. Bangka Selatan	70.388.824.822	1.616.479.128	-	67.501.857.916	-	561.985.019	701.234.591	70.381.556.654
135	Kab. Bangka Tengah	52.826.781.988	1.616.479.128	-	50.028.407.890	-	401.887.049	701.234.591	52.748.008.658
136	Kab. Bangka Barat	55.860.361.836	1.616.479.128	-	53.495.826.280	-	46.821.837	701.234.591	55.860.361.836
137	Kab. Belitung Timur	61.458.371.265	1.616.479.128	-	58.405.720.815	-	734.936.731	701.234.591	61.458.371.265
138	Provinsi Bengkulu	25.953.334.012	-	-	24.799.297.280	58.084.698	548.173.160	-	25.405.555.138



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 436 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	Kab. Bengkulu Selatan	6.114.407.990	-	-	5.382.580.621	12.907.856	2.979.300	701.234.591	6.099.702.368
140	Kab. Bengkulu Utara	27.217.754.603	-	-	25.046.153.735	12.907.856	26.812.800	701.234.591	25.787.108.982
141	Kab. Rejang Lebong	6.155.933.005	-	-	5.382.580.621	55.348.338	2.979.300	701.234.591	6.142.142.850
142	Kota Bengkulu	6.144.729.883	-	-	5.382.580.621	12.907.856	47.106.390	701.234.591	6.143.829.458
143	Kab. Kaur	6.267.622.658	-	-	5.519.936.416	12.907.856	33.543.795	701.234.591	6.267.622.658
144	Kab. Seluma	8.616.825.302	-	-	7.882.509.976	12.907.856	20.172.879	701.234.591	8.616.825.302
145	Kab. Mukomuko	6.113.492.523	-	-	5.382.580.621	12.907.856	2.979.300	701.234.591	6.099.702.368
146	Kab. Lebong	7.480.040.569	-	-	6.703.630.385	12.907.856	2.979.300	701.234.591	7.420.752.132
147	Kab. Bengkulu Tengah	27.451.038.486	-	-	26.720.126.560	12.907.880	16.769.455	701.234.591	27.451.038.486
148	Kab. Kepahiang	6.176.315.021	-	-	5.382.580.621	73.728.915	8.216.504	701.234.591	6.165.760.631
149	Provinsi Lampung	89.921.761.457	66.089.197.466	17.363.207.583	1.508.968.080	4.584.982.945	375.405.383	-	89.921.761.457
150	Kab. Lampung Barat	12.922.139.039	8.967.380.194	2.313.955.822	221.390.212	665.757.126	52.421.094	701.234.591	12.922.139.039
151	Kab. Lampung Selatan	13.199.205.438	8.967.380.194	2.313.955.822	313.265.836	820.821.953	82.547.042	701.234.591	13.199.205.438
152	Kab. Lampung Tengah	12.900.387.832	8.967.380.194	2.313.955.822	210.261.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	12.900.387.832
153	Kab. Lampung Utara	12.876.058.612	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	39.924.300	701.234.591	12.863.561.818
154	Kab. Lampung Timur	44.454.946.251	40.521.938.613	2.313.955.822	210.261.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	44.454.946.251
155	Kab. Tanggamus	23.614.217.350	8.967.380.194	2.313.955.822	3.031.793.214	8.439.068.178	160.785.351	701.234.591	23.614.217.350
156	Kab. Tulang Bawang	12.984.905.132	8.967.380.194	2.313.955.822	294.778.912	654.997.299	52.558.314	701.234.591	12.984.905.132
157	Kab. Way Kanan	13.724.222.749	8.967.380.194	2.313.955.822	463.105.297	654.997.299	623.549.546	701.234.591	13.724.222.749
158	Kab. Pesawaran	13.389.806.645	8.967.380.194	2.313.955.822	280.485.839	1.074.191.885	52.558.314	701.234.591	13.389.806.645
159	Kab. Pesisir Barat	12.876.532.991	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	43.049.983	701.234.591	12.866.687.501
160	Kab. Pringsewu	12.896.551.132	8.967.380.194	2.313.955.822	206.424.912	654.997.299	52.558.314	701.234.591	12.896.551.132
161	Kab. Mesuji	13.195.118.519	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.613	654.997.299	371.481.000	701.234.591	13.195.118.519



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 437 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	Kab. Tulang Bawang Barat	12.876.195.832	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	12.876.195.832
163	Kota Bandar Lampung	13.011.176.886	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	790.115.573	45.989.713	701.234.591	13.004.745.505
164	Kota Metro	12.876.195.832	8.967.380.194	2.313.955.822	186.069.612	654.997.299	52.558.314	701.234.591	12.876.195.832
165	Provinsi DKI Jakarta	183.375.491.488	130.238.555.574	52.435.701.394	-	-	-	701.234.520	183.375.491.488
166	Provinsi Jawa Barat	307.513.548.008	66.627.817.955	79.076.521.901	5.266.894.160	155.572.404.668	969.909.324	-	307.513.548.008
167	Kab. Bandung	184.280.656.644	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	172.198.178.337	154.724.880	701.234.591	184.280.656.644
168	Kab. Bekasi	31.877.244.515	6.486.866.541	12.273.045.063	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	31.877.244.515
169	Kab. Bogor	75.624.857.352	4.944.070.438	5.908.065.237	9.741.057.872	54.219.793.528	110.635.686	701.234.591	75.624.857.352
170	Kab. Ciamis	24.333.314.822	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	438.454.637	701.234.591	24.333.314.822
171	Kab. Cianjur	25.392.269.761	4.944.070.438	5.908.065.237	1.516.822.959	11.967.106.758	354.969.778	701.234.591	25.392.269.761
172	Kab. Cirebon	23.972.292.072	4.944.070.438	5.908.065.237	374.841.812	11.967.106.758	76.973.236	701.234.591	23.972.292.072
173	Kab. Garut	81.410.721.837	4.944.070.438	5.908.065.237	607.235.563	69.155.674.758	94.441.250	701.234.591	81.410.721.837
174	Kab. Indramayu	32.432.300.220	8.399.061.278	10.823.479.278	374.383.161	11.967.106.758	167.035.154	701.234.591	32.432.300.220
175	Kab. Karawang	36.982.967.582	7.474.504.415	16.390.533.294	374.383.161	11.967.106.758	75.205.363	701.234.591	36.982.967.582
176	Kab. Kuningan	24.023.614.014	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	128.753.829	701.234.591	24.023.614.014
177	Kab. Majalengka	24.216.392.102	5.042.910.841	6.027.064.365	374.383.161	11.967.106.758	103.692.386	701.234.591	24.216.392.102
178	Kab. Pangandaran	24.227.179.528	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	332.319.343	701.234.591	24.227.179.528
179	Kab. Purwakarta	24.189.736.124	4.944.070.438	5.908.065.237	392.082.435	12.007.459.551	236.823.872	701.234.591	24.189.736.124
180	Kab. Subang	46.425.739.102	6.172.701.525	27.077.062.735	374.383.161	12.008.227.595	92.129.495	701.234.591	46.425.739.102
181	Kab. Sukabumi	64.015.895.237	4.944.070.438	5.908.065.237	906.500.279	51.346.349.675	209.675.017	701.234.591	64.015.895.237
182	Kab. Sumedang	24.020.721.600	4.944.070.438	5.908.065.237	374.426.326	11.972.732.957	120.192.051	701.234.591	24.020.721.600
183	Kab. Tasikmalaya	24.035.212.694	4.944.070.438	5.908.065.237	365.571.358	11.967.106.758	149.164.312	701.234.591	24.035.212.694
184	Kab. Bandung Barat	24.060.444.084	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	12.006.112.359	126.578.298	701.234.591	24.060.444.084



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 438 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	Kota Bandung	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
186	Kota Bekasi	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
187	Kota Bogor	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
188	Kota Cirebon	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
189	Kota Depok	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
190	Kota Sukabumi	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
191	Kota Cimahi	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
192	Kota Tasikmalaya	23.969.468.586	4.944.070.438	5.908.065.237	374.383.161	11.967.106.758	74.608.401	701.234.591	23.969.468.586
193	Kota Banjar	24.134.117.102	4.944.070.438	5.908.065.237	377.247.147	11.967.106.758	236.392.931	701.234.591	24.134.117.102
194	Provinsi Banten	3.378.868.313	-	-	2.438.542.508	460.863.819	479.461.986	-	3.378.868.313
195	Kab. Lebak	2.186.779.805	-	-	1.199.969.886	131.675.630	153.899.698	701.234.591	2.186.779.805
196	Kab. Pandeglang	6.980.328.786	-	-	4.806.691.047	530.414.385	941.988.763	701.234.591	6.980.328.786
197	Kab. Serang	1.984.463.485	-	-	623.397.845	522.987.854	131.655.721	701.234.591	1.979.276.011
198	Kab. Tangerang	1.600.419.761	-	-	630.520.399	131.675.630	136.989.141	701.234.591	1.600.419.761
199	Kota Cilegon	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	1.593.297.207
200	Kota Tangerang	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	1.593.297.207
201	Kota Serang	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	1.593.297.207
202	Kota Tangerang Selatan	1.593.297.207	-	-	623.397.845	131.675.630	136.989.141	701.234.591	1.593.297.207
203	Provinsi Jawa Tengah	11.258.878.606	617.899.676	4.951.031.508	96.167.508	451.708.450	5.142.071.464	-	11.258.878.606
204	Kab. Banjarnegara	1.381.781.534	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	323.749.370	701.234.591	1.381.781.534
205	Kab. Banyumas	1.613.765.918	36.346.929	291.237.025	2.642.858	155.520.720	333.035.199	701.234.591	1.520.017.322
206	Kab. Batang	1.550.296.911	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	492.264.747	701.234.591	1.550.296.911
207	Kab. Blora	17.015.980.402	1.235.799.353	9.902.062.422	2.642.858	26.570.761	5.147.670.417	701.234.591	17.015.980.402



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 439 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	Kab. Boyolali	1.413.096.043	36.346.929	291.237.025	2.642.858	29.072.970	352.561.670	701.234.591	1.413.096.043
209	Kab. Brebes	1.748.636.703	36.346.929	291.237.025	2.642.858	107.144.776	610.030.524	701.234.591	1.748.636.703
210	Kab. Cilacap	1.650.381.787	36.346.929	291.237.025	105.085.062	26.570.761	489.907.419	701.234.591	1.650.381.787
211	Kab. Demak	1.345.825.990	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	287.793.826	701.234.591	1.345.825.990
212	Kab. Grobogan	1.968.820.449	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	910.788.285	701.234.591	1.968.820.449
213	Kab. Jepara	1.398.370.142	36.346.929	291.237.025	11.664.712	26.570.761	331.316.124	701.234.591	1.398.370.142
214	Kab. Karanganyar	1.690.895.599	36.346.929	291.237.025	2.642.858	364.543.572	294.890.624	701.234.591	1.690.895.599
215	Kab. Kebumen	1.417.931.636	36.346.929	291.237.025	26.447.758	26.570.761	336.094.572	701.234.591	1.417.931.636
216	Kab. Kendal	1.627.524.417	36.346.929	291.237.025	2.642.858	34.905.773	561.157.241	701.234.591	1.627.524.417
217	Kab. Klaten	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	1.340.170.369
218	Kab. Kudus	1.340.380.149	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.347.985	701.234.591	1.340.380.149
219	Kab. Magelang	1.384.029.091	36.346.929	291.237.025	2.642.858	61.945.699	290.621.989	701.234.591	1.384.029.091
220	Kab. Pati	1.683.829.392	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	625.797.228	701.234.591	1.683.829.392
221	Kab. Pekalongan	1.412.196.759	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	354.164.595	701.234.591	1.412.196.759
222	Kab. Pemalang	1.931.441.590	36.346.929	291.237.025	2.642.858	46.706.549	853.273.638	701.234.591	1.931.441.590
223	Kab. Purbalingga	1.370.725.108	36.346.929	291.237.025	2.642.858	41.725.995	297.537.710	701.234.591	1.370.725.108
224	Kab. Purworejo	1.384.455.122	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	326.422.958	701.234.591	1.384.455.122
225	Kab. Rembang	2.206.958.859	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	1.148.926.695	701.234.591	2.206.958.859
226	Kab. Semarang	1.535.145.516	36.346.929	291.237.025	2.642.858	144.864.576	358.819.537	701.234.591	1.535.145.516
227	Kab. Sragen	1.465.666.498	36.346.929	291.237.025	2.642.858	83.479.538	350.725.557	701.234.591	1.465.666.498
228	Kab. Sukoharjo	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	1.340.170.369
229	Kab. Tegal	1.580.665.102	36.346.929	291.237.025	2.642.858	85.408.015	463.795.684	701.234.591	1.580.665.102
230	Kab. Temanggung	1.382.471.079	36.346.929	291.237.025	2.642.858	39.572.737	311.436.939	701.234.591	1.382.471.079



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 440 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	Kab. Wonorejo	1.581.592.203	36.346.929	291.237.025	212.631.367	33.474.011	306.668.280	701.234.591	1.581.592.203
232	Kab. Wonosobo	1.391.005.084	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	332.972.920	701.234.591	1.391.005.084
233	Kota Magelang	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	1.340.170.369
234	Kota Pekalongan	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	1.340.170.369
235	Kota Salatiga	1.341.711.048	36.346.929	291.237.025	2.642.858	28.111.440	282.138.205	701.234.591	1.341.711.048
236	Kota Semarang	1.394.502.004	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	336.469.840	701.234.591	1.394.502.004
237	Kota Surakarta	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	1.340.170.369
238	Kota Tegal	1.340.170.369	36.346.929	291.237.025	2.642.858	26.570.761	282.138.205	701.234.591	1.340.170.369
239	Provinsi DI Yogyakarta	44.756.323	-	-	22.980.691	-	21.775.632	-	44.756.323
240	Kab. Bantul	713.613.199	-	-	1.489.441	-	10.889.167	701.234.591	713.613.199
241	Kab. Gunung Kidul	746.273.941	-	-	1.489.441	-	43.549.909	701.234.591	746.273.941
242	Kab. Kulon Progo	798.087.404	-	-	85.964.997	-	10.887.816	701.234.591	798.087.404
243	Kab. Sleman	713.611.848	-	-	1.489.441	-	10.887.816	701.234.591	713.611.848
244	Kota Yogyakarta	713.611.848	-	-	1.489.441	-	10.887.816	701.234.591	713.611.848
245	Provinsi Jawa Timur	1.237.819.248.991	1.157.989.967.942	58.768.355.271	15.388.619.409	577.281.112	5.095.025.257	-	1.237.819.248.991
246	Kab. Bangkalan	74.403.438.039	65.556.392.830	7.043.568.124	814.454.968	31.203.994	256.583.532	701.234.591	74.403.438.039
247	Kab. Banyuwangi	100.073.579.995	62.568.101.586	3.099.167.031	30.316.870.959	389.175.367	2.999.030.461	701.234.591	100.073.579.995
248	Kab. Blitar	67.813.967.013	62.568.101.586	3.099.167.031	814.903.487	31.203.994	599.356.324	701.234.591	67.813.967.013
249	Kab. Bojonegoro	2.281.171.868.831	2.274.535.553.497	4.376.587.362	814.447.240	31.203.994	712.842.147	701.234.591	2.281.171.868.831
250	Kab. Bondowoso	68.044.170.471	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	209.165.322	652.054.701	701.234.591	68.044.170.471
251	Kab. Gresik	67.656.560.411	62.584.661.653	3.242.222.454	814.447.240	31.203.994	282.790.479	701.234.591	67.656.560.411
252	Kab. Jember	68.371.280.627	62.568.101.586	3.099.167.031	870.231.781	31.203.994	1.101.341.644	701.234.591	68.371.280.627
253	Kab. Jombang	67.570.446.261	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	356.291.819	701.234.591	67.570.446.261



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 441 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Kab. Kediri	67.657.259.548	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	443.105.106	701.234.591	67.657.259.548
255	Kab. Lamongan	67.878.634.176	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	664.479.734	701.234.591	67.878.634.176
256	Kab. Lumajang	68.776.133.401	62.568.101.586	3.099.167.031	1.927.030.345	31.203.994	449.395.854	701.234.591	68.776.133.401
257	Kab. Madiun	68.260.537.856	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	124.075.999	953.511.409	701.234.591	68.260.537.856
258	Kab. Magetan	67.505.629.262	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	66.648.428	256.030.386	701.234.591	67.505.629.262
259	Kab. Malang	67.674.547.652	62.568.101.586	3.099.167.031	815.525.940	51.934.491	438.584.013	701.234.591	67.674.547.652
260	Kab. Mojokerto	67.573.074.718	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	97.756.310	292.367.960	701.234.591	67.573.074.718
261	Kab. Nganjuk	67.837.368.461	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	623.214.019	701.234.591	67.837.368.461
262	Kab. Ngawi	68.047.978.545	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	121.213.662	743.814.435	701.234.591	68.047.978.545
263	Kab. Pacitan	67.494.241.557	62.568.101.586	3.099.167.031	842.389.140	31.203.994	252.145.215	701.234.591	67.494.241.557
264	Kab. Pamekasan	67.474.493.348	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	260.338.906	701.234.591	67.474.493.348
265	Kab. Pasuruan	67.564.288.164	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	80.362.676	300.975.040	701.234.591	67.564.288.164
266	Kab. Ponorogo	68.003.061.903	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	213.998.223	606.113.232	701.234.591	68.003.061.903
267	Kab. Probolinggo	67.630.981.571	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	416.827.129	701.234.591	67.630.981.571
268	Kab. Sampang	67.465.013.364	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.858.922	701.234.591	67.465.013.364
269	Kab. Sidoarjo	69.683.433.642	62.558.306.241	5.328.063.523	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	69.683.433.642
270	Kab. Situbondo	67.511.714.466	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	34.222.238	294.541.780	701.234.591	67.511.714.466
271	Kab. Sumenep	70.116.679.712	62.568.101.586	5.738.713.221	814.447.240	31.203.994	262.979.080	701.234.591	70.116.679.712
272	Kab. Trenggalek	67.610.023.958	62.568.101.586	3.099.167.031	850.755.542	31.203.994	359.561.214	701.234.591	67.610.023.958
273	Kab. Tuban	72.249.797.730	66.717.633.509	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	886.111.365	701.234.591	72.249.797.730
274	Kab. Tulungagung	67.509.044.392	62.568.101.586	3.099.167.031	816.048.421	31.203.994	293.288.769	701.234.591	67.509.044.392
275	Kota Blitar	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495
276	Kota Kediri	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 442 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277	Kota Madiun	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495
278	Kota Malang	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495
279	Kota Mojokerto	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495
280	Kota Pasuruan	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495
281	Kota Probolinggo	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495
282	Kota Surabaya	67.464.332.495	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	31.203.994	250.178.053	701.234.591	67.464.332.495
283	Kota Batu	67.514.043.095	62.568.101.586	3.099.167.031	814.447.240	78.053.234	253.039.413	701.234.591	67.514.043.095
284	Provinsi Kalimantan Barat	64.690.232.937	-	-	25.192.406.117	-	39.497.826.820	-	64.690.232.937
285	Kab. Bengkayang	4.536.246.330	-	-	3.055.343.137	-	778.215.808	701.234.591	4.534.793.536
286	Kab. Landak	8.803.016.155	-	-	6.762.629.885	-	1.339.151.679	701.234.591	8.803.016.155
287	Kab. Kapuas Hulu	7.399.769.155	-	-	5.410.939.064	-	1.287.595.500	701.234.591	7.399.769.155
288	Kab. Ketapang	41.835.407.183	-	-	28.627.335.980	-	12.506.836.612	701.234.591	41.835.407.183
289	Kab. Mempawah	4.738.794.215	-	-	3.169.959.720	-	867.599.904	701.234.591	4.738.794.215
290	Kab. Sambas	4.278.961.865	-	-	2.858.831.071	-	718.896.203	701.234.591	4.278.961.865
291	Kab. Sanggau	30.894.092.479	-	-	28.284.219.429	-	1.908.638.459	701.234.591	30.894.092.479
292	Kab. Sintang	7.302.712.059	-	-	5.010.303.487	-	1.175.371.800	701.234.591	6.886.909.878
293	Kota Pontianak	4.372.674.332	-	-	2.843.879.072	-	827.560.669	701.234.591	4.372.674.332
294	Kota Singkawang	4.272.454.327	-	-	2.857.037.975	-	714.181.761	701.234.591	4.272.454.327
295	Kab. Kayong Utara	4.496.070.980	-	-	3.092.193.715	-	480.002.393	701.234.591	4.273.430.699
296	Kab. Kubu Raya	5.492.893.463	-	-	2.954.633.772	-	1.837.025.100	701.234.591	5.492.893.463
297	Kab. Sekadau	5.204.342.771	-	-	3.792.584.092	-	710.524.088	701.234.591	5.204.342.771
298	Kab. Melawi	4.661.463.383	-	-	2.852.251.775	-	655.813.800	701.234.591	4.209.300.166
299	Provinsi Kalimantan Tengah	440.616.398.456	14.551.600	149.076.900	165.697.915.497	-	274.754.854.459	-	440.616.398.456



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 443 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	Kab. Barito Selatan	56.863.612.880	2.238.600	22.925.000	51.065.952.153	-	5.071.262.536	701.234.591	56.863.612.880
301	Kab. Barito Utara	121.298.995.124	28.912.800	298.021.500	107.755.560.596	-	12.515.265.637	701.234.591	121.298.995.124
302	Kab. Kapuas	136.187.992.842	2.238.600	22.925.000	121.950.442.573	-	13.511.152.078	701.234.591	136.187.992.842
303	Kab. Kotawaringin Barat	33.109.106.805	2.238.600	22.925.000	23.924.351.626	-	8.458.356.988	701.234.591	33.109.106.805
304	Kab. Kotawaringin Timur	37.978.232.343	2.238.600	22.925.000	29.558.361.390	-	7.693.472.762	701.234.591	37.978.232.343
305	Kota Palangkaraya	29.576.838.372	2.238.600	22.925.000	24.058.105.145	-	4.792.335.036	701.234.591	29.576.838.372
306	Kab. Barito Timur	52.966.127.133	2.429.000	22.925.000	45.776.556.755	-	6.462.981.787	701.234.591	52.966.127.133
307	Kab. Murung Raya	121.741.543.643	2.238.600	22.925.000	106.139.219.270	-	14.875.926.182	701.234.591	121.741.543.643
308	Kab. Pulang Pisau	30.291.079.086	2.238.600	22.925.000	23.841.863.565	-	5.410.693.258	701.234.591	29.978.955.014
309	Kab. Gunung Mas	40.220.167.102	2.238.600	22.925.000	24.656.008.447	-	14.837.760.464	701.234.591	40.220.167.102
310	Kab. Lamandau	41.513.381.213	2.238.600	22.925.000	29.840.896.134	-	10.946.086.888	701.234.591	41.513.381.213
311	Kab. Sukamara	29.356.326.275	2.238.600	22.925.000	23.866.055.569	-	4.763.872.515	701.234.591	29.356.326.275
312	Kab. Katingan	51.656.622.576	2.238.600	22.925.000	31.647.499.692	-	19.282.724.693	701.234.591	51.656.622.576
313	Kab. Seruyan	54.217.880.872	2.238.600	22.925.000	25.473.778.899	-	28.017.703.782	701.234.591	54.217.880.872
314	Provinsi Kalimantan Selatan	762.758.179.083	1.452.221.703	-	755.187.580.493	-	6.118.376.887	-	762.758.179.083
315	Kab. Banjar	197.092.896.470	242.037.107	-	195.836.718.075	-	240.448.290	701.234.591	197.020.438.063
316	Kab. Barito Kuala	126.171.287.472	242.037.107	-	125.098.779.065	-	129.236.709	701.234.591	126.171.287.472
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	202.212.473.634	242.037.107	-	201.139.682.599	-	129.519.337	701.234.591	202.212.473.634
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	126.252.595.802	242.037.107	-	125.180.136.566	-	128.376.021	701.234.591	126.251.784.285
319	Kab. Hulu Sungai Utara	126.187.948.382	242.037.107	-	125.115.489.146	-	30.549.600	701.234.591	126.089.310.444
320	Kab. Kotabaru	175.075.899.507	242.037.107	-	173.948.700.915	-	30.549.600	701.234.591	174.922.522.213
321	Kab. Tabalong	276.826.921.179	2.581.262.337	-	272.676.502.334	-	140.825.100	701.234.591	276.099.824.362
322	Kab. Tanah Laut	363.706.003.309	242.037.107	-	362.505.766.231	-	256.965.380	701.234.591	363.706.003.309



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 444 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
323	Kab. Tapin	262.830.476.936	242.037.107	-	261.758.017.700	-	129.187.538	701.234.591	262.830.476.936
324	Kota Banjarbaru	126.294.708.315	242.037.107	-	125.221.190.865	-	130.245.752	701.234.591	126.294.708.315
325	Kota Banjarmasin	126.203.073.402	242.037.107	-	125.098.779.065	-	161.022.639	701.234.591	126.203.073.402
326	Kab. Balangan	493.743.642.997	565.217.546	-	492.256.619.729	-	134.883.939	701.234.591	493.657.955.805
327	Kab. Tanah Bumbu	441.408.747.791	242.037.107	-	439.815.111.613	-	246.533.100	701.234.591	441.004.916.411
328	Provinsi Kalimantan Timur	2.391.882.976.117	258.780.194.198	508.222.115.251	1.376.416.405.134	-	248.464.261.534	-	2.391.882.976.117
329	Kab. Berau	848.392.350.462	54.539.323.240	106.094.112.160	658.026.589.288	-	29.031.091.183	701.234.591	848.392.350.462
330	Kab. Kutai Kartanegara	1.678.266.613.567	263.589.232.742	450.765.831.826	948.716.678.779	-	14.493.635.629	701.234.591	1.678.266.613.567
331	Kab. Kutai Barat	720.953.272.569	54.539.323.240	106.094.112.160	544.597.393.309	-	15.021.209.269	701.234.591	720.953.272.569
332	Kab. Kutai Timur	1.369.165.385.570	55.072.616.323	106.094.112.160	1.195.877.049.023	-	11.420.373.473	701.234.591	1.369.165.385.570
333	Kab. Mahakam Ulu	478.569.984.865	54.539.323.240	106.094.112.160	302.686.322.225	-	14.548.992.649	701.234.591	478.569.984.865
334	Kab. Paser	761.308.544.258	54.539.323.240	106.094.112.160	591.697.764.441	-	8.276.109.826	701.234.591	761.308.544.258
335	Kota Balikpapan	469.470.265.663	54.539.323.240	106.094.112.160	302.309.377.228	-	5.826.218.444	701.234.591	469.470.265.663
336	Kota Bontang	476.458.032.797	59.739.616.604	107.682.982.457	302.499.211.632	-	5.834.987.513	701.234.591	476.458.032.797
337	Kota Samarinda	523.611.520.869	56.323.588.470	106.981.181.948	353.777.651.509	-	5.827.852.194	701.234.591	523.611.508.712
338	Kab. Penajam Paser Utara	496.807.515.659	62.682.519.953	117.333.554.458	307.139.372.579	-	8.950.834.078	701.234.591	496.807.515.659
339	Provinsi Kalimantan Utara	223.771.675.390	9.181.078.099	841.168.236	117.306.132.439	-	96.443.296.616	-	223.771.675.390
340	Kab. Bulungan	117.342.320.158	7.972.373.801	1.113.217.047	89.853.318.762	-	17.702.175.957	701.234.591	117.342.320.158
341	Kab. Malinau	139.126.380.435	4.590.539.049	420.584.119	126.985.385.085	-	6.428.637.591	701.234.591	139.126.380.435
342	Kab. Nunukan	141.469.575.100	6.053.966.494	877.831.500	115.125.264.973	-	18.711.277.542	701.234.591	141.469.575.100
343	Kab. Tana Tidung	94.618.094.982	4.592.354.427	420.584.119	77.333.873.404	-	11.570.048.441	701.234.591	94.618.094.982
344	Kota Tarakon	77.624.523.590	14.569.719.119	608.914.094	56.018.568.541	-	5.726.087.245	701.234.591	77.624.523.590
345	Provinsi Sulawesi Utara	42.604.269.019	-	-	38.609.808.653	3.308.117.665	686.342.701	-	42.604.269.019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 445 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346	Kab. Bolaang Mongondow	7.202.882.775	-	-	6.011.200.515	472.588.593	11.833.200	701.234.591	7.196.856.899
347	Kab. Minahasa	9.617.113.012	-	-	5.366.856.650	3.537.653.946	11.367.825	701.234.591	9.617.113.012
348	Kab. Sangihe	6.831.275.613	-	-	5.646.084.609	472.588.588	11.367.825	701.234.591	6.831.275.613
349	Kota Bitung	59.656.199.896	-	-	58.471.008.892	472.588.588	11.367.825	701.234.591	59.656.199.896
350	Kota Manado	6.588.934.171	-	-	5.369.953.450	506.378.305	11.367.825	701.234.591	6.588.934.171
351	Kab. Kepulauan Talaud	6.720.665.755	-	-	5.535.474.751	472.588.588	11.367.825	701.234.591	6.720.665.755
352	Kab. Minahasa Selatan	6.999.645.216	-	-	5.788.879.050	495.933.879	4.454.700	701.234.591	6.990.502.220
353	Kab. Minahasa Tenggara	6.832.159.704	-	-	5.639.684.756	478.731.790	7.692.300	701.234.591	6.827.343.437
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	6.552.047.654	-	-	5.366.856.650	472.588.588	11.367.825	701.234.591	6.552.047.654
355	Kota Kotamobagu	6.623.916.390	-	-	5.438.725.386	472.588.588	11.367.825	701.234.591	6.623.916.390
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	10.671.188.844	-	-	9.484.631.585	472.588.588	4.922.400	701.234.591	10.663.377.164
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16.806.459.711	-	-	15.524.894.029	472.588.588	107.742.503	701.234.591	16.806.459.711
358	Kota Tomohon	9.370.138.123	-	-	5.366.856.650	3.290.679.057	11.367.825	701.234.591	9.370.138.123
359	Kab. Minahasa Utara	13.550.443.091	-	-	12.168.041.134	669.799.541	11.367.825	701.234.591	13.550.443.091
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6.947.769.904	-	-	5.723.246.251	472.588.588	26.459.400	701.234.591	6.923.528.830
361	Provinsi Gorontalo	1.738.621.363	-	-	532.806.154	-	1.205.814.625	-	1.738.620.779
362	Kab. Boalemo	758.559.471	-	-	162.580	-	57.162.300	701.234.591	758.559.471
363	Kab. Gorontalo	1.013.833.512	-	-	220.620.645	-	90.647.100	701.234.591	1.012.502.336
364	Kota Gorontalo	755.540.670	-	-	162.579	-	54.143.500	701.234.591	755.540.670
365	Kab. Pohuwato	1.715.590.579	-	-	874.461.188	-	139.894.800	701.234.591	1.715.590.579
366	Kab. Gorontalo Utara	1.134.850.474	-	-	196.310.984	-	132.731.700	701.234.591	1.030.277.275
367	Kab. Bone Bolango	1.600.954.473	-	-	844.403.182	-	55.316.700	701.234.591	1.600.954.473
368	Provinsi Sulawesi Tengah	130.835.477.495	9.313.351.600	95.519.542.177	20.326.758.863	-	5.675.824.855	-	130.835.477.495



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 446 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
369	Kab. Banggai	217.006.961.648	18.626.702.500	191.039.083.287	5.312.252.105	-	1.327.689.165	701.234.591	217.006.961.648
370	Kab. Banggai Laut	20.990.401.093	1.552.225.500	15.919.923.670	2.699.893.793	-	117.123.539	701.234.591	20.990.401.093
371	Kab. Banggai Kepulauan	20.985.806.834	1.552.225.500	15.919.923.670	2.695.684.281	-	35.424.000	701.234.591	20.904.492.042
372	Kab. Buol	22.452.606.774	1.552.225.500	15.919.923.670	4.117.157.895	-	71.169.300	701.234.591	22.361.710.956
373	Kab. Toli-toli	22.561.680.055	1.552.225.500	15.919.923.670	4.254.281.594	-	134.014.700	701.234.591	22.561.680.055
374	Kab. Donggala	21.245.305.610	1.552.225.500	15.919.923.670	2.913.754.302	-	70.406.400	701.234.591	21.157.544.463
375	Kab. Morowali	54.251.914.710	1.552.225.500	15.919.923.670	34.957.247.191	-	1.121.283.758	701.234.591	54.251.914.710
376	Kab Morowali Utara	26.553.155.780	1.552.225.500	15.919.923.670	7.486.502.607	-	893.269.412	701.234.591	26.553.155.780
377	Kab. Poso	22.700.899.727	1.552.225.500	15.919.923.670	3.758.925.888	-	768.590.078	701.234.591	22.700.899.727
378	Kota Palu	21.266.237.118	1.552.225.500	15.919.923.670	2.976.058.856	-	35.424.000	701.234.591	21.184.866.617
379	Kab. Parigi Moutong	22.404.438.963	1.552.225.500	15.919.923.670	4.033.154.392	-	189.725.872	701.234.591	22.396.264.025
380	Kab. Sigi	21.129.293.771	1.552.225.500	15.919.923.670	2.803.312.486	-	40.640.400	701.234.591	21.017.336.647
381	Kab. Tojo Una Una	23.097.135.947	1.552.225.500	15.919.923.670	4.151.471.204	-	772.280.982	701.234.591	23.097.135.947
382	Provinsi Sulawesi Selatan	44.586.701.611	858.951	9.922.700.200	32.741.849.137	-	842.512.877	-	43.507.921.165
383	Kab. Bantaeng	4.343.619.422	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	26.931.071	701.234.591	4.343.619.422
384	Kab. Barru	4.381.507.996	74.650	862.843.100	2.785.600.687	-	13.610.562	701.234.591	4.363.363.590
385	Kab. Bone	4.899.170.095	74.650	862.843.100	3.287.899.546	-	47.118.208	701.234.591	4.899.170.095
386	Kab. Bulukumba	4.077.967.928	74.650	862.843.100	2.487.824.691	-	25.990.896	701.234.591	4.077.967.928
387	Kab. Enrekang	4.428.446.951	74.650	862.843.100	2.833.192.110	-	31.102.500	701.234.591	4.428.446.951
388	Kab. Gowa	4.552.960.383	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	236.272.032	701.234.591	4.552.960.383
389	Kab. Jeneponto	4.342.990.765	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	26.302.414	701.234.591	4.342.990.765
390	Kab. Luwu	5.370.717.026	74.650	862.843.100	3.779.627.147	-	20.953.603	701.234.591	5.364.733.091
391	Kab. Luwu Utara	4.915.566.810	74.650	862.843.100	3.323.845.907	-	27.568.562	701.234.591	4.915.566.810



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 447 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
392	Kab. Maros	4.435.813.555	74.650	862.843.100	2.788.751.210	-	82.910.004	701.234.591	4.435.813.555
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	4.558.641.359	74.650	862.843.100	2.990.404.818	-	4.084.200	701.234.591	4.558.641.359
394	Kab. Pinrang	4.346.022.479	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	29.334.128	701.234.591	4.346.022.479
395	Kab. Kepulauan Selayar	5.388.498.847	74.650	862.843.100	3.798.355.610	-	25.990.896	701.234.591	5.388.498.847
396	Kab. Sidenreng Rappang	4.664.514.966	74.650	862.843.100	3.074.410.710	-	3.589.500	701.234.591	4.642.152.551
397	Kab. Sijau	4.349.076.173	74.650	862.843.100	2.752.536.011	-	32.387.821	701.234.591	4.349.076.173
398	Kab. Soppeng	4.362.980.186	74.650	862.843.100	2.755.846.171	-	42.981.674	701.234.591	4.362.980.186
399	Kab. Takalar	4.342.679.247	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	25.990.896	701.234.591	4.342.679.247
400	Kab. Tana Toraja	4.407.101.559	74.650	862.843.100	2.808.954.314	-	33.994.904	701.234.591	4.407.101.559
401	Kab. Wajo	23.349.400.970	1.717.273	19.845.399.700	2.775.058.510	-	25.990.896	701.234.591	23.349.400.970
402	Kota Pare-pare	4.342.679.247	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	25.990.896	701.234.591	4.342.679.247
403	Kab. Toraja Utara	4.419.408.345	74.650	862.843.100	2.828.317.765	-	26.938.239	701.234.591	4.419.408.345
404	Kota Makassar	4.473.840.753	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	50.096.529	701.234.591	4.366.784.880
405	Kota Palopo	4.342.679.247	74.650	862.843.100	2.752.536.010	-	25.990.896	701.234.591	4.342.679.247
406	Kab. Luwu Timur	70.108.815.185	74.650	862.843.100	68.191.671.484	-	352.991.360	701.234.591	70.108.815.185
407	Provinsi Sulawesi Barat	826.153.886	-	-	140.906.501	-	450.437.227	-	591.343.728
408	Kab. Majene	716.880.512	-	-	-	-	6.844.430	701.234.591	708.079.021
409	Kab. Mamuju	867.213.626	-	-	137.652.202	-	4.942.200	701.234.591	843.828.993
410	Kab. Mamuju Tengah	738.927.586	-	-	-	-	37.692.995	701.234.591	738.927.586
411	Kab. Polewali Mandar	764.809.243	-	-	46.400.200	-	2.667.600	701.234.591	750.302.391
412	Kab. Mamasa	2.440.307.998	-	-	137.652.200	-	1.500.045.966	701.234.591	2.338.932.757
413	Kab. Pasangkayu	978.121.577	-	-	241.920.000	-	3.202.800	701.234.591	946.357.391
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	75.288.076.201	-	-	70.403.856.239	-	4.884.219.962	-	75.288.076.201



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 448 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	Kab. Buton	10.364.193.939	-	-	9.591.050.651	-	8.371.800	701.234.591	10.300.657.042
416	Kab. Konawe	12.798.172.625	-	-	10.112.917.275	-	1.984.020.759	701.234.591	12.798.172.625
417	Kab Konawe Kepulauan	9.365.725.211	-	-	8.612.457.093	-	52.033.527	701.234.591	9.365.725.211
418	Kab. Kolaka	85.045.559.859	-	-	82.969.670.592	-	1.374.654.676	701.234.591	85.045.559.859
419	Kab. Kolaka Timur	9.439.305.616	-	-	8.526.421.410	-	13.122.300	701.234.591	9.240.778.301
420	Kab. Muna	9.419.452.929	-	-	8.665.017.210	-	7.934.700	701.234.591	9.374.186.501
421	Kota Kendari	9.351.406.770	-	-	8.592.455.251	-	12.994.471	701.234.591	9.306.684.313
422	Kota Bau-bau	9.280.142.678	-	-	8.526.421.411	-	52.486.676	701.234.591	9.280.142.678
423	Kab. Konawe Selatan	29.765.273.270	-	-	29.010.056.907	-	11.925.000	701.234.591	29.723.216.498
424	Kab. Bombana	23.298.949.194	-	-	22.128.995.862	-	364.793.424	701.234.591	23.195.023.877
425	Kab. Konawe Utara	37.343.634.897	-	-	34.508.879.604	-	1.971.052.800	701.234.591	37.181.166.995
426	Kab. Buton Utara	9.479.275.798	-	-	8.564.069.667	-	8.826.000	701.234.591	9.274.130.258
427	Kab. Wakatobi	9.279.754.219	-	-	8.526.421.410	-	52.098.218	701.234.591	9.279.754.219
428	Kab. Kolaka Utara	10.793.330.140	-	-	10.040.044.727	-	10.108.800	701.234.591	10.751.388.118
429	Kab. Muna Barat	9.279.675.627	-	-	8.526.421.410	-	7.236.600	701.234.591	9.234.892.601
430	Kab. Buton Tengah	9.291.396.500	-	-	8.538.142.283	-	7.236.600	701.234.591	9.246.613.474
431	Kab. Buton Selatan	9.372.057.519	-	-	8.603.711.003	-	7.236.600	701.234.591	9.312.182.194
432	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Badung	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
434	Kab. Bangli	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
435	Kab. Buleleng	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
436	Kab. Gianyar	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
437	Kab. Jembrana	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 449 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
438	Kab. Karangasem	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
439	Kab. Klungkung	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
440	Kab. Tabanan	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
441	Kota Denpasar	701.234.591	-	-	-	-	-	701.234.591	701.234.591
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	114.678.544.196	-	-	112.692.161.917	-	1.986.382.279	-	114.678.544.196
443	Kab. Bima	19.440.961.289	-	-	18.671.507.754	-	5.202.600	701.234.591	19.377.944.945
444	Kab. Dompu	21.606.605.831	-	-	20.867.824.312	-	37.546.928	701.234.591	21.606.605.831
445	Kab. Lombok Barat	25.779.327.317	-	-	24.938.714.380	-	40.193.675	800.419.262	25.779.327.317
446	Kab. Lombok Tengah	25.330.163.811	-	-	24.477.917.335	-	25.537.181	800.419.262	25.303.873.778
447	Kab. Lombok Timur	25.522.053.155	-	-	24.642.144.653	-	42.313.506	800.419.262	25.484.877.421
448	Kab. Sumbawa	26.770.143.133	-	-	25.783.887.043	-	185.836.828	800.419.262	26.770.143.133
449	Kota Mataram	25.319.832.803	-	-	24.477.917.335	-	35.073.776	800.419.262	25.313.410.373
450	Kab. Lombok Utara	25.319.886.838	-	-	24.477.917.335	-	41.550.241	800.419.262	25.319.886.838
451	Kota Bima	18.806.308.370	-	-	18.078.907.841	-	26.165.938	701.234.591	18.806.308.370
452	Kab. Sumbawa Barat	227.159.944.208	-	-	226.227.611.409	-	62.900.509	800.419.262	227.090.931.180
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.871.923.397	-	-	1.252.364.964	607.469.333	12.089.100	-	1.871.923.397
454	Kab. Alor	791.742.188	-	-	3.900.448	83.554.049	3.053.100	701.234.591	791.742.188
455	Kab. Belu	1.476.753.654	-	-	716.513.237	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.476.753.654
456	Kab. Ende	1.132.256.114	-	-	4.202.591	417.311.632	9.507.300	701.234.591	1.132.256.114
457	Kab. Flores Timur	786.223.596	-	-	3.810.591	80.027.014	1.151.400	701.234.591	786.223.596
458	Kab. Kupang	1.365.204.266	-	-	604.963.849	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.365.204.266
459	Kab. Lembata	847.184.359	-	-	3.810.591	140.987.777	1.151.400	701.234.591	847.184.359
460	Kab. Malaka	764.049.094	-	-	3.808.677	57.854.426	1.151.400	701.234.591	764.049.094



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 450 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						Total
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
461	Kab. Manggarai	1.532.048.248	-	-	121.971.292	707.690.965	1.151.400	701.234.591	1.532.048.248
462	Kab. Ngada	780.836.585	-	-	3.810.591	74.640.003	1.151.400	701.234.591	780.836.585
463	Kab. Sikka	776.819.908	-	-	3.810.591	57.854.426	13.920.300	701.234.591	776.819.908
464	Kab. Sumba Barat	1.099.715.008	-	-	339.474.591	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.099.715.008
465	Kab. Sumba Timur	1.362.605.567	-	-	602.365.150	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.362.605.567
466	Kab. Timor Tengah Selatan	1.323.446.242	-	-	563.205.825	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.323.446.242
467	Kab. Timor Tengah Utara	1.682.081.635	-	-	921.841.218	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.682.081.635
468	Kota Kupang	764.051.008	-	-	3.810.591	57.854.426	1.151.400	701.234.591	764.051.008
469	Kab. Rote Ndao	764.089.408	-	-	3.848.991	57.854.426	1.151.400	701.234.591	764.089.408
470	Kab. Nagekeo	771.495.651	-	-	11.255.234	57.854.426	1.151.400	701.234.591	771.495.651
471	Kab. Sumba Tengah	1.239.786.409	-	-	479.545.992	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.239.786.409
472	Kab. Sumba Barat Daya	1.324.579.508	-	-	564.339.091	57.854.426	1.151.400	701.234.591	1.324.579.508
473	Kab. Manggarai Timur	884.003.406	-	-	123.762.989	57.854.426	1.151.400	701.234.591	884.003.406
474	Kab. Sabu Raijua	877.664.772	-	-	117.424.355	57.854.426	1.151.400	701.234.591	877.664.772
475	Kab. Manggarai Barat	840.594.624	-	-	80.354.207	57.854.426	1.151.400	701.234.591	840.594.624
476	Provinsi Maluku	38.549.994.417	118.201.794	-	1.664.980.166	-	36.766.812.457	-	38.549.994.417
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.673.478.262	23.640.359	-	270.467.944	-	1.017.428.700	701.234.591	2.012.771.594
478	Kab. Maluku Tengah	4.526.220.158	23.640.359	-	270.467.944	-	3.530.877.264	701.234.591	4.526.220.158
479	Kab. Maluku Tenggara	1.567.619.930	23.640.359	-	270.467.944	-	572.277.036	701.234.591	1.567.619.930
480	Kab. Buru	4.193.008.617	23.640.359	-	270.467.944	-	1.050.983.400	701.234.591	2.046.326.294
481	Kota Ambon	1.564.541.790	23.640.359	-	270.467.944	-	568.696.929	701.234.591	1.564.039.823
482	Kab. Seram Bagian Barat	2.901.981.445	23.640.359	-	473.813.744	-	1.703.292.751	701.234.591	2.901.981.445
483	Kab. Seram Bagian Timur	2.151.359.772	236.403.588	-	270.467.944	-	294.647.700	701.234.591	1.502.753.823



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 451 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
484	Kab. Maluku Barat Daya	5.252.393.027	23.640.359	-	3.955.241.038	-	572.277.039	701.234.591	5.252.393.027
485	Kab. Buru Selatan	6.427.818.448	23.640.359	-	328.322.944	-	5.374.620.554	701.234.591	6.427.818.448
486	Kab. Kepulauan Aru	1.594.241.871	23.640.359	-	270.467.944	-	295.988.700	701.234.591	1.291.331.594
487	Kota Tual	1.567.619.933	23.640.359	-	270.467.944	-	572.277.039	701.234.591	1.567.619.933
488	Provinsi Maluku Utara	81.821.475.756	-	-	60.722.510.254	59.508.301	21.039.457.201	-	81.821.475.756
489	Kab. Halmahera Tengah	41.024.345.425	-	-	39.617.261.840	13.223.994	692.625.000	701.234.591	41.024.345.425
490	Kab. Halmahera Barat	13.129.254.493	-	-	12.155.830.508	13.223.994	258.965.400	701.234.591	13.129.254.493
491	Kota Ternate	12.580.528.509	-	-	11.608.765.624	13.223.994	257.304.300	701.234.591	12.580.528.509
492	Kab. Halmahera Timur	36.205.099.141	-	-	28.484.878.075	13.223.994	7.005.762.481	701.234.591	36.205.099.141
493	Kota Tidore Kepulauan	13.309.661.287	-	-	12.337.898.402	13.223.994	257.304.300	701.234.591	13.309.661.287
494	Kab. Kepulauan Sula	29.730.608.006	-	-	28.234.723.538	13.223.994	503.158.800	701.234.591	29.452.340.923
495	Kab. Pulau Morotai	12.920.942.521	-	-	11.757.179.636	13.223.994	449.304.300	701.234.591	12.920.942.521
496	Kab. Pulau Taliabu	17.695.007.990	-	-	15.369.913.177	13.223.994	1.250.904.300	701.234.591	17.335.276.062
497	Kab. Halmahera Selatan	42.695.817.981	-	-	40.055.686.416	119.016.274	1.819.880.700	701.234.591	42.695.817.981
498	Kab. Halmahera Utara	49.692.967.892	-	-	48.713.576.907	13.223.994	264.932.400	701.234.591	49.692.967.892
499	Provinsi Papua	670.366.816.672	-	-	608.904.254.879	-	61.462.561.793	-	670.366.816.672
500	Kab. Yalimo	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	44.549.948.080
501	Kab. Lanny Jaya	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	44.549.948.080
502	Kab. Biak Numfor	44.548.403.301	-	-	42.905.611.503	-	142.229.100	701.234.591	43.749.075.194
503	Kab. Jayapura	46.403.415.951	-	-	44.606.275.327	-	253.042.800	701.234.591	45.560.552.718
504	Kab. Jayawijaya	44.767.776.358	-	-	43.124.984.560	-	889.312.163	701.234.591	44.715.531.314
505	Kab. Merauke	54.607.528.697	-	-	42.905.611.503	-	11.000.682.603	701.234.591	54.607.528.697
506	Kab. Mimika	1.230.408.200.693	-	-	1.215.658.954.826	-	14.048.011.276	701.234.591	1.230.408.200.693



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 452 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507	Kab. Nabire	52.900.866.805	-	-	44.628.807.102	-	7.570.825.112	701.234.591	52.900.866.805
508	Kab. Paniai	48.300.796.583	-	-	46.656.460.006	-	943.101.986	701.234.591	48.300.796.583
509	Kab. Puncak Jaya	54.570.426.062	-	-	52.925.173.808	-	944.017.663	701.234.591	54.570.426.062
510	Kab. Kepulauan Yapen	44.548.403.301	-	-	42.905.611.503	-	888.903.329	701.234.591	44.495.749.423
511	Kota Jayapura	44.556.201.737	-	-	42.905.611.503	-	926.462.871	701.234.591	44.533.308.965
512	Kab. Sarmi	59.364.181.562	-	-	46.655.511.630	-	1.146.193.800	701.234.591	48.502.940.021
513	Kab. Keerom	50.790.203.228	-	-	45.720.032.164	-	4.368.936.473	701.234.591	50.790.203.228
514	Kab. Yahukimo	48.175.770.840	-	-	46.370.268.503	-	1.104.267.746	701.234.591	48.175.770.840
515	Kab. Pegunungan Bintang	47.326.827.097	-	-	45.682.490.520	-	943.101.986	701.234.591	47.326.827.097
516	Kab. Tolikara	45.486.299.580	-	-	43.841.963.003	-	943.101.986	701.234.591	45.486.299.580
517	Kab. Boven Digoel	48.065.951.060	-	-	42.905.611.503	-	4.459.104.966	701.234.591	48.065.951.060
518	Kab. Mappi	44.728.850.654	-	-	42.905.611.503	-	1.122.004.560	701.234.591	44.728.850.654
519	Kab. Asmat	46.848.890.462	-	-	42.905.611.503	-	1.305.116.115	701.234.591	44.911.962.209
520	Kab. Waropen	47.109.835.789	-	-	45.465.211.972	-	142.229.100	701.234.591	46.308.675.663
521	Kab. Mamberamo Raya	52.369.771.101	-	-	47.902.759.603	-	2.959.989.900	701.234.591	51.563.984.094
522	Kab. Mamberamo Tengah	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	44.549.948.080
523	Kab. Nduga	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	44.549.948.080
524	Kab. Dogiyai	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	44.549.948.080
525	Kab. Intan Jaya	47.009.985.008	-	-	45.365.648.431	-	943.101.986	701.234.591	47.009.985.008
526	Kab Puncak	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	44.549.948.080
527	Kab. Deiyai	44.549.948.080	-	-	42.905.611.503	-	943.101.986	701.234.591	44.549.948.080
528	Kab. Supiori	44.563.780.248	-	-	42.918.070.103	-	944.475.554	701.234.591	44.563.780.248
529	Provinsi Papua Barat	824.997.794.065	322.132.593.141	454.941.360.523	4.624.293.390	-	43.299.547.011	-	824.997.794.065



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 453 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
530	Kab. Sorong	68.190.167.408	19.309.390.493	45.077.707.079	371.755.160	-	858.843.300	701.234.591	66.318.930.623
531	Kab. Manokwari	47.411.397.330	2.942.249.834	39.679.466.673	2.483.362.083	-	1.605.084.149	701.234.591	47.411.397.330
532	Kab. Manokwari Selatan	45.792.070.642	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	1.066.083.482	701.234.591	44.621.427.663
533	Kab. Fak fak	46.799.517.155	2.942.249.834	39.679.466.673	2.268.149.883	-	684.661.200	701.234.591	46.275.762.181
534	Kota Sorong	44.732.836.902	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	1.154.290.961	701.234.591	44.709.635.142
535	Kab. Pegunungan Arfak	44.732.836.913	2.942.249.834	39.679.466.684	232.393.083	-	813.649.004	701.234.591	44.368.993.196
536	Kab. Sorong Selatan	49.929.400.777	2.942.249.834	39.679.466.673	354.598.524	-	6.251.851.155	701.234.591	49.929.400.777
537	Kab. Raja Ampat	49.729.160.518	3.268.224.914	39.679.466.673	4.864.402.157	-	466.512.600	701.234.591	48.979.840.935
538	Kab. Teluk Bintuni	499.332.019.784	19.635.229.741	470.755.358.869	4.766.251.783	-	3.473.944.800	701.234.591	499.332.019.784
539	Kab. Teluk Wondama	50.118.460.388	2.942.249.834	39.679.466.673	681.195.447	-	6.114.313.843	701.234.591	50.118.460.388
540	Kab. Tambrauw	44.734.645.203	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.083	-	626.844.900	701.234.591	44.182.189.081
541	Kab. Maybrat	45.941.419.547	2.942.249.834	39.679.466.673	232.393.084	-	850.935.900	701.234.591	44.406.280.082
542	Kab. Kamana	51.780.686.948	2.942.249.834	39.679.466.673	2.059.784.383	-	6.397.951.467	701.234.591	51.780.686.948
JUMLAH		45.135.219.307.212	13.265.216.482.401	9.210.412.221.749	19.807.904.298.240	832.936.590.394	1.612.576.032.153	357.622.699.445	45.086.668.324.382



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 454 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.787.725.000	5.787.725.000
2	Kab. Aceh Barat	263.078.000	263.078.000
3	Kab. Aceh Besar	908.754.000	908.754.000
4	Kab. Aceh Selatan	263.078.000	197.308.500
5	Kab. Aceh Singkil	263.078.000	-
6	Kab. Aceh Tengah	517.162.000	517.162.000
7	Kab. Aceh Tenggara	263.078.000	-
8	Kab. Aceh Timur	339.072.000	339.072.000
9	Kab. Aceh Utara	375.814.000	281.860.500
10	Kab. Bireuen	275.732.000	68.933.000
11	Kab. Pidie	555.386.000	555.386.000
12	Kab. Simeulue	263.078.000	-
13	Kota Banda Aceh	263.078.000	197.308.500
14	Kota Sabang	263.078.000	197.308.500
15	Kota Langsa	263.078.000	263.078.000
16	Kota Lhokseumawe	263.078.000	197.308.500
17	Kab. Nagan Raya	263.078.000	131.539.000
18	Kab. Aceh Jaya	263.078.000	263.078.000
19	Kab. Pidie Jaya	529.055.000	529.055.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	263.078.000	131.539.000
21	Kab. Gayo Lues	4.483.236.000	4.483.236.000
22	Kab. Aceh Tamiang	263.078.000	263.078.000
23	Kab. Bener Meriah	1.837.389.000	1.837.389.000
24	Kota Subulussalam	263.078.000	263.078.000
25	Provinsi Sumatera Utara	6.445.996.000	6.445.996.000
26	Kab. Asahan	268.583.000	268.583.000
27	Kab. Dairi	1.269.294.000	1.269.294.000
28	Kab. Deli Serdang	2.442.249.000	2.442.249.000
29	Kab. Karo	397.750.000	397.750.000
30	Kab. Labuhan Batu	268.583.000	67.145.750
31	Kab. Langkat	268.583.000	268.583.000
32	Kab. Mandailing Natal	354.590.000	354.590.000
33	Kab. Nias	268.583.000	201.437.250
34	Kab. Simalungun	268.583.000	268.583.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	268.583.000	201.437.250
36	Kab. Tapanuli Tengah	268.583.000	268.583.000
37	Kab. Tapanuli Utara	313.180.000	313.180.000
38	Kab. Toba Samosir	268.583.000	201.437.250
39	Kota Binjai	268.583.000	134.291.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 455 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
40	Kota Medan	441.632.000	331.224.000
41	Kota Pematang Siantar	2.213.968.000	2.213.968.000
42	Kota Sibolga	268.583.000	268.583.000
43	Kota Tanjung Balai	268.583.000	268.583.000
44	Kab. Batu Bara	268.583.000	268.583.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	268.583.000	201.437.250
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	268.583.000	201.437.250
47	Kab. Padang Lawas Utara	268.583.000	201.437.250
48	Kab. Padang Lawas	268.583.000	268.583.000
49	Kab. Nias Utara	268.583.000	201.437.250
50	Kab. Nias Barat	268.583.000	67.145.750
51	Kota Tebing Tinggi	268.583.000	268.583.000
52	Kota Padang Sidempuan	268.583.000	201.437.250
53	Kab. Pakpak Bharat	352.820.000	352.820.000
54	Kab. Nias Selatan	268.583.000	268.583.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	809.182.000	606.886.500
56	Kab. Serdang Bedagai	268.583.000	268.583.000
57	Kab. Samosir	268.583.000	201.437.250
58	Kota Gunungsitoli	268.583.000	201.437.250
59	Provinsi Sumatera Barat	4.091.621.000	4.091.621.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.683.510.000	2.683.510.000
61	Kab. Agam	859.217.000	859.217.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	227.313.000	227.313.000
63	Kab. Padang Pariaman	227.313.000	227.313.000
64	Kab. Pasaman	557.848.000	557.848.000
65	Kab. Pesisir Selatan	227.313.000	170.484.750
66	Kab. Sijunjung	227.313.000	227.313.000
67	Kab. Solok	556.913.000	556.913.000
68	Kab. Tanah Datar	995.806.000	995.806.000
69	Kota Bukit Tinggi	227.313.000	227.313.000
70	Kota Padang Panjang	227.313.000	113.656.500
71	Kota Padang	227.313.000	227.313.000
72	Kota Payakumbuh	605.521.000	605.521.000
73	Kota Sawahlunto	560.559.000	560.559.000
74	Kota Solok	227.313.000	227.313.000
75	Kota Pariaman	227.313.000	227.313.000
76	Kab. Pasaman Barat	227.313.000	56.828.250
77	Kab. Dharmasraya	227.313.000	227.313.000
78	Kab. Solok Selatan	227.313.000	113.656.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 456 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	Provinsi Kepulauan Riau	1.713.037.000	1.713.037.000
93	Kab. Bintan	285.507.000	142.753.500
94	Kab. Natuna	285.507.000	285.507.000
95	Kab. Karimun	285.507.000	285.507.000
96	Kota Batam	2.284.053.000	2.284.053.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	285.507.000	285.507.000
98	Kota Tanjung Pinang	285.507.000	285.507.000
99	Kab. Lingga	285.507.000	285.507.000
100	Provinsi Jambi	2.513.649.000	1.885.236.750
101	Kab. Batanghari	251.365.000	251.365.000
102	Kab. Bungo	251.365.000	125.682.500
103	Kab. Kerinci	2.768.339.000	2.768.339.000
104	Kab. Merangin	488.389.000	244.194.500
105	Kab. Muaro Jambi	251.365.000	188.523.750
106	Kab. Sarolangun	251.365.000	188.523.750
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	251.365.000	251.365.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	251.365.000	62.841.250
109	Kab. Tebo	251.365.000	251.365.000
110	Kota Jambi	251.365.000	251.365.000
111	Kota Sungai Penuh	597.534.000	448.150.500
112	Provinsi Sumatera Selatan	2.593.005.000	1.944.753.750
113	Kab. Lahat	162.063.000	-
114	Kab. Musi Banyuasin	162.063.000	-
115	Kab. Musi Rawas	162.063.000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	162.063.000	-
117	Kab. Muara Enim	162.063.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 457 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
118	Kab. Ogan Komering Ilir	162.063.000	81.031.500
119	Kab. Ogan Komering Ulu	162.063.000	-
120	Kota Palembang	162.063.000	40.515.750
121	Kota Pagar Alam	162.063.000	-
122	Kota Lubuk Linggau	162.063.000	-
123	Kota Prabumulih	162.063.000	-
124	Kab. Empat Lawang	162.063.000	162.063.000
125	Kab. Banyuasin	162.063.000	81.031.500
126	Kab. Ogan Ilir	162.063.000	121.547.250
127	Kab. OKU Timur	357.822.000	89.455.500
128	Kab. OKU Selatan	3.261.582.000	3.261.582.000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	162.063.000	-
130	Provinsi Bangka Belitung	-	-
131	Kab. Bangka	-	-
132	Kab. Belitung	-	-
133	Kota Pangkal Pinang	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-
135	Kab. Bangka Tengah	-	-
136	Kab. Bangka Barat	-	-
137	Kab. Belitung Timur	-	-
138	Provinsi Bengkulu	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	Provinsi Lampung	3.623.000.000	3.623.000.000
150	Kab. Lampung Barat	3.216.913.000	3.216.913.000
151	Kab. Lampung Selatan	306.685.000	306.685.000
152	Kab. Lampung Tengah	354.045.000	354.045.000
153	Kab. Lampung Utara	332.066.000	332.066.000
154	Kab. Lampung Timur	917.492.000	917.492.000
155	Kab. Tanggamus	541.023.000	541.023.000
156	Kab. Tulang Bawang	241.533.000	241.533.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 458 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
157	Kab. Way Kanan	267.751.000	267.751.000
158	Kab. Pesawaran	467.420.000	467.420.000
159	Kab. Pesisir Barat	241.533.000	241.533.000
160	Kab. Pringsewu	574.018.000	574.018.000
161	Kab. Mesuji	241.533.000	241.533.000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	249.986.000	187.489.500
163	Kota Bandar Lampung	241.533.000	241.533.000
164	Kota Metro	260.137.000	260.137.000
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-
166	Provinsi Jawa Barat	106.557.067.000	106.557.067.000
167	Kab. Bandung	11.229.654.000	11.229.654.000
168	Kab. Bekasi	4.288.251.000	1.072.062.750
169	Kab. Bogor	4.311.913.000	4.311.913.000
170	Kab. Ciamis	4.467.324.000	4.467.324.000
171	Kab. Cianjur	4.621.396.000	4.621.396.000
172	Kab. Cirebon	4.957.147.000	4.957.147.000
173	Kab. Garut	26.420.902.000	26.420.902.000
174	Kab. Indramayu	4.336.185.000	4.336.185.000
175	Kab. Karawang	63.924.503.000	63.924.503.000
176	Kab. Kuningan	5.804.529.000	5.804.529.000
177	Kab. Majalengka	10.095.738.000	7.571.803.500
178	Kab. Pangandaran	4.527.935.000	4.527.935.000
179	Kab. Purwakarta	4.464.934.000	3.348.700.500
180	Kab. Subang	4.413.679.000	4.413.679.000
181	Kab. Sukabumi	4.333.418.000	4.333.418.000
182	Kab. Sumedang	38.582.754.000	38.582.754.000
183	Kab. Tasikmalaya	4.540.377.000	3.405.282.750
184	Kab. Bandung Barat	4.925.857.000	4.925.857.000
185	Kota Bandung	4.233.733.000	3.175.299.750
186	Kota Bekasi	4.233.512.000	3.175.134.000
187	Kota Bogor	4.270.252.000	4.270.252.000
188	Kota Cirebon	4.275.665.000	3.206.748.750
189	Kota Depok	4.235.871.000	-
190	Kota Sukabumi	4.285.081.000	3.213.810.750
191	Kota Cimahi	4.255.489.000	3.191.616.750
192	Kota Tasikmalaya	4.296.762.000	3.222.571.500
193	Kota Banjar	4.300.295.000	4.300.295.000
194	Provinsi Banten	-	-
195	Kab. Lebak	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 459 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
196	Kab. Pandeglang	-	-
197	Kab. Serang	-	-
198	Kab. Tangerang	-	-
199	Kota Cilegon	-	-
200	Kota Tangerang	-	-
201	Kota Serang	-	-
202	Kota Tangerang Selatan	-	-
203	Provinsi Jawa Tengah	203.078.428.000	203.078.428.000
204	Kab. Banjarnegara	6.410.840.000	6.410.840.000
205	Kab. Banyumas	5.980.898.000	5.980.898.000
206	Kab. Batang	6.170.847.000	6.170.847.000
207	Kab. Blora	8.830.957.000	8.830.957.000
208	Kab. Boyolali	17.631.437.000	17.631.437.000
209	Kab. Brebes	6.321.642.000	6.321.642.000
210	Kab. Cilacap	6.126.478.000	6.126.478.000
211	Kab. Demak	12.474.350.000	12.474.350.000
212	Kab. Grobogan	9.441.765.000	9.441.765.000
213	Kab. Jepara	6.325.997.000	6.325.997.000
214	Kab. Karanganyar	13.930.058.000	13.930.058.000
215	Kab. Kebumen	7.406.434.000	7.406.434.000
216	Kab. Kendal	17.958.292.000	17.958.292.000
217	Kab. Klaten	14.944.437.000	14.944.437.000
218	Kab. Kudus	147.894.137.000	147.894.137.000
219	Kab. Magelang	15.251.693.000	15.251.693.000
220	Kab. Pati	6.359.218.000	6.359.218.000
221	Kab. Pekalongan	6.035.205.000	6.035.205.000
222	Kab. Pemasang	6.984.403.000	6.984.403.000
223	Kab. Purbalingga	6.541.387.000	6.541.387.000
224	Kab. Purworejo	7.141.300.000	7.141.300.000
225	Kab. Rembang	18.612.460.000	18.612.460.000
226	Kab. Semarang	8.702.409.000	8.702.409.000
227	Kab. Sragen	6.906.202.000	6.906.202.000
228	Kab. Sukoharjo	7.018.220.000	7.018.220.000
229	Kab. Tegal	6.608.140.000	6.608.140.000
230	Kab. Temanggung	30.735.722.000	30.735.722.000
231	Kab. Wonogiri	6.928.844.000	6.928.844.000
232	Kab. Wonosobo	12.940.062.000	12.940.062.000
233	Kota Magelang	6.064.653.000	6.064.653.000
234	Kota Pekalongan	6.962.880.000	6.962.880.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 460 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
235	Kota Salatiga	5.973.923.000	5.973.923.000
236	Kota Semarang	7.680.546.000	7.680.546.000
237	Kota Surakarta	6.580.938.000	6.580.938.000
238	Kota Tegal	5.972.895.000	5.972.895.000
239	Provinsi DI Yogyakarta	4.903.054.000	4.903.054.000
240	Kab. Bantul	5.021.795.000	5.021.795.000
241	Kab. Gunung Kidul	1.584.686.000	1.584.686.000
242	Kab. Kulon Progo	1.225.764.000	1.225.764.000
243	Kab. Sleman	2.370.891.000	2.370.891.000
244	Kota Yogyakarta	1.237.323.000	1.237.323.000
245	Provinsi Jawa Timur	453.628.963.000	453.628.963.000
246	Kab. Bangkalan	13.189.491.000	13.189.491.000
247	Kab. Banyuwangi	15.338.964.000	15.338.964.000
248	Kab. Blitar	15.787.197.000	15.787.197.000
249	Kab. Bojonegoro	34.817.896.000	34.817.896.000
250	Kab. Bondowoso	25.557.195.000	25.557.195.000
251	Kab. Gresik	13.258.402.000	13.258.402.000
252	Kab. Jember	55.076.650.000	55.076.650.000
253	Kab. Jombang	31.354.594.000	31.354.594.000
254	Kab. Kediri	34.970.472.000	34.970.472.000
255	Kab. Lamongan	27.454.023.000	27.454.023.000
256	Kab. Lumajang	16.843.019.000	16.843.019.000
257	Kab. Madiun	13.929.340.000	13.929.340.000
258	Kab. Magetan	13.990.430.000	13.990.430.000
259	Kab. Malang	73.641.430.000	73.641.430.000
260	Kab. Mojokerto	13.934.023.000	13.934.023.000
261	Kab. Nganjuk	15.563.577.000	15.563.577.000
262	Kab. Ngawi	19.044.881.000	19.044.881.000
263	Kab. Pacitan	13.428.481.000	13.428.481.000
264	Kab. Pamekasan	45.183.528.000	45.183.528.000
265	Kab. Pasuruan	173.544.009.000	173.544.009.000
266	Kab. Ponorogo	14.641.525.000	14.641.525.000
267	Kab. Probolinggo	50.841.284.000	50.841.284.000
268	Kab. Sampang	17.819.022.000	17.819.022.000
269	Kab. Sidoarjo	13.656.908.000	13.656.908.000
270	Kab. Situbondo	27.456.765.000	27.456.765.000
271	Kab. Sumenep	33.255.724.000	33.255.724.000
272	Kab. Trenggalek	13.077.240.000	13.077.240.000
273	Kab. Tuban	19.657.858.000	19.657.858.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 461 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
274	Kab. Tulungagung	17.731.144.000	17.731.144.000
275	Kota Blitar	13.681.855.000	13.681.855.000
276	Kota Kediri	58.059.072.000	58.059.072.000
277	Kota Madiun	13.119.146.000	13.119.146.000
278	Kota Malang	25.675.809.000	25.675.809.000
279	Kota Mojokerto	13.538.254.000	13.538.254.000
280	Kota Pasuruan	13.054.050.000	13.054.050.000
281	Kota Probolinggo	13.115.695.000	13.115.695.000
282	Kota Surabaya	21.105.780.000	21.105.780.000
283	Kota Batu	13.072.850.000	13.072.850.000
284	Provinsi Kalimantan Barat	2.221.555.000	1.110.777.500
285	Kab. Bengkayang	170.889.000	85.444.500
286	Kab. Landak	170.889.000	85.444.500
287	Kab. Kapuas Hulu	170.889.000	85.444.500
288	Kab. Ketapang	2.962.075.000	1.481.037.500
289	Kab. Pontianak	170.889.000	85.444.500
290	Kab. Sambas	170.889.000	85.444.500
291	Kab. Sanggau	170.889.000	85.444.500
292	Kab. Sintang	170.889.000	85.444.500
293	Kota Pontianak	170.889.000	85.444.500
294	Kota Singkawang	170.889.000	85.444.500
295	Kab. Kayong Utara	170.889.000	85.444.500
296	Kab. Kubu Raya	170.889.000	85.444.500
297	Kab. Sekadau	170.889.000	85.444.500
298	Kab. Melawi	170.889.000	85.444.500
299	Provinsi Kalimantan Tengah	2.013.243.000	2.013.243.000
300	Kab. Barito Selatan	183.023.000	183.023.000
301	Kab. Barito Utara	183.023.000	-
302	Kab. Kapuas	183.023.000	91.511.500
303	Kab. Kotawaringin Barat	736.813.000	736.813.000
304	Kab. Kotawaringin Timur	188.926.000	188.926.000
305	Kota Palangkaraya	183.023.000	183.023.000
306	Kab. Barito Timur	183.023.000	-
307	Kab. Murung Raya	183.023.000	183.023.000
308	Kab. Pulang Pisau	1.758.590.000	879.295.000
309	Kab. Gunung Mas	183.023.000	183.023.000
310	Kab. Lamandau	183.023.000	-
311	Kab. Sukamara	183.023.000	183.023.000
312	Kab. Katingan	183.023.000	45.755.750



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 462 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
313	Kab. Seruyan	183.023.000	-
314	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
315	Kab. Banjar	-	-
316	Kab. Barito Kuala	-	-
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
320	Kab. Kotabaru	-	-
321	Kab. Tabalong	-	-
322	Kab. Tanah Laut	-	-
323	Kab. Tapin	-	-
324	Kota Banjarbaru	-	-
325	Kota Banjarmasin	-	-
326	Kab. Balangan	-	-
327	Kab. Tanah Bumbu	-	-
328	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
329	Kab. Berau	-	-
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
331	Kab. Kutai Barat	-	-
332	Kab. Kutai Timur	-	-
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-
334	Kab. Paser	-	-
335	Kota Balikpapan	-	-
336	Kota Bontang	-	-
337	Kota Samarinda	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-- 463 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	Provinsi Gorontalo	-	-
362	Kab. Boalemo	-	-
363	Kab. Gorontalo	-	-
364	Kota Gorontalo	-	-
365	Kab. Pohuwato	-	-
366	Kab. Gorontalo Utara	-	-
367	Kab. Bone Bolango	-	-
368	Provinsi Sulawesi Tengah	2.195.087.000	2.195.087.000
369	Kab. Banggai	803.621.000	602.715.750
370	Kab. Banggai Laut	219.509.000	219.509.000
371	Kab. Banggai Kepulauan	219.509.000	219.509.000
372	Kab. Buol	219.509.000	219.509.000
373	Kab. Toli-Toli	219.509.000	164.631.750
374	Kab. Donggala	219.509.000	219.509.000
375	Kab. Morowali	219.509.000	164.631.750
376	Kab. Morowali Utara	219.509.000	219.509.000
377	Kab. Poso	219.509.000	164.631.750
378	Kota Palu	1.756.070.000	1.756.070.000
379	Kab. Parigi Moutong	367.092.000	367.092.000
380	Kab. Sigi	219.509.000	219.509.000
381	Kab. Tojo Una Una	219.509.000	164.631.750
382	Provinsi Sulawesi Selatan	5.056.141.000	5.056.141.000
383	Kab. Bantaeng	303.897.000	303.897.000
384	Kab. Barru	239.874.000	239.874.000
385	Kab. Bone	819.711.000	819.711.000
386	Kab. Bulukumba	428.601.000	428.601.000
387	Kab. Enrekang	219.833.000	219.833.000
388	Kab. Gowa	219.833.000	219.833.000
389	Kab. Jeneponto	234.864.000	234.864.000
390	Kab. Luwu	241.158.000	241.158.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 464 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
391	Kab. Luwu Utara	219.833.000	219.833.000
392	Kab. Maros	219.833.000	219.833.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	219.833.000	219.833.000
394	Kab. Pinrang	219.833.000	219.833.000
395	Kab. Selayar	219.833.000	219.833.000
396	Kab. Sidenreng Rappang	219.833.000	219.833.000
397	Kab. Sinjai	1.772.176.000	1.772.176.000
398	Kab. Soppeng	4.220.593.000	4.220.593.000
399	Kab. Takalar	219.833.000	219.833.000
400	Kab. Tana Toraja	219.833.000	219.833.000
401	Kab. Wajo	239.318.000	239.318.000
402	Kota Pare-pare	219.833.000	219.833.000
403	Kab. Toraja Utara	219.833.000	219.833.000
404	Kota Makassar	219.833.000	219.833.000
405	Kota Palopo	219.833.000	219.833.000
406	Kab. Luwu Timur	219.833.000	219.833.000
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Pasangkayu	-	-
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
415	Kab. Buton	-	-
416	Kab. Konawe	-	-
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-
418	Kab. Kolaka	-	-
419	Kab. Kolaka Timur	-	-
420	Kab. Muna	-	-
421	Kota Kendari	-	-
422	Kota Bau-bau	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-
424	Kab. Bombana	-	-
425	Kab. Konawe Utara	-	-
426	Kab. Buton Utara	-	-
427	Kab. Wakatobi	-	-
428	Kab. Kolaka Utara	-	-
429	Kab. Muna Barat	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 465 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
430	Kab. Buton Tengah	-	-
431	Kab. Buton Selatan	-	-
432	Provinsi Bali	3.548.633.000	3.548.633.000
433	Kab. Badung	443.579.000	332.684.250
434	Kab. Bangli	503.459.000	503.459.000
435	Kab. Buleleng	3.366.514.000	3.366.514.000
436	Kab. Gianyar	1.536.554.000	1.536.554.000
437	Kab. Jembrana	499.529.000	499.529.000
438	Kab. Karangasem	599.771.000	599.771.000
439	Kab. Klungkung	443.579.000	443.579.000
440	Kab. Tabanan	443.579.000	443.579.000
441	Kota Denpasar	443.579.000	443.579.000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	74.734.327.148	74.734.327.148
443	Kab. Bima	8.331.598.000	8.331.598.000
444	Kab. Dompu	5.343.594.000	5.343.594.000
445	Kab. Lombok Barat	13.327.700.729	13.327.700.729
446	Kab. Lombok Tengah	41.641.222.888	41.641.222.888
447	Kab. Lombok Timur	53.417.315.590	53.417.315.590
448	Kab. Sumbawa	8.266.351.032	8.266.351.032
449	Kota Mataram	31.229.352.604	31.229.352.604
450	Kab. Lombok Utara	8.453.757.530	8.453.757.530
451	Kota Bima	1.761.805.000	1.761.805.000
452	Kab. Sumbawa Barat	2.593.671.474	2.593.671.474
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.741.989.000	3.556.491.750
454	Kab. Alor	545.116.000	-
455	Kab. Belu	286.438.000	-
456	Kab. Ende	225.809.000	-
457	Kab. Flores Timur	1.301.402.000	325.350.500
458	Kab. Kupang	309.662.000	154.831.000
459	Kab. Lembata	466.613.000	-
460	Kab. Malaka	225.809.000	-
461	Kab. Manggarai	1.809.766.000	-
462	Kab. Ngada	236.512.000	59.128.000
463	Kab. Sikka	903.646.000	-
464	Kab. Sumba Barat	236.512.000	236.512.000
465	Kab. Sumba Timur	375.643.000	93.910.750
466	Kab. Timor Tengah Selatan	259.681.000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	225.809.000	-
468	Kota Kupang	225.809.000	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 466 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
469	Kab. Rote Ndao	225.809.000	-
470	Kab. Nagekeo	743.110.000	185.777.500
471	Kab. Sumba Tengah	225.809.000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	1.076.651.000	807.488.250
473	Kab. Manggarai Timur	479.082.000	479.082.000
474	Kab. Sabu Raijua	247.214.000	-
475	Kab. Manggarai Barat	432.740.000	108.185.000
476	Provinsi Maluku	-	-
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-
487	Kota Tual	-	-
488	Provinsi Maluku Utara	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	Provinsi Papua	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 467 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	Provinsi Papua Barat	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
JUMLAH		2.964.808.087.995	2.922.191.165.245



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 468 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.060.263.235.000	2.060.263.235.000	1.576.401.640.000	1.471.613.112.593
2	Kab. Aceh Barat	570.763.544.000	570.763.544.000	189.325.546.000	180.969.637.761
3	Kab. Aceh Besar	713.344.629.000	713.344.629.000	241.500.986.000	198.391.154.414
4	Kab. Aceh Selatan	641.605.359.000	641.605.359.000	324.209.737.000	315.285.379.749
5	Kab. Aceh Singkil	441.266.415.000	441.266.415.000	138.467.819.000	119.272.244.615
6	Kab. Aceh Tengah	603.737.495.000	603.737.495.000	221.449.494.000	210.625.435.066
7	Kab. Aceh Tenggara	586.091.423.000	586.091.423.000	199.342.084.000	151.157.752.221
8	Kab. Aceh Timur	786.034.858.000	786.034.858.000	199.139.509.000	192.612.259.187
9	Kab. Aceh Utara	847.191.268.000	847.191.268.000	372.779.369.000	364.373.142.302
10	Kab. Bireuen	802.618.535.000	802.618.535.000	273.347.486.000	265.190.124.110
11	Kab. Pidie	794.948.892.000	794.948.892.000	309.703.441.000	293.595.826.388
12	Kab. Simeulue	444.554.705.000	444.554.705.000	140.952.070.000	132.388.792.225
13	Kota Banda Aceh	591.711.772.000	591.711.772.000	129.961.032.000	116.595.706.007
14	Kota Sabang	350.863.359.000	350.863.359.000	134.168.011.000	127.162.931.061
15	Kota Langsa	444.012.586.000	444.012.586.000	134.356.202.000	131.946.202.463
16	Kota Lhokseumawe	459.628.037.000	459.628.037.000	102.792.279.000	93.948.851.900
17	Kab. Nagan Raya	507.106.599.000	507.106.599.000	149.202.595.000	146.257.947.462
18	Kab. Aceh Jaya	421.315.269.000	421.315.269.000	153.015.629.000	150.114.010.462
19	Kab. Pidie Jaya	420.639.477.000	420.639.477.000	184.146.496.000	177.599.868.091
20	Kab. Aceh Barat Daya	451.309.794.000	451.309.794.000	201.210.730.000	192.663.131.445
21	Kab. Gayo Lues	462.943.021.000	462.943.021.000	170.506.857.000	166.695.480.399
22	Kab. Aceh Tamiang	532.641.693.000	532.641.693.000	172.342.579.000	163.435.948.924
23	Kab. Bener Meriah	448.988.545.000	448.988.545.000	121.935.612.000	117.742.883.739
24	Kota Subulussalam	345.335.126.000	345.335.126.000	79.444.673.000	73.710.148.823
25	Provinsi Sumatera Utara	2.629.224.545.000	2.629.224.545.000	4.082.135.830.000	3.923.216.182.249
26	Kab. Asahan	877.794.641.000	877.794.641.000	247.058.157.000	231.933.908.489
27	Kab. Deli	612.745.792.000	612.745.792.000	169.332.568.000	154.914.774.714
28	Kab. Deli Serdang	1.468.561.952.000	1.468.561.952.000	466.075.998.000	455.242.047.339
29	Kab. Karo	738.378.312.000	738.378.312.000	211.431.929.000	184.960.051.262
30	Kab. LabuhanBatu	684.408.474.000	684.408.474.000	209.425.055.000	199.352.228.211
31	Kab. Langkat	1.179.392.864.000	1.179.392.864.000	414.927.706.000	392.914.470.349
32	Kab. Mandailing Natal	783.200.132.000	783.200.132.000	253.694.038.000	248.799.513.596
33	Kab. Nias	430.091.477.000	430.091.477.000	186.691.760.000	170.260.660.801
34	Kab. Simalungun	1.209.194.704.000	1.209.194.704.000	396.528.444.000	364.957.717.597
35	Kab. Tapanuli Selatan	644.304.467.000	644.304.467.000	166.840.616.000	163.894.825.061
36	Kab. Tapanuli Tengah	627.027.553.000	627.027.553.000	257.399.477.000	241.018.512.560
37	Kab. Tapanuli Utara	639.394.068.000	639.394.068.000	203.769.695.000	191.102.620.448
38	Kab. Toba Samosir	528.490.802.000	528.490.802.000	168.007.248.000	158.583.010.253
39	Kota Binjai	564.377.582.000	564.377.582.000	137.072.598.000	129.936.136.339
40	Kota Medan	1.583.624.375.000	1.583.624.375.000	388.300.386.000	356.788.804.200
41	Kota Pematang Siantar	583.106.207.000	583.106.207.000	196.049.598.000	188.366.544.385
42	Kota Sibolga	405.554.215.000	405.554.215.000	96.453.637.000	90.935.128.378
43	Kota Tanjung Balai	418.666.416.000	418.666.416.000	95.262.968.000	90.844.606.170
44	Kab. Batu Bara	602.464.355.000	602.464.355.000	165.400.037.000	151.358.139.644
45	Kab. LabuhanBatu Utara	588.021.836.000	588.021.836.000	245.247.454.000	235.115.494.290
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	504.525.796.000	504.525.796.000	160.723.218.000	147.933.110.879
47	Kab. Padang Lawas Utara	537.469.609.000	537.469.609.000	147.681.324.000	138.216.844.240
48	Kab. Padang Lawas	521.562.942.000	521.562.942.000	160.101.069.000	157.464.009.272
49	Kab. Nias Utara	413.837.391.000	413.837.391.000	146.587.743.000	136.489.812.774



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 469 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
50	Kab. Nias Barat	348.251.352.000	348.251.352.000	214.083.960.000	206.066.316.839
51	Kota Tebing Tinggi	409.399.195.000	409.399.195.000	120.547.171.000	114.868.858.164
52	Kota Padang Sidempuan	498.768.033.000	498.768.033.000	135.687.423.000	124.683.309.074
53	Kab. Pakpak Bharat	339.271.690.000	339.271.690.000	76.630.526.000	71.532.318.937
54	Kab. Nias Selatan	556.410.357.000	556.410.357.000	205.201.189.000	199.651.552.996
55	Kab. Humbang Hasundutan	523.818.445.000	523.818.445.000	147.110.998.000	142.133.738.492
56	Kab. Serdang Bedagai	763.943.386.000	763.943.386.000	323.742.306.000	310.954.071.433
57	Kab. Sumsel	453.737.230.000	453.737.230.000	145.102.356.000	139.883.498.974
58	Kota Gunungsitoli	426.758.929.000	426.758.929.000	113.748.744.000	109.906.226.086
59	Provinsi Sumatera Barat	2.014.646.639.000	2.014.646.639.000	1.825.208.546.000	1.763.791.244.387
60	Kab. Lima Puluh Kota	747.073.168.000	747.073.168.000	254.372.166.000	236.061.072.373
61	Kab. Agam	813.474.914.000	813.474.914.000	284.359.411.000	262.382.906.117
62	Kab. Kepulauan Mentawai	610.939.918.000	610.939.918.000	170.723.124.000	152.970.429.302
63	Kab. Padang Pariaman	769.827.010.000	769.827.010.000	325.744.165.000	306.685.313.801
64	Kab. Pasaman	596.083.486.000	596.083.486.000	162.181.140.000	147.062.049.488
65	Kab. Pesisir Selatan	838.100.134.000	838.100.134.000	278.271.663.000	265.159.690.710
66	Kab. Sijunjung	548.573.107.000	548.573.107.000	151.719.988.000	139.505.882.043
67	Kab. Solok	710.962.915.000	710.962.915.000	230.998.945.000	211.524.645.912
68	Kab. Tanah Datar	695.555.745.000	695.555.745.000	273.243.829.000	237.114.024.294
69	Kota Bukit Tinggi	450.905.882.000	450.905.882.000	66.569.182.000	59.565.781.339
70	Kota Padang Panjang	375.436.356.000	375.436.356.000	67.562.403.000	57.424.847.367
71	Kota Padang	1.100.370.559.000	1.100.370.559.000	284.775.700.000	263.030.961.104
72	Kota Payakumbuh	437.696.934.000	437.696.934.000	105.347.474.000	99.022.990.283
73	Kota Sawahlunto	375.131.128.000	375.131.128.000	82.041.001.000	64.415.138.140
74	Kota Solok	398.106.262.000	398.106.262.000	78.922.163.000	71.968.447.294
75	Kota Pariaman	415.241.327.000	415.241.327.000	91.269.676.000	83.096.934.607
76	Kab. Pasaman Barat	644.333.727.000	644.333.727.000	232.170.727.000	217.224.642.075
77	Kab. Dharmasraya	502.298.085.000	502.298.085.000	193.590.735.000	187.705.190.546
78	Kab. Solok Selatan	480.406.179.000	480.406.179.000	147.086.555.000	137.314.855.550
79	Provinsi Riau	1.465.261.007.000	1.465.261.007.000	1.728.536.844.000	1.635.090.586.303
80	Kab. Bengkalis	345.070.716.000	345.070.716.000	218.058.065.000	183.801.494.841
81	Kab. Indragiri Hilir	918.602.922.000	918.602.922.000	241.540.908.000	221.058.798.121
82	Kab. Indragiri Hulu	646.609.433.000	646.609.433.000	198.259.495.000	162.440.212.758
83	Kab. Kampar	774.370.036.000	774.370.036.000	332.767.162.000	305.292.493.019
84	Kab. Kuantan Singingi	618.561.583.000	618.561.583.000	214.660.548.000	202.328.743.402
85	Kab. Pelalawan	610.599.637.000	610.599.637.000	169.518.518.000	147.794.646.899
86	Kab. Rokan Hilir	432.022.856.000	432.022.856.000	199.517.128.000	168.071.481.411
87	Kab. Rokan Hulu	654.291.480.000	654.291.480.000	247.278.920.000	234.938.355.856
88	Kab. Siak	323.293.793.000	323.293.793.000	202.931.802.000	191.890.258.298
89	Kota Dumai	427.188.089.000	427.188.089.000	182.864.333.000	166.331.273.455
90	Kota Pekanbaru	798.138.148.000	798.138.148.000	235.800.179.000	212.931.929.581
91	Kab. Kepulauan Meranti	403.426.873.000	403.426.873.000	172.997.560.000	158.755.443.046
92	Provinsi Kepulauan Riau	1.150.516.796.000	1.150.516.796.000	598.868.305.000	581.563.538.822
93	Kab. Bintan	484.586.669.000	484.586.669.000	123.177.913.000	115.572.160.116
94	Kab. Natuna	368.413.963.000	368.413.963.000	105.912.412.000	100.102.868.329
95	Kab. Karimun	403.184.262.000	403.184.262.000	223.948.899.000	210.593.110.332
96	Kota Batam	599.074.016.000	599.074.016.000	174.229.056.000	162.160.638.526
97	Kab. Kepulauan Anambas	364.336.885.000	364.336.885.000	109.115.713.000	102.809.320.682
98	Kota Tanjung Pinang	457.366.176.000	457.366.176.000	105.169.584.000	100.173.268.328



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 470 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
99	Kab. Lingga	455.758.203.000	455.758.203.000	120.294.283.000	114.405.753.614
100	Provinsi Jambi	1.399.367.134.000	1.399.367.134.000	984.106.096.000	935.300.581.842
101	Kab. Batanghari	605.739.426.000	605.739.426.000	155.943.284.000	141.430.445.078
102	Kab. Bungo	635.999.293.000	635.999.293.000	201.368.830.000	191.980.404.384
103	Kab. Kerinci	589.202.611.000	589.202.611.000	163.055.528.000	155.138.708.215
104	Kab. Merangin	718.849.295.000	718.849.295.000	214.271.029.000	194.318.877.142
105	Kab. Muaro Jambi	670.341.091.000	670.341.091.000	202.418.501.000	175.375.563.818
106	Kab. Sarolangun	583.152.387.000	583.152.387.000	161.113.327.000	143.747.196.458
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	506.589.288.000	506.589.288.000	147.210.829.000	142.753.784.049
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	540.400.531.000	540.400.531.000	210.425.771.000	196.922.022.086
109	Kab. Tebo	582.313.417.000	582.313.417.000	139.842.780.000	129.648.054.971
110	Kota Jambi	714.783.378.000	714.783.378.000	291.823.567.000	277.298.116.284
111	Kota Sungai Penuh	422.532.652.000	422.532.652.000	103.162.020.000	92.350.598.379
112	Provinsi Sumatera Selatan	1.697.897.817.000	1.697.897.817.000	2.239.022.240.000	2.170.012.209.131
113	Kab. Lahat	696.379.856.000	696.379.856.000	228.458.230.000	221.396.196.527
114	Kab. Musi Banyuasin	370.826.979.000	370.826.979.000	264.004.132.000	258.339.719.486
115	Kab. Musi Rawas	639.753.278.000	639.753.278.000	280.633.217.000	274.429.844.260
116	Kab Musi Rawas Utara	383.935.458.000	383.935.458.000	201.842.840.000	186.721.499.530
117	Kab. Muara Enim	661.337.068.000	661.337.068.000	243.024.261.000	235.688.695.036
118	Kab. Ogan Komering Ilir	1.053.840.757.000	1.053.840.757.000	380.678.836.000	369.716.929.562
119	Kab. Ogan Komering Ulu	636.233.972.000	636.233.972.000	192.582.480.000	183.161.504.401
120	Kota Palembang	1.269.426.417.000	1.269.426.417.000	497.046.815.000	481.900.223.636
121	Kota Pagar Alam	391.943.478.000	391.943.478.000	131.337.080.000	113.818.849.262
122	Kota Lubuk linggau	449.082.849.000	449.082.849.000	132.148.074.000	124.671.818.972
123	Kota Prabumulih	416.312.645.000	416.312.645.000	100.964.525.000	97.780.605.399
124	Kab. Empat Lawang	424.811.343.000	424.811.343.000	193.137.833.000	187.918.012.283
125	Kab. Banyuasin	933.631.693.000	933.631.693.000	339.674.743.000	319.248.731.658
126	Kab. Ogan Ilir	623.348.780.000	623.348.780.000	249.132.726.000	239.900.136.052
127	Kab. OKU Timur	767.167.031.000	767.167.031.000	281.840.479.000	268.448.705.478
128	Kab. OKU Selatan	598.063.061.000	598.063.061.000	183.972.625.000	176.993.703.944
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	317.402.008.000	317.402.008.000	164.622.621.000	152.733.330.695
130	Provinsi Bangka Belitung	1.018.673.218.000	1.018.673.218.000	477.958.706.000	457.248.755.861
131	Kab. Bangka	529.693.057.000	529.693.057.000	158.979.164.000	146.711.843.788
132	Kab. Belitung	480.560.681.000	480.560.681.000	148.235.984.000	136.413.967.928
133	Kota Pangkal Pinang	443.476.956.000	443.476.956.000	164.883.946.000	157.626.702.360
134	Kab. Bangka Selatan	466.182.109.000	466.182.109.000	156.062.373.000	148.733.631.210
135	Kab. Bangka Tengah	439.128.449.000	439.128.449.000	131.553.770.000	127.994.070.259
136	Kab. Bangka Barat	445.168.706.000	445.168.706.000	134.617.979.000	125.830.480.976
137	Kab. Belitung Timur	440.265.288.000	440.265.288.000	113.777.568.000	100.079.772.515
138	Provinsi Bengkulu	1.301.538.847.000	1.301.538.847.000	624.124.581.000	596.924.519.743
139	Kab. Bengkulu Selatan	554.227.555.000	554.227.555.000	157.045.584.000	151.473.245.759
140	Kab. Bengkulu Utara	625.146.185.000	625.146.185.000	188.106.625.000	178.507.519.724
141	Kab. Rejang Lebong	593.702.491.000	593.702.491.000	207.561.174.000	199.934.328.125
142	Kota Bengkulu	671.384.345.000	671.384.345.000	163.657.480.000	157.409.377.766
143	Kab. Kaur	435.518.398.000	435.518.398.000	112.497.595.000	102.413.423.004
144	Kab. Seluma	497.868.275.000	497.868.275.000	177.567.584.000	165.274.694.591
145	Kab. Mukomuko	492.562.518.000	492.562.518.000	122.923.745.000	118.315.585.553
146	Kab. Lebong	405.048.287.000	405.048.287.000	100.669.737.000	94.531.189.096
147	Kab. Bengkulu Tengah	430.023.533.000	430.023.533.000	121.812.643.000	117.192.906.321



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 471 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
148	Kab. Kepahiang	414.396.205.000	414.396.205.000	110.689.648.000	106.571.947.541
149	Provinsi Lampung	1.857.043.487.000	1.857.043.487.000	2.195.260.835.000	2.132.385.102.832
150	Kab. Lampung Barat	521.743.958.000	521.743.958.000	312.627.934.000	307.395.275.747
151	Kab. Lampung Selatan	1.019.207.779.000	1.019.207.779.000	353.878.952.000	348.372.103.639
152	Kab. Lampung Tengah	1.319.480.688.000	1.319.480.688.000	457.631.283.000	437.002.533.599
153	Kab. Lampung Utara	949.774.837.000	949.774.837.000	308.458.247.000	226.503.513.121
154	Kab. Lampung Timur	1.069.168.109.000	1.069.168.109.000	363.143.901.000	355.380.212.579
155	Kab. Tanggamus	778.605.786.000	778.605.786.000	247.678.372.000	240.167.619.173
156	Kab. Tulang Bawang	612.112.587.000	612.112.587.000	273.610.957.000	256.723.192.931
157	Kab. Way Kanan	655.518.878.000	655.518.878.000	344.457.373.000	337.441.152.282
158	Kab. Pesawaran	669.276.831.000	669.276.831.000	255.672.043.000	250.821.838.688
159	Kab. Pesisir Barat	417.412.494.000	417.412.494.000	141.842.215.000	133.816.358.062
160	Kab. Pringsewu	621.967.450.000	621.967.450.000	203.636.701.000	196.385.795.591
161	Kab. Mesuji	446.272.067.000	446.272.067.000	144.700.488.000	138.886.646.742
162	Kab. Tulang Bawang Barat	463.478.442.000	463.478.442.000	239.852.919.000	237.255.143.339
163	Kota Bandar Lampung	1.034.730.849.000	1.034.730.849.000	270.866.364.000	264.908.878.825
164	Kota Metro	455.732.157.000	455.732.157.000	145.660.812.000	141.554.086.855
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-	3.136.629.255.000	2.645.603.991.214
166	Provinsi Jawa Barat	3.023.552.986.000	3.023.552.986.000	9.745.960.170.000	9.379.847.926.040
167	Kab. Bandung	2.060.202.697.000	2.060.202.697.000	792.150.938.000	737.019.669.306
168	Kab. Bekasi	1.152.893.281.000	1.152.893.281.000	378.522.198.000	336.464.448.595
169	Kab. Bogor	1.919.023.527.000	1.919.023.527.000	670.569.805.000	637.617.713.872
170	Kab. Ciamis	1.183.061.992.000	1.183.061.992.000	416.875.558.000	405.372.512.431
171	Kab. Cianjur	1.548.376.287.000	1.548.376.287.000	642.510.404.000	617.131.832.222
172	Kab. Cirebon	1.500.538.688.000	1.500.538.688.000	507.436.424.000	482.734.102.661
173	Kab. Garut	1.776.936.655.000	1.776.936.655.000	690.598.890.000	658.897.211.119
174	Kab. Indramayu	1.371.769.951.000	1.371.769.951.000	450.837.686.000	429.382.722.396
175	Kab. Karawang	1.245.521.327.000	1.245.521.327.000	537.455.851.000	491.491.861.535
176	Kab. Kuningan	1.197.194.996.000	1.197.194.996.000	415.861.747.000	399.724.583.341
177	Kab. Majalengka	1.204.397.174.000	1.204.397.174.000	440.694.096.000	420.418.332.786
178	Kab. Pangandaran	538.882.193.000	538.882.193.000	199.579.730.000	190.111.565.695
179	Kab. Purwakarta	854.419.670.000	854.419.670.000	282.962.084.000	265.883.032.920
180	Kab. Subang	1.282.683.362.000	1.282.683.362.000	451.750.555.000	436.390.303.341
181	Kab. Sukabumi	1.580.414.660.000	1.580.414.660.000	551.398.996.000	533.275.079.784
182	Kab. Sumedang	1.125.798.410.000	1.125.798.410.000	415.546.749.000	409.715.609.147
183	Kab. Tasikmalaya	1.451.247.063.000	1.451.247.063.000	565.948.278.000	550.280.189.633
184	Kab. Bandung Barat	1.091.118.868.000	1.091.118.868.000	374.063.434.000	352.833.523.306
185	Kota Bandung	1.643.076.905.000	1.643.076.905.000	499.234.857.000	462.437.060.573
186	Kota Bekasi	1.212.033.531.000	1.212.033.531.000	305.718.986.000	295.252.447.074
187	Kota Bogor	791.929.143.000	791.929.143.000	191.716.946.000	179.875.196.265
188	Kota Cirebon	577.778.746.000	577.778.746.000	179.184.996.000	164.489.195.433
189	Kota Depok	860.675.991.000	860.675.991.000	224.968.437.000	195.519.453.727
190	Kota Sukabumi	495.865.420.000	495.865.420.000	144.697.321.000	130.989.790.173
191	Kota Cimahi	576.278.051.000	576.278.051.000	157.470.504.000	144.938.837.788
192	Kota Tasikmalaya	780.073.445.000	780.073.445.000	307.728.472.000	299.932.769.876
193	Kota Banjar	368.153.289.000	368.153.289.000	79.090.159.000	75.925.333.043
194	Provinsi Banten	1.072.903.468.000	1.072.903.468.000	2.395.789.872.000	2.269.670.919.999
195	Kab. Lebak	1.086.661.291.000	1.086.661.291.000	421.108.405.000	387.752.105.644
196	Kab. Pandeglang	1.172.374.842.000	1.172.374.842.000	426.373.358.000	385.626.887.343



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 472 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
197	Kab. Serang	1.078.411.345.000	1.078.411.345.000	418.238.755.000	387.690.019.660
198	Kab. Tangerang	1.178.485.856.000	1.178.485.856.000	412.980.894.000	381.460.784.571
199	Kota Cilegon	598.515.134.000	598.515.134.000	128.161.069.000	123.996.175.236
200	Kota Tangerang	866.113.340.000	866.113.340.000	227.879.834.000	213.587.477.495
201	Kota Serang	636.602.678.000	636.602.678.000	152.816.021.000	146.974.402.472
202	Kota Tangerang Selatan	572.637.313.000	572.637.313.000	152.702.482.000	141.157.634.550
203	Provinsi Jawa Tengah	3.652.586.431.000	3.652.586.431.000	6.756.315.118.000	6.507.583.153.672
204	Kab. Banjarnegara	959.486.489.000	959.486.489.000	383.655.403.000	364.545.234.875
205	Kab. Banyumas	1.373.971.809.000	1.373.971.809.000	490.108.673.000	477.533.051.326
206	Kab. Batang	781.383.387.000	781.383.387.000	241.996.944.000	231.124.509.384
207	Kab. Blora	926.754.302.000	926.754.302.000	338.981.256.000	333.004.046.384
208	Kab. Boyolali	1.014.602.019.000	1.014.602.019.000	389.150.665.000	381.026.305.696
209	Kab. Brebes	1.322.465.038.000	1.322.465.038.000	419.479.479.000	398.599.759.143
210	Kab. Cilacap	1.362.443.518.000	1.362.443.518.000	463.571.821.000	443.618.853.481
211	Kab. Demak	894.376.873.000	894.376.873.000	283.657.892.000	275.348.403.392
212	Kab. Grobogan	1.094.460.434.000	1.094.460.434.000	400.743.048.000	385.401.361.674
213	Kab. Jepara	984.937.249.000	984.937.249.000	328.599.224.000	314.882.423.372
214	Kab. Karanganyar	978.664.650.000	978.664.650.000	332.279.859.000	308.185.919.715
215	Kab. Kebumen	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	412.176.759.000	390.504.708.527
216	Kab. Kendal	956.765.777.000	956.765.777.000	306.531.100.000	295.942.730.376
217	Kab. Klaten	1.237.967.327.000	1.237.967.327.000	394.218.628.000	373.028.991.537
218	Kab. Kudus	807.711.173.000	807.711.173.000	258.820.220.000	239.054.267.051
219	Kab. Magelang	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000	322.883.487.000	301.160.637.595
220	Kab. Pati	1.189.796.870.000	1.189.796.870.000	435.261.793.000	414.061.984.957
221	Kab. Pekalongan	915.154.037.000	915.154.037.000	366.638.864.000	346.840.785.740
222	Kab. Pemasang	1.180.834.332.000	1.180.834.332.000	356.263.948.000	331.768.131.456
223	Kab. Purbalingga	881.574.483.000	881.574.483.000	372.175.819.000	333.565.496.887
224	Kab. Purworejo	924.251.795.000	924.251.795.000	308.339.590.000	297.357.422.378
225	Kab. Rembang	771.584.367.000	771.584.367.000	282.210.059.000	258.619.192.504
226	Kab. Semarang	952.362.147.000	952.362.147.000	327.925.404.000	314.696.838.280
227	Kab. Sragen	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	334.257.047.000	320.063.100.709
228	Kab. Sukoharjo	906.416.629.000	906.416.629.000	302.965.064.000	286.887.271.862
229	Kab. Tegal	1.144.494.182.000	1.144.494.182.000	352.404.227.000	339.287.872.985
230	Kab. Temanggung	793.801.136.000	793.801.136.000	232.143.431.000	225.548.811.404
231	Kab. Wonogiri	1.125.312.680.000	1.125.312.680.000	395.201.647.000	379.596.211.850
232	Kab. Wonosobo	827.791.657.000	827.791.657.000	284.687.567.000	277.386.975.847
233	Kota Magelang	440.041.244.000	440.041.244.000	113.246.363.000	105.991.302.809
234	Kota Pekalongan	449.055.738.000	449.055.738.000	115.135.973.000	110.631.025.427
235	Kota Salatiga	448.067.710.000	448.067.710.000	95.645.513.000	88.527.219.754
236	Kota Semarang	1.190.422.387.000	1.190.422.387.000	350.631.680.000	330.030.704.917
237	Kota Surakarta	826.753.038.000	826.753.038.000	226.716.078.000	216.821.173.609
238	Kota Tegal	482.150.715.000	482.150.715.000	124.689.784.000	94.845.070.521
239	Provinsi Di Yogyakarta	1.314.372.147.000	1.314.372.147.000	946.184.887.000	912.156.183.851
240	Kab. Bantul	982.250.842.000	982.250.842.000	356.069.177.000	342.620.916.112
241	Kab. Gunung Kidul	938.221.136.000	938.221.136.000	322.400.991.000	303.863.880.056
242	Kab. Kulon Progo	705.868.940.000	705.868.940.000	260.428.120.000	247.883.109.094
243	Kab. Sleman	996.492.454.000	996.492.454.000	339.258.544.000	321.540.108.398
244	Kota Yogyakarta	658.504.186.000	658.504.186.000	188.129.240.000	162.523.890.048
245	Provinsi Jawa Timur	3.813.411.928.000	3.813.411.928.000	7.150.849.653.000	6.869.606.818.234



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 473 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
246	Kab. Bangkalan	994.460.684.000	994.460.684.000	308.312.968.000	260.696.538.242
247	Kab. Banyuwangi	1.375.784.247.000	1.375.784.247.000	442.593.081.000	423.717.990.705
248	Kab. Blitar	1.109.812.753.000	1.109.812.753.000	410.165.755.000	382.043.194.822
249	Kab. Bojonegoro	932.445.113.000	932.445.113.000	378.811.650.000	349.495.303.481
250	Kab. Bondowoso	910.319.122.000	910.319.122.000	329.658.613.000	309.056.755.613
251	Kab. Gresik	909.888.092.000	909.888.092.000	351.571.255.000	330.283.398.649
252	Kab. Jember	1.697.477.217.000	1.697.477.217.000	529.854.557.000	478.354.824.047
253	Kab. Jombang	1.091.779.457.000	1.091.779.457.000	364.092.359.000	341.135.141.100
254	Kab. Kediri	1.225.331.641.000	1.225.331.641.000	424.783.623.000	406.576.707.166
255	Kab. Lamongan	1.146.161.266.000	1.146.161.266.000	454.501.481.000	429.800.064.440
256	Kab. Lumajang	972.852.929.000	972.852.929.000	330.054.686.000	306.661.771.652
257	Kab. Madiun	877.868.685.000	877.868.685.000	320.302.605.000	303.837.979.055
258	Kab. Magetan	899.960.340.000	899.960.340.000	306.067.226.000	278.740.644.408
259	Kab. Malang	1.665.195.901.000	1.665.195.901.000	588.243.213.000	553.022.487.244
260	Kab. Mojokerto	973.768.511.000	973.768.511.000	369.041.904.000	337.920.214.957
261	Kab. Nganjuk	1.059.746.429.000	1.059.746.429.000	384.950.335.000	361.601.592.261
262	Kab. Ngawi	1.039.619.057.000	1.039.619.057.000	350.461.658.000	334.579.617.361
263	Kab. Pacitan	793.715.346.000	793.715.346.000	282.439.173.000	277.683.212.331
264	Kab. Pamekasan	849.764.469.000	849.764.469.000	289.125.093.000	266.900.962.262
265	Kab. Pasuruan	1.179.777.625.000	1.179.777.625.000	415.803.948.000	387.073.986.651
266	Kab. Ponorogo	1.043.916.636.000	1.043.916.636.000	434.499.623.000	405.686.933.708
267	Kab. Probolinggo	967.345.237.000	967.345.237.000	302.117.135.000	282.727.096.204
268	Kab. Sampang	825.443.163.000	825.443.163.000	294.214.648.000	279.475.126.533
269	Kab. Sidoarjo	1.203.737.401.000	1.203.737.401.000	449.062.283.000	415.805.733.813
270	Kab. Situbondo	806.660.581.000	806.660.581.000	327.642.434.000	303.035.021.045
271	Kab. Sumenep	1.144.489.870.000	1.144.489.870.000	330.553.820.000	318.164.202.097
272	Kab. Trenggalek	885.545.437.000	885.545.437.000	306.254.354.000	290.488.992.985
273	Kab. Tuban	1.028.370.328.000	1.028.370.328.000	323.808.210.000	311.052.055.461
274	Kab. Tulungagung	1.151.959.732.000	1.151.959.732.000	471.895.459.000	438.491.758.679
275	Kota Blitar	421.212.306.000	421.212.306.000	126.977.276.000	104.546.300.626
276	Kota Kediri	606.928.225.000	606.928.225.000	121.069.685.000	111.321.491.483
277	Kota Madiun	502.392.070.000	502.392.070.000	77.420.525.000	70.689.542.010
278	Kota Malang	844.576.426.000	844.576.426.000	202.637.120.000	184.452.461.185
279	Kota Mojokerto	390.118.825.000	390.118.825.000	85.000.428.000	74.274.872.665
280	Kota Pasuruan	424.499.789.000	424.499.789.000	151.989.086.000	124.354.364.356
281	Kota Probolinggo	461.952.836.000	461.952.836.000	119.364.796.000	102.056.324.513
282	Kota Surabaya	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	440.719.915.000	398.797.386.102
283	Kota Batu	474.881.106.000	474.881.106.000	90.110.425.000	77.838.891.013
290	Provinsi Kalimantan Barat	1.724.402.496.000	1.724.402.496.000	1.554.705.923.000	1.487.264.125.073
291	Kab. Bengkayang	581.274.511.000	581.274.511.000	183.342.723.000	173.905.503.371
292	Kab. Landak	670.222.701.000	670.222.701.000	276.056.375.000	268.890.449.941
293	Kab. Kapuas Hulu	975.757.515.000	975.757.515.000	299.935.750.000	292.467.332.303
294	Kab. Ketapang	1.122.269.534.000	1.122.269.534.000	357.881.688.000	335.157.692.404
295	Kab. Mempawah	583.210.092.000	583.210.092.000	207.542.224.000	199.602.980.557
296	Kab. Sambas	873.609.250.000	873.609.250.000	360.100.826.000	345.123.001.262
297	Kab. Sanggau	824.217.941.000	824.217.941.000	320.804.657.000	280.489.089.182
298	Kab. Sintang	909.410.866.000	909.410.866.000	372.440.549.000	351.581.836.133
299	Kota Pontianak	699.448.985.000	699.448.985.000	193.884.869.000	189.323.074.300
300	Kota Singkawang	492.487.388.000	492.487.388.000	172.857.374.000	149.662.300.565



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 474 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
301	Kab. Kayong Utara	472.544.021.000	472.544.021.000	154.122.780.000	146.013.672.816
302	Kab. Kubu Raya	782.647.725.000	782.647.725.000	332.788.854.000	322.384.358.285
303	Kab. Sekadau	504.548.895.000	504.548.895.000	204.110.372.000	150.505.334.115
304	Kab. Melawi	604.543.876.000	604.543.876.000	193.812.228.000	182.377.273.756
305	Provinsi Kalimantan Tengah	1.574.382.856.000	1.574.382.856.000	899.006.537.000	871.152.626.504
306	Kab. Barito Selatan	576.041.341.000	576.041.341.000	166.820.611.000	159.775.921.222
307	Kab. Barito Utara	559.665.616.000	559.665.616.000	171.230.664.000	162.376.186.859
308	Kab. Kapuas	866.321.730.000	866.321.730.000	285.162.297.000	271.460.074.291
309	Kab. Kotawaringin Barat	652.906.913.000	652.906.913.000	176.267.742.000	169.591.409.220
310	Kab. Kotawaringin Timur	820.559.562.000	820.559.562.000	214.452.736.000	198.592.942.745
311	Kota Palangkaraya	646.270.544.000	646.270.544.000	155.288.671.000	149.663.978.896
312	Kab. Barito Timur	478.975.191.000	478.975.191.000	122.459.353.000	117.705.864.742
313	Kab. Murung Raya	667.654.598.000	667.654.598.000	192.661.943.000	185.940.755.229
314	Kab. Pulang Pisau	568.390.382.000	568.390.382.000	213.497.077.000	207.858.468.017
315	Kab. Gunung Mas	559.898.689.000	559.898.689.000	189.633.870.000	180.921.429.482
316	Kab. Lamandau	462.248.605.000	462.248.605.000	99.823.112.000	95.832.653.032
317	Kab. Sukamara	420.535.543.000	420.535.543.000	127.591.219.000	122.277.982.314
318	Kab. Katingan	696.300.554.000	696.300.554.000	217.731.471.000	208.340.312.389
319	Kab. Seruyan	616.493.956.000	616.493.956.000	191.940.444.000	186.575.296.212
320	Provinsi Kalimantan Selatan	1.118.213.289.000	1.118.213.289.000	977.026.328.000	932.766.102.579
321	Kab. Banjar	709.407.411.000	709.407.411.000	291.390.017.000	272.331.969.107
322	Kab. Barito Kuala	565.599.843.000	565.599.843.000	208.458.268.000	199.754.994.741
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	522.814.008.000	522.814.008.000	197.137.474.000	186.501.672.823
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	519.741.516.000	519.741.516.000	182.519.056.000	169.416.141.770
325	Kab. Hulu Sungai Utara	485.062.285.000	485.062.285.000	187.659.373.000	175.927.903.178
326	Kab. Kotabaru	612.929.409.000	612.929.409.000	184.086.491.000	167.498.841.495
327	Kab. Tabalong	494.109.854.000	494.109.854.000	174.327.801.000	152.343.418.702
328	Kab. Tanah Laut	528.690.162.000	528.690.162.000	254.526.431.000	239.891.419.691
329	Kab. Tapin	448.697.311.000	448.697.311.000	138.933.004.000	134.346.921.703
330	Kota Banjarbaru	428.542.067.000	428.542.067.000	160.488.832.000	153.802.001.843
331	Kota Banjarmasin	696.828.787.000	696.828.787.000	173.793.606.000	162.900.494.334
332	Kab. Balangan	382.593.322.000	382.593.322.000	123.973.940.000	107.140.074.624
333	Kab. Tanah Bumbu	457.712.799.000	457.712.799.000	180.156.223.000	170.017.213.906
334	Provinsi Kalimantan Timur	767.682.423.000	767.682.423.000	1.117.790.753.000	1.075.683.891.680
335	Kab. Berau	561.401.129.000	561.401.129.000	220.844.708.000	185.757.595.993
336	Kab. Kutai Kartanegara	249.562.937.000	249.562.937.000	376.951.357.000	349.024.531.165
337	Kab. Kutai Barat	600.687.747.000	600.687.747.000	128.792.838.000	119.348.431.316
338	Kab. Kutai Timur	552.776.510.000	552.776.510.000	170.571.244.000	158.879.842.260
339	Kab. Mahakam Ulu	470.722.849.000	470.722.849.000	89.403.526.000	76.368.544.292
340	Kab. Paser	386.895.907.000	386.895.907.000	156.088.435.000	151.266.217.629
341	Kota Balikpapan	410.543.293.000	410.543.293.000	179.838.266.000	170.566.774.550
342	Kota Bontang	215.830.009.000	215.830.009.000	80.518.946.000	76.069.380.994
343	Kota Samarinda	659.322.535.000	659.322.535.000	242.306.672.000	234.160.199.197
344	Kab. Penajam Paser Utara	259.192.257.000	259.192.257.000	138.899.602.000	118.631.288.563
284	Provinsi Kalimantan Utara	1.185.105.787.000	1.185.105.787.000	354.147.252.000	340.690.138.981
285	Kab. Bulungan	497.449.426.000	497.449.426.000	162.288.240.000	158.479.243.265
286	Kab. Malinau	798.139.775.000	798.139.775.000	129.902.724.000	123.374.212.863
287	Kab. Nunukan	453.241.796.000	453.241.796.000	188.036.112.000	180.609.548.271
288	Kab. Tana Tidung	394.725.005.000	394.725.005.000	47.185.154.000	42.974.348.710



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 475 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
289	Kota Tarakan	380.969.519.000	380.969.519.000	164.159.864.000	157.588.699.499
345	Provinsi Sulawesi Utara	1.427.544.997.000	1.427.544.997.000	1.013.884.068.000	963.695.634.505
346	Kab. Bolaang Mongondow	556.612.417.000	556.612.417.000	213.885.530.000	206.410.223.418
347	Kab. Minahasa	656.641.151.000	656.641.151.000	232.625.482.000	221.231.538.080
348	Kab. Sangihe	518.472.055.000	518.472.055.000	170.640.394.000	153.984.975.135
349	Kota Bitung	476.935.367.000	476.935.367.000	211.596.335.000	203.284.399.558
350	Kota Manado	727.970.839.000	727.970.839.000	176.496.324.000	165.407.742.587
351	Kab. Kepulauan Talaud	488.354.687.000	488.354.687.000	158.834.739.000	139.669.923.500
352	Kab. Minahasa Selatan	523.238.733.000	523.238.733.000	264.626.265.000	243.492.758.581
353	Kab. Minahasa Tenggara	407.185.484.000	407.185.484.000	120.661.600.000	113.856.997.510
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	385.429.131.000	385.429.131.000	170.586.105.000	134.767.591.603
355	Kota Kotamobagu	376.388.719.000	376.388.719.000	175.243.709.000	171.048.865.141
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	341.807.077.000	341.807.077.000	133.900.982.000	129.408.162.373
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	349.643.086.000	349.643.086.000	110.843.836.000	106.573.164.734
358	Kota Tomohon	401.366.876.000	401.366.876.000	138.730.505.000	133.006.595.896
359	Kab. Minahasa Utara	496.136.006.000	496.136.006.000	145.568.655.000	131.495.165.367
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	384.772.383.000	384.772.383.000	151.519.546.000	140.988.642.599
361	Provinsi Gorontalo	1.006.924.707.000	1.006.924.707.000	395.083.511.000	370.824.273.846
362	Kab. Boalemo	452.535.801.000	452.535.801.000	229.642.212.000	209.589.456.124
363	Kab. Gorontalo	653.986.983.000	653.986.983.000	360.446.224.000	337.657.059.816
364	Kota Gorontalo	508.677.825.000	508.677.825.000	170.959.881.000	132.026.723.646
365	Kab. Pohuwato	513.389.155.000	513.389.155.000	184.748.664.000	178.359.374.852
366	Kab. Gorontalo Utara	402.570.414.000	402.570.414.000	153.235.829.000	144.151.240.328
367	Kab. Bone Bolango	487.244.817.000	487.244.817.000	217.595.287.000	202.098.479.193
368	Provinsi Sulawesi Tengah	1.586.163.908.000	1.586.163.908.000	976.962.777.000	953.221.062.164
369	Kab. Banggai	869.604.156.000	869.604.156.000	261.487.704.000	249.050.528.494
370	Kab. Banggai Laut	397.037.063.000	397.037.063.000	102.823.702.000	88.799.346.787
371	Kab. Banggai Kepulauan	465.346.799.000	465.346.799.000	176.537.342.000	164.512.996.173
372	Kab. Buol	528.033.354.000	528.033.354.000	204.062.877.000	192.891.578.885
373	Kab. Toli-toli	618.784.625.000	618.784.625.000	177.757.647.000	164.916.344.191
374	Kab. Donggala	659.731.826.000	659.731.826.000	211.607.349.000	207.662.219.147
375	Kab. Morowali	509.533.134.000	509.533.134.000	205.364.920.000	197.507.484.461
376	Kab. Morowali Utara	558.773.483.000	558.773.483.000	209.441.702.000	206.738.086.961
377	Kab. Poso	723.089.621.000	723.089.621.000	281.178.342.000	275.669.370.626
378	Kota Palu	671.600.535.000	671.600.535.000	203.483.077.000	195.171.092.200
379	Kab. Parigi Moutong	750.918.302.000	750.918.302.000	302.673.259.000	290.626.082.739
380	Kab. Sigi	634.133.821.000	634.133.821.000	256.206.197.000	244.935.609.690
381	Kab. Tojo Una Una	567.372.983.000	567.372.983.000	170.625.051.000	164.597.862.401
382	Provinsi Sulawesi Selatan	2.509.480.255.000	2.509.480.255.000	2.695.227.590.000	2.553.260.115.413
383	Kab. Bantaeng	494.749.832.000	494.749.832.000	222.720.011.000	215.529.019.670
384	Kab. Barru	510.978.699.000	510.978.699.000	219.627.726.000	208.448.805.220
385	Kab. Bone	1.070.426.493.000	1.070.426.493.000	467.789.754.000	454.581.140.617
386	Kab. Bulukumba	705.099.263.000	705.099.263.000	340.624.256.000	318.538.927.491
387	Kab. Enrekang	534.335.959.000	534.335.959.000	233.963.668.000	228.774.951.421
388	Kab. Gowa	837.326.483.000	837.326.483.000	384.326.476.000	380.202.231.681
389	Kab. Jenepono	627.644.516.000	627.644.516.000	304.866.064.000	296.771.322.098
390	Kab. Luwu	680.212.384.000	680.212.384.000	231.601.785.000	226.035.056.309
391	Kab. Luwu Utara	655.693.773.000	655.693.773.000	262.743.673.000	255.514.760.202
392	Kab. Maros	697.947.111.000	697.947.111.000	272.589.059.000	265.357.127.967



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 476 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	752.773.975.000	752.773.975.000	272.041.805.000	254.489.977.990
394	Kab. Pinrang	693.794.315.000	693.794.315.000	260.788.933.000	250.453.739.206
395	Kab. Kepulauan Selayar	580.780.803.000	580.780.803.000	238.701.256.000	232.128.162.002
396	Kab. Sidenreng Rappang	610.506.232.000	610.506.232.000	288.880.838.000	283.058.010.217
397	Kab. Sinjai	585.911.082.000	585.911.082.000	268.441.908.000	262.570.872.744
398	Kab. Soppeng	624.804.701.000	624.804.701.000	250.203.550.000	244.013.518.712
399	Kab. Takalar	595.466.518.000	595.466.518.000	274.879.684.000	256.130.933.270
400	Kab. Tana Toraja	551.496.571.000	551.496.571.000	234.234.567.000	223.679.321.245
401	Kab. Wajo	714.224.148.000	714.224.148.000	292.072.056.000	280.429.998.297
402	Kota Pare-pare	454.752.410.000	454.752.410.000	132.727.738.000	127.529.699.403
403	Kab. Toraja Utara	519.040.535.000	519.040.535.000	274.652.761.000	262.417.829.026
404	Kota Makassar	1.300.764.306.000	1.300.764.306.000	462.625.154.000	401.425.917.297
405	Kota Palopo	516.167.587.000	516.167.587.000	218.799.860.000	215.391.889.365
406	Kab. Luwu Timur	545.609.968.000	545.609.968.000	226.794.297.000	220.736.443.611
407	Provinsi Sulawesi Barat	1.025.033.063.000	1.025.033.063.000	468.342.173.000	450.334.925.040
408	Kab. Majene	512.162.492.000	512.162.492.000	149.560.436.000	147.835.927.732
409	Kab. Mamuju	627.775.288.000	627.775.288.000	223.868.146.000	219.255.558.042
410	Kab. Mamuju Tengah	347.815.396.000	347.815.396.000	141.810.691.000	136.069.833.276
411	Kab. Polewali Mandar	713.339.396.000	713.339.396.000	305.761.113.000	299.025.456.064
412	Kab. Mamasa	515.625.843.000	515.625.843.000	190.551.944.000	184.942.913.656
413	Kab. Pasangkayu	483.136.786.000	483.136.786.000	152.896.742.000	148.341.483.525
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.575.959.517.000	1.575.959.517.000	1.214.075.997.000	1.169.536.638.180
415	Kab. Buton	424.357.645.000	424.357.645.000	196.613.689.000	182.974.007.913
416	Kab. Konawe	678.419.303.000	678.419.303.000	194.309.628.000	190.070.966.295
417	Kab Konawe Kepulauan	315.499.213.000	315.499.213.000	96.711.049.000	91.377.903.711
418	Kab. Kolaka	582.742.370.000	582.742.370.000	173.798.991.000	167.763.941.686
419	Kab. Kolaka Timur	402.711.812.000	402.711.812.000	101.836.510.000	96.732.158.509
420	Kab. Muna	658.128.350.000	658.128.350.000	246.322.950.000	243.260.160.556
421	Kota Kendari	662.782.152.000	662.782.152.000	252.453.612.000	249.387.870.879
422	Kota Bau-bau	509.013.667.000	509.013.667.000	150.094.879.000	145.768.712.848
423	Kab. Konawe Selatan	666.731.360.000	666.731.360.000	253.959.666.000	248.877.062.901
424	Kab. Bombana	482.294.441.000	482.294.441.000	140.553.132.000	132.453.388.634
425	Kab. Konawe Utara	454.226.840.000	454.226.840.000	126.533.244.000	124.059.735.478
426	Kab. Buton Utara	410.109.235.000	410.109.235.000	114.765.484.000	111.341.616.173
427	Kab. Wakatobi	463.652.327.000	463.652.327.000	209.793.672.000	204.709.145.524
428	Kab. Kolaka Utara	475.754.194.000	475.754.194.000	124.751.513.000	120.905.705.029
429	Kab. Muna Barat	356.862.831.000	356.862.831.000	121.208.618.000	119.238.946.228
430	Kab. Buton Tengah	358.696.369.000	358.696.369.000	160.176.709.000	156.709.766.310
431	Kab. Buton Selatan	343.792.777.000	343.792.777.000	126.954.121.000	125.031.358.075
432	Provinsi Bali	1.268.585.388.000	1.268.585.388.000	1.102.440.440.000	1.048.792.635.535
433	Kab. Badung	330.336.650.000	330.336.650.000	153.350.911.000	147.499.745.680
434	Kab. Bangli	559.867.699.000	559.867.699.000	123.630.664.000	98.523.654.743
435	Kab. Buleleng	965.435.235.000	965.435.235.000	270.730.677.000	251.132.931.738
436	Kab. Gianyar	693.573.732.000	693.573.732.000	216.328.339.000	207.925.722.534
437	Kab. Jembrana	552.643.376.000	552.643.376.000	132.747.433.000	121.721.250.874
438	Kab. Karangasem	729.378.991.000	729.378.991.000	199.915.436.000	187.547.161.754
439	Kab. Klungkung	530.371.681.000	530.371.681.000	128.490.929.000	120.943.257.704
440	Kab. Tabanan	811.768.631.000	811.768.631.000	237.947.837.000	228.591.669.673
441	Kota Denpasar	650.169.150.000	650.169.150.000	155.434.473.000	143.294.526.569



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 477 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.537.777.886.000	1.537.777.886.000	1.454.262.126.000	1.401.066.660.559
443	Kab. Bima	880.920.216.000	880.920.216.000	423.326.232.000	416.530.293.427
444	Kab. Dompu	572.061.726.000	572.061.726.000	228.459.417.000	223.893.542.356
445	Kab. Lombok Barat	771.028.054.000	771.028.054.000	291.474.620.000	283.970.250.081
446	Kab. Lombok Tengah	985.217.157.000	985.217.157.000	387.895.658.000	375.752.025.902
447	Kab. Lombok Timur	1.147.731.584.000	1.147.731.584.000	556.344.948.000	528.019.968.808
448	Kab. Sumbawa	821.927.598.000	821.927.598.000	333.839.050.000	315.746.201.466
449	Kota Mataram	598.318.257.000	598.318.257.000	205.027.649.000	198.061.418.460
450	Kab. Lombok Utara	392.932.943.000	392.932.943.000	175.229.910.000	167.347.499.619
451	Kota Bima	455.972.250.000	455.972.250.000	157.886.864.000	152.038.608.385
452	Kab. Sumbawa Barat	400.284.503.000	400.284.503.000	177.899.376.000	169.726.258.778
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.827.412.640.000	1.827.412.640.000	1.885.339.844.000	1.784.037.619.507
454	Kab. Alor	600.881.201.000	600.881.201.000	276.559.920.000	264.126.614.328
455	Kab. Belu	501.312.256.000	501.312.256.000	214.403.552.000	208.282.595.364
456	Kab. Ende	621.873.578.000	621.873.578.000	202.083.516.000	182.115.289.753
457	Kab. Flores Timur	608.246.576.000	608.246.576.000	239.294.828.000	216.818.990.907
458	Kab. Kupang	681.370.762.000	681.370.762.000	292.327.076.000	270.417.611.896
459	Kab. Lembata	466.007.663.000	466.007.663.000	141.217.781.000	136.212.752.068
460	Kab. Malaka	436.377.451.000	436.377.451.000	147.373.968.000	138.791.619.406
461	Kab. Manggarai	572.870.496.000	572.870.496.000	234.979.250.000	224.296.757.486
462	Kab. Ngada	470.536.836.000	470.536.836.000	118.674.358.000	111.889.898.276
463	Kab. Sikka	622.679.290.000	622.679.290.000	192.918.147.000	182.748.667.364
464	Kab. Sumba Barat	397.976.871.000	397.976.871.000	223.871.607.000	217.843.032.706
465	Kab. Sumba Timur	637.391.140.000	637.391.140.000	189.063.851.000	169.415.544.661
466	Kab. Timor Tengah Selatan	747.723.272.000	747.723.272.000	341.268.889.000	301.043.603.693
467	Kab. Timor Tengah Utara	582.372.204.000	582.372.204.000	157.175.223.000	147.002.815.808
468	Kota Kupang	649.542.427.000	649.542.427.000	235.537.591.000	226.807.530.550
469	Kab. Rote Ndao	445.782.708.000	445.782.708.000	177.168.259.000	169.559.232.423
470	Kab. Nagekeo	432.406.320.000	432.406.320.000	125.879.410.000	119.884.445.535
471	Kab. Sumba Tengah	351.241.387.000	351.241.387.000	101.464.960.000	94.958.670.474
472	Kab. Sumba Barat Daya	467.693.510.000	467.693.510.000	180.223.341.000	166.481.523.168
473	Kab. Manggarai Timur	507.763.475.000	507.763.475.000	258.477.600.000	248.587.452.378
474	Kab. Sabu Raijua	346.280.257.000	346.280.257.000	115.129.037.000	91.344.353.490
475	Kab. Manggarai Barat	506.495.526.000	506.495.526.000	265.694.182.000	251.523.066.541
476	Provinsi Maluku	1.670.234.402.000	1.670.234.402.000	872.454.524.000	829.326.348.724
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	561.838.215.000	561.838.215.000	147.175.421.000	140.556.393.564
478	Kab. Maluku Tengah	965.391.210.000	965.391.210.000	338.561.120.000	317.645.449.651
479	Kab. Maluku Tenggara	495.979.781.000	495.979.781.000	183.296.137.000	176.807.140.414
480	Kab. Buru	500.117.604.000	500.117.604.000	228.295.886.000	221.272.221.252
481	Kota Ambon	674.130.364.000	674.130.364.000	182.270.533.000	170.302.430.309
482	Kab. Seram Bagian Barat	597.525.057.000	597.525.057.000	291.125.795.000	281.041.633.010
483	Kab. Seram Bagian Timur	530.650.657.000	530.650.657.000	190.247.018.000	168.884.101.312
484	Kab. Maluku Barat Daya	566.039.812.000	566.039.812.000	121.056.644.000	96.764.184.296
485	Kab. Buru Selatan	421.390.061.000	421.390.061.000	230.849.684.000	222.630.267.264
486	Kab. Kepulauan Aru	580.686.128.000	580.686.128.000	277.967.664.000	245.644.477.961
487	Kota Tual	394.706.960.000	394.706.960.000	123.517.854.000	121.826.166.195
488	Provinsi Maluku Utara	1.331.236.347.000	1.331.236.347.000	664.497.731.000	651.539.307.564
489	Kab. Halmahera Tengah	448.490.415.000	448.490.415.000	122.275.444.000	119.065.631.953
490	Kab. Halmahera Barat	493.248.990.000	493.248.990.000	279.313.566.000	277.966.179.429



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 478 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
491	Kota Ternate	610.569.215.000	610.569.215.000	121.623.139.000	120.641.348.267
492	Kab. Halmahera Timur	477.350.304.000	477.350.304.000	103.557.907.000	98.759.437.040
493	Kota Tidore Kepulauan	545.226.947.000	545.226.947.000	162.976.273.000	157.075.843.604
494	Kab. Kepulauan Sula	480.487.794.000	480.487.794.000	192.946.647.000	189.637.591.907
495	Kab. Pulau Morotai	391.524.047.000	391.524.047.000	144.896.753.000	142.851.217.542
496	Kab. Pulau Taliabu	341.053.281.000	341.053.281.000	106.575.813.000	102.976.849.067
497	Kab. Halmahera Selatan	751.125.982.000	751.125.982.000	247.892.965.000	242.796.536.711
498	Kab. Halmahera Utara	486.052.902.000	486.052.902.000	158.347.443.000	155.630.323.808
499	Provinsi Papua	2.571.298.119.000	2.571.298.119.000	1.222.885.646.000	914.093.743.390
500	Kab. Yalimo	620.836.641.000	620.836.641.000	164.960.191.000	144.756.859.320
501	Kab. Lanny Jaya	635.655.130.000	635.655.130.000	232.620.876.000	225.547.207.578
502	Kab. Biak Numfor	590.680.088.000	590.680.088.000	183.819.387.000	168.667.986.726
503	Kab. Jayapura	685.569.817.000	685.569.817.000	159.095.366.000	152.581.529.364
504	Kab. Jayawijaya	714.016.533.000	714.016.533.000	280.935.172.000	268.643.813.140
505	Kab. Merauke	1.220.130.325.000	1.220.130.325.000	332.045.406.000	305.830.656.603
506	Kab. Mimika	610.285.895.000	610.285.895.000	277.861.017.000	262.684.868.136
507	Kab. Nabire	709.282.575.000	709.282.575.000	273.860.021.000	263.699.417.579
508	Kab. Paniai	586.036.724.000	586.036.724.000	190.851.642.000	187.487.053.110
509	Kab. Puncak Jaya	749.825.236.000	749.825.236.000	137.860.990.000	131.587.202.300
510	Kab. Kepulauan Yapen	547.266.529.000	547.266.529.000	181.289.417.000	161.068.118.800
511	Kota Jayapura	634.300.774.000	634.300.774.000	141.667.687.000	124.614.710.613
512	Kab. Sarmi	711.725.614.000	711.725.614.000	127.110.240.000	106.363.979.400
513	Kab. Keerom	545.712.219.000	545.712.219.000	192.245.500.000	171.776.040.877
514	Kab. Yahukimo	748.276.221.000	748.276.221.000	284.109.864.000	279.292.133.135
515	Kab. Pegunungan Bintang	851.061.519.000	851.061.519.000	269.479.359.000	260.412.057.995
516	Kab. Tolikara	734.503.655.000	734.503.655.000	239.872.588.000	232.433.220.965
517	Kab. Boven Digoel	831.711.325.000	831.711.325.000	157.562.759.000	148.316.810.100
518	Kab. Mappi	781.328.280.000	781.328.280.000	170.293.282.000	162.404.939.921
519	Kab. Asmat	895.264.341.000	895.264.341.000	138.641.461.000	112.241.299.203
520	Kab. Waropen	562.528.293.000	562.528.293.000	115.732.915.000	104.092.907.290
521	Kab. Mamberamo Raya	720.547.800.000	720.547.800.000	92.463.749.000	75.210.895.955
522	Kab. Mamberamo Tengah	635.796.762.000	635.796.762.000	139.860.513.000	136.978.037.570
523	Kab. Nduga	632.951.682.000	632.951.682.000	241.407.194.000	239.319.080.946
524	Kab. Dogiyai	492.099.027.000	492.099.027.000	145.950.602.000	143.001.200.811
525	Kab. Intan Jaya	700.866.324.000	700.866.324.000	164.393.834.000	153.534.741.550
526	Kab. Puncak	805.591.888.000	805.591.888.000	198.900.267.000	178.133.391.688
527	Kab. Deiyai	475.401.856.000	475.401.856.000	153.525.149.000	150.001.046.414
528	Kab. Supiori	451.175.449.000	451.175.449.000	78.311.909.000	74.753.646.760
529	Provinsi Papua Barat	1.431.332.966.000	1.431.332.966.000	452.640.969.000	435.382.845.960
530	Kab. Sorong	512.300.811.000	512.300.811.000	233.538.688.000	229.351.183.641
531	Kab. Manokwari	529.220.329.000	529.220.329.000	156.866.403.000	138.557.527.784
532	Kab. Manokwari Selatan	347.705.874.000	347.705.874.000	116.315.878.000	113.928.830.106
533	Kab. Fak fak	668.545.841.000	668.545.841.000	159.827.017.000	147.899.355.835
534	Kota Sorong	471.797.886.000	471.797.886.000	105.541.553.000	92.961.897.100
535	Kab. Pegunungan Arfak	380.420.717.000	380.420.717.000	133.597.480.000	128.740.245.564
536	Kab. Sorong Selatan	448.077.175.000	448.077.175.000	108.726.993.000	97.199.401.538
537	Kab. Raja Ampat	666.645.462.000	666.645.462.000	175.428.684.000	164.950.039.083
538	Kab. Teluk Bintuni	549.667.337.000	549.667.337.000	116.253.860.000	114.758.771.274
539	Kab. Teluk Wondama	444.837.467.000	444.837.467.000	136.539.003.000	132.546.484.315



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 479 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
540	Kab. Tambrau	519.425.053.000	519.425.053.000	170.269.951.000	167.550.411.626
541	Kab. Maybrat	444.866.529.000	444.866.529.000	91.270.486.000	86.981.311.960
542	Kab. Kaimana	609.928.253.000	609.928.253.000	85.660.134.000	36.306.943.195
543	Dana Cadangan	-	-	2.695.766.600.000	353.976.565.607
	JUMLAH	401.489.579.649.000	401.489.579.649.000	185.888.071.708.000	173.449.578.218.684



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 480 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	8.029.791.593.000	-	-	-	8.029.791.593.000	8.029.791.593.000	-	-	-	8.029.791.593.000
2	Kab. Aceh Barat	-	220.927.595.000	-	35.250.000.000	256.177.595.000	-	220.192.020.000	-	35.250.000.000	255.442.020.000
3	Kab. Aceh Besar	-	394.170.701.000	-	18.000.000.000	412.170.701.000	-	394.170.700.800	-	18.000.000.000	412.170.700.800
4	Kab. Aceh Selatan	-	180.986.876.000	-	35.250.000.000	216.236.876.000	-	180.986.875.995	-	35.250.000.000	216.236.875.995
5	Kab. Aceh Singkil	-	91.394.344.000	-	-	91.394.344.000	-	91.080.148.829	-	-	91.080.148.829
6	Kab. Aceh Tengah	-	197.926.546.000	-	34.750.000.000	232.676.546.000	-	197.926.546.000	-	34.750.000.000	232.676.546.000
7	Kab. Aceh Tenggara	-	252.238.604.000	-	-	252.238.604.000	-	252.238.604.000	-	-	252.238.604.000
8	Kab. Aceh Timur	-	345.119.425.000	-	19.750.000.000	364.869.425.000	-	345.119.425.000	-	19.750.000.000	364.869.425.000
9	Kab. Aceh Utara	-	562.234.583.000	-	-	562.234.583.000	-	562.234.583.000	-	-	562.234.583.000
10	Kab. Bireuen	-	416.718.854.000	-	8.750.000.000	425.468.854.000	-	416.718.854.000	-	8.750.000.000	425.468.854.000
11	Kab. Pidie	-	498.843.013.000	-	-	498.843.013.000	-	498.843.013.000	-	-	498.843.013.000
12	Kab. Simeulue	-	102.024.542.000	-	43.500.000.000	145.524.542.000	-	102.024.542.000	-	43.500.000.000	145.524.542.000
13	Kota Banda Aceh	-	64.464.666.000	-	35.500.000.000	99.964.666.000	-	64.147.528.037	-	17.750.000.000	81.897.528.037
14	Kota Sabang	-	19.527.822.000	-	34.250.000.000	53.777.822.000	-	19.527.822.000	-	34.250.000.000	53.777.822.000
15	Kota Langsa	-	53.459.733.000	-	-	53.459.733.000	-	53.459.732.999	-	-	53.459.732.999
16	Kota Lhokseumawe	-	54.102.499.000	-	-	54.102.499.000	-	53.113.862.465	-	-	53.113.862.465
17	Kab. Nagan Raya	-	158.922.821.000	-	33.250.000.000	192.172.821.000	-	158.913.821.000	-	33.250.000.000	192.163.821.000
18	Kab. Aceh Jaya	-	117.810.988.000	-	35.500.000.000	153.310.988.000	-	117.810.988.000	-	35.500.000.000	153.310.988.000
19	Kab. Pidie Jaya	-	151.154.709.000	-	-	151.154.709.000	-	151.154.709.000	-	-	151.154.709.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	-	105.354.225.000	-	-	105.354.225.000	-	105.033.672.600	-	-	105.033.672.600
21	Kab. Gayo Lues	-	101.209.135.000	-	26.500.000.000	127.709.135.000	-	101.209.134.895	-	26.500.000.000	127.709.134.895
22	Kab. Aceh Tamiang	-	150.088.313.000	-	25.500.000.000	175.588.313.000	-	150.088.312.985	-	25.500.000.000	175.588.312.985
23	Kab. Bener Meriah	-	157.060.749.000	-	35.750.000.000	192.810.749.000	-	157.060.749.000	-	35.750.000.000	192.810.749.000
24	Kota Subulussalam	-	63.666.451.000	-	-	63.666.451.000	-	63.666.451.000	-	-	63.666.451.000
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kab. Asahan	-	126.612.806.000	-	-	126.612.806.000	-	126.612.806.000	-	-	126.612.806.000
27	Kab. Dairi	-	111.931.480.000	-	26.750.000.000	138.681.480.000	-	111.931.480.000	-	26.750.000.000	138.681.480.000
28	Kab. Deli Serdang	-	271.727.110.000	-	-	271.727.110.000	-	271.727.069.600	-	-	271.727.069.600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 481 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
29	Kab. Karo		173.032.360.000		-	173.032.360.000		173.032.360.000		-	173.032.360.000
30	Kab. LabuhanBatu		60.319.154.000		-	60.319.154.000		60.319.154.000		-	60.319.154.000
31	Kab. Langkat		179.187.255.000		-	179.187.255.000		179.187.255.000		-	179.187.255.000
32	Kab. Mandailing Natal		253.119.996.000		-	253.119.996.000		251.925.512.200		-	251.925.512.200
33	Kab. Nias		149.540.247.000		-	149.540.247.000		148.167.029.009		-	148.167.029.009
34	Kab. Simakungun		259.242.614.000		-	259.242.614.000		259.088.113.999		-	259.088.113.999
35	Kab. Tapanuli Selatan		145.867.334.000		8.000.000.000	153.867.334.000		144.815.909.800		8.000.000.000	152.815.909.800
36	Kab. Tapanuli Tengah		121.729.547.000		-	121.729.547.000		120.966.783.000		-	120.966.783.000
37	Kab. Tapanuli Utara		164.171.758.000		34.250.000.000	198.421.758.000		164.171.758.000		34.250.000.000	198.421.758.000
38	Kab. Toba Samosir		154.311.189.000		17.000.000.000	171.311.189.000		153.248.394.400		17.000.000.000	170.248.394.400
39	Kota Binjai		-		17.500.000.000	17.500.000.000		-		17.500.000.000	17.500.000.000
40	Kota Medan		-		-	-		-		-	-
41	Kota Pematang Siantar		-		-	-		-		-	-
42	Kota Sibolga		-		-	-		-		-	-
43	Kota Tanjung Balai		-		-	-		-		-	-
44	Kab. Batu Bara		104.278.229.000		-	104.278.229.000		104.278.228.948		-	104.278.228.948
45	Kab. Labuhan Batu Utara		67.742.000.000		-	67.742.000.000		67.742.000.000		-	67.742.000.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan		46.111.054.000		-	46.111.054.000		46.111.054.000		-	46.111.054.000
47	Kab. Padang Lawas Utara		254.182.148.000		-	254.182.148.000		252.229.192.200		-	252.229.192.200
48	Kab. Padang Lawas		204.968.532.000		-	204.968.532.000		203.014.984.800		-	203.014.984.800
49	Kab. Nias Utara		111.964.852.000		-	111.964.852.000		109.293.137.200		-	109.293.137.200
50	Kab. Nias Barat		92.981.905.000		-	92.981.905.000		92.981.904.984		-	92.981.904.984
51	Kota Tebing Tinggi		-		-	-		-		-	-
52	Kota Padang Sidempuan		33.662.556.000		-	33.662.556.000		33.662.556.000		-	33.662.556.000
53	Kab. Pakpak Bharat		40.948.983.000		25.500.000.000	66.448.983.000		40.021.955.400		25.500.000.000	65.521.955.400
54	Kab. Nias Selatan		315.110.810.000		-	315.110.810.000		267.448.027.033		-	267.448.027.033
55	Kab. Humbang Hasundutan		105.690.046.000		-	105.690.046.000		105.690.046.000		-	105.690.046.000
56	Kab. Serdang Bedagai		162.795.883.000		-	162.795.883.000		161.297.332.647		-	161.297.332.647
57	Kab. Samosir		90.953.371.000		-	90.953.371.000		90.953.371.000		-	90.953.371.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 482 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
58	Kota Gunungsitoli		77.492.216.000		-	77.492.216.000	76.000.480.809				76.000.480.809
59	Provinsi Sumatera Barat				71.250.000.000	71.250.000.000			71.250.000.000		71.250.000.000
60	Kab. Lima Puluh Kota		64.726.914.000		26.750.000.000	91.476.914.000	64.726.913.998		26.750.000.000		91.476.913.998
61	Kab. Agam		63.842.103.000		25.500.000.000	89.342.103.000	63.842.103.000		25.500.000.000		89.342.103.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai		45.361.198.000		-	45.361.198.000	45.361.140.800				45.361.140.800
63	Kab. Padang Pariaman		81.807.844.000		16.500.000.000	98.307.844.000	81.807.844.000		16.500.000.000		98.307.844.000
64	Kab. Pasaman		39.081.007.000		16.750.000.000	55.831.007.000	39.081.007.000		8.375.000.000		47.456.007.000
65	Kab. Pesisir Selatan		145.956.367.000		8.750.000.000	154.706.367.000	145.956.367.000		8.750.000.000		154.706.367.000
66	Kab. Sijunjung		49.651.473.000		35.250.000.000	84.901.473.000	49.651.473.000		35.250.000.000		84.901.473.000
67	Kab. Solok		62.971.507.000		-	62.971.507.000	62.971.507.000				62.971.507.000
68	Kab. Tanah Datar		56.799.295.000		25.750.000.000	82.549.295.000	56.799.295.000		25.750.000.000		82.549.295.000
69	Kota Bukit Tinggi		-		28.250.000.000	28.250.000.000			28.250.000.000		28.250.000.000
70	Kota Padang Panjang		-		8.000.000.000	8.000.000.000			4.000.000.000		4.000.000.000
71	Kota Padang		-		28.250.000.000	28.250.000.000			28.250.000.000		28.250.000.000
72	Kota Payakumbuh		-		16.500.000.000	16.500.000.000			16.500.000.000		16.500.000.000
73	Kota Sawahlunto		23.469.694.000		27.500.000.000	50.969.694.000	23.469.694.000		27.500.000.000		50.969.694.000
74	Kota Solok		-		9.500.000.000	9.500.000.000			9.500.000.000		9.500.000.000
75	Kota Panaman		41.606.563.000		8.500.000.000	50.106.563.000	41.270.376.154		8.500.000.000		49.770.376.154
76	Kab. Pasaman Barat		35.839.479.000		34.750.000.000	70.589.479.000	35.839.479.000		34.750.000.000		70.589.479.000
77	Kab. Dharmasraya		43.249.031.000		17.500.000.000	60.749.031.000	43.249.031.000		17.500.000.000		60.749.031.000
78	Kab. Solok Selatan		35.721.401.000		-	35.721.401.000	35.721.400.999				35.721.400.999
79	Provinsi Riau		-		9.000.000.000	9.000.000.000			9.000.000.000		9.000.000.000
80	Kab. Bengkalis		118.033.975.000		26.750.000.000	144.783.975.000	118.033.974.996		26.750.000.000		144.783.974.996
81	Kab. Indragiri Hilir		146.756.324.000		-	146.756.324.000	146.426.521.200				146.426.521.200
82	Kab. Indragiri Hulu		140.433.302.000		-	140.433.302.000	140.433.275.000				140.433.275.000
83	Kab. Kampar		185.162.993.000		-	185.162.993.000	184.378.856.000				184.378.856.000
84	Kab. Kuantan Singingi		153.076.959.000		-	153.076.959.000	153.076.959.000				153.076.959.000
85	Kab. Pelalawan		90.154.697.000		-	90.154.697.000	89.841.146.300				89.841.146.300
86	Kab. Rokan Hilir		126.860.825.000		-	126.860.825.000	126.860.825.000				126.860.825.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 483 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
87	Kab. Rokan Hulu		120.306.632.000		-	120.306.632.000		120.306.631.400		-	120.306.631.400
88	Kab. Siak		97.135.442.000		55.750.000.000	152.885.442.000		97.135.441.994		55.750.000.000	152.885.441.994
89	Kota Dumai		-		-	-		-		-	-
90	Kota Pekanbaru		-		27.250.000.000	27.250.000.000		-		27.250.000.000	27.250.000.000
91	Kab. Kepulauan Meranti		84.050.804.000		35.250.000.000	119.300.804.000		84.050.801.000		35.250.000.000	119.300.801.000
92	Provinsi Kepulauan Riau		-		-	-		-		-	-
93	Kab. Bintan		30.903.914.000		17.750.000.000	48.653.914.000		30.903.914.000		17.750.000.000	48.653.914.000
94	Kab. Natuna		54.514.794.000		-	54.514.794.000		54.514.794.000		-	54.514.794.000
95	Kab. Karimun		35.444.527.000		41.250.000.000	76.694.527.000		35.444.527.000		41.250.000.000	76.694.527.000
96	Kota Batam		-		-	-		-		-	-
97	Kab. Kepulauan Anambas		43.487.568.000		-	43.487.568.000		43.487.568.000		-	43.487.568.000
98	Kota Tanjung Pinang		-		-	-		-		-	-
99	Kab. Lingga		57.013.545.000		-	57.013.545.000		57.013.545.000		-	57.013.545.000
100	Provinsi Jambi		-		18.250.000.000	18.250.000.000		-		9.125.000.000	9.125.000.000
101	Kab. Batanghari		88.949.104.000		25.250.000.000	114.199.104.000		88.949.104.000		25.250.000.000	114.199.104.000
102	Kab. Bungo		99.662.383.000		-	99.662.383.000		99.662.379.349		-	99.662.379.349
103	Kab. Kerinci		189.579.503.000		35.250.000.000	224.829.503.000		187.861.330.200		35.250.000.000	223.111.330.200
104	Kab. Merangin		148.823.813.000		-	148.823.813.000		148.823.812.977		-	148.823.812.977
105	Kab. Muaro Jambi		107.496.108.000		35.250.000.000	142.746.108.000		107.496.108.000		35.250.000.000	142.746.108.000
106	Kab. Sarolangun		116.644.095.000		44.000.000.000	160.644.095.000		115.844.592.000		44.000.000.000	159.844.592.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat		89.944.914.000		-	89.944.914.000		89.944.914.000		-	89.944.914.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur		61.125.428.000		-	61.125.428.000		61.125.428.000		-	61.125.428.000
109	Kab. Tebo		91.640.792.000		26.750.000.000	118.390.792.000		91.640.792.000		26.750.000.000	118.390.792.000
110	Kota Jambi		-		18.000.000.000	18.000.000.000		-		18.000.000.000	18.000.000.000
111	Kota Sungai Penuh		47.271.346.000		17.750.000.000	65.021.346.000		47.204.703.200		17.750.000.000	64.954.703.200
112	Provinsi Sumatera Selatan		-		64.750.000.000	64.750.000.000		-		64.750.000.000	64.750.000.000
113	Kab. Lahat		269.158.286.000		25.250.000.000	294.408.286.000		269.158.284.000		25.250.000.000	294.408.284.000
114	Kab. Musi Banyuasin		194.512.079.000		26.750.000.000	221.262.079.000		194.512.079.000		26.750.000.000	221.262.079.000
115	Kab. Musi Rawas		166.798.219.000		37.250.000.000	204.048.219.000		166.798.219.000		37.250.000.000	204.048.219.000
116	Kab Musi Rawas Utara		83.178.183.000		-	83.178.183.000		83.178.142.999		-	83.178.142.999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 484 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
117	Kab. Muara Enim		208.161.174.000		43.500.000.000	251.661.174.000		208.161.174.000		43.500.000.000	251.661.174.000
118	Kab. Ogan Komering Ilir		253.191.679.000		26.250.000.000	279.441.679.000		253.191.679.000		26.250.000.000	279.441.679.000
119	Kab. Ogan Komering Ulu		118.813.420.000		25.000.000.000	143.813.420.000		118.180.845.600		25.000.000.000	143.180.845.600
120	Kota Palembang		-		25.250.000.000	25.250.000.000		-		25.250.000.000	25.250.000.000
121	Kota Pagar Alam		-		8.000.000.000	8.000.000.000		-		8.000.000.000	8.000.000.000
122	Kota Lubuk Linggau		-		17.750.000.000	17.750.000.000		-		17.750.000.000	17.750.000.000
123	Kota Prabumulih		16.294.634.000		17.000.000.000	33.294.634.000		16.294.634.000		17.000.000.000	33.294.634.000
124	Kab. Empat Lawang		112.223.919.000		-	112.223.919.000		112.223.919.000		-	112.223.919.000
125	Kab. Banyuasin		253.420.207.000		35.750.000.000	289.170.207.000		253.420.206.999		35.750.000.000	289.170.206.999
126	Kab. Ogan Ilir		176.964.320.000		17.500.000.000	194.464.320.000		176.332.916.400		17.500.000.000	193.832.916.400
127	Kab. OKU Timur		205.926.152.000		8.000.000.000	213.926.152.000		205.926.152.000		8.000.000.000	213.926.152.000
128	Kab. OKU Selatan		190.415.134.000		18.750.000.000	209.165.134.000		190.415.134.000		18.750.000.000	209.165.134.000
129	Kab. Panukal Abab Lematang Ilir		65.063.635.000		-	65.063.635.000		65.063.635.000		-	65.063.635.000
130	Provinsi Bangka Belitung		-		-	-		-		-	-
131	Kab. Bangka		51.718.989.000		16.500.000.000	68.218.989.000		51.718.988.898		8.250.000.000	59.968.988.898
132	Kab. Belitung		38.805.104.000		-	38.805.104.000		38.805.104.000		-	38.805.104.000
133	Kota Pangkal Pinang		-		-	-		-		-	-
134	Kab. Bangka Selatan		42.487.059.000		-	42.487.059.000		42.487.059.000		-	42.487.059.000
135	Kab. Bangka Tengah		47.148.882.000		8.000.000.000	55.148.882.000		47.148.882.000		8.000.000.000	55.148.882.000
136	Kab. Bangka Barat		48.519.806.000		25.250.000.000	73.769.806.000		47.679.073.537		25.250.000.000	72.929.073.537
137	Kab. Belitung Timur		35.618.320.000		-	35.618.320.000		35.618.320.000		-	35.618.320.000
138	Provinsi Bengkulu		-		-	-		-		-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan		97.393.929.000		-	97.393.929.000		97.388.065.000		-	97.388.065.000
140	Kab. Bengkulu Utara		146.743.965.000		-	146.743.965.000		145.830.615.400		-	145.830.615.400
141	Kab. Rejang Lebong		97.529.213.000		-	97.529.213.000		97.526.692.700		-	97.526.692.700
142	Kota Bengkulu		-		-	-		-		-	-
143	Kab. Kaur		129.967.425.000		9.250.000.000	139.217.425.000		129.967.424.400		9.250.000.000	139.217.424.400
144	Kab. Seluma		126.703.577.000		-	126.703.577.000		126.703.576.979		-	126.703.576.979
145	Kab. Mukomuko		106.544.049.000		-	106.544.049.000		106.544.049.000		-	106.544.049.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 485 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
146	Kab. Lebong		68.355.722.000		26.750.000.000	95.105.722.000		67.737.752.400		26.750.000.000	94.487.752.400
147	Kab. Bengkulu Tengah		98.197.538.000			98.197.538.000		95.171.279.187			95.171.279.187
148	Kab. Kepahang		74.958.035.000			74.958.035.000		74.957.867.800			74.957.867.800
149	Provinsi Lampung										
150	Kab. Lampung Barat		112.483.521.000		16.750.000.000	129.233.521.000		112.483.521.000		16.750.000.000	129.233.521.000
151	Kab. Lampung Selatan		225.519.782.000		35.000.000.000	260.519.782.000		225.199.887.396		35.000.000.000	260.199.887.396
152	Kab. Lampung Tengah		258.648.643.000		8.500.000.000	267.148.643.000		258.648.643.000		4.250.000.000	262.898.643.000
153	Kab. Lampung Utara		215.481.590.000		34.500.000.000	249.981.590.000		215.481.589.996		34.500.000.000	249.981.589.996
154	Kab. Lampung Timur		234.301.839.000			234.301.839.000		234.301.839.000			234.301.839.000
155	Kab. Tanggamus		248.590.256.000			248.590.256.000		248.590.256.000			248.590.256.000
156	Kab. Tulang Bawang		128.010.109.000		18.000.000.000	146.010.109.000		127.242.124.629		9.000.000.000	136.242.124.629
157	Kab. Way Kanan		164.879.793.000		16.750.000.000	181.629.793.000		164.879.793.000		16.750.000.000	181.629.793.000
158	Kab. Pesawaran		134.135.688.000		34.000.000.000	168.135.688.000		134.135.688.000		34.000.000.000	168.135.688.000
159	Kab. Pesisir Barat		98.950.577.000			98.950.577.000		98.950.576.096			98.950.576.096
160	Kab. Pringsewu		105.274.360.000		26.250.000.000	131.524.360.000		105.274.360.000		26.250.000.000	131.524.360.000
161	Kab. Mesuji		87.417.060.000		35.250.000.000	122.667.060.000		87.417.060.000		35.250.000.000	122.667.060.000
162	Kab. Tulang Bawang Barat		74.708.156.000		26.750.000.000	101.458.156.000		74.708.156.000		26.750.000.000	101.458.156.000
163	Kota Bandar Lampung										
164	Kota Metro				25.500.000.000	25.500.000.000				25.500.000.000	25.500.000.000
165	Provinsi DKI Jakarta										
166	Provinsi Jawa Barat				33.750.000.000	33.750.000.000				33.750.000.000	33.750.000.000
167	Kab. Bandung		259.468.420.000		34.250.000.000	293.718.420.000		259.468.420.000		34.250.000.000	293.718.420.000
168	Kab. Bekasi		196.713.680.000		27.750.000.000	224.463.680.000		196.713.680.000		13.875.000.000	210.588.680.000
169	Kab. Bogor		402.068.049.000		17.500.000.000	419.568.049.000		402.068.048.852		17.500.000.000	419.568.048.852
170	Kab. Ciamis		217.285.506.000		25.750.000.000	243.035.506.000		217.285.506.000		25.750.000.000	243.035.506.000
171	Kab. Cianjur		346.804.878.000		25.750.000.000	372.554.878.000		346.452.870.400		25.750.000.000	372.202.870.400
172	Kab. Cirebon		370.242.221.000		35.750.000.000	405.992.221.000		370.242.221.000		35.750.000.000	405.992.221.000
173	Kab. Garut		393.536.092.000		17.250.000.000	410.786.092.000		393.536.092.000		17.250.000.000	410.786.092.000
174	Kab. Indramayu		310.922.174.000		35.000.000.000	345.922.174.000		310.922.174.000		35.000.000.000	345.922.174.000
175	Kab. Karawang		283.709.059.000		25.750.000.000	309.459.059.000		280.948.448.400		25.750.000.000	306.698.448.400



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 486 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
176	Kab. Kuningan		262.301.673.000		-	262.301.673.000		262.301.673.000		-	262.301.673.000
177	Kab. Majalengka		312.485.897.000		-	312.485.897.000		312.485.897.000		-	312.485.897.000
178	Kab. Pangandaran		76.670.519.000		17.000.000.000	93.670.519.000		76.670.519.000		17.000.000.000	93.670.519.000
179	Kab. Purwakarta		142.032.991.000		32.750.000.000	174.782.991.000		141.719.243.083		32.750.000.000	174.469.243.083
180	Kab. Subang		185.677.056.000		-	185.677.056.000		185.339.855.150		-	185.339.855.150
181	Kab. Sukabumi		304.406.625.000		18.750.000.000	323.156.625.000		300.895.124.977		18.750.000.000	319.645.124.977
182	Kab. Sumedang		192.462.069.000		25.000.000.000	217.462.069.000		192.462.067.600		25.000.000.000	217.462.067.600
183	Kab. Tasikmalaya		322.586.652.000		33.750.000.000	356.336.652.000		322.586.652.000		33.750.000.000	356.336.652.000
184	Kab. Bandung Barat		198.291.361.000		-	198.291.361.000		198.291.361.000		-	198.291.361.000
185	Kota Bandung		-		-	-		-		-	-
186	Kota Bekasi		-		-	-		-		-	-
187	Kota Bogor		-		-	-		-		-	-
188	Kota Cirebon		-		17.500.000.000	17.500.000.000		-		17.500.000.000	17.500.000.000
189	Kota Depok		-		78.250.000.000	78.250.000.000		-		78.250.000.000	78.250.000.000
190	Kota Sukabumi		-		39.250.000.000	39.250.000.000		-		39.250.000.000	39.250.000.000
191	Kota Cimahi		-		9.000.000.000	9.000.000.000		-		4.500.000.000	4.500.000.000
192	Kota Tasikmalaya		-		-	-		-		-	-
193	Kota Banjar		17.291.312.000		32.250.000.000	49.541.312.000		17.291.312.000		32.250.000.000	49.541.312.000
194	Provinsi Banten		-		-	-		-		-	-
195	Kab. Lebak		239.383.197.000		25.750.000.000	265.133.197.000		239.378.424.400		25.750.000.000	265.128.424.400
196	Kab. Pandeglang		231.185.206.000		-	231.185.206.000		231.185.206.000		-	231.185.206.000
197	Kab. Serang		227.676.618.000		34.750.000.000	262.426.618.000		226.934.084.800		34.750.000.000	261.684.084.800
198	Kab. Tangerang		242.671.332.000		17.500.000.000	260.171.332.000		240.890.904.216		8.750.000.000	249.640.904.216
199	Kota Cilegon		-		-	-		-		-	-
200	Kota Tangerang		-		35.000.000.000	35.000.000.000		-		35.000.000.000	35.000.000.000
201	Kota Serang		-		-	-		-		-	-
202	Kota Tangerang Selatan		-		35.000.000.000	35.000.000.000		-		35.000.000.000	35.000.000.000
203	Provinsi Jawa Tengah		-		33.500.000.000	33.500.000.000		-		33.500.000.000	33.500.000.000
204	Kab. Banjarnegara		222.775.782.000		26.750.000.000	249.525.782.000		222.775.782.000		26.750.000.000	249.525.782.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 487 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
205	Kab. Banyumas		295.876.047.000		34.250.000.000	330.126.047.000		295.876.047.000		34.250.000.000	330.126.047.000
206	Kab. Batang		168.403.538.000		34.250.000.000	202.653.538.000		168.403.538.000		34.250.000.000	202.653.538.000
207	Kab. Blora		229.733.837.000		26.250.000.000	255.983.837.000		229.733.837.000		26.250.000.000	255.983.837.000
208	Kab. Boyolali		192.998.474.000		23.500.000.000	216.498.474.000		192.998.474.000		23.500.000.000	216.498.474.000
209	Kab. Brebes		344.197.496.000		-	344.197.496.000		344.197.496.000		-	344.197.496.000
210	Kab. Cilacap		240.787.259.000		27.250.000.000	268.037.259.000		240.787.259.000		27.250.000.000	268.037.259.000
211	Kab. Demak		229.565.688.000		34.000.000.000	263.565.688.000		229.565.688.000		34.000.000.000	263.565.688.000
212	Kab. Grobogan		248.195.231.000		25.000.000.000	273.195.231.000		248.195.231.000		25.000.000.000	273.195.231.000
213	Kab. Jepara		190.273.424.000		8.000.000.000	198.273.424.000		190.273.424.000		8.000.000.000	198.273.424.000
214	Kab. Karanganyar		138.839.437.000		68.250.000.000	207.089.437.000		138.839.437.000		68.250.000.000	207.089.437.000
215	Kab. Kebumen		350.691.179.000		-	350.691.179.000		350.691.179.000		-	350.691.179.000
216	Kab. Kendal		215.090.043.000		27.000.000.000	242.090.043.000		215.090.043.000		27.000.000.000	242.090.043.000
217	Kab. Klaten		320.940.593.000		-	320.940.593.000		320.940.593.000		-	320.940.593.000
218	Kab. Kudus		117.966.044.000		26.250.000.000	144.216.044.000		117.966.044.000		26.250.000.000	144.216.044.000
219	Kab. Magelang		325.360.832.000		-	325.360.832.000		325.360.832.000		-	325.360.832.000
220	Kab. Pati		365.454.541.000		42.500.000.000	407.954.541.000		365.454.541.000		42.500.000.000	407.954.541.000
221	Kab. Pekalongan		227.842.747.000		8.000.000.000	235.842.747.000		227.842.747.000		8.000.000.000	235.842.747.000
222	Kab. Pemalang		249.322.556.000		9.000.000.000	258.322.556.000		249.322.556.000		9.000.000.000	258.322.556.000
223	Kab. Purbalangga		199.934.262.000		9.500.000.000	209.434.262.000		199.934.262.000		9.500.000.000	209.434.262.000
224	Kab. Purworejo		326.085.184.000		9.000.000.000	335.085.184.000		326.085.184.000		9.000.000.000	335.085.184.000
225	Kab. Rembang		229.010.130.000		-	229.010.130.000		229.010.130.000		-	229.010.130.000
226	Kab. Semarang		157.084.768.000		17.500.000.000	174.584.768.000		157.084.768.000		17.500.000.000	174.584.768.000
227	Kab. Sragen		146.148.323.000		9.000.000.000	155.148.323.000		146.148.323.000		9.000.000.000	155.148.323.000
228	Kab. Sukoharjo		126.076.256.000		35.750.000.000	161.826.256.000		126.076.256.000		35.750.000.000	161.826.256.000
229	Kab. Tegal		282.703.163.000		35.000.000.000	317.703.163.000		282.703.162.997		35.000.000.000	317.703.162.997
230	Kab. Temanggung		213.042.611.000		18.750.000.000	231.792.611.000		213.042.611.000		18.750.000.000	231.792.611.000
231	Kab. Wonogiri		196.188.133.000		25.500.000.000	221.688.133.000		196.188.133.000		25.500.000.000	221.688.133.000
232	Kab. Wonosobo		184.414.648.000		8.750.000.000	193.164.648.000		184.414.648.000		8.750.000.000	193.164.648.000
233	Kota Magelang		-		18.250.000.000	18.250.000.000		-		18.250.000.000	18.250.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 488 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
234	Kota Pekalongan	-	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000	-	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000
235	Kota Salatiga	-	-	-	38.500.000.000	38.500.000.000	-	-	-	38.500.000.000	38.500.000.000
236	Kota Semarang	-	-	-	60.250.000.000	60.250.000.000	-	-	-	60.250.000.000	60.250.000.000
237	Kota Surakarta	-	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000	-	-	-	33.250.000.000	33.250.000.000
238	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	1.000.000.000.000	37.250.000.000	1.037.250.000.000	-	-	1.000.000.000.000	37.250.000.000	1.037.250.000.000
240	Kab. Bantul	79.076.105.000	-	-	34.250.000.000	113.326.105.000	-	79.076.105.000	-	34.250.000.000	113.326.105.000
241	Kab. Gunung Kidul	117.574.520.000	-	-	9.000.000.000	126.574.520.000	-	117.574.520.000	-	9.000.000.000	126.574.520.000
242	Kab. Kulon Progo	76.680.810.000	-	-	62.250.000.000	138.930.810.000	-	76.680.810.000	-	62.250.000.000	138.930.810.000
243	Kab. Sleman	81.187.698.000	-	-	51.500.000.000	132.687.698.000	-	81.187.698.000	-	51.500.000.000	132.687.698.000
244	Kota Yogyakarta	-	-	-	42.500.000.000	42.500.000.000	-	-	-	42.500.000.000	42.500.000.000
245	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	77.500.000.000	77.500.000.000	-	-	-	77.500.000.000	77.500.000.000
246	Kab. Bangkalan	270.643.937.000	-	-	-	270.643.937.000	-	270.643.937.000	-	-	270.643.937.000
247	Kab. Banyuwangi	167.707.413.000	-	-	74.500.000.000	242.207.413.000	-	167.707.412.850	-	74.500.000.000	242.207.412.850
248	Kab. Blitar	163.105.009.000	-	-	36.250.000.000	199.355.009.000	-	163.105.009.000	-	36.250.000.000	199.355.009.000
249	Kab. Bojonegoro	316.364.467.000	-	-	17.250.000.000	333.614.467.000	-	316.364.467.000	-	17.250.000.000	333.614.467.000
250	Kab. Bondowoso	197.149.839.000	-	-	24.500.000.000	221.649.839.000	-	197.149.839.000	-	24.500.000.000	221.649.839.000
251	Kab. Gresik	246.902.275.000	-	-	34.250.000.000	281.152.275.000	-	246.902.275.000	-	17.125.000.000	264.027.275.000
252	Kab. Jember	236.182.333.000	-	-	-	236.182.333.000	-	235.267.846.549	-	-	235.267.846.549
253	Kab. Jombang	238.440.982.000	-	-	18.500.000.000	256.940.982.000	-	238.440.974.712	-	18.500.000.000	256.940.974.712
254	Kab. Kediri	270.691.907.000	-	-	34.750.000.000	305.441.907.000	-	270.691.907.000	-	34.750.000.000	305.441.907.000
255	Kab. Lamongan	321.349.755.000	-	-	43.750.000.000	365.099.755.000	-	321.349.755.000	-	43.750.000.000	365.099.755.000
256	Kab. Lumajang	163.728.393.000	-	-	35.000.000.000	198.728.393.000	-	163.206.258.000	-	35.000.000.000	198.206.258.000
257	Kab. Madiun	142.156.308.000	-	-	18.000.000.000	160.156.308.000	-	142.156.308.000	-	9.000.000.000	151.156.308.000
258	Kab. Magetan	147.948.351.000	-	-	33.250.000.000	181.198.351.000	-	147.948.351.000	-	33.250.000.000	181.198.351.000
259	Kab. Malang	314.215.308.000	-	-	26.250.000.000	340.465.308.000	-	314.215.308.000	-	26.250.000.000	340.465.308.000
260	Kab. Mojokerto	208.535.750.000	-	-	9.000.000.000	217.535.750.000	-	203.605.688.600	-	9.000.000.000	212.605.688.600
261	Kab. Nganyuk	235.353.730.000	-	-	-	235.353.730.000	-	235.353.700.000	-	-	235.353.700.000
262	Kab. Ngawi	167.815.849.000	-	-	17.250.000.000	185.065.849.000	-	167.815.849.000	-	17.250.000.000	185.065.849.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 489 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
263	Kab. Pacitan		125.652.536.000		37.000.000.000	162.652.536.000		125.652.536.000		37.000.000.000	162.652.536.000
264	Kab. Pamekasan		162.867.892.000		25.750.000.000	188.617.892.000		162.014.284.400		25.750.000.000	187.764.284.400
265	Kab. Pasuruan		301.266.507.000		25.750.000.000	327.016.507.000		301.027.884.400		25.750.000.000	326.777.884.400
266	Kab. Ponorogo		216.613.335.000		27.250.000.000	243.863.335.000		216.613.335.000		27.250.000.000	243.863.335.000
267	Kab. Probolinggo		322.100.878.000		16.250.000.000	338.350.878.000		322.100.877.987		16.250.000.000	338.350.877.987
268	Kab. Sampang		179.206.635.000		-	179.206.635.000		179.206.635.000		-	179.206.635.000
269	Kab. Sidoarjo		252.255.524.000		45.000.000.000	297.255.524.000		247.400.305.606		45.000.000.000	292.400.305.606
270	Kab. Situbondo		115.130.385.000		26.750.000.000	141.880.385.000		115.130.381.000		26.750.000.000	141.880.381.000
271	Kab. Sumenep		278.366.376.000		-	278.366.376.000		278.366.376.000		-	278.366.376.000
272	Kab. Trenggalek		127.606.280.000		17.000.000.000	144.606.280.000		127.606.280.000		17.000.000.000	144.606.280.000
273	Kab. Tuban		226.950.413.000		26.500.000.000	253.450.413.000		226.950.413.000		26.500.000.000	253.450.413.000
274	Kab. Tukungagung		205.952.328.000		-	205.952.328.000		205.952.328.000		-	205.952.328.000
275	Kota Blitar		-		26.000.000.000	26.000.000.000		-		13.000.000.000	13.000.000.000
276	Kota Kediri		-		18.250.000.000	18.250.000.000		-		18.250.000.000	18.250.000.000
277	Kota Madun		-		-	-		-		-	-
278	Kota Malang		-		25.500.000.000	25.500.000.000		-		25.500.000.000	25.500.000.000
279	Kota Mojokerto		-		66.750.000.000	66.750.000.000		-		66.750.000.000	66.750.000.000
280	Kota Pasuruan		-		8.000.000.000	8.000.000.000		-		4.000.000.000	4.000.000.000
281	Kota Probolinggo		-		-	-		-		-	-
282	Kota Surabaya		-		48.750.000.000	48.750.000.000		-		48.750.000.000	48.750.000.000
283	Kota Batu		21.347.494.000		54.750.000.000	76.097.494.000		21.347.494.000		54.750.000.000	76.097.494.000
284	Provinsi Kalimantan Barat		-		7.250.000.000	7.250.000.000		-		7.250.000.000	7.250.000.000
285	Kab. Bengkayang		92.400.237.000		-	92.400.237.000		92.400.237.000		-	92.400.237.000
286	Kab. Landak		154.158.590.000		18.500.000.000	172.658.590.000		154.158.590.000		18.500.000.000	172.658.590.000
287	Kab. Kapuas Hulu		228.933.717.000		-	228.933.717.000		228.933.717.000		-	228.933.717.000
288	Kab. Ketapang		217.293.380.000		18.750.000.000	236.043.380.000		217.293.380.000		18.750.000.000	236.043.380.000
289	Kab. Mempawah		55.232.991.000		18.750.000.000	73.982.991.000		55.232.991.000		18.750.000.000	73.982.991.000
290	Kab. Sambas		172.844.238.000		-	172.844.238.000		172.844.238.000		-	172.844.238.000
291	Kab. Sanggau		128.783.898.000		27.750.000.000	156.533.898.000		128.479.518.000		13.875.000.000	142.354.518.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 490 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
292	Kab. Sintang		294.873.842.000		-	294.873.842.000		294.718.224.000		-	294.718.224.000
293	Kota Pontianak		-		16.750.000.000	16.750.000.000		-		16.750.000.000	16.750.000.000
294	Kota Singkawang		-		-	-		-		-	-
295	Kab. Kayong Utara		39.856.608.000		-	39.856.608.000		39.856.608.000		-	39.856.608.000
296	Kab. Kubu Raya		111.498.747.000		26.250.000.000	137.748.747.000		110.330.425.000		26.250.000.000	136.580.425.000
297	Kab. Sekadau		69.076.050.000		9.000.000.000	78.076.050.000		68.763.682.135		4.500.000.000	73.263.682.135
298	Kab. Melawi		130.908.954.000		-	130.908.954.000		130.908.953.973		-	130.908.953.973
299	Provinsi Kalimantan Tengah		-		-	-		-		-	-
300	Kab. Barito Selatan		70.547.743.000		-	70.547.743.000		70.221.534.200		-	70.221.534.200
301	Kab. Barito Utara		76.315.979.000		27.250.000.000	103.565.979.000		76.315.979.000		27.250.000.000	103.565.979.000
302	Kab. Kapuas		160.073.599.000		-	160.073.599.000		160.073.599.000		-	160.073.599.000
303	Kab. Kotawaringin Barat		65.845.758.000		17.750.000.000	83.595.758.000		65.247.882.799		17.750.000.000	82.997.882.799
304	Kab. Kotawaringin Timur		129.483.060.000		34.750.000.000	164.233.060.000		126.501.547.800		34.750.000.000	161.251.547.800
305	Kota Palangkaraya		-		36.500.000.000	36.500.000.000		-		36.500.000.000	36.500.000.000
306	Kab. Barito Timur		73.784.575.000		27.750.000.000	101.534.575.000		73.784.575.000		27.750.000.000	101.534.575.000
307	Kab. Murung Raya		102.176.180.000		8.750.000.000	110.926.180.000		102.176.180.000		8.750.000.000	110.926.180.000
308	Kab. Pulang Pisau		78.360.356.000		44.000.000.000	122.360.356.000		78.360.356.000		44.000.000.000	122.360.356.000
309	Kab. Gunung Mas		87.206.969.000		17.250.000.000	104.456.969.000		85.418.505.400		17.250.000.000	102.668.505.400
310	Kab. Lamandau		65.425.783.000		26.500.000.000	91.925.783.000		65.117.047.152		26.500.000.000	91.617.047.152
311	Kab. Sukamara		28.277.201.000		-	28.277.201.000		28.277.201.000		-	28.277.201.000
312	Kab. Katungan		123.109.956.000		17.250.000.000	140.359.956.000		123.109.685.400		17.250.000.000	140.359.685.400
313	Kab. Saruyan		84.482.209.000		9.250.000.000	93.732.209.000		82.532.152.804		9.250.000.000	91.782.152.804
314	Provinsi Kalimantan Selatan		-		25.500.000.000	25.500.000.000		-		12.750.000.000	12.750.000.000
315	Kab. Banjar		188.881.942.000		17.250.000.000	206.131.942.000		188.881.942.000		17.250.000.000	206.131.942.000
316	Kab. Barito Kuala		132.904.071.000		34.500.000.000	167.404.071.000		132.904.071.000		34.500.000.000	167.404.071.000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan		105.076.993.000		36.000.000.000	141.076.993.000		104.769.835.800		36.000.000.000	140.769.835.800
318	Kab. Hulu Sungai Tengah		113.048.455.000		34.750.000.000	147.798.455.000		113.048.455.000		34.750.000.000	147.798.455.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara		155.822.737.000		25.750.000.000	181.572.737.000		155.822.737.000		12.875.000.000	168.697.737.000
320	Kab. Kotabaru		144.947.050.000		-	144.947.050.000		144.947.050.000		-	144.947.050.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 491 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi	
321	Kab. Tabalong		93.539.641.000		50.000.000.000	143.539.641.000		93.539.641.000			50.000.000.000	143.539.641.000
322	Kab. Tanah Laut		93.622.628.000		9.500.000.000	103.122.628.000		92.050.239.700			9.500.000.000	101.550.239.700
323	Kab. Tapin		88.565.041.000		8.000.000.000	96.565.041.000		88.565.041.000			8.000.000.000	96.565.041.000
324	Kota Banjarbaru		-		8.750.000.000	8.750.000.000		-			8.750.000.000	8.750.000.000
325	Kota Banjarmasin		-		26.500.000.000	26.500.000.000		-			26.500.000.000	26.500.000.000
326	Kab. Balangan		105.312.544.000		27.750.000.000	133.062.544.000		104.545.595.000			27.750.000.000	132.295.595.000
327	Kab. Tanah Bumbu		105.407.731.000		26.750.000.000	132.157.731.000		105.407.728.000			26.750.000.000	132.157.728.000
328	Provinsi Kalimantan Timur		-		-	-		-			-	-
329	Kab. Berau		90.992.725.000		-	90.992.725.000		90.871.653.500			-	90.871.653.500
330	Kab. Kutai Kartanegara		159.897.070.000		-	159.897.070.000		157.684.888.906			-	157.684.888.906
331	Kab. Kutai Barat		148.195.189.000		34.750.000.000	182.945.189.000		148.195.189.000			34.750.000.000	182.945.189.000
332	Kab. Kutai Timur		141.179.638.000		9.000.000.000	150.179.638.000		140.507.968.337			9.000.000.000	149.507.968.337
333	Kab. Mahakam Ulu		56.364.021.000		-	56.364.021.000		55.962.436.600			-	55.962.436.600
334	Kab. Paser		106.475.887.000		27.750.000.000	134.225.887.000		104.926.336.600			27.750.000.000	132.676.336.600
335	Kota Balikpapan		-		26.000.000.000	26.000.000.000		-			26.000.000.000	26.000.000.000
336	Kota Bontang		-		24.750.000.000	24.750.000.000		-			24.750.000.000	24.750.000.000
337	Kota Samarinda		-		-	-		-			-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara		28.609.375.000		-	28.609.375.000		28.609.375.000			-	28.609.375.000
339	Provinsi Kalimantan Utara		-		-	-		-			-	-
340	Kab. Bulungan		67.596.565.000		-	67.596.565.000		67.596.562.000			-	67.596.562.000
341	Kab. Malinau		118.919.224.000		34.250.000.000	153.169.224.000		118.919.224.000			34.250.000.000	153.169.224.000
342	Kab. Nunukan		166.800.519.000		35.250.000.000	202.050.519.000		166.800.519.000			35.250.000.000	202.050.519.000
343	Kab. Tana Tidung		34.235.379.000		-	34.235.379.000		34.235.379.000			-	34.235.379.000
344	Kota Tarakan		-		-	-		-			-	-
345	Provinsi Sulawesi Utara		-		8.750.000.000	8.750.000.000		-			8.750.000.000	8.750.000.000
346	Kab. Bolaang Mongondow		141.107.482.000		-	141.107.482.000		141.107.482.000			-	141.107.482.000
347	Kab. Minahasa		151.906.617.000		18.750.000.000	170.656.617.000		151.906.617.000			18.750.000.000	170.656.617.000
348	Kab. Sangihe		99.715.800.000		17.250.000.000	116.965.800.000		99.715.800.000			17.250.000.000	116.965.800.000
349	Kota Bitung		-		18.750.000.000	18.750.000.000		-			18.750.000.000	18.750.000.000
350	Kota Manado		-		-	-		-			-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 492 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
351	Kab. Kepulauan Talaud		98.448.136.000		35.250.000.000	133.698.136.000		98.448.136.000		35.250.000.000	133.698.136.000
352	Kab. Minahasa Selatan		120.399.906.000		27.000.000.000	147.399.906.000		120.399.906.000		27.000.000.000	147.399.906.000
353	Kab. Minahasa Tenggara		93.325.083.000		43.500.000.000	136.825.083.000		93.325.083.000		43.500.000.000	136.825.083.000
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		59.926.989.000		-	59.926.989.000		59.926.989.000		-	59.926.989.000
355	Kota Kotamobagu		17.430.851.000		18.750.000.000	36.180.851.000		17.430.851.000		18.750.000.000	36.180.851.000
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur		59.104.609.000		17.750.000.000	76.854.609.000		58.488.264.000		17.750.000.000	76.238.264.000
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		59.560.601.000		8.000.000.000	67.560.601.000		59.560.601.000		8.000.000.000	67.560.601.000
358	Kota Tomohon		-		25.000.000.000	25.000.000.000		-		25.000.000.000	25.000.000.000
359	Kab. Minahasa Utara		89.468.459.000		19.000.000.000	108.468.459.000		89.468.459.000		19.000.000.000	108.468.459.000
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara		75.468.287.000		35.500.000.000	110.968.287.000		75.468.287.000		35.500.000.000	110.968.287.000
361	Provinsi Gorontalo		-		17.000.000.000	17.000.000.000		-		17.000.000.000	17.000.000.000
362	Kab. Boalemo		72.967.579.000		-	72.967.579.000		72.967.579.000		-	72.967.579.000
363	Kab. Gorontalo		170.949.169.000		41.000.000.000	211.949.169.000		170.949.169.000		41.000.000.000	211.949.169.000
364	Kota Gorontalo		-		35.000.000.000	35.000.000.000		-		35.000.000.000	35.000.000.000
365	Kab. Pohuwato		79.073.314.000		27.000.000.000	106.073.314.000		79.073.314.000		27.000.000.000	106.073.314.000
366	Kab. Gorontalo Utara		88.869.533.000		-	88.869.533.000		88.869.533.000		-	88.869.533.000
367	Kab. Bone Bolango		125.177.663.000		34.250.000.000	159.427.663.000		124.875.215.400		34.250.000.000	159.125.215.400
368	Provinsi Sulawesi Tengah		-		-	-		-		-	-
369	Kab. Banggai		203.474.376.000		17.250.000.000	220.724.376.000		203.474.376.000		17.250.000.000	220.724.376.000
370	Kab. Banggai Laut		47.192.680.000		-	47.192.680.000		47.192.680.000		-	47.192.680.000
371	Kab. Banggai Kepulauan		99.213.710.000		-	99.213.710.000		99.213.710.000		-	99.213.710.000
372	Kab. Buol		79.718.705.000		33.750.000.000	113.468.705.000		79.718.686.925		33.750.000.000	113.468.686.925
373	Kab. Toli-toli		76.404.400.000		-	76.404.400.000		76.404.399.600		-	76.404.399.600
374	Kab. Donggala		123.460.807.000		-	123.460.807.000		123.460.807.000		-	123.460.807.000
375	Kab. Morowali		90.213.479.000		33.250.000.000	123.463.479.000		90.213.479.000		33.250.000.000	123.463.479.000
376	Kab. Morowali Utara		95.403.798.000		-	95.403.798.000		95.403.798.000		-	95.403.798.000
377	Kab. Poso		110.953.533.000		-	110.953.533.000		110.953.533.000		-	110.953.533.000
378	Kota Palu		-		18.750.000.000	18.750.000.000		-		18.750.000.000	18.750.000.000
379	Kab. Pangi Moutong		207.264.407.000		-	207.264.407.000		207.264.406.987		-	207.264.406.987



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 493 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
380	Kab. Sigi		127.246.327.000		-	127.246.327.000		127.246.327.000		-	127.246.327.000
381	Kab. Tojo Una Una		103.574.985.000		33.750.000.000	137.324.985.000		103.574.985.000		33.750.000.000	137.324.985.000
382	Provinsi Sulawesi Selatan		-		16.000.000.000	16.000.000.000		-		8.000.000.000	8.000.000.000
383	Kab. Bantaeng		38.832.248.000		9.000.000.000	47.832.248.000		38.832.248.000		9.000.000.000	47.832.248.000
384	Kab. Barru		41.950.855.000		16.500.000.000	58.450.855.000		41.950.855.000		16.500.000.000	58.450.855.000
385	Kab. Bone		289.886.499.000		17.500.000.000	307.386.499.000		289.120.285.200		17.500.000.000	306.620.285.200
386	Kab. Bulukumba		95.646.406.000		34.750.000.000	130.396.406.000		95.646.406.000		34.750.000.000	130.396.406.000
387	Kab. Enrekang		97.769.717.000		-	97.769.717.000		97.769.717.000		-	97.769.717.000
388	Kab. Gowa		124.707.358.000		26.250.000.000	150.957.358.000		123.986.915.999		26.250.000.000	150.236.915.999
389	Kab. Jeneponto		85.403.574.000		-	85.403.574.000		85.403.574.000		-	85.403.574.000
390	Kab. Luwu		166.790.061.000		25.250.000.000	192.040.061.000		166.790.061.000		25.250.000.000	192.040.061.000
391	Kab. Luwu Utara		143.801.788.000		8.750.000.000	152.551.788.000		143.801.788.000		8.750.000.000	152.551.788.000
392	Kab. Maros		74.083.395.000		35.750.000.000	109.833.395.000		74.083.395.000		35.750.000.000	109.833.395.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan		60.274.262.000		8.000.000.000	68.274.262.000		60.274.262.000		4.000.000.000	64.274.262.000
394	Kab. Pinrang		57.070.425.000		25.750.000.000	82.820.425.000		57.070.425.000		25.750.000.000	82.820.425.000
395	Kab. Kepulauan Selayar		70.757.748.000		33.250.000.000	104.007.748.000		70.757.748.000		33.250.000.000	104.007.748.000
396	Kab. Sidenreng Rappang		55.539.074.000		17.000.000.000	72.539.074.000		55.539.074.000		17.000.000.000	72.539.074.000
397	Kab. Sinjai		59.003.589.000		41.000.000.000	100.003.589.000		59.003.588.193		41.000.000.000	100.003.588.193
398	Kab. Soppeng		43.861.085.000		17.000.000.000	60.861.085.000		43.861.085.000		17.000.000.000	60.861.085.000
399	Kab. Takalar		70.305.555.000		-	70.305.555.000		70.305.555.000		-	70.305.555.000
400	Kab. Tana Toraja		103.514.268.000		-	103.514.268.000		103.514.268.000		-	103.514.268.000
401	Kab. Wajo		104.219.771.000		18.250.000.000	122.469.771.000		103.913.127.626		18.250.000.000	122.163.127.626
402	Kota Pare-pare		-		25.250.000.000	25.250.000.000		-		25.250.000.000	25.250.000.000
403	Kab. Toraja Utara		109.601.625.000		34.250.000.000	143.851.625.000		109.601.625.000		17.125.000.000	126.726.625.000
404	Kota Makassar		-		35.750.000.000	35.750.000.000		-		17.875.000.000	17.875.000.000
405	Kota Palopo		-		10.250.000.000	10.250.000.000		-		10.250.000.000	10.250.000.000
406	Kab. Luwu Timur		99.497.559.000		34.250.000.000	133.747.559.000		99.497.559.000		34.250.000.000	133.747.559.000
407	Provinsi Sulawesi Barat		-		18.250.000.000	18.250.000.000		-		18.250.000.000	18.250.000.000
408	Kab. Majene		53.384.442.000		34.250.000.000	87.634.442.000		53.384.442.000		34.250.000.000	87.634.442.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 494 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
409	Kab. Mamuju		70.314.731.000		-	70.314.731.000		70.314.731.000		-	70.314.731.000
410	Kab. Mamuju Tengah		45.226.004.000		16.500.000.000	61.726.004.000		45.226.000.000		16.500.000.000	61.726.000.000
411	Kab. Polewali Mandar		130.070.147.000		43.500.000.000	173.570.147.000		130.070.093.000		43.500.000.000	173.570.093.000
412	Kab. Mamasa		124.446.771.000		42.000.000.000	166.446.771.000		124.446.771.000		42.000.000.000	166.446.771.000
413	Kab. Pasangkayu		48.436.242.000		36.000.000.000	84.436.242.000		48.436.242.000		36.000.000.000	84.436.242.000
414	Provinsi Sulawesi Tenggara		-		16.500.000.000	16.500.000.000		-		16.500.000.000	16.500.000.000
415	Kab. Buton		63.341.301.000		36.500.000.000	99.841.301.000		63.341.301.000		36.500.000.000	99.841.301.000
416	Kab. Konawe		201.473.903.000		16.000.000.000	217.473.903.000		198.933.402.800		16.000.000.000	214.933.402.800
417	Kab. Konawe Kepulauan		65.308.557.000		-	65.308.557.000		64.079.694.000		-	64.079.694.000
418	Kab. Kolaka		75.174.449.000		16.000.000.000	91.174.449.000		75.174.449.000		16.000.000.000	91.174.449.000
419	Kab. Kolaka Timur		84.611.627.000		-	84.611.627.000		84.611.627.000		-	84.611.627.000
420	Kab. Muna		102.572.896.000		-	102.572.896.000		101.956.550.400		-	101.956.550.400
421	Kota Kendari		-		16.500.000.000	16.500.000.000		-		8.250.000.000	8.250.000.000
422	Kota Bau-bau		-		25.250.000.000	25.250.000.000		-		25.250.000.000	25.250.000.000
423	Kab. Konawe Selatan		225.016.754.000		16.750.000.000	241.766.754.000		224.819.174.000		16.750.000.000	241.569.174.000
424	Kab. Bombana		90.639.986.000		17.750.000.000	108.389.986.000		90.639.985.000		17.750.000.000	108.389.985.000
425	Kab. Konawe Utara		110.381.184.000		-	110.381.184.000		110.381.183.800		-	110.381.183.800
426	Kab. Buton Utara		59.873.876.000		-	59.873.876.000		59.873.875.600		-	59.873.875.600
427	Kab. Wakatobi		57.444.549.000		16.500.000.000	73.944.549.000		57.444.545.400		16.500.000.000	73.944.545.400
428	Kab. Kolaka Utara		106.445.883.000		24.000.000.000	130.445.883.000		106.445.882.793		24.000.000.000	130.445.882.793
429	Kab. Muna Barat		66.818.419.000		-	66.818.419.000		66.818.419.000		-	66.818.419.000
430	Kab. Buton Tengah		54.296.304.000		-	54.296.304.000		54.296.303.999		-	54.296.303.999
431	Kab. Buton Selatan		50.847.283.000		-	50.847.283.000		50.847.283.000		-	50.847.283.000
432	Provinsi Bali		-		41.500.000.000	41.500.000.000		-		41.500.000.000	41.500.000.000
433	Kab. Badung		42.302.590.000		81.250.000.000	123.552.590.000		42.302.590.000		81.250.000.000	123.552.590.000
434	Kab. Bangli		52.857.670.000		52.000.000.000	104.857.670.000		52.857.669.800		52.000.000.000	104.857.669.800
435	Kab. Buleleng		107.039.777.000		34.750.000.000	141.789.777.000		107.039.777.000		34.750.000.000	141.789.777.000
436	Kab. Gianyar		51.971.543.000		50.500.000.000	102.471.543.000		51.971.543.000		50.500.000.000	102.471.543.000
437	Kab. Jembrana		39.391.724.000		37.250.000.000	76.641.724.000		39.391.724.000		37.250.000.000	76.641.724.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 495 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
438	Kab. Karangasem		64.239.619.000		35.250.000.000	99.489.619.000		64.239.619.000		35.250.000.000	99.489.619.000
439	Kab. Klungkung		43.276.499.000		34.750.000.000	78.026.499.000		43.276.499.000		34.750.000.000	78.026.499.000
440	Kab. Tabanan		101.721.992.000		51.000.000.000	152.721.992.000		101.721.992.000		51.000.000.000	152.721.992.000
441	Kota Denpasar		27.404.975.000		27.250.000.000	54.654.975.000		27.404.975.000		27.250.000.000	54.654.975.000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat				27.250.000.000	27.250.000.000				27.250.000.000	27.250.000.000
443	Kab. Bima		156.776.861.000		25.250.000.000	182.026.861.000		156.776.860.725		25.250.000.000	182.026.860.725
444	Kab. Dompu		61.698.788.000			61.698.788.000		61.698.788.000			61.698.788.000
445	Kab. Lombok Barat		128.321.278.000		35.750.000.000	164.071.278.000		128.321.278.000		35.750.000.000	164.071.278.000
446	Kab. Lombok Tengah		155.444.598.000		16.500.000.000	171.944.598.000		155.444.598.000		16.500.000.000	171.944.598.000
447	Kab. Lombok Timur		252.711.702.000		35.750.000.000	288.461.702.000		252.711.702.000		35.750.000.000	288.461.702.000
448	Kab. Sumbawa		123.909.408.000		27.750.000.000	151.659.408.000		123.909.408.000		27.750.000.000	151.659.408.000
449	Kota Mataram				38.000.000.000	38.000.000.000				38.000.000.000	38.000.000.000
450	Kab. Lombok Utara		49.433.654.000		36.000.000.000	85.433.654.000		49.037.342.000		36.000.000.000	85.037.342.000
451	Kota Bima				27.750.000.000	27.750.000.000				27.750.000.000	27.750.000.000
452	Kab. Sumbawa Barat		52.509.433.000		35.250.000.000	87.759.433.000		52.509.432.996		35.250.000.000	87.759.432.996
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur										
454	Kab. Alor		139.899.534.000			139.899.534.000		139.899.534.000			139.899.534.000
455	Kab. Belu		72.451.173.000			72.451.173.000		72.451.173.000			72.451.173.000
456	Kab. Ende		175.257.121.000			175.257.121.000		175.257.120.198			175.257.120.198
457	Kab. Flores Timur		155.311.387.000			155.311.387.000		155.311.387.000			155.311.387.000
458	Kab. Kupang		136.520.446.000			136.520.446.000		136.520.446.000			136.520.446.000
459	Kab. Lembata		114.468.459.000			114.468.459.000		114.221.367.400			114.221.367.400
460	Kab. Malaka		95.196.646.000			95.196.646.000		95.187.554.592			95.187.554.592
461	Kab. Manggarai		125.785.322.000			125.785.322.000		125.785.322.000			125.785.322.000
462	Kab. Ngada		96.524.287.000			96.524.287.000		95.747.929.863			95.747.929.863
463	Kab. Sikka		125.012.694.000		26.500.000.000	151.512.694.000		125.012.694.000		26.500.000.000	151.512.694.000
464	Kab. Sumba Barat		67.192.170.000			67.192.170.000		67.192.170.000			67.192.170.000
465	Kab. Sumba Timur		108.473.996.000		17.500.000.000	125.973.996.000		108.382.480.500		17.500.000.000	125.882.480.500
466	Kab. Timor Tengah Selatan		233.686.745.000			233.686.745.000		233.686.745.000			233.686.745.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 496 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
467	Kab. Timor Tengah Utara		137.831.056.000		-	137.831.056.000		137.831.055.200		-	137.831.055.200
468	Kota Kupang		-		-	-		-		-	-
469	Kab. Rote Ndao		91.824.992.000		-	91.824.992.000		91.824.992.000		-	91.824.992.000
470	Kab. Nagekeo		75.953.714.000		-	75.953.714.000		75.953.714.000		-	75.953.714.000
471	Kab. Sumba Tengah		59.271.547.000		-	59.271.547.000		59.271.547.000		-	59.271.547.000
472	Kab. Sumba Barat Daya		186.636.451.000		-	186.636.451.000		186.636.451.000		-	186.636.451.000
473	Kab. Manggarai Timur		160.856.109.000		-	160.856.109.000		160.856.109.000		-	160.856.109.000
474	Kab. Sabu Raijua		63.498.620.000		-	63.498.620.000		63.498.620.000		-	63.498.620.000
475	Kab. Manggarai Barat		127.893.447.000		-	127.893.447.000		127.893.447.000		-	127.893.447.000
476	Provinsi Maluku		-		18.250.000.000	18.250.000.000		-		9.125.000.000	9.125.000.000
477	Kab. Maluku Tenggara Barat		71.097.358.000		-	71.097.358.000		71.097.347.536		-	71.097.347.536
478	Kab. Maluku Tengah		150.561.589.000		26.250.000.000	176.811.589.000		149.892.385.623		26.250.000.000	176.142.385.623
479	Kab. Maluku Tenggara		131.874.165.000		37.750.000.000	169.624.165.000		131.874.165.000		37.750.000.000	169.624.165.000
480	Kab. Buru		65.863.399.000		26.250.000.000	92.113.399.000		65.863.399.000		26.250.000.000	92.113.399.000
481	Kota Ambon		30.779.402.000		-	30.779.402.000		30.779.402.000		-	30.779.402.000
482	Kab. Seram Bagian Barat		86.318.043.000		-	86.318.043.000		86.318.043.000		-	86.318.043.000
483	Kab. Seram Bagian Timur		140.065.596.000		-	140.065.596.000		140.065.596.000		-	140.065.596.000
484	Kab. Maluku Barat Daya		93.674.327.000		-	93.674.327.000		93.674.327.000		-	93.674.327.000
485	Kab. Buru Selatan		74.041.238.000		-	74.041.238.000		71.288.799.217		-	71.288.799.217
486	Kab. Kepulauan Aru		90.552.385.000		-	90.552.385.000		90.552.382.700		-	90.552.382.700
487	Kota Tual		28.659.645.000		-	28.659.645.000		28.659.645.000		-	28.659.645.000
488	Provinsi Maluku Utara		-		-	-		-		-	-
489	Kab. Halmahera Tengah		50.445.563.000		-	50.445.563.000		50.445.552.472		-	50.445.552.472
490	Kab. Halmahera Barat		116.654.285.000		-	116.654.285.000		116.654.285.000		-	116.654.285.000
491	Kota Ternate		-		16.750.000.000	16.750.000.000		-		16.750.000.000	16.750.000.000
492	Kab. Halmahera Timur		83.978.431.000		25.750.000.000	109.728.431.000		83.978.256.000		25.750.000.000	109.728.256.000
493	Kota Tidore Kepulauan		39.930.625.000		27.000.000.000	66.930.625.000		39.930.624.988		27.000.000.000	66.930.624.988
494	Kab. Kepulauan Sula		62.699.592.000		-	62.699.592.000		62.699.591.508		-	62.699.591.508
495	Kab. Pulau Morotai		65.910.753.000		-	65.910.753.000		65.910.752.589		-	65.910.752.589



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 497 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
496	Kab. Pulau Taliabu		54.510.776.000		-	54.510.776.000		54.510.775.800		-	54.510.775.800
497	Kab. Halmahera Selatan		171.935.114.000		28.250.000.000	200.185.114.000		171.935.113.200		28.250.000.000	200.185.113.200
498	Kab. Halmahera Utara		140.160.498.000		37.750.000.000	177.910.498.000		139.257.220.200		37.750.000.000	177.007.220.200
499	Provinsi Papua	8.020.854.115.000			-	8.020.854.115.000	8.020.854.115.000				8.020.854.115.000
500	Kab. Yalimo		209.824.398.000		-	209.824.398.000		209.824.398.000		-	209.824.398.000
501	Kab. Lanny Jaya		246.393.527.000		-	246.393.527.000		246.393.527.000		-	246.393.527.000
502	Kab. Biak Numfor		180.962.759.000		-	180.962.759.000		180.962.758.532		-	180.962.758.532
503	Kab. Jayapura		111.970.736.000		25.250.000.000	137.220.736.000		111.970.736.000		25.250.000.000	137.220.736.000
504	Kab. Jayawijaya		240.932.941.000		16.500.000.000	257.432.941.000		240.932.941.000		8.250.000.000	249.182.941.000
505	Kab. Merauke		182.467.383.000		18.500.000.000	200.967.383.000		182.467.383.000		18.500.000.000	200.967.383.000
506	Kab. Mimika		122.773.890.000		-	122.773.890.000		121.920.720.800		-	121.920.720.800
507	Kab. Nabire		76.884.837.000		-	76.884.837.000		76.528.379.028		-	76.528.379.028
508	Kab. Paniai		173.404.573.000		-	173.404.573.000		173.404.573.000		-	173.404.573.000
509	Kab. Puncak Jaya		243.549.531.000		-	243.549.531.000		243.549.531.000		-	243.549.531.000
510	Kab. Kepulauan Yapen		119.682.949.000		-	119.682.949.000		119.682.949.000		-	119.682.949.000
511	Kota Jayapura		18.465.060.000		8.500.000.000	26.965.060.000		18.465.060.000		8.500.000.000	26.965.060.000
512	Kab. Sarmi		83.866.011.000		-	83.866.011.000		83.866.011.000		-	83.866.011.000
513	Kab. Keerom		85.103.081.000		-	85.103.081.000		85.103.081.000		-	85.103.081.000
514	Kab. Yahukimo		357.953.032.000		-	357.953.032.000		357.953.032.000		-	357.953.032.000
515	Kab. Pegunungan Bintang		219.018.657.000		-	219.018.657.000		219.018.657.000		-	219.018.657.000
516	Kab. Tolikara		365.435.608.000		-	365.435.608.000		365.435.608.000		-	365.435.608.000
517	Kab. Boven Digoel		107.925.695.000		-	107.925.695.000		107.925.694.994		-	107.925.694.994
518	Kab. Mappi		135.265.105.000		-	135.265.105.000		135.265.105.000		-	135.265.105.000
519	Kab. Asmat		184.603.058.000		16.000.000.000	200.603.058.000		184.603.058.000		16.000.000.000	200.603.058.000
520	Kab. Waropen		83.950.063.000		-	83.950.063.000		83.950.063.000		-	83.950.063.000
521	Kab. Mamberamo Raya		73.626.016.000		-	73.626.016.000		72.393.326.000		-	72.393.326.000
522	Kab. Mamberamo Tengah		64.302.828.000		-	64.302.828.000		64.302.828.000		-	64.302.828.000
523	Kab. Nduga		177.338.214.000		-	177.338.214.000		177.338.214.000		-	177.338.214.000
524	Kab. Dogiyai		69.721.372.000		-	69.721.372.000		65.559.328.403		-	65.559.328.403



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 498 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2018 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
525	Kab. Intan Jaya		92.186.735.000		-	92.186.735.000		92.186.735.000			92.186.735.000
526	Kab. Puncak		166.578.832.000		-	166.578.832.000		166.578.831.974			166.578.831.974
527	Kab. Dayak		62.044.921.000		-	62.044.921.000		62.044.920.813			62.044.920.813
528	Kab. Supren		34.106.161.000		-	34.106.161.000		34.106.161.000			34.106.161.000
529	Provinsi Papua Barat	4.008.937.478.000	-		-	4.008.937.478.000	4.008.937.478.000	-			4.008.937.478.000
530	Kab. Sorong		169.164.934.000		8.000.000.000	177.164.934.000		169.164.934.000	8.000.000.000		177.164.934.000
531	Kab. Manokwan		122.819.328.000		-	122.819.328.000		122.819.327.200			122.819.327.200
532	Kab. Manokwan Selatan		50.765.671.000		-	50.765.671.000		50.765.671.000			50.765.671.000
533	Kab. Fak fak		114.404.235.000		-	114.404.235.000		114.404.235.000			114.404.235.000
534	Kota Sorong		-		-	-		-			-
535	Kab. Pegunungan Arfak		124.105.369.000		-	124.105.369.000		124.105.369.000			124.105.369.000
536	Kab. Sorong Selatan		90.956.708.000		-	90.956.708.000		90.956.708.000			90.956.708.000
537	Kab. Raja Ampat		90.332.849.000		8.750.000.000	99.082.849.000		90.332.849.000	4.375.000.000		94.707.849.000
538	Kab. Teluk Bintuni		95.889.728.000		43.750.000.000	139.639.728.000		95.889.609.400	43.750.000.000		139.639.609.400
539	Kab. Teluk Wondama		60.808.826.000		-	60.808.826.000		60.808.182.200			60.808.182.200
540	Kab. Tambrauw		156.933.803.000		-	156.933.803.000		156.933.803.000			156.933.803.000
541	Kab. Maybrat		176.533.271.000		-	176.533.271.000		176.533.271.000			176.533.271.000
542	Kab. Kaimana		77.811.539.000		-	77.811.539.000		77.811.539.000			77.811.539.000
	JUMLAH	20.059.583.186.000	60.000.000.000.000	1.000.000.000.000	8.500.000.000.000	89.559.583.186.000	20.059.583.186.000	59.859.408.609.275	1.000.000.000.000	8.230.750.000.000	89.149.741.795.275



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 499 -

**PERSETUJUAN KONTRAK
TAHUN JAMAK
31 DESEMBER 2018**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 500 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 4

**PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*)
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					Total sd 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	011	Kementerian Luar Negeri	78.136.003.000	186.606.735.000	179.531.152.000	172.208.630.000	164.586.281.000	781.379.371.202
2	012	Kementerian Pertahanan	510.814.970.000	105.560.000.000				616.726.153.930
3	015	Kementerian Keuangan	739.867.605.000	1.131.320.091.000	756.863.822.000	521.166.728.000	240.356.810.000	3.389.575.056.000
4	024	Kementerian Kesehatan	133.990.135.000	186.366.527.000				320.451.585.733
5	025	Kementerian Agama	439.009.981.000	171.516.651.000				610.680.901.158
6	022	Kementerian Perhubungan	9.751.172.814.000	3.376.298.507.000				13.127.471.321.000
7	033	Kementerian PU Pera	37.607.695.790.000	17.238.491.476.000	12.356.566.593.000	6.446.222.232.000		73.648.976.091.000
8	084	Badan Standardisasi Nasional	50.000.000.000					50.000.000.000
9	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	124.635.000.000	63.450.000.000				188.198.890.000
10	112	BP Batam	40.135.758.000					40.135.758.000
11	118	BP Sabang	81.721.000.000					81.721.000.000
Jumlah			49.557.179.056.000	22.459.609.987.000	13.292.961.567.000	7.139.597.590.000	404.943.091.000	92.855.316.128.024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 501 -

SALDO KAS DI REKENING KPPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 502 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	DJPB PUSAT		5.126.994.858.550	2.280.287.123.733
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	5.126.994.858.550	2.280.287.123.733
2	RPKBUN - PUSAT	902	0	0
	I. NAD			
3	BANDA ACEH	001	0	0
4	LANGSA	002	0	0
5	MEULABOH	003	0	0
6	TAPAK TUAN	074	0	0
7	LHOKSEUMAWE	089	0	-
8	KUTACANE	105	0	-
9	TAKENGON	122	0	-
	II. SUMATERA UTARA			
10	MEDAN I	004	0	-
11	PEMATANG SIANTAR	005	0	-
12	PADANG SIDEMPUAN	006	0	-
13	GUNUNG SITOLI	007	0	-
14	RANTAU PRAPAT	075	0	-
15	TANJUNG BALAI	076	0	-
16	SIBOLGA	106	0	-
17	SIDIKALANG	119	0	0
18	MEDAN II	123	0	0
19	TEBING TINGGI	124	0	-
20	BALIGE	125	0	-
	III. SUMATERA BARAT			
21	PADANG	010	0	-
22	BUKIT TINGGI	011	0	-
23	SIJUNJUNG	077	0	-
24	SOLOK	090	0	-
25	LUBUK SIKAPING	091	0	0
26	PAINAN	142	0	0
	IV. RIAU			
27	PEKANBARU	008	0	-
28	RENGAT	092	0	0
29	DUMAI	120	0	0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 503 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	V. JAMBI			
30	JAMBI	012	0	-
31	SUNGAI PENUH	013	0	0
32	MUARA BUNGO	078	0	0
33	KUALA TUNGKAL	143	0	0
34	BANGKO	159	0	0
	VI. SUMATERA SELATAN			
35	PALEMBANG	014	0	-
36	LUBUK LINGGAU	070	0	0
37	BATURAJA	109	0	-
38	LAHAT	144	0	0
39	SEKAYU	160	0	0
	VII. LAMPUNG			
40	BANDAR LAMPUNG	017	0	-
41	KOTABUMI	116	0	-
42	METRO	126	0	-
43	LIWA	145	0	0
	VIII. BENGKULU			
44	BENGKULU	016	0	0
45	MANNA	121	0	0
46	CURUP	146	0	0
47	MUKO MUKO	181	0	0
	IX. BANGKA BELITUNG			
48	PANGKAL PINANG	015	0	-
49	TANJUNG PANDAN	107	0	-
	X. BANTEN			
50	SERANG	020	0	-
51	TANGERANG	127	0	-
52	RANGKASBITUNG	161	0	-
	XI. DKI JAKARTA		782.358.523	1.790.445.550
53	JAKARTA I	018	0	0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 504 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
54	JAKARTA II	019	0	-
55	JAKARTA III	088	0	1.764.382.865
56	JAKARTA IV	133	0	-
57	JAKARTA V	139	0	-
58	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	782.358.523	26.062.685
59	JAKARTA VI	175	0	0
60	JAKARTA VII	182	0	0
	XII. JAWA BARAT			
61	PURWAKARTA	021	0	-
62	BANDUNG I	022	0	-
63	BOGOR	023	0	0
64	CIREBON	024	0	-
65	TASIKMALAYA	025	0	0
66	KARAWANG	086	0	0
67	SUMEDANG	087	0	0
68	BANDUNG II	095	0	-
69	GARUT	096	0	-
70	SUKABUMI	128	0	-
71	KUNINGAN	147	0	0
72	BEKASI	171	0	0
	XIII. JAWA TENGAH			
73	SEMARANG I	026	0	-
74	PURWOREJO	027	0	-
75	SURAKARTA	028	0	-
76	PURWOKERTO	029	0	-
77	PEKALONGAN	072	0	-
78	PATI	097	0	-
79	MAGELANG	115	0	-
80	TEGAL	118	0	-
81	KUDUS	129	0	-
82	CILACAP	130	0	-
83	SEMARANG II	134	0	0
84	KLATEN	148	0	0
85	SRAGEN	162	0	0
86	PURWODADI	163	0	-
87	BANJARNEGARA	164	0	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 505 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	XIV. DIY			
88	YOGYAKARTA	030	0	-
89	WONOSARI	149	0	-
90	WATES	176	0	-
	XV. JAWA TIMUR			
91	SURABAYA I	031	0	-
92	MALANG	032	0	-
93	MADIUN	033	0	-
94	KEDIRI	034	0	-
95	BONDOWOSO	035	0	0
96	PAMEKASAN	036	0	-
97	BOJONEGORO	073	0	-
98	MOJOKERTO	098	0	0
99	PACITAN	099	0	0
100	BANYUWANGI	100	0	-
101	JEMBER	131	0	-
102	SURABAYA II	135	0	0
103	BLITAR	150	0	-
104	SIDOARJO	165	0	-
105	TUBAN	166	0	-
	XVI. KALIMANTAN BARAT			
106	PONTIANAK	042	0	-
107	SINTANG	079	0	0
108	SINGKAWANG	093	0	-
109	KETAPANG	094	0	0
110	PUTUSSIBAU	117	0	0
111	SANGGAU	167	0	-
	XVII. KALIMANTAN TENGAH			
112	PALANGKARAYA	043	0	0
113	SAMPIT	044	0	0
114	BUNTOK	080	0	0
115	PANGKALAN BUN	102	0	0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 506 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
	XVIII. KALIMANTAN SELATAN			
116	BANJARMASIN	045	0	0
117	KOTABARU	081	0	0
118	BARABAI	110	0	0
119	TANJUNG	151	0	0
120	PELAIHARI	168	0	0
	XIX. KALIMANTAN TIMUR			
121	SAMARINDA	046	0	0
122	BALIKPAPAN	047	0	-
123	TARAKAN	048	0	-
124	NUNUKAN	152	0	0
125	TANJUNG REDEP	153	0	0
	XX. BALI			
126	DENPASAR	037	0	0
127	SINGARAJA	132	0	0
128	AMLAPURA	154	0	0
	XXI. NTB			
129	MATARAM	038	0	0
130	BIMA	071	0	0
131	SUMBAWA BESAR	101	0	0
132	SELONG	169	0	0
	XXII. NTT			
133	KUPANG	039	0	0
134	ENDE	040	0	0
135	WAINGAPU	041	0	0
136	RUTENG	111	0	0
137	ATAMBUA	172	0	0
138	LARANTUKA	174	0	0
	XXIII. SULAWESI SELATAN			
139	MAKASSAR I	054	0	0
140	WATAMPONE	055	0	0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 507 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
141	BANTAENG	056	0	0
142	PARE-PARE	057	0	0
143	PALOPO	058	0	0
144	MAKASAR II	136	0	0
145	BENTENG	155	0	0
146	MAKALE	170	0	0
147	SINJAI	177	0	0
	XXIV. SULAWESI TENGAH			
148	PALU	051	0	-
149	POSO	052	0	0
150	LUWUK	053	0	0
151	TOLI-TOLI	082	0	-
	XXV. SULAWESI TENGGARA			
152	KENDARI	060	0	-
153	BAU-BAU	103	0	-
154	KOLAKA	156	0	0
155	RAHA	157	0	0
	XXVI. GORONTALO			
156	GORONTALO	050	0	-
157	MARISA	180	0	0
	XXVII. SULAWESI UTARA			
158	MANADO	049	0	-
159	TAHUNA	083	0	0
160	KOTAMOBAGU	158	0	-
161	BITUNG	179	0	0
	XXVIII. MALUKU UTARA			
162	TERNATE	062	0	-
163	TOBELO	112	0	0
	XXIX. MALUKU			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 508 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
164	AMBON	061	0	-
165	TUAL	084	0	-
166	SAUMLAKI	104	0	0
167	MASOHI	173	0	0
	XXX. PAPUA			
168	JAYAPURA	063	0	-
169	BIAK	064	0	-
170	MERAUKE	068	0	-
171	NABIRE	085	0	0
172	WAMENA	113	0	0
173	SERUI	138	0	0
174	TIMIKA	141	0	0
	XXXI. KEPRI			
175	TANJUNG PINANG	009	0	-
176	BATAM	137	0	-
	XXXII. SULAWESI BARAT			
177	MAJENE	059	0	-
178	MAMUJU	178	0	0
	XXXIII. PAPUA BARAT			
179	MANOKWARI	065	0	-
180	SORONG	066	0	0
181	FAK-FAK	067	0	0
	JUMLAH KAS DI KPPN		5.127.777.217.073	2.282.077.569.283



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 509 -

KAS PADA KL DAN BUN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 510 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	BA BA	KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	4.394.113	-	-	7.991.268	267.468.248
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	-	-	-	43.223.870.642	4.198.123.779
4	005	MAHKAMAH AGUNG	273.808.265	41.343.500	172.019.680	61.309.801	83.330.667	247.141.999
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.437.588.539	830.414.895	49.747.260.089	1.648.312.460	64.023.781.991	76.537.993.226
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	5.134.682.240	6.281.732.577	-	-	43.346.258.768	44.553.108.684
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	143.743.791	143.514.400	4.030.950.000	2.318.750.000	1.129.504.310	9.338.053.629
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	166.373.082.924	119.867.022.901	17.634.868.167	20.772.633.298	49.597.819.355	37.031.523.542
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	513.621.500	13.502.999	-	-	86.891.991.725	38.241.570.044
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2.473.362.985	1.294.724.415	-	-	32.906.472.664	36.289.582.072
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.313.040.226	2.533.211.245	3.658.057.948	6.330.715.641	363.024.058.349	471.927.362.187
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	348.601.261	6.915.057.587	1.400.000	651.711.457	16.728.092.179	31.942.760.365
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	487.542.376	70.859.339	-	25.520.000	17.974.532	141.006.450
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	37.944.493	-	26.462.561	3.305.418.786	3.337.319.164
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.703.397.121	7.929.652.381	1.381.754.969	1.241.057.661	37.072.720.984	27.484.286.145
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8.424.255.920	17.803.152.339	325.000	75.537.000	222.407.919.463	54.112.301.810
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.659.565.736	1.320.666.799	849.108.715	218.677.700	173.145.297.853	574.442.183.969
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.097.762.414	2.694.462.913	813.089.991	44.176.550	69.233.159.758	60.147.935.567
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	38.350.000	714.208.315	500	5.000.000	433.310.701	89.419.780
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	211.191.900	85.430.900	992.366.000	-	391.775.845.227	335.962.866.982
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	433.086.289	1.040.061.029	498.020.500	1.636.578.500	58.433.019.192	43.939.120.401
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	997.164.079	546.762.090	81.252.337	41.669.445	4.153.747.344	8.905.907.153
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	89.433.535	162.261.960	-	-	39.139.679	36.257.424.764
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	58.450.000	-	-	-	2.245.494.963	2.413.819.878
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	4.861.000	-	-	756.122.835	951.029.083
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	185.843.797	138.770.095	-	-	204.488.113	231.503.520



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 511 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	BA BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	30.996.559	10.000	-	249.085.262	-	369.334.760
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.120.995.548	3.001.316.341	6.790.646.185	66.556.092.999	1.281.396.850.338	790.575.624.052
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	45.651.150	-	-	5.214.488.215	4.219.142.469
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	4.412.887.953	-	-	2.123.408.012	1.986.463.595
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	95.000	1.027.500	-	-	46.512.282	80.853.400
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	178.812.587	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	63.448	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	262.099.491	4.879.223.807	80.000	10.000.000	8.573.176.162	8.004.257.733
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	205.713.244	659.923.772	-	-	26.811.835.914	542.920.796.056
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	25.043.881	122.832.777	-	-	20.185.135.659	1.265.975.848
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	13.720.600	420.000	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	160.430.233	74.714.000	-	2.883.172	212.857.027	11.940.000
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	122.930.729	716.375.997	1.527.976.500	1.376.826.300	126.473.628.235	741.201.340.537
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	326.927.000	-	-	-	6.811.810
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	472.469.831	284.499.790	-	-	1.519.541.000	4.242.465.945
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	909.613	112.621.575	-	-	13.366.623.268	424.887.604
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	16.831.000	18.938.471	-	-	-	1.182.986
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	71.065.068	-	-	301.703.933	1.255.196.936
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	6.249.325.250	1.696.322.621
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	-	-	1.375.000	250.000	170.000	230.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	12.199.147.128	3.385.459.380	-	-	20.645.677.672	2.736.090.651.979
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	-	150.729.965	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 512 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	BA BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.394.382	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	7.616.396	361.996.100	455.548.400	1.809.135.278	403.239.846
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	668.429.983	603.658.983	-	-	548.841.411	332.409.648
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.221.303	124.314.478	894.941.252	894.027.094	2.883.687.144	1.541.139.025
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	88.731.703	4.127.708	-	-	32.025.846	22.830.018
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	3.535.317	387.465.154	38.386.320
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	10.564.192	8.344.850
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	33.049.600	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	5.038.000	-	-	160.675.524	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	45.644.000
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	9.242.309.176	8.685.477.847	2.833.954.982	15.655.000	2.465.438.568	3.032.043.224
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	354.442.744	646.841.213	-	-	13.575.289.272	8.522.072.979
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	500.000.000	299.227.500	852.463	-	13.274.181.027	27.947.696.290
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.244.617.605	2.783.677.454	-	-	7.142.305.426	8.259.964.507
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	6.448.280	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	265.088.934.982	34.683.033.156
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	150.000.000	-	-	-	-	33.455.722
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	-	42.031	-	-	9.840	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	110.291.608
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	3.661.000	-	-	465.454.036	421.963.906



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 513 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 6

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	BA BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2018 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	105.945.287.155	121.049.516.851
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	55.078.000	114.322.000	-	-	2.247.800.333	1.746.404.351
80	114	SEKRETARIAT KABINET	6.650.017.080	1.688.396.606	-	-	2.528.755.745	903.253.008
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	54.650.444.304	6.630.389.917	-	-	30.423.399.232	730.131.317.730
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	191.778.834	32.313.100	8.500.000	-	304.983.823	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.700.000	80.892.500	-	1.076.397.138	223.138.219	4.022.885.752
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	3.052.000	22.343.100
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	2.041.278	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
PENYESUAIAN (Reklasifikasi Dana Kelolaan BLU)							(722.521.164.344)	3.687.119.773
JUMLAH KAS PADA K/L			284.832.122.869	210.331.016.647	92.280.796.378	105.738.412.756	2.904.645.056.288	7.680.309.646.436
JUMLAH KAS PADA SATKER BUN			318.150.600	497.147.493	-	-	734.083.631.611	22.643.658
JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN			285.150.273.469	210.828.164.140	92.280.796.378	105.738.412.756	3.638.728.687.899	7.680.332.290.094



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 514 -

**BELANJA DIBAYAR DI
MUKA, UANG MUKA
BELANJA, DAN
PENDAPATAN YANG
MASIH HARUS DITERIMA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 515 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	8.081.642.144	357.453.807	-	-	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.047.125.304	1.095.671.281	-	-	-	-
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12.244.268.080	-	-	-	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	18.806.044.829	18.821.994.720	-	-	15.799.083	334.080.000
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	46.339.409.828	70.423.287.306	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	10.281.967.652.641	1.541.545.722.838	5.825.359.174.425	10.838.536.884.561	-	11.138.314.702
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11.586.621.509	14.616.502.667	-	75.516.187.188	6.258.866	24.546.979
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	403.999.653.767	436.912.535.114	3.191.963.782	3.251.678.938	547.460.256.932	265.793.509.448
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.199.940.494.192	1.183.182.121	-	-	39.400.000	798.368.000
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	1.683.139.314	1.444.469.000
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	609.884.111	13.691.034.387	65.712.600	-	-	2.318.605
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	13.232.318.730	12.247.000	-	-	656.668.774	199.145.435.459
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	746.624.152.037	2.781.927.171.918	3.239.072.280	-	1.276.144.200	1.006.223.020
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	57.881.942.877	90.593.929.623	-	9.566.508.000	514.275.732	627.111.298
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	110.961.057.652	334.252.428	2.863.054.200	-	453.533.788	10.585.069.823
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	621.810.720	457.050.000
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	508.490.858	5.000.000	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	20.715.982.899	3.097.413.072	-	-	6.007.500	867.518.093
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.538.743.092	1.813.676.034	-	-	559.083.651	205.943.307
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.392.000.000	6.657.558.999	8.035.327.500	-	12.469.580.396	3.308.414.845



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 516 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	461.096.315	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	58.236.633	133.478.544	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	9.633.438.059	11.678.383.948	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	481.258.001	2.302.234.817	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	4.690.204.581	10.661.747.689	152.800.298	1.958.017.187	26.684.078.461	12.744.529.763
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	415.762.001	575.437.390	-	-	(1.768.108.828)	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	182.011.382	-	-	-
33	050	BADAN INTELJEN NEGARA	225.026.073.712	107.641.492.716	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.616.040.032	1.390.969.539	-	-	11.190.198	16.827.080
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	28.553.827.881	38.698.322.327	-	-	224.200	110.173.600
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	389.100.033	366.399.131	-	-	17.586.730	-
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.710.114.042	1.904.139.050	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	207.086.265	19.044.986.376	-	-	-	2.000.000
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	167.323.892.899	18.446.256.104	1.494.519.431.842	232.068.191.536	19.080.548	55.568.712
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	14.190.671.821	816.965.199	-	-	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	79.530.000	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	49.500.000	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.234.307.331	869.160.353	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 517 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-	-	1.863.514
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	927.000	1.821.500	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.000.000	3.000.000	-	-	13.557.888.534	23.727.143.345
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	25.449.832.216	2.966.488.111	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	99.467.503	7.095.059	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.783.708.900	1.792.897.141	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	155.833.333	115.500.000	-	-	88.405.911	359.821.880
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	153.609.000	136.205.666	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	37.950.000	42.166.664	-	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	-	556.499.787	87.258.983
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	82.848.542	-	13.793.480.760	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	6.650.000	19.950.000	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.211.250.276	1.296.695.876	-	-	15.440.600	21.762.859
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	7.423.010.101	11.565.716.696	-	56.875.000	21.816.188	791.880.736
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	177.468.835.532	5.123.314.000	29.731.456.507	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	2.209.379.781	1.299.149.210	-	-	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.052.169.757	1.704.255.477	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	340.575.001	442.033.463	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 518 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			<i>AUDITED</i>	<i>AUDITED</i>	<i>AUDITED</i>	<i>AUDITED</i>	<i>AUDITED</i>	<i>AUDITED</i>
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.848.213.548.984	486.181.132.504	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	529.976.513	644.147.062	-	-	-	-
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	259.589.052	314.677.984	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	882.592.499	717.308.000	-	-	-	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	497.751.375	951.377.875	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	3.113.505.376	3.120.991.906	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	12.350.000	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	27.818.764.946	28.046.814.084
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	5.976.000	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	249.816.402.819	64.607.256.433	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	-	-	294.034.000	320.409.000	22.946.250	152.310.000
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	60.412	97.774.871	-	22.054.746.964	4.339.517.000	15.010.768.716
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	3.466.610	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	106.203.147.477	87.257.669.877	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	3.084.017.500	4.185.855.852	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			23.667.667.801.256	6.045.121.028.182	7.356.819.377.069	11.213.060.954.881	637.147.289.481	576.867.095.851
88	999.01	PENGLOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGLOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 519 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 7

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2016
			AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	1.750.000.084	3.453.385.539	-	-	-	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	135.664.283	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BA BUN			1.750.000.084	3.589.049.822	-	-	-	-
TOTAL			23.669.417.801.342	6.048.710.078.004	7.356.819.377.069	11.213.060.954.881	637.147.289.481	576.867.095.851



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 520 -

PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 521 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 8.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.179.013.937.280
115122	Piutang PPh Pasal 22	513.491.595.695
115123	PPh Pasal 22 Impor	56.267.402.423
115124	Piutang PPh Pasal 23	1.274.118.662.166
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.583.276.185.064
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	16.109.153.823.702
115127	Piutang PPh Pasal 26	1.692.189.385.192
115128	Piutang PPh Final	1.818.771.827.092
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	23.743.183.930.888
115132	PPN Impor	317.942.525.280
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	504.887.065.463
115142	PPnBM Impor	2.051.369.198
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.302.383.004.670
115154	Piutang PBB Kehutanan	611.275.366.842
115155	Piutang PBB Pertambangan	6.033.394.958.747
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	21.618.657.418
115161	Cukai Hasil Tembakau	8.869.155.688.606
115162	Cukai Etil Alkohol	12.120.000
115163	Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.098.196.600
115164	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	28.458.154.707
115169	Pendapatan Cukai Lainnya	12.667.767.967
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.025.634.020
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	6.594.205.443.940
115174	Bunga Penagihan PPN	794.282.304
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.914.538.121.192
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	193.213.126.394
115181	Bea masuk	1.076.661.519.002
115183	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	2.083.214.902.034
115184	Pendapatan Pabean Lainnya	372.162.006.946
115185	Pajak/Pungutan Ekspor	482.125.830.727
115186	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	16.065.266.082
115187	Pendapatan Bunga Bea Keluar	536.564.390
115191	Bea Masuk Andidumping	61.483.362.000
115193	Bea Masuk Tindakan Pengamanan	3.617.543.000
Jumlah Piutang Pajak		81.477.055.227.031
116112	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(15.608.454.939.722)
116113	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(12.910.651.974.419)
116114	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	(452.316.382.119)
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.811.730)
116116	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Cukai dan Bea Meterai	(157.090.888.152)
116117	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(9.561.022.375.801)
116118	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.105.488.495.412)
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(44.487.442.867.354)
Jumlah Piutang Pajak Netto		36.989.612.359.677



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 522 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 8.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)

A. PIUTANG PAJAK

Kode Akun	Nama Akun	s.d 1 th	1 s.d 2 thn	2 s.d. 3 thn	3 sd 4 thn	4 sd 5 thn	dias 5 th	JUMLAH
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.080.540.080.479	2.895.854.841.741	2.010.181.854.415	148.842.177.991	9.628.877.858	449.157.611.453	6.594.205.443.937
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	474.643.029.343	2.875.424.875.691	1.459.610.315.773	62.605.091.978	20.151.946.267	22.102.862.140	4.914.538.121.192
115175	Piutang Bunga Penagihan PPhBM	28.074.826.814	49.016.964.745	59.245.826.216	56.428.325.682	-	447.182.937	193.213.126.394
115154	Piutang PBB Kehutanan	207.635.950.688	107.579.175.222	94.156.820.685	90.508.276.732	51.536.505.831	59.858.637.684	611.275.366.842
115153	Piutang BB Perkebunan	527.831.074.037	171.886.216.340	183.511.051.028	171.412.171.563	159.947.865.124	87.794.626.578	1.302.383.004.670
115155	Piutang PBB Pertambangan	2.221.500.975.010	403.763.336.770	544.337.881.644	1.098.247.149.405	351.158.568.692	1.414.387.047.227	6.033.394.958.748
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	10.420.812.684	2.025.795.171	6.695.913.504	2.476.136.059	-	-	21.618.657.418
115121	Piutang PPh Psl. 21	442.797.162.841	209.550.476.948	124.835.877.894	128.883.034.367	98.709.543.051	174.237.842.184	1.179.013.937.285
115122	Piutang PPh Psl. 22	67.341.920.022	10.485.897.489	2.583.984.710	6.292.581.855	5.199.743.111	421.587.468.508	513.491.595.695
115124	Piutang PPh Psl. 23	427.725.860.874	115.067.041.116	104.569.364.445	111.487.605.700	140.419.276.337	374.849.513.691	1.274.118.662.163
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	3.632.261.544.934	2.641.233.262.622	2.706.150.308.618	1.718.199.267.662	1.288.704.344.884	4.122.605.095.003	16.109.153.823.723
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	444.723.459.965	208.093.102.767	163.878.354.466	322.937.817.230	172.576.669.096	271.066.781.541	1.583.276.185.065
115127	Piutang PPh Psl. 26	402.550.218.186	44.190.288.737	99.773.990.653	708.952.475.108	96.037.405.572	340.685.006.936	1.692.189.385.192
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	1.002.697.280.331	278.761.678.359	146.662.088.365	151.441.418.068	174.009.156.312	65.200.205.646	1.818.771.827.081
115131	Piutang PPN	9.005.647.665.974	3.678.593.702.313	2.103.445.901.963	2.216.740.633.823	2.127.934.042.025	4.610.821.984.793	23.743.183.930.891
115141	Piutang PPh BM	56.079.979.507	1.244.368.167	6.801.303.365	223.860.195.407	2.782.803.469	214.118.415.548	504.887.065.463
115172	Piutang PTLL	1.965.556.020	-	60.078.000	-	-	-	2.025.634.020
	Jumlah	20.034.437.397.709	13.692.771.024.198	9.816.500.915.744	7.219.314.358.630	4.698.796.747.629	12.628.920.281.869	68.090.740.725.779



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 523 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 8.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PERPAJAKAN BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)

B. PIUTANG BEA DAN CUKAI

Kode Akun	Nama Akun	s.d 1 th	1 s.d 2 thn	2 s.d. 3 thn	di atas 3 thn	JUMLAH
115181	Piutang Bea Masuk	315.030.034.889	23.838.810.476	11.914.412.000	725.878.261.638	1.076.661.519.002
115191	Piutang Bea Masuk Antri Dumping	38.524.987.000	-	-	22.958.375.000	61.483.362.000
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.482.431.000	2.135.112.000	-	-	3.617.543.000
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	233.103.852.975	28.973.440.000	2.816.953.000	1.818.320.656.059	2.083.214.902.034
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	21.484.040.975	1.610.850.760	660.214.000	348.406.901.210	372.162.006.945
115185	Piutang Pungutan ekspor	328.280.567.944	185.078.026	523.640	153.659.661.117	482.125.830.727
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	28.267.000	-	-	16.036.999.081	16.065.266.082
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	3.703.000	84.000	532.777.390	536.564.390
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	8.798.112.540.440	1.063.360.000	-	69.979.788.166	8.869.155.688.606
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	12.120.000	-	-	-	12.120.000
115163	Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	3.098.196.600	3.098.196.600
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	1.023.511.000	20.000.000	-	27.414.643.707	28.458.154.707
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	183.891.200	285.127.600	2.160.000	12.196.589.167	12.667.767.967
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	30.387.995.777	2.444.185.872	879.022.000	22.556.198.773	56.267.402.423
115142	Piutang PPnBM Impor	198.000	-	-	2.051.171.198	2.051.369.198
115132	Piutang PPN Impor	213.114.100.573	6.460.668.782	5.543.185.000	92.824.570.925	317.942.525.280
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	311.607.000	10.982.000	-	471.693.304	794.282.304
	Jumlah	9.981.080.145.773	67.031.318.516	21.816.553.640	3.316.386.483.337	13.386.314.501.266

JUMLAH PIUTANG PAJAK, BEA DAN CUKAI (A + B)	81.477.055.227.045
Penyesuaian Berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang LK BA 015	(14)
JUMLAH PIUTANG PERPAJAKAN & BEA CUKAI	81.477.055.227.031



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 524 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 8.C

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

1. Direktorat Jenderal Pajak						(dalam Rupiah)
Akun	Jenis Pajak	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
115173	Bunga Penagihan PPh	397.425.607	60.898.381.678	504.413.767.813	4.896.625.621.989	5.462.335.197.087
115174	Bunga Penagihan PPN	359.316.555	56.092.307.245	385.918.334.822	3.508.941.237.865	3.951.311.196.487
115175	Bunga Penagihan PPnBM	26.554.257	2.311.342.125	20.673.038.295	123.442.777.143	146.453.711.820
115154	PBB Kehutanan	1.038.179.752	20.173.599.596	71.022.391.294	59.858.637.684	152.092.808.326
115153	PBB Perkebunan	2.637.185.800	35.407.936.955	165.680.018.379	87.794.626.578	291.519.767.712
115155	PBB Pertambangan	11.107.504.878	94.628.415.223	724.702.859.078	1.416.204.113.522	2.246.642.892.701
115159	PBB Sektor Lainnya	52.104.063	872.170.875	1.238.068.033		2.162.342.971
115121	PPh PsI. 21	1.003.904.699	26.832.106.065	121.065.345.127	467.197.913.427	616.099.269.318
115122	PPh PsI. 22	165.141.622	2.731.706.422	9.812.438.618	433.520.592.764	446.229.879.426
115124	PPh PsI. 23	1.184.431.678	15.378.726.341	96.325.111.926	690.331.218.187	803.219.488.132
115125	PPh PsI. 25 Badan	6.692.502.158	205.871.462.640	2.199.091.291.784	8.289.200.352.712	10.700.855.609.294
115126	PPh PsI. 25 OP	924.908.874	26.868.094.948	123.654.901.726	882.139.130.734	1.033.587.036.282
115127	PPh PsI. 26	1.254.457.733	14.108.422.635	53.364.306.285	1.193.482.740.266	1.262.209.926.919
115128	PPh PsI.4 Ayat (2)	1.777.199.249	63.197.985.142	172.868.789.872	484.616.741.956	722.460.716.219
115131	PPN	17.517.523.790	568.105.754.233	2.301.938.532.913	9.923.213.149.560	12.810.774.960.496
115141	PPn BM	237.888.675	319.189.306	4.409.305.426	445.298.826.524	450.265.209.931
115172	PTLL	46.800	146.674.002	248.334.000	52.866.000	447.920.802
	Grand Total	46.376.276.190	1.193.944.275.431	6.956.426.835.391	32.901.920.546.911	41.098.667.933.923



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 525 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 8.C

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)**

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Akun	Uraian	s.d 1 th	1-2 th	2-3 th	diatas 3 th	Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
115181	Piutang Bea Masuk	1.571.733.641	2.374.888.548	4.989.959.000	728.556.128.696	737.492.709.885
115191	Piutang Bea Masuk Anti Dumping	192.624.935	-	-	22.958.375.000	23.150.999.935
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	7.412.155	213.511.200	-	-	220.923.355
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.165.005.595	2.897.344.000	1.383.476.500	1.818.110.407.677	1.823.556.233.772
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	107.362.954	160.905.176	313.559.500	348.445.268.230	349.027.095.860
115185	Piutang Pungutan ekspor	1.641.402.840	2.160.903	-	153.823.653.757	155.467.217.499
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	141.335	-	-	16.036.999.081	16.037.140.416
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	43.300	-	536.131.390	536.174.690
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	43.990.562.702	106.336.000	-	69.979.788.166	114.076.686.868
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	60.600	-	-	-	60.600
115163	Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	3.098.196.600	3.098.196.600
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	4.767.555	-	-	27.504.643.707	27.509.411.262
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	54.695	27.816.760	-	12.378.661.367	12.406.532.822
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	151.745.197	244.418.587	77.327.000	23.319.523.319	23.793.014.104
115142	Piutang PPhBM Impor	990	-	-	2.051.171.198	2.051.172.188
115132	Piutang PPN Impor	1.065.055.934	646.066.878	304.779.000	97.861.112.111	99.877.013.923
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.558.034	1.098.200	-	471.693.304	474.349.539
		49.899.489.163	6.674.589.552	7.069.101.000	3.325.131.753.603	3.388.774.933.317



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 526 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 8.D

**PIUTANG PAJAK DALUARSA
PER 31 DESEMBER 2018 (*Audited*)
(dalam ribuan rupiah)**

Kode Akun	Nama Akun	DALUARSA
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.979.152.867.319
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	1.386.274.519.962
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	6.072.574.178
115154	Piutang PBB Kehutanan	217.840.784.822
115153	Piutang PBB Perkebunan	194.284.410.409
115155	Piutang PBB Pertambangan	4.886.102.453.558
115159	PBB Sektor Lainnya	-
115121	Piutang PPh Pasal 21	477.478.783.157
115122	Piutang PPh Pasal 22	32.819.090.366
115124	Piutang PPh Pasal 23	548.923.318.695
115125	Piutang PPh Pasal 25 Badan	6.192.327.443.680
115126	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	685.306.722.705
115127	Piutang PPh Pasal 26	353.277.160.761
115128	Piutang PPh Final	324.113.343.842
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	6.190.664.770.095
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	71.088.938.090
115172	Piutang PTL	4.618.450
	Jumlah	23.545.731.800.089



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 527 -

PIUTANG BUKAN PAJAK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 528 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	170.026.803	(850.135)	169.176.668	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	600.181.033	(15.375.905)	584.805.128	493.439.437	(24.890.698)	468.548.739
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	616.722.457	(79.594.140)	537.128.317	3.626.968.686	(25.439.867)	3.601.528.819
4	005	MAHKAMAH AGUNG	918.553.121	(4.592.765)	913.960.356	902.540.921	(4.512.704)	898.028.217
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	17.658.347.583.931	(11.389.499.015.869)	6.268.848.568.062	17.207.138.324.097	(11.232.408.079.064)	5.974.730.245.033
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	9.834.118	(49.170)	9.784.948
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	33.844.804.945	(4.905.287.529)	28.939.517.416	37.112.398.138	(1.081.373.246)	36.031.024.892
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	51.407.086.714	(257.614.420)	51.149.472.294	48.238.263.965	(241.191.323)	47.997.072.642
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	456.088.556.143	(32.578.121.269)	423.510.434.874	464.652.140.360	(35.088.135.064)	429.564.005.296
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	386.127.641.921	(347.983.315.237)	38.144.326.684	389.792.042.282	(359.843.265.606)	29.948.776.676
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	106.065.442.231	(45.572.869.279)	60.492.572.952	55.583.122.513	(45.673.329.718)	9.909.792.795
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	101.880.036.002	(2.408.637.087)	99.471.398.915	1.308.819.636	(312.781.522)	996.038.114
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	56.789.334.387	(27.054.979.774)	29.734.354.613	55.259.785.609	(27.567.081.593)	27.692.704.016
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.659.967.368.426	(13.715.443.026.585)	944.524.341.841	11.795.354.469.701	(10.099.483.949.336)	1.695.870.520.365
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	847.089.111.102	(266.148.929.509)	580.940.181.593	274.210.888.813	(22.455.062.296)	251.755.826.517



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 529 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.150.450.806	(10.752.255)	2.139.698.551	323.373.693	(44.882.550)	278.491.143
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.317.031.629	(3.417.159.202)	26.899.872.427	41.694.452.251	(5.475.319.552)	36.219.132.699
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	16.032.073.364	(2.421.177.379)	13.610.895.985	10.598.392.702	(2.630.248.439)	7.968.144.263
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	120.649.943	(603.250)	120.046.693	70.357.193	(351.786)	70.005.407
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	343.275.773	(1.716.386)	341.559.387	336.267.961	(157.491.481)	178.776.480
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.999.519.410.852	(3.636.250.700.963)	363.268.709.889	3.604.825.051.714	(3.208.649.715.591)	396.175.336.123
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	57.096.652.401	(19.683.633.005)	37.413.019.396	55.776.488.794	(19.647.685.249)	36.128.803.545
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	393.573.107.028	(34.881.416.800)	358.691.690.228	174.387.359.767	(33.768.081.146)	140.619.278.621
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	184.217.101	(921.084)	183.296.017	694.956.249	(3.474.780)	691.481.469
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	449.026.084	(2.245.132)	446.780.952	129.505.616	(647.529)	128.858.087
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	25.289.572.755	(126.447.863)	25.163.124.892	31.562.247.418	(157.811.237)	31.404.436.181
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.879.053.586	(444.927.415)	3.434.126.171	3.016.921.085	(440.616.754)	2.576.304.331
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	119.788.093.963	(64.042.573.002)	55.745.520.961	166.409.433.378	(101.845.812.986)	64.563.620.392
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	97.892.269.367	(97.393.704.417)	498.564.950	91.764.183.638	(89.845.174.398)	1.919.009.240



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 530 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	241.323.805	-	241.323.805	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	834.372.539	(4.171.863)	830.200.676	19.954.100	(99.771)	19.854.329
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	1.145.882.259	(5.729.410)	1.140.152.849
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	2.018.000	(10.090)	2.007.910
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.621.948.090	(57.584.671)	2.564.363.419	1.946.347.573	(81.560.901)	1.864.786.672
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	3.516.480	(17.582)	3.498.898	154.281.400	-	154.281.400
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.065.256.942	(2.543.903.682)	521.353.260	4.073.366.909	(2.550.287.482)	1.523.079.427
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.323.688.942.817	(2.198.455.907.576)	125.233.035.241	2.405.493.494.580	(2.175.923.549.755)	229.569.944.825
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.752.094.238	(59.576.595)	6.692.517.643	44.254.772.350	(247.089.986)	44.007.682.364
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.746.515.029	(13.732.576)	2.732.782.453	377.604.756	(1.888.024)	375.716.732
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	71.735.340	(358.676)	71.376.664	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	29.563.380	-	29.563.380	38.406.235	(192.031)	38.214.204
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	287.628.443	(1.438.145)	286.190.298	14.135.582.951	(175.617.083)	13.959.965.868



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 531 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	14.895.514	(74.477)	14.821.037	964.895.514	(4.824.477)	960.071.037
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	12.218.691.442	(61.133.287)	12.157.558.155	7.958.019.645	(39.646.723)	7.918.372.922
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	425.000	(2.125)	422.875	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	40.350.361.621	(201.751.809)	40.148.609.812	2.808.079.592	(14.040.399)	2.794.039.193
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	236.837.860	(1.184.189)	235.653.671	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	4.879.096.474	(1.747.572.299)	3.131.524.175	5.864.453.726	(2.818.851.034)	3.045.602.692
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4.362.560.602	(1.812.098.394)	2.550.462.208	3.385.333.470	(1.807.212.254)	1.578.121.216
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	35.100.915.315	(29.888.966.967)	5.211.948.348	53.303.623.314	(49.226.404.090)	4.077.219.224
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	108.908.698	(544.543)	108.364.155	8.767.698.427	(43.838.495)	8.723.859.932
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.585.146.089	(153.885.795)	1.431.260.294	2.512.459.030	(42.474.833)	2.469.984.197
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.101.085.944	(21.681.407)	1.079.404.537	1.809.585.944	(9.047.930)	1.800.538.014
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	26.040.828	(130.204)	25.910.624	58.468.470	(292.343)	58.176.127
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	485.956.341	(2.429.782)	483.526.559	158.216.952	(791.085)	157.425.867



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 532 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.194.544.373	(313.662.276)	880.882.097	706.503.121	(307.953.706)	398.549.415
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	10.034.043.078	(171.690.419)	9.862.352.659	22.535.809.851	(231.443.690)	22.304.366.161
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	30.406.745	(152.034)	30.254.711	303.002.210	(1.515.011)	301.487.199
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	576.147.537.379	(10.677.075.615)	565.470.461.764	523.774.435.781	(17.036.892.655)	506.737.543.126
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	225.846.455	(1.129.232)	224.717.223	105.479.044	(527.395)	104.951.649
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	114.048.605	(570.243)	113.478.362	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-	2.573.110.780	(2.562.196.346)	10.914.434
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	306.213.128	(296.573.750)	9.639.378
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	101.308.655	(506.544)	100.802.111	81.797.154	(408.986)	81.388.168
73	107	BADAN SAR NASIONAL	30.341.969.149	(27.167.783.497)	3.174.185.652	28.928.600.000	(27.322.670.000)	1.605.930.000
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	162.347.404.463	(152.173.372.020)	10.174.032.443	159.528.084.343	(145.344.844.188)	14.183.240.155
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	646.249.000	(3.231.245)	643.017.755	549.388.956	(2.746.944)	546.642.012



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 533 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 9

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (A UDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	37.014.633	(185.073)	36.829.560	119.447.063	(597.235)	118.849.828
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.966.135.668	-	1.966.135.668	2.031.729.289	-	2.031.729.289
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	6.990.000	(34.950)	6.955.050
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	1.019.999.998	-	1.019.999.998
81	115	BADAN PENGAWAS PEMLU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.051.472.500	(1.166.621.888)	884.850.612	3.369.035.985	(1.134.557.081)	2.234.478.904
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	101.396.470.471	(89.403.169.333)	11.993.301.138	123.983.091.557	(84.078.585.153)	39.904.506.404
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.768.746.963	(1.523.968.203)	244.778.760	1.213.035.410	(11.992.724)	1.201.042.686
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	545.277.384	(2.726.387)	542.550.997	1.281.793.530	(4.034.298)	1.277.759.232
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	73.474.787	(367.374)	73.107.413
JUMLAH PADA K/L			42.436.309.628.220	(32.208.264.178.309)	10.228.045.449.911	37.946.995.596.919	(27.798.207.844.367)	10.148.787.752.552
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	133.806.951.655.973	(93.997.385.751.924)	39.809.565.904.049	120.673.577.411.630	(99.456.395.011.878)	21.217.182.399.752
TOTAL			176.243.261.284.193	(126.205.649.930.233)	50.037.611.353.960	158.620.573.008.549	(127.254.602.856.245)	31.365.970.152.304



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 534 -

RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 535 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 10

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2018

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.00000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018
			Pengembalian Tahun 2017	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018			
1	2		15	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6		8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan							
1	PT. Bank Anrico	07 Juni 2007	8.150.345,00	62.432.303.026,78	324.604.591,00	72.289.864.957,85	140.797.811.123,91	137.790.863.417,88
2	PT. Bank Guna Internasional	08 Maret 2007	173.803.487,00	53.693.721.137,21	1.012.429.346,00	238.261.158.483,21	106.107.201.031,41	12.793.849.516,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	08 Maret 2007	382.021.799,00	105.445.778.465,52	271.508.051,00	691.445.343.015,52	136.297.409.195,04	3.174.736.969.836,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	08 Maret 2007	527.736.991,00	8.939.838.669,00	9.090.909,00	34.047.118.415,19	172.736.782.621,00	167.755.048.520,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	08 Maret 2007	523.820.349,00	52.269.852.048,83	18.181.818,00	99.160.235.937,83	157.450.001.984,00	102.652.378.353,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	08 Maret 2007	0,00	9.507.058.537,00	0,00	40.693.058.537,00	6.760.484.884,70	296.070.151.329,98
7	PT. Bank Pasific	08 Maret 2007	291.480.270,00	276.328.490.911,96	10.306.543.092,00	618.658.110.271,76	1.638.279.007.000,00	1.514.708.324.567,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	08 Maret 2007	2.068.322.313,00	366.250.312.955,15	7.724.410.996,00	1.231.361.941.344,80	1.015.640.110.944,00	455.987.574.027,73
9	PT. South East Asia Bank	08 Maret 2007	0,00	97.482.364.439,79	0,00	196.785.083.820,68	181.953.841.474,06	702.613.939.485,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	17 Januari 2008	370.997.961,00	28.025.558.872,00	0,00	34.995.693.472,00	114.546.599.155,04	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	31 Maret 2008	2.036.818.273,00	69.792.196.192,42	13.074.954.600,00	214.816.754.392,42	56.733.811.676,21	364.101.506.306,35
12	PT. Bank Pinaesaan	05 Maret 2008	498.784.053,00	46.854.867.581,52	283.417.291,00	65.594.964.972,63	92.182.282.117,24	615.489.525.946,95
13	PT. Bank Jakarta	Belum BAST	0,00	90.034.069.938,00	0,00	210.993.999.999,67	81.323.394.608**	0,00
14	PT. Bank Industri	Sudah BAST	39.484.546,00	83.326.130.673,00	731.691.677,00	363.181.822.350,00	238.376.301.422,00	148.288.406.976,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	TL Bubar Sebelum BAST	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan		6.921.420.387,00	1.350.382.543.448,18	33.756.832.371,00	4.114.785.149.970,56	4.057.861.644.628,61	7.774.153.631.587,39



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 536 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 10

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2018

No.	ASAL BANK BDL	Tanggal BAST Aset	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2018	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan Laporan)	Saldo Hak Tagih 31 Desember 2018
			Pengembalian Tahun 2017	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2017	Pengembalian Periode Tahun 2018			
1	2		15	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 · 7	
	BDL eks Dana Penjaminan							
1	PT Bank Asiatc		2.678.511.707,00	83.700.289.552,00	685.569.126,00	89.385.858.678,00	797.193.365.765,83	
2	PT Bank Dagang Bali		73.707.577.815,00	490.159.813.294,00	3.998.645.569,00	494.158.458.863,00	837.358.452.614,24	
3	PT Bank Global Internasional		481.500.000,00	325.276.936.482,00	529.650.000,00	325.806.586.482,00	478.427.683.913,51	
4	PT Bank Ratu		41.817.985.352,00	71.817.985.352,00	0,00	71.817.985.352,00	0,00	
5	PT Bank Prasidha Utama		0,00	16.898.914.545,52	0,00	20.898.914.545,52	206.235.644.598,48	
	Total BDL Eks Dana Penjaminan		118.685.574.874,00	987.853.939.225,52	5.213.864.695,00	1.002.067.803.920,52	2.319.215.146.892,06	
TOTAL SALDO PIUTANG BDL			TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI			5.116.852.953.891,08	10.093.368.778.479,40	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 537 -

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN DAN EKS PT PPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 538 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	18.157.554.088.107,60	26.708.951.618.345,30	28.583.268.405.495,70	73.449.774.111.948,60

1. **Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN ***

a **Asset Transfer Kit (ATK)**

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	542.894.417,41	7.861.654.058.514,21	541.235.832,35	7.332.663.056.677,80
Rupiah	7.707.129.407.177,64	7.707.129.407.177,64	7.410.962.766.853,05	7.410.962.766.853,05
Yen Jepang	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30	5.615.941.858,85	675.139.544.763,97
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,39	13.093.102,45	211.762.863.647,37
		16.521.936.747.405,50		15.630.528.231.942,20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 539 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	28.356.584,87	410.631.705.502,47	28.356.584,87	384.175.011.818,76
Rupiah	1.224.986.625.699,63	1.224.986.625.699,63	1.228.619.059.526,81	1.228.619.059.526,81
		1.635.618.331.202,10		1.612.794.071.345,57

**Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN*

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	571.251.002,28	8.272.285.764.016,68	569.592.417,22	7.716.838.068.496,56
Rupiah	8.932.116.032.877,27	8.932.116.032.877,27	8.639.581.826.379,86	8.639.581.826.379,86
Yen Jepang	5.615.941.858,85	736.334.778.417,30	5.615.941.858,85	675.139.544.763,97
Euro	13.093.102,45	216.818.503.296,39	13.093.102,45	211.762.863.647,37
Jumlah		18.157.555.078.607,60		17.243.322.303.287,80



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 540 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018	Mutasi TA 2018	Saldo 31 Desember 2017 (Audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,00	0,00	577.812.000.000,00
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,00	0,00	155.727.000.000,00
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00	0,00	170.144.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00	0,00	4.308.730.000.000,00
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	0,00	0,00	0,00
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00	0,00	136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,00	0,00	596.794.000.000,00
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636,00	0,00	509.986.363.636,00
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.831.110.763.791,18	0,00	7.831.110.763.791,18
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00	0,00	188.483.118.182,00
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00	0,00	790.557.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 541 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 *(Audited)*

LAMPIRAN 11.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 *(Audited)*

Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703,00	0,00	2.525.651.574.703,00
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00	0,00	70.460.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,00	0,00	406.415.000.000,00
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669,00	0,00	4.893.525.874.669,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00	0,00	424.656.000.000,00
KAHARUDIN ONGKO	Bank Arya Panduartha (BBK)	359.435.826.603,76		0,00
SUJANTO GONDOKUSUMO	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305,32		0,00
HINDARTO TANTULAR/ANTON TANTULAR	Bank Central Dagang (BBKU)	1.470.120.709.878,01		0,00
SJAMSUL NURSALIM	Bank Dewa Rutji (BBKU)	470.658.063.577,00		0,00
Jumlah		26.708.951.618.345,30	0,00	23.586.482.694.981,20

Catatan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 542 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 (Audited)

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Rupiah	11.364.155.398.555,00	11.364.155.398.555,00	11.484.758.087.138,00	11.484.758.087.138,00
Dollar Amerika	996.655.658,92	14.432.570.596.820,50	996.655.658,92	13.502.690.867.048,20
Yen Jepang	998.413.744,00	130.907.117.885,93	998.413.744,00	120.027.702.841,69
Deutschmark	0,00	0,00	0,00	0,00
Euro **	436.387,00	7.226.459.623,25	436.387,00	7.057.957.510,94
Dollar Australia	1.332.783,00	13.609.433.720,07	1.332.783,00	14.070.576.638,07
Poundsterling **	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		25.948.469.006.604,80		25.128.605.191.176,90



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 543 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 *(Audited)*

LAMPIRAN 11.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 *(Audited)*

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31
	Dollar Amerika	26.403.988,65	382.356.159.640,65	26.403.988,65	357.721.238.230,20
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00	893.182.300,00
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00	17.331.000,00
Penyerahan Aset Kredit 2016 yang belum tercatat pada KPKNL	Rupiah	0,00	0,00	1.623.424.334,00	1.623.424.334,00
Total			2.634.799.398.890,90		2.611.787.901.814,45



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 544 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 *(Audited)*

LAMPIRAN 11.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2018 *(Audited)*

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Dollar Amerika	14.481,00	13.548,00
2	Yen Jepang	131,12	120,22
3	Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4	Euro	16.559,75	16.173,62
5	Dollar Australia	10.211,29	10.557,29
6	Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7	Dollar Singapura	10.602,97	10.133,53



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 545 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018**

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2018
TOTAL	4.021.040.786.202,22	5.203.783.891.104,09	9.224.824.677.306,31

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018 (Unaudited)	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.508,72	1.546.751.938.774,32	106.812.508,56	1.447.095.865.964,48
Dollar Singapore	79.397,45	841.848.780,43	79.397,45	804.576.441,50
Rupiah	2.448.509.128.092,74	2.448.509.128.092,74	2.448.683.794.112,41	2.448.683.794.112,41
Yen Jepang	141.216.722,50	18.515.644.692,26	141.216.722,50	16.976.848.432,19
Deutchmark	758.512,78	6.422.225.862,48	758.512,78	6.272.476.375,18
Jumlah		4.021.040.786.202,22		3.919.833.561.325,76



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 546 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018**

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2018 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 (audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,00	1.299.150.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00	108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,75	34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,50	69.168.040.819,50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,00	62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84	30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24	112.771.449.858,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50	425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00	8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01	91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,93	1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,65	26.981.928.647,65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374,47	615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	873.811.488.440,40	0,00
Jumlah		3.610.641.294.586,29	2.736.829.806.145,89



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 547 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018**

Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2018 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
		Dollar Amerika	38.822.432,00	562.187.637.792,00	38.822.432,00	525.966.308.736,00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00
		Dollar Amerika	960.092,00	13.903.092.252,00	960.092,00	13.007.326.416,00
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00
		Dollar Amerika	2.435,00	35.261.235,00	2.435,00	32.989.380,00
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
		Dollar Amerika	25.540.008,00	369.844.855.848,00	25.540.008,00	346.016.028.384,00
Grand Total				1.568.573.257.460,00		1.507.625.063.249,00

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 548 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 11.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2018**

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2018	Saldo 31 Desember 2017 (audited)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875,00	24.561.586.875,00
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933,42	4.911.933,42
3	Faridah	Rupiah	2.528.941,32	2.528.941,32
4	Haryanto	Rupiah	59.266,60	59.266,60
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041,46	252.041,46
Total			24.569.339.057,80	24.569.339.057,80

Catatan

	Kurs Tengah BI	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Dollar Amerika	14.481,00	13.548,00
2	Yen Jepang	131,12	120,22
3	Deutschmark	8.466,87	8.269,44
4	Euro	16.559,75	16.173,62
5	Dollar Australia	10.211,29	10.557,29
6	Poundsterling	18.372,78	18.218,01
7	Dollar Singapura	10.602,97	10.133,53



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 549 -

BAGIAN LANCAR TP/TGR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 550 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 12

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	82.051.392	(410.257)	81.641.135	340.360.952	(1.701.805)	338.659.147
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	250.000.000	(1.250.000)	248.750.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	106.226.996	(13.919.051)	92.307.945	41.446.296	(13.595.148)	27.851.148
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.041.454.419	(867.137.012)	174.317.407	1.166.591.178	(923.482.693)	243.108.485
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	20.262.450	(101.312)	20.161.138	20.292.450	(101.462)	20.190.988
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.509.229.574	(92.546.148)	18.416.683.426	18.462.979.574	(92.314.898)	18.370.664.676
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	34.908.890.307	(33.289.023.154)	1.619.867.153	32.967.279.848	(31.997.124.048)	970.155.800
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	438.401.336	(429.806.303)	8.595.033	438.401.336	(429.806.303)	8.595.033
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	337.616.858	(1.688.082)	335.928.776	594.027.312	(2.970.136)	591.057.176
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	239.190.122	(1.195.951)	237.994.171	327.629.565	(1.638.147)	325.991.418
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	24.227.611.824	(17.783.976.531)	6.443.635.293	25.046.108.301	(20.110.981.249)	4.935.128.052
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.230.000	(9.483.750)	746.250	41.430.000	(9.639.750)	31.790.250
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	-	-	-	149.580.000	(747.900)	148.832.100
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	840.073.333	(4.200.367)	835.872.966	38.800.000	(194.000)	38.606.000
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	542.781.764	(3.055.728)	539.726.036	1.394.732.983	(18.834.387)	1.375.898.596
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	5.392.000	-	5.392.000	-	-	-
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	12.866.689.195	(5.473.790.297)	7.392.898.898	13.239.021.735	(5.475.901.960)	7.763.119.775
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.491.101.667	(9.422.471.963)	68.629.704	9.540.598.800	(9.428.507.114)	112.091.686
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.827.151	(109.626)	23.717.525	21.874.020	(108.370)	21.765.650
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	188.021.714	(940.110)	187.081.604	119.184.500	(595.923)	118.588.577
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.500.004	(17.500)	3.482.504	3.500.004	(17.500)	3.482.504
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	3.000.000	(15.000)	2.985.000	1.800.000	(9.000)	1.791.000
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	10.890.000	(54.451)	10.835.549
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	87.737.143	(438.686)	87.298.457
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	19.710.338.388	(18.330.000.346)	1.380.338.042	19.771.175.874	(18.535.693.127)	1.235.482.747
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	1.410.788	(7.054)	1.403.734
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	319.962.078	(1.742.310)	318.219.768	170.472.504	(852.363)	169.620.141
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.396.980	(21.985)	4.374.995	4.396.980	(21.985)	4.374.995
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.269.849.548	(762.633.498)	507.216.050	1.411.215.548	(291.953.978)	1.119.261.570
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	235.891.869	(1.749.460)	234.142.409	1.306.351.645	(6.531.759)	1.299.819.886
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.839.984	(24.200)	4.815.784	4.839.984	(24.200)	4.815.784
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	2.315.782	(11.579)	2.304.183
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	12.009.672	(60.049)	11.949.623	85.477.700	(427.388)	85.050.312
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	88.468.100	(442.338)	88.025.762	88.468.100	(442.338)	88.025.762
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	39.433.680	(197.168)	39.236.512	39.363.480	(196.818)	39.166.662
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	12.356.464	(61.782)	12.294.682	15.000.000	(75.000)	14.925.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.762.067.846	(27.364.195)	1.734.703.651	1.279.172.095	(17.972.106)	1.261.199.989
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	101.904.000	(101.904.000)	-	76.428.000	(7.642.800)	68.785.200
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	13.100.000	(1.310.000)	11.790.000	13.100.000	(1.310.000)	11.790.000
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	21.136.000	(105.680)	21.030.320	89.052.000	(445.260)	88.606.740
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	198.741.111	(983.706)	197.747.405	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.100.434.041	(10.502.170)	2.089.931.871	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	4.104.000	(20.520)	4.083.480	4.104.000	(20.520)	4.083.480
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	12.000.000	(60.000)	11.940.000	17.676.256	(88.381)	17.587.875



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 551 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 12

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62.068.956	(310.344)	61.758.612	62.068.956	(310.344)	61.758.612
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	3.499.500	(17.498)	3.482.002
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	873.971.250	(4.369.856)	869.601.394	114.411.250	(572.056)	113.839.194
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	101.466.324	(507.332)	100.958.992	94.823.324	(474.117)	94.349.207
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	162.032.709	(6.282.664)	155.750.045	154.541.454	(772.707)	153.768.747
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	531.468.683	(245.934.342)	285.534.341	4.082.473.190	(404.806.069)	3.687.667.121
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	192.580.000	(12.362.900)	180.217.100	355.423.277	(179.991.300)	175.431.977
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	4.060.000	(20.300)	4.039.700	5.220.000	(26.100)	5.193.900
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	664.701.149	(456.883.215)	207.817.934	630.728.070	(504.575.823)	126.152.247
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	181.451.044	(148.918.027)	32.533.017	207.548.844	(147.181.447)	60.367.197
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	188.620.978	(464.100)	188.156.878	20.000.000	-	20.000.000
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	165.144.000	(825.720)	164.318.280	14.589.000	(72.845)	14.516.055
TOTAL			132.923.950.960	(87.509.960.349)	45.413.990.611	134.439.614.178	(88.612.532.992)	45.827.081.186



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 552 -

PERSEDIAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 553 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 13

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	11.286.396.319	7.483.566.263
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	23.226.536.663	18.560.434.078
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15.843.612.528	15.887.954.266
4	005	MAHKAMAH AGUNG	23.353.040.743	18.069.171.901
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	468.311.929.929	340.677.490.552
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	596.880.169.078	567.141.947.498
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	170.851.287.822	279.686.794.522
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	63.604.896.877	47.636.453.144
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	57.801.718.824.526	48.618.947.782.931
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	411.488.366.832	547.645.750.308
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	368.543.028.343	376.664.699.351
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	889.356.431.578	553.130.416.941
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	312.622.732.637	410.615.589.704
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.027.676.296.737	843.424.910.555
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	8.189.041.789.589	7.022.058.287.675
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.232.210.766.192	1.428.258.639.787
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.848.474.789.132	3.443.123.902.754
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	81.382.238.309	67.960.460.498
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	416.157.184.324	18.111.579.777
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	451.765.319.891	478.497.291.788
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	973.194.410.140	536.427.131.856
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	187.113.345.598	851.505.706.652
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	10.117.302.555.177	4.398.225.644.611
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	13.038.950	26.603.867
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	781.297.894	680.594.496
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.828.380.778	1.624.989.732
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	29.104.736.750	37.730.094.642
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.633.934.371	759.008.096
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	2.809.327.268.968	1.802.435.378.484
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	64.301.362.339	2.072.111.304
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.426.066.348	19.220.776.479
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.474.233.641	757.741.009
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	11.181.461.354	2.473.967.943



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 554 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 13

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	611.821.950	1.290.554.583
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	3.647.425
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	29.209.225.390	28.528.286.333
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.003.556.532.748	482.466.729.156
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	82.903.600.336	75.566.143.863
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.868.690.299	26.187.007.204
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.442.895.214	16.728.626.689
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	5.823.228.307.786	4.980.541.918.826
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	155.641.585.196	121.624.164.634
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	249.894.626	329.336.508
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.156.865.494	2.338.336.351
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	36.902.363.191	39.811.236.832
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	581.713.720.524	399.770.817.759
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	623.579.528.663	639.967.637.712
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	527.832.004	280.124.178
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	114.812.864.174	97.229.087.022
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.050.272.584.033	355.853.933.684
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	2.052.266.170	1.619.210.613
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.772.854.264	980.510.696
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	81.013.520.968	92.518.037.456
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	66.781.667.698	60.036.135.675
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	14.646.643.458	13.534.849.078
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	57.318.366.099	54.955.291.470
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131.413.937.869	130.224.546.891
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	111.866.751	182.863.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	3.252.036.988	2.789.540.385
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.640.228.608	2.930.769.434
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.268.275.397	1.385.672.418
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	11.054.864.115	9.655.127.921
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.843.219.941	6.963.618.456
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.881.570.620.917	36.526.527.839
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	498.832.224.112	180.369.796.059
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.098.833.089.639	842.295.854.659
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	790.360.885	956.735.193
68	100	KOMISI YUDISIAL	484.539.172	600.075.136



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 555 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 13

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	234.196.545.653	317.831.111.871
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	45.677.965.002	45.558.182.496
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	5.467.142.113
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.060.478.766	766.276.037
73	107	BADAN SAR NASIONAL	157.465.334.995	152.152.104.712
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	368.339.492	302.686.686
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	90.363.242.495	227.111.413.322
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	837.246.364	878.410.028
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	11.331.227.996	12.903.122.585
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	18.626.355.115	16.260.345.536
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	438.355.222	446.582.121
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.763.974.162	1.899.303.426
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	169.498.213	187.822.279
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4.855.554.074	4.849.642.361
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.544.479.692	4.383.256.789
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	206.172.928	231.005.071
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	15.325.391.914	4.672.748.150
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	321.591.664	370.324.846
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	874.545.140	1.425.205.930
JUMLAH PADA K/L			112.585.262.923.923	82.262.262.310.961
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	5.394.004.262	2.039.495.859.264
TOTAL			112.590.656.928.185	84.301.758.170.225



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 556 -

IKHTISAR LK PERUSAHAAN NEGARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 557 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		15=12x15
1	Perum Perhutani	Audited 2018		3.314.309	12.737.655	16.051.964	987.073	4.004.081	4.991.154	2.586.303	(1.334.148)	-	(778.185)	10.594.425	11.068.395	(7.585)	11.060.810	100,00	11.068.395
2	Perum Perikanan Indonesia	Audited 2018		526.825	384.205	911.030	235.930	258.396	495.326	341.434	-	-	(7.852)	82.122	415.704		415.704	100,00	415.704
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.683.415	9.731.783	13.425.198	3.292.897	4.033.407	7.326.304	1.051.567	1.080	-	3.356.563	1.185.032	5.594.242	504.652	6.098.894	100,00	5.594.242
4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2018		367.685	464.887	832.572	73.367	290.816	364.183	350.537	-	-	3.713	114.139	468.389		468.389	100,00	468.389
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2018		16.874.548	107.445.587	124.320.135	26.625.084	41.473.116	68.098.200	34.059.877	798	-	27.917.220	(10.849.788)	51.128.107	5.093.828	56.221.935	100,00	51.128.107
6	Perum Bulog	Audited 2018		35.226.557	8.216.346	43.442.903	31.685.112	952.025	32.637.137	12.522.387	-	-	(251.053)	(1.373.357)	10.897.977	(82.211)	10.805.766	100,00	10.897.977
7	Perum Jasa Tirta I	Audited 2018		531.067	335.935	867.002	119.812	18.627	138.439	31.701	4.186	-	1.366	690.695	727.948	615	728.563	100,00	727.948
8	Perum Jasa Tirta II	Audited 2018		751.254	565.535	1.316.789	162.931	79.403	242.334	164.548	-	-	(49.606)	949.513	1.064.455	10.000	1.074.455	100,00	1.064.455
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2018		57.647.384	81.256.095	138.903.479	24.524.445	48.352.148	72.876.593	25.000.000	-	-	29.325.012	11.496.803	65.821.815	205.071	66.026.886	100,00	65.821.815
10	PT BioFarma (Persero)	Audited 2018		2.391.930	5.009.229	7.401.159	745.305	693.015	1.438.320	2.000.000	-	-	1.880.115	2.082.724	5.962.839		5.962.839	100,00	5.962.839
11	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2018		5.369.548	4.090.879	9.460.427	3.774.305	2.329.663	6.103.968	555.400	67.436	-	315.478	2.263.680	3.201.884	154.465	3.356.459	90,03	2.882.755
12	PT Berdikari (Persero)	Audited 2018		532.688	137.723	670.411	524.660	39.516	564.176	75.000	-	-	8.982	22.253	108.235		106.235	100,00	106.235
13	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2018		237.112	323.190	560.302	728.294	1.229.172	1.958.466	534.000	1.008	-	-	(1.933.172)	(1.398.164)		(1.398.164)	100,00	-
14	PT Pertamina (Persero)	Audited 2018		864.330	368.257	1.232.587	316.786	589.373	906.159	1.021.315	39.721	-	21.871	(756.633)	326.374	54	326.428	100,00	326.374
15	PT Garam (Persero)	Audited 2018		529.530	557.924	1.087.454	98.320	88.187	187.507	600.000	158.829	-	-	141.118	899.847		899.847	100,00	899.847
16	PT IndoFarma (Persero) Tbk	Audited 2018		867.493	574.857	1.442.350	827.237	118.466	945.703	309.927	81.120	-	51	105.549	496.647		496.647	80,66	400.595
17	PT Pertamina (Persero)	Audited 2018		335.296.028	582.965.403	918.261.431	202.341.304	306.063.610	508.404.914	234.464.825	(13.384.730)	5.808.619	8.788.134	145.043.759	380.730.607	28.125.910	408.856.517	100,00	380.730.607
18	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2018		265.291	383.319	648.610	73.863	22.920	96.783	250.000	106	-	(22.639)	324.359	551.826	1	551.827	100,00	551.826
19	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2018		51.193	27.708	78.901	44.477	2.578	47.055	15.555	-	-	799	15.479	31.833	13	31.846	100,00	31.833
20	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2018		176.411	9.557.980	9.734.391	187.812	1.055.433	1.253.245	101.700	82	-	8.484.589	(115.225)	8.481.146		8.481.146	100,00	8.481.146
21	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2018		383.742	1.463.131	1.846.873	206.112	143.121	349.234	880.000	297.808	-	(697)	320.502	1.497.614	25	1.497.639	100,00	1.497.614
22	PT Sarnah (Persero)	Audited 2018		225.314	140.650	365.964	82.892	33.558	126.450	46.850	181	-	-	182.436	239.467	47	239.514	100,00	239.467
23	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2018		436.171	2.864.888	3.301.059	143.978	1.007.781	1.151.759	156.200	-	-	(19.244)	2.009.170	2.146.126	3.174	2.149.300	100,00	2.146.126
24	PT Bhandha Ghara Reksa (Persero)	Audited 2018		545.065	403.789	948.854	376.477	46.390	422.867	375.000	-	-	(1.449)	152.446	525.997		525.997	100,00	525.997
25	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.824.092	5.006.433	8.830.525	3.742.337	1.064.780	4.807.117	455.023	-	-	2.016.658	1.576.348	4.048.029	(24.621)	4.023.408	100,00	4.048.029
26	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2018		90.241.787	1.379.072.494	1.469.314.281	157.895.954	407.177.934	565.073.888	109.826.526	274.330	18.905.003	665.849.322	107.844.462	903.699.643	540.750	904.240.393	100,00	903.699.643
27	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2018		623.263	1.542.380	2.165.643	523.488	134.587	658.075	363.945	111.968	-	(5.220)	1.036.875	1.507.568		1.507.568	73,15	1.102.786



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 558 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBOS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2018		116.293	202.634	318.927	42.232	30.571	72.803	25.863	-	-	1.210	219.051	246.124		246.124	51,09	125.745
29	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2018		356.864	146.242	503.105	57.202	18.699	75.901	150.000	-	-	-	277.204	427.204		427.204	60,00	256.323
30	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2018		219.124	106.433	325.557	127.510	24.281	151.791	40.000	86.696	-	(979)	48.049	173.766		173.766	60,00	104.260
31	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2018		519.539	97.745	617.284	264.826	171.503	436.329	43.749	-	-	(88)	137.294	180.955		180.955	100,00	180.955
32	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2018		1.921.786	3.133.518	5.055.304	972.415	1.568.754	2.541.169	363.573	(64.059)	-	(34.941)	2.238.594	2.503.167	10.968	2.514.135	100,00	2.503.167
33	Perum Produksi Film Negara	Audited 2018		11.458	30.341	41.799	18.517	2.602	21.119	40.000	16.783	-	-	(36.103)	20.680		20.680	100,00	20.680
34	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2018		150.553	65.267	215.820	60.664	102.349	163.013	9.116	32.033	-	(45.586)	57.298	52.861	(54)	52.807	100,00	52.861
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		18.007.685	35.148.205	51.155.890	8.202.837	10.216.757	18.419.594	593.152	1.458.258	-	526.896	28.613.779	31.192.085	1.544.211	32.736.286	51,01	15.911.083
36	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2018		1.358.329	4.179.750	5.538.079	636.408	1.428.000	2.064.408	993.254	1.270.607	-	(47.054)	1.256.828	3.473.635	36	3.473.671	75,57	2.625.026
37	PT Semen Kumpang (Persero)	Audited 2018		12.556	597.780	610.316	26.018	570.882	596.900	133.713	-	-	5.305	(125.602)	13.416		13.416	61,48	8.248
38	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2018		134.868	176.467	311.335	154.976	37.004	191.980	14.400	-	-	122.178	(17.223)	119.355		119.355	100,00	119.355
39	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		43.268.000	182.828.000	206.196.000	46.281.000	42.632.000	88.893.000	4.953.000	2.455.000	-	507.000	90.995.000	98.810.000	18.393.000	117.303.000	52,08	51.522.219
40	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.202.265	2.916.418	6.118.683	2.083.120	3.774.535	5.857.655	3.885.661	12.450	-	214.595	(3.851.645)	261.061	(33)	261.028	100,00	261.061
41	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2018		177.771	583.093	760.864	92.612	233.840	326.452	456.694	3.656	-	(645)	(25.293)	434.412		434.412	100,00	434.412
42	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahan (Persero)	Audited 2018		1.163.339	1.370.564	2.533.903	3.360.530	285.145	3.645.675	976.600	635	-	639.989	(2.728.996)	(1.111.772)		(1.111.772)	99,95	-
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2018		294.245	355.976	650.221	468.408	459.473	927.881	240.836	51	-	141.118	(666.699)	(284.594)	6.934	(277.660)	100,00	-
44	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2018		45.085.189	120.593.500	165.678.689	18.951.262	68.734.787	88.686.049	54.177.941	(18.199.606)	-	14.294.178	11.601.760	61.874.273	14.118.367	75.992.640	100,00	61.874.273
45	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2018		14.332.135	47.911.808	62.243.943	23.150.413	13.024.646	36.175.059	14.301.045	1.768.666	-	19.890.725	(9.768.492)	26.191.944	(123.060)	26.068.884	80,00	20.953.555
46	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2018		415.712	419.039	834.751	384.635	211.371	606.006	340.816	9.564	-	288.056	(409.707)	228.828	(84)	228.745	100,00	228.829
47	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2018		18.386	20.503	38.889	10.035	26.438	36.473	27.200	-	-	-	(24.784)	2.416		2.416	100,00	2.416
48	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018		976.780	852.894	1.829.674	1.485.562	122.545	1.608.107	350.000	1.229	-	714.643	(844.823)	221.049	518	221.567	100,00	221.049
49	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.573.898	973.464	4.547.362	2.841.044	511.293	3.352.337	762.915	3.221	-	480.374	(51.485)	1.195.025		1.195.025	100,00	1.195.025
50	PT Bahana (Persero)	Audited 2018		1.246.663	548.595	1.795.258	847.933	5.802	853.735	250.000	6.397	-	37.644	611.355	905.396	36.127	941.523	100,00	905.396
51	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2018		4.302.343	1.834.488	6.136.841	3.916.151	1.307.617	5.223.768	175.001	-	-	283.365	347.690	816.056	87.017	913.073	100,00	816.056
52	PT Pindad (Persero)	Audited 2018		5.607.213	846.073	6.453.286	3.460.700	1.619.765	5.080.465	1.367.542	-	-	(332.510)	337.774	1.372.806	15	1.372.821	100,00	1.372.806



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 559 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		15=12x15
53	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2018		9.476.902	3.524.670	13.001.572	7.499.418	2.053.619	9.553.038	21.167.765	74.751	-	1.877.200	(19.571.182)	3.448.534	-	3.448.534	100,00	3.448.534
54	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		25.429.544	4.689.071	30.118.615	18.964.304	4.869.039	23.833.343	356.085	2.588.834	-	336.728	2.992.838	6.274.485	10.787	6.285.272	51,00	3.199.987
55	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2018		757.365	298.849	1.056.214	573.041	293.063	866.104	44.285	-	-	230.564	(84.739)	190.110	-	190.110	100,00	190.110
56	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2018		3.195.197	2.108.469	5.303.666	2.469.145	1.259.287	3.728.432	161.555	-	-	348.399	1.055.023	1.564.077	10.257	1.575.234	100,00	1.564.977
57	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2018		11.813.856	70.604.744	82.418.600	31.081.475	31.138.139	62.219.614	3.628.836	3.997.085	-	(604.893)	9.887.378	16.908.506	3.290.480	20.198.986	70,00	11.835.954
58	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		66.989.131	57.402.451	124.391.582	56.799.726	38.704.738	95.504.464	1.357.390	5.552.026	-	744.295	10.347.404	18.001.115	10.886.003	28.887.118	66,04	11.887.936
59	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2018		43.555.496	15.674.505	59.230.001	28.251.952	13.762.734	42.014.686	896.995	7.829.094	-	597.600	5.479.925	14.803.614	2.411.701	17.215.315	65,05	9.629.751
60	PT Utama Karya (Persero)	Audited 2018		14.813.363	49.720.044	64.533.407	16.937.331	36.980.162	53.917.493	6.100.000	-	-	467.494	4.044.182	10.611.676	4.238	10.615.914	100,00	10.611.676
61	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2018		37.534.483	15.014.668	52.549.151	26.522.885	9.710.654	36.233.539	619.990	4.710.054	-	2.161.391	5.274.318	12.765.753	3.549.859	16.315.612	51,00	6.510.534
62	Perum Perumnas	Audited 2018		9.286.525	751.689	10.038.214	5.537.213	1.114.806	6.652.019	1.000	1.960.375	-	281.870	1.130.450	3.373.695	12.500	3.386.195	100,00	3.373.695
63	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2018		5.222.126	1.040.702	6.262.828	4.244.016	447.058	4.691.074	1.251.843	-	-	378.213	(72.211)	1.558.845	12.809	1.571.754	100,00	1.558.845
64	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2018		41.695	55.568	97.263	9.894	30.771	40.665	19.000	-	-	(6)	37.604	56.598	-	56.598	100,00	56.598
65	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2018		2.622.950	11.397.903	14.020.853	2.677.740	4.863.536	7.541.276	1.700.000	-	527.133	(158.093)	3.380.016	5.449.056	1.030.521	6.479.577	100,00	5.449.056
66	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2018		24.554.336	26.879.541	51.432.877	5.498.194	29.500.227	34.998.421	1.444.029	(280.771)	-	(112.143)	14.106.256	15.147.371	1.287.085	16.434.456	100,00	15.147.371
67	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2018		6.462.869	24.042.847	30.505.716	3.574.313	16.576.088	20.150.402	1.018.953	-	-	38.741	8.021.542	8.079.236	1.276.078	10.355.314	100,00	9.079.236
68	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2018		2.474.141	7.899.027	10.373.168	1.171.231	3.219.673	4.390.904	3.112.085	1.466	-	105.840	2.749.791	5.969.182	13.082	5.982.264	100,00	5.969.182
69	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2018		250.538	256.683	507.221	151.029	189.213	340.242	7.000	97.707	-	2.199	60.073	166.979	-	166.979	100,00	166.979
70	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2018		93.099	49.701	142.800	72.757	23.314	96.071	15.000	-	-	(6.403)	38.132	46.729	-	46.729	100,00	46.729
71	Perum Damri	Audited 2018		187.492	976.953	1.164.445	123.755	299.641	423.396	18.700	631.987	-	(61.827)	150.989	741.049	-	741.049	100,00	741.049
72	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2018		103.124	203.844	306.968	152.756	107.877	260.633	231.769	271.039	-	5.620	(462.093)	46.335	-	46.335	100,00	46.335
73	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2018		3.588.962	2.036.168	5.625.130	944.952	30.349	975.301	1.541.350	(516.195)	975.506	29.778	2.619.390	4.649.829	-	4.649.829	100,00	4.649.829
74	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2018		5.115.607	26.493.309	31.608.916	7.614.989	8.941.702	16.556.691	6.414.412	22.963	-	374.350	8.235.636	15.047.361	4.864	15.052.225	100,00	15.047.361
75	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2018		5.507.894	33.012.920	38.520.814	4.796.882	10.106.948	14.903.830	7.000.000	4.434.924	881.023	(281.400)	11.582.175	23.616.722	262	23.616.984	100,00	23.616.722
76	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2018		277.981	116.131	394.112	191.001	24.540	215.541	25.000	1.051	-	109.262	43.258	178.571	-	178.571	100,00	178.571
77	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2018		409.798	86.852	496.648	271.238	3.057	274.295	50.000	-	-	(6.872)	179.225	222.353	-	222.353	100,00	222.353
78	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2018		93.263	88.089	181.352	75.815	32.597	108.412	2.000	-	-	58.791	12.149	72.940	-	72.940	100,00	72.940
79	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		267.836.821	540.735.190	808.572.011	648.417.017	49.781.205	698.198.222	9.054.807	14.568.468	-	13.406.777	71.046.832	108.076.884	2.286.905	110.373.789	60,00	64.846.130



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 560 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=12x15
80	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2018		506.332.915	695.918.179	1.202.252.094	932.732.816	84.558.973	1.017.291.789	11.666.667	17.316.192	-	25.134.972	127.084.686	181.202.517	3.757.788	184.960.305	60,00	108.721.510
81	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		1.244.965.192	51.933.101	1.296.898.293	976.428.738	135.194.224	1.111.622.962	6.167.291	273.715	-	13.396.148	163.130.389	182.967.543	2.307.788	185.275.331	57,27	104.785.512
82	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2018		78.698.153	227.738.041	306.436.194	242.801.199	39.794.547	282.595.746	5.295.000	2.054.454	-	2.776.675	13.714.319	23.840.448	-	23.840.448	60,00	14.304.269
83	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2018		13.080.077	3.160.920	16.240.997	3.476.714	1.468.603	4.945.317	7.638.733	-	-	65.792	3.581.140	11.295.665	15	11.295.680	100,00	11.295.665
84	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2018		36.294.884	12.004.784	48.299.678	4.168.576	42.532.078	46.700.654	200.000	-	-	(425.308)	1.824.332	1.589.024	-	1.589.024	100,00	1.589.024
85	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2018		6.657.406	6.818.445	13.475.851	2.740.270	7.567.605	10.307.875	425.000	-	-	52.923	2.681.998	3.159.921	8.055	3.167.976	100,00	3.159.921
86	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2018		448.214	36.369.453	36.817.667	7.890.605	39.168.213	47.058.818	235.000	3.037	-	2.599.898	(13.084.837)	(10.247.002)	5.851	(10.241.151)	100,00	-
87	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2018		17.283.179	764.242	18.047.421	7.985.446	218.054	8.203.500	6.611.000	-	-	(153.409)	3.386.330	9.843.921	-	9.843.921	100,00	9.843.921
88	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2018		14.080.106	1.127.942	15.218.048	4.302.085	235.771	4.537.856	5.000.000	13.504	-	(485.220)	6.094.650	10.622.934	57.258	10.680.192	100,00	10.622.934
89	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2018		7.802.025	889.671	8.691.696	5.245.082	541.699	5.786.781	878.358	270	-	961.153	1.065.119	2.904.900	15	2.904.915	100,00	2.904.900
90	PT Taspen (Persero)	Audited 2018		30.493.118	201.372.920	231.866.036	835.572	221.311.778	222.147.350	100.000	400.000	-	(4.651.725)	13.861.551	9.709.826	8.860	9.718.686	100,00	9.709.826
91	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018		19.850.351	43.655.653	63.506.004	35.494.620	14.630.946	50.125.566	18.974.845	340.688	-	(878.880)	(5.933.971)	12.502.682	677.756	13.180.438	60,54	7.568.123
92	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2018		2.886.301	3.675.537	6.561.838	444.787	223.999	668.786	7.065.092	564.951	-	689.012	(2.428.388)	5.890.667	2.385	5.893.052	100,00	5.890.667
93	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2018		8.950.940	30.044.819	38.995.759	7.251.784	13.443.920	20.695.704	12.268.743	-	-	(222.788)	6.060.149	18.106.104	193.951	18.300.055	100,00	18.106.104
94	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2018		3.193.126	949.867	4.142.993	877.717	2.041.220	2.918.937	272.500	-	-	3.652	66.642	342.794	881.262	1.224.056	100,00	342.794
95	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018		492.462	332.203	824.665	112.710	99.655	212.365	255.000	-	-	23.153	334.147	612.300	-	612.300	100,00	612.300
96	PT Danareksa (Persero)	Audited 2018		1.691.247	1.604.169	3.295.416	1.862.660	8.627	1.871.287	701.480	85.927	-	492.740	143.837	1.423.984	145	1.424.129	100,00	1.423.984
97	PT Klining Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2018		1.857.663	21.035	1.878.698	1.547.854	13.207	1.561.061	102.000	-	-	(1.429)	215.618	316.189	1.448	317.637	100,00	316.189
98	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2018		12.637.306	5.611.264	18.248.570	4.310.355	12.044.636	16.354.991	1.300.000	-	-	12.563	571.171	1.883.734	9.845	1.893.579	100,00	1.883.734
99	PT PANN (Persero)	Audited 2018		404.857	482.122	886.979	278.536	4.161.848	4.441.384	45.997	192.066	-	-	(3.782.468)	(3.554.405)	-	(3.554.405)	93,04	-
100	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2018		43.525.272	9.265.916	52.791.188	24.053.213	8.621.486	32.674.699	6.250.000	-	-	5.813.506	8.050.805	20.114.311	2.178	20.116.489	100,00	20.114.311
101	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2018		1.755.617	1.743.825	3.499.442	586.352	398.705	985.057	300.000	1.182	-	796.140	1.408.257	2.505.579	(1.194)	2.504.385	95,00	2.380.300
102	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2018		968.612	607.377	1.575.989	362.952	68.833	431.785	25.000	105	-	202.417	918.958	1.146.480	(2.276)	1.144.204	85,12	975.884
103	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2018		2.128.738	5.189.614	7.318.352	974.642	120.368	1.095.010	3.857.489	181.766	620.969	(10.597)	1.430.429	6.080.056	143.286	6.223.342	100,00	6.080.056
104	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2018		411.846	530.916	942.762	176.391	294.470	470.861	2.015.044	1.427	-	(583)	(1.543.996)	471.892	9	471.901	73,23	345.567
105	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2018		7.280.098	4.464.403	11.744.501	5.440.230	1.042.228	6.482.458	2.996.688	(308.059)	-	503.517	1.952.285	5.144.431	117.612	5.262.043	100,00	5.144.431
106	PT Iglas (Persero)	Audited 2018		18.860	123.209	142.068	1.204.146	-	1.204.146	47.007	94.583	-	-	(1.203.667)	(1.062.077)	-	(1.062.077)	63,82	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 561 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018**

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
107	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Audited 2018		209.959	415.834	625.793	349.445	46.717	396.162	198.870	650		189.491	(159.380)	229.631		229.631	100,00	229.631
108	PT Primmisima (Persero)	Audited 2018		85.573	106.081	191.654	135.180	14.120	149.300	13.000	2.276		86.359	(59.281)	42.354		42.354	52,79	22.359
109	PT Survei Udara Panas (Persero)	Audited 2018		71.774	69.654	141.428	83.849	165.157	259.106	13.000				(131.924)	(118.924)	1.246	(117.678)	100,00	
110	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2018		52.680	16.682	69.362	45.958	24.415	70.373	11.000			3.355	(15.366)	(1.011)		(1.011)	100,00	
111	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2018		114.809	763.338	878.147	1.726.823	141.612	1.868.535	788.994				(1.789.382)	(990.388)		(990.388)	96,65	
112	PT Kertas Leces (Persero)	TW III / 2018		6.088	694.520	700.608	1.101.355	218.000	1.319.355	415.073	1.976		618.400	(1.654.196)	(618.747)		(618.747)	100,00	
113	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Audited 2017		58.354	726.086	784.440	7.411.031	3.138.419	10.549.450	1.864.556			45.162	(11.774.863)	(9.765.145)	135	(9.765.010)	96,99	
114																			
	TOTAL			3.318.559.382	4.846.018.478	8.164.578.860	3.738.333.228	1.867.042.832	5.605.376.158	684.161.267	42.336.924	28.718.253	852.511.266	847.605.893	2.455.333.602	103.869.100	2.559.202.702		2.180.048.007



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 562 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN -	BEBAN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM	PAJAK	LABA RUGI TAHUN	PENDAPATAN	LABA RUGI	LABA RUGI TAHUN	LABA RUGI
			USAHA		LAIN	LAIN - LAIN		PAJAK	BERJALAN	KOMPREHENSIF	KOMPREHENSIF	BERJALAN	KOMPREHENSIF	BERJALAN	DIATRIBUSIKAN	LABA RUGI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
1	Perum Perhutani	Audited 2018	5.361.968	4.763.783	598.185	214.556	-	812.741	18.334	794.407	140.428	653.979	-	96.586	653.954	750.538
2	Perum Perikanan Indonesia	Audited 2018	1.002.330	970.860	31.470	77.123	69.190	39.403	26.884	12.519	(13.477)	25.996	(8.097)	17.899	25.996	17.899
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2018	5.186.962	5.110.712	76.250	600.923	207.835	469.338	312.809	156.529	(31.771)	188.300	20.731	209.031	152.764	162.735
4	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2018	580.137	577.922	2.215	13.398	-	15.613	-	15.613	1.528	14.085	(1.935)	12.150	14.085	12.150
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2018	33.320.129	32.086.962	1.233.167	3.288.372	-	4.521.539	2.849.657	1.671.882	757.145	914.737	7.833.992	8.748.729	870.197	7.775.477
6	Perum Bulog	Audited 2018	28.436.610	27.342.710	1.093.900	764.688	912.412	946.176	2.198.158	(1.251.982)	(290.196)	(961.786)	126.286	(835.500)	(923.229)	(797.391)
7	Perum Jasa Tirta I	Audited 2018	501.058	365.050	136.008	38.593	27.858	146.743	-	146.743	32.915	113.828	636	114.464	113.828	114.464
8	Perum Jasa Tirta II	Audited 2018	825.545	602.060	223.485	31.255	18.209	236.531	-	236.531	69.935	166.596	54.062	220.658	166.596	220.658
9	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2018	69.448.132	60.002.067	9.446.065	83.304	148.695	9.380.674	3.456.859	5.923.815	1.710.438	4.213.377	(18.329)	4.195.048	4.180.476	4.162.147
10	PT BroFarma (Persero)	Audited 2018	3.235.225	2.498.461	736.764	454.802	464.198	727.368	-	727.368	184.142	543.226	6.067	549.293	543.226	549.293
11	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2018	7.454.115	6.880.813	573.302	194.453	2.736	765.019	187.291	577.728	175.934	401.794	373.909	775.703	415.896	786.883
12	PT Berdikari (Persero)	Audited 2018	1.382.345	1.363.832	18.513	37.214	17.650	38.077	3.072	35.005	5.860	29.145	-	29.145	29.145	29.145
13	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2018	172.947	270.950	(98.003)	46.861	64.946	(116.088)	66.454	(182.542)	-	(182.542)	-	(182.542)	(182.542)	(182.542)
14	PT Pertamina (Persero)	Audited 2018	1.772.938	1.857.766	(84.828)	15.945	6.517	(75.400)	41.520	(116.920)	(33.848)	(83.072)	1.694	(81.378)	(83.075)	(81.381)
15	PT Garam (Persero)	Audited 2018	389.115	236.786	152.329	46.407	19.091	179.645	47	179.598	41.448	138.150	(7.136)	131.014	138.150	131.014
16	PT Indofarma (Persero) Tbk	Audited 2018	1.592.980	1.587.826	5.154	52.659	31.871	25.942	51.240	(25.298)	7.438	(32.736)	2.973	(29.763)	(32.736)	(29.763)
17	PT Pertamina (Persero)	Unaudited 2018	798.687.886	733.231.306	65.456.580	4.431.176	4.429.024	65.458.732	11.800.232	53.658.500	39.963.777	13.694.723	1.038.804	14.733.527	12.209.406	13.966.978
18	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2018	424.608	271.749	152.859	22.326	517	174.668	666	174.002	46.276	127.726	6.093	133.819	127.726	133.819
19	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2018	21.498	21.301	197	13.269	197	5.335	8.131	2.259	5.872	(1.684)	7.556	112	7.668	7.668
20	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2018	698.791	649.940	48.851	39.468	24.582	63.737	45.277	18.460	1.018	17.442	(8.320)	9.122	17.442	9.122
21	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2018	289.816	201.764	88.052	35.285	47.249	76.089	-	76.089	3.048	73.041	3.453	76.494	73.041	76.493
22	PT Sarinah (Persero)	Audited 2018	822.365	801.549	20.816	13.850	3.370	31.296	-	31.296	10.448	20.848	-	20.848	20.848	20.848
23	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.496.513	1.490.970	5.543	217.800	78.092	145.251	-	145.251	34.785	110.466	2.493	112.959	109.783	111.685
24	PT Bhandara Ghara Reksa (Persero)	Audited 2018	1.211.989	1.089.032	122.957	27.067	27.067	95.890	-	95.890	34.708	61.182	-	61.182	61.182	61.182
25	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2018	5.223.036	5.252.594	(29.558)	340.446	102.128	208.760	93.921	114.839	(12.614)	127.453	603.472	730.925	120.742	730.925
26	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Unaudited 2018	328.642.335	308.398.097	20.244.238	14.928.705	9.858.852	25.314.091	21.631.473	3.682.618	3.468.127	214.491	(19.824.961)	(19.610.470)	185.086	(19.639.875)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 563 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
27	PT Kawasan Bankat Nusantara (Persero)	Audited 2018	649.704	457.961	191.743	41.100	23.977	208.866	10.509	198.357	48.573	149.784	(542)	149.242	149.784	149.242
28	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2018	117.507	59.472	58.035	2.174	85	60.124	2.531	57.593	3.503	54.090	(47)	54.043	54.090	54.043
29	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2018	240.804	176.260	64.545	6.745		71.290	648	70.642	6.987	63.655	-	63.655	63.655	63.655
30	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2018	104.387	54.387	50.000	7.554	292	57.262	3.319	53.943	5.894	48.049	(722)	47.327	48.049	47.327
31	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2018	295.521	262.660	32.861	5.013	8.024	29.850	16.970	12.880	3.914	8.966	-	8.966	8.966	8.966
32	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2018	3.196.517	2.740.783	455.734	107.336	17.511	545.559	137.612	407.947	120.412	287.535	(6.003)	281.532	285.041	278.614
33	Perum Produksi Film Negara	Audited 2018	22.365	22.406	(41)	6.421	(21)	6.401	-	6.401	1.084	5.317	-	5.317	5.317	5.317
34	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2018	339.527	326.868	12.659	8.627	4.048	17.238	-	17.238	5.252	11.986	8.586	20.572	11.975	20.561
35	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	30.687.626	25.914.360	4.773.266	290.952		5.064.218	959.259	4.104.959	1.019.255	3.085.704	431.669	3.517.373	3.079.115	3.475.788
36	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2018	1.995.808	1.748.306	247.502	16.503		264.005	118.648	145.357	69.282	76.075	(2.510)	73.565	76.072	73.562
37	PT Semen Kupang (Persero)	Audited 2018	12.282	4.415	7.867	9		7.876	2.383	5.493	-	5.493	-	5.493	5.493	5.493
38	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2018	108.494	106.668	1.826	15.421	9.921	7.326	150	7.176	1.788	5.388	60	5.448	5.388	5.448
39	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	132.604.000	93.759.000	38.845.000	1.067.000		39.912.000	3.507.000	36.405.000	9.426.000	26.979.000	4.942.000	31.921.000	18.032.000	22.844.000
40	PT PAL Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.581.828	1.535.286	46.542	268.364	473.601	(158.695)	83.856	(242.551)	61.604	(304.155)	5.404	(298.751)	(304.156)	(298.752)
41	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2018	153.794	134.952	18.842	4.403	3.954	19.291	-	19.291	3.897	15.394	3.023	18.417	15.394	18.417
42	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2018	427.708	611.250	(183.542)	84.098	81.874	(181.318)	22.307	(203.625)	69.254	(272.879)	639.989	367.110	(272.879)	367.110
43	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2018	129.333	172.971	(43.638)	77.373	4.714	29.021	26.883	2.138	(440)	2.578	2.664	5.242	1.905	4.569
44	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2018	65.277.429	55.372.058	9.905.371	7.610.337	1.582.828	15.932.880	2.082.465	13.850.415	3.133.213	10.717.202	2.527.510	13.244.712	8.283.715	10.516.326
45	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2018	24.781.416	24.805.092	(23.677)	866.271	401.908	440.686	1.600.310	(1.159.624)	(60.360)	(1.099.264)	349.981	(749.283)	(1.083.425)	(716.289)
46	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2018	340.979	328.105	12.874	5.464	1.191	17.147	6.797	10.350	(116)	10.466	(8.105)	2.361	10.441	2.336
47	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2018	23.618	24.500	(882)	3.959	173	2.904	-	2.904	2.262	642	-	642	642	642
48	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018	847.756	747.937	99.819	15.962	29.581	86.200	68.252	17.948	17.485	463	5.594	6.057	1.702	7.296
49	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2018	2.176.896	2.023.699	153.197	55.957	18.571	190.583	42.658	147.925	80.118	67.807	(5.042)	62.765	67.807	62.765
50	PT Dahana (Persero)	Audited 2018	1.982.662	1.833.295	149.367	33.876		183.243	16.852	166.391	32.426	133.965	262	134.227	134.559	134.821
51	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2018	5.337.972	4.971.876	366.096	49.299	80.594	334.801	123.449	211.352	39.877	171.475	11.889	183.364	133.181	144.966
52	PT Pindad (Persero)	Audited 2018	3.200.897	2.816.760	384.137	68.246	122.018	330.365	193.061	137.304	36.726	100.578	(25.542)	75.036	100.578	75.036



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 564 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
53	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2018	3.244.893	3.545.359	(300.466)	190.039	122.220	(232.646)	286.310	(518.956)	30.724	(549.680)	(7.035)	(556.714)	(549.680)	(556.714)
54	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2018	15.655.499	13.985.688	1.669.811	197.232	175.522	1.691.521	523.744	1.167.777	522.748	645.029	(131.771)	513.258	644.159	512.387
55	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2018	704.516	665.282	39.234	15.470	111	54.593	23.923	30.670	21.567	9.103	17.402	26.505	9.103	26.505
56	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2018	4.729.278	4.407.800	321.478	264.405	11.783	574.100	83.850	490.250	132.891	357.359	189.808	547.167	356.328	546.136
57	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2018	36.974.075	32.381.894	4.592.181	1.285.130	827.344	5.049.967	1.839.660	3.210.307	1.173.816	2.036.491	48.303	2.084.794	2.202.600	2.249.998
58	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2018	48.788.951	41.594.078	7.194.873	2.905.200	2.104.388	7.995.685	2.459.242	5.536.443	916.875	4.619.568	289.488	4.909.056	3.962.838	4.252.326
59	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2018	31.158.193	28.339.210	2.818.983	1.655.229	1.116.662	3.357.550	998.921	2.358.629	285.329	2.073.300	140.243	2.213.543	1.730.256	1.860.118
60	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2018	26.747.664	23.397.232	3.350.432	438.690	1.098.033	2.691.089	293.484	2.397.605	121.181	2.276.424	8.679	2.285.103	2.274.876	2.283.556
61	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2018	25.119.560	22.727.114	2.392.446	1.388.437	208.540	3.572.343	759.837	2.812.506	853.513	1.958.993	157.616	2.116.609	1.501.973	1.602.553
62	Perum Perumnas	Audited 2018	2.667.116	2.077.744	589.372	66.509	291.263	364.618	-	364.618	58.846	305.772	-	305.772	305.960	305.960
63	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2018	3.255.889	3.138.777	117.112	-	-	117.112	-	117.112	27.658	89.454	15.230	104.684	86.401	101.631
64	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2018	63.031	63.530	(499)	5.538	918	4.121	-	4.121	606	3.515	6	3.521	3.515	3.521
65	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2018	3.113.533	1.868.587	1.244.946	239.691	135.374	1.349.263	153.281	1.195.982	291.111	904.871	(30.940)	873.931	911.814	880.874
66	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2018	12.218.360	8.824.214	3.394.146	1.881.519	1.012.765	4.262.900	1.130.782	3.132.118	701.408	2.430.710	(40.589)	2.390.121	2.379.262	2.339.484
67	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2018	10.778.773	8.210.531	2.568.243	143.194	79.521	2.631.915	808.410	1.823.505	438.103	1.385.403	739.672	2.125.075	759.639	1.502.625
68	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2018	3.305.799	2.752.141	553.658	152.026	154.938	550.746	68.151	482.595	156.392	326.203	2.177	328.380	326.133	328.310
69	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2018	195.583	156.037	39.546	1.553	8.672	32.426	725	31.701	8.964	22.738	193	22.931	22.738	22.931
70	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2018	90.929	87.308	3.621	13.558	1.313	15.866	-	15.866	4.226	11.640	1.860	13.500	11.640	13.500
71	Perum Damri	Audited 2018	1.237.678	1.177.664	60.014	19.434	8.169	71.279	20.486	50.793	29.231	21.562	(25.526)	(3.964)	21.562	(3.964)
72	Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	Audited 2018	328.554	314.892	13.662	9.777	7.831	15.608	-	15.608	2.286	13.322	-	13.322	13.322	13.322
73	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2018	3.275.758	2.869.186	406.572	134.414	12.392	528.594	440	528.154	146.708	381.446	7.011	388.457	381.446	388.457
74	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2018	8.521.087	5.762.646	2.758.441	390.605	60.850	3.088.196	265.134	2.823.062	817.144	2.005.918	(71.104)	1.934.814	2.007.018	1.935.914
75	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2018	9.486.855	6.430.746	3.056.109	331.377	164.035	3.223.451	476.942	2.746.509	834.957	1.911.552	(30.751)	1.880.801	1.911.610	1.880.859
76	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2018	462.259	398.645	63.614	945	1.085	63.474	8.378	55.096	16.671	38.425	119	38.544	38.425	38.544
77	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2018	520.505	382.394	138.111	1.052	4.957	134.206	4.050	130.156	8.062	122.094	(1.061)	121.033	122.094	121.033



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 565 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
78	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2018	166.224	150.171	16.053	106	1.120	15.039	32	15.007	4.990	10.017	(1.508)	8.509	10.017	8.509
79	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	71.748.629	52.149.230	19.599.399	703.116	481.800	19.820.715	-	19.820.715	4.728.952	15.091.763	(855.511)	14.236.252	15.015.118	14.250.362
80	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2018	119.681.209	85.775.412	33.905.797	37.572	33.943.369	-	-	33.943.369	8.091.432	25.851.937	(1.316.749)	24.535.188	25.015.021	23.771.531
81	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	139.186.447	97.457.996	41.728.451	27.817	2.574	41.753.694	-	41.753.694	9.335.208	32.418.486	(3.477.661)	28.940.825	32.351.133	28.910.721
82	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2018	24.923.352	21.329.552	3.593.800	16.475	-	3.610.275	-	3.610.275	802.352	2.807.923	(25.416)	2.782.507	2.807.923	2.782.507
83	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2018	2.326.010	2.365.249	(39.239)	547.522	-	508.283	-	508.283	110.740	397.543	(135.958)	261.585	397.542	261.585
84	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2018	2.630.841	2.636.807	(5.966)	147.761	-	141.795	-	141.795	31.329	110.466	301.088	411.554	110.466	411.554
85	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2018	4.451.130	3.904.337	546.793	352.697	601.028	298.462	59.297	239.165	37.595	201.570	(6.855)	194.715	201.093	194.235
86	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2018	7.811.135	23.728.178	(15.917.043)	218.440	47.568	(15.746.171)	-	(15.746.171)	85.983	(15.832.154)	(70.917)	(15.903.071)	(15.832.201)	(15.903.118)
87	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2018	6.761.150	5.257.460	1.503.690	(57.348)	696.885	749.457	-	749.457	98.622	650.835	(29.053)	621.782	650.804	621.745
88	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2018	6.941.421	4.916.562	2.024.859	-	-	2.024.859	-	2.024.859	398.585	1.626.274	(428.154)	1.198.120	1.620.235	1.193.047
89	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2018	4.457.768	4.181.896	275.872	2.027	814	277.085	76.500	200.585	(2.801)	203.386	(170.395)	32.991	203.385	32.991
90	PT Taspen (Persero)	Audited 2018	15.726.606	15.800.301	(73.695)	791.927	202.183	516.049	-	516.049	244.497	271.552	(4.510.477)	(4.238.925)	270.242	(4.240.235)
91	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2018	62.300.281	65.236.133	(2.935.853)	4.427.419	-	1.491.567	1.220.756	270.811	199.320	71.491	(444.878)	(373.387)	11.537	(447.274)
92	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Audited 2018	4.593.313	4.518.202	75.111	215.535	-	290.646	-	290.646	86.473	204.174	(14.757)	189.417	203.631	315.044
93	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2018	26.864.014	23.732.306	3.131.708	514.469	694.510	2.951.667	1.002.481	1.949.186	413.603	1.535.583	236.080	1.771.663	1.555.221	1.791.215
94	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2018	747.886	606.352	141.534	10.589	-	152.123	-	152.123	31.661	120.462	133.854	45.530	56.251	56.251
95	PT Bro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2018	795.680	665.524	130.156	-	23.361	106.795	-	106.795	33.897	72.898	24.827	97.725	72.898	97.725
96	PT Danareksa (Persero)	Audited 2018	287.442	784.353	(496.911)	965.604	-	468.693	143.459	325.234	179.949	145.285	42.145	187.430	145.284	187.428
97	PT Klining Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2018	70.805	48.913	21.892	19.535	2.855	38.572	-	38.572	11.043	27.529	(1.071)	26.458	27.444	26.373
98	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2018	3.255.748	3.167.497	88.251	134.954	124.048	99.157	-	99.157	31.359	67.798	4.998	72.796	65.960	70.958
99	PT PANNI (Persero)	Unaudited 2018	219.401	164.273	55.128	7.811	-	62.939	19.589	43.350	41.005	2.345	-	2.345	2.345	2.345
100	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2018	11.464.462	5.578.241	5.886.221	28.921	351	5.914.791	2.251.619	3.663.172	887.691	2.775.481	136.161	2.911.642	2.775.080	2.911.241
101	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2018	2.801.809	2.375.798	426.011	39.751	61.546	404.216	15	404.201	109.890	294.311	8.947	303.258	293.916	302.837
102	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2018	1.417.420	1.240.026	177.394	21.476	15.351	183.519	-	183.519	47.542	135.977	(4.032)	131.945	137.433	133.399
103	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2018	2.799.967	2.657.431	142.536	154.756	16.736	280.556	-	280.556	24.923	255.633	(2.608)	253.025	263.536	260.928



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 566 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 14.B

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN LAIN	ERIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
104	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2018	561.706	486.177	75.529	32.109	28.065	79.573	18.419	61.154	(152)	61.306	(582)	60.724	61.306	60.724
105	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2018	6.824.001	6.292.565	531.436	197.783	211.555	517.664	76.004	441.660	12.860	428.800	61.779	490.579	426.077	467.878
106	PT Iglas (Persero)	Audited 2018	690	6.259	(5.569)	2.849	57.138	(59.857)	48.422	(108.280)	(23.662)	(84.618)	-	(84.618)	(84.618)	(84.618)
107	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Audited 2018	325.164	321.660	3.504	8.526	10.503	1.527	-	1.527	841	686	1.418	2.104	686	2.104
108	PT Primissima (Persero)	Audited 2018	168.227	152.222	16.005	-	14.750	1.255	-	1.255	212	1.043	33.399	34.442	1.043	34.442
109	PT Survai Udara Pemas (Persero)	Audited 2018	53.710	53.851	(141)	11.753	533	11.079	8.163	2.916	754	2.162	-	2.162	1.958	1.958
110	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2018	159.101	162.943	(3.842)	434	5.679	(9.087)	-	(9.087)	(2.436)	(6.651)	-	(6.651)	(6.651)	(6.651)
111	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2018	172.695	188.217	(15.522)	5.463	8.692	(18.751)	56.365	(75.116)	-	(75.116)	-	(75.116)	(75.116)	(75.116)
112	PT Kertas Lepas (Persero)	TW III / 2018	1.515	16.917	(15.402)	19.979	-	4.577	-	4.577	-	4.577	-	4.577	4.577	4.577
113	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)															
	TOTAL		2.360.159.500	2.072.605.898	287.553.602	58.060.194	30.350.599	315.263.198	66.998.943	248.264.255	94.088.971	154.175.283	(10.267.201)	143.350.690	138.114.838	127.510.497



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 567 -

**IKHTISAR LK
PERUSAHAAN NEGARA
DI BAWAH KEMENKEU**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 568 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 15.A

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Labar (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	Labar (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Labar (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Labar (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Labar (Rugi) Komprehensif	Labar (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Non Pengendali	Labar (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 - 6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited 2018	4.008.063.076.873	2.188.192.000.120	1.819.871.076.753	22.702.098.036	27.278.444.666	1.815.294.730.123	-	1.815.294.730.123	284.184.774.358	1.531.109.955.765	(5.373.253.334)	1.525.736.702.431	1.531.109.955.765	1.525.736.702.431
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited 2018	834.251.967.000	356.786.856.000	477.465.011.000	-	-	477.465.011.000	-	477.465.011.000	6.384.835.000	471.080.176.000	(140.702.373.000)	330.377.803.000	471.080.176.000	330.377.803.000
3	PT Sarana Multiguna Finansial	Audited 2018	1.345.406.000.000	851.572.000.000	493.834.000.000	-	-	493.834.000.000	-	493.834.000.000	57.281.000.000	436.543.000.000	(38.476.000.000)	398.067.000.000	436.543.000.000	398.067.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited 2018	783.548.583.858	526.252.737.200	257.296.846.658	39.067.680.604	52.312.868.983	244.051.658.279	-	244.051.658.279	73.712.757.804	170.338.900.475	40.186.691	170.379.087.166	158.977.295.813	159.014.802.052
			6.971.270.627.731	3.922.803.693.320	3.048.466.934.411	61.769.778.640	79.591.313.649	3.030.645.399.402	-	3.030.645.399.402	421.573.367.162	2.609.072.032.240	(184.511.439.643)	2.424.560.592.597	2.597.710.427.578	2.413.196.307.483



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 569 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 15.B

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPVBD	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7 = 5 + 6)	(8)	(9)	(10 = 8 + 9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15)	(17)	(18 = 16 + 17)	(19)	(20 = 18 x 19)
1	PT Sawana Multi Infrastruktur	Audited 2018			62.493.180.581.375			26.917.300.925.198	30.516.600.000.000			507.343.678.196	4.551.945.977.983	35.675.889.858.178		35.675.889.858.179	100,00	35.675.889.858.179
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited 2018			10.620.915.509.000			140.244.832.000	8.000.000.000.000			(110.532.768.000)	2.591.203.445.000	10.480.670.877.000		10.480.670.877.000	100,00	10.480.670.877.000
3	PT Sarana Multiinfra Finansial	Audited 2018			19.491.557.000.000			11.305.635.000.000	8.000.000.000.000			(28.383.000.000)	2.215.305.000.000	8.185.922.000.000		8.185.922.000.000	100,00	8.185.922.000.000
4	PT Gas Duta Energi	Audited 2018	676.127.451.745	3.000.148.418.863	3.676.275.870.708	257.126.207.877	606.803.347.703	863.928.655.380	3.275.443.770.000				(463.097.454.672)	2.812.346.315.328		2.812.346.315.328	93,33	2.624.752.816.696
			676.127.451.745	3.000.148.418.863	96.281.938.961.083	257.126.207.877	606.803.347.703	39.227.110.312.576	47.792.043.770.000			367.427.910.196	8.896.356.968.311	57.054.828.648.507		57.054.828.648.507		58.887.245.149.275



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 570 -

**LAPORAN PMN PADA
LEMBAGA KEUANGAN
INTERNASIONAL**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 571 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 16

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2018 (Audited)

NO	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah			Surat hutang	
			USD	IDR	Utang dalam MUA	Utang dalam IDR
A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional						
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.822.482.670.109	
	World Bank Group					
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD	167.203.427,47	2.421.272.833.205		
3	International Development Association (IDA)	USD	34.411.001,07	498.305.706.424		5.237.901.545
4	International Finance Corporation (IFC)	USD	31.602.000,00	457.628.562.000		
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3.797.820,00	54.996.231.420	USD	1.135.018
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	136.086.967,25	2.740.795.601.663		
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	USD	2.060.000,00	29.830.860.000		
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Foreign Trade (IIFIT)	ID	125.140,32	2.520.329.798		
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD	71.959.000,00	1.042.038.279.000		
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2018)	EUR	223.450,00	18.599.791.519	EUR	223.450
		USD	1.028.901,00			3.700.282.430
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	16.305.864,78	236.125.227.879		
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	12.600.000,00	182.460.600.000		
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD	537.680.000,00	7.786.144.080.000		
	Jumlah*		425.535.557,57	878.648.014,32	21.293.200.773.016	
PMN Lainnya						
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD	120.000.000,00	1.737.720.000.000		
16	International Rubber Consortium Limited	USD	4.000.000,00	57.924.000.000		
	Jumlah		124.000.000,00	1.795.644.000.000		
	Jumlah		425.535.557,57	1.002.648.014,32	23.088.844.773.016	25.374.379.633

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1,39079
2. Kurs Euro to IDR 16.559,75
3. Kurs USD to IDR Rp 14.481
4. Kurs Islamic Dinar (ID) to IDR Rp 20.140

*Selisih jumlah antara Lampiran dengan CaLK sebesar Rp7.240 akibat pembulatan kurs mata uang asing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 572 -

IKHTISAR LK NON BUMN (MINORITAS)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 573 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 17.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2018	758.903	600.645	158.258	22.007	-	180.265	2.297	177.968	16.304	161.664	(5.145)	156.519	161.682	156.537
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2018	320.435	171.848	148.587	13.560	21.827	140.320	-	140.320	24.092	116.228	(44)	116.184	116.228	116.184
3	PT Nindya Karya	Audited 2018	6.226.913	5.834.721	392.192	173.626	219.593	346.225	72.837	273.388	1.207	272.181	178	272.359	271.522	271.772
4	PT Perkebunan Nusantara I	unaudited 2018	834.095	818.241	15.854	9.157	47.130	(22.119)	119.821	(141.940)	-	(141.940)	-	(141.940)	(141.942)	(113.781)
5	PT Perkebunan Nusantara II	unaudited 2018	1.225.668	1.123.108	102.560	269.800	119.026	253.334	173.700	79.634	-	79.634	265.526	345.160	345.450	(220.483)
6	PT Perkebunan Nusantara IV	unaudited 2018	5.200.019	4.103.381	1.096.638	139.255	105.384	1.130.509	305.532	824.977	265.341	559.636	320.649	880.285	924.142	547.073
7	PT Perkebunan Nusantara V	unaudited 2018	4.907.512	4.365.546	541.966	-	-	541.966	219.815	322.151	80.897	241.254	304.579	545.833	545.833	203.457
8	PT Perkebunan Nusantara VI	unaudited 2018	1.422.855	1.237.011	185.844	24.955	18.463	192.336	90.283	102.053	30.962	71.091	61.860	132.951	137.408	55.935
9	PT Perkebunan Nusantara VII	unaudited 2018	2.897.762	3.019.623	(121.861)	122.184	-	323	546.030	(545.707)	5.165	(550.872)	1.061.256	510.384	510.537	(232.591)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	unaudited 2018	1.445.775	1.662.723	(216.948)	1.736.841	95.678	1.424.215	230.990	1.193.225	18.462	1.174.763	4.959.572	6.134.335	6.134.279	(295.473)
11	PT Perkebunan Nusantara IX	unaudited 2018	986.460	1.282.401	(295.941)	121.789	-	(174.152)	152.032	(326.184)	-	(326.184)	97.922	(228.262)	(228.262)	(193.277)
12	PT Perkebunan Nusantara X	unaudited 2018	2.726.459	2.479.627	246.832	153.713	119.888	280.657	124.342	156.315	51.207	105.108	106.371	211.479	202.999	53.458
13	PT Perkebunan Nusantara XI	unaudited 2018	1.735.330	1.801.900	(66.570)	89.613	12.093	10.950	151.685	(140.735)	(4.488)	(136.247)	-	(136.247)	(136.437)	(77.053)
14	PT Perkebunan Nusantara XII	unaudited 2018	1.148.230	1.018.532	129.698	146.978	101.768	174.908	166.757	8.151	5.878	2.273	87.144	89.417	89.741	(73.434)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018	1.392.478	1.663.340	(270.862)	50.915	98.618	(318.565)	365.982	(684.547)	1.944	(686.491)	221.784	(464.707)	(468.670)	(381.397)
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	unaudited 2018	608.624	726.903	(118.279)	69.468	-	(48.811)	141.511	(190.322)	-	(190.322)	32.909	(157.413)	(157.413)	(152.962)
17	PT Rekeyasa Industri	unaudited 2018	4.914.923	4.571.474	343.449	50.343	18.784	375.008	174.223	200.785	-	200.785	36.140	236.925	184.237	220.377
18	PT PANN Pembinaan Maritim	unaudited 2018	13.659	152.350	(138.691)	199.512	18.405	42.416	-	42.416	41.005	1.411	-	1.411	1.411	1.411
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2018	23.139.551	24.888.440	(1.748.889)	1.360.299	149.894	(538.484)	2.125.059	(2.663.543)	(578.484)	(2.085.059)	223.925	(1.861.134)	(2.403.843)	(2.181.969)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 574 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 17.A

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10+11	13	14
20	PT Bank Bukopin Tbk	Audited 2018	7.980.892	8.457.928	(477.036)	855.041	161.670	216.335	-	216.335	26.365	189.970	188.966	378.936	189.595	378.410
21	PT Socfindo	Audited 2017	2.440.713	1.425.743	1.014.970	21.523	-	1.036.493	-	1.036.493	262.946	773.547	(9.154)	764.393	773.547	764.393
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2017	905.384	839.664	65.720	16.142	-	81.862	-	81.862	12.529	69.333	-	69.333	69.333	69.333
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2017	911.761	723.315	188.446	24.552	10.503	202.495	3.169	199.326	69.544	129.782	(5.016)	124.766	129.782	124.766
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	-	752	(752)	1.614	-	862	-	862	232	630	-	630	631	631
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2018	21.166.993	15.218.740	5.948.253	1.013.365	-	6.961.618	103.543	6.858.075	1.736.963	5.121.112	740.459	5.861.571	5.023.946	5.764.405
26	PT Timah Tbk	Audited 2018	11.049.946	10.303.124	746.822	324.301	(43.464)	1.114.587	304.641	809.946	191.669	618.277	104.885	723.162	531.359	636.244
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2018	25.241.267	23.388.540	1.852.727	487.333	520.228	1.819.832	554.331	1.265.501	391.075	874.426	422.178	1.296.604	874.425	1.296.603
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2018	56.045.322	47.066.595	8.978.727	2.896.591	1.183.503	10.691.815	2.221.820	8.469.995	3.189.672	5.280.323	(402.615)	4.877.708	4.416.589	4.004.967
29	PT Istaka Karya (Persero)	Audited 2018	418.488	385.190	33.298	3.382	1.311	35.369	7.721	27.648	7.207	20.441	-	20.441	20.441	20.441



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 575 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 17.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=12x15
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	unaudited 2018	584.826	290.800	875.626	70.491	31.484	101.975	200.000	443	-	(5.603)	578.808	773.648	3	773.651	50,00%	386.824.000.000
2	PT Jakarta Industrial Estate Palodagung	unaudited 2018	428.720	228.569	657.289	133.694	7.560	141.254	200.000	-	-	(67)	316.102	516.035	-	516.035	50,00%	258.017.500.000
3	PT Nindya Karya	unaudited 2018	4.517.913	1.173.088	5.691.001	3.667.131	511.824	4.178.955	559.497	-	-	420.954	514.459	1.494.910	17.136	1.512.046	1,00%	59.500.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara I	unaudited 2018	186.794	2.284.318	2.481.112	698.279	1.641.042	2.339.321	160.997	720.201	-	38.150	(777.802)	141.546	245	141.791	24,00%	38.841.000.000
5	PT Perkebunan Nusantara II	unaudited 2018	498.329	6.327.028	6.825.357	3.363.007	1.672.321	5.035.328	327.606	-	-	4.128.574	(2.667.630)	1.788.550	1.479	1.790.029	10,00%	32.761.000.000
6	PT Perkebunan Nusantara IV	unaudited 2018	1.874.775	15.079.692	16.954.467	2.093.968	7.199.162	9.293.130	2.942.116	-	-	2.609.089	1.957.964	7.509.169	152.168	7.661.337	10,00%	294.212.000.000
7	PT Perkebunan Nusantara V	unaudited 2018	1.260.216	7.783.088	9.043.304	1.387.133	4.919.433	6.306.566	1.313.322	-	-	1.106.384	317.031	2.736.737	1	2.736.738	10,00%	131.332.000.000
8	PT Perkebunan Nusantara VI	unaudited 2018	428.967	3.726.665	4.155.632	749.258	1.791.410	2.540.668	653.293	334	-	649.287	307.504	1.610.418	4.546	1.614.964	10,00%	65.329.000.000
9	PT Perkebunan Nusantara VII	unaudited 2018	1.202.828	11.741.703	12.944.531	3.650.946	6.741.480	10.392.426	1.401.223	8.889	-	4.511.827	(3.372.185)	2.549.754	2.351	2.552.105	10,00%	140.122.000.000
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	unaudited 2018	842.527	14.637.057	15.479.584	1.881.569	2.438.161	4.319.730	930.302	-	-	4.954.123	5.273.673	11.158.098	1.756	11.159.854	13,00%	122.528.000.000
11	PT Perkebunan Nusantara IX	unaudited 2018	1.422.828	3.215.739	4.638.567	2.464.727	725.095	3.189.822	1.599.815	-	-	1.522.007	(1.673.077)	1.448.745	-	1.448.745	10,00%	159.981.000.000
12	PT Perkebunan Nusantara X	unaudited 2018	2.538.613	10.667.074	13.205.687	1.749.507	2.195.427	3.944.934	1.845.596	-	-	6.843.562	519.827	9.208.985	51.768	9.260.753	10,00%	184.560.000.000
13	PT Perkebunan Nusantara XI	unaudited 2018	1.393.912	6.306.035	7.699.947	2.032.820	2.129.222	4.162.042	1.168.481	105	-	2.405.153	(36.024)	3.537.715	190	3.537.905	10,00%	116.848.000.000
14	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018	1.217.401	10.170.480	11.387.881	2.407.550	2.240.287	4.647.837	1.272.976	-	-	5.322.782	139.627	6.735.385	4.659	6.740.044	10,00%	127.298.000.000
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	unaudited 2018	443.398	4.643.865	5.087.263	2.359.280	3.985.922	6.345.202	1.029.738	-	-	(286.978)	(2.133.658)	(1.390.898)	132.959	(1.257.939)	10,00%	102.974.000.000
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	unaudited 2018	591.505	1.672.458	2.263.963	1.007.642	1.810.551	2.818.193	235.001	-	-	1.218.522	(2.007.753)	(554.230)	-	(554.230)	10,00%	23.500.000.000
17	PT Rekeyasa Industri	SMT I / 2018	5.518.500	2.188.297	7.706.797	3.880.863	3.067.132	6.947.995	450.000	1.035	-	226.177	59.083	736.295	22.507	758.802	4,97%	22.366.000.000
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	unaudited 2018	327.695	388.189	715.884	309.991	-	309.991	678.413	724.338	-	-	(996.858)	405.893	-	405.893	0,00%	1.000.000
19	PT Indosat, Tbk	TW III / 2018	7.906.525	45.233.062	53.139.587	21.040.365	19.962.975	41.003.340	543.393	1.546.587	-	587.121	8.497.003	11.174.104	962.143	12.136.247	14,29%	77.662.499.900
20	PT Bank Bukopin Tbk	TW III / 2018	86.272.075	9.371.848	95.643.923	83.434.091	3.615.546	87.049.637	1.376.437	2.923.938	-	1.327.037	2.944.853	8.572.265	22.021	8.594.286	11,44%	150.785.787.600
21	PT Socfindo	Audited 2017	433.932	1.423.025	1.856.957	483.457	575.517	1.058.974	42.250	3.671	-	752.062	797.983	-	797.983	10,00%	4.225.000.000	
22	PT Asean Buntalu Fertilizer	Audited 2016	978.516	2.670.815	3.649.330	210.088	462.601	672.670	1.000.500	-	-	1.976.161	2.976.661	-	2.976.661	13,00%	136.227.000.000	
23	PT Prasada Pannamah Lembang Industri	Audited 2017	962.967	541.319	1.504.286	190.583	122.915	313.498	50.888	(22.637)	-	408.714	753.823	1.190.788	-	1.190.788	5,00%	2.478.911.250
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015	21.461	304	21.765	78	-	78	8.656	-	-	-	13.031	21.687	-	21.687	20,36%	1.762.087.000
25	PT Bukit Asam Tbk	TW III / 2018	11.739.344	12.433.589	24.172.933	4.935.696	2.967.541	7.903.237	1.152.066	(2.271.151)	-	319.554	16.814.700	16.015.169	254.527	16.269.696	0,00%	500
26	PT Timah Tbk	TW III / 2018	9.204.287	5.913.661	15.117.948	6.176.251	2.419.816	8.596.067	372.388	55	-	(25.117)	6.174.365	6.521.691	190	6.521.881	0,00%	50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 576 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 17.B

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2018**

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=12x15
27	PT Aneka Tambang Tbk	TW III / 2018	8.498.443	24.807.948	33.306.391	5.511.745	8.055.416	13.567.161	2.403.076	3.934.833	-	2.810.123	10.591.179	19.739.211	19	19.739.230	0,00%	100
28	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	TW III / 2018	35.820.346	79.148.280	114.968.626	23.235.127	45.366.931	68.602.058	4.981.739	(6.770.954)	-	(876.202)	39.947.287	37.281.870	9.084.699	46.366.569	0,00%	100
29	PT Istaka Karya (Persero)	Audited 2018	411.483	281.824	693.307	502.109	-	502.109	50.000	602.898	-	(482.141)	20.441	191.198	-	191.198,01	7,66%	50.000.000,000
Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Ekuitas																	644.841.500,000	
Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																	2.045.094.286,500	
Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																	2.689.935.786,500	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 577 -

IKHTISAR LK LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 578 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 *(Audited)*

LAMPIRAN 18

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2018 *(AUDITED)***

status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)
Audited 2018	4.000.000.000.000	14.634.820.441.000	19.890.741.000	87.464.519.773.000	102.119.230.955.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 579 -

ASET TETAP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 580 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	343.728.232.605	343.728.232.605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	188.409.157.000	188.409.157.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.989.704.672.051	1.857.964.547.083
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.864.312.403.867	4.793.673.683.460
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.844.291.889.173	3.830.796.872.345
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	87.070.470.339.603	87.074.543.797.603
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.253.066.003.779	2.276.589.447.779
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	11.502.743.450.419	11.066.986.986.557
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	294.345.486.868.825	296.536.866.272.608
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.625.444.631.053	12.672.489.520.638
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	19.436.535.504.094	19.349.423.511.784
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	11.608.949.370.893	11.628.839.367.360
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.620.380.005.603	2.575.568.019.159
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.276.347.034.160	3.737.148.692.766
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	74.768.518.687.719	75.742.121.286.401
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.040.119.575.914	4.207.264.327.026
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.404.565.123.149	15.781.343.836.355
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	17.129.404.796.332	17.432.422.531.102
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.622.328.251.528	1.625.315.206.554
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.495.475.164.694	3.556.821.561.447
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.365.498.329.641	2.662.177.738.345
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.444.400.900.882	2.703.873.839.795
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	269.138.602.834.438	292.480.373.394.093
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.420.230.276.062	1.420.889.583.062
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.198.404.650	273.198.404.650
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	76.039.000.565.104	58.651.792.675.836
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	876.321.187.609	1.183.259.332.609
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	294.120.000	294.120.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.651.451.539.479	1.545.973.041.479
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	446.959.267.105	446.514.387.105
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	772.800.959.901	773.225.293.257
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	180.483.709.805	179.478.885.500
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.040.367.985.540	2.027.972.861.507
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	326.366.052.000	326.366.052.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	998.225.868.635	998.033.700.475
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	41.953.588.425.160	45.787.314.955.912
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	622.657.329.807	555.367.081.351
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	100.600.000.000	100.600.000.000
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	333.830.014.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	324.379.067.106	125.751.844.930
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	122.404.255.697	120.992.735.697



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 581 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	372.869.158.878	377.635.858.956
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	860.125.687.828	846.738.707.121
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	585.704.428.389	606.358.583.625
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	89.075.216.326	89.075.216.326
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	81.705.022.040	80.978.000.000
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.201.291.154.537	6.846.181.762.046
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.782.773.318.225	1.782.773.318.225
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	781.190.927.385	840.070.594.665
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	325.015.190.655	320.651.455.392
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	27.226.540.000	27.226.540.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11.250.883.554	11.250.883.554
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	515.131.306.413	515.131.306.413
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	216.312.132.396	216.312.132.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	440.002.155.618	444.447.889.239
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.015.394.877.901	1.040.119.546.830
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	937.546.345.302	888.598.843.330
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	336.575.243.520	336.575.243.520
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	515.234.741.435	453.822.133.060
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	69.139.276.742	57.502.052.742
68	100	KOMISI YUDISIAL	48.799.520.400	47.188.389.400
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	113.143.589.776	113.143.589.776
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	43.853.876.181	44.748.936.081
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	3.520.341.767.980
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	116.490.960.000	116.490.960.000
73	107	BADAN SAR NASIONAL	314.683.285.364	303.615.044.275
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.987.200.000	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	471.736.231.125	429.505.041.845
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	7.315.400.000	7.315.400.000
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	21.822.314.130.937	21.830.341.424.135
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	38.261.256.000	1.977.000.000
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	221.628.762	221.628.762
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.585.286.126.373	2.639.261.998.650
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.307.355.554.899	3.348.951.908.778
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	597.525.625.314	588.009.096.314
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	6.737.260.600	5.544.500.600
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA K/L			1.019.501.217.507.960	1.037.753.703.553.270
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	4.016.775.779	4.016.775.779
		Penyesuaian (Eliminasi) pada SPAN	(857.211.200.000)	-
TOTAL			1.018.648.023.083.740	1.037.757.720.329.050



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 582 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	157.535.478.383	(127.882.666.316)	29.652.812.067	148.831.544.599	(120.071.320.509)	28.760.224.090
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.320.157.553.414	(929.544.472.379)	390.613.081.035	1.188.424.521.149	(804.093.379.649)	384.331.141.500
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.971.544.524.387	(1.630.757.004.133)	340.787.520.254	1.961.947.628.280	(1.502.512.437.022)	459.435.191.258
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.917.147.390.887	(2.301.314.727.130)	615.832.663.757	2.703.706.525.961	(2.098.944.069.588)	604.762.456.373
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.487.200.803.633	(2.064.770.585.061)	1.422.430.218.572	2.829.780.003.481	(1.792.932.045.372)	1.036.847.958.109
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.622.893.042.849	(2.129.636.610.118)	1.493.256.432.731	3.078.891.846.102	(1.851.721.409.808)	1.227.170.436.294
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.963.315.687.798	(2.679.559.533.823)	283.756.153.975	2.916.134.984.443	(2.580.034.879.096)	336.100.105.347
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.160.421.214.721	(1.467.545.543.785)	692.875.670.936	1.856.678.982.918	(1.298.774.583.385)	557.904.399.533
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	227.303.639.687.598	(108.488.012.725.453)	118.815.626.962.145	191.232.696.715.953	(91.801.816.953.578)	99.430.879.762.375
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.680.447.076.850	(4.407.498.695.412)	2.272.948.381.438	5.714.938.492.900	(3.602.514.871.035)	2.112.423.621.865
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.107.977.235.913	(10.861.430.455.942)	3.246.546.779.971	13.627.399.300.896	(10.269.980.408.649)	3.357.418.892.247
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.225.890.240.250	(4.700.564.104.242)	1.525.326.136.008	6.007.283.535.144	(4.270.325.461.087)	1.736.958.074.057
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.838.718.583.443	(1.953.087.290.290)	885.631.293.153	2.646.562.621.961	(1.741.695.049.720)	904.867.572.241
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.134.852.582.106	(3.966.609.219.808)	1.168.243.362.298	5.052.666.303.415	(3.663.751.438.234)	1.388.914.865.181
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	49.051.998.331.321	(25.733.040.571.422)	23.318.957.759.899	43.493.459.809.414	(21.599.967.169.435)	21.893.492.639.979
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.417.235.655.314	(2.446.822.749.458)	970.412.905.856	3.192.976.280.873	(2.269.707.578.060)	923.268.702.813
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	19.931.915.819.977	(14.702.932.779.488)	5.228.983.040.489	30.298.593.008.907	(22.794.222.198.080)	7.504.370.810.827
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	8.666.975.027.179	(6.587.245.554.537)	2.079.729.472.642	7.863.111.088.549	(5.783.375.986.927)	2.079.735.101.622



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 583 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.493.107.556.237	(1.515.160.349.103)	977.947.207.134	2.333.052.146.841	(1.328.154.058.006)	1.004.898.088.835
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.788.554.554.510	(1.402.111.593.278)	386.442.961.232	1.751.270.679.842	(1.237.589.909.574)	513.680.770.268
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.373.676.281.912	(2.444.112.122.135)	929.564.159.777	3.196.243.543.792	(2.330.361.494.746)	865.882.049.046
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.631.552.945.324	(3.728.287.515.633)	1.903.265.429.691	5.620.044.740.193	(3.480.878.317.492)	2.139.166.422.701
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	13.109.431.069.667	(7.885.247.316.585)	5.224.183.753.082	10.907.002.968.381	(6.801.456.896.357)	4.105.546.072.024
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	125.456.875.877	(94.025.592.776)	31.431.283.101	122.823.118.743	(82.707.456.693)	40.115.662.050
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	64.652.995.149	(49.172.886.473)	15.480.108.676	59.427.718.065	(43.394.951.212)	16.032.766.853
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	75.422.307.424	(57.514.810.127)	17.907.497.297	79.588.439.223	(56.808.098.805)	22.780.340.418
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	471.713.974.169	(333.857.259.112)	137.856.715.057	409.256.751.706	(293.230.345.226)	116.026.406.480
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	122.026.524.215	(92.638.266.811)	29.388.257.404	114.169.368.148	(82.094.961.098)	32.074.407.050
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	23.585.360.888.712	(17.122.789.183.343)	6.462.571.705.369	22.043.852.287.476	(15.382.916.956.126)	6.660.935.331.350
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	406.599.540.127	(347.934.033.813)	58.665.506.314	400.639.177.271	(324.419.005.264)	76.220.172.007
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	95.571.541.415	(69.673.879.550)	25.897.661.865	94.259.793.486	(55.027.890.538)	39.231.902.948
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	103.103.352.431	(70.059.645.563)	33.043.706.868	90.317.431.592	(62.471.363.229)	27.846.068.363
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	10.505.136.328.482	(5.393.001.721.005)	5.112.134.607.477	8.951.547.860.450	(3.777.863.767.557)	5.173.684.092.893



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 584 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.793.202.944.519	(5.422.295.375.071)	1.370.907.569.448	6.532.100.035.646	(4.686.677.387.395)	1.845.422.648.251
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	158.821.733.247	(98.335.210.140)	60.486.523.107	159.188.547.377	(67.804.455.621)	91.384.091.756
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.891.531.310.334	(1.497.332.102.001)	394.199.208.333	1.737.061.101.350	(1.349.822.429.256)	387.238.672.094
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	332.663.047.278	(219.799.543.037)	112.863.504.241	273.023.533.027	(166.253.412.340)	106.770.120.687
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.618.852.315.583	(1.819.887.630.853)	798.964.684.730	2.386.990.201.224	(1.609.216.863.801)	777.773.337.423
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	558.958.560.402	(249.337.171.171)	309.621.389.231	496.477.053.115	(223.558.444.571)	272.918.608.544
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.146.630.406.292	(1.434.297.408.422)	712.332.997.870	2.782.208.505.075	(1.325.048.895.769)	1.457.159.609.306
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	110.053.992.531.197	(54.943.646.544.149)	55.110.345.987.048	86.798.752.155.212	(40.142.958.672.907)	46.655.793.482.305
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.434.616.953.555	(1.447.632.923.296)	986.984.030.259	2.086.540.043.491	(1.246.620.404.822)	839.919.638.669
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	350.702.533.884	(257.273.579.791)	93.428.954.093	298.742.412.095	(217.580.784.725)	81.161.627.370
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	232.085.022.345	(208.364.527.467)	23.720.494.878	232.559.785.523	(203.116.450.159)	29.443.335.364
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.026.684.912.696	(1.107.894.183.748)	918.790.728.948	1.706.969.603.844	(852.616.803.434)	854.352.800.410
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	344.347.161.374	(229.816.758.575)	114.530.402.799	331.245.725.328	(194.282.897.487)	136.962.827.841
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	454.276.912.620	(358.991.953.504)	95.284.959.116	422.748.982.559	(332.435.367.149)	90.313.615.410
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	27.794.544.161	(24.854.145.591)	2.940.398.570	25.016.080.524	(21.490.245.373)	3.525.835.151
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	4.158.147.493.545	(3.135.554.878.698)	1.022.592.614.847	3.633.316.469.312	(2.644.166.297.028)	989.150.172.284
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.304.109.267.235	(727.024.679.172)	577.084.588.063	832.980.215.769	(614.917.078.109)	218.063.137.660



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 585 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (<i>AUDITED</i>)			31 DESEMBER 2017 (<i>AUDITED</i>)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	255.815.979.563	(222.332.659.936)	33.483.319.627	243.000.749.346	(209.000.026.524)	34.000.722.822
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	118.793.778.109	(87.175.449.795)	31.618.328.314	110.597.292.348	(75.996.128.595)	34.601.163.753
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.723.437.864.534	(1.127.698.823.009)	595.739.041.525	1.436.999.731.660	(1.003.749.463.150)	433.250.268.510
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.013.923.992.497	(595.864.147.550)	418.059.844.947	876.178.559.164	(536.294.889.043)	339.883.670.121
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.994.893.473.642	(1.876.960.845.823)	1.117.932.627.819	2.754.354.375.370	(1.650.798.131.303)	1.103.556.244.067
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.368.808.513.310	(755.640.242.292)	613.168.271.018	1.202.377.314.869	(630.917.040.610)	571.460.274.259
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.034.767.353.697	(776.592.235.901)	258.175.117.796	923.707.281.421	(691.850.436.854)	231.856.844.567
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	41.509.541.786	(29.926.011.659)	11.583.530.127	42.750.590.319	(26.795.023.959)	15.955.566.360
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120.042.125.093	(78.128.930.239)	41.913.194.854	115.518.436.047	(71.502.476.146)	44.015.959.901
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	176.039.169.071	(149.789.427.780)	26.249.741.291	171.006.618.574	(143.363.945.116)	27.642.673.458
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	196.135.354.724	(170.519.136.473)	25.616.218.251	195.093.264.253	(162.069.997.505)	33.023.266.748
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	539.281.544.640	(428.443.721.524)	110.837.823.116	496.480.147.511	(379.113.220.088)	117.366.927.423
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	381.726.544.930	(300.753.302.051)	80.973.242.879	328.936.657.011	(273.420.280.814)	55.516.376.197
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	771.053.591.013	(645.245.133.726)	125.808.457.287	738.830.977.606	(619.430.173.926)	119.400.803.680
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	682.617.192.748	(432.200.825.066)	250.416.367.682	501.711.614.402	(387.062.309.743)	114.649.304.659
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	605.972.934.481	(363.363.123.793)	242.609.810.688	555.634.140.026	(290.926.262.647)	264.707.877.379
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	137.187.762.130	(117.557.831.415)	19.629.930.715	140.141.212.363	(116.113.429.045)	24.027.783.318
68	100	KOMISI YUDISIAL	49.765.110.623	(43.570.068.789)	6.195.041.834	48.589.855.918	(40.013.473.449)	8.576.382.469



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 586 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/JL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.301.094.714.025	(1.006.930.866.457)	294.163.847.568	1.295.301.771.927	(829.678.734.347)	465.623.037.580
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	167.841.381.133	(138.085.844.574)	29.755.536.559	170.630.985.540	(137.463.308.040)	33.167.677.500
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	151.490.237.335	(91.413.879.691)	60.076.357.644
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	208.050.847.316	(129.336.280.053)	78.714.567.263	186.982.734.923	(90.048.170.378)	96.934.564.545
73	107	BADAN SAR NASIONAL	8.601.402.036.170	(4.661.260.231.535)	3.940.141.804.635	7.910.772.864.082	(3.772.425.810.436)	4.138.347.053.646
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	28.161.334.109	(20.260.272.594)	7.901.061.515	25.745.668.889	(18.816.404.704)	6.929.264.185
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	33.262.317.682	(20.967.135.230)	12.295.182.452	22.233.577.944	(19.008.186.746)	3.225.391.198
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	41.357.097.591	(29.564.103.963)	11.792.993.628	40.151.199.049	(26.838.741.033)	13.312.458.016
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	79.414.853.670	(56.123.409.898)	23.291.443.772	76.974.049.537	(50.492.711.876)	26.481.337.661
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.221.776.217.713	(850.616.980.842)	371.159.236.871	1.063.527.969.569	(743.101.607.819)	320.426.361.750
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	317.333.696.415	(168.724.029.178)	148.609.667.237	313.135.625.991	(103.652.918.477)	209.482.707.514
80	114	SEKRETARIAT KABINET	55.019.747.053	(43.100.096.667)	11.919.650.386	54.506.077.745	(42.324.283.490)	12.181.794.255
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	354.870.590.962	(135.443.539.890)	219.427.051.072	174.727.792.977	(100.113.085.724)	74.614.707.253
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.358.515.800.522	(1.129.616.551.398)	228.899.249.124	1.285.833.879.179	(1.100.042.928.399)	185.790.950.780
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.532.465.596.166	(1.367.020.241.310)	1.165.445.354.856	1.764.777.955.416	(1.263.802.256.292)	500.975.699.124
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	57.636.862.010	(40.341.576.809)	17.295.285.201	55.795.062.810	(35.431.505.857)	20.363.556.953



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 587 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.347.247.788.067	(656.550.790.187)	690.696.997.880	1.192.231.455.635	(549.410.961.343)	642.820.494.292
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	100.422.974.762	(43.780.967.605)	56.642.007.157	59.069.896.632	(20.990.790.421)	38.079.106.211
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	28.091.846.029	(12.445.615.436)	15.646.230.593	24.406.262.576	(6.361.962.883)	18.044.299.693
JUMLAH PADA K/L			589.844.387.849.927	(329.678.110.529.237)	260.166.277.320.690	519.473.703.556.589	(287.394.218.557.576)	232.079.484.999.013
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	442.306.166.552	(344.680.350.375)	97.625.816.177	422.386.780.615	(288.090.838.707)	134.295.941.908
TOTAL			590.286.694.016.479	(330.022.790.879.612)	260.263.903.136.867	519.896.090.337.204	(287.682.309.396.283)	232.213.780.940.921



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 588 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	220.385.697.914	(53.307.270.932)	167.078.426.982	207.005.054.808	(47.218.863.812)	159.786.190.996
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	907.534.052.443	(188.580.554.347)	718.953.498.096	885.368.481.115	(162.370.878.565)	722.997.602.550
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.332.971.508.643	(316.182.639.145)	2.016.788.869.498	2.325.635.127.982	(264.185.397.241)	2.061.449.730.741
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.992.652.726.378	(1.572.348.334.794)	6.420.304.391.584	7.555.156.372.496	(1.401.650.266.883)	6.153.506.105.613
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	6.007.786.627.706	(1.251.601.872.108)	4.756.184.755.598	5.839.341.744.774	(1.139.224.734.772)	4.700.117.010.002
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	5.790.344.144.015	(1.748.617.456.319)	4.041.726.687.696	3.697.178.100.803	(1.589.364.908.568)	2.107.813.192.235
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.522.795.952.068	(652.840.708.857)	1.869.955.243.211	2.799.100.959.818	(676.650.608.209)	2.122.450.351.609
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.451.334.088.938	(3.957.710.066.559)	2.493.624.022.379	6.702.165.653.533	(3.826.118.328.110)	2.876.047.325.423
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	44.899.893.872.846	(14.083.695.076.689)	30.816.198.796.157	42.887.557.331.350	(12.832.159.956.366)	30.055.397.374.984
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.457.963.798.623	(2.323.816.547.094)	8.134.147.251.529	11.135.467.855.672	(2.214.457.972.033)	8.921.009.883.639
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.544.545.225.457	(3.755.337.542.619)	10.789.207.682.838	14.271.267.493.102	(3.377.393.779.502)	10.893.873.713.600
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.734.934.884.794	(1.089.264.819.476)	3.645.670.065.318	4.758.157.681.267	(1.029.783.779.916)	3.728.373.901.351
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.675.432.517.112	(390.886.203.044)	1.284.546.314.068	1.515.316.610.965	(352.566.425.628)	1.162.750.185.337
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.166.250.483.575	(598.483.944.019)	1.567.766.539.556	2.163.560.176.324	(528.463.001.881)	1.635.097.174.443
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	25.586.841.177.815	(3.433.685.733.626)	22.153.155.444.189	23.274.257.931.008	(2.821.639.832.359)	20.452.618.098.609
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.004.481.460.948	(932.178.235.827)	4.072.303.225.121	4.719.650.447.399	(847.350.612.257)	3.872.299.835.142
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	13.574.335.256.508	(2.903.594.715.702)	10.670.740.540.806	14.264.231.925.068	(2.744.288.397.671)	11.519.943.527.397
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	26.802.836.201.742	(4.646.032.458.595)	22.156.803.743.147	25.604.968.974.564	(4.289.518.753.369)	21.315.450.221.195
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.442.717.606.755	(277.117.457.764)	1.165.600.148.991	1.435.418.016.658	(260.052.162.477)	1.175.365.854.181
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.513.338.943.015	(361.072.631.791)	1.152.266.311.224	1.510.007.242.771	(318.029.253.097)	1.191.977.989.674
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.397.477.874.437	(455.828.665.741)	1.941.649.208.696	2.232.634.338.395	(403.775.047.886)	1.828.859.290.509
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.103.635.605.049	(603.034.197.284)	3.500.601.407.765	3.894.176.044.395	(546.105.521.470)	3.348.070.522.925
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	17.505.734.217.644	(1.569.561.723.730)	15.936.172.493.914	20.178.006.715.792	(1.690.020.962.088)	18.487.985.753.704
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	8.134.999.202	(920.333.975)	7.214.665.227	5.598.310.526	(860.824.459)	4.737.486.067



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 589 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.C

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	22.785.169.780	(4.100.080.218)	18.685.089.562	22.785.169.780	(3.632.952.978)	19.152.216.802
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	162.802.785.121	(17.750.071.892)	145.052.713.229	162.486.121.051	(14.491.499.398)	147.994.621.653
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.167.697.980.889	(222.582.630.238)	945.115.350.651	865.451.960.378	(206.793.790.658)	658.658.169.720
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	245.548.812.957	(41.869.842.418)	203.678.970.539	196.573.019.634	(37.347.676.623)	159.225.343.011
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	29.801.781.695.588	(4.928.782.106.647)	24.872.999.588.941	27.303.772.194.881	(4.450.828.235.815)	22.852.943.959.066
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	797.166.836.674	(170.319.817.769)	626.847.018.905	854.798.416.600	(154.235.218.889)	700.563.197.711
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	104.426.273.203	(9.288.716.796)	95.137.556.407	104.426.273.203	(7.195.138.738)	97.231.134.465
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	37.572.097.436	(5.808.012.690)	31.764.084.746	33.626.425.495	(4.414.400.195)	29.212.025.300
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	730.064.092.473	(110.438.044.612)	619.626.047.861	578.418.037.421	(91.993.672.774)	486.424.364.647
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.016.402.983.406	(72.388.014.872)	944.014.968.534	983.445.174.536	(51.506.945.658)	931.938.228.878
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.930.243.613.988	(364.456.539.093)	1.565.787.074.895	1.873.467.611.438	(340.215.836.170)	1.533.251.775.268
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	144.131.361.953	(34.504.274.610)	109.627.087.343	137.642.745.900	(29.057.419.254)	108.585.326.646
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.083.541.389.078	(337.182.419.604)	1.746.358.969.474	1.882.135.331.888	(290.114.803.343)	1.592.020.528.545
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	556.219.926.984	(61.462.435.333)	494.757.491.651	553.771.098.393	(47.451.196.201)	506.319.902.192
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	739.117.374.472	(209.055.295.451)	530.062.079.021	750.241.479.014	(193.354.839.431)	556.886.639.583
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	21.137.675.588.196	(4.558.876.072.562)	16.578.799.515.634	17.720.687.344.074	(4.120.803.236.600)	13.599.884.107.474
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	669.133.787.588	(138.352.024.302)	530.781.763.286	641.816.205.428	(164.277.431.690)	477.538.773.738
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	274.667.240.692	(24.927.059.575)	249.740.181.117	252.579.816.384	(19.700.164.644)	232.879.651.740
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	245.317.298.605	(58.887.102.839)	186.430.195.766	245.317.298.605	(51.939.275.882)	193.378.022.723
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.020.982.337.974	(154.539.268.910)	866.443.069.064	951.563.570.792	(136.879.894.907)	814.683.675.885
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	329.194.678.847	(39.039.732.598)	290.154.946.249	330.387.908.090	(35.697.915.518)	294.689.992.572
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	367.230.483.740	(111.690.663.556)	255.539.820.184	340.567.625.332	(101.876.209.897)	238.691.415.435
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	11.440.763.193	(1.144.076.319)	10.296.686.874	13.058.303.193	(1.043.056.439)	12.015.246.754



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 590 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 19.C

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (<i>AUDITED</i>)			31 DESEMBER 2017 (<i>AUDITED</i>)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.060.044.349.465	(224.726.111.508)	835.318.237.957	1.108.913.087.133	(213.478.253.169)	895.434.833.964
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	503.775.867.237	(74.749.011.115)	429.026.856.122	496.220.140.998	(64.883.023.448)	431.337.117.550
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	249.040.949.062	(43.230.167.739)	205.810.781.323	246.873.832.513	(38.873.012.749)	208.000.819.764
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	147.070.688.731	(19.852.382.588)	127.218.306.143	146.085.491.154	(16.926.979.381)	129.158.511.773
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.215.315.192.230	(197.489.134.192)	1.017.826.058.038	1.105.408.347.634	(161.569.479.529)	943.838.868.105
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	607.102.240.600	(258.474.880.040)	348.627.360.560	805.804.854.900	(207.954.029.736)	597.850.825.164
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	882.480.723.826	(181.349.873.405)	701.130.850.421	742.838.607.831	(123.160.064.873)	619.678.542.958
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	317.054.317.655	(83.008.126.628)	234.046.191.027	296.511.486.642	(70.316.901.473)	226.194.585.169
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	113.637.697.525	(27.715.786.908)	85.921.910.617	105.679.034.732	(24.359.563.679)	81.319.471.053
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19.950.542.915	(4.812.747.250)	15.137.795.665	20.103.550.480	(4.504.627.508)	15.598.922.972
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	466.235.260.661	(104.888.123.762)	361.347.136.899	462.280.170.172	(93.030.230.776)	369.249.939.396
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	232.559.835.154	(57.350.517.341)	175.209.317.813	233.874.874.154	(75.927.296.465)	157.947.577.689
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	687.835.852.268	(124.269.328.618)	563.566.523.650	664.526.079.484	(110.320.190.359)	554.205.889.125
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	913.574.996.570	(201.982.264.181)	711.592.732.389	905.663.787.449	(176.299.447.474)	729.364.339.975
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	794.985.145.735	(143.970.715.514)	651.014.430.221	794.505.857.974	(127.457.607.821)	667.048.250.153
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	254.853.529.859	(49.255.433.817)	205.598.096.042	245.333.338.859	(44.000.422.451)	201.332.916.408
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	407.107.703.622	(44.946.939.118)	362.160.764.504	404.563.747.058	(34.569.983.227)	369.993.763.831
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	65.863.779.175	(5.013.541.288)	60.850.237.887	67.600.455.175	(3.714.111.742)	63.886.343.433
68	100	KOMISI YUDISIAL	72.314.003.716	(13.493.236.208)	58.820.767.508	71.676.580.588	(12.046.203.734)	59.630.376.854
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	576.047.389.075	(46.697.340.620)	529.350.048.455	539.690.594.752	(36.152.213.811)	503.538.380.941
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	74.834.040.087	(11.906.893.096)	62.927.146.991	73.374.094.030	(10.509.071.360)	62.865.022.670
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	9.646.391.985	(237.480.480)	9.408.911.505
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	160.657.530.329	(11.037.351.555)	149.620.178.774	160.430.583.711	(7.822.127.627)	152.608.456.084



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 591 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
73	107	BADAN SAR NASIONAL	946.399.056.369	(103.131.248.788)	843.267.807.581	871.645.179.876	(87.502.161.506)	784.143.018.370
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	173.700.000	(45.429.231)	128.270.769	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	36.419.569.236	(3.345.626.821)	33.073.942.415	18.470.776.884	(2.542.362.987)	15.928.413.897
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	30.273.586.663	(2.894.590.367)	27.378.996.296	31.977.517.063	(2.478.612.721)	29.498.904.342
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.233.215.663.807	(188.568.337.618)	1.044.647.326.189	1.062.442.964.853	(171.837.704.041)	890.605.260.812
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	205.269.758.084	(14.835.307.177)	190.434.450.907	163.590.307.114	(11.133.631.431)	152.456.675.683
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.940.294.000	(77.611.760)	1.862.682.240	1.940.294.000	(38.805.880)	1.901.488.120
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	463.272.406.105	(159.301.576.147)	303.970.829.958	445.111.125.952	(148.107.172.858)	297.003.953.094
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	479.810.814.660	(194.357.970.143)	285.452.844.517	592.501.519.758	(181.647.766.883)	410.853.752.875
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.522.249.681.813	(120.080.591.206)	1.402.169.090.607	1.550.241.578.543	(89.340.104.053)	1.460.901.474.490
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	47.107.069.885	(6.237.784.772)	40.869.285.113	47.007.069.885	(5.297.312.232)	41.709.757.653
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			287.027.976.732.583	(61.566.239.473.462)	225.461.737.259.121	275.152.781.045.431	(56.276.139.037.825)	218.876.642.007.606
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	490.017.000	(4.900.170)	485.116.830	-	-	-
TOTAL			287.028.466.749.583	(61.566.244.373.632)	225.462.222.375.951	275.152.781.045.431	(56.276.139.037.825)	218.876.642.007.606



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 592 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.646.277.700	(3.553.308.580)	10.092.969.120	13.646.277.700	(3.200.892.824)	10.445.384.876
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	90.637.956.944	(40.142.772.764)	50.495.184.180	85.649.875.877	(35.643.662.046)	50.006.213.831
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	352.549.239.113	(216.390.289.863)	136.158.949.250	352.210.045.652	(203.330.032.143)	148.880.013.509
4	005	MAHKAMAH AGUNG	249.518.888.772	(96.517.729.176)	153.001.159.596	242.845.274.991	(89.453.541.866)	153.391.733.125
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	66.084.044.018	(39.860.667.266)	26.223.376.752	72.065.373.960	(40.501.407.913)	31.563.966.047
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	814.259.751.249	(514.733.606.903)	299.526.144.346	706.030.462.751	(467.514.250.394)	238.516.212.357
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	284.698.704.165	(122.075.841.748)	162.622.862.417	283.321.001.463	(109.991.065.265)	173.329.936.198
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	45.366.823.820	(39.488.880.748)	5.877.943.072	47.665.251.029	(41.846.666.413)	5.818.584.616
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	11.739.190.777.222	(7.201.855.039.741)	4.537.335.737.481	10.867.833.184.048	(6.773.185.627.655)	4.094.647.556.393
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	74.628.773.346	(48.688.864.957)	25.939.908.389	75.128.078.754	(46.378.170.689)	28.749.908.065
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	492.466.667.314	(191.431.511.743)	301.035.155.571	496.240.136.223	(177.977.779.276)	318.262.356.947
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	608.350.078.280	(267.419.208.831)	340.930.869.449	606.318.041.651	(250.159.940.102)	356.158.101.549
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	39.083.159.489	(14.838.695.711)	24.244.463.778	51.998.623.466	(16.011.633.283)	35.986.990.183
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.625.304.817.685	(361.226.107.241)	1.264.078.710.444	5.819.181.998.686	(732.456.322.764)	5.086.725.675.922
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	109.896.131.855.771	(51.100.510.033.793)	58.795.621.821.978	107.378.546.316.060	(45.175.573.540.813)	62.202.972.775.247
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	253.532.131.731	(112.982.103.721)	140.550.028.010	241.083.683.411	(99.058.055.228)	142.025.628.183
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	659.140.096.700	(322.164.666.134)	336.975.430.566	675.062.859.576	(308.745.534.426)	366.317.325.150
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	852.690.815.796	(223.662.940.060)	629.027.875.736	597.171.065.155	(240.808.398.494)	356.362.666.661
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	87.131.238.977	(62.661.926.117)	24.469.312.860	70.384.152.585	(53.427.066.754)	16.957.085.831
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	116.099.265.531	(54.928.812.462)	61.170.453.069	115.380.301.270	(48.260.685.072)	67.119.616.198
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	366.068.778.168	(161.409.243.755)	204.659.534.413	278.439.235.093	(125.520.345.514)	152.918.889.579
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.867.557.664.078	(1.329.097.279.387)	1.538.460.384.691	2.971.164.972.970	(1.295.206.973.758)	1.675.957.999.212



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 593 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	448.629.109.542.751	(276.172.334.850.102)	172.456.774.692.649	535.321.612.427.100	(240.614.899.608.726)	294.706.712.818.374
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.475.255.400	(542.701.287)	1.932.554.113	2.475.255.400	(478.544.521)	1.996.710.879
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	144.386.000	(33.171.325)	111.214.675	144.386.000	(29.561.675)	114.824.325
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	56.927.687.773	(29.161.163.550)	27.766.524.223	60.913.210.545	(28.941.968.759)	31.971.241.786
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.201.056.420	(987.919.863)	2.213.136.557	3.201.056.420	(899.703.235)	2.301.353.185
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.275.363.488.177	(628.405.530.355)	646.957.957.822	1.266.045.901.613	(612.037.645.046)	654.008.256.567
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	48.254.855.445	(22.103.633.324)	26.151.222.121	49.425.853.297	(20.841.120.705)	28.584.732.592
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.152.456.725	(4.633.723.553)	518.733.172	5.152.456.725	(3.605.557.207)	1.546.899.518
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(603.858.894)	791.357.656	1.395.216.550	(559.128.606)	836.087.944
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	142.624.465.295	(60.540.546.196)	82.083.919.099	150.949.571.850	(61.163.364.890)	89.786.206.960
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37.449.601.826	(12.861.647.553)	24.587.954.273	37.449.601.826	(11.686.681.487)	25.762.920.339
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	-	-	-	-	-
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.507.585.170	(3.153.379.513)	3.354.205.657	6.507.585.170	(2.942.850.366)	3.564.734.804
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	22.816.996.787	(8.898.074.532)	13.918.922.255	22.416.744.583	(8.131.569.681)	14.285.174.902
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	54.724.368.942	(957.853.858)	53.766.515.084	54.724.368.942	(923.932.208)	53.800.436.734
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.262.337.137	(12.101.181.807)	19.161.155.330	30.161.281.609	(11.237.338.868)	18.923.942.741
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	847.085.525.229	(459.488.158.831)	387.597.366.398	824.913.528.281	(423.204.897.391)	401.708.630.890



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 594 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	28.520.550.327	(7.227.367.300)	21.293.183.027	26.004.587.222	(6.542.559.991)	19.462.027.231
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11.118.997.502	(2.059.426.170)	9.059.571.332	3.999.150.587	(1.527.179.401)	2.471.971.186
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.863.164.183	(1.607.288.915)	3.255.875.268	4.863.164.183	(1.483.491.423)	3.379.672.760
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	45.387.927.803	(15.750.916.292)	29.637.011.511	39.273.107.803	(13.880.200.515)	25.392.907.288
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	732.005.217.423	(190.165.972.058)	541.839.245.365	965.108.724.575	(238.312.806.499)	726.795.918.076
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	27.500.273.480	(14.123.553.364)	13.376.720.116	25.919.449.694	(13.003.248.677)	12.916.201.017
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	229.990.006.233	(93.183.026.150)	136.806.980.083	253.577.868.489	(109.838.853.630)	143.739.014.859
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.284.045.495	(462.665.517)	821.379.978	1.427.412.095	(489.216.236)	938.195.859
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45.054.462.043	(23.280.974.631)	21.773.487.412	45.408.062.043	(22.339.764.668)	23.068.297.375
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	628.286.198	(357.002.027)	271.284.171	628.286.198	(299.882.741)	328.403.457
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	203.024.166.928	(90.114.751.486)	112.909.415.442	245.205.663.209	(101.188.942.446)	144.016.720.763
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	121.863.800.285	(41.252.018.440)	80.611.781.845	51.315.651.636	(38.393.630.345)	12.922.021.291
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	123.426.801.131	(33.644.640.593)	89.782.160.538	121.834.021.131	(28.691.696.172)	93.142.324.959
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	42.420.442.869	(26.651.419.398)	15.769.023.471	45.407.620.981	(26.414.878.053)	18.992.742.928
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	9.420.314.030	(2.880.752.972)	6.539.561.058	8.863.738.475	(2.654.457.977)	6.209.280.498
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.272.411.872	(1.030.662.162)	1.241.749.710	2.272.411.872	(1.439.292.232)	833.119.640
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	9.201.428.880	(3.660.184.058)	5.541.244.822	8.471.679.216	(2.828.017.204)	5.643.662.012
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.741.372.797	(6.158.324.313)	5.583.048.484	11.543.273.797	(5.820.756.893)	5.722.516.904
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	23.239.393.756	(14.151.529.407)	9.087.864.349	23.258.684.256	(13.120.348.736)	10.138.335.520
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	15.185.311.538	(8.812.507.418)	6.372.804.120	17.382.563.038	(8.392.713.148)	8.989.849.890



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 595 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	25.690.278.749	(22.060.204.221)	3.630.074.528	25.507.442.449	(21.815.136.017)	3.692.306.432
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.881.430.936	(8.990.874.337)	2.890.556.599	12.049.455.936	(8.468.621.459)	3.580.834.477
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	126.156.177.603	(34.948.712.402)	91.207.465.201	117.956.045.292	(30.211.403.577)	87.744.641.715
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	27.677.000	(294.436)	27.382.564
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.588.869.628	(3.457.085.931)	131.783.697	3.588.869.628	(3.449.181.876)	139.687.752
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.190.429.000	(119.042.900)	1.071.386.100	1.190.429.000	(71.425.740)	1.119.003.260
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	12.077.735.207	(9.823.672.353)	2.254.062.854	12.120.395.452	(9.338.483.788)	2.781.911.664
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	597.961.790.333	(115.474.586.535)	482.487.203.798
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	(14.326.273.749)	(14.326.273.749)
73	107	BADAN SAR NASIONAL	57.593.114.435	(15.385.843.125)	42.207.271.310	46.592.688.404	-	46.592.688.404
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	105.238.959.033	(20.686.235.155)	84.552.723.878	48.908.454.347	(15.492.578.981)	33.415.875.366
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	(20.567.863.530)	(20.567.863.530)
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	36.015.310.318	(24.129.367.370)	11.885.942.948	39.235.842.818	(3.751.983.407.915)	(3.712.747.565.097)
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	7.427.274.269.254	(3.962.176.977.500)	3.465.097.291.754	7.405.404.216.665	(15.167.736.562)	7.390.236.480.103
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	58.854.528.469	(19.411.879.312)	39.442.649.157	52.401.186.939	-	52.401.186.939
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.115.711.700	(553.413.763)	562.297.937	1.113.759.200	(452.987.967)	660.771.233
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	20.006.091.035	(10.974.725.569)	9.031.365.466	23.581.471.790	(11.500.132.399)	12.081.339.391
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	26.715.212.180	(12.077.175.979)	14.638.036.201	20.917.102.526	(12.922.798.209)	7.994.304.317



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 596 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	617.385.904.920	(278.289.223.243)	339.096.681.677	695.650.598.420	(241.033.704.575)	454.616.893.845
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	35.895.980.460	(6.833.181.469)	29.062.798.991	35.895.980.460	(5.993.291.059)	29.902.689.401
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			593.013.461.009.196	(344.948.939.522.544)	248.064.521.486.652	680.926.723.185.441	(303.050.766.911.424)	377.875.956.274.017
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	227.735.842.632	(60.842.255.085)	166.893.587.547	154.452.073.132	(40.889.131.179)	113.562.941.953
TOTAL			593.241.196.851.828	(345.009.781.777.629)	248.231.415.074.199	681.081.175.258.573	(303.091.656.042.603)	377.989.519.215.970



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 597 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	73.440.383.488	-	73.440.383.488	66.451.125.475	0	66.451.125.475
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	19.832.817.868	-	19.832.817.868	19.238.192.079	0	19.238.192.079
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	24.329.110.328	(482.415.781)	23.846.694.547	23.870.580.607	(402.519.155)	23.468.061.452
4	005	MAHKAMAH AGUNG	73.890.244.537	(525.440.920)	73.364.803.617	65.999.639.840	(546.287.205)	65.453.352.635
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12.425.940.639	(497.222.054)	11.928.718.585	11.619.447.041	(416.868.300)	11.202.578.741
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.214.731.558.617	(4.503.555.713)	3.210.228.002.904	1.224.227.578.028	(4.457.307.775)	1.219.770.270.253
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	186.880.348.286	(137.811.871.932)	49.068.476.354	190.887.797.956	(79.580.030.559)	111.307.767.397
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	97.258.327.925	(5.861.398.720)	91.396.929.205	94.709.830.232	(5.748.953.851)	88.960.876.381
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	5.624.453.663.962	(1.365.586.686.650)	4.258.866.977.312	4.147.202.957.721	(987.436.356.496)	3.159.766.601.225
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	68.218.739.768	(6.043.713.717)	62.175.026.051	70.832.527.797	(5.787.294.902)	65.045.232.895
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	51.089.377.176	(585.696.709)	50.503.680.467	55.953.215.349	(549.119.806)	55.404.095.543
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	72.295.320.166	(1.468.982.573)	70.826.337.593	79.520.885.958	(1.263.655.777)	78.257.230.181
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	28.003.391.321	(1.022.149.100)	26.981.242.221	29.911.166.531	(1.021.649.100)	28.889.517.431
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	430.305.894.454	(1.598.722.991)	428.707.171.463	439.695.860.786	(1.380.257.420)	438.315.603.366
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.303.454.098.620	(80.887.399.119)	3.222.566.699.501	3.207.799.393.553	(125.112.862.944)	3.082.686.530.609
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	412.300.389.335	(4.722.701.103)	407.577.688.232	338.127.542.172	(4.344.229.407)	333.783.312.765



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 598 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	180.330.322.376	(3.278.310.046)	177.052.012.330	253.351.060.234	(7.157.937.466)	246.193.122.768
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.320.276.033.117	(71.400.253.882)	1.248.875.779.235	1.234.806.086.792	(66.758.185.989)	1.168.047.900.803
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	16.880.404.515	(1.190.018.197)	15.690.386.318	8.817.233.763	(83.195.375)	8.734.038.388
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	14.798.697.676	(3.430.878.695)	11.367.818.981	14.788.440.270	(3.115.510.718)	11.672.929.552
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	105.333.767.646	(5.249.320.685)	100.084.446.961	103.905.414.761	(5.168.946.240)	98.736.468.521
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	116.166.184.657	(6.111.680.008)	110.054.504.649	146.902.957.776	(6.126.218.671)	140.776.739.105
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	35.911.136.545.120	(5.821.560.452.289)	30.089.576.092.831	35.350.410.359.224	(3.816.556.095.304)	31.533.854.263.920
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	24.595.834.418	(3.000.000)	24.592.834.418	23.244.640.159	(3.000.000)	23.241.640.159
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.071.925	-	63.071.925	63.071.925	0	63.071.925
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.439.174.836	(120.264.375)	1.318.910.461	944.775.132	(85.903.125)	858.872.007
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	15.236.395.367	(840.089.751)	14.396.305.616	22.423.958.462	(856.756.608)	21.567.201.854
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.046.413.262	-	1.046.413.262	1.260.287.262	0	1.260.287.262
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.019.472.809.235	(53.255.002.897)	966.217.806.338	952.144.078.123	(46.515.557.958)	905.628.520.165



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 599 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.069.152.260	-	3.069.152.260	2.599.575.930	(4.137.388)	2.595.438.542
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	315.310.076	(13.875.000)	301.435.076	310.310.194	(10.125.000)	300.185.194
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	864.607.100	-	864.607.100	3.111.007.523	0	3.111.007.523
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.133.994.145	(39.750.000)	3.094.244.145	2.942.398.145	(39.750.000)	2.902.648.145
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.778.000.866	(143.498.901)	6.634.501.965	7.677.372.866	(281.244.276)	7.396.128.590
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	811.201.704	-	811.201.704	811.201.704	0	811.201.704
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	51.045.639.716	(38.727.714)	51.006.912.002	47.815.514.459	(9.460.000)	47.806.054.459
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	5.379.109.730	-	5.379.109.730	5.146.207.030	0	5.146.207.030
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.478.019.156.338	(2.384.273.929)	1.475.634.882.409	1.330.272.790.778	(2.312.106.304)	1.327.960.684.474
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	194.244.882.925	(15.900.000)	194.228.982.925	162.468.924.990	(15.900.000)	162.453.024.990
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.196.091.736	(368.160.615)	47.827.931.121	42.290.193.159	(437.950.434)	41.852.242.725
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	66.043.685.608	(18.098.799.570)	47.944.886.038	138.370.540.740	(16.974.085.381)	121.396.455.359
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	18.972.377.860	(58.607.348)	18.913.770.512	18.367.157.511	(19.994.563)	18.347.162.948



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 600 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	10.573.803.403	(886.617.168)	9.687.186.235	9.781.286.403	(788.526.090)	8.992.760.313
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.034.420.929	(450.687.650)	583.733.279	1.034.420.929	(450.687.650)	583.733.279
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	13.069.442.164	(2.150.063.936)	10.919.378.228	9.297.243.795	(2.020.752.373)	7.276.491.422
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	159.755.240.972	(14.323.842.768)	145.431.398.204	212.537.171.053	(18.116.842.339)	194.420.328.714
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.936.690.490	(64.150.063)	2.872.540.427	2.895.657.920	(50.996.125)	2.844.661.795
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.553.250.979	(33.534.981)	1.519.715.998	1.452.974.731	(33.534.981)	1.419.439.750
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	12.972.272.991	(753.816.700)	12.218.456.291	8.683.016.521	(753.816.700)	7.929.199.821
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.878.987.154	(676.408.641)	3.202.578.513	2.877.583.766	(555.459.390)	2.322.124.376
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	24.893.021.573	(206.912.750)	24.686.108.823	23.018.919.620	0	23.018.919.620
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	306.151.787	(22.552.500)	283.599.287	286.237.147	(22.552.500)	263.684.647
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	366.066.403.488	(13.406.000)	366.052.997.488	373.114.069.121	(13.406.000)	373.100.663.121
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	26.806.386.594	(31.200.000)	26.775.186.594	26.896.865.153	(31.200.000)	26.865.665.153
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	39.222.145.529	(263.783.941)	38.958.361.588	36.316.206.117	(65.147.500)	36.251.058.617
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	13.422.975.780	(17.952.500)	13.405.023.280	13.075.435.280	(13.635.000)	13.061.800.280



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 601 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	12.365.100.402	(36.400.000)	12.328.700.402	12.274.176.402	(36.400.000)	12.237.776.402
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	3.307.132.388	-	3.307.132.388	7.187.550.434	0	7.187.550.434
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.040.553.507	(3.000.000)	2.037.553.507	2.139.936.140	(3.000.000)	2.136.936.140
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	6.109.228.202	(66.608.214)	6.042.619.988	5.783.313.827	(64.027.200)	5.719.286.627
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	15.627.955.878	(60.483.100)	15.567.472.778	15.346.484.496	(60.483.100)	15.286.001.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	9.889.943.122	(129.192.970)	9.760.750.152	7.240.522.049	(29.800.000)	7.210.722.049
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.810.633.321	(457.712.040)	3.352.921.281	2.492.311.492	(352.306.255)	2.140.005.237
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.246.574.376	(615.062.339)	7.631.512.037	7.757.976.025	(582.003.214)	7.175.972.811
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	86.321.915.762	(33.603.053.855)	52.718.861.907	50.964.957.299	(10.270.649.714)	40.694.307.585
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	7.297.619.585	-	7.297.619.585	7.354.852.418	0	7.354.852.418
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	44.466.968.323	(391.613.526)	44.075.354.797	42.473.617.501	0	42.473.617.501
68	100	KOMISI YUDISIAL	1.901.048.257	-	1.901.048.257	1.256.182.536	0	1.256.182.536
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	13.345.213.780	-	13.345.213.780	10.970.170.780	0	10.970.170.780
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	10.637.399.936	(276.955.250)	10.360.444.686	10.192.040.942	(276.955.250)	9.915.085.692
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	3.305.748.483	0	3.305.748.483



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 602 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/JL DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	641.685.335	(34.150.000)	607.535.335	546.809.785	(34.150.000)	512.659.785
73	107	BADAN SAR NASIONAL	21.973.714.657	(1.869.041.000)	20.104.673.657	19.284.334.945	0	19.284.334.945
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.787.801.648	(5.637.500)	1.782.164.148	1.859.938.530	(5.637.500)	1.854.301.030
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	5.588.990.050	-	5.588.990.050	5.542.088.050	0	5.542.088.050
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	4.225.119.385	(336.465.610)	3.888.653.775	3.069.208.880	(100.682.392)	2.968.526.488
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	17.069.784.125	-	17.069.784.125	17.727.381.614	-	17.727.381.614
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14.912.068.009	(536.448.250)	14.375.619.759	14.901.552.509	(473.027.250)	14.428.525.259
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	4.497.207.735	-	4.497.207.735	4.497.207.735	0	4.497.207.735
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.123.646.923	-	1.123.646.923	1.025.306.923	0	1.025.306.923
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	10.713.420.664	(133.760.620)	10.579.660.044	18.235.785.529	(74.100.003)	18.161.685.526
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	15.821.273.204	(6.090.618.088)	9.730.655.116	15.391.594.544	(6.049.865.752)	9.341.728.792
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	5.090.373.816	(1.471.137.102)	3.619.236.714	3.159.583.066	(1.393.306.602)	1.766.276.464
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	38.013.827.949	(136.874.651)	37.876.953.298	39.134.440.949	(136.874.651)	38.997.566.298



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 603 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.E

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	20.230.559.652	-	20.230.559.652	1.755.192.300	0	1.755.192.300
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	77.166.944.364	(64.050.000)	77.102.894.364	76.437.138.451	0	76.437.138.451
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	13.751.130.817	-	13.751.130.817	8.426.720.817	0	8.426.720.817
JUMLAH PADA K/L			55.451.024.499.709	(7.665.412.014.697)	47.785.612.485.012	51.080.294.513.044	(5.233.439.279.028)	45.846.855.234.016
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	87.194.673.901	(12.456.910.765)	74.737.763.136	84.997.116.700	(5.013.140.737)	79.983.975.963
TOTAL			55.538.219.173.610	(7.677.868.925.462)	47.860.350.248.148	51.165.291.629.744	(5.238.452.419.765)	45.926.839.209.979



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 604 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.F

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan Bun
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	18.925.965.286	17.328.422.600
4	005	MAHKAMAH AGUNG	195.373.014.198	239.137.575.785
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	15.699.534.950	17.864.222.300
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	5.325.208.050	12.376.892.818
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	182.496.252.653	152.309.976.430
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	415.204.726.270	89.431.455.069
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.991.717.524.943	18.532.210.503.625
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	722.754.577.352	288.538.742.791
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	278.968.308.402	206.417.421.601
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	14.198.879.909	22.236.085.173
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	51.976.363.654	63.090.939.723
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	667.023.445.885	532.270.673.797
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	42.859.398.535.213	32.109.534.219.729
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	764.495.228.518	701.356.750.775
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.148.494.656.000	3.379.500.085.896
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.840.176.765.988	1.235.865.769.638
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	57.859.210.133	22.775.291.346
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	623.272.587	623.272.587
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	35.479.636.017	41.570.765.718
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	339.926.330.712	329.571.709.867
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.955.196.610.516	52.596.156.693.721
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	1.861.761.752
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	240.073.284.120	221.138.438.031
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	47.802.332.780	1.288.255.220
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	6.242.058.075.615	5.442.112.727.159
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	4.407.331.012	2.505.285.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	5.369.662.030	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	247.504.586.414	4.241.599.437
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	23.786.153.661	1.265.812.700
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	16.179.258.363	28.726.057.332
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	742.732.400	7.013.851.417
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.346.499.832.363	3.488.138.787.834
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	85.011.000.826	5.855.812.906
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	5.553.739.362	5.553.739.362
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 605 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 19.F

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	11.585.610.008	80.224.344.455
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	11.181.884.170	24.495.714.219
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.761.235.555	3.190.102.000
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	44.085.900	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	41.661.090.360	12.939.713.578
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	1.225.776.283
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	14.122.950.475	8.701.286.854
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	7.778.778.600	684.298.900
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.223.689.500	845.053.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	583.053.947.699	391.004.559.635
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	4.384.589.900
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	45.122.863.976	3.837.380.508
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	28.583.355.350	12.468.732.200
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.712.566.399	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5.584.600.500	7.265.552.500
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	18.547.973.000	202.790.179.132
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	834.285.000	2.770.819.290
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	1.065.989.528
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.304.624.372	5.304.624.372
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	19.009.056.300
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.534.331.148	2.352.784.000
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	648.273.500
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	27.005.000	1.401.456.713
73	107	BADAN SAR NASIONAL	200.985.906.541	680.670.000
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	99.438.855.200	51.250.225.230
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	11.482.425.218	11.754.922.708
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	437.978.646.602	426.717.114.669
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	3.907.353.514	1.439.032.500
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	463.125.675	17.418.636.877
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	157.235.901.675	93.881.368.045
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	847.029.736.240	704.879.141.912
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	12.131.378.142
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA K/L			130.374.085.651.859	121.909.229.164.089
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	211.040.616.878	50.099.177.219
		Penyesuaian (Eliminasi pada SPAN)	-	-
TOTAL			130.585.126.268.737	121.959.328.341.308



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 606 -

TAGIHAN TUNTUTAN TP/TGR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 607 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	108.400.474	(542.003)	107.858.471
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	216.000.000	(210.030.000)	5.970.000	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.196.262.033	(2.696.178.366)	500.083.667	2.908.215.990	(2.523.276.509)	384.939.481
4	005	MAHKAMAH AGUNG	13.770.947	(68.854)	13.702.093	49.115.563	(245.578)	48.869.985
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	93.888.627	(469.443)	93.419.184	99.858.627	(499.293)	99.359.334
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.750.000	(93.750)	18.656.250	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	-	-	-	1.022.251.411	(744.651.976)	277.599.435
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	825.035.872	(788.281.647)	36.754.225	992.767.597	(947.375.148)	45.392.449
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.097.460.531	(85.597.165)	1.011.863.366	901.155.492	(16.168.275)	884.987.217
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.051.328.428	(11.772.909.904)	278.418.524	11.935.622.280	(11.532.349.151)	403.273.129
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	9.199.782.860	(132.861.669)	9.066.921.191	927.024.746	(77.866.372)	849.158.374
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	750.000	(3.750)	746.250
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.894.416.883	(498.436.997)	9.395.979.886	9.289.750.741	(306.686.998)	8.983.063.743
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	88.902.167	(444.511)	88.457.656	9.300.000	(46.500)	9.253.500
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.843.156.898	(1.672.952.782)	7.170.204.116	8.906.350.598	(1.616.556.125)	7.289.794.473
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	800.585.529	(5.075.000)	795.510.529	792.492.741	(119.163)	792.373.578
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	29.000.000	(145.000)	28.855.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 608 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (<i>AUDITED</i>)			31 DESEMBER 2017 (<i>AUDITED</i>)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.686.969.463	(1.271.842.162)	1.415.127.301	2.730.658.857	(1.272.060.609)	1.458.598.248
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	71.515.619	(215.130)	71.300.489	258.335.449	(1.201.934)	257.133.515
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	431.664.134	(236.413.983)	195.250.151	395.413.327	(287.925.030)	107.488.297
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	168.064.805	(168.064.805)	-	168.064.805	(168.064.805)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	33.964.410	(169.822)	33.794.588	33.964.410	(169.822)	33.794.588
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	7.659.162.099	(5.389.399.515)	2.269.762.584	5.939.574.151	(5.380.169.465)	559.404.686
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PEMBAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	784.230.781	(784.230.781)	-	817.073.466	(817.073.466)	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	280.954.219	(23.539.911)	257.414.308	77.732.912	(5.475.316)	72.257.596
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	-	-	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.818.354.115	(2.008.102.701)	810.251.414	2.893.259.407	(2.008.394.105)	884.865.302



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 609 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	101.589.211	(507.945)	101.081.266	91.984.349	(459.921)	91.524.428
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	10.580.559.280	(1.338.850.567)	9.241.708.713	8.101.385.125	(1.325.510.920)	6.775.874.205
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	10.113.380	(50.567)	10.062.813	14.953.364	(74.767)	14.878.597
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	756.943.840	(755.401.590)	1.542.250	747.851.422	(740.827.049)	7.024.373
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	19.541.286	-	19.541.286	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	58.626.778	(790.655)	57.836.123	118.837.638	(791.005)	118.046.633
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	189.863.000	(189.863.000)	-	212.680.410	(1.063.402)	211.617.008
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	5.238.000	(26.190)	5.211.810	108.356.464	(541.782)	107.814.682
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.770.862.410	(117.604.056)	5.653.258.354	3.015.240.306	(147.605.981)	2.867.634.325
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	25.476.000	(2.547.600)	22.928.400
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	9.782.496.467	(9.782.496.467)	-	62.463.254.102	(62.463.254.102)	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	22.905.685.655	(19.967.042.473)	2.938.643.182	23.542.910.041	(20.650.812.959)	2.892.097.082
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	103.708.888	(29.251.294)	74.457.594	65.957.508.409	(65.957.508.409)	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	8.360.332.688	(5.777.466.579)	2.582.866.109	2.026.247.201	(2.026.247.201)	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.710.968.626	(10.700.119.146)	10.849.480	10.600.324.210	(10.585.391.250)	14.932.960



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 610 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.360.000	(71.800)	14.288.200	71.360.000	(356.800)	71.003.200
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	155.172.436	(775.862)	154.396.574	222.413.805	(1.112.069)	221.301.736
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	3.499.500	(17.498)	3.482.002
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	28.816.238.986	(28.552.394.836)	263.844.150	30.241.842.834	(29.922.736.384)	319.106.450
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.267.093.320	(331.351.332)	1.935.741.988	2.249.977.644	(331.265.754)	1.918.711.890
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	152.132.669	(760.663)	151.372.006	254.654.453	(1.273.272)	253.381.181
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	2.750.000	(13.750)	2.736.250
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	527.808.275	(169.984.725)	357.823.550	293.020.000	(1.465.100)	291.554.900
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	70.990.922	(1.340.922)	69.650.000	2.081.830	(2.081.830)	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 611 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 20

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	101.182.608	(505.913)	100.676.695	116.847.608	(584.238)	116.263.370
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	363.569.394	(1.304.097)	362.265.297	123.125.000	(49.375)	123.075.625
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	110.096.000	(550.480)	109.545.520	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			163.209.394.539	(105.463.890.057)	57.745.504.482	261.894.714.759	(221.870.658.811)	40.024.055.948
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	-	-	-	-	-	-
TOTAL			163.209.394.539	(105.463.890.057)	57.745.504.482	261.894.714.759	(221.870.658.811)	40.024.055.948



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 612 -

ASET TAK BERWUJUD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 613 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	AMORTISASI	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.887.621.020	-	(1.570.558.520)	317.062.500	2.048.944.540	-	(1.260.756.045)	788.188.495
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	47.375.876.247	-	(22.343.908.839)	25.031.967.408	41.851.828.145	-	(20.248.695.119)	21.603.133.026
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	176.965.980.064	-	(113.780.436.620)	63.185.543.444	186.848.003.424	-	(92.995.689.043)	93.852.314.381
4	005	MAHKAMAH AGUNG	35.119.419.017	-	(30.230.407.133)	4.889.011.884	31.509.885.319	-	(27.460.451.378)	4.049.433.941
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	615.696.541.777	-	(213.679.502.596)	402.017.039.181	279.643.543.244	-	(86.512.450.302)	193.131.092.942
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	55.941.988.423	-	(29.025.309.652)	26.916.678.771	35.096.856.423	-	(21.646.238.431)	13.450.617.992
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	803.524.362.949	-	(762.999.735.964)	40.524.626.985	787.967.553.266	-	(710.627.656.569)	77.339.896.697
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	92.736.286.129	-	(59.712.893.675)	33.023.392.454	85.980.730.994	-	(42.920.934.432)	43.059.796.562
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.298.265.237.160	186.738.706.991	(1.146.630.409.887)	2.338.373.534.264	3.276.440.860.850	160.554.154.191	(933.005.739.662)	2.503.989.275.379
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	526.019.128.257	-	(354.852.166.897)	171.166.961.360	486.690.695.488	-	(328.424.502.247)	158.266.193.241
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.370.630.220.833	-	(1.085.012.343.458)	285.617.877.375	1.202.236.914.878	-	(952.878.516.287)	249.358.398.591
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	92.020.243.837	-	(22.006.731.346)	70.013.512.491	91.781.280.244	-	(29.988.481.728)	61.792.798.516
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	27.358.799.081	-	(22.442.735.215)	4.916.063.866	24.275.992.406	-	(19.322.236.131)	4.953.756.275
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	249.839.002.115	213.324.400	(173.012.024.968)	77.040.301.547	234.486.989.726	213.324.400	(150.362.467.998)	84.337.846.128
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.488.094.406.760	44.504.716.108	(412.839.551.474)	2.119.759.571.394	2.226.511.102.716	27.384.526.240	(350.226.863.727)	1.903.668.765.229
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	273.541.419.740	-	(135.847.321.339)	137.694.098.401	280.089.370.653	-	(130.993.724.869)	149.095.645.784
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	271.946.991.563	-	(180.961.896.869)	90.985.094.694	230.678.798.039	-	(155.600.611.475)	75.078.186.564
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	161.835.481.098	-	(101.780.914.757)	60.054.566.341	140.303.459.538	-	(92.128.112.341)	48.175.347.197
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	51.411.962.866	-	(32.738.104.837)	18.673.858.029	46.692.881.104	-	(25.381.243.244)	21.311.637.860
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	94.613.896.087	-	(72.837.403.209)	21.776.492.878	84.518.479.682	-	(62.238.285.243)	22.280.194.439
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	113.349.663.351	-	(58.461.720.931)	54.887.942.420	128.691.760.797	-	(55.131.953.667)	73.559.807.130
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	216.434.890.696	-	(97.851.052.099)	118.583.838.597	227.867.709.404	-	(83.211.149.032)	144.656.560.372
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.484.744.654.096	33.446.695.075	(102.086.956.816)	7.416.104.392.355	7.109.439.406.318	18.272.265.508	(79.343.230.442)	7.048.368.441.384



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 614 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	13.430.621.425	-	(11.331.679.989)	2.098.941.436	12.973.832.925	-	(10.509.786.354)	2.464.046.571
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	14.473.017.969	-	(6.536.854.292)	7.936.163.677	11.050.106.455	-	(3.726.105.444)	7.324.001.011
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.267.026.500	-	(674.038.438)	592.988.062	824.826.500	-	(573.706.813)	251.119.687
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	43.742.820.878	-	(14.411.746.192)	29.331.074.686	40.509.270.005	-	(9.107.497.914)	31.401.772.091
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	23.033.447.590	-	(16.821.802.780)	6.211.644.810	20.665.430.090	-	(18.187.193.269)	2.478.236.821
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	685.639.932.233	10.000.000	(297.142.550.306)	388.507.381.927	659.214.561.968	-	(272.364.973.760)	386.849.588.208
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	34.332.242.833	-	(35.572.294.821)	(1.240.051.988)	33.602.470.392	-	(32.610.613.123)	991.857.269
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.450.041.700	-	(11.906.626.938)	5.543.414.762	17.450.041.700	-	(8.120.515.137)	9.329.526.563
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	3.212.718.420	-	(2.304.079.688)	908.638.732	2.764.262.420	-	(1.801.383.655)	962.878.765
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.625.879.247.072	-	(748.798.612.096)	2.877.080.634.976	2.395.915.619.396	-	(666.254.090.724)	1.729.661.528.672
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	524.522.811.827	-	(327.481.890.454)	197.040.921.373	519.579.003.827	-	(290.434.062.700)	229.144.941.127
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	118.329.609.412	-	(60.653.532.110)	57.676.077.302	125.931.109.678	-	(34.387.154.066)	91.543.955.612
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	660.902.639.698	-	(444.748.810.285)	216.153.829.413	610.562.099.050	-	(398.430.633.714)	212.131.465.336
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	49.586.947.884	-	(35.707.224.356)	13.879.723.528	44.716.060.923	-	(28.275.579.590)	16.440.481.333
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUJANG/BADAN PERTANAHAN	199.607.672.280	-	(143.313.223.160)	56.294.449.120	188.349.708.641	-	(136.594.388.921)	51.755.319.720
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133.099.603.713	-	(35.222.740.249)	97.876.863.464	120.320.467.050	-	(31.789.615.621)	88.530.851.429
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	362.881.073.382	-	(276.796.047.384)	86.085.025.998	348.431.857.608	-	(253.534.169.345)	94.897.688.263



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 615 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.260.389.635.058	-	(1.118.262.922.344)	2.142.126.712.714	2.566.058.520.086	-	(616.095.070.229)	1.949.963.449.857
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	97.890.198.613	-	(38.480.862.511)	59.409.336.102	87.632.831.258	8.236.000	(30.274.586.793)	57.366.480.465
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	210.664.394.406	-	(189.805.985.167)	20.858.409.239	202.982.948.732	-	(176.043.862.461)	26.939.086.271
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	80.164.757.135	-	(58.478.381.211)	21.686.375.924	72.133.349.427	-	(55.244.939.910)	16.888.409.517
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	150.801.107.700	-	(89.207.571.092)	61.593.536.608	134.423.480.480	620.181.072	(73.698.815.701)	61.344.845.851
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	7.854.215.654	-	(4.167.482.042)	3.686.733.612	7.775.495.654	-	(3.350.454.065)	4.425.041.589
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	37.160.307.101	-	(31.840.084.367)	5.320.222.734	35.664.443.701	-	(26.404.030.957)	9.260.412.744
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	658.885.000	-	(2.722.070.005)	(2.063.185.005)	2.807.924.589	-	(2.517.750.527)	290.174.062
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	449.658.379.456	-	(399.190.246.112)	50.468.133.344	435.079.324.618	-	(322.305.865.181)	112.773.459.437
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11.162.754.056	-	(6.312.261.630)	4.850.492.426	5.281.486.456	-	(3.941.423.652)	1.340.062.804
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	27.256.404.411	-	(12.509.075.514)	14.747.328.897	15.188.586.616	-	(10.314.413.285)	4.874.173.331
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	23.821.857.738	-	(18.799.050.866)	5.022.806.872	23.693.936.634	-	(15.605.032.978)	8.088.903.656
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	126.791.506.448	-	(26.578.765.283)	100.212.741.165	68.725.714.782	-	(23.582.931.031)	45.142.783.751
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	38.345.597.682	-	(24.382.605.982)	13.962.991.700	29.703.690.264	-	(21.215.361.924)	8.488.328.340
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	108.958.715.394	-	(95.581.586.295)	13.377.129.099	101.173.070.117	-	(90.335.040.760)	10.838.029.357
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	374.445.802.861	4.528.150.000	(87.637.845.809)	291.336.107.052	288.449.451.263	109.347.500	(62.258.641.367)	226.300.157.396
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2.642.771.136.054	2.421.811.801	(1.527.896.901.137)	1.117.296.046.718	2,324.586.515.746	12,447.669.044	(1,236.507.054.414)	1,100.527.130.376
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.160.797.150	-	(8.091.726.868)	1.069.070.282	9.964.060.400	-	(6.120.315.114)	3.843.745.286
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	10.668.937.629	-	(4.343.875.451)	6.325.062.178	5.914.301.501	-	(2.686.023.015)	3.228.278.486
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.891.837.900	-	(2.804.112.568)	1.087.725.332	2.907.022.400	-	(2.603.776.400)	303.246.000
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.520.424.655	-	(9.057.490.982)	2.462.933.673	11.164.778.155	-	(8.600.850.258)	2.563.927.897
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	178.604.173.959	-	(168.328.442.736)	10.275.731.223	171.319.688.743	-	(164.208.110.769)	7.111.577.974



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 616 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	AMORTISASI	NETTO
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	47.405.179.997	701.263.200	(24.729.384.337)	23.377.058.860	28.890.230.947	91.848.750	(17.877.018.118)	11.105.061.579
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	103.885.747.514	-	(89.625.170.759)	14.260.576.755	115.035.820.201	-	(93.057.662.629)	21.978.157.572
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	935.513.694.884	-	(12.160.483.365)	923.353.211.319	18.380.270.511	662.762.984.362	(9.321.727.022)	671.821.527.851
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	69.466.817.064	725.055.000	(41.814.250.597)	28.377.621.467	59.262.265.326	-	(34.917.771.045)	24.344.494.281
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.813.495.152	-	(6.618.468.543)	(1.804.973.391)	4.601.574.152	-	(6.083.556.008)	(1.481.981.856)
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.017.355.940	-	(2.086.234.928)	931.121.012	2.304.693.472	-	(1.792.254.982)	512.438.490
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	190.119.649.115	-	(65.536.374.673)	124.583.274.442	168.552.971.840	-	(38.539.342.467)	130.013.629.373
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	14.469.131.238	-	(12.144.886.323)	2.324.244.915	13.433.259.188	-	(11.081.823.262)	2.351.435.926
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	549.989.747	-	(475.697.897)	74.291.850
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	29.107.768.566	1.714.492.815	(19.466.375.243)	11.355.886.138	26.292.596.173	1.524.809.315	(18.131.785.630)	9.685.619.858
73	107	BADAN SAR NASIONAL	204.836.520.335	-	(97.201.349.826)	107.635.170.509	157.063.868.355	-	(69.605.396.465)	87.458.471.890
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	882.292.863	-	(612.519.108)	269.773.755	853.777.863	-	(617.551.548)	236.226.315
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	85.906.871.271	2.160.000	(2.263.892.478)	83.645.138.793	83.622.017.421	157.293.440	(2.035.890.228)	81.743.420.633
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	764.229.234	-	(663.562.449)	100.666.785	669.729.234	-	(537.294.420)	132.434.814
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	204.846.316.215	-	(9.166.239.619)	195.680.076.596	185.113.852.194	-	(7.805.174.514)	177.308.677.680
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	193.842.470.450	3.302.885.193	(19.487.045.291)	177.658.310.352	66.148.324.196	3.302.885.193	(17.457.399.673)	51.993.809.716
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	232.294.756.728	-	(20.885.329.074)	211.409.427.654	232.294.756.728	-	(7.208.755.326)	225.086.001.402
80	114	SEKRETARIAT KABINET	3.457.298.192	-	(8.229.847.146)	(4.772.548.954)	7.838.307.274	-	(8.076.332.584)	(238.025.310)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 617 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 21

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)				31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	AMORTISASI	NETTO
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	11.294.156.637	-	(12.680.323.010)	(1.386.166.373)	10.053.076.337	-	(10.901.105.496)	(848.029.159)
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	5.771.910.518	-	(4.324.226.615)	1.447.683.903	4.836.516.518	-	(2.978.097.616)	1.858.418.902
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.683.270.416	-	(1.300.145.143)	2.383.125.273	2.721.976.916	-	(887.216.468)	1.834.760.448
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	310.609.000	-	-	310.609.000	260.850.000	0	-	260.850.000
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	68.295.955.208	-	(59.933.646.610)	8.362.308.598	65.021.318.908	-	(48.928.451.337)	16.092.867.571
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	3.940.368.500	-	(1.213.292.439)	2.727.076.061	1.232.575.000	-	(422.776.500)	809.798.500
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	7.995.138.520	-	(200.716.250)	7.794.422.270	6.688.347.500	-	(186.466.250)	6.501.881.250
JUMLAH PADA K/L			35.349.308.377.399	278.309.260.583	(12.138.950.950.437)	23.488.666.687.545	30.258.867.363.449	887.449.525.015	(10.015.012.414.379)	21.131.304.474.085
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	148.907.231.481	-	(70.195.621.600)	78.711.609.881	146.774.243.367	-	(57.616.621.604)	89.157.621.763
TOTAL			35.498.215.608.880	278.309.260.583	(12.209.146.572.037)	23.567.378.297.426	30.405.641.606.816	887.449.525.015	(10.072.629.035.983)	21.220.462.095.848



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 618 -

ASET EKS BPPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 619 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.A

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2018**

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2017		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Desember 2018 (Audited)	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	915	363.788.450.347,00			915	363.788.450.347,00		430.284.201.950,00	915	794.072.652.297,00
2	Temuan BPK	370	767.275.549.869,15			370	767.275.549.869,15	(1)	15.520.250.000,00	369	782.795.799.869,15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00			63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-			-	-			-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-			-	-			-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00			42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000,00			2	295.000.000,00			2	295.000.000,00
7	Covernote	96	157.799.804.037,00			96	157.799.804.037,00		182.766.723.000,00	96	340.566.527.037,00
		1.488	1.709.554.940.253			1.488	1.709.554.940.253,15		628.571.174.950,00	1.487	2.338.126.115.203,15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 620 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 *(Audited)*

LAMPIRAN 22.B

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET INVENTARIS EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>		Mutasi TA 2018		Saldo 31 Desember 2018 <i>(Audited)</i>		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	32.408	11.009.466.267,35	13.755	2.504.758.110	18.653	8.504.708.157,35	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338,35			11.274	6.400.600.338,35	
	b. Tidak Digunakan (idle)	21.134	4.608.865.929,00	13.755	2.504.758.110	7.379	2.104.107.819,00	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 621 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.C

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018**

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2017	Mutasi (Rp)	Nilai per 31 Desember 2018
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Ruci	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp 5 841 796 415,00	-	Rp 5 841 796 415,00
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258 438,5	Bank luar negeri	Rp 3 501 324 798,00	Rp 241 123 120,50	Rp 3 742 447 918,50
3	Bank Bahari	Cousts Bank Hongkong Branch sebesar USD350 526 24	Bank luar negeri	Rp 4 748 929 499,52	Rp (4 748 929 499,52)	Rp -
Total				Rp 14.092.060.712,52		Rp 9.864.244.333,50
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
1	Bank Central Dagang BKKU	Bank CICI Jakarta	Bank dalam negeri	Rp 2 044 748,80		Rp 2 044 748,80
3	BUN	BRI Cut Mutah		Rp 83 311 328,35		Rp 83 311 328,35
4	BUN	Citibank		Rp 8 776 916 074,45		Rp 8 776 916 074,45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur Jkt		Rp 97 686 237,95		Rp 97 686 237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp 706 429 119,47		Rp 706 429 119,47
7	Bank Dewa Ruci	Bank Ganesha, Jkt		Rp 196 059 779,49		Rp 196 059 779,49
8	Bank Kharisma BKKU	Bank Aspac		Rp 287 761,43		Rp 287 761,43
9	Bank Budi Internasional BKKU	Bank Astna (dalam likuidasi)	telah dikudasi (BBO/BKKU)	Rp 6 601 373,85		Rp 6 601 373,85
10	Bank Aken BKKU	Bank Central Dagang		Rp 625 069,88		Rp 625 069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp 2 994 990,16		Rp 2 994 990,16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp 6 207 877,95		Rp 6 207 877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp 122 086 331,08		Rp 122 086 331,08
16	SANHO	Bank Umum Servitis		Rp 4 887 591,05		Rp 4 887 591,05
17	BDNI	BDNI Finance Hongkong		Rp 1 020 060 447,89		Rp 1 020 060 447,89
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp 6 017 122,84		Rp 6 017 122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp 11 739 033,84		Rp 11 739 033,84
20	Bank Kharisma BKKU	Indover Bank	Bank Indover	Rp 141 402 439,43		Rp 141 402 439,43
21	Bank Hastin Internasional BKKU	Indover Bank		Rp 361 433 693,83		Rp 361 433 693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp 2 864 035,05		Rp 2 864 035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp 268 237 424,51		Rp 268 237 424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BKKU	Indover Bank		Rp 109 652 042,65		Rp 109 652 042,65
25	BUN	Indover Bank		Rp 925 492 300,93		Rp 925 492 300,93
26	BUN	Indover Bank		Rp 531 317 595,65		Rp 531 317 595,65
27	Bank BIRA BKKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24 530 231,65		Rp 24 530 231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp 32 416 251,32		Rp 32 416 251,32
29	Bank Asia Pacific BKKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 16 993 382,21		Rp 16 993 382,21
30	Bank Unibank BKKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 45 288 112,29		Rp 45 288 112,29
31	Bank Unibank BKKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 24 849 497,60		Rp 24 849 497,60
32	Bank Mashil Utama BKKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 354 542 691,02		Rp 354 542 691,02
33	Bank Central Dagang BKKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 92 060 251,91		Rp 92 060 251,91
34	Bank Ficoninvent BKKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp 77 574 756,22		Rp 77 574 756,22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 1 139 267,42		Rp 1 139 267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 11 664 932,40		Rp 11 664 932,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp 108 150 696,65		Rp 108 150 696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp 120 045 719,99		Rp 120 045 719,99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp 341 740 942,42		Rp 341 740 942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp 195 403 134,60		Rp 195 403 134,60
41	Bank Asia Pacific BKKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 956 004 466,45		Rp 956 004 466,45
42	Bank Unibank BKKU	Indover Bank, Hamburg		Rp 2 996 775,68		Rp 2 996 775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp 254 274 894,54		Rp 254 274 894,54
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg		Rp 27 358 123,38		Rp 27 358 123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp 122 424 186,80		Rp 122 424 186,80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp 406 733 525 331,33		Rp 406 733 525 331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)	tidak diketahui	Rp 2 359 921 197,78		Rp 2 359 921 197,78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp 2 257 377 867,88		Rp 2 257 377 867,88
49	BDNI	Indovna Bank (Khusus Deviden)		Rp 1 758 722 655,31		Rp 1 758 722 655,31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp 1 834 239 834,61		Rp 1 834 239 834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp 666 429 511,70		Rp 666 429 511,70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp 61 815 826,61		Rp 61 815 826,61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp 44 241 246,97		Rp 44 241 246,97
54	BDNI	Bank Boston, NA, Singapore		Rp 2 270 531,95		Rp 2 270 531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp 378 699 549,31		Rp 378 699 549,31
56	SURYA	Bank Credit Issue		Rp 234 342 412,12		Rp 234 342 412,12
57	Bank Yama BKKU	Bank Mashil		Rp 58 834 913,90		Rp 58 834 913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp 65 028 723,58		Rp 65 028 723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp 41 766 481,92		Rp 41 766 481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp 6 616 463 903,03		Rp 6 616 463 903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp 266 632 029,06		Rp 266 632 029,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp 339 690 834,35		Rp 339 690 834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp 357 108 818,21		Rp 357 108 818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp 6 463 800,47		Rp 6 463 800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 208 766 445,27		Rp 208 766 445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp 327 222 390,61		Rp 327 222 390,61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp 1 675 910,59		Rp 1 675 910,59
68	BUN	BCCI, London		Rp 1 312 775 083,50		Rp 1 312 775 083,50
69	BUN	BNP, Singapore		Rp 490 837 088,12		Rp 490 837 088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp 4 122 298,55		Rp 4 122 298,55
71	BUN	Chemical Bank		Rp 909 494 195,25		Rp 909 494 195,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp 980 037 418,44		Rp 980 037 418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp 103 609 247,09		Rp 103 609 247,09
74	BUN	National Westminster		Rp 1 708 457 513,38		Rp 1 708 457 513,38
75	Bank Ficoninvent BKKU	National Westminster Bank, London		Rp 1 332 284 084,60		Rp 1 332 284 084,60
76	BDNI	Security Pacific Nat'l Bank, Singapore		Rp 25 528 725,87		Rp 25 528 725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp 72 226 080,57		Rp 72 226 080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp 566 327 485,65		Rp 566 327 485,65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp 456 068 074,81		Rp 456 068 074,81
80	BDNI	Sumitomo Bank Ltd, Tokyo		Rp 1 550 878 033,20		Rp 1 550 878 033,20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 622 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2017	Mutasi (Rp)	Nilai per 31 Desember 2018
81	BUN	Summa Hanieb Bank		Rp 219 893 772,84		Rp 219 893 772,84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp 457 663 217,47		Rp 457 663 217,47
83	BDNI	The Dai-ichi Kangyo Bank, NY		Rp 449 662 818,68		Rp 449 662 818,68
84	Bank Modern BBO	UBOC New York		Rp 25 317 208,51		Rp 25 317 208,51
85	BUN	UMBC Kualalumpur		Rp 230 472 902,02		Rp 230 472 902,02
86	Bank Central Dagang BBU	Union Bank of California		Rp 124 810 097,58		Rp 124 810 097,58
87	Bank Metropolitan BBU	Union Bank of California		Rp 22 488 860,17		Rp 22 488 860,17
88	Bank Central Dagang BBU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp 93 484 495,37		Rp 93 484 495,37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp 51 007 390,52		Rp 51 007 390,52
90	BDNI	United Pacific Bank LA		Rp 1 926 555 302,27		Rp 1 926 555 302,27
91	PESONA	Westpac Bank Sidney		Rp 7 752 795,93		Rp 7 752 795,93
92	Masih dalam penelusuran			Rp 508 554 149,20		Rp 508 554 149,20
		Total		Rp 484.445.381.290,83		Rp 484.445.381.290,83

* Pengkonversian nilai rekening BIRA di ClearStream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Coutts Bank menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

	Akhir Desember 2017	31 Desember 2018
Kurs tengah Bank Indonesia	Rp 13 548,00	Rp 14 481,00

** Mutasi nilai rekening eks. BIRA di ClearStream merupakan selisih kurs

*** Dana Nostro yang telah disetorkan ke RKUN

Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)	Rp 54 584 286,49
Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp 1 187 712 120,85
Rekening Eks Bank Ficoinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)	Rp 8 840 515 509,00
Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch (disetorkan tanggal 1 Februari 2018)	Rp 4 697 519 206,00
Total	Rp 14.780.331.122,34

Penjelasan

Penelusuran dan Konfirmasi Dana Nostro

1. Telah dilaksanakan rapat dengan PPAATK pada tanggal 18 Juni 2015
2. DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN 5/2014 s.d S-1381/KN 5/2014 tanggal 16 Juni 2014 Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostror eks BBO/BBKU di bank-bank tersebut PT Bank Mutiara mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank BRI dan BPR Tn Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan

Progres Pengelolaan Dana Nostro di Bank Indonesia

1. Menanggapi surat Direktorat PKNSI DJKN nomor S-2369/KN 5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 18/156/DPTP tanggal 26 November 2014, menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficoinvest di Bank Tata sebesar Rp8 840 515 509 dan Rp1 187 712 121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran Untuk rekening senilai Rp406 733 525 331 33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover tidak terdapat nama bank eks BBO/BBKU yang mengiklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338 538 20 yang berstatus dispute
2. Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN 5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat a. Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor b. Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dan Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c. q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indov c Bank Indonesia saat ini menatausahaan rekening eks Bank Ficoinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10 028 227 629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas c. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Nomor LAP- OI /KN 5 2/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian/Penelusuran Dokumen Aset Nostro Eks BPPN dan surat tugas Direktur PKNSI nomor ST-1131/KN 5/2016 tanggal
3. Melalui surat nomor 18/35/DPTP/Sr/B tanggal 31 Maret 2016, Bank Indonesia menyampaikan bahwa rekening eks Bank Ficoinvest dan Bank Tata sebesar Rp8 840 515 509 dan Rp1 187 712 121 merupakan hak Kementerian Keuangan. Selanjutnya melalui surat nomor 18/104/DPTP-GPTP-DPT/Sr/B tanggal 29 April 2016, Bank Indonesia menyatakan dana eks Bank Ficoinvest dan Bank Tata tersebut telah disetorkan ke RKUN tanggal 26 April 2016

Progres Pengelolaan Dana Nostro Eks BDR di PT Bank Ganesha Tbk

1. Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5 841 796 415,00 namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks BDR sebesar Rp51 447 560 083,00
2. Melalui surat Nomor S-2586/KN 5/2014 tanggal 15 Oktober 2014 Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/II/2014 tanggal 29 Desember 2014 PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa a. Tidak terdapat outstanding dana eks BDNI pada PT Bank Ganesha b. Terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5 841 796 415,00 namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks BDR sebesar Rp51 447 560 083,00 sehingga secara set off eks BDR
3. Menanggapi surat PT Bank Ganesha tersebut, melalui surat Nomor S-35/KN 5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN 5/2015 tanggal 15 April 2015 Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan
4. Melalui surat nomor S-2734/KN 5/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Dit PKNSI telah meminta bantuan saran/pendapat dari OJK terkait dana eks BDR yang tersimpan di PT Bank Ganesha. Melalui surat nomor SR-08/PB 332/2016
5. Selanjutnya melalui surat nomor S-200/KN 5/2015 tanggal 16 Februari 2016 DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui
6. Berdasarkan PMK nomor 17/PMK 05/2005 program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian
7. Menanggapi surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui surat nomor 037/DIR/II/17 tanggal 2 Februari 2017 PT Bank Ganesha menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1425 dan 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
8. Berkenaan dengan tanggapan PT Bank Ganesha tersebut, Direktorat PKNSI akan melakukan koordinasi dengan internal Kementerian Keuangan terkait guna pengembalian dana eks BDR ke rekening kas Negara

Progres Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank BIRA di ClearStream Banking SA

1. Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BIRA di ClearStream Banking SA dengan nilai 258 438,50 USD
2. Melalui surat nomor S-10044/KN 5/2015 tanggal 18 November 2015, DJKN telah meminta rekening dalam valuta asing kepada Ditjen Perbendaharaan dan telah mendapat tanggapan melalui surat nomor S-9935/PB 3/2015 tanggal
3. Selanjutnya melalui surat nomor S-S-1147/KN 5/2017 tanggal 31 Juli 2017, dalam rangka pengalihan dana tersebut ke RKUN, Direktorat PKNSI telah menyampaikan kepada Konsultan Hukum Widyawan & Partners selaku kuasa hukum ClearStream Banking SA nomor RKUN dalam dollar USD serta draft surat Direktur PKNSI kepada ClearStream Banking SA untuk permintaan pengalihan dana eks Bank BIRA tersebut ke RKUN dan spesimen tanda tangan
4. Saat ini, Direktorat PKNSI sedang menunggu tanggapan dan Konsultan Hukum Widyawan & Partners untuk pengembalian dana eks Bank BIRA tersebut ke RKUN

Progres Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank Bahari di Coutts Bank

1. Berdasarkan surat surat Konsultan Hukum Ali Budiarto Nugroho, Reksoadiputro (ABNR) nomor 001/COB-16014/II/2017/AAAD-PW tanggal 4 Desember 2017 dan nomor 004/COB-16014/II/2017/AAAD-PW tanggal 14 November 2014 hal Penyampaian Informasi Sehubungan dengan Rencana Pengembalian Aset Bank Bahari: surat Alternate Chief Executive, Coutts and Co Ltd Hongkong Branch tanggal 21 Juli 2017 hal Pemberian Konfirmasi dan Permintaan Dokumen serta Prosedur oleh DJKN dan surat Head and Front Office, Coutts and Co Ltd Singapore Branch tanggal 17 April 2017 hal Permohonan Klarifikasi Proses Pengembalian Aset maka telah terkonfirmasi dana eks Bank Bahari terkonsolidasi di Coutts and Co Ltd Hongkong Branch sebagai berikut: 1. Mengingat Coutts and Co Ltd akan segera menutup cabangnya di Hongkong dan Singapura. Direktorat PKNSI melalui surat nomor S-1823/KN 5/2017 tanggal 11 Desember 2017, telah meminta Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch 2. melalui email tanggal 2 Januari 2017. Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch menyampaikan bahwa telah mencoba melakukan pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN di Bank Indonesia namun tidak berhasil dikarenakan terkek 3. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI DJKN melalui surat nomor S-22/KN 5/2018 tanggal 8 Januari 2018 telah bantuan informasi kepada Bank Indonesia mengenai SWIFT details RKUN di Bank Indonesia dan mekanisme 4. Selanjutnya, melalui email tanggal 26 Januari 2018 Direktorat PKNSI menyampaikan kembali mekanisme pemindahbukuan dana tersebut ke RKUN sesuai dengan surat Bank Indonesia nomor 20/27/DOTP-GLP-LIP/SH/B tanggal 23 Januari 2018
6. Berdasarkan surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPN nomor S-2985/PB 3/2018 tanggal 2 April 2018 diketahui bahwa dana tersebut telah efektif diterima RKUN pada tanggal 1 Februari 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

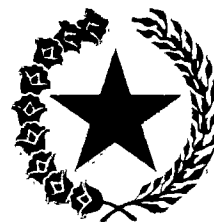
- 623 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2017	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2018	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds												
1	Dgs International Finance Co.	Scripless	0,01	USD	1.000.000	-	-	-	-	-	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	Scripless	101,88	USD	4.500.000	1,02	4.584.685,50	30 November 2018	62.113.319.154,00	66.390.830.725,50	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	Scripless	1,00	USD	25.000.000	0,01	250.000,00	01 November 2018	3.387.000.000,00	3.620.250.000,00	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	Coupon	38.750.000,00	IDR	-	1,00	38.750.000,00	27 Juni 2008	38.750.000,00	38.750.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	Coupon	800.000.000,00	IDR	-	1,00	800.000.000,00	27 Juni 2008	800.000.000,00	800.000.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	Coupon	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	Coupon	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	Scripless	2,10	USD	3.000.000	0,02	63.000,00	30 November 2018	853.524.000,00	912.303.000,00	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	Tpe International Finance Co. Bv	Scripless	1,00	USD	2.000.000	0,01	20.000,00	30 November 2018	270.960.000,00	289.620.000,00	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	Principal dan Coupon	100,00	IDR	500.000.000	1,00	500.000.000,00	10 Juni 2015	500.000.000,00	500.000.000,00	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	Scripless	2,10	USD	4.000.000	0,02	84.000,00	30 November 2018	1.138.032.000,00	1.216.404.000,00	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	Scripless	88,21	USD	182.000	0,88	160.547,48	30 November 2018	2.175.097.259,04	2.324.888.057,88	Emiten Aktif	EUROCLEAR
Total									71.352.932.413,04	76.169.295.783,38		
b. Medium Term Notes												
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	93,92	USD	182.000	0,94	170.937,49	30 November 2018	2.315.861.114,52	2.475.345.792,69	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	90,00	USD	20.000.000	0,90	18.000.000,00	30 November 2018	243.864.000.000,00	260.658.000.000,00	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	90,00	USD	960.560	0,90	864.504,00	30 November 2018	11.712.300.192,00	12.518.882.424,00	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	90,00	USD	965.840	0,90	869.256,00	30 November 2018	11.776.680.288,00	12.587.696.136,00	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	13.548.000.000,00	14.481.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	5.000.000	1,00	5.000.000,00	01 Oktober 2004	67.740.000.000,00	72.405.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
Total									378.052.841.584,52	404.087.924.352,69		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 624 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2017	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2018	Keterangan	Kustodian
<i>c. Non-Convertible Debentures</i>												
1	Polysindo Eka Perkasa	Principal	100,00	IDR	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000,00	30 November 2018	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
Total									5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
Total (a+b+c)									454.405.774.007,56	485.257.220.136,07		

Total Nilai

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018

Catatan		
Kurs Tengah BI Per 31 Desember 2018		
1	Dollar Amerika	14.481,00

Keterangan

- * Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berhara di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI
- ** Emiten surat berharga berstatus aktif karena masih tercatat di Bursa
- *** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 625 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

Aset Saham Pada Kustodi Citibank												
No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Ditjen AHU
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32.137.300	144,00	Rp 4.917.006.900,00	Rp 4.627.771.200,00	Aktif	Berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk	Manufaktur Textile	Sertifikat	37.459.700	112,00	Rp 5.731.334.100,00	Rp 3.970.728.200,00	Aktif		Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	Scrpless	40.000	850,00	Rp 34.000.000,00	Rp 34.000.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui	-	Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46.250	75,00	Rp 3.468.750,00	Rp 3.468.750,00	BBO	-	-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75,00	Rp 27.225,00	Rp 27.225,00	BBO	-	-	-	-
6	PT Bank Ficoninvest	-	Sertifikat	400	50,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	BBKU	-	-	-	-
7	PT Bank PDFCI	-	Sertifikat	250	350,00	Rp 87.500,00	Rp 87.500,00	BTD	-	-	-	-
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300,00	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00	BBO	-	-	-	-
9	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scrpless	11.304.425	114,00	Rp 1.266.095.600,00	Rp 1.345.226.575,00	Aktif	-	Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
10	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scrpless	41.421.439	114,00	Rp 4.639.201.168,00	Rp 4.929.151.241,00	Aktif	-	Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 626 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

11	PT Gajah Tunggal, Tbk	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	640,00	Rp	143.000,00	Rp	130.000,00	Aktif
12	PT Holcim Indonesia, Tbk	Manufaktur Semen	Sertifikat	13.898.500	1.900,00	Rp	11.188.292.500,00	Rp	26.198.672.500,00	Aktif
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk	Manufaktur Plastik	Scrpless	57.901.002	142,00	Rp	9.785.269.338,00	Rp	8.337.744.288,00	Aktif
14	PT Star Pacific, Tbk (dlh PT Lippo E-Net)	Investasi dan bisnis medi	Sertifikat	100	140,00	Rp	14.000,00	Rp	14.000,00	Aktif
15	PT Merck, Tbk	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	40.000,00	Rp	4.000.000,00	Rp	4.000.000,00	Aktif
16	PT Mulia Industrindo, Tbk	Manufaktur Keramik dan Kaca	Sertifikat	-	0,00	Rp	-	Rp	-	-
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94.600	675,00	Rp	63.855.000,00	Rp	63.855.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui

Surat Nomor S-1349/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
Surat Nomor S-1348/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
Surat Nomor S-1369/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan tidak diberikan nama Pemegang Saham	-
Berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Muka Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset		
Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Dirjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 627 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

18	PT Perdana Inti Investama		Sertifikat	49.251.500	50,00	Rp	2.462.575.000,00	Rp	2.462.575.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui
19	PT Prma Alloy Steel Universal, Tbk	Manufaktur velg Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2.500	75,00	Rp	187.500,00	Rp	187.500,00	Aktif
20	PT Sierad Produce, Tbk	Peternakan	Scripless	1.918.865	1.160,00	Rp	1.419.960.100,00	Rp	1.966.836.625,00	Aktif
21	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	9.000,00	Rp	6.230.000,00	Rp	6.090.000,00	Aktif
22	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	Scripless	348.000	9.000,00	Rp	3.097.200.000,00	Rp	3.027.600.000,00	Aktif
23	PT Tnas Sentosa, Tbk	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	400,00	Rp	38.800,00	Rp	40.000,00	Aktif

Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU		Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak jelas
Surat Nomor S-1371/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten		
Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten		
Surat Nomor S-1373/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak tercatat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham perseroan atas nama BPPN	
Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	
Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 628 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

24	Unit Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Prima d.h. saham PT BDN Reksadana		Scrpless	80.000.000		Rp 42.726.015.195,72	Rp 44.798.339.066,32	Aktif	Berdasarkan surat PT Dadyndo Entricom selaku Biro Administrasi Efek emiten no DEIX/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh PT BDN Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saat ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan
Total						Rp 87.345.261.676,72	Rp 101.776.804.670,32		

Senua saham yang berstatus aktif, saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan, hanya 9 emiten dan 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dan 9 emiten yang membenarkan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya meninformasikan nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing.

Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 28 Desember 2018 (sumber: <https://www.bareksa.com/id/data/reksadana/296/reksa-dana-prma>)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 629 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2018

Saham Pengelolaan Langsung Oleh DJKN

No.	Nama Emiten	Core Business	Bentuk Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	eterangan Nilai Penyaji	Alamat Emiten
1	PT Karabha Dgdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf		100,00%	10.000	Rp 251.240.740.586	251.240.740.585,80	Aktif	Nilai buku berdasarkan surat Direksi PT Karabha Dgdaya Nomor D67.2/DIR/PTKD/VIII/17 tanggal 10 Juli 2017	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods		0,0024%	312	Rp 312.000	312.000,00	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perseroan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 No 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murni, Tbk	Manufaktur Kabel		6,24%	69.882.400	Rp 47.100.737.600	47.100.737.600,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Kabelindo Murni, Tbk Nomor D84/DIR-S/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl Rawagrang No 2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H R Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
Total						Rp 298.341.790.185,80	Rp 298.341.790.185,80			
Total Aset Saham Eks BPPN						Rp 400.118.594.856,12				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2018, melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang menbenkan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 630 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.F

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang disajikan dalam Neraca	Saldo Per 31 Desember 2017 (Audited)		Mutasi Semester I 2018		Saldo Per 30 Juni 2018		Mutasi Semester II 2018		Saldo Per 31 Desember 2018	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	285	1.804.429.239.851	5	31.199.803.000	290	1.835.629.042.851	(4)	(4.098.310.000)	286	1.831.530.732.851
BS	1.076	1.580.829.348.019	(11)	(45.832.640.000)	1.065	1.534.996.708.019	(74)	(16.197.370.000)	991	1.518.799.338.019
BT	323	865.910.243.344			323	865.910.243.344			323	865.910.243.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123.953.401.452			37	123.953.401.452			37	123.953.401.452
penebusan tanah										
JUMLAH	1.721	4.375.122.232.666			1.715	4.360.489.395.666			1.637	4.340.193.715.666
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang diungkap dalam CaLK										
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	640	2.092.463.091.833			640	2.092.463.091.833	(7)	(8.914.000.000)	633	2.083.549.091.833
JUMLAH	640	2.092.463.091.833			640	2.092.463.091.833			633	2.083.549.091.833
JUMLAH TOTAL	2.361	6.467.585.324.499							2.270	6.423.742.807.499

L. 630



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 631 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.G

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2017 (Audited) *	Nilai Aset Per 31 Desember 2018	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	2.793.450.000,00	Various	USD	22.000.000,00	Rp 186.230.000.000,00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	6.499.457.694,00	BII	USD	15.356.072,52	Rp 129.989.153.881,80	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000,00	4.317.150.000,00	BALI	USD	30.000.000,00	Rp 253.950.000.000,00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	215.857.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00	Rp 12.697.500.000,00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	1.805.657.589,00	Danamon	USD	1.000.000,00	Rp 8.465.000.000,00	
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
Total			16.657.242.209,00	16.657.242.209,00				Rp 625.201.523.307,80	

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

Kurs

8465



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 632 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan		n/a	Rp 223.500,00	Rp 223.500,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum,
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380	14,29%	Rp 141.550.000,00	Rp 141.550.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500	15,00%	Rp 28.310.000,00	Rp 28.310.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20,00%	Rp 234.871,00	Rp 234.871,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan
6	PT Servitria Finance	-	BUS	24.750	99,00%	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2006, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 633 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400	n/a	Rp 125.015.692,00	Rp 125.015.692,00	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham melalui Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5,43%	Rp 385.154.000,00	Rp 385.154.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU, Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330	15,00%	Rp -	Rp -	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	200.933	2,30%	Rp 323.903.996,00	Rp 323.903.996,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Jambi Ventura Nomor 06/DIR/SJV/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	498.260	3,67%	Rp 355.094.954,20	Rp 355.094.954,20	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalbar Ventura Nomor 453/SKV/07/2017 tanggal 28 Juli 2017	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121. Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 634 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193.066	1,04%	Rp 382.656.812,00	Rp 390.958.650,00	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 015/SKV/07/II/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	-
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106	1,41%	Rp 31.286.000,00	Rp 31.286.000,00	Aktif	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	-
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115	16,64%	Rp 34.239.460.920,00	Rp 4.038.531.683,65	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited)	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone . (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax (021) 521 0755	- Berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI per 31 Desember 2017 (audited), saham perseroan yang dimiliki Kementerian Keuangan adalah 1.412 lembar saham, yang terdiri atas 1.115 lembar saham eks. kelolaan PT PPA dan 397 lembar saham eks BDL. Berdasarkan hal tersebut dilakukan koreksi pencatatan. - Pada tahun 2018, berdasarkan hasil RUPST perseroan tahun 2017, dilakukan pembagian cash sebagai hasil divestasi anak usaha PT SBPI yaitu AFC. Merchant Bank Atas kepemilikan 1.115 lembar saham PT SBPI, Kementerian Keuangan menerima Rp24.382.173.300,00,
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Ma	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,04%	Rp 4.500.000.000,00	Rp 4.341.276.000,00	Aktif	Nilai wajar saham per 09 Juni 2017 berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT AJTM Nomor LAP-0215/11/WKN.07/KNL.03/03.01/2017 tanggal 8 Juli 2017	Tamansari Parama Boutque Office Lantai 11. Jalab KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 635 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	Rp 335.020.000,00	Rp 335.020.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor - KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/2007		-
17	BDNI Reksadana (PT Reks)	-	BDNI	0	0,00%	Rp -	Rp -	0	0		Saham PT BDNI Reksadana dihapusbukan dari akun surat berharga eks kelolaan PT PPA dikarenakan berdasarkan surat PT Dadyndo Entricom selaku Biro Administrasi Efek emiten no DE/X/2014-7152 tanggal 9
18	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	Rp 61.553.000,00	Rp 61.553.000,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 056/SSV/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
19	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	861.465	3,74%	Rp 861.465.000,00	Rp 970.886.000,00	Aktif	Nilai saldo saham berdasarkan surat Direksi PT Sarana Sumbar Ventura nomor 07/SSBV-DIR/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
20	PT Sarana Papua Ventura (d h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	Rp 82.471.000,00	Rp 82.471.000,00	Aktif	Nilai Modal Disetor Kementerian Keuangan per tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan surat Direktur PT Sarana Papua Ventura Nomor 16/ADM/SPV.VI/2016 tanggal 22 Agustus 2016	Jalan Santorosa, Tasangkapura No. 20, 99223. Jayapura, Papua	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 636 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018**

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
21	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000	15,00%	Rp 3.750.000.000,00	Rp 3.750.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-462/BL.10/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No S-171/MK 6/2007 tanggal 29 Juni 2007		
22	PT Asia Natural Resources	Perdagangan hasil tambang	-	22.006.500	0,97%	Rp 1.100.325.000,00	Rp 1.100.325.000,00	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di bursa telah
23	PT Jemblo Cable Company	Manufaktur kabel	-	654.500	0,43%	Rp 3.403.400.000,00	Rp 4.352.425.000,00	Aktif	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2018		Pada tahun 2016, aset saham PT Jemblo Cable tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersimpan di
24	PT Sukapraya Estetika Padang	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	13,87%	Rp 1.425.000.000,00	Rp 1.425.000.000,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraya Estetika Padang Golf Nomor 006/SEPG/DIR/OSW/2018 tanggal 26 Januari 2018	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifikasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq DJKN dh. PT PPA (Persero).
25	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-	-	100,00%	Rp -	Rp -	Tidak Aktif			Aset saham PT SEPG direklasifikasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 637 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 22.H

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2018

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2017	Nilai Per 31 Desember 2018	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
26	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga	-	273.000	96,53%	Rp -	Rp 22.470.000.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Pada tahun 2018, aset saham PT Sejahtera Eka Graha tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifikasi dari akun aset saham yang diserahkan ke aset saham eks kelolaan PT PPA.
27	PT Turban Petrochemical Industres	Petrokimia	-	-	70,00%	Rp -	Rp 8.750.000,00	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017		Pada tahun 2018, aset saham PT Turban Petrochemical Industri tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan aset saham tersebut direklasifikasi dari akun aset saham yang diserahkan ke aset saham
Total						Rp 53.107.124.745,20	Rp 46.292.969.346,85				

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2017, melalui surat nomor S-19/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2019, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2018 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK tahun 2018 belum ada emiten yang menbenkan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2018 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 638 -

ASET LAIN-LAIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 639 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	12.287.110.720	(262.752.167)	12.024.358.553	12.093.595.400	(1.283.710.421)	10.809.884.979
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18.627.927.252	(8.284.185.458)	10.343.741.794	16.513.703.434	(5.846.076.518)	10.667.626.916
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	61.551.373.767	(55.653.217.360)	5.898.156.407	21.421.653.287	(20.447.536.349)	974.116.938
4	005	MAHKAMAH AGUNG	135.623.038.742	(114.569.274.531)	21.053.764.211	121.947.499.753	(104.123.178.191)	17.824.321.562
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	78.507.611.770	(72.786.529.897)	5.721.081.873	55.088.376.025	(50.099.183.630)	4.989.192.395
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	262.071.923.074	(114.947.470.049)	147.124.453.025	276.502.028.994	(107.525.285.055)	168.976.743.939
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	388.378.557.288	(177.980.572.171)	210.397.985.117	243.017.275.805	(116.957.094.440)	126.060.181.365
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	113.688.381.260	(81.938.129.579)	31.750.251.681	117.733.922.822	(64.846.101.544)	52.887.821.278
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.305.613.513.814	(3.471.143.073.409)	2.834.470.440.405	5.099.567.905.903	(3.475.590.062.866)	1.623.977.843.037
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	349.586.548.982	(256.677.527.937)	92.909.021.045	271.241.635.576	(234.938.144.439)	36.303.491.137
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.139.813.993.517	(910.595.400.676)	229.218.592.841	865.287.703.248	(700.350.560.167)	164.937.143.081
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	716.975.689.013	(245.244.101.082)	471.731.587.931	366.970.350.022	(176.107.287.347)	190.863.062.675
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.180.818.896.191	(828.808.401.464)	352.010.494.727	1.203.012.177.177	(560.070.438.889)	642.941.738.288
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.129.200.211.249	(413.742.922.887)	715.457.288.362	1.110.690.803.891	(370.775.357.075)	739.915.446.816
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	5.231.113.506.667	(1.382.199.721.916)	3.848.913.784.751	4.689.311.508.841	(869.299.894.710)	3.820.011.614.131
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	607.599.164.234	(539.078.925.000)	68.520.239.234	564.843.100.649	(487.310.308.816)	77.532.791.833
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.896.652.429.657	(4.821.936.883.640)	1.074.715.546.017	1.861.374.860.857	(1.572.540.013.150)	288.834.847.707
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	303.467.082.927	(208.612.292.851)	94.854.790.076	182.792.595.700	(140.465.330.209)	42.327.265.491



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 640 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	545.056.528.846	(458.228.910.138)	86.827.618.708	617.430.188.157	(460.742.008.640)	156.688.179.517
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	27.417.688.583	(24.858.951.495)	2.558.737.088	29.632.501.014	(28.327.019.000)	1.305.482.014
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	482.878.816.419	(383.422.746.684)	99.456.069.735	374.479.476.319	(286.310.901.032)	88.168.575.287
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	342.965.519.318	(258.241.124.883)	84.724.394.435	214.641.530.229	(173.983.874.404)	40.657.655.825
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	233.130.907.196.903	(31.778.517.454.240)	201.352.389.742.663	34.514.284.618.434	(7.026.126.413.099)	27.488.158.205.335
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1.028.775.466	(116.970.835)	911.804.631	1.710.707.023	(1.706.444.523)	4.262.500
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	3.380.215.129	(2.908.769.049)	471.446.080	3.183.506.702	(2.695.909.439)	487.597.263
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	250.365.400	(250.365.400)	-	481.804.150	(432.744.150)	49.060.000
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	57.765.832.615	(11.233.662.781)	46.532.169.834	60.435.929.219	(10.674.865.958)	49.761.063.261
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	906.938.624	(882.577.124)	24.361.500	4.429.388.813	(367.056.514)	4.062.332.299
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	555.046.603.518	(308.887.568.529)	246.159.034.989	441.472.902.832	(243.729.312.557)	197.743.590.275
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	185.922.326.191	(16.947.230.725)	168.975.095.466	299.762.228.161	(24.175.450.199)	275.586.777.962
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	261.326.200	(149.329.256)	111.996.944



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 641 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.484.310.584	(1.484.018.084)	292.500	16.008.239	(10.672.159)	5.336.080
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.767.753.563	(1.802.482.743)	2.965.270.820	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	9.285.528.963	(2.143.836.815)	7.141.692.148	1.782.860.067	(1.782.860.067)	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	99.943.393.399	(87.230.572.407)	12.712.820.992	82.265.888.737	(66.028.892.181)	16.236.996.556
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	62.680.178.299	(2.607.734.195)	60.072.444.104	63.873.985.294	(2.598.368.149)	61.275.617.145
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	125.004.264.599	(114.427.810.259)	10.576.454.340	103.004.149.752	(100.572.588.356)	2.431.561.396
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93.930.401.983	(8.786.378.146)	85.144.023.837	79.122.343.101	(9.058.743.306)	70.063.599.795
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.621.187.552	(18.983.762.369)	1.637.425.183	25.020.789.361	(22.005.191.820)	3.015.597.541
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	856.260.491.543	(777.902.275.224)	78.358.216.319	753.747.925.477	(697.789.953.531)	55.957.971.946
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	15.276.035.516	(15.838.332.018)	(562.296.502)	14.942.717.477	(12.375.262.569)	2.567.454.908
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	8.343.400.965	(197.200.000)	8.146.200.965	528.172.499	(80.922.000)	447.250.499
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	49.773.970	(49.773.970)	-	-	(45.648.308.323)	(45.648.308.323)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	50.688.053.831	(49.759.618.763)	928.435.068	46.461.721.651	(963.858.970.889)	(917.397.249.238)
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	1.994.248.710.782	(889.622.125.693)	1.104.626.585.089	2.501.523.762.400	0	2.501.523.762.400



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 642 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	14.797.720.282	(10.129.262.907)	4.668.457.375	14.862.441.763	(8.835.820.857)	6.026.620.906
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.356.007.867	(104.785.675)	2.251.222.192	104.785.675	(104.785.675)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	36.375.441.590	(27.370.078.199)	9.005.363.391	28.109.240.771	(20.588.880.932)	7.520.359.839
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	62.663.133.603	(58.927.231.688)	3.735.901.915	57.677.783.200	(55.457.487.505)	2.220.295.695
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	7.000.920.398	(6.989.131.973)	11.788.425	6.984.249.898	(6.984.249.898)	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3.107.133.503	(94.176.500)	3.012.957.003	3.575.551.002	(1.847.088.579)	1.728.462.423
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	104.689.484.879	(56.807.950.403)	47.881.534.476	22.535.167.957	(19.013.407.476)	3.521.760.481
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	8.528.081.274	(8.645.504.434)	(117.423.160)	10.958.952.504	(10.459.088.421)	499.864.083
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	237.493.496.013	(109.451.928.198)	128.041.567.815	122.883.418.331	(101.962.014.813)	20.921.403.518
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	5.983.005.475	(4.812.248.441)	1.170.757.034	4.876.735.931	(4.022.518.154)	854.217.777
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	#VALUE!	6.416.386.500	(182.054.000)	6.234.332.500
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	4.322.338.489	(1.578.329.735)	2.744.008.754	98.178.705	(34.259.705)	63.919.000
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.260.701.850	(1.119.293.140)	141.408.710	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.375.539.100	(1.328.233.450)	47.305.650	737.034.955	(464.606.455)	272.428.500
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	7.254.929.769	(7.124.928.900)	130.000.869	4.764.944.283	(4.665.040.908)	99.903.375
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	5.040.713.882	(4.945.244.595)	95.469.287	13.056.081.276	(7.888.934.771)	5.167.146.505



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 643 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.778.682.115	(2.575.132.384)	203.549.731	3.834.449.277	(2.703.079.525)	1.131.369.752
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	111.442.518.114	(47.878.273.001)	63.564.245.113	2.724.474.604.741	(200.053.878.185)	2.524.420.726.556
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	196.677.386.495	(82.460.492.234)	114.216.894.261	246.870.284.728	(82.367.454.297)	164.502.830.431
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	4.435.355.597	(4.203.290.277)	232.065.320	4.266.426.001	(4.134.838.476)	131.587.525
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	9.594.029.740	(6.850.182.100)	2.743.847.640	7.497.924.955	(5.595.290.375)	1.902.634.580
68	100	KOMISI YUDISIAL	100.987.032	-	#VALUE!	522.029.174	(514.385.636)	7.643.538
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	81.529.802.239	(71.720.001.019)	9.809.801.220	171.500.999.962	(140.130.883.580)	31.370.116.382
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	23.375.013.984	(22.902.059.451)	472.954.533	16.759.004.183	(16.316.546.264)	442.457.919
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	#VALUE!	10.567.651.901	(7.623.831.428)	2.943.820.473
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	9.685.537.677	(1.627.893.151)	8.057.644.526	11.708.907.835	(2.816.123.141)	8.892.784.694
73	107	BADAN SAR NASIONAL	213.233.575.302	(65.346.477.613)	147.887.097.689	219.142.248.577	(58.911.411.450)	160.230.837.127
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	0	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	815.822.395	(509.078.084)	306.744.311	1.256.377.439	(921.304.271)	335.073.168
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	37.195.313.400	(21.855.629.535)	15.339.683.865	61.443.336.957	(31.201.482.699)	30.241.854.258



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 644 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 23

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	245.153.378.589	(149.836.409.876)	95.316.968.713	200.659.098.517	(203.972.156.865)	(3.313.058.348)
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	683.050.000	(662.621.428)	20.428.572	322.362.443	(107.640.766)	214.721.677
80	114	SEKRETARIAT KABINET	6.261.239.836	(941.919.382)	5.319.320.454	1.324.821.904	(556.352.889)	768.469.015
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	13.564.770.668	(7.234.337.428)	6.330.433.240	6.719.477.637	(693.438.332)	6.026.039.305
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	42.526.514.418	(41.255.719.947)	1.270.794.471	40.326.424.921	(39.422.247.992)	904.176.929
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	218.664.209.118	(193.540.378.614)	25.123.830.504	106.391.060.184	(104.934.932.312)	1.456.127.872
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589.396	(2.287.151.679)	1.260.437.717	3.547.589.396	(1.782.976.591)	1.764.612.805
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	14.445.733.031	(14.439.506.531)	6.226.500	482.232.826	(473.243.826)	8.989.000
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	#VALUE!	-	0	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	46.249.000	(34.303.417)	11.945.583	20.089.000	(10.044.500)	10.044.500
JUMLAH PADA K/L			264.349.885.641.992	(49.961.295.798.219)	214.388.589.843.773	61.455.378.467.188	(20.387.914.329.132)	41.067.464.138.056
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	578.750.594.207.564	(3.586.380.347)	578.747.007.827.217	598.059.673.768.407	(201.034.632.686.026)	397.025.041.082.381
TOTAL			843.100.479.849.556	(49.964.882.178.566)	793.135.597.670.990	659.515.052.235.595	(221.422.547.015.158)	438.092.505.220.437



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 645 -

DAFTAR BMN IDLE



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 646 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 24.A

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2018

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Jalan		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Lampung	Kab. Lampung Barat	Jl. Kesuma, Pasar Krui, Pesisir Tengah	615	01/01/2010	145.755.000	-	145.755.000	Hibah ke Pemkab Pesisir Barat
2	2010201001	Tanah Rawa	KPKNL Palembang	Palembang	Jl. Seroja Kamboja, Kelurahan 20 Ilir, Kec.	4.205	01/01/2013	1.567.177.840	-	1.567.177.840	PSP pada BPS RI
3	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Metro	Lampung Timur	Jl. Jenderal Sudirman No.01	1.130	01/01/1988	60.500.000	-	60.500.000	PSP pada Kementerian Keuangan
4	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Tangerang I	Tangerang	Jl. Komplek Perumahan Griya Pinang Asri,	730	01/01/2013	1.611.131.000	-	1.611.131.000	PSP pada Komisi Yudisial
5	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Dr. Maliholo	531	01/04/1968	356.400.000	-	356.400.000	PSP pada Kementerian Keuangan
TOTAL TANAH						7.211		3.740.963.840	-	3.740.963.840	
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Lampung	Kab. Lampung Barat	Jl. Kesuma, Pasar Krui, Pesisir Tengah	144	01/01/2010	60.425.000	9.668.000	50.757.000	Hibah ke Pemkab Pesisir Barat
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Metro	Lampung Timur	Jl. Jenderal Sudirman No.01	360	01/01/1988	82.300.000	23.941.818	58.358.182	PSP pada Kementerian Keuangan
TOTAL BANGUNAN						504		142.725.000	33.609.818	109.115.182	
TOTAL						7.715		3.883.688.840	33.609.818	3.850.079.022	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 647 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 24.B

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166128	Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN									
	TANAH		73.407	44.038.163.516	281.374	25.103.886.660	7.211	3.740.963.840	347.650	65.481.076.228
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	6.631	2.597.922.602	667	140.326.000			7.298	2.738.248.602
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	13.289	11.596.150.416	3.061	181.481.000	531	356.400.000	15.819	11.421.231.416
2.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	200	1.001.000.000					200	1.001.000.000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	15.329	16.470.008.500	4.948	316.208.000	2.475	1.817.386.000	17.802	14.968.830.500
2.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	M2	1.015	1.380.400.000					1.015	1.380.400.000
2.01.01.04.018	Tanah Bangunan Pos Jaga	M2	-	-	6.508	71.980.550			6.508	71.980.550
2.01.01.99.999	Tanah Persil Lainnya	M2	889	7.477.138.000					889	7.477.138.000
2.01.02.01.001	Tanah Rawa	M2	9.144	3.407.913.000			4.205	1.567.177.840	4.939	1.840.735.160
2.01.02.02.002	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	M2	26.990	107.621.000					26.990	107.621.000
2.01.03.08.003	Tanah untuk Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	M2	-	-	266.190	24.393.891.000			266.190	24.393.891.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN		83	10.626.564.884	30	3.488.823.038	2	142.725.000	121	13.982.652.920
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	16	6.785.871.041	2	1.728.633.171	2	142.725.000	16	8.371.779.212
4.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	1	26.555.288	1	15.117.825			2	41.673.113
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	6.200.000	2	59.265.000			3	65.465.000
4.01.01.04.001	Gedung Instalasi Studio	Unit	-	-	1	7.562.000			1	7.562.000
4.01.01.04.002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	2	8.694.000					2	8.694.000
4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	-	-	2	295.543.000			2	295.543.000
4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	-	-	1	10.184.248			1	10.184.248
4.01.01.13.002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	1	15.271.000	7	245.363.347			8	260.634.347



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 648 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 24.B

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2017		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2018	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	62.500.000					1	62.500.000
4.01.01.24.001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	1	109.116.485					1	109.116.485
4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	118.927.000					2	118.927.000
4.01.02.01.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	2	120.804.437					2	120.804.437
4.01.02.01.013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	-	-	4	173.936.000			4	173.936.000
4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	338.711.692					1	338.711.692
4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	289.995.000	3	455.205.591			6	745.200.591
4.01.02.02.008	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Unit	-	-	1	15.317.000			1	15.317.000
4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	52	1.769.175.029					52	1.769.175.029
4.01.02.02.013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	1	77.520.134					1	77.520.134
4.01.02.02.014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Unit	2	80.943.778					2	80.943.778
4.01.02.02.015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Unit	2	28.100.000					2	28.100.000
4.01.02.04.001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Unit	-	-	2	398.222.854			2	398.222.854
4.01.02.09.999	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya	Unit	-	-	1	3.813.000			1	3.813.000
4.01.02.99.999	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Unit	3	703.311.000					3	703.311.000
4.04.01.01.009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	1	43.928.000	3	91.660.000			4	135.588.000
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	1	39.931.000					1	39.931.000
TOTAL				54.003.709.402		20.003.709.586		3.003.000.940		79.303.729.148



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 649 -

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 650 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	345213143	406.765.290	-	135.416.000	7.991.268	129.414.237
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	99388158	2.359.840.672	5.361.621.728	4.439.877.981	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	62537868997	60.986.545.027	952.515.553	1.075.292.762	1.286.850	43.936.941
4	005	MAHKAMAH AGUNG	23504418265	30.084.076.014	971.400.491	844.110.148	2.819.000	10.718.466
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1,3287E+11	88.528.814.594	419.977.265	-	1.031.673.674	863.250
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1,07304E+11	67.213.565.692	63.334.688.539	71.843.462.056	5.541.091.473	7.218.551.826
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.099.580.668	12.055.539.377	3.388.124.870	1.348.220.166	-	617.569.067
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	66.046.352.492	51.796.815.809	383.250.000	638.750.000	197.781.298	16.179.293
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	8.488.408.342.644	6.454.161.190.355	1.169.368.774.536	6.007.668.352	25.144.591.430	8.660.097.620
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	105.218.621.484	222.697.385.108	297.076.909.128	293.567.777.306	893.850	41.628.677
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	472.206.297.236	1.486.741.001.607	88.730.205.183	267.311.529.885	2.690.975.505	1.634.231.652
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	247.540.754.802	29.986.921.676	4.991.253.179	4.111.131.341	-	2.178.462.038
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.736.812.603	2.518.832.120	19.723.767.548	19.104.459.056	-	11.297.816
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	111.949.273.418	75.690.991.106	10.351.484.291	16.362.159.263	288.913.070	194.956.199
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	446.077.282.624	219.484.907.017	31.947.759.585	52.281.877.089	1.781.300	271.351.355
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	508.819.563.523	1.046.462.808.793	1.405.663.161	1.344.508.821	268.624.707	409.552.089
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.247.499.237.957	1.492.156.224.516	115.414.379.017	116.097.544.526	109.374.898	174.220.925



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 651 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	489.786.337.885	1.098.066.469.844	28.527.070.912	27.837.498.982	4.072.446.624	2.732.064.166
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.397.831.487	7.246.549.166	551.319.155.846	497.671.397.490	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.205.917.841	155.625.426	146.742.000	316.883.583	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	48.511.655.011	39.464.238.717	1.663.905.634	1.739.210.196	2.727.272	5.827.150
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.224.707.014	175.323.176.542	2.795.261.502	2.599.217.498	-	775.481
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.152.176.385.294	79.442.197.871	18.512.859.775	21.548.857.458	13.349.261	109.819.154
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.132.143.718	2.467.902.405	-	-	257.551.671	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.232.554.692	4.668.404.629	-	-	93.258.415	65.968.790
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	384.536.115	281.336.587	-	-	106.603.805	231.503.520
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	30.808.255.546	35.640.614.494	4.453.731.971	4.556.975.543	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	6.626.846.612	37.109.483	1.627.566.300	3.126.930.400	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.466.618.127.260	819.900.650.121	480.381.269.898	581.809.786.686	7.559.368.598	12.459.754.131
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	7.907.900.743	7.399.751.015	27.580.098.626	24.236.796.334	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.203.141.374	-	10.283.000	20.566.000	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	2.694.682.148	258.443.937	-	-	12.543.385	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 652 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	54.791.945.996	10.783.800.003	473.783.631	853.409.262	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	937.297.137	826.821.026	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1.076.426.760	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	132.577.726.879	67.116.062.498	406.655.330	76.987.320	162.548.572	247.823.811
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	21.715.821.483	13.270.000.291	200.409.583	110.938.166	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	57.486.088.181	59.165.382.652	428.229.924.943	448.354.593.856	28.517.852	23.040.532
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.771.297.238	2.298.377.533	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.449.639.269	9.424.956.990	10.455.045.823.788	11.660.741.708.117	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	309.249.930.906	703.448.690.296	20.182.640.866	40.741.580.208	1.142.655.681	24.104.024.451
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	12.307.969.987	3.206.263.638	33.391.680.815	31.863.416.571	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	461.426.721	405.609.250	1.251.405.956	998.761.290	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.018.700.285	4.665.237.219	1.627.616.429	1.630.840.096	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.647.769.945	3.572.577.082	19.387.500	34.897.500	388.900	19.403.181
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	4.357.312.149	6.611.032.907	-	-	-	1.182.408
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.716.023.450	1.315.735.102	467.789.000	896.127.517	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	715.839.862	537.844.410	-	-	-	175.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 653 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.260.040.398	4.245.598.516	-	-	-	-
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	19.325.252.305	8.997.844.787	-	-	1.685.207.180	1.258.616.446
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	540.604.451	650.287.175	1.806.470.877	2.306.117.323	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	144.780.102	990.452.993	3.828.330	13.016.327	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	2.333.816.164	3.429.695.646	361.643.820	361.643.820	717.750.664	103.253.321
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	24.119.681.385	2.784.516.563	107.883.967	109.542.858	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	26.850.031.216	29.906.879.523	-	-	1.373.004.832	1.109.078.849
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	10.216.744.310	752.183.933	93.913.250	5.541.508	-	22.778.384
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.354.183.940	664.082.523	69.030.970	40.367.507	-	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	5.225.574.491	31.594.478	609.000.000	745.500.000	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	14.916.503	252.273.498	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	542.824.852	234.971.695	2.576.406.102	1.802.497.421	10.564.192	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.458.992.441	549.493.059	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.961.186.258	2.041.990.119	299.415.347	458.488.712	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.846.298.102	3.214.411.201	714.393.028	642.930.618	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.077.868.216	4.370.754.385	1.476.673.228	2.539.337.866	16.128.950	22.600.150
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	29.111.364.834	18.460.027.268	628.236.150	58.586.996	4.076.053	8.727.272



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 654 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	14.794.536.717	12.043.630.323	29.427.488	27.187.680	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.763.656.901	5.589.408.903	-	-	218.367.763	241.979.367
68	100	KOMISI YUDISIAL	129.925.795	131.992.624	10.512.667	72.900.667	6.448.280	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	179.616.426.130	12.311.613.581	197.955.000	318.266.250	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	4.471.661.968	3.674.605.147	17.513.526	72.878.901	-	33.455.722
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	5.042.433.878	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	620.028.446	598.750.160	293.488.828	295.935.518	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	5.300.455.703	1.241.445.972	201.646.100	481.495.900	-	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	23.903.801	47.694.160	6.709.073.996	11.002.242.566	-	92.672.608
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	16.097.200	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	375.211.249	329.574.269	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	540.454.036	674.790.136	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	123.023.117.279	127.672.110.075	1.671.126.470.419	1.169.990.012.803	8.079.500	5.384.500
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	206.869.613	95.048.260	-	-	-	28.341.373
80	114	SEKRETARIAT KABINET	8.147.367.714	4.070.837.821	-	-	385.225.904	422.053.397



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 655 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 25

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA, PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA DAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2018 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	3.126.405.160	28.295.180.195	-	-	2.303.213.408	2.988.089.793
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.359.492.707	8.692.631.294	14.262.668.912	13.023.514.604	-	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	138.167.775.441	132.751.962.826	10.862.669.813	9.472.287.295	3.040.959.468	3.094.746.998
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.052.000	22.343.100	380.174.667	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	451.754.231	3.622.700.001	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	2.503.407.505	3.219.400.853	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	831.846.622	2.466.357.607	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			17.548.296.494.980	14.934.504.654.454	15.584.991.431.064	15.422.121.457.965	58.508.784.553	71.046.171.406
Jurnal Konsolidasi SPAN			5.065.326.093.892	-	-	-	(5.092.755.757.470)	(54.572.479.892)
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	77.267.818.090.744	29.503.730.518.739	100.581.952.941	126.927.059.727	5.067.125.419.119	20.847.698
TOTAL			99.881.440.679.616	44.438.235.173.193	15.685.573.384.005	15.549.048.517.692	32.878.446.202	16.494.539.212



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 656 -

RINCIAN UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI PERBANKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 657 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ^{*)}	UTANG JANGKA PANJANG IDR ^{*)}	TOTAL POSISI UTANG IDR ^{*)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	USD	31	7.320.574.083	12.055.474.253.791	93.953.759.041.842	106.009.233.295.633
AFD	EUR	7	859.364.286	88.358.094.548	14.142.499.635.904	14.230.857.730.452
	USD	3	450.000.000	1.158.480.000.000	5.357.970.000.000	6.516.450.000.000
IBRD	USD	34	13.314.849.390	10.184.862.050.208	182.627.471.966.093	192.812.334.016.300
IDA	SDR	1	26.053.500	91.931.195.842	432.787.075.965	524.718.271.806
JICA	JPY	38	376.509.998.000	7.400.676.044.867	41.965.469.993.903	49.366.146.038.770
KfW	EUR	5	1.100.000.000	-	18.215.725.000.000	18.215.725.000.000
	USD	5	832.649.882	945.480.674.545	11.112.122.271.910	12.057.602.946.455
TOTAL		124		31.925.262.313.800	367.807.804.985.616	399.733.067.299.417

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.481,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 658 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ¹⁾	UTANG JANGKA PANJANG IDR ¹⁾	TOTAL POSISI UTANG IDR ¹⁾
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
2	ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	2	6.855.351,82	20.640.529.780,30	92.882.382.520,95	113.522.912.301,25
3	ADB	ADB	6	34.841.819,49	147.870.528.215,85	356.673.859.818,84	504.544.388.034,69
4		SDR	45	354.358.326,05	1.345.592.622.068,44	5.791.194.695.328,34	7.136.787.317.396,78
5		USD	84	1.939.654.472,29	3.728.783.204.548,89	24.359.353.208.610,20	28.088.136.413.159,10
6	AFD	EUR	1	34.496.668,41	60.132.232.178,54	511.123.972.523,96	571.256.204.702,50
7		USD	4	93.380.662,97	144.607.872.985,60	1.207.637.507.410,57	1.352.245.380.396,17
8	AiIB	USD	3	73.648.422,69	-	1.066.502.808.973,89	1.066.502.808.973,89
9	AKA	USD	1	29.182.631,03	90.146.299.837,68	332.447.380.107,75	422.593.679.945,43
10	ATRADIUS DSB	EUR	1	24.443.395,61	150.380.530.613,85	254.395.989.838,85	404.776.520.452,70
11		USD	1	6.699.685,30	36.043.690.927,68	60.974.451.901,62	97.018.142.829,30
12	AUSTRALIA	AUD	2	468.954.614,01	99.566.239.065,34	4.689.060.631.882,69	4.788.626.870.948,03
13	B A W A G	EUR	2	14.586.788,84	57.358.251.490,50	184.195.324.986,14	241.553.576.476,63
14	BANCO DE SABADELL	USD	1	38.336.105,00	138.786.284.271,06	416.358.852.233,94	555.145.136.505,00
15	BANK MANDIRI SIN	USD	9	150.676.998,67	879.680.007.996,12	1.302.273.609.744,15	2.181.953.617.740,27
16	BANQUE DE FRANCE	EUR	3	73.832.520,21	334.392.503.083,79	888.255.573.463,76	1.222.648.076.547,55
17	BBVA	EUR	2	7.120.715,86	43.923.077.091,26	73.994.197.371,38	117.917.274.462,64
18		USD	2	32.500.000,00	117.658.125.289,62	352.974.374.710,38	470.632.500.000,00
19	BBVAIT	EUR	1	5.009.375,00	23.701.142.187,50	59.252.855.468,75	82.953.997.656,25
20	BELGIUM	EUR	11	18.962.219,76	77.756.071.307,75	236.253.547.362,92	314.009.618.670,66
21	BLG	EUR	1	19.714.000,00	-	326.458.911.500,00	326.458.911.500,00
22	BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	29.984.349,00	-	441.062.277.702,75	441.062.277.702,75
23		EUR	8	118.911.324,03	851.183.320.091,47	1.117.958.478.014,32	1.969.141.798.105,79
24		GBP	1	4.212.241,72	19.347.636.892,76	58.042.911.413,20	77.390.548.305,96
25		USD	3	41.445.797,22	260.425.267.884,45	339.751.321.658,37	600.176.589.542,82
26	BNP PARIBAS, SPAIN	EUR	1	527.863,68	8.741.290.574,88	-	8.741.290.574,88
27	BQC CAYMAN ISLAND	USD	1	6.302.728,74	45.634.907.586,78	45.634.907.297,16	91.269.814.883,94
28	BOTM SINGAPORE	USD	5	120.690.643,17	540.002.380.291,56	1.207.718.823.453,21	1.747.721.203.744,77
29	BRI SINGAPORE	USD	1	2.851.077,18	11.796.128.183,88	29.490.320.459,70	41.286.448.643,58
30	BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	14.157.186,13	-	234.439.463.016,27	234.439.463.016,27
31		USD	3	160.774.823,29	968.271.196.140,00	1.359.909.019.922,49	2.328.180.216.062,49
32	BRUNEI INVEST. BANK	USD	2	5.264.026,32	60.982.692.459,48	15.245.672.680,44	76.228.365.139,92
33	CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	91.675.850,51	287.206.509.654,00	1.040.351.481.581,31	1.327.557.991.235,31
34	CASA OF FRANCE	EUR	1	91.036.314,00	-	1.507.538.600.761,50	1.507.538.600.761,50
35	CASSA DEPOSITI	USD	2	2.204.854,41	14.161.279.503,78	17.767.217.207,43	31.928.496.711,21
36	CDC	GBP	1	1.589.233,04	10.847.721.047,38	18.350.892.072,94	29.198.613.120,32
37	CESCE, SPAIN	USD	1	11.444.216,83	61.568.830.744,49	104.154.873.185,22	165.723.703.929,71
38	CEXIM	USD	1	9.979.000,00	57.802.359.600,00	86.703.539.400,00	144.505.899.000,00
39	CIDA	CAD	24	77.424.202,51	104.505.415.588,65	718.077.958.832,52	822.583.374.421,17
40	CITIBANK LONDON	EUR	3	26.269.855,03	79.094.951.603,68	355.927.280.229,37	435.022.231.833,04
41	COFACE	EUR	1	42.893.895,68	263.891.575.568,97	446.420.613.417,91	710.312.188.986,88
42		USD	1	25.756.714,37	138.568.737.743,05	234.414.243.048,92	372.982.980.791,97
43	CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	6	139.482.294,93	984.654.995.010,91	1.325.136.938.456,16	2.309.791.933.467,07
44		USD	2	69.952.121,05	288.926.664.925,05	724.050.000.000,00	1.012.976.664.925,05
45	CREDIT SUISSE	CHF	2	4.688.902,63	28.007.805.292,50	40.964.780.169,14	68.972.585.461,64
46	CZECH EXPORT BANK	USD	1	37.590.154,50	-	544.343.027.314,50	544.343.027.314,50
47	DENMARK	DKK	3	13.168.205,00	8.837.359.622,56	20.368.007.200,79	29.205.366.823,35
48	DEUTSCHE BANK AG, HK	USD	1	676.585,14	9.797.629.412,34	-	9.797.629.412,34
49	DEUTSCHE BANK LONDON	USD	2	24.224.450,15	78.773.455.338,48	272.020.807.283,67	350.794.262.622,15
50	DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	2	7.856.047,81	28.562.431.008,57	101.531.756.713,08	130.094.187.721,65
51	DEUTSCHE BANK TOKYO	USD	2	1.974.397,54	28.591.250.776,74	-	28.591.250.776,74
52	DFAS	USD	1	1.544.923,16	8.311.548.558,65	14.060.483.721,31	22.372.032.279,96
53	DRESDNER SINGAPORE	EUR	3	271.645,13	3.961.587.717,40	536.787.773,80	4.498.375.491,20
54		USD	1	119.842,14	1.156.956.280,22	578.477.749,12	1.735.434.029,34
55	DZ Bank AG Singapore	USD	3	11.802.675,79	70.744.778.735,19	100.169.769.379,80	170.914.548.114,99
56	ECCGD	GBP	1	63.904.799,04	436.198.737.338,82	737.909.437.319,32	1.174.108.174.658,14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 659 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ¹⁾	UTANG JANGKA PANJANG IDR ¹⁾	TOTAL POSISI UTANG IDR ¹⁾
1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
57		USD	1	12.193.443,42	65.599.603.916,78	110.973.650.248,24	176.573.254.165,02
58	EDC	USD	3	114.623.218,70	365.706.415.224,31	1.294.152.414.770,39	1.659.858.829.994,70
59	EFIC	EUR	3	20.196.299,05	137.792.678.795,91	196.652.984.314,53	334.445.663.110,44
60		USD	20	65.022.562,58	412.719.559.994,08	528.872.168.741,38	941.591.728.735,46
61	EIB	USD	1	9.902.491,31	94.410.005.397,75	48.987.971.262,36	143.397.976.660,11
62	EKF	EUR	1	1.609.452,31	9.901.664.035,54	16.750.463.854,98	26.652.127.890,52
63		USD	1	6.307.720,34	33.934.955.123,69	57.407.143.061,93	91.342.098.185,62
64	EKN	USD	1	3.657.173,71	19.681.869.048,52	33.277.663.445,99	52.959.532.494,51
65	EKSPORTFINANS ASA	USD	6	15.132.831,45	85.167.094.004,82	133.971.438.222,63	219.138.532.227,45
66	EKSPORTKREDIT AS	USD	1	79.376.470,00	-	1.149.450.662.070,00	1.149.450.662.070,00
67	ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	18.944.480,48	20.481.044.484,02	293.234.816.144,66	313.715.860.628,68
68	EXIM BANK KOREA	KRW	18	325.245.648.180,00	152.690.716.037,20	4.085.260.079.748,20	4.237.950.795.785,40
69		USD	22	1.092.567.435,42	2.669.323.718.484,98	13.152.145.313.846,50	15.821.469.032.331,50
70	EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	1.007.554.261,87	327.059.863.778,20	1.798.829.251.054,40	2.125.889.114.832,61
71		USD	16	1.435.640.373,71	1.651.960.645.317,14	19.137.547.606.435,30	20.789.508.251.752,40
72	EXIM BANK TAIPEI	USD	1	913.907,26	4.916.736.840,68	8.317.554.191,38	13.234.291.032,06
73	EXIMBANK HUNGARY	USD	1	26.263.491,98	-	380.321.627.362,38	380.321.627.362,38
74	FINNVERA	EUR	4	500.075,02	2.835.204.733,35	5.445.912.529,42	8.281.117.262,77
75		USD	1	602.106,88	3.239.279.565,62	5.479.830.163,66	8.719.109.729,28
76	GIEK	USD	1	3.578.200,72	19.250.394.084,82	32.565.530.541,50	51.815.924.626,32
77	GOSPODRSTWA	USD	4	6.550.431,59	56.475.881.898,75	38.380.917.956,04	94.856.799.854,79
78	HAPOLIM, ZURICH	USD	1	4.080.000,00	39.388.320.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00
79	HSBC LONDON	GBP	4	5.850.041,25	77.008.712.906,34	30.472.749.470,42	107.481.462.376,76
80	IBRD	USD	59	3.786.553.631,54	2.155.966.276.420,95	52.677.116.861.851,90	54.833.083.138.272,80
81	ICO	EUR	9	78.318.097,03	7.327.171.717,22	1.289.600.935.575,33	1.296.928.107.292,54
82		USD	19	119.845.958,93	278.994.704.311,85	1.456.494.626.953,48	1.735.489.331.265,33
83	IDA	SDR	31	743.038.080,67	2.182.820.884.716,85	12.781.988.351.119,40	14.964.809.235.836,20
84		USD	48	124.746.462,33	404.804.833.858,48	1.401.648.687.142,25	1.806.453.521.000,73
85	IDB	ACU	42	195.833.399,28	487.613.251.751,51	2.348.250.203.207,69	2.835.863.454.959,20
86		USD	25	792.241.816,23	1.324.989.086.395,09	10.147.464.654.373,60	11.472.453.740.768,70
87	IFAD	EUR	2	8.495.708,24	8.009.851.716,50	132.676.952.810,84	140.686.804.527,34
88		SDR	8	122.914.664,74	138.150.817.745,42	2.337.354.217.558,12	2.475.505.035.303,54
89		USD	1	2.500.000,00	-	36.202.500.000,00	36.202.500.000,00
90	ING BANK AMSTERDAM	EUR	7	327.124.426,68	915.988.841.561,28	4.501.109.883.152,86	5.417.098.724.714,13
91	JAICA	JPY	2	6.892.880.000,00	139.244.891.775,50	764.515.758.712,50	903.760.650.488,00
92	JBIC	JPY	12	33.239.684.563,00	1.751.857.220.867,53	2.606.367.344.578,67	4.358.224.565.446,20
93		USD	4	45.591.558,83	313.119.807.535,05	347.091.555.882,18	660.211.363.417,23
94	JICA	JPY	239	1.017.276.854.869,00	13.984.280.551.502,90	119.396.076.002.332,00	133.380.356.553.834,00
95	KFAED	KWD	2	886.800,00	21.128.426.796,00	21.128.426.700,70	42.256.853.496,70
96	KfW	EUR	63	671.048.099,42	1.727.543.361.391,92	9.384.845.402.978,43	11.112.388.764.370,30
97		USD	2	37.027.921,25	213.441.843.528,09	322.759.484.093,16	536.201.327.621,25
98	KOMERCNI BANKA	USD	1	4.030.356,60	29.181.796.962,30	29.181.796.962,30	58.363.593.924,60
99	MAFF, JAPAN	JPY	2	4.253.103.675,00	156.430.039.631,43	401.216.074.026,57	557.646.113.657,99
100	METI, GOV. OF JAPAN	JPY	1	5.359.332.998,00	261.059.602.736,33	441.629.879.229,74	702.689.481.968,07
101	MIZUHO SINGAPORE	USD	1	15.199.487,07	48.911.949.487,80	171.191.822.772,87	220.103.772.260,67
102	N I O	EUR	10	69.730.500,57	386.853.218.944,43	767.866.437.869,63	1.154.719.656.814,06
103	NATIXIS BANQUE	EUR	74	442.580.472,41	1.320.648.303.128,39	6.008.373.674.863,10	7.329.021.977.991,50
104	NIB	EUR	3	8.921.050,12	10.730.141.720,70	137.000.218.003,97	147.730.359.724,67
105	NORDEA FINLAND	USD	1	6.345.373,45	22.971.838.775,40	68.915.514.125,09	91.887.352.900,49
106	OEKB	EUR	1	47.432.969,58	291.816.862.065,46	493.661.255.936,95	785.478.118.002,41
107	ONDD	EUR	1	13.189.961,19	81.147.210.976,15	137.275.248.839,95	218.422.459.816,10
108	PT BNI TOKYO BRANCH	USD	3	5.440.000,00	19.694.160.000,00	59.082.480.000,00	78.776.640.000,00
109	PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	2	121.162.023,58	958.500.066.659,05	1.047.912.753.319,86	2.006.412.819.978,91
110		USD	2	283.610.394,74	1.246.191.393.540,78	2.860.770.732.689,16	4.106.962.126.229,94
111	PT MANDIRI HONGKONG	USD	1	21.250.000,00	153.860.625.000,00	153.860.625.000,00	307.721.250.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 660 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.B

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2018

NO	CREDITOR NAME	CU BASE	JML LOAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR IDR ¹⁾	UTANG JANGKA PANJANG IDR ¹⁾	TOTAL POSISI UTANG IDR ¹⁾
1	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
112	PT. BNI-HONG KONG	USD	5	37.559.697,20	91.973.862.133,83	451.928.113.019,37	543.901.975.153,20
113	PT. BNI-SINGAPORE	GBP	1	1.021.607,75	12.513.176.269,80	6.256.587.951,17	18.769.764.220,97
114		USD	24	198.370.548,47	1.053.383.389.560,41	1.819.220.522.833,66	2.872.603.912.394,07
115	RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3	14.680.608,66	40.517.868.043,98	202.589.341.213,46	243.107.209.257,44
116	RUSIA FED.	USD	7	209.400.453,75	416.151.509.800,50	2.616.176.460.953,25	3.032.327.970.753,75
117	SACE	EUR	1	365.159,45	2.246.535.875,51	3.800.413.326,62	6.046.949.202,14
118		USD	1	1.710.114,27	9.200.257.201,96	15.563.907.541,91	24.764.164.743,87
119	SERV	CHF	5	43.342.578,38	231.262.559.517,04	406.295.932.808,16	637.558.492.325,21
120	SFD	SAR	5	177.778.950,85	85.583.392.772,24	600.534.912.348,75	686.118.305.120,98
121	SOCIETE GENERALE	EUR	2	5.009.555,00	-	82.956.978.411,25	82.956.978.411,25
122	SWISS	CHF	1	2.833.333,30	41.677.624.509,68	-	41.677.624.509,68
123	UBS AG, SINGAPORE	USD	2	41.966.549,55	607.717.604.033,55	-	607.717.604.033,55
124	UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	35	177.964.952,67	581.139.505.482,23	2.365.915.619.494,81	2.947.055.124.977,03
125	UNICREDIT MUNICH	EUR	1	4.326.316,25	20.469.347.339,01	51.173.368.181,93	71.642.715.520,94
126	US DEP TREASURY	USD	2	5.129.321,01	37.424.575.773,27	36.853.121.772,54	74.277.697.545,81
127	US EXIM	USD	9	126.176.317,25	575.624.583.077,19	1.251.534.667.020,06	1.827.159.250.097,25
128	USAID	USD	110	201.633.712,26	613.318.943.790,33	2.306.538.843.417,77	2.919.857.787.208,10
129	USDA	USD	10	109.712.291,88	390.810.863.976,75	1.197.932.834.737,53	1.588.743.698.714,28
130	VNESHECONOMBANK	USD	2	99.875.000,00	1.446.289.875.000,00	-	1.446.289.875.000,00
131	Grand Total		1293		56.807.705.485.166,50	346.526.988.201.325,00	403.334.693.686.492,00

132 ¹⁾ Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 14.481,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 661 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.C

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0031	15-Nov-20	(168.270.917.000,00)	88.385.985.000,00
2	FR0034	15-Jun-21	(941.746.000,00)	51.737.802.000,00
3	FR0035	15-Jun-22	(7.358.964.000,00)	-
4	FR0037	15-Sep-26	(60.748.763.000,00)	-
5	FR0039	15-Aug-23	(16.454.792.000,00)	-
6	FR0040	15-Sep-25	(11.705.210.000,00)	609.333.102.000,00
7	FR0042	15-Jul-27	(108.291.531.000,00)	48.919.032.000,00
8	FR0043	15-Jul-22	(71.244.181.000,00)	36.970.671.000,00
9	FR0044	15-Sep-24	(617.843.580.000,00)	11.881.409.000,00
10	FR0045	15-May-37	(39.287.747.000,00)	655.998.320.000,00
11	FR0046	15-Jul-23	(797.798.701.000,00)	268.709.145.000,00
12	FR0047	15-Feb-28	(853.077.807.000,00)	32.433.952.000,00
13	FR0050	15-Jul-38	(470.080.715.000,00)	142.485.235.000,00
14	FR0052	15-Aug-30	(297.693.698.000,00)	111.928.972.000,00
15	FR0053	15-Jul-21	(197.914.460.000,00)	991.536.857.000,00
16	FR0054	15-Jul-31	(383.552.731.000,00)	394.520.901.000,00
17	FR0056	15-Sep-26	(797.582.111.000,00)	2.120.925.199.000,00
18	FR0057	15-May-41	(28.582.168.000,00)	1.169.714.224.000,00
19	FR0058	15-Jun-32	(43.632.332.000,00)	3.957.668.048.000,00
20	FR0059	15-May-27	(998.745.865.000,00)	1.209.077.539.000,00
21	FR0061	15-May-22	(254.289.063.000,00)	1.336.468.032.000,00
22	FR0062	15-Apr-42	(374.707.396.000,00)	110.170.285.000,00
23	FR0063	15-May-23	(3.484.225.388.000,00)	140.673.566.000,00
24	FR0064	15-May-28	(4.830.751.605.000,00)	139.172.980.000,00
25	FR0065	15-May-33	(4.137.516.218.000,00)	641.639.105.000,00
26	FR0067	15-Feb-44	(392.405.823.000,00)	1.027.689.567.000,00
27	FR0068	15-Mar-34	(2.129.894.069.000,00)	872.315.946.000,00
28	FR0070	15-Mar-24	(457.614.633.000,00)	1.745.793.795.000,00
29	FR0071	15-Mar-29	(193.930.573.000,00)	3.010.165.206.000,00
30	FR0072	15-May-36	(664.594.048.000,00)	2.797.394.782.000,00
31	FR0073	15-May-31	(196.631.835.000,00)	3.694.440.223.000,00
32	FR0074	15-Aug-32	(343.581.741.000,00)	513.011.016.000,00
33	FR0075	15-May-38	(1.966.671.363.000,00)	1.268.614.589.000,00
34	FR0076	15-May-48	(134.626.823.000,00)	11.286.314.000,00
35	FR0077	15-May-24	(228.594.616.000,00)	40.276.821.000,00
36	FR0078	15-May-29	(273.154.182.000,00)	74.709.344.000,00
Grand Total			(26.033.997.395.000,00)	29.326.047.964.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 662 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.D

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-35	-	638.241.056.000,00
2	RI0037	17-Feb-37	(131.245.719.000,00)	-
3	RI0038	17-Jan-38	(268.220.543.000,00)	-
4	RI0122	8-Jan-22	(14.009.586.000,00)	-
5	RI0123	11-Jan-23	(25.333.239.000,00)	-
6	RI0124	15-Jan-24	(68.065.006.000,00)	-
7	RI0125	15-Jan-25	(92.539.564.000,00)	-
8	RI0126	8-Jan-26	(87.306.574.000,00)	-
9	RI0127	8-Jan-27	(54.712.559.000,00)	-
10	RI0128	11-Jan-28	(64.269.898.000,00)	-
11	RI0142	17-Jan-42	(228.085.213.000,00)	165.138.384.000,00
12	RI0144	15-Jan-44	(255.247.974.000,00)	-
13	RI0145	15-Jan-45	(248.174.156.000,00)	-
14	RI0146	8-Jan-46	(109.380.352.000,00)	-
15	RI0147	8-Jan-47	(142.063.579.000,00)	-
16	RI0148	11-Jan-48	(190.720.343.000,00)	-
17	RI0320	13-Mar-20	(20.958.997.000,00)	-
18	RI0422	25-Apr-22	(50.221.085.000,00)	-
19	RI0423	15-Apr-23	(65.391.027.000,00)	-
20	RI0428	24-Apr-28	(31.585.610.000,00)	-
21	RI0443	15-Apr-43	(234.427.085.000,00)	-
22	RI0521	5-May-21	(87.616.603.000,00)	-
23	RI0727	18-Jul-27	(46.764.185.000,00)	-
24	RI0747	18-Jul-47	(100.210.008.000,00)	-
25	RI1023	17-Oct-23	(28.649.854.000,00)	-
26	RIEUR0425	24-Apr-25	(29.995.899.000,00)	-
27	RIEUR0623	14-Jun-23	(132.183.951.000,00)	-
28	RIEUR0628	14-Jun-28	(260.783.425.000,00)	-
29	RIEUR0721	8-Jul-21	(36.065.876.000,00)	-
30	RIEUR0724	18-Jul-24	(21.895.618.000,00)	-
31	RIEUR0725	30-Jul-25	(181.427.248.000,00)	-
Grand Total			(3.307.550.776.000,00)	803.379.440.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 663 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 26.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Unamortized Discount / Premium Obligasi SBSN Rupiah
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(5.411.444.000,00)	14.624.904.000,00
2	IFR0007	15-Jan-25	(8.932.948.000,00)	10.964.453.000,00
3	IFR0008	15-Mar-20	(513.200.000,00)	473.762.000,00
4	IFR0010	15-Feb-36	(15.932.545.000,00)	267.534.760.000,00
5	PBS002	15-Jan-22	(575.544.125.000,00)	-
6	PBS003	15-Jan-27	(426.800.270.000,00)	2.244.233.000,00
7	PBS004	15-Feb-37	(1.329.182.458.000,00)	-
8	PBS005	15-Apr-43	(1.775.928.688.000,00)	-
9	PBS006	15-Sep-20	(53.334.762.000,00)	361.598.179.000,00
10	PBS007	15-Sep-40	(14.387.962.000,00)	351.937.481.000,00
11	PBS011	15-Aug-23	(4.546.572.000,00)	1.056.141.009.000,00
12	PBS012	15-Nov-31	(63.574.887.000,00)	2.842.526.304.000,00
13	PBS014	15-May-21	(334.686.140.000,00)	48.200.014.000,00
14	PBS015	15-Jul-47	(431.518.786.000,00)	47.672.458.000,00
15	PBS016	15-Mar-20	(145.244.502.000,00)	138.467.859.000,00
16	PBS017	15-Oct-25	(252.777.095.000,00)	-
17	PBS018	15-May-28	(66.034.006.000,00)	-
18	PBS019	15-Sep-23	(55.487.558.000,00)	-
19	PBS020	15-Oct-27	(23.697.662.000,00)	4.486.301.000,00
20	PBS021	15-Nov-26	(4.352.651.000,00)	-
Grand Total			(5.587.888.261.000,00)	5.146.871.717.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 664 -

IKHTISAR LK UBL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 665 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	9.500.000		9.363.558			9.363.558	136.442	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						0	0	Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	279.150		265.597			265.597	13.554	Bagian satker	018
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	1.337.687		1.337.687			1.337.687	0	Bagian satker	050
5	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	99.844.802	6.335.227	85.097.850	2.758.060		94.191.138	5.653.664	Satker	026
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	10.000.000		10.000.000			10.000.000		Bagian satker	025
7	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda						0	0	tidak aktif	033
8	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	54.419.000	4.406.623	45.901.921	1.815.147		52.123.692	2.295.308	Satker	033
9	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	183.355.740	38.594.902	123.102.115	4.153.033		165.850.051	17.505.689	Satker	020
10	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)						0	0	Bukan satker	025
11	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	-	0	-	-		0	0	inaktif	025
12	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	12.000.000	7.838.734	3.506.739	171.127		11.516.599	483.401	Satker	090
13	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.065.140		1.040.758			1.040.758	24.382	Bagian satker	088
14	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)						0	0	Bukan satker	091
15	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						0	0	Bagian satker	040
16	Badan Restorasi Gambut	234.762.553	11.514.673	187.341.961	12.688.545		211.545.179	23.217.374	Satker	029
17	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	3.216.279	2.783.686			5.999.966	34	Bukan satker	025
18	Dewan Energi Nasional (DEN)	57.116.345	17.979.694	32.907.839	2.114.433		53.001.966	4.114.379	Satker	020
19	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	21.600.000		18.990.850	232.400		19.223.250	2.376.750	Satker	036



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 666 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
20	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	278.522.850				255.921.175	255.921.175	22.601.675	Satker	999
21	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	1.000.000		902.898	34.500		937.398	62.602	Bagian satker	018
22	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	14.325.000		13.357.180			13.357.180	967.820	Bagian satker	044
23	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	18.252.213	1.574.285	16.556.998	80.300		18.211.583	40.630	Satker	035
24	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	1.152.380		1.152.134			1.152.134	246	Bagian satker	026
25	Dewan Pers	17.854.774	2.894.169	13.720.717	34.901		16.649.787	1.204.987	Satker	059
26	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	2.000.000		1.845.522			1.845.522	154.478	Bagian satker	010
27	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	38.978.810	3.380.485	34.885.104	125.634		38.391.223	587.587	Satker	007
28	Dewan Riset Nasional (DRN)	5.436.040	-	5.333.890			5.333.890	102.150	Bagian satker	042
29	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	10.207.707	248.682	9.499.084	199.918		9.947.684	260.023	Satker	033
30	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	3.200.000		3.154.495			3.154.495	45.505	Bagian satker	055
31	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	38.768.467	7.288.643	24.634.006	1.231.859		33.154.508	5.613.959	Bagian satker	048
32	Komisi Banding Merek	722.964		474.124			474.124	248.840	Bagian satker	013
33	Komisi Banding Paten	447.201	-	439.474	-		439.474	7.727	Bagian satker	013
34	Komisi Informasi Pusat (KIP)	16.750.702	3.369.234	12.801.144	251.773		16.422.151	328.551	Satker	059
35	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	749.390		747.707			747.707	1.683	Bagian satker	043
36	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	9.530.512		8.733.439			8.733.439	797.073	Bagian satker	034
37	Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas)	14.714.529	2.825.766	11.718.221			14.543.987	170.542	Bagian satker	034
38	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	18.782.982	7.430.983	9.592.321	44.086		17.067.390	1.715.592	Bagian satker	074
39	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	2.405.285		66.900			66.900	2.338.385	Bagian satker	027
40	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	-	-	-	-		-	-	tidak aktif	036



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 667 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
41	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	3.155.169		3.147.974			3.147.974	7.196	Bagian satker	025
42	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	51.381.082	6.525.241	40.167.832	3.795.035		50.488.108	892.974	Satker	059
43	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	15.000.000	1.395.000	12.925.146	570.440		14.890.586	109.414	Satker	047
44	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	16.552.224		14.364.011			14.364.011	2.188.213	Bagian satker	084
45	Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)	58.500.000		57.953.371			57.953.371	546.629	Bagian satker	035
46	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	33.320.000	14.663.030	2.683.287	2.457.216	8.887.981	28.691.514	4.628.486	Bagian satker	012
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.000.000		994.071			994.071	5.929	Bagian satker	035
48	Komite Keuangan Nasional Syariah	18.900.000		16.302.308	1.288.484		17.590.792	1.309.208	satker	055
49	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPIP)	40.000.000		39.587.001	146.561		39.733.562	266.438	Bagian satker	035
50	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	564.320		405.418			405.418	158.902	Bagian satker	078
51	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	42.756.192	8.371.587	24.175.778	6.790.680	-	39.338.045	3.418.147	Satker	022
52	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	50.252.256	6.925.350	1.417.438			41.709.576	50.052.364	Bagian satker	092
53	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	2.726.100		1.835.505			1.835.505	890.595	Bagian satker	048
54	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)						-	-	Tidak aktif	035
55	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)						0	0	Tidak aktif	041
56	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.544.315		3.520.467			3.520.467	23.848	Satker	015
57	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KNSU)						-	-	Tidak aktif	084
58	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	34.565.651		26.476.535	4.011.171		30.487.705	4.077.946	Satker	024
59	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.200.000		1.197.564			1.197.564	2.436	Bagian satker	088
60	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.089.590		1.867.705			1.867.705	221.885	Bagian satker	026
61	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	81.411.655	8.296.633	64.620.022	7.776.226		80.692.881	718.774	Satker	007



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 668 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14
62	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	834.240		833.288			833.288	952	Bagian satker	026
63	Lembaga Sensor Film (LSF)	41.130.449	12.384.937	25.226.852	1.269.343	-	38.881.131	2.249.318	Satker	023
64	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						0	0	Tidak aktif	024
65	Otorita Asahan	5.740.000	1.491.449	204.475			1.695.924	4.044.076	Bukan satker	019
66	Sekretariat Pengadilan Pajak	99.336.906	70.917.251	21.451.017	4.254.484		96.622.751	2.714.155	Satker	015
67	SKK MIGAS (Satker)	1.856.364.450				1.611.276.862	1.611.276.862	245.087.588	satker	999
68	SKK MIGAS (Bukan Satker)						0	0	Bukan satker	999
69	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	45.458.965	-	37.198.920			37.198.920	8.260.045	Bagian satker	114
70	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	41.616.381	-	4.215.586	583.876		4.799.462	36.816.919	Bagian satker	114
71	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)						0	0	Bukan Satker	999
72	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)						0	0	Satker	999
73	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						0	0	Bukan Satker	007
74	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						0	0	Bukan Satker	007
75	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	73.500.000	2.597.774	37.669.842	3.523.540		43.791.156	29.708.844	Satker	040
76	Otoritas Nasional Senjata Kimia	4.153.716		3.851.752			3.851.752	301.964	Bagian satker	019
77	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur								Belum aktif	040
78	Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan								Belum aktif	092
79	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia								Belum aktif	024
	J U M L A H	3.810.135.884	252.466.632	1.135.549.083	62.402.772	1.917.795.594	3.368.214.080	441.921.804		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 669 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.B

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	239.407.364	-	239.407.364	245.680.595	-	245.680.595	(6.273.231)	025	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)			-	92.428.698		92.428.698	(92.428.698)	026	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda			-			-	-	033	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)		575.037	575.037	50.751.406	-	50.751.406	(50.176.369)	033	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.415.740.143	4.294.701	1.420.034.844	163.545.466	9.509	163.554.975	1.256.479.868	020	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)			-			-	-	025	tidak aktif
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	14.955.533.310	68.302.769	15.023.836.079	14.802.653.933		14.802.653.933	221.182.146	025	Bukan satker
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	8.685	8.685	11.633.361	59.100	11.692.461	(11.683.776)	090	Satker
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	487.657.312	-	487.657.312	3.470.351		3.470.351	484.186.961	091	Bukan satker
10	Badan Restorasi Gambut	74.686	7.991.975	8.066.662	151.122.035	3.138.897	154.260.932	(146.194.271)		
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	237.910	6.237.910	5.999.966	9.229	6.009.195	228.716	025	Bukan satker
12	Dewan Energi Nasional (DEN)		449.351	449.351	53.018.257	4.470	53.022.727	(52.573.375)	020	Satker
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	20.570	20.570	19.557.865	48.752	19.606.616	(19.586.047)	036	Satker
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	3.022	304.921	307.943	48.269.038	5.318	48.274.355	(47.966.412)	999	Satker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 670 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.B

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	9.174	9.174	18.226.176	1.154	18.227.329	(18.218.155)	035	Satker
16	Dewan Pers	499	24.720	25.219	17.136.166	20.738	17.156.904	(17.131.685)	059	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	23.177	23.177	39.136.221	9.491	39.145.712	(39.122.535)	007	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	334	334	9.959.964	621	9.960.585	(9.960.251)	033	Satker
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	264	40.058	40.322	33.850.027	667	33.850.694	(33.810.372)	048	Satker
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	71.954	71.954	16.703.141	206.041	16.909.182	(16.837.228)	059	Satker
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	26.121	19.755	45.876	50.042.032	114.464	50.156.496	(50.110.620)	059	Satker
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	218.287	218.287	14.872.944	93.364	14.966.308	(14.748.022)	047	Satker
23	Komite Keuangan Nasional Syariah	1.082	-	1.082	16.786.955	-	16.786.955	(16.785.873)	055	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	93.516	1.610	95.126	37.166.334	11	37.166.345	(37.071.219)	022	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	-	8.000	8.000	3.531.492	74	3.531.567	(3.523.567)	015	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	10.786.703	138.813	10.925.516	29.503.950	14.657	29.518.607	(18.593.091)	024	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	50	313.162	313.212	80.396.666	33.713	80.430.379	(80.117.167)	007	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	3.384.177	378.896	3.763.073	42.641.873	92.817	42.734.691	(38.971.617)	023	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	024	Tidak aktif
30	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	019	Bukan satker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 671 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.B

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	2.953	187.937	190.889	96.814.548	130.525	96.945.072	(96.754.183)	015	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	3.173.979	15.432.918	18.606.896	1.621.096.467	649.435	1.621.745.902	(1.603.139.006)	999	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.611.292.317	-	1.611.292.317	1.715.701.276	-	1.715.701.276	(104.408.960)	999	Bukan satker
34	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	5.569.587.680	-	5.569.587.680	5.034.453.918	-	5.034.453.918	535.133.762	999	Bukan Satker
35	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	2.294.753	2.294.753	50.602.486	-	50.602.486	(48.307.733)	999	Satker
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMI	115.617.020	-	115.617.020	114.537.123	-	114.537.123	1.079.897	007	Bukan satker
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.843.516	-	3.843.516	1.660.144	3.577.529	5.237.673	(1.394.157)	007	Bukan satker
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	7.479	7.695	15.173	40.931.268	20.533	40.951.801	(40.936.628)	040	satker
	J U M L A H	24.422.233.192	101.357.161	24.523.590.353	24.733.882.142	8.241.108	24.742.123.250	(218.532.897)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 672 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	98.713.929	-	9.915.996	-	108.629.925	5.404.705	-	5.404.705	103.225.220	108.629.925	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	1.883.918	-	2.914.505	-	4.798.423	-	-	-	4.798.423	4.798.423	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	773	-	2.378.195	22.260	2.401.227	-	-	-	2.401.227	2.401.227	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	117.934.596	-	253.027.909	1.971.840	372.934.345	13.802.013	-	13.802.013	359.132.332	372.934.345	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak aktif
7	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	72.203.669.370	40.720.915.397	1.011.469	242.979	112.925.839.215	361.761.842	108.774.780.536	109.136.542.378	112.925.839.215	112.925.839.215	Bukan Satker
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	155.306	-	431.154	246.800	833.260	-	-	-	833.260	833.260	Satker
9	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	1.385.433.160	8.814.486.707	-	-	10.199.919.867	-	9.715.732.906	9.715.732.906	484.186.961	10.199.919.867	Bukan satker
10	Badan Restorasi Gambut	161.895.995	-	13.780.896	601.790	176.278.682	-	-	-	176.278.682	176.278.682	Satker
11	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	694.872	563.276	184.087	4.660.450	6.102.685	702.442	4.131.694	4.834.135	1.268.550	6.102.685	Bukan satker
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	365.739	-	3.921.680	42.276	4.329.696	-	-	-	4.329.696	4.329.696	Satker
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional	245.046	-	895.239	-	1.140.285	178.880	-	178.880	961.405	1.140.285	Satker
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Kepulauan Riau	-	-	428.773.260	3.301.928	432.075.188	-	-	-	432.075.188	432.075.188	Satker
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	70.919	-	25.916	74.414	171.249	100.867	-	100.867	70.382	171.249	Satker
16	Dewan Pers	172.183	-	828.647	83.750	1.084.580	5.599	-	5.599	1.078.981	1.084.580	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	794.754	-	806.488	80.763	1.682.005	3.612	-	3.612	1.678.393	1.682.005	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	22.537	-	576.297	-	598.834	-	-	-	598.834	598.834	Satker
19	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	214.105	-	7.111.702	439.418	7.765.225	145.698	-	145.698	7.619.527	7.765.225	Satker
20	Komisi Informasi Pusat (KIP)	124.295	-	525.365	38.144	687.804	13.707	-	13.707	674.097	687.804	Satker
21	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	376.204	-	8.893.672	52.706	9.322.582	79.260	-	79.260	9.243.322	9.322.582	Satker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 673 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 27.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
22	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	233.590		1.144.775	183.583	1.561.947	-	-	-	1.561.947	1.561.947	Satker
23	Komite Keuangan Nasional Syariah	21.518		1.822.672	-	1.844.189	345.356		345.356	1.498.833	1.844.189	Satker
24	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	27.187		11.827.040	10.603.134	22.457.361	-		-	22.457.361	22.457.361	Satker
25	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	32.605		18.334		50.939	-		-	50.939	50.939	Satker
26	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	1.969.754		158.126.615	563.260	160.659.629	809.704		809.704	159.849.925	160.659.629	Satker
27	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	100.996		145.349.236	321.613	145.771.845	240.275		240.275	145.531.569	145.771.845	Satker
28	Lembaga Sensor Film (LSF)	1.601.431		12.972.519	321.303	14.895.253	20		20	14.895.233	14.895.253	Satker
29	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-	-		-	-	-	Tidak aktif
30	Otorita Asahan	1.255.399		4.504.964	1.239.478.731	1.245.239.094	85.642.943		85.642.943	1.159.596.151	1.245.239.094	Bukan satker (dibubarkan)
31	Sekretariat Pengadilan Pajak	735.979		8.167.099	-	8.903.078	-		-	8.903.078	8.903.078	Satker
32	SKK MIGAS (Satker)	3.117.970		69.684.435	48.452.578	121.254.984	12.036.224		12.036.224	109.218.760	121.254.984	satker
33	SKK MIGAS (Bukan Satker)	2.541.534		103.748.132		106.289.666	133.599.223	868.896.091	1.002.495.313	(896.205.647)	106.289.666	Bukan satker
34	Otoritas Jasa Keuangan (DJK) (bukan satker)	6.115.776.314		1.128.523.052	551.575.699	7.795.875.066	244.129.818	1.769.260.112	2.013.389.929	5.782.485.137	7.795.875.066	Bukan Satker
35	Otoritas Jasa Keuangan (DJK) (satker)	5.338.796		98.035.195	26.957.104	130.331.095	-		-	130.331.095	130.331.095	Satker
36	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMI	35.913.947		87.931.725		123.845.672	15.863.847	16.946.418	32.810.265	91.035.407	123.845.672	Bukan Satker
37	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.958.801		2.932.453		6.891.253			-	6.891.253	6.891.253	Bukan Satker
38	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	10.608		3.989.100		3.999.709	11.023		11.023	3.988.686	3.999.709	Satker
	TOTAL	80.145.404.129	49.535.965.380	2.574.779.824	1.890.316.524	134.146.465.856	874.877.058	121.149.747.755	122.024.624.814	121.258.383.421	134.146.465.856	

L. 673



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 674 -

**DANA KELOLAAN BLU
PUSAT PEMBIAYAAN
PERUMAHAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 675 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 28

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
1	BTN	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	20.286.930.568,33
2	MANDIRI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	126-00-0703519-8	3.963.832,70
3	BTN SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	7011001717	6.671.891.834,00
4	BUKOPIN	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1023938011	1.715.113,56
5	BANK RIAU KEPRI	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	10-10-00010-6	67.924.654,45
6	BANK SUMUT	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	350.01.06.0000054	391.763.027,06
7	BANK SUMUT Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	610.01.06.000008-0	17.195.170,30
8	BANK Kaltim	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11100244	178.528.937,39
9	BANK Sumsel Babel	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	1703000001	3.027.627,49
10	BANK NTT	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	016.01.01.000014-6	870.840.980,24
11	BANK DIY	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	1111001471	1.307.233,98
12	BRI	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	0193-01-002945-30-6	5.125.775,72
13	BNI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	2226662828	1.739.010.758,00
14	BRI SYARIAH	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1030811328	551.583.437,41
15	BPD JATIM	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	11268862	339.861.123,28
16	BPD JATIM Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6101003780	6.722.601,47
17	BPD JATENG	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	1-034-02557-2	1.828.324,00
18	BPD Papua	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	1500105000063	7.937.885,55
19	BPD Kalteng	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	100-002-000003591-0	293.767.010,00
20	BPD Kalsel	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	003.00.04.00848.5	2.497.862,44
21	Bank Syariah Mandiri	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	7122212216	244.105.365,83
22	BPD Nagari (Sumbar)	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	2100.0101.01446-1	267.835.906,25
23	BPD Sulawesi Tenggara	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	001.01.05.500231-0	99.770.546,00
24	Bank Artha Graha	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	1075015719	8.947.302.621,37
25	Bank NTB	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	001.21.07109.00-6	115.367.349,50
26	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	8000000000003	5.451.896,00
27	Bank Mayora	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6000486815	19.964.413,53
28	Bank Sumsel Babel Syariah	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	801-32-00002	182.285.538,00
29	Bank Jambi	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	3000947217	1.552.003,39
30	Bank Jabar Banten Syariah	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	70102000901	109.102.625,93
31	Bank Sulselbar Syariah	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	510-052-000000004-7	13.416.368,00
32	Bank Sulut Go	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	1601420000036	12.767.378,76
33	Bank Sulselbar	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	3.980.105,00
34	Bank Kalbar	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	1000001909	264.687.887,23
35	Bank Sulteng	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	10101000353	197.690.403,44
36	Bank Bali	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	100121000548	23.551.700,92
37	Bank Kalsel Syariah	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	901.00.01.00303.8	32.131.521,85
38	Bank Aceh Syariah	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	610 01.01.000007-0	8.875.499,49
39	BTPN	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	5373000630	3.839.595,00
40	Bank Jambi Syariah	RPL 019 PPDP UTK Dana Kelolaan	7001170273	11.225.875,07



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 676 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 28

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Bank	Nama Rekening	No. Rekening	Saldo Dana Bergulir (Rp)
41	Bank Kaltimtaras syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5100052101	3.442.564,00
42	Bank Jateng Syariah	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	5031004003	2.443.991,00
43	Bank DKI	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	40001208662	0
44	KEB Hana	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	110121800087211	9.695.280,19
45	BRI Agro	RPL 019 PPDPP UTK Dana Kelolaan	1001000505407	600.772,62
46	BTN	Pengelolaan Kas	101400224547	200.000.000.000,00
47	BTN	Pengelolaan Kas	101400225218	150.000.000.000,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran (1)				392.024.510.965,74
Selisih kas rekening Dana Kelolaan (2)				* (101.403.796,82)
Total Saldo Dana Bergulir Sesuai Rekening Koran (3=1-2)				391.923.107.168,92
Total Aset Lainnya (4=3)				391.923.107.168,92

Keterangan :

Selisih kas rekening dana kelolaan senilai Rp.100.736.544,00 terdiri dari akumulasi dari nilai-nilai berikut ini :

- a. Jasa giro yang belum dipindahkan ke rekening operasional sebesar (Rp457.344.115,60);
- b. Pencairan FLPP pada bank Sulteng yang seharusnya dipindahkan ke dana program sebelum 31 Desember 2018, namun baru dilakukan setelah 31 Desember 2018 sebesar (Rp183.825.000,00);
- c. Biaya-biaya yang muncul pada rekening Dana Kelolaan sebesar Rp395.548,15;
- d. Kesalahan Bank Sultra yang melakukan *double* pendebitan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp194.250.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019;
- e. Kesalahan Bank NTT yang kelebihan dalam melakukan pendebitan pencairan FLPP dari Dana Kelolaan ke Dana Program sebesar Rp10.000.000,00 serta kekurangan pendebitan sebesar (Rp8.326.000,00) (dua kali kekurangan pendebitan masing-masing sebesar Rp.4.163.000,00), sehingga jika dijumlahkan adalah PPDPP lebih bayar sebesar Rp1.674.000,00. Namun telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan pada tanggal 03 Januari 2019 (rekening terlampir);
- f. Pembatalan FLPP sebesar Rp381.445.763,00 atas beberapa bank yaitu :
 - a. Bank Jatim sebesar Rp92.625.000,00;
 - b. Bank Sumsel Babel sebesar Rp89.250.000,00;
 - c. Bank Sultra sebesar Rp96.900.000,00;
 - d. Bank Sumsel Babel Syariah sebesar Rp102.670.763,00.atas pembatalan beberapa bank tersebut telah dana telah dikembalikan ke rekening Dana Kelolaan PPDPP pada bulan Januari 2019.
- g. Kesalahan pemindahbukuan bank dari rekening operasional bank Sulselbar ke rekening dana kelolaan sebesar (Rp38.000.000,00), dan akan dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening operasional pada Januari 2019;
- h. Serta beberapa kesalahan pencatatan oleh beberapa bank sebesar Rp7,63,00.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 677 -

LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 678 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	131111	Tanah	353.496.962.605	937.764.422.000	584.267.459.395
2	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	160.568.289.493	201.278.735.000	40.710.445.507
3	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	131111	Tanah	188.409.157.000	1.073.370.956.905	884.961.799.905
4	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	133111	Gedung dan Bangunan	722.151.448.273	826.074.360.556	103.922.912.283
5	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134111	Jalan dan Jembatan	6.870.699.000	6.870.699.000	-
6	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	134112	Irigasi	3.388.031.928	3.388.031.928	-
7	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	131111	Tanah	1.695.021.150.768	5.393.085.509.622	3.698.064.358.854
8	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.874.796.628.372	2.154.254.141.535	279.457.513.163
9	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	5.045.811.543	16.097.672.416	11.051.860.873
10	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	134112	Irigasi	9.476.290.763	13.090.041.946	3.613.751.183
11	005	MAHKAMAH AGUNG	131111	Tanah	4.674.570.201.359	18.590.587.433.846	13.916.017.232.487
12	005	MAHKAMAH AGUNG	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
13	005	MAHKAMAH AGUNG	133111	Gedung dan Bangunan	5.376.248.766.311	6.799.952.598.875	1.423.703.832.564
14	005	MAHKAMAH AGUNG	134111	Jalan dan Jembatan	12.416.781.360	14.907.717.902	2.490.936.542
15	005	MAHKAMAH AGUNG	134112	Irigasi	13.505.181.291	11.772.777.772	(1.732.403.519)

L.678



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 679 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
16	005	MAHKAMAH AGUNG	135121	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
17	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	3.561.671.405.231	15.332.134.078.146	11.770.462.672.915
18	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	4.291.149.722.005	3.856.815.866.992	(434.333.855.013)
19	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	6.103.210.905	14.304.798.924	8.201.588.019
20	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	6.370.747.340	6.512.643.251	141.895.911
21	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	131111	Tanah	87.074.216.197.603	559.533.523.926.383	472.459.307.728.780
22	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	4.082.450.411.857	6.764.028.915.607	2.681.578.503.750
23	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	96.349.832.668	308.350.248.390	212.000.415.722
24	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	134112	Irigasi	59.821.647.437	110.699.422.492	50.877.775.055
25	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	131111	Tanah	2.273.442.063.655	11.229.540.817.000	8.956.098.753.345
26	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	1.855.664.967.978	2.490.376.042.273	634.711.074.295
27	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	31.565.116.287	30.698.010.202	(867.106.085)
28	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	134112	Irigasi	8.464.999.229	11.333.495.877	2.868.496.648
29	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	131111	Tanah	10.987.477.162.452	38.193.366.319.037	27.205.889.156.585

L.679



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 680 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
30	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	1.896.301.944.078	6.778.444.985.396	4.882.143.041.318
31	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134111	Jalan dan Jembatan	24.644.803	13.010.308.077	12.985.663.274
32	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	134112	Irigasi	3.649.502	3.649.502	-
33	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131111	Tanah	294.835.406.765.490	1.466.872.624.813.270	1.172.037.218.047.780
34	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
35	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	133111	Gedung dan Bangunan	23.834.922.396.954	53.769.102.464.825	29.934.180.067.871
36	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134111	Jalan dan Jembatan	1.350.639.967.619	6.630.977.337.771	5.280.337.370.152
37	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	134112	Irigasi	510.651.937.276	725.342.567.655	214.690.630.379
38	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	131111	Tanah	12.529.831.996.828	45.705.235.412.953	33.175.403.416.125
39	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	6.831.801.421.177	8.784.787.551.093	1.952.986.129.916
40	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	134111	Jalan dan Jembatan	9.591.169.054	23.051.610.929	13.460.441.875
41	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	134112	Irigasi	7.859.359.770	8.436.254.983	576.895.213
42	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	131111	Tanah	19.215.320.495.376	91.266.532.570.966	72.051.212.075.590
43	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	10.325.780.551.852	14.274.045.587.039	3.948.265.035.187
44	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	134.516.561.740	156.498.749.730	21.982.187.990

L.680



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 681 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
45	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	134112	Irigasi	24.481.215.196	34.065.716.472	9.584.501.276
46	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	131111	Tanah	11.491.409.430.690	80.262.934.985.401	68.771.525.554.711
47	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	133111	Gedung dan Bangunan	3.108.401.959.119	5.441.815.505.120	2.333.413.546.001
48	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134111	Jalan dan Jembatan	64.254.198.545	167.198.212.875	102.944.014.330
49	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	134112	Irigasi	91.776.340.396	200.632.287.353	108.855.946.957
50	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	131111	Tanah	2.529.491.595.203	8.301.434.578.250	5.771.942.983.047
51	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	133111	Gedung dan Bangunan	975.736.040.859	1.508.529.543.877	532.793.503.018
52	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134111	Jalan dan Jembatan	1.098.186.672	11.741.052.369	10.642.865.697
53	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	134112	Irigasi	3.542.044.426	36.992.940.225	33.450.895.799
54	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER	131111	Tanah	4.136.646.637.155	18.148.561.938.495	14.011.915.301.340
55	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER	133111	Gedung dan Bangunan	1.581.252.968.553	2.263.967.267.051	682.714.298.498
56	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER	134111	Jalan dan Jembatan	17.854.596.703	33.149.966.410	15.295.369.707
57	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER	134112	Irigasi	50.210.435.328	139.524.730.867	89.314.295.539
58	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	131111	Tanah	65.317.591.521.473	299.375.287.114.701	234.057.695.593.228

L.681



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 682 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
59	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	133111	Gedung dan Bangunan	13.985.852.886.495	15.645.064.896.571	1.659.212.010.076
60	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134111	Jalan dan Jembatan	43.640.649.187.820	90.306.043.882.437	46.665.394.694.617
61	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134112	Irigasi	3.661.440.388.442	5.049.634.347.262	1.388.193.958.820
62	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	131111	Tanah	3.779.503.080.672	16.723.323.479.369	12.943.820.398.697
63	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	3.319.332.969.982	6.110.778.984.810	2.791.446.014.828
64	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	31.950.459.157	65.772.207.468	33.821.748.311
65	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	134112	Irigasi	27.750.933.418	184.580.087.037	156.829.153.619
66	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	131111	Tanah	15.562.732.556.862	64.345.859.548.002	48.783.126.991.140
67	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	133111	Gedung dan Bangunan	9.216.965.190.061	12.213.335.321.685	2.996.370.131.624
68	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134111	Jalan dan Jembatan	28.874.858.801	82.856.315.164	53.981.456.363
69	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	134112	Irigasi	46.597.448.486	51.009.350.331	4.411.901.845
70	025	KEMENTERIAN AGAMA	131111	Tanah	15.875.691.355.278	59.803.628.403.868	43.927.937.048.590
71	025	KEMENTERIAN AGAMA	133111	Gedung dan Bangunan	16.943.686.149.528	23.405.616.807.892	6.461.930.658.364
72	025	KEMENTERIAN AGAMA	134111	Jalan dan Jembatan	81.906.410.656	118.706.536.480	36.800.125.824
73	025	KEMENTERIAN AGAMA	134112	Irigasi	112.515.576.131	98.441.840.722	(14.073.735.409)

L.682



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 683 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
74	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	131111	Tanah	1.625.314.695.584	7.599.735.077.026	5.974.420.381.442
75	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.051.854.428.944	1.662.601.755.780	610.747.326.836
76	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134111	Jalan dan Jembatan	7.941.484.563	15.896.782.005	7.955.297.442
77	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	134112	Irigasi	3.067.091.918	5.208.339.035	2.141.247.117
78	027	KEMENTERIAN SOSIAL	131111	Tanah	3.549.930.651.797	18.296.772.009.000	14.746.841.357.203
79	027	KEMENTERIAN SOSIAL	133111	Gedung dan Bangunan	1.053.463.388.254	1.551.066.993.093	497.603.604.839
80	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134111	Jalan dan Jembatan	28.007.880.242	45.919.255.805	17.911.375.563
81	027	KEMENTERIAN SOSIAL	134112	Irigasi	26.221.498.085	24.393.011.512	(1.828.486.573)
82	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN	131111	Tanah	2.281.792.425.376	10.465.691.373.399	8.183.898.948.023
83	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.644.157.168.954	2.682.555.327.185	1.038.398.158.231
84	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN	134111	Jalan dan Jembatan	43.268.529.911	183.272.755.436	140.004.225.525
85	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN	134112	Irigasi	37.530.223.745	48.713.660.429	11.183.436.684
86	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	131111	Tanah	2.198.015.984.967	13.259.733.497.421	11.061.717.512.454
87	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	2.438.742.658.841	3.377.767.414.068	939.024.755.227

L.683



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 684 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
88	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	571.876.843.800	919.646.254.398	347.769.410.598
89	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	134112	Irigasi	448.121.663.919	926.616.379.121	478.494.715.202
90	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	131111	Tanah	425.917.910.136.766	1.185.324.067.746.120	759.406.157.609.351
91	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
92	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	133111	Gedung dan Bangunan	8.004.949.231.685	14.759.077.821.874	6.754.128.590.189
93	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	134111	Jalan dan Jembatan	118.693.745.523.128	349.460.998.475.376	230.767.252.952.248
94	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	134112	Irigasi	93.271.668.618.509	197.837.563.266.216	104.565.894.647.707
95	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUBUNGAN LUAR NEGERI	133111	Gedung dan Bangunan	4.685.407.070	8.610.602.000	3.925.194.930
96	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	133111	Gedung dan Bangunan	18.232.282.347	28.345.959.000	10.113.676.653
97	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN	133111	Gedung dan Bangunan	149.523.812.503	153.539.561.000	4.015.748.497
98	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	131111	Tanah	1.595.430.929.869	7.000.239.458.875	5.404.808.529.006
99	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	133111	Gedung dan Bangunan	514.621.835.787	773.525.758.399	258.903.922.612
100	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134111	Jalan dan Jembatan	3.303.630.186	6.587.086.000	3.283.455.814

L.684



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 685 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
101	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	134112	Irigasi	3.998.725.617	4.350.287.961	351.562.344
102	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131111	Tanah	273.198.404.650	1.307.839.814.000	1.034.641.409.350
103	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	155.723.508.467	281.382.620.000	125.659.111.533
104	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	131111	Tanah	57.349.103.821.453	334.958.442.295.664	277.609.338.474.211
105	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-
106	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	133111	Gedung dan Bangunan	16.725.878.933.756	24.911.951.550.450	8.186.072.616.694
107	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	134111	Jalan dan Jembatan	145.511.791.781	468.649.325.982	323.137.534.201
108	042	KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKA	134112	Irigasi	97.617.550.496	141.414.583.681	43.797.033.185
109	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	131111	Tanah	876.321.187.609	2.861.633.061.000	1.985.311.873.391
110	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	133111	Gedung dan Bangunan	689.737.155.351	853.215.603.674	163.478.448.323
111	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	134111	Jalan dan Jembatan	11.837.228.920	8.879.264.321	(2.957.964.599)
112	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL	134112	Irigasi	2.653.858.162	4.969.259.000	2.315.400.838
113	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	131111	Tanah	294.120.000	1.626.120.000	1.332.000.000
114	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	133111	Gedung dan Bangunan	98.220.800.494	114.657.287.000	16.436.486.506

L.685



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 686 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
115	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	27.683.537.081	56.846.985.475	29.163.448.394
116	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	131111	Tanah	1.327.193.478.205	4.089.638.405.000	2.762.444.926.795
117	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	372.368.550.323	716.323.590.947	343.955.040.624
118	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	3.726.455.323	15.295.413.000	11.568.957.677
119	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	134112	Irigasi	12.609.121.395	12.829.407.328	220.285.933
120	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	131111	Tanah	230.330.789.519	741.572.134.394	511.241.344.875
121	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	412.558.331.125	331.490.397.806	(81.067.933.319)
122	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	134112	Irigasi	2.629.460.550	423.510.000	(2.205.950.550)
123	054	BADAN PUSAT STATISTIK	131111	Tanah	752.203.225.466	2.933.561.554.606	2.181.358.329.140
124	054	BADAN PUSAT STATISTIK	133111	Gedung dan Bangunan	1.474.084.223.804	1.604.128.397.407	130.044.173.603
125	054	BADAN PUSAT STATISTIK	134112	Irigasi	-	-	-
126	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	131111	Tanah	179.478.885.500	1.357.777.745.000	1.178.298.859.500
127	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	108.120.792.906	147.622.414.000	39.501.621.094

L.686



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 687 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
128	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN N	134111	Jalan dan Jembatan	370.929.648	51.605.000	(319.324.648)
129	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN N	134112	Irigasi	310.934.780	2.450.323.000	2.139.388.220
130	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	131111	Tanah	1.965.854.219.814	8.617.521.411.767	6.651.667.191.953
131	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	133111	Gedung dan Bangunan	1.043.171.306.057	1.727.634.108.153	684.462.802.096
132	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134111	Jalan dan Jembatan	527.305.656	2.899.617.924	2.372.312.268
133	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	134112	Irigasi	368.753.614	916.207.601	547.453.987
134	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	326.366.052.000	1.842.591.607.000	1.516.225.555.000
135	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	143.517.156.168	244.930.678.185	101.413.522.017
136	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	131111	Tanah	996.757.053.210	5.030.125.452.685	4.033.368.399.475
137	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	133111	Gedung dan Bangunan	516.746.856.214	707.276.543.012	190.529.686.798
138	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134111	Jalan dan Jembatan	5.380.568.359	8.822.920.000	3.442.351.641
139	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	134112	Irigasi	2.047.968.022	2.993.683.522	945.715.500
140	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	43.736.485.617.407	177.981.337.304.528	134.244.851.687.121
141	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	10.253.845.613.566	19.864.615.224.052	9.610.769.610.486

L.687



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 688 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
142	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	68.183.261.160	326.731.878.204	258.548.617.044
143	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	44.365.365.531	100.398.587.708	56.033.222.177
144	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	131111	Tanah	519.866.034.658	1.296.263.408.100	776.397.373.442
145	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	133111	Gedung dan Bangunan	404.582.643.428	567.624.652.187	163.042.008.759
146	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134111	Jalan dan Jembatan	704.015.060	1.872.755.520	1.168.740.460
147	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	134112	Irigasi	3.477.766.254	4.598.218.966	1.120.452.712
148	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	131111	Tanah	101.438.100.000	1.418.300.300.000	1.316.862.200.000
149	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	198.975.570.760	294.920.669.475	95.945.098.715
150	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	1.238.440.520	2.743.866.000	1.505.425.480
151	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	134112	Irigasi	380.613.000	(450.748.276)	(831.361.276)
152	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	131111	Tanah	333.830.014.000	1.992.281.774.000	1.658.451.760.000
153	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	133111	Gedung dan Bangunan	196.970.014.589	279.368.332.388	82.398.317.799
154	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	131111	Tanah	67.931.369.276	219.749.425.000	151.818.055.724
155	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	575.748.738.822	401.190.797.686	(174.557.941.136)

L.688



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 689 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
156	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	212.256.636	4.812.541.099	4.600.284.463
157	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134112	Irigasi	2.607.116.767	2.709.185.000	102.068.233
158	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	131111	Tanah	123.510.085.888	642.616.544.191	519.106.458.303
159	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	133111	Gedung dan Bangunan	168.022.062.241	398.247.882.995	230.225.820.754
160	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	134111	Jalan dan Jembatan	106.156.485.726	113.076.958.945	6.920.473.219
161	067	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TE	134112	Irigasi	18.331.500.238	12.641.733.312	(5.689.766.926)
162	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	131111	Tanah	371.913.603.454	2.034.749.364.958	1.662.835.761.504
163	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	133111	Gedung dan Bangunan	205.432.684.900	473.073.560.150	267.640.875.250
164	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	134111	Jalan dan Jembatan	1.201.527.239	3.097.466.882	1.895.939.643
165	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENC	134112	Irigasi	1.806.173.017	2.342.554.000	536.380.983
166	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	133111	Gedung dan Bangunan	12.145.847.261	15.518.594.000	3.372.746.739
167	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	131111	Tanah	840.096.145.812	3.369.020.054.288	2.528.923.908.476
168	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	133111	Gedung dan Bangunan	857.978.605.785	1.070.806.349.448	212.827.743.663
169	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	134111	Jalan dan Jembatan	12.419.358.627	28.361.979.243	15.942.620.616

L.689



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 690 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
170	075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFIS	134112	Irigasi	18.168.138.438	25.521.756.425	7.353.617.987
171	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	561.364.640.301	933.221.789.200	371.857.148.899
172	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	386.960.183.513	551.520.313.730	164.560.130.217
173	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134111	Jalan dan Jembatan	106.197.666	145.702.854	39.505.188
174	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	134112	Irigasi	61.201.243	444.706.877	383.505.634
175	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	131111	Tanah	89.075.216.326	382.975.758.000	293.900.541.674
176	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	133111	Gedung dan Bangunan	206.745.640.723	241.890.332.591	35.144.691.868
177	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	134111	Jalan dan Jembatan	963.605.649	1.944.445.000	980.839.351
178	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KE	131111	Tanah	80.978.000.000	325.328.697.000	244.350.697.000
179	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KE	133111	Gedung dan Bangunan	64.378.179.376	145.048.765.000	80.670.585.624
180	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KE	134111	Jalan dan Jembatan	271.323.100	105.538.000	(165.785.100)
181	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	131111	Tanah	6.315.989.762.206	28.953.383.959.160	22.637.394.196.954
182	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	874.654.226.449	1.050.541.652.143	175.887.425.694
183	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	13.105.490.489	43.113.987.504	30.008.497.015

L.690



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 691 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
184	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	134112	Irigasi	8.430.486.600	48.848.335.139	40.417.848.539
185	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	131111	Tanah	1.788.972.615.313	13.752.630.052.088	11.963.657.436.775
186	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	349.902.451.263	655.189.208.855	305.286.757.592
187	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	430.235.452	1.576.632.000	1.146.396.548
188	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	134112	Irigasi	805.876.717	6.389.163.284	5.583.286.567
189	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	131111	Tanah	840.070.594.665	4.226.181.592.399	3.386.110.997.734
190	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	133111	Gedung dan Bangunan	616.415.077.982	1.184.076.464.572	567.661.386.590
191	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	134111	Jalan dan Jembatan	4.525.332.733	960.588.460	(3.564.744.273)
192	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	134112	Irigasi	1.395.964.308	2.018.258.441	622.294.133
193	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	131111	Tanah	277.041.192.102	1.719.731.549.050	1.442.690.356.948
194	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	178.649.349.585	285.993.655.485	107.344.305.900
195	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	4.948.465.624	80.776.729.862	75.828.264.238
196	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	134112	Irigasi	1.866.296.205	9.031.938.504	7.165.642.299
197	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	131111	Tanah	27.226.540.000	184.060.499.000	156.833.959.000

L.691



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 692 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
198	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	133111	Gedung dan Bangunan	78.837.489.880	85.746.541.902	6.909.052.022
199	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134111	Jalan dan Jembatan	-	330.598.000	330.598.000
200	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	134112	Irigasi	891.945.721	1.152.643.336	260.697.615
201	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	131111	Tanah	11.250.883.554	117.417.760.000	106.166.876.446
202	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	133111	Gedung dan Bangunan	15.251.924.936	12.276.559.000	(2.975.365.936)
203	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134111	Jalan dan Jembatan	64.240.704	1.785.327.375	1.721.086.671
204	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	134112	Irigasi	172.906.562	69.425.000	(103.481.562)
205	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	131111	Tanah	511.094.866.313	3.843.818.261.578	3.332.723.395.265
206	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	371.369.675.481	637.952.793.869	266.583.118.388
207	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	-	1.030.559.855	1.030.559.855
208	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	134112	Irigasi	678.261.480	1.429.756.000	751.494.520
209	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	215.715.732.396	851.899.807.600	636.184.075.204
210	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	133111	Gedung dan Bangunan	151.594.804.778	232.358.159.478	80.763.354.700
211	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134111	Jalan dan Jembatan	27.363.083	345.580.000	318.216.917
212	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	134112	Irigasi	484.068.434	38.417.000	(445.651.434)

L.692



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 693 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
213	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	131111	Tanah	410.917.619.119	2.497.383.834.883	2.086.466.215.764
214	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	133111	Gedung dan Bangunan	538.262.661.694	783.849.869.950	245.587.208.256
215	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	4.168.687.575	5.848.581.063	1.679.893.488
216	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	134112	Irigasi	4.024.239.491	1.897.122.540	(2.127.116.951)
217	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	131111	Tanah	1.036.506.333.558	4.163.558.623.060	3.127.052.289.502
218	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	133111	Gedung dan Bangunan	661.158.588.941	847.210.614.507	186.052.025.566
219	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	134111	Jalan dan Jembatan	963.553.051	4.619.316.000	3.655.762.949
220	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	134112	Irigasi	466.713.747	1.493.538.000	1.026.824.253
221	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	131111	Tanah	633.535.700.530	2.272.940.570.000	1.639.404.869.470
222	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	689.579.967.617	758.589.045.665	69.009.078.048
223	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	-	1.538.255.000	1.538.255.000
224	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134112	Irigasi	218.249.393	492.838.000	274.588.607
225	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	131111	Tanah	323.999.844.320	726.213.007.000	402.213.162.680
226	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	133111	Gedung dan Bangunan	288.609.240.683	442.281.186.208	153.671.945.525

L.693



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 694 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
227	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134111	Jalan dan Jembatan	495.832.400	1.925.143.000	1.429.310.600
228	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	134112	Irigasi	462.486.770	117.026.048	(345.460.722)
229	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	131111	Tanah	453.822.133.060	1.675.136.125.000	1.221.313.991.940
230	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	133111	Gedung dan Bangunan	55.621.420.649	116.711.404.000	61.089.983.351
231	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	131111	Tanah	43.062.623.473	159.548.294.240	116.485.670.767
232	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	133111	Gedung dan Bangunan	62.826.697.107	32.230.960.000	(30.595.737.107)
233	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	134111	Jalan dan Jembatan	-	-	-
234	100	KOMISI YUDISIAL RI	131111	Tanah	47.188.389.400	226.330.350.000	179.141.960.600
235	100	KOMISI YUDISIAL RI	133111	Gedung dan Bangunan	60.054.484.279	92.661.850.000	32.607.365.721
236	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	131111	Tanah	113.143.589.776	182.973.800.000	69.830.210.224
237	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	133111	Gedung dan Bangunan	473.459.968.867	460.029.978.384	(13.429.990.483)
238	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	131111	Tanah	52.430.088.081	246.024.658.000	193.594.569.919
239	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	133111	Gedung dan Bangunan	63.999.258.500	79.403.633.885	15.404.375.385

L.694



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 695 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
240	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	134111	Jalan dan Jembatan	807.966.517	2.909.568.000	2.101.601.483
241	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUN	134112	Irigasi	510.587.130	481.135.500	(29.451.630)
242	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (B	131111	Tanah	3.520.341.767.980	3.742.852.311.479	222.510.543.499
243	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (B	133111	Gedung dan Bangunan	1.660.810.665	2.919.793.000	1.258.982.335
244	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (B	134111	Jalan dan Jembatan	764.820.281	548.106.000	(216.714.281)
245	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (B	134112	Irigasi	301.364.763.624	294.277.229.000	(7.087.534.624)
246	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JAS/	131111	Tanah	116.490.960.000	349.428.991.000	232.938.031.000
247	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JAS/	133111	Gedung dan Bangunan	149.053.959.869	142.071.926.692	(6.982.033.177)
248	107	BADAN SAR NASIONAL	131111	Tanah	286.800.624.150	889.771.723.070	602.971.098.920
249	107	BADAN SAR NASIONAL	133111	Gedung dan Bangunan	584.687.968.683	686.733.752.496	102.045.783.813
250	107	BADAN SAR NASIONAL	134111	Jalan dan Jembatan	14.527.090.096	16.998.807.326	2.471.717.230
251	107	BADAN SAR NASIONAL	134112	Irigasi	4.485.367.883	55.719.985	(4.429.647.898)
252	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	131111	Tanah	279.884.701.713	420.463.767.000	140.579.065.287
253	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	133111	Gedung dan Bangunan	14.073.715.015	11.115.606.700	(2.958.108.315)

L.695



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 696 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
254	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134111	Jalan dan Jembatan	7.817.903.471	11.486.751.560	3.668.848.089
255	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	134112	Irigasi	4.387.676.062	9.946.811.000	5.559.134.938
256	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	131111	Tanah	7.315.400.000	25.847.516.000	18.532.116.000
257	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	133111	Gedung dan Bangunan	26.376.688.774	24.796.788.988	(1.579.899.786)
258	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134111	Jalan dan Jembatan	12.445.391.323	48.058.780.983	35.613.389.660
259	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	134112	Irigasi	5.075.125.783	10.612.438.000	5.537.312.217
260	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	131111	Tanah	21.633.142.599.667	43.003.077.624.800	21.369.935.025.133
261	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	133111	Gedung dan Bangunan	725.778.421.702	5.557.820.976.949	4.832.042.555.247
262	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	134111	Jalan dan Jembatan	2.826.686.384.296	2.747.139.740.827	(79.546.643.469)
263	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN B	134112	Irigasi	575.270.377.239	1.506.371.674.536	931.101.297.297
264	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISM	133111	Gedung dan Bangunan	102.077.219.984	68.810.456.000	(33.266.763.984)
265	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISM	134111	Jalan dan Jembatan	19.152.757.691	3.443.482.953	(15.709.274.738)
266	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISM	134112	Irigasi	5.075.264.576	6.451.330.650	1.376.066.074

L.696



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 697 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
267	115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	131111	Tanah	33.770.762	2.380.363.000	2.346.592.238
268	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK IN	131111	Tanah	2.608.304.448.150	12.247.939.481.625	9.639.635.033.475
269	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK IN	133111	Gedung dan Bangunan	291.696.947.415	714.726.036.267	423.029.088.852
270	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK IN	134111	Jalan dan Jembatan	1.602.452.486	6.272.931.800	4.670.479.314
271	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK IN	134112	Irigasi	1.198.116.255	2.922.785.050	1.724.668.795
272	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	131111	Tanah	3.218.023.161.997	11.475.468.175.126	8.257.445.013.129
273	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	133111	Gedung dan Bangunan	284.339.595.394	1.103.252.155.449	818.912.560.055
274	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	134111	Jalan dan Jembatan	803.346.542	19.114.653.350	18.311.306.808
275	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK	134112	Irigasi	441.720.286	5.012.994.348	4.571.274.062
276	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN	131111	Tanah	565.836.540.454	1.733.205.752.740	1.167.369.212.286
277	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.401.642.014.095	1.167.793.341.587	(233.848.672.508)
278	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN	134111	Jalan dan Jembatan	261.503.604.172	269.738.291.210	8.234.687.038
279	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN	134112	Irigasi	6.834.499.603	13.601.084.710	6.766.585.107
280	119	BADAN KEAMANAN LAUT	131111	Tanah	5.300.180.600	17.117.003.000	11.816.822.400

L.697



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 698 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 29

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

No	Kode	Uraian	Akun	Uraian Akun	Nilai Buku	Nilai Wajar	Kenaikan (Penurunan)
281	119	BADAN KEAMANAN LAUT	133111	Gedung dan Bangunan	41.742.413.903	27.095.537.933	(14.646.875.970)
282	119	BADAN KEAMANAN LAUT	134111	Jalan dan Jembatan	23.955.189.401	26.950.086.000	2.994.896.599
283	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	131111	Tanah	4.016.775.779	24.738.816.000	20.722.040.221
284	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	134111	Jalan dan Jembatan	81.002.315.725	109.260.965.000	28.258.649.275
TOTAL					1.587.484.548.294.830	5.669.450.660.565.540	4.081.966.112.270.710

L.698



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 699 -

TRANSFER KELUAR TRANSFER MASUK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 700 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 30

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2018

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Saldo
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	50.135.279.963	(50.092.679.963)	42.600.000
4	005	MAHKAMAH AGUNG	193.518.080.170	(117.703.852.634)	75.814.227.536
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	872.889.397.606	(869.573.277.719)	3.316.119.887
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.941.651.542.183	(2.396.588.408.863)	2.545.063.133.320
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	108.013.871.047	(108.013.871.047)	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	184.619.586.714	(87.448.064.635)	97.171.522.079
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	82.374.986.663.427	(82.480.188.410.439)	(105.201.747.012)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.603.177.212.936	(1.640.530.373.151)	(37.353.160.215)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	6.979.801.983.378	(7.010.187.583.298)	(30.385.599.920)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	115.263.799.193	(112.611.349.311)	2.652.449.882
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	34.354.284.869	(141.363.900.965)	(107.009.616.096)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	224.355.766.401	(281.402.826.389)	(57.047.059.988)
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	19.665.458.385.093	(19.225.756.089.663)	439.702.295.430
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37.419.248.552	(37.380.066.526)	39.182.026
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.006.637.949.688	(1.023.072.029.762)	(16.434.080.074)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.529.374.169.991	(1.157.911.277.676)	371.462.892.315
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	67.883.925.193	(67.883.925.193)	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.006.075.155.871	(1.006.407.534.481)	(332.378.610)
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	237.682.126.019	(218.540.577.516)	19.141.548.503
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	680.936.906.608	(697.325.661.910)	(16.388.755.302)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	129.293.662.132.855	(87.108.218.846.937)	42.185.443.285.918
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	56.720.230	-	56.720.230
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	48.765.896.898	(48.765.896.898)	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	417.404.767.104	(437.581.285.498)	(20.176.518.394)
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	(1.196.255.687)	3.610.886.000	2.414.630.313
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	(2.414.630.313)	(2.414.630.313)
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	19.430.410	(19.430.410)	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	138.384.772.105	(143.171.234.877)	(4.786.462.772)
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.984.540.573	(2.057.723.042)	(73.182.469)
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	268.804.159.079	(252.646.364.393)	16.157.794.686
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	(1.755.225.000)	(1.755.225.000)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.130.046.922	(743.774.384.502)	(701.644.337.580)
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	40.519.146.472.019	(40.502.029.092.225)	17.117.379.794
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	63.466.268.776	(46.105.236.362)	17.361.032.414
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	469.269.797.130	(310.561.855.471)	158.707.941.659
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	469.840.806.273	(476.566.205.095)	(6.725.398.822)

L. 700



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 701 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 30

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2018

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Saldo
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	137.947.715.407	(137.939.671.907)	8.043.500
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	150.779.299.400	(140.953.240.525)	9.826.058.875
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	763.882.661.415	(763.882.661.415)	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	(556.344.547)	(556.344.547)
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	113.463.048.054	(113.455.523.084)	7.524.970
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	157.251.440.478	(102.707.000.224)	54.544.440.254
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	135.057.237.127	(134.904.313.044)	152.924.083
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	25.517.988.319	(25.307.238.319)	210.750.000
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	56.067.077.929	(55.715.342.822)	351.735.107
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	118.993.150	(407.133.720)	(288.140.570)
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	(1.693.809.600)	(1.693.809.600)
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	(682.659.450)	(682.659.450)
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	135.200.000	(135.200.000)	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	25.589.907.494	(971.833.494)	24.618.074.000
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	28.859.538.069	(28.863.543.513)	(4.005.444)
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	21.631.808.124	(21.631.808.124)	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	38.611.025.260	(38.611.025.260)	-
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	605.847.422	(10.532.347.422)	(9.926.500.000)
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	459.278.900	(58.484.502.900)	(58.025.224.000)
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	1.174.124.296	(2.069.184.196)	(895.059.900)
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	(4.058.755.289.527)	(4.058.755.289.527)
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	558.124.699.240	(559.437.083.717)	(1.312.384.477)
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	2.118.143.077	-	2.118.143.077
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	30.195.000	-	30.195.000
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	(834.097.489)	(834.097.489)
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	39.188.990.112	(13.336.908.514)	25.852.081.598
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	(32.987.680)	(32.987.680)
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	2.629.175.480	(2.629.175.480)	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	32.808.996.762	(65.451.585.512)	(32.642.588.750)
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.474.524.462.879	(779.605.137.675)	694.919.325.204
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	8.080.417.367	-	8.080.417.367
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-
Jumlah Pada KL			297.420.632.160.350	(255.921.624.935.324)	41.499.007.225.026
88	999	BENDAHARA UMUM NEGARA	196.917.881.391	(41.152.763.503.447)	(41.349.681.384.838)
Penyesuaian Konsolidasian LKPP			-	-	-
TOTAL KONSOLIDASIAN TK TM LKPP			297.617.550.041.741	(297.074.388.438.771)	543.161.602.970



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 702 -

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 703 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	706
II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2018	710
III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN	711
A. Bunga Utang Surat Berharga Negara	711
B. Surat Berharga Negara Neto	712
IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2018.....	714
A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah	714
B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	715
C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing	719
D. Pelaksanaan Debt Switching/Buyback.....	719
V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2018.....	720
VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018	729
I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah	729
II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)	749
III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2018	751
VII. PENUTUP	753



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 704 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sbn Neto Tahun 2018	713
Tabel 2. Seri SPN Yang Diterbitkan Tahun 2018	716
Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2018	718
Tabel 4. Realisasi Penerbitan SUN Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2018	719
Tabel 5. Realisasi Pelaksanaan <i>Debtswitching</i> Tahun 2018	720
Tabel 6. Rincian Realisasi Pelaksanaan <i>Debtswitching</i> Tahun 2018	720
Tabel 7. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2018	723
Tabel 8. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2018	724
Tabel 9. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2018	725
Tabel 10. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan Tahun 2018	728
Tabel 11. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2018	728
Tabel 12. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2018	728
Tabel 13. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2018	728
Tabel 14. <i>Outstanding</i> SBN Seri Fixed Rate (FR) Per 31 Desember 2018	730
Tabel 15. Data <i>Outstanding</i> ORI Per 31 Desember 2018	733
Tabel 16. Nilai dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) 31 Desember 2018	Per 735
Tabel 17. Struktur <i>Outstanding</i> SPN Per 31 Desember 2018	736
Tabel 18. Struktur <i>Outstanding</i> Surat Utang Pemerintah	738
Tabel 19. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018	739
Tabel 20. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018	741
Tabel 21. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri SR dan ST Per 31 Desember 2018	744
Tabel 22. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri SPNS Per 31 Desember 2018	745
Tabel 23. Struktur <i>Outstanding</i> SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018	747
Tabel 24. <i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo SBN Valas Per 31 Desember 2018	750
Tabel 25. Mutasi Principle <i>Outstanding</i> SBN Tahun 2018	752



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 705 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Outstanding ON Rupiah Seri FR Tgl 31 Desember 2018	731
Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR.....	731
Grafik 3. Struktur Outstanding ORI Per 31 Desember 2018	733
Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI Per 31 Desember 2018.....	734
Grafik 5. Struktur Outstanding VR Per 31 Desember 2018	735
Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR Per 31 Desember 2018.....	735
Grafik 7. Struktur Outstanding SPN Per 31 Desember 2018	737
Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN Per 31 Desember 2018	737
Grafik 9. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2018 ..	738
Grafik 10. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2018	739
Grafik 11. Struktur Outstanding SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018	740
Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2018.....	740
Grafik 13. Struktur Outstanding SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018	742
Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2018	742
Grafik 15. Struktur Outstanding SBSN Seri SR Per 31 Desember 2018.....	744
Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SR Per 31 Desember 2018	745
Grafik 17. Struktur Outstanding SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2018	746
Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2018.....	746
Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018	748
Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2018	749



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 706 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2018. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

- a. Membiayai defisit APBN;
- b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
- c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 707 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

a. Sebagai Instrumen Fiskal

Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 708 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter/ OTC*). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 709 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

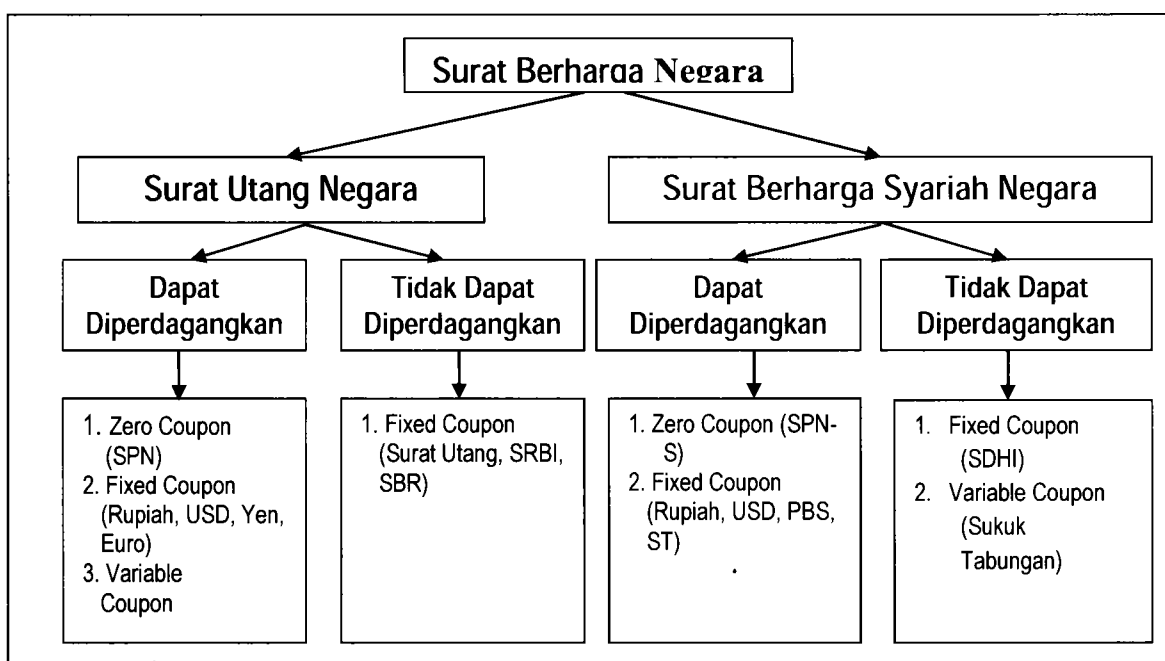
asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2018 dapat digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 710 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2018

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan sebagai berikut¹:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali;
2. Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai, peningkatan kinerja kegiatan - kegiatan yang dibiayai dengan utang dan *shortening duration* portofolio utang;
3. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;
5. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang;
6. Meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka *Asset Liability Management (ALM)*;
7. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional;
8. Mengoptimalkan pinjaman tunai untuk meningkatkan fleksibilitas pemenuhan pembiayaan melalui utang dengan mempertimbangkan kapasitas pemberi pinjaman dan biaya serta risiko pinjaman;
9. Meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor;

¹ Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 52/PR/2018 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 711 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

10. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di SBN melalui pengembangan jalur distribusi SBN Ritel secara online.

III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2018 sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2017 sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2018, kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp399.219,4 miliar terdiri atas SBN neto sebesar Rp383.184,8 miliar dan Pinjaman neto sebesar Rp16.034,6 miliar. Dengan memperhatikan utang jatuh tempo sebesar Rp400.467,4 miliar yang terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp323.963,0 miliar dan Pinjaman sebesar Rp76.504,3 miliar maka kebutuhan pembiayaan melalui utang sebesar Rp799.686,7 miliar. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui (a) penerbitan SBN sebesar Rp707.147,8 miliar, pembiayaan melalui penerbitan SBN dimaksud tidak termasuk penerbitan SPN dan SPNS yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 sebesar Rp91.830,0 miliar sehingga penerbitan SBN Bruto sebesar Rp798.977,8 miliar (b) pembiayaan melalui penarikan Pinjaman sebesar Rp92.538,9 miliar. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang mengutamakan penerbitan melalui lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai yang bersumber dari mitra pembangunan (*development partners*) multilateral dan bilateral.

Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN TA 2018, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp245.099.773.630.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp238.043.106.503.289,-, atau sebesar 97,12%.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 712 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk Tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, target SBN neto adalah sebesar Rp414.520.685.000.000,-. Realisasi SBN neto Tahun 2018 adalah sebesar Rp358.398.491.544.783,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada Tabel 1.

Realisasi SBN neto Tahun 2018 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar minus Rp5.456.769.040,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp7.180.920.271.401,- dan pembayaran sebesar Rp7.186.377.040.441,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN Tahun 2018 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN Tahun 2018 adalah sebesar Rp782.313.242.271.401,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp641.581.192.271.401,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar USD2.850.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp140.732.050.000.000,-.

Atas penerbitan SBN Tahun 2018, terdapat penerbitan valas yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2019 (*prefunding*) sebesar USD3.000.000.000,-, sehingga atas penerbitan tersebut tidak dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di Tahun 2018. Adapun selama Tahun 2018 Transaksi *Debt switching* SBN tercatat sebesar Rp515.000.000.000,-.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 713 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Pelunasan SBN Tahun 2018 adalah sebesar Rp423.914.750.726.618,- dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp381.055.706.226.618,- dan pelunasan SBN valas Rp42.859.044.500.000,-.

Tabel 1. SBN Neto Tahun 2018

NO	AKUN	URAIAN	TOTAL
Penerimaan Pembiayaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	143,050,000,000,000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	320,274,306,000,000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	5,446,859,375,000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	96,869,377,647,000
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,734,060,896,401
6	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	51,680,000,000,000
7	711461	Penerimaan SBSN - pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	22,526,588,353,000
8	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	97,877,550,000,000
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	-
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	42,854,500,000,000
11	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total Penerimaan			782,313,242,271,401
Pengeluaran Pembiayaan			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	170,257,290,000,000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	83,438,091,186,177
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Pembelian Kembali	515,000,000,000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	5,546,137,909,040
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	73,588,948,000,000
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,640,239,131,401
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	46,070,000,000,000
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	28,241,044,500,000
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	-
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	-
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	14,618,000,000,000
Total Pengeluaran			423,914,750,726,618
SBN Netto			358,398,491,544,783



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 714 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2018

Target SBN Netto 2018 adalah sebesar Rp383.184,8 miliar disebabkan adanya kebijakan pelebaran defisit. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto yaitu jumlah penerbitan SUN setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*).

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2018 dilelang sebanyak 23 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2018.

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di Tahun 2018, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk. Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp319.759.306.000.000,- dengan rincian:

- a. ON dalam negeri sebesar Rp287.130.000.000.000,-; dan
- b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan *Saving Bond Retail* (SBR) adalah sebesar Rp32.629.306.000.000,-.

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak 3 kali penerbitan, yaitu seri ORI014, SBR003 dan SBR004, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan Obligasi Negara Rupiah yang jatuh tempo pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp83.438.091.186.177,- yang terdiri dari:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 715 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

- a. ON bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp 34.281.933.186.177,-;
- b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI dan SBR sebesar Rp31.237.880.000.000,-;
dan
- c. ON bunga variable (*Variable Rate*) sebesar Rp 17.918.278.000.000,-.

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada Tahun 2018, Pemerintah menerbitkan 33 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp 143.050.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 716 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 2. Seri SPN yang diterbitkan Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPN	Mata Uang	Nominal
1	1/5/2018	4/4/2018	SPN03180404	IDR	5.000.000.000.000.00
2	1/5/2018	1/4/2019	SPN12190104	IDR	5.000.000.000.000.00
3	1/18/2018	4/17/2018	SPN03180417	IDR	5.000.000.000.000.00
4	1/18/2018	1/4/2019	SPN12190104	IDR	5.000.000.000.000.00
5	2/1/2018	4/30/2018	SPN03180430	IDR	5.000.000.000.000.00
6	2/1/2018	1/31/2019	SPN12190131	IDR	5.000.000.000.000.00
7	2/15/2018	5/14/2018	SPN03180514	IDR	5.000.000.000.000.00
8	2/15/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	5.000.000.000.000.00
9	3/1/2018	5/28/2018	SPN03180528	IDR	5.000.000.000.000.00
10	3/1/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	5.000.000.000.000.00
11	3/15/2018	6/14/2018	SPN03180614	IDR	5.000.000.000.000.00
12	3/15/2018	3/14/2019	SPN12190314	IDR	5.000.000.000.000.00
13	3/29/2018	6/28/2018	SPN03180628	IDR	5.000.000.000.000.00
14	3/29/2018	3/14/2019	SPN12190314	IDR	4.050.000.000.000.00
15	4/12/2018	7/12/2018	SPN12180712	IDR	4.200.000.000.000.00
16	4/12/2018	4/11/2019	SPN12190411	IDR	4.450.000.000.000.00
17	5/24/2018	8/23/2018	SPN03180823	IDR	2.200.000.000.000.00
18	5/24/2018	2/14/2019	SPN12190214	IDR	3.300.000.000.000.00
19	6/7/2018	9/6/2018	SPN12180906	IDR	3.000.000.000.000.00
20	6/7/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	700.000.000.000.00
21	7/5/2018	10/4/2018	SPN12181004	IDR	3.000.000.000.000.00
22	7/5/2018	7/4/2019	SPN12190704	IDR	3.500.000.000.000.00
23	7/19/2018	10/18/2018	SPN03181018	IDR	3.000.000.000.000.00
24	7/19/2018	4/11/2019	SPN12190411	IDR	3.000.000.000.000.00
25	8/2/2018	11/1/2018	SPN03181101	IDR	3.000.000.000.000.00
26	8/2/2018	8/1/2019	SPN12190801	IDR	3.000.000.000.000.00
27	8/16/2018	11/15/2018	SPN12181115	IDR	3.000.000.000.000.00
28	8/16/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	3.000.000.000.000.00
29	8/30/2018	11/29/2018	SPN03181129	IDR	3.000.000.000.000.00
30	8/30/2018	8/29/2019	SPN12190829	IDR	1.100.000.000.000.00
31	9/14/2018	12/13/2018	SPN03181213	IDR	3.000.000.000.000.00
32	9/14/2018	9/13/2019	SPN12190913	IDR	4.500.000.000.000.00
33	9/27/2018	12/26/2018	SPN03181226	IDR	3.000.000.000.000.00
34	9/27/2018	6/6/2019	SPN12190606	IDR	1.500.000.000.000.00
35	10/11/2018	1/10/2019	SPN03190110	IDR	3.000.000.000.000.00
36	10/11/2018	10/10/2019	SPN12191010	IDR	3.000.000.000.000.00
37	10/25/2018	1/24/2019	SPN03190124	IDR	2.600.000.000.000.00
38	10/25/2018	7/4/2019	SPN12190704	IDR	3.000.000.000.000.00
39	11/8/2018	2/7/2019	SPN03190207	IDR	1.000.000.000.000.00
40	11/8/2018	11/7/2019	SPN12191107	IDR	1.000.000.000.000.00
41	11/23/2018	2/22/2019	SPN03190222	IDR	1.000.000.000.000.00
42	11/23/2018	8/1/2019	SPN12190801	IDR	950.000.000.000.00
Total SPN (IDR)					143.050.000.000.000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 717 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp170.257.290.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 718 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPN12180104	03/01/2018	5,300,000,000,000.00
2	SPN12180104	03/01/2018	5,000,000,000,000.00
3	SPN12180104	03/01/2018	500,000,000,000.00
4	SPN12180104	03/01/2018	5,000,000,000,000.00
5	SPN03180118	17/01/2018	3,650,000,000,000.00
6	SPN12180201	31/01/2018	4,900,000,000,000.00
7	SPN12180201	31/01/2018	9,450,000,000,000.00
8	SPN12180201	31/01/2018	5,000,000,000,000.00
9	SPN12180201	31/01/2018	1,600,000,000,000.00
10	SPN03180215	2/14/2018	2,600,000,000,000.00
11	SPN12180301	2/28/2018	1,800,000,000,000.00
12	SPN12180301	2/28/2018	900,000,000,000.00
13	SPN12180301	2/28/2018	3,000,000,000,000.00
14	SPN12180301	2/28/2018	4,050,000,000,000.00
15	SPNNT20180328	3/27/2018	10,107,290,000,000.00
16	SPN03180404	4/3/2018	5,000,000,000,000.00
17	SPN12180412	4/11/2018	3,050,000,000,000.00
18	SPN12180412	4/11/2018	5,000,000,000,000.00
19	SPN03180417	4/16/2018	5,000,000,000,000.00
20	SPN03180430	4/27/2018	5,000,000,000,000.00
21	SPN12180511	5/11/2018	3,000,000,000,000.00
22	SPN12180511	5/11/2018	2,300,000,000,000.00
23	SPN03180514	5/14/2018	5,000,000,000,000.00
24	SPN03180528	5/28/2018	5,000,000,000,000.00
25	SPN12180607	6/7/2018	3,000,000,000,000.00
26	SPN12180607	6/7/2018	2,550,000,000,000.00
27	SPN03180614	6/8/2018	5,000,000,000,000.00
28	SPN03180628	6/28/2018	5,000,000,000,000.00
29	SPN12180712	7/12/2018	4,200,000,000,000.00
30	SPN12180712	7/12/2018	3,100,000,000,000.00
31	SPN12180809	8/9/2018	3,000,000,000,000.00
32	SPN12180809	8/9/2018	5,000,000,000,000.00
33	SPN03180823	8/23/2018	2,200,000,000,000.00
34	SPN12180906	9/6/2018	3,000,000,000,000.00
35	SPN12180906	9/6/2018	3,000,000,000,000.00
36	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
37	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
38	SPN12181004	10/4/2018	3,000,000,000,000.00
39	SPN03181018	10/18/2018	3,000,000,000,000.00
40	SPN03181101	11/1/2018	3,000,000,000,000.00
41	SPN12181115	11/15/2018	3,000,000,000,000.00
42	SPN12181115	11/15/2018	3,000,000,000,000.00
43	SPN03181129	11/29/2018	3,000,000,000,000.00
44	SPN03181213	12/13/2018	3,000,000,000,000.00
45	SPN03181226	12/26/2018	3,000,000,000,000.00
TOTAL (IDR)			170,257,290,000,000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 719 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

C. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Valuta Asing

Total penerbitan Obligasi Negara (ON) Valas adalah sebesar USD5.000.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp97.877.550.000.000,- yang terdiri atas *International Bonds* sebesar USD1.000.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- serta JPY100.000.000.000,-.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada Tahun 2018, disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Penerbitan Obligasi Negara Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

No	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Nominal
1	12/11/2017	1/11/2023	RI0123	USD	1,000,000,000.00
2	12/11/2017	1/11/2028	RI0128	USD	1,250,000,000.00
3	12/11/2017	1/11/2048	RI0148	USD	1,750,000,000.00
4	4/24/2018	4/24/2028	RI0428	USD	1,000,000,000.00
5	4/24/2018	4/24/2025	RIEUR0425	EUR	1,000,000,000.00
6	5/31/2018	5/31/2021	RIJPY0521	JPY	49,000,000,000.00
7	5/31/2018	5/31/2023	RIJPY0523	JPY	39,000,000,000.00
8	5/31/2018	5/30/2025	RIJPY0525	JPY	3,500,000,000.00
9	5/31/2018	5/31/2028	RIJPY0528	JPY	8,500,000,000.00

Catatan: Seri RI0123, RI0128 dan RI0148 diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2018

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 720 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Total pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2018 adalah sebanyak 1 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp515.000.000.000,- sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018

No.	Tanggal <i>Debtswitch</i>	Penawaran	Dimenangkan
1	18-Okt-18	Rp1.050.000.000.000,-	Rp515.000.000.000,-

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada Tahun 2018 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* Tahun 2018
(dalam juta rupiah)

Date		Source					Destination			
Debt Switch	Settlement	Series	Maturity	Coupon	Offer	Alloted	Series	Maturity	Coupon	Alloted
18-Oct-18	23-Oct-18	FR0069	15-04-2019	7.87500%	647,000	515,000	FR0077	15-05-2024	8.12500%	445,000
		FR0036	15-09-2019	11.50000%	110,000	-	FR0078	15-05-2029	8.25000%	70,000
		FR0031	15-11-2020	11.00000%	293,000	-				
Total Debt Switch 2018					1,050,000	515,000				515,000

Di samping *debtswitching*, Pemerintah juga dapat melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Namun demikian, pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi *buyback*.

V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2018

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 721 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
- d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 722 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir Tahun 2018 terdiri atas 6 jenis instrumen yakni Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), *Project Based Sukuk* (PBS), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI), dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 7, 9, 10 dan 11 berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 723 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 7. Daftar Penerbitan SPNS Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPNS	Mata Uang	Nominal
1	1/11/2018	7/10/2018	SPNS10072018	IDR	2.000.000.000.000.00
2	1/25/2018	7/10/2018	SPNS10072018	IDR	2.000.000.000.000.00
3	2/8/2018	8/7/2018	SPNS07082018	IDR	3.000.000.000.000.00
4	2/22/2018	8/7/2018	SPNS07082018	IDR	3.000.000.000.000.00
5	3/8/2018	9/7/2018	SPNS07092018	IDR	1.230.000.000.000.00
6	3/22/2018	9/7/2018	SPNS07092018	IDR	3.000.000.000.000.00
7	4/5/2018	10/4/2018	SPNS04102018	IDR	2.400.000.000.000.00
8	4/19/2018	10/4/2018	SPNS04102018	IDR	2.100.000.000.000.00
9	5/4/2018	11/3/2018	SPNS03112018	IDR	650.000.000.000.00
10	5/17/2018	11/3/2018	SPNS03112018	IDR	500.000.000.000.00
11	6/4/2018	12/1/2018	SPNS01122018	IDR	2.550.000.000.000.00
12	6/28/2018	12/1/2018	SPNS01122018	IDR	4.000.000.000.000.00
13	7/12/2018	1/11/2019	SPNS11012019	IDR	2.900.000.000.000.00
14	7/12/2018	4/11/2019	SPNS11042019	IDR	1.000.000.000.000.00
15	7/26/2018	1/11/2019	SPNS11012019	IDR	900.000.000.000.00
16	7/26/2018	4/11/2019	SPNS11042019	IDR	1.100.000.000.000.00
17	8/9/2018	2/8/2019	SPNS08022019	IDR	850.000.000.000.00
18	8/9/2018	5/8/2019	SPNS08052019	IDR	1.200.000.000.000.00
19	8/24/2018	2/8/2019	SPNS08022019	IDR	3.000.000.000.000.00
20	8/24/2018	5/8/2019	SPNS08052019	IDR	1.000.000.000.000.00
21	9/6/2018	3/5/2019	SPNS05032019	IDR	1.100.000.000.000.00
22	9/6/2018	6/5/2019	SPNS05062019	IDR	1.200.000.000.000.00
23	9/20/2018	3/5/2019	SPNS05032019	IDR	1.300.000.000.000.00
24	10/4/2018	4/3/2019	SPNS03042019	IDR	1.400.000.000.000.00
25	10/4/2018	7/3/2019	SPNS03072019	IDR	1.000.000.000.000.00
26	10/18/2018	4/3/2019	SPNS03042019	IDR	1.000.000.000.000.00
27	10/18/2018	7/3/2019	SPNS03072019	IDR	1.000.000.000.000.00
28	11/1/2018	5/1/2019	SPNS01052019	IDR	950.000.000.000.00
29	11/1/2018	8/1/2019	SPNS01082019	IDR	1.700.000.000.000.00
30	11/15/2018	5/1/2019	SPNS01052019	IDR	1.050.000.000.000.00
31	11/15/2018	8/1/2019	SPNS01082019	IDR	1.600.000.000.000.00
Total SPNS (IDR)					51.680.000.000.000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 724 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 8. Daftar Pelunasan SPNS Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPNS05012018	1/4/2018	2,000,000,000,000.00
2	SPNS05012018	1/4/2018	870,000,000,000.00
3	SPNS02022018	2/1/2018	2,000,000,000,000.00
4	SPNS02022018	2/1/2018	2,000,000,000,000.00
5	SPNS02022018	2/1/2018	3,000,000,000,000.00
6	SPNS13032018	3/12/2018	2,000,000,000,000.00
7	SPNS13032018	3/12/2018	1,450,000,000,000.00
8	SPNS11042018	4/10/2018	1,600,000,000,000.00
9	SPNS11042018	4/10/2018	2,000,000,000,000.00
10	SPNS08052018	5/8/2018	1,750,000,000,000.00
11	SPNS08052018	5/8/2018	970,000,000,000.00
12	SPNS10072018	7/10/2018	2,000,000,000,000.00
13	SPNS10072018	7/10/2018	2,000,000,000,000.00
14	SPNS07082018	8/7/2018	3,000,000,000,000.00
15	SPNS07082018	8/7/2018	3,000,000,000,000.00
16	SPNS07092018	9/7/2018	1,230,000,000,000.00
17	SPNS07092018	9/7/2018	3,000,000,000,000.00
18	SPNS04102018	10/4/2018	2,100,000,000,000.00
19	SPNS04102018	10/4/2018	2,400,000,000,000.00
20	SPNS03112018	11/5/2018	650,000,000,000.00
21	SPNS03112018	11/5/2018	500,000,000,000.00
22	SPNS01122018	12/3/2018	2,550,000,000,000.00
23	SPNS01122018	12/3/2018	4,000,000,000,000.00
TOTAL (IDR)			46,070,000,000,000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 725 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 9. Daftar Penerbitan PBS Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	1/11/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1.550.000.000.000.00
2	1/11/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	1.640.000.000.000.00
3	1/11/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	870.000.000.000.00
4	1/11/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4.370.000.000.000.00
5	1/11/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	2.570.000.000.000.00
6	1/25/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1.040.000.000.000.00
7	1/25/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	2.060.000.000.000.00
8	1/25/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	2.970.000.000.000.00
9	1/25/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	560.000.000.000.00
10	2/8/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	390.000.000.000.00
11	2/8/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	970.000.000.000.00
12	2/8/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4.910.000.000.000.00
13	2/8/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	805.000.000.000.00
14	2/15/2018	8/15/2023	PBS011	IDR	500.000.000.000.00
15	2/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	250.000.000.000.00
16	2/22/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	680.000.000.000.00
17	2/22/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	200.000.000.000.00
18	2/22/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4.400.000.000.000.00
19	2/22/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	195.000.000.000.00
20	2/26/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	500.000.000.000.00
21	2/28/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1.000.000.000.000.00
22	2/28/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1.000.000.000.000.00
23	3/8/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	510.000.000.000.00
24	3/8/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	440.000.000.000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 726 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 31

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
25	3/8/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	810,000,000,000.00
26	3/8/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,920,000,000,000.00
27	3/8/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	185,000,000,000.00
28	3/13/2018	5/15/2019	PBS013	IDR	250,000,000,000.00
29	3/22/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	502,857,000,000.00
30	3/22/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	150,000,000,000.00
31	3/22/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	4,630,000,000,000.00
32	3/22/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	620,000,000,000.00
33	4/5/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	600,000,000,000.00
34	4/5/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	316,857,000,000.00
35	4/5/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	690,000,000,000.00
36	4/5/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,220,000,000,000.00
37	4/5/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,560,000,000,000.00
38	4/19/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	605,000,000,000.00
39	4/19/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	527,000,000,000.00
40	4/19/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	410,000,000,000.00
41	4/19/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	2,710,000,000,000.00
42	5/4/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	380,000,000,000.00
43	5/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	250,000,000,000.00
44	5/4/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	100,000,000,000.00
45	5/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,000,000,000,000.00
46	5/17/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,190,000,000,000.00
47	5/17/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	665,000,000,000.00
48	5/17/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	860,000,000,000.00
49	5/17/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	840,000,000,000.00
50	5/30/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	300,000,000,000.00
51	6/4/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	315,000,000,000.00
52	6/4/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,080,000,000,000.00
53	6/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	415,000,000,000.00
54	6/4/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	2,000,000,000,000.00
55	6/28/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	325,000,000,000.00
56	6/28/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	294,000,000,000.00
57	6/28/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	540,000,000,000.00
58	7/3/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	1,000,000,000,000.00
59	7/12/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	3,050,000,000,000.00
60	7/12/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	35,000,000,000.00
61	7/12/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	105,000,000,000.00
62	7/12/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	910,000,000,000.00
63	7/26/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	565,000,000,000.00
64	7/26/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,000,000,000,000.00
65	7/26/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,150,000,000,000.00
66	7/26/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	95,000,000,000.00
67	7/27/2018	2/15/2037	PBS004	IDR	350,000,000,000.00
68	7/27/2018	5/15/2028	PBS018	IDR	1,000,000,000,000.00
69	8/9/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	900,000,000,000.00
70	8/9/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	420,000,000,000.00
71	8/9/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	340,000,000,000.00
72	8/9/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,460,000,000,000.00
73	8/10/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
74	8/13/2018	4/15/2043	PBS005	IDR	500,000,000,000.00
75	8/24/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	500,000,000,000.00
76	8/24/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	510,000,000,000.00
77	8/24/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,120,000,000,000.00
78	8/24/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	135,000,000,000.00
79	8/27/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	500,000,000,000.00
80	8/29/2018	8/29/2023	PBSNT001	IDR	1,500,000,000,000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 727 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 31

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
81	8/30/2018	4/15/2043	PBS005	IDR	250,000,000,000.00
82	8/30/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,000,000,000,000.00
83	9/6/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	330,000,000,000.00
84	9/6/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	900,000,000,000.00
85	9/6/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	175,000,000,000.00
86	9/6/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,100,000,000,000.00
87	9/12/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
88	9/20/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	60,000,000,000.00
89	9/20/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	1,060,000,000,000.00
90	9/20/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,153,000,000,000.00
91	9/20/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,260,000,000,000.00
92	9/20/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	70,000,000,000.00
93	9/24/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	500,000,000,000.00
94	10/4/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	100,000,000,000.00
95	10/4/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	1,030,000,000,000.00
96	10/4/2018	3/15/2020	PBS016	IDR	1,510,000,000,000.00
97	10/4/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	65,000,000,000.00
98	10/8/2018	1/15/2027	PBS003	IDR	250,000,000,000.00
99	10/18/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	605,000,000,000.00
100	10/18/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	1,350,000,000,000.00
101	10/18/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	505,000,000,000.00
102	10/18/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	765,000,000,000.00
103	10/22/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	1,000,000,000,000.00
104	11/1/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	270,000,000,000.00
105	11/1/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	2,160,000,000,000.00
106	11/1/2018	10/15/2025	PBS017	IDR	35,000,000,000.00
107	11/1/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	510,000,000,000.00
108	11/5/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	1,000,000,000,000.00
109	11/6/2018	1/15/2022	PBS002	IDR	1,000,000,000,000.00
110	11/6/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	2,000,000,000,000.00
111	11/15/2018	11/15/2031	PBS012	IDR	155,000,000,000.00
112	11/15/2018	5/15/2021	PBS014	IDR	230,000,000,000.00
113	11/15/2018	7/15/2047	PBS015	IDR	470,000,000,000.00
114	11/15/2018	9/15/2023	PBS019	IDR	610,000,000,000.00
115	11/19/2018	10/15/2027	PBS020	IDR	250,000,000,000.00
116	12/5/2018	11/15/2026	PBS021	IDR	1,500,000,000,000.00
Total (IDR)					106,013,714,000,000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 728 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 10. Daftar Penerbitan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	3/21/2018	3/10/2021	SR-010	IDR	8,436,570,000,000.00
2	11/29/2018	11/10/2020	ST002	IDR	4,945,682,000,000.00
Total (IDR)					13,382,252,000,000.00

Tabel 11. Daftar Penerbitan SBSN Valas Tahun 2018

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri PBS	Mata Uang	Nominal
1	3/1/2018	3/1/2023	SNI0323	USD	1,250,000,000.00
2	3/1/2018	3/1/2028	SNI0328	USD	1,750,000,000.00
3	11/15/2018	11/15/2021	USDPBS001	USD	100,000,000.00
Total (USD)					3,100,000,000.00

Tabel 12. Daftar Pelunasan SBSN Jangka Panjang Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (IDR)
1	PBS009	1/24/2018	37,890,000,000,000.00
2	PBS001	2/14/2018	6,725,000,000,000.00
3	SR-007	3/9/2018	21,965,035,000,000.00
4	SDHI-2018A	5/30/2018	2,500,000,000,000.00
5	IFR0002	8/15/2018	1,985,000,000,000.00
6	ST001	9/7/2018	2,523,913,000,000.00
TOTAL (IDR)			73,588,948,000,000.00

Tabel 13. Daftar Pelunasan SBSN Valas Tahun 2018

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (USD)	Jumlah (IDR)
1	SNI18	11/21/2018	1,000,000,000.00	14,618,000,000,000.00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 729 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2018

I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds - FR*)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir Tahun 2018, terdapat 39 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,625% sampai dengan 12,9% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2048. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel 14 berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 730 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 14. *Outstanding* SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2018

No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	FR0031	16-Jun-2005	15-Nov-2020	11.00000%	IDR 17.792.000.000.000
2	FR0034	26-Jan-2006	15-Jun-2021	12.80000%	IDR 16.097.400.000.000
3	FR0035	16-Feb-2006	15-Jun-2022	12.90000%	IDR 11.023.750.000.000
4	FR0036	20-Apr-2006	15-Sep-2019	11.50000%	IDR 9.184.500.000.000
5	FR0037	18-May-2006	15-Sep-2026	12.00000%	IDR 2.450.000.000.000
6	FR0039	24-Aug-2006	15-Aug-2023	11.75000%	IDR 4.175.000.000.000
7	FR0040	21-Sep-2006	15-Sep-2025	11.00000%	IDR 26.002.090.000.000
8	FR0042	25-Jan-2007	15-Jul-2027	10.25000%	IDR 14.774.100.000.000
9	FR0043	22-Feb-2007	15-Jul-2022	10.25000%	IDR 14.417.000.000.000
10	FR0044	19-Apr-2007	15-Sep-2024	10.00000%	IDR 18.014.000.000.000
11	FR0045	24-May-2007	15-May-2037	9.75000%	IDR 9.624.304.000.000
12	FR0046	19-Jul-2007	15-Jul-2023	9.50000%	IDR 24.680.000.000.000
13	FR0047	30-Aug-2007	15-Feb-2028	10.00000%	IDR 20.385.000.000.000
14	FR0050	24-Jan-2008	15-Jul-2038	10.50000%	IDR 15.661.000.000.000
15	FR0052	20-Aug-2009	15-Aug-2030	10.50000%	IDR 23.500.000.000.000
16	FR0053	08-Jul-2010	15-Jul-2021	8.25000%	IDR 100.027.793.000.000
17	FR0054	22-Jul-2010	15-Jul-2031	9.50000%	IDR 27.096.000.000.000
18	FR0056	23-Sep-2010	15-Sep-2026	8.37500%	IDR 121.414.000.000.000
19	FR0057	21-Apr-2011	15-May-2041	9.50000%	IDR 17.236.573.000.000
20	FR0058	21-Jul-2011	15-Jun-2032	8.25000%	IDR 42.798.000.000.000
21	FR0059	15-Sep-2011	15-May-2027	7.00000%	IDR 115.080.000.000.000
22	FR0061	06-Oct-2011	15-May-2022	7.00000%	IDR 104.878.000.000.000
23	FR0062	09-Feb-2012	15-Apr-2042	6.37500%	IDR 13.692.000.000.000
24	FR0063	13-Aug-2012	15-May-2023	5.62500%	IDR 93.466.000.000.000
25	FR0064	13-Aug-2012	15-May-2028	6.12500%	IDR 106.295.000.000.000
26	FR0065	30-Aug-2012	15-May-2033	6.62500%	IDR 85.343.000.000.000
27	FR0067	18-Jul-2013	15-Feb-2044	8.75000%	IDR 28.188.284.000.000
28	FR0068	01-Aug-2013	15-Mar-2034	8.37500%	IDR 92.400.000.000.000
29	FR0069	29-Aug-2013	15-Apr-2019	7.87500%	IDR 61.881.000.000.000
30	FR0070	29-Aug-2013	15-Mar-2024	8.37500%	IDR 134.439.421.000.000
31	FR0071	12-Sep-2013	15-Mar-2029	9.00000%	IDR 93.390.682.000.000
32	FR0072	09-Jul-2015	15-May-2036	8.25000%	IDR 90.910.000.000.000
33	FR0073	06-Aug-2015	15-May-2031	8.75000%	IDR 66.217.000.000.000
34	FR0074	10-Nov-2016	15-Aug-2032	7.50000%	IDR 46.031.140.000.000
35	FR0075	10-Aug-2017	15-May-2038	7.50000%	IDR 68.420.860.000.000
36	FR0076	22-Sep-2017	15-May-2048	7.37500%	IDR 5.210.000.000.000
37	FR0077	27-Sep-2018	15-May-2024	8.12500%	IDR 27.495.000.000.000
38	FR0078	27-Sep-2018	15-May-2029	8.25000%	IDR 28.070.000.000.000
39	FRNT0001	29-Aug-2018	29-Aug-2023	8.00000%	IDR 3.500.000.000.000
Jumlah					IDR 1.801.259.897.000.000



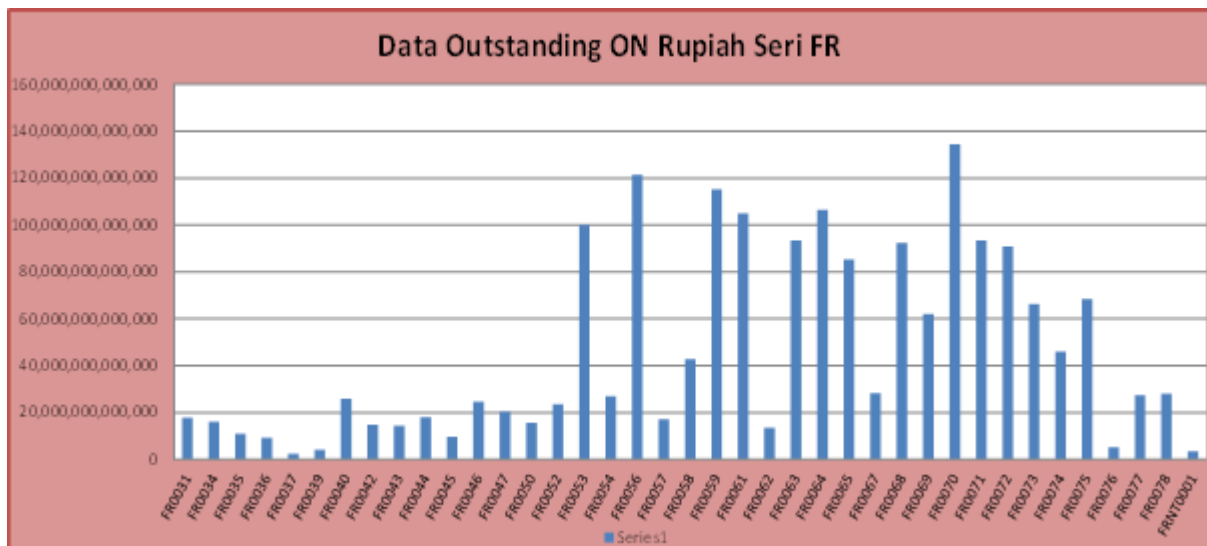
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 731 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

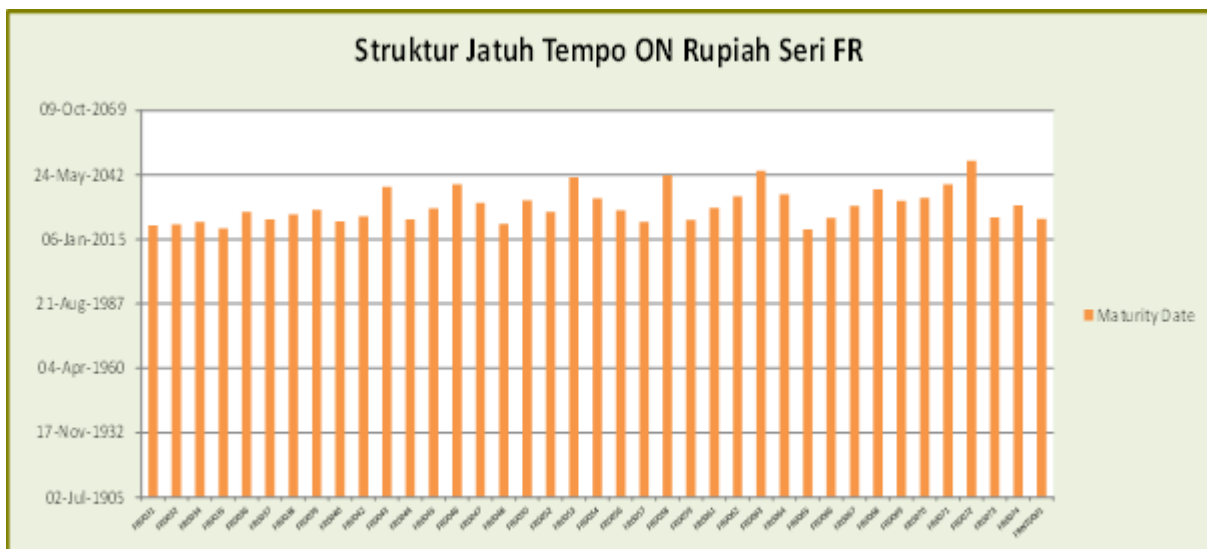
LAMPIRAN 31

Grafik 1. Data *Outstanding* ON Rupiah seri FR tgl 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 732 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2018 - 2021 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 884/KMK.08/2017. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

Selain itu, penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2018 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI015 dengan tingkat kupon 8.25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp23.378.269.000.000.- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2018 menunjukkan ada 3 (tiga) seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 15 berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 733 -

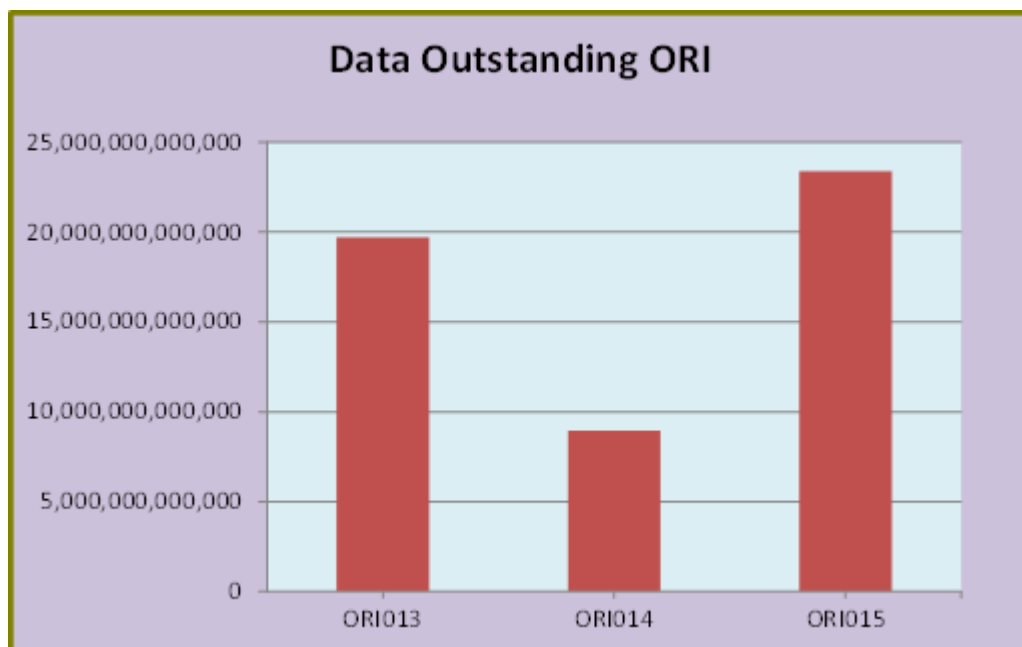
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 15. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2018

No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	ORI013	26-Oct-2016	15-Oct-2019	6.60000%	IDR 19,691,455,000,000
2	ORI014	25-Oct-2017	15-Oct-2020	5.85000%	IDR 8,948,660,000,000
3	ORI015	31-Oct-2018	15-Oct-2021	8.25000%	IDR 23,378,269,000,000
Jumlah					IDR 52,018,384,000,000

Grafik 3. Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut.



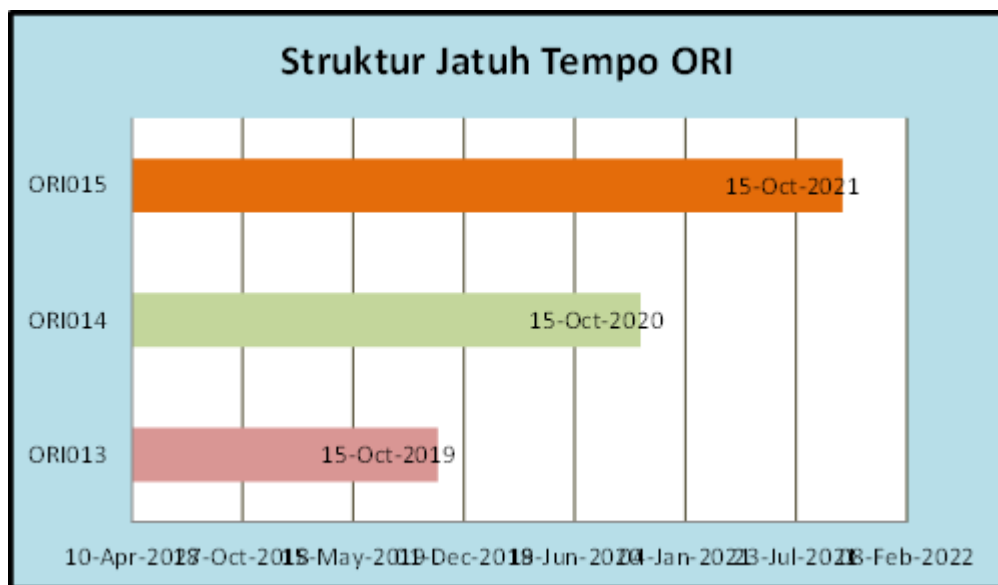
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 734 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2018



c. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon - ZC*)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005 sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

d. Obligasi berbunga mengambang (*Variable Rate Bonds - VR*)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 3 seri VR dan 2 seri SBR dengan *outstanding* berkisar dari 1.9 triliun sampai dengan 25,3 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2019 sampai dengan 2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 735 -

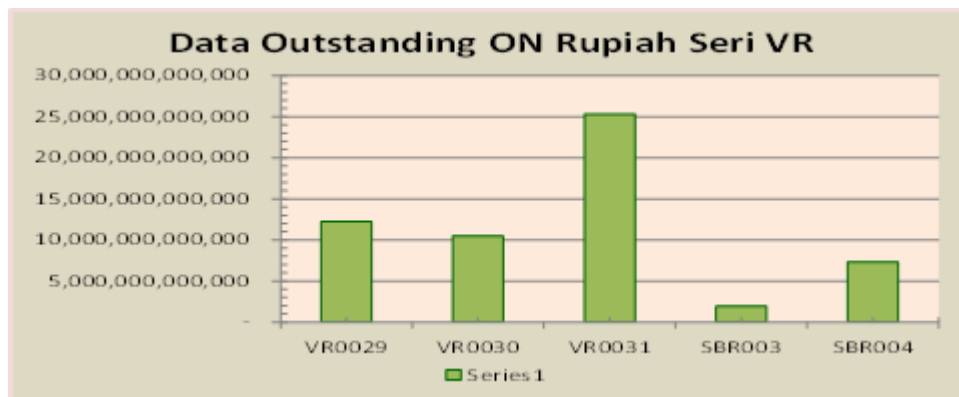
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 16. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR)
per 31 Desember 2018

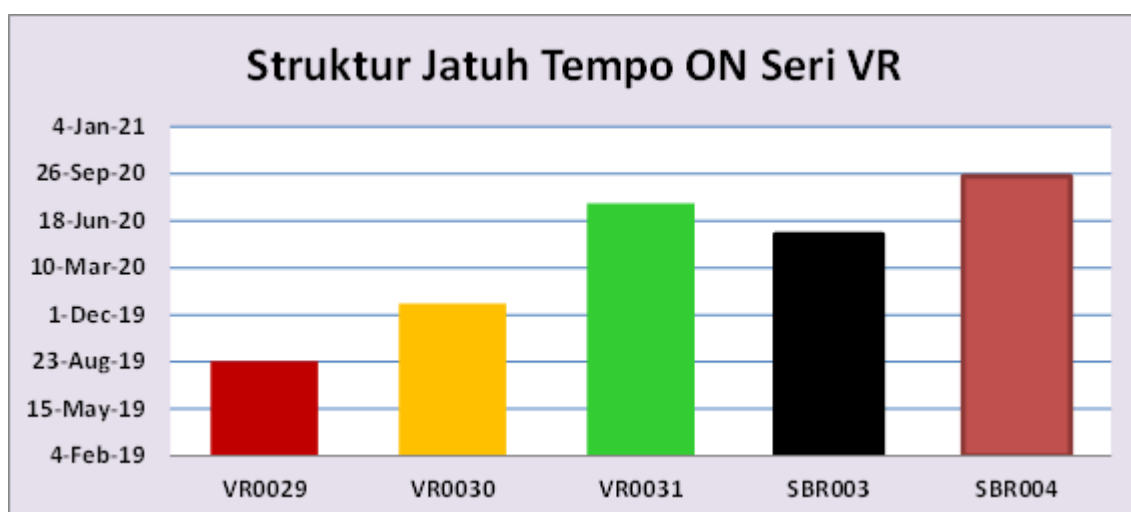
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	VR0029	20-Nov-2002	25-Aug-2019	5.76000%	IDR 12.212.320.000.000
2	VR0030	20-Nov-2002	25-Dec-2019	5.57533%	IDR 10.503.015.000.000
3	VR0031	20-Nov-2002	25-Jul-2020	5.21833%	IDR 25.322.354.000.000
4	SBR003	31-May-2018	20-May-2020	8.55000%	IDR 1.928.066.000.000
5	SBR004	19-Sep-2018	20-Sep-2020	8.55000%	IDR 7.322.971.000.000
Jumlah					IDR 57.288.726.000.000

Grafik 5. Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 6 berikut.

Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2018





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 736 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 16 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar 1 triliun dan 13,3 triliun yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

Tabel 17. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Outstanding
1	SPN03190110	10-Jan-2019	IDR 3.000.000.000.000
2	SPN03190124	24-Jan-2019	IDR 2.600.000.000.000
3	SPN03190207	07-Feb-2019	IDR 1.000.000.000.000
4	SPN03190222	22-Feb-2019	IDR 1.000.000.000.000
5	SPN12190104	04-Jan-2019	IDR 10.000.000.000.000
6	SPN12190131	31-Jan-2019	IDR 5.000.000.000.000
7	SPN12190214	14-Feb-2019	IDR 13.300.000.000.000
8	SPN12190314	14-Mar-2019	IDR 9.050.000.000.000
9	SPN12190411	11-Apr-2019	IDR 7.450.000.000.000
10	SPN12190606	06-Jun-2019	IDR 5.200.000.000.000
11	SPN12190704	04-Jul-2019	IDR 6.500.000.000.000
12	SPN12190801	01-Aug-2019	IDR 3.950.000.000.000
13	SPN12190829	29-Aug-2019	IDR 1.100.000.000.000
14	SPN12190913	13-Sep-2019	IDR 4.500.000.000.000
15	SPN12191010	10-Oct-2019	IDR 3.000.000.000.000
16	SPN12191107	07-Nov-2019	IDR 1.000.000.000.000
Jumlah			IDR 77.650.000.000.000



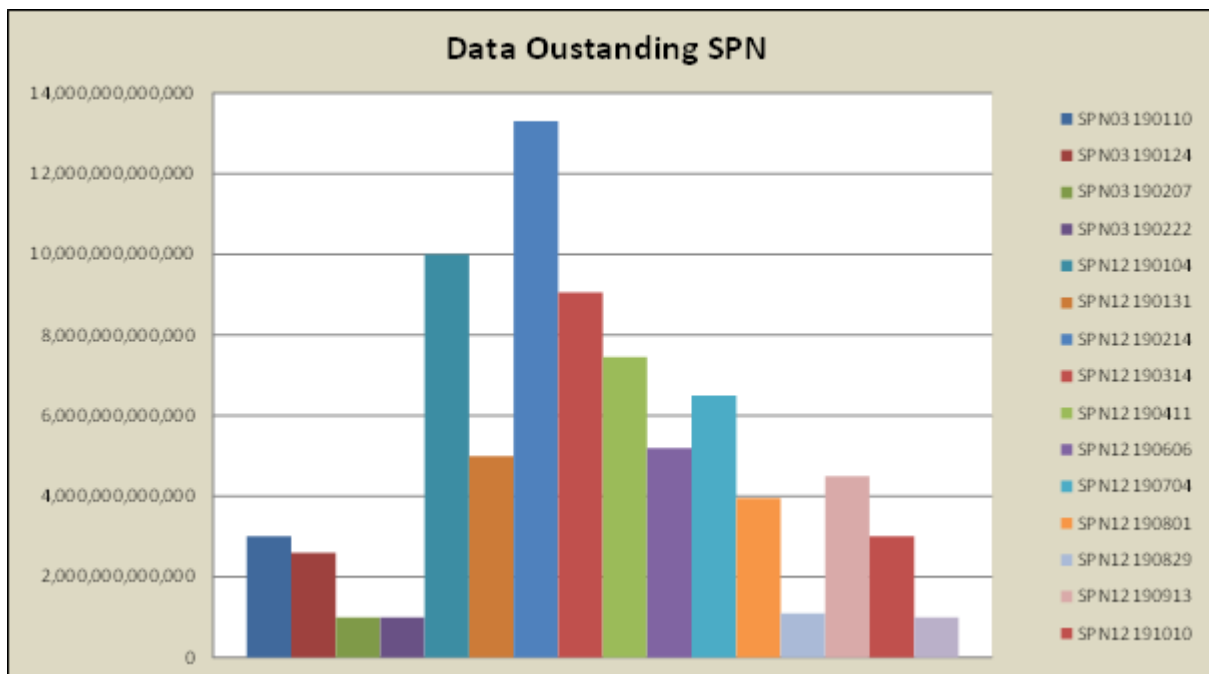
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 737 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

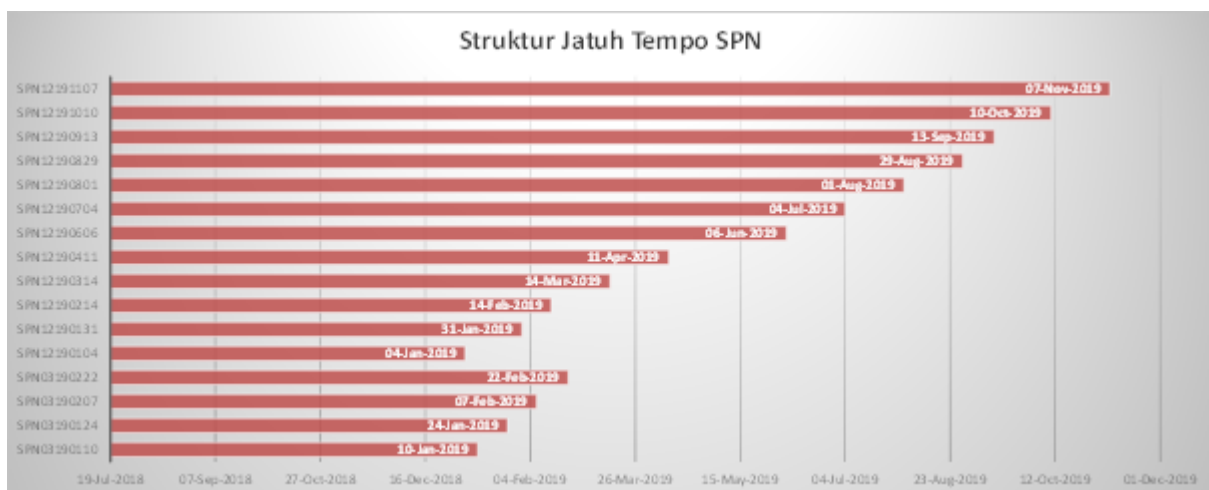
LAMPIRAN 31

Grafik 7. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo ON seri SPN disajikan dalam Grafik 8 berikut.

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2018





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 738 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

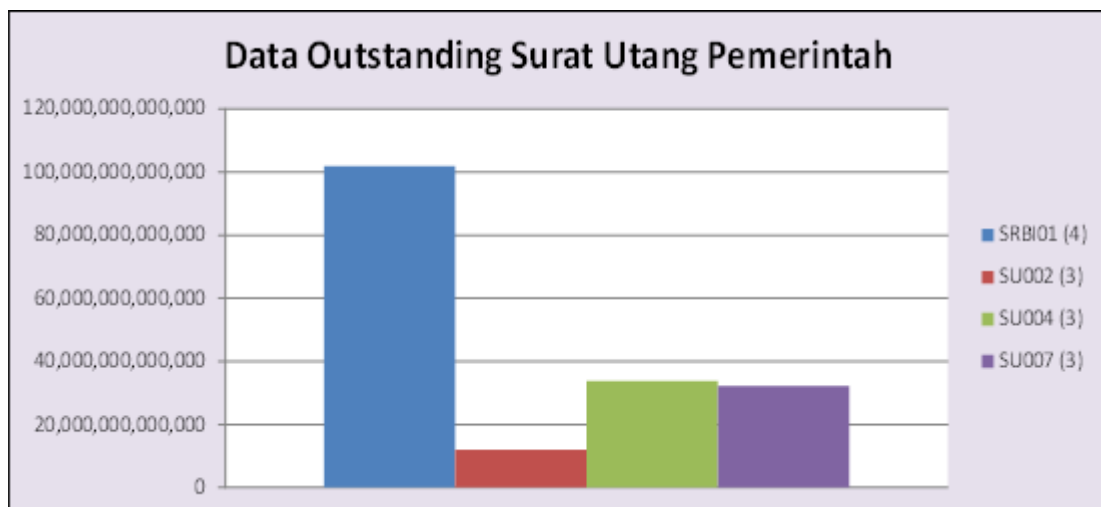
f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007 dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data *outstanding* SUP disajikan pada tabel 18 berikut.

Tabel 18. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SRBI01 (4)	01-Aug-2043	0.10000%	IDR 101,859,120,794,279
2	SU002 (3)	01-Apr-2025	0.10000%	IDR 12,048,595,070,162
3	SU004 (3)	01-Dec-2025	0.10000%	IDR 33,686,948,838,416
4	SU007 (3)	01-Aug-2025	0.10000%	IDR 32,194,936,059,459
Jumlah				IDR 179,789,600,762,316

Grafik 9. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2018



Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan dalam Grafik 10 berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 739 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Grafik 10. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah
per 31 Desember 2018



g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat imbalan yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbalan/rate seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtanggankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Pada akhir Tahun 2018 terdapat 4 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2020 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8.80% sampai dengan 10,25% yang disajikan dalam tabel 19 berikut.

Tabel 19. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	IFR0006	15-Mar-2030	10.25000%	IDR 2,175,000,000,000
2	IFR0007	15-Jan-2025	10.25000%	IDR 1,547,000,000,000
3	IFR0008	15-Mar-2020	8.80000%	IDR 252,000,000,000
4	IFR0010	15-Feb-2036	10.00000%	IDR 4,110,000,000,000
Jumlah				IDR 8,084,000,000,000



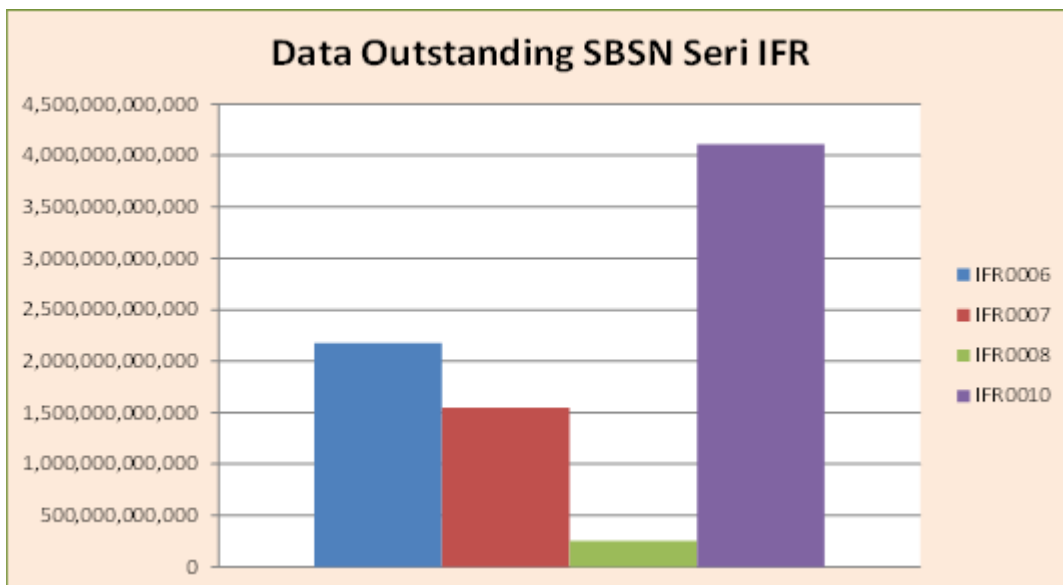
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 740 -

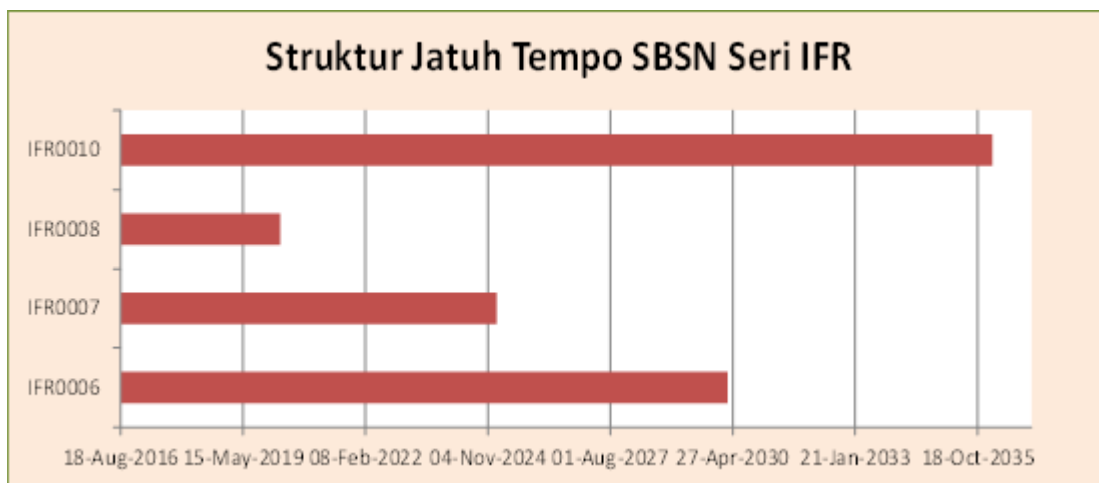
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Grafik 11. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2018



Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2018



h. *Project Based Sukuk (PBS)*

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang menggunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir Tahun 2018 terdapat 19 seri PBS yang ada sebagaimana disajikan dalam tabel 20 berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 741 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 20. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	PBS002	15-Jan-2022	5.45000%	IDR 16,710,857,000,000
2	PBS003	15-Jan-2027	6.00000%	IDR 5,536,000,000,000
3	PBS004	15-Feb-2037	6.10000%	IDR 16,497,857,000,000
4	PBS005	15-Apr-2043	6.75000%	IDR 10,984,000,000,000
5	PBS006	15-Sep-2020	8.25000%	IDR 38,508,000,000,000
6	PBS007	15-Sep-2040	9.00000%	IDR 7,525,000,000,000
7	PBS010	25-Jan-2019	8.62500%	IDR 4,050,000,000,000
8	PBS011	15-Aug-2023	8.75000%	IDR 21,750,000,000,000
9	PBS012	15-Nov-2031	8.87500%	IDR 44,039,100,000,000
10	PBS013	15-May-2019	6.25000%	IDR 50,425,000,000,000
11	PBS014	15-May-2021	6.50000%	IDR 26,807,857,000,000
12	PBS015	15-Jul-2047	8.00000%	IDR 5,243,000,000,000
13	PBS016	15-Mar-2020	6.25000%	IDR 39,525,000,000,000
14	PBS017	15-Oct-2025	6.12500%	IDR 6,375,000,000,000
15	PBS018	15-May-2028	7.62500%	IDR 4,000,000,000,000
16	PBS019	15-Sep-2023	8.25000%	IDR 3,950,000,000,000
17	PBS020	15-Oct-2027	9.00000%	IDR 2,250,000,000,000
18	PBS021	15-Nov-2026	8.50000%	IDR 1,500,000,000,000
19	PBSNT001	29-Aug-2023	8.00000%	IDR 1,500,000,000,000
				IDR 307,176,671,000,000



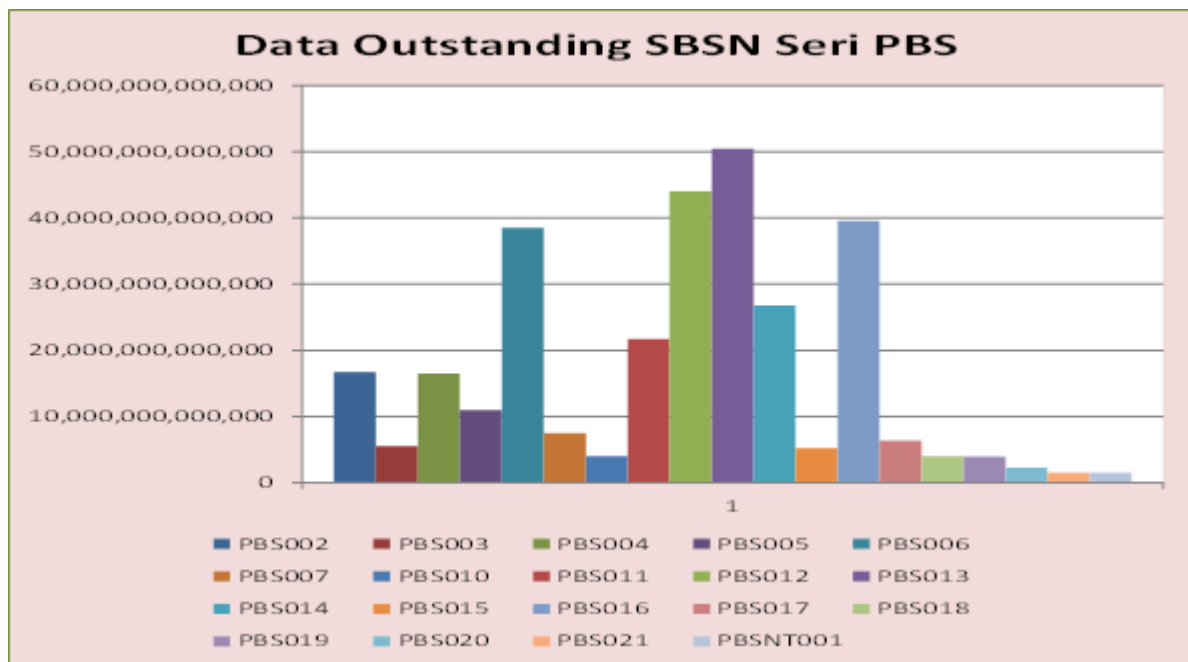
PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 742 -

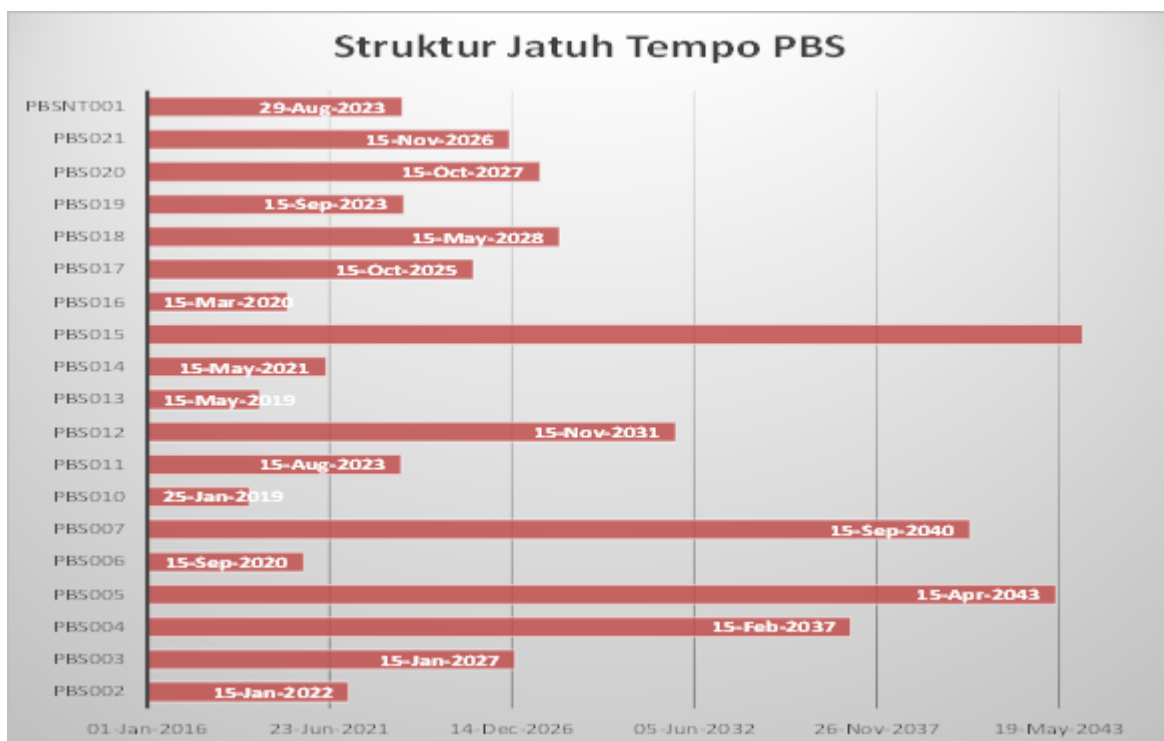
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited)

LAMPIRAN 31

Grafik 13. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2018



Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2018





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 743 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

i. Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Penerbitan Sukuk Tabungan menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.

Tahun 2018, pemerintah menerbitkan SR010 dan ST002 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2018 menunjukkan ada 3 seri SR dan 1 seri ST dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang disajikan pada tabel 16.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 744 -

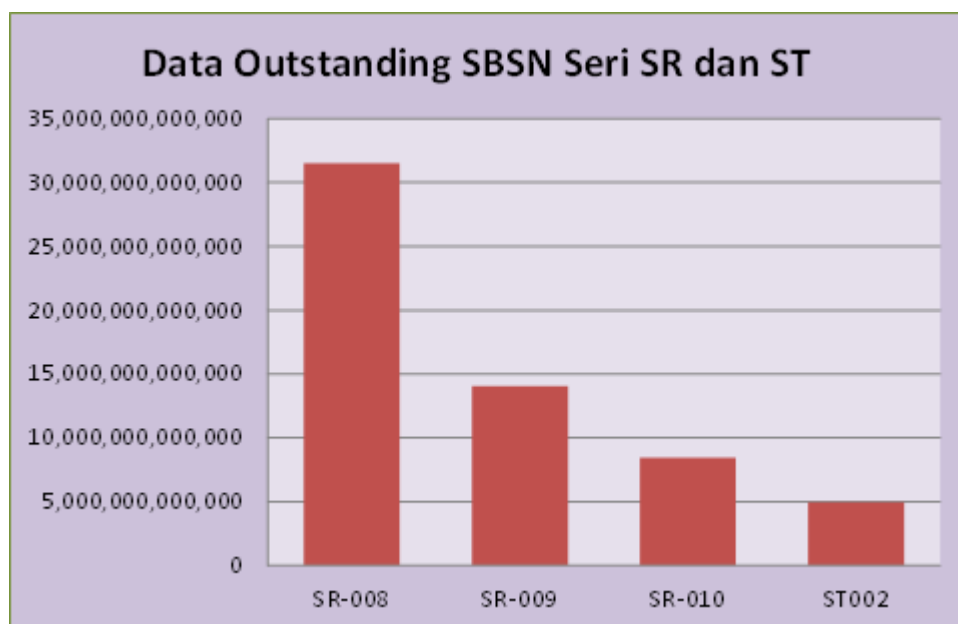
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 21. Struktur Outstanding SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SR-008	10-Mar-2019	8.30000%	IDR 31,500,000,000,000
2	SR-009	10-Mar-2020	6.90000%	IDR 14,037,310,000,000
3	SR-010	10-Mar-2021	5.90000%	IDR 8,436,570,000,000
4	ST002	10-Nov-2020	8.30000%	IDR 4,945,682,000,000
Jumlah				IDR 58,919,562,000,000

Grafik 15. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018





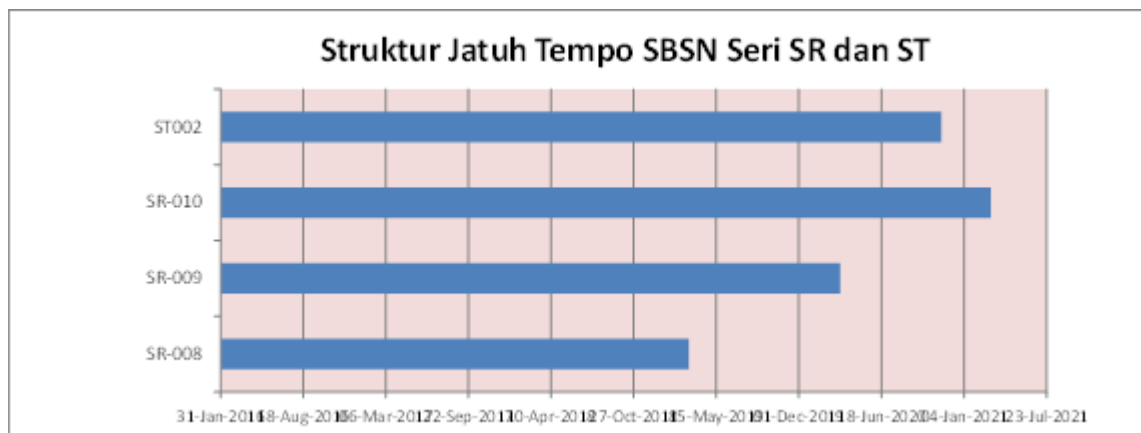
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 745 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR dan ST per 31 Desember 2018



j. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir Tahun 2018, terdapat 10 seri SPN-S yang beredar dengan total *outstanding* sebesar Rp25.250.000.000.000,- yang akan jatuh tempo pada Tahun 2019.

Tabel 22. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SPNS01052019	01-May-2019	-	IDR 2,000,000,000,000
2	SPNS01082019	01-Aug-2019	-	IDR 3,300,000,000,000
3	SPNS03042019	03-Apr-2019	-	IDR 2,400,000,000,000
4	SPNS03072019	03-Jul-2019	-	IDR 2,000,000,000,000
5	SPNS05032019	05-Mar-2019	-	IDR 2,400,000,000,000
6	SPNS05062019	05-Jun-2019	-	IDR 1,200,000,000,000
7	SPNS08022019	08-Feb-2019	-	IDR 3,850,000,000,000
8	SPNS08052019	08-May-2019	-	IDR 2,200,000,000,000
9	SPNS11012019	11-Jan-2019	-	IDR 3,800,000,000,000
10	SPNS11042019	11-Apr-2019	-	IDR 2,100,000,000,000
Jumlah				IDR 25,250,000,000,000



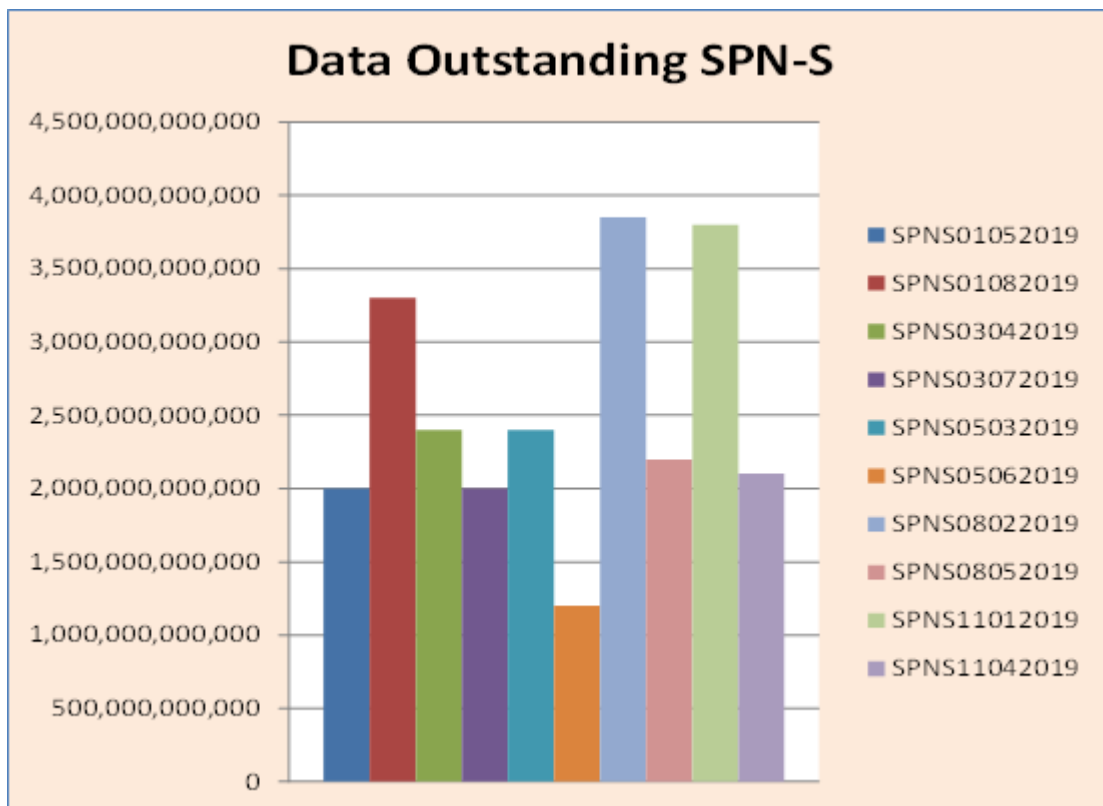
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 746 -

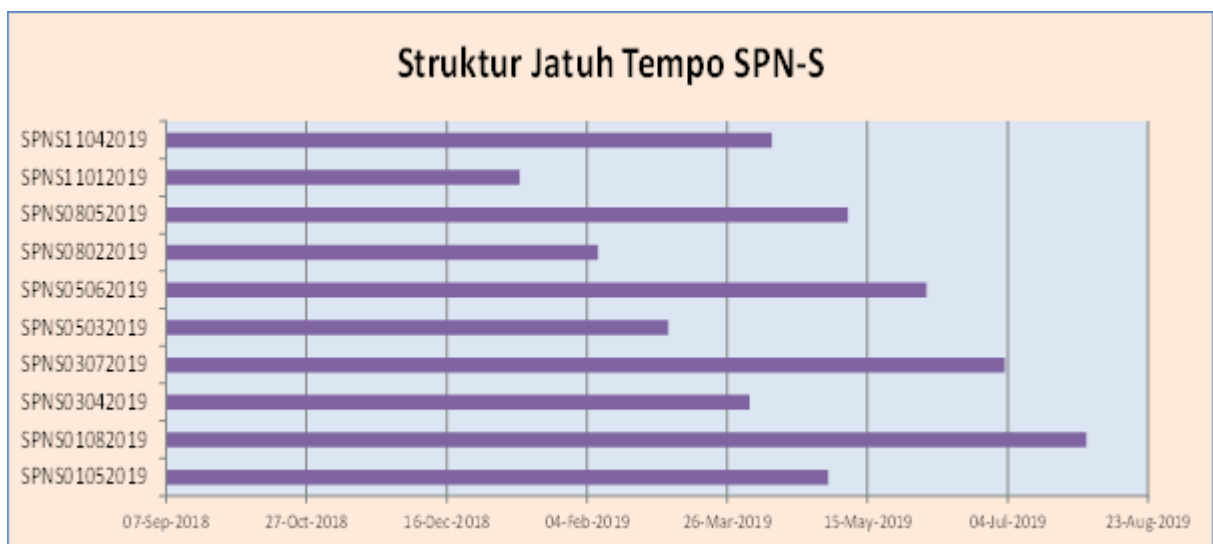
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Grafik 17. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018



Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2018





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 747 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI merupakan instrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan. Pada akhir Tahun 2018, terdapat 17 seri SDHI dengan nilai *outstanding* Rp34.197.000.000.000,-.

Tabel 23. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SDHI 2020C	03-Jan-2020	8.30000%	IDR 3,000,000,000,000
2	SDHI-2019A	21-Mar-2019	5.46000%	IDR 3,000,000,000,000
3	SDHI-2019B	11-Feb-2019	8.05000%	IDR 2,000,000,000,000
4	SDHI-2020A	27-Apr-2020	5.79000%	IDR 1,500,000,000,000
5	SDHI-2020B	28-Jun-2020	6.20000%	IDR 1,000,000,000,000
6	SDHI-2021A	11-Apr-2021	8.00000%	IDR 2,000,000,000,000
7	SDHI-2021B	17-Oct-2021	7.16000%	IDR 3,000,000,000,000
8	SDHI-2022A	21-Mar-2022	5.91000%	IDR 3,342,000,000,000
9	SDHI-2022B	11-Feb-2022	8.75000%	IDR 2,000,000,000,000
10	SDHI-2024A	11-Feb-2024	9.04000%	IDR 2,000,000,000,000
11	SDHI-2029A	25-Mar-2029	8.43000%	IDR 1,000,000,000,000
12	SDHI-2029B	13-Aug-2029	8.62000%	IDR 2,855,000,000,000
13	SDHI2019C	27-Apr-2019	7.20000%	IDR 1,000,000,000,000
14	SDHI2020D	29-Jun-2020	8.20000%	IDR 1,000,000,000,000
15	SDHI2020E	21-Mar-2020	7.14000%	IDR 2,000,000,000,000
16	SDHI2023A	04-Nov-2023	8.82000%	IDR 1,500,000,000,000
17	SDHI2025A	08-Jul-2025	8.30000%	IDR 2,000,000,000,000
Jumlah				IDR 34,197,000,000,000



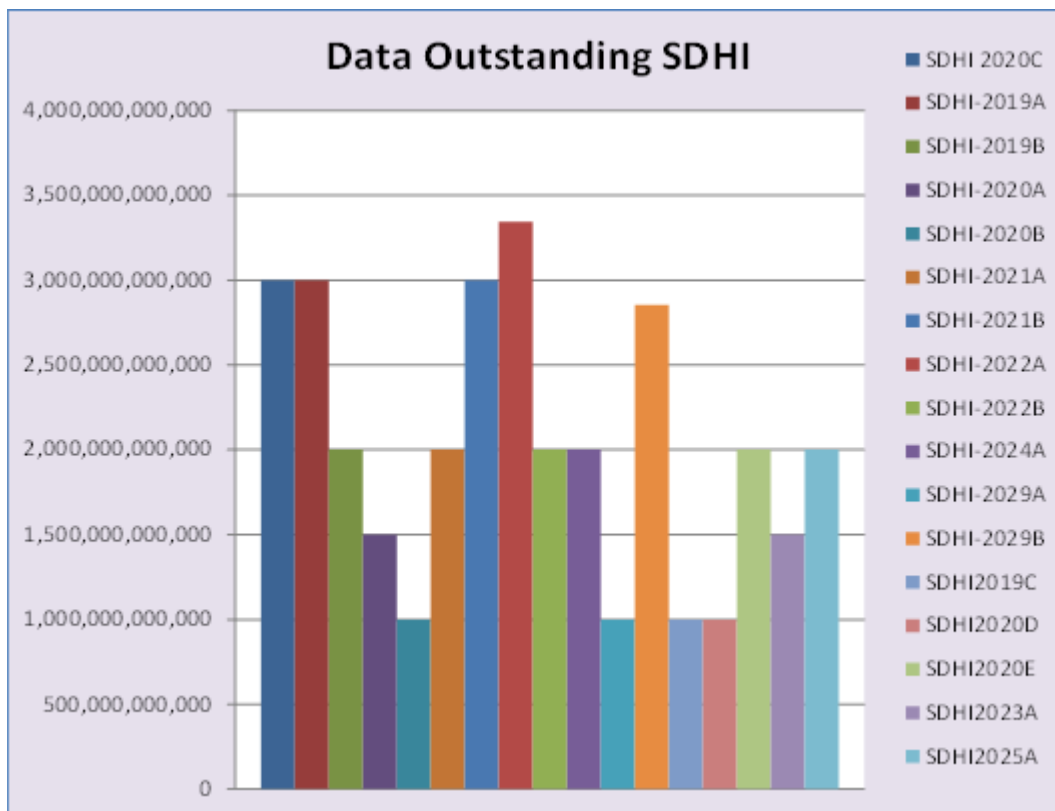
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 748 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018





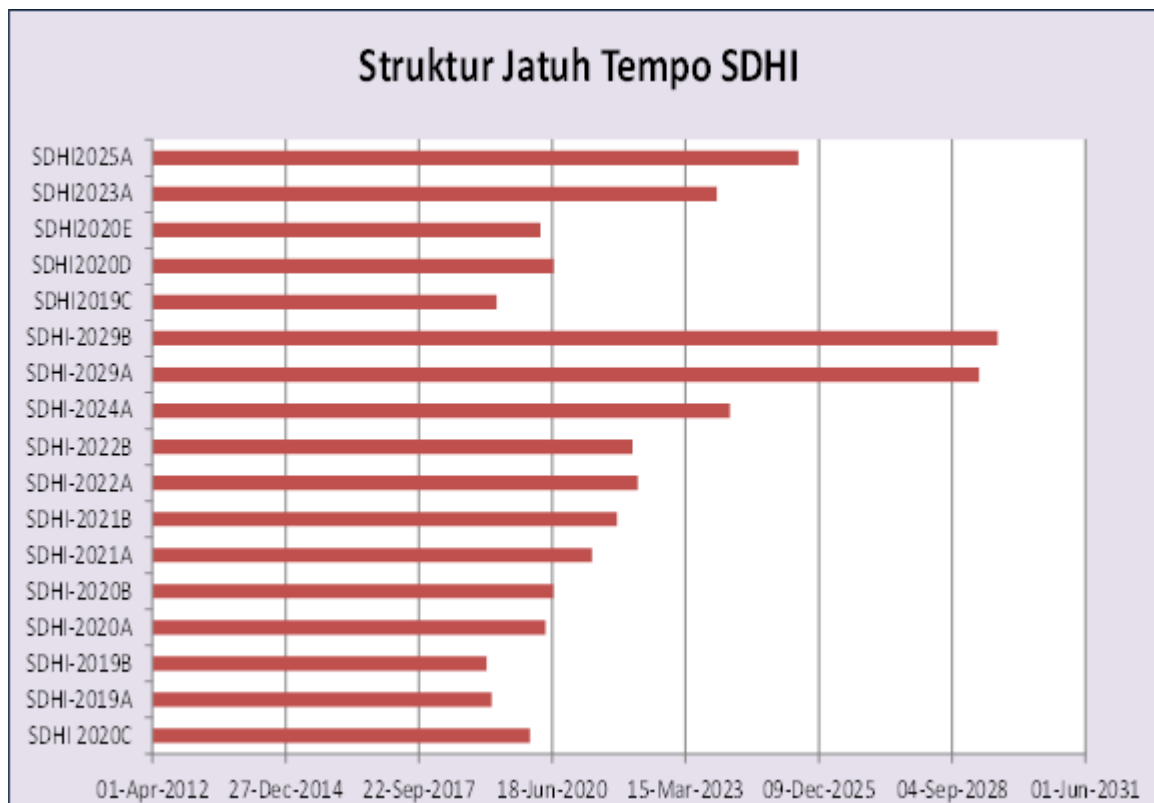
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 749 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2018



II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 750 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Sampai dengan akhir Tahun 2018, terdapat 59 seri SBN valas dengan 38 seri memiliki denominasi USD (termasuk SBN domestik yang berdenominasi valas), 14 seri dengan denominasi JPY dan 7 Seri berdenominasi EURO. Data outstanding SBN valas disajikan dalam tabel 24 berikut.

Tabel 24. *Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2018*

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
A. GOVERNMENT DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
1	RI00190304	04-Mar-2019	11.62500% USD	2,000,000,000	
2	RI0035	12-Oct-2035	8.50000% USD	1,600,000,000	
3	RI0037	17-Feb-2037	6.62500% USD	1,500,000,000	
4	RI0038	17-Jan-2038	7.75000% USD	2,000,000,000	
5	RI0122	08-Jan-2022	3.70000% USD	750,000,000	
6	RI0123	11-Jan-2023	2.95000% USD	1,000,000,000	
7	RI0124	15-Jan-2024	5.87500% USD	2,000,000,000	
8	RI0125	15-Jan-2025	4.12500% USD	2,000,000,000	
9	RI0126	08-Jan-2026	4.75000% USD	2,250,000,000	
10	RI0127	08-Jan-2027	4.35000% USD	1,250,000,000	
11	RI0128	11-Jan-2028	3.50000% USD	1,250,000,000	
12	RI0142	17-Jan-2042	5.25000% USD	2,250,000,000	
13	RI0144	15-Jan-2044	6.75000% USD	2,000,000,000	
14	RI0145	15-Jan-2045	5.12500% USD	2,000,000,000	
15	RI0146	08-Jan-2046	5.95000% USD	1,250,000,000	
16	RI0147	08-Jan-2047	5.25000% USD	1,500,000,000	
17	RI0148	11-Jan-2048	4.35000% USD	1,750,000,000	
18	RI0320	13-Mar-2020	5.87500% USD	2,000,000,000	
19	RI0422	25-Apr-2022	3.75000% USD	2,000,000,000	
20	RI0423	15-Apr-2023	3.37500% USD	1,500,000,000	
21	RI0428	24-Apr-2028	4.10000% USD	1,000,000,000	
22	RI0433	15-Apr-2043	4.62500% USD	1,500,000,000	
23	RI0521	05-May-2021	4.87500% USD	2,500,000,000	
24	RI0727	18-Jul-2027	3.85000% USD	1,000,000,000	
25	RI0747	18-Jul-2047	4.75000% USD	1,000,000,000	
26	RI1023	17-Oct-2023	5.37500% USD	1,000,000,000	
27	USDFR0002	24-Jun-2026	4.05000% USD	200,000,000	
Total Fixed Coupon				USD	42,050,000,000
Total US Dollar Denominated *)				IDR	608,926,050,000,000
Japan Yen Denominated					
Fixed Coupon					
28	RIJPY0521	31-May-2021	0.67000% JPY	49,000,000,000	
29	RIJPY0523	31-May-2023	0.92000% JPY	39,000,000,000	
30	RIJPY0525	30-May-2025	1.07000% JPY	3,500,000,000	
31	RIJPY0528	31-May-2028	1.27000% JPY	8,500,000,000	
32	RIJPY0619	21-Jun-2019	0.83000% JPY	62,000,000,000	
33	RIJPY0620	08-Jun-2020	0.65000% JPY	40,000,000,000	
34	RIJPY0621	21-Jun-2021	1.16000% JPY	38,000,000,000	
35	RIJPY0622	08-Jun-2022	0.89000% JPY	50,000,000,000	
36	RIJPY0624	07-Jun-2024	1.04000% JPY	10,000,000,000	
37	RIJPY0719	29-Jul-2019	2.73000% JPY	35,000,000,000	
38	RIJPY0820	13-Aug-2020	1.38000% JPY	22,500,000,000	
39	RIJPY0825	13-Aug-2025	0.91000% JPY	55,000,000,000	
40	RIJPY1120	12-Nov-2020	1.60000% JPY	60,000,000,000	
41	RIJPY1122	22-Nov-2022	1.13000% JPY	60,000,000,000	
Total Fixed Coupon				JPY	532,500,000,000
Total Japan Yen Denominated *)				IDR	69,818,790,750,000
Euro Denominated					
Fixed Coupon					
42	RIEURO425	24-Apr-2025	1.75000% EUR	1,000,000,000	
43	RIEURO623	14-Jun-2023	2.62500% EUR	1,500,000,000	
44	RIEURO628	14-Jun-2028	3.75000% EUR	1,500,000,000	
45	RIEURO721	08-Jul-2021	2.87500% EUR	1,000,000,000	
46	RIEURO724	18-Jul-2024	2.15000% EUR	1,000,000,000	
47	RIEURO725	30-Jul-2025	3.37500% EUR	1,250,000,000	
48	EURFRNT0001	26-Apr-2020	0.90000% EUR	50,000,000	
Total Fixed Coupon				EUR	7,300,000,000
Total Euro Denominated *)				IDR	120,886,175,000,000
TOTAL GOVERNMENT DEBT SECURITIES (A)				IDR	799,631,015,750,000
B. GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
49	SNIO322	29-Mar-2022	3.40000% USD	1,000,000,000	
50	SNIO323	01-Mar-2023	3.75000% USD	1,250,000,000	
51	SNIO327	29-Mar-2027	4.15000% USD	2,000,000,000	
52	SNIO328	01-Mar-2028	4.40000% USD	1,750,000,000	
53	SN119	15-Mar-2019	6.12500% USD	1,500,000,000	
54	SN121	29-Mar-2021	3.40000% USD	750,000,000	
55	SN122	21-Nov-2022	3.30000% USD	1,000,000,000	
56	SN124	10-Sep-2024	4.35000% USD	1,500,000,000	
57	SN125	28-May-2025	4.32500% USD	2,000,000,000	
58	SN126	29-Mar-2026	4.55000% USD	1,750,000,000	
59	USDIBS001	15-Nov-2021	4.05000% USD	100,000,000	
Total Fixed Coupon				USD	14,600,000,000
Total US Dollar Denominated *)				IDR	211,422,600,000,000
TOTAL GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES (B)				IDR	211,422,600,000,000
GRAND TOTAL (A + B)				IDR	1,011,053,615,750,000

Notes:

*) Assumed exchange rate for conversion (IDR/USD) is 14,481.00
 Assumed exchange rate for conversion (IDR/JPY) is 131.1151
 Assumed exchange rate for conversion (IDR/EUR) is 16,559.75



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 751 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2018

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 25.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 752 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

Tabel 25. Mutasi Principle *Outstanding* SBN Tahun 2018

Saldo awal Th 2018 (<i>Original Currency</i>)	Mutasi 2018		Saldo Akhir tahun 2018 (<i>Original Currency</i>)	Saldo Akhir 2018 (Rupiah)
	Penerimaan	Pembayaran		
a	b	c	d	e
IDR 2,341,102,897,948,500.00	IDR 634,400,272,000,000.00	IDR 373,869,329,186,177.00	IDR 2,601,633,840,762,320.00	2,601,633,840,762,320.00
USD 51,450,000,000.00	USD 8,100,000,000.00	USD 2,900,000,000.00	USD 56,650,000,000.00	820,348,650,000,000.00
JPY 455,000,000,000.00	JPY 100,000,000,000.00	JPY 22,500,000,000.00	JPY 532,500,000,000.00	69,818,790,750,000.00
EUR 6,300,000,000.00	EUR 1,000,000,000.00	0.00	EUR 7,300,000,000.00	120,886,175,000,000.00
Jumlah				3,612,687,456,512,320.00

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2017 USD = 13.548,00 JPY = 120,22 EUR = 16.173,62

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2018 USD = 14.481,00 JPY = 131,12 EUR = 16,559.75



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 753 -

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*)

LAMPIRAN 31

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.

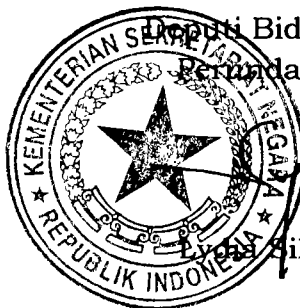
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktori Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman